

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2011
*(Audited)***

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

	INDEKS ISI
INDEKS ISI	ii
INDEKS TABEL	iii
INDEKS GRAFIK	iv
INDEKS DAFTAR	vi
INDEKS SINGKATAN	viii
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT	xvi
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI APBN	5
II. NERACA	9
III. LAPORAN ARUS KAS	13
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	16
A. PENJELASAN UMUM	17
A.1. DASAR HUKUM	17
A.2. KEBIJAKAN FISKAL KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO	17
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	60
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	64
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN	82
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN	82
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN	83
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	105
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	109
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	109
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA	110
C.3. CATATAN PENTING LAINNYA	170
C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN	191
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	192
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	192
D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	195
DAFTAR	215

*Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)***INDEKS TABEL**

1.	Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2007 – 2011	36
2.	Perkembangan Belanja Negara tahun 2007-2011	51
3.	Fiscal Space terhadap PDB Tahun 2007-2011	52
4.	Dampak APBN Terhadap Sektor Ritel Tahun 2007-2011	57
5.	Persentase Anggaran dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2011	58
6.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2007-2011	58
7.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2011 dan TA 2010	89
8.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak	115
9.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai	116
10.	Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes	163
11.	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing	164
12.	Saldo Anggaran Lebih TA 2011 dan TA 2010	184
13.	Laporan Rekening Nomor 600.000.411990 Tahun 2011 dan 2010	190
14.	Jenis dan Outstanding SPN Tahun 2011	477
15.	Debtswitch Tahun 2011	478
16.	Transaksi Buyback Tahun 2011	479
17.	Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN Tahun 2011	481
18.	Nilai Outstanding SBN Seri Fixed Rate (FRI) per 31 Desember 2011	482
19.	Jatuh Tempo SBN Seri Fixed Rate (FRI) per 31 Desember 2011	483
20.	Kupon SBN Seri Fixed Rate (FRI) per 31 Desember 2011	484
21.	Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2011	485
22.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN seri Zeri Cnupnn (ZC) per 31 Desember 2011	487
23.	Nilai dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VRI) per 31 Desember 2011	488
24.	Nilai dan Outstanding Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2011	490
25.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2011	491
26.	Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas dalam Rupiah per 31 Desember 2011	493
27.	Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2011	495

*Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)***INDEKS GRAFIK**

1. Sumber-sumber Pertumbuhan PDB 2008-2011	18
2. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2007 – 2011	20
3. Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2007-2011	21
4. Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2010 dan 2011	21
5. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011	22
6. Perbandingan Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011	23
7. Perkembangan PDB Per Kapita Tahun 2007 – 2011	23
8. Laju Inflasi Tahun 2010 dan 2011	24
9. Analis Inflasi Tahun 2010 dan 2011	25
10. Perbandingan Eksport Impor Tahun 2010 dan 2011	27
11. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Tahun 2011	27
12. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2011	30
13. Tren CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2011	31
14. Nomina Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan Tahun 2009-2011	31
15. Cadangan Devisa Triwulan 2008-2011	32
16. Tren Tax Ratin Tahun 2007-2011	38
17. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2007-2011	39
18. Realisasi PNBP Lainnya tahun 2007-2011	40
19. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2007-2011	41
20. Target dan Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2007-2011	42
21. KIL Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar	44
22. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2011 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi	44
23. Tren Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2010	46
24. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2011	46
25. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2011	47
26. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2011	47
27. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2011	48
28. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2011	49
29. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2011	49
30. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2011	50
31. Grafik Belanja Tidak Terikat dan Belanja Terikat Tahun 2007-2011	52

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

32. Trend Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2011	53
33. Trend Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2011	54
34. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2007-2011	55
35. Defisit dan Keseimbangan Primer Tahun 2007-2011	56
36. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2007-2011	56
37. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2007 - 2011	82
38. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2007 – 2011	83
39. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011	84
40. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011	89
41. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2011	90
42. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2011	90
43. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011	93
44. Komposisi Pendapatan BLU TA 2011	107
45. Pendapatan, Belan, dan Surplus/Deksur BLU TA 2011	108
46. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Netto pada Neraca Tahun 2007 – 2011	109
47. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	179
48. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	184
49. Struktur Surat Berharga Negara	476
50. Struktur <i>Outstanding</i> ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2011	482
51. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2011	483
52. Tingkat Kupon Seri FR per 31 Desember 2011	484
53. Struktur <i>Outstanding</i> DRI per 31 Desember 2011	486
54. Struktur Jatuh Tempo DRI per 31 Desember 2011	486
55. Struktur <i>Outstanding</i> Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011	487
56. Struktur Jatuh Tempo Zerro Coupon (ZC) per 31 Desember 2011	487
57. Struktur <i>Outstanding</i> VR per 31 Desember 2011	488
58. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2011	489
59. Struktur <i>Outstanding</i> SPN per 31 Desember 2011	489
60. Struktur <i>Outstanding</i> SUP per 31 Desember 2011	490
61. Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2011	490
62. Struktur <i>Outstanding</i> Fixed Rate SBSN per 31 Desember 2011	492
63. Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2011	492

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

64. Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2011	492
65. Struktur <i>Outstanding</i> SBN Valas per 31 Desember 2011 (dalam rupiah)	494
66. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2011	494
67. Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 Desember 2011	494
68. Struktur Outstanding SUN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2011	495

*Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)***INDEKS DAFTAR**

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2011	216
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011	232
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2011	255
4. Daftar Rekening Khusus per 31 Desember 2011	325
5. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2011	333
6. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2011	338
7. Rekening Pemerintah Lainnya Tahun 2011	339
8. Kas pada KIL per 31 Desember 2011	340
9. Piutang PNBP per 31 Desember 2011	344
10. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	345
11. Uang Muka Belanja pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	346
12. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi	347
13. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	348
14. Penyertaan Modal Negara Pada BUMN	351
15. Penyertaan Modal Negara Pada Non BUMN	366
16. Penyerahan Modul Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional	367
17. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	368
18. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	371
19. Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	372
20. Aset KKKS per 31 Desember 2011	374
21. Aset Eks BPPN yang Dikelola Tim Koordinasi	385
22. Rincian Aset Negara yang Dikelola PPA per 31 Desember 2011	386
23. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2011	388
24. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2011	393
25. Surat Berharga Negara Jangka Pendek Dalam Negeri per 31 Desember 2011	397
26. Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2011	398
27. Ikhtisar Laporan Hasil Penetapan Barang Milik Negara pada KIL per 31 Desember 2011	403
28. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2011	405
29. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan	418
30. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2011	425
31. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010	427
32. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2011	476

*Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)***INDEKS SINGKATAN**

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BOL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Buu Perulihan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJT	: Badan Penyalur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawas Keharusan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyelatan Perhankam Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bayi Husil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Exchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Eksport
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LOKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
KKKL	: Laporan Keuangan Kamarerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Palakaana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penetapan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Brutton
PFK	: Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PMA	: Penarikan Modal Asing
PMDN	: Penarikan Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Post Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SIKPA	: Sisa Kurang Pembayaran Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembayaran Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPB	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SPD	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbandahaan Negara
SP3	: Surat Perintah Penyelesaian Pembukuan
SUN	: Surat Ulang Negara
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tunjulan Ganti Rugi
THT	: Tabungan Hari Tua
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USD	: <i>United State Dolar</i>
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP,TUP	: Dang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

*Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)***INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****LAPORAN REALISASI APBN****Pendapatan Negara dan Hibah**

		Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Pendagangan Internasional
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	Belanja Negara
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alinkasi Umum
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alinkasi Khusus
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Olunumi Khusus dan Penyesuaian
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Olunumi Khusus
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian
Catatan	B.2.2.3	Suspon

Surplus (Defisit) Anggaran

Catatan	B.2.3	Surplus (Defisit) Anggaran
---------	-------	----------------------------

Pembiayaan

Catatan	B.2.4	Pembiayaan
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	99
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	100
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	100
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	101
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	101
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	102
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	102
Catatan	B.2.4.2	Pembentukan Luar Negeri (Neto)	102
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	102
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	102
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	103
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	104
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	104
SILPA (SiKPA)			
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembentukan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	104
CATATAN PENTING LAINNYA			
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	105

NERACA**ASET**

Aset Lancar			
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	110
Catatan	C.2.2	Rekening Kas di KPPN	110
Catatan	C.2.3	Rekening Pemerintah Lainnya	110
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	111
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penetapanan	111
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	112
Catatan	C.2.7	Kas Pada BLU	113
Catatan	C.2.8	Uang Muka dan Rekening BUN	114
Catatan	C.2.9	Piutang Pajak	114
Catatan	C.2.10	Piutang Bukan Pajak	117
Catatan	C.2.11	Bagiuan Lancar Tugihun Penjualan Anggaran	119
Catatan	C.2.12	Bagiuan Lancar Tugihun Tunjulan Ganti Rugi	119
Catatan	C.2.13	Bagiuan Lancar Investasi Jangka Panjang	120
Catatan	C.2.14	Uang Muka Belanja	120
Catatan	C.2.15	Piutang dari Kegiatan BLU	121
Catatan	C.2.16	Piutang Lain-lain	126
Catatan	C.2.17	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	125
Catatan	C.2.18	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	125
Catatan	C.2.19	Investasi Jangka Pendek BLU	126
Catatan	C.2.20	Investasi Jangka Pendek Lainnya	126
Catatan	C.2.21	Persediaan	127
Investasi Jangka Panjang			
Catatan	C.2.22	Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	128
Catatan	C.2.23	Dana Bergulir	128

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Catatan	C.2.24	Investasi Non Permanen Lainnya	129
Catatan	C.2.25	Investasi Permanen PMN	130
Catatan	C.2.26	Investasi Permanen BLU	134
Catatan	C.2.27	Investasi Permanen Lainnya	134
Catatan	C.2.28	Aset Tetap	135
Catatan	C.2.29	Aset Lainnya	136
Catatan	C.2.30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya	151
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Catatan	C.2.31	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	151
Catatan	C.2.32	Utang Kepada Pihak Ketiga	152
Catatan	C.2.33	Utang Kebutuhan Pembayaran Pendapatan	153
Catatan	C.2.34	Bogian Lancar Utang Jangka Panjang	154
Catatan	C.2.35	Utang Biaya Pinjaman	155
Catatan	C.2.36	Utang Suhsidi	156
Catatan	C.2.37	Utang SBN Jangka Pendek	156
Catatan	C.2.38	Pendapatan Diterima di Muka	156
Catatan	C.2.39	Utang Jangka Pendek Lainnya	156
Catatan	C.2.40	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara	158
Catatan	C.2.41	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	159
Catatan	C.2.42	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	160
Catatan	C.2.43	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	160
Catatan	C.2.44	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	162
Catatan	C.2.45	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	162
Ekuitas Dana Lancar			
Catatan	C.2.46	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian	164
Catatan	C.2.47	SiLPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	165
Catatan	C.2.48	Dana Lancar Lainnya	166
Catatan	C.2.49	Cadangan Piutang	166
Catatan	C.2.50	Cadangan Persediaan	166
Catatan	C.2.51	Pendapatan yang Dilanggukan	166
Catatan	C.2.52	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	167
Catatan	C.2.53	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	168
Catatan	C.2.54	Barang/Jasa yang Harus Diterima	168
Catatan	C.2.55	Selisih Kurs Bagian Lancar	168
Ekuitas Dana Investasi			
Catatan	C.2.56	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	168
Catatan	C.2.57	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	168
Catatan	C.2.58	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	169
Catatan	C.2.59	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	169
Catatan	C.2.60	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	169
CATATAN PENTING LAINNYA			
Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	170
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN			
Catatan	C.4	Kejadian Penting Setelah Tanggal Pelaporan	191

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**LAPORAN ARUS KAS****ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	195
Catatan	D.2.2	PNBP	199
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	200
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	201
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	202
Catatan	D.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	202
Catatan	D.2.7	Subsidi	203
Catatan	D.2.8	Belanja Hibah	204
Catatan	D.2.9	Bantuan Sosial	204
Catatan	D.2.10	Belanja Lain-Lain	204
Catatan	D.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	205
Catatan	D.2.12	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	205
Catatan	D.2.13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	205
Catatan	D.2.14	Dana Alokasi Umum	205
Catatan	D.2.15	Dana Alokasi Khusus	206
Catatan	D.2.16	Dana Otonomi Khusus	206
Catatan	D.2.17	Dana Penyesuaian	206

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.18	Penjualan Aset	207
Catatan	D.2.19	Belanja Modal	207

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.20	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	208
Catatan	D.2.21	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	209
Catatan	D.2.22	Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	210
Catatan	D.2.23	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	210
Catatan	D.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	211
Catatan	D.2.25	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	211
Catatan	D.2.26	Penerusan Pinjaman	211

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.27	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	212
Catatan	D.2.28	PKF Prefinancing dan PFK Lainnya (Neto)	213
Catatan	D.2.29	Kiriman Uang (Neto)	213
Catatan	D.2.30	Transito (Neto)	214

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011**

- 01 Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
 - 02 Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 04 – 05 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mereview dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi - pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibutuh oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas ketepuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas kesalahan sistem pengendalian intern, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
 - 03 Dalam Laporan BPK Nomor 27a/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2010 karena permasalahan yang berkaitan dengan 1) ketidakjelasan transaksi pengganti atas transaksi pembatalan penerimaan perpajakan (*reversal*), penetapan dan pengalihan PBB Migas tidak sesuai UU PBB dan UU Migas, dan penyelesaian PPN melalui Pajak Ditanggung Pemerintah yang tidak sesuai dengan UU PPN; 2) pencatatan Uang Muka BUN yang tidak dapat mengidentifikasi transaksi talangan dan penggantian yang berpengaruh pada pencatatan SAL; 3) permasalahan pencatatan dan pelaporan Piutang Pajak; dan 4) permasalahan pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap.
- Dalam tahun 2011, Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan pengalihan PBB Migas sesuai UU PBB, perbaikan metodologi rekonsiliasi data dan penetitian atas *reversal* penerimaan perpajakan, penyelesaian PPN atas BBM sehingga sesuai dengan UU dan ketentuan berlaku, pemotongan dan penelusuran data rincian Uang Muka BUN, serta perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan Piutang Pajak.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

- 04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.28 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing senilai Rp1.567,97 triliun dan Rp1.184,30 triliun yang merupakan nilai Aset Tetap berdasar Neraca Kementerian Negara/Lembaga (KL) dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan belum memperhitungkan penyusutan. Pemerintah telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Neraca Awal per 31 Desember 2004, tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil IP sebagai berikut: 1) Aset Tetap pada sepuluh KL dengan nilai perolehan Rp4,13 triliun belum dilakukan IP; 2) Aset Tanah Jalan Nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,06 triliun tidak dapat diakui kewajarannya karena belum selesai dilakukan IP dan hasil IP tidak memadai; 3) Aset Tetap hasil IP pada tiga KL senilai Rp3,88 triliun dicatat ganda; 4) pencatatan hasil IP pada 40 KL masih selisih senilai Rp1,54 triliun dengan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 5) Aset Tetap pada 14 KL senilai Rp6,89 triliun tidak diketahui keberadaannya; dan 6) Pelaksanaan IP belum mencakup penilaian masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan Aset Tetap. Nilai Aset Tetap yang dilaporkan bisa berbeda secara signifikan jika Pemerintah menyelesaikan dan mencatat seluruh hasil IP.
- 05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.29 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing senilai Rp438,63 triliun dan Rp278,20 triliun. Aset Lainnya tersebut termasuk Aset Eks BPPN dengan nilai per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing senilai Rp67,54 triliun dan Rp29,20 triliun. Kenaikan Aset Eks BPPN senilai Rp38,34 triliun berasal dari hasil inventarisasi, perhitungan, dan penilaian yang dilakukan Pemerintah. Pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN tersebut masih mengandung kelemahan yaitu: 1) Pemerintah belum menemukan dokumen *ceksile* atas Aset Eks BPPN berupa Aset Kredit senilai Rp18,25 triliun; 2) Aset eks BPPN yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) senilai Rp11,18 triliun tidak didukung oleh dokumen sumber yang valid; 3) Aset Eks BPPN berupa tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) senilai Rp8,68 triliun belum didukung kesepakatan dengan Pemegang Saham; 4) Aset Eks BPPN berupa aset properti sebanyak 917 item belum dinilai; dan 5) Pemerintah belum dapat menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Aset Eks BPPN yang berupa piutang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.
- 06 Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan dan mencatat seluruh hasil IP Aset Tetap serta mencatat Aset Eks BPPN berdasarkan dokumen yang valid dan menyajikannya sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, laporan keuangan yang kami sebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 dan 2010 serta realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 07 Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPP Tahun 2011, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

pelaksanaan APBN TA 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24b/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan Nomor 24c/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2012
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

Drs. Hadi Poernomo, Ak
Register Negara No. D-786

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**RINGKASAN**

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2011 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (KKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2011 - 31 Desember 2011. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.210,60 triliun atau 103,48 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.295,00 triliun atau 98,05 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp883,72 triliun atau 97,30 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp411,32 triliun atau 99,71 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2011 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp44,50 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2011 sebesar Rp84,40 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2011 adalah sebesar Rp130,95 triliun atau 86,82 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp46,55 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)			TA 2010 (<i>Audited</i>)
	Anggaran (UU No. 11/2011)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.169,91	1.210,60	103,48	995,27
Belanja Negara	1.320,75	1.295,00	98,05	1.042,12
Belanja Pemerintah Pusat	908,24	883,72	97,30	697,41
Transfer ke Daerah	412,51	411,32	99,71	344,73
Suspen Belanja Negara	-	(0,05)	-	(0,02)
Surplus (Defisit) Anggaran	(150,84)	(84,40)	55,99	(46,55)
Pembiayaan Neto	150,84	130,95	86,82	91,55
SILPA (SiKPA)		46,55		44,71

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.023,44 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp266,81 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp750,03 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.567,97 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp438,63 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.947,37 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp246,44 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.700,93 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.076,07 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp40,81 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.035,26 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Aset	3.023,44	2.423,69
Aset Lancar	266,81	254,78
Investasi Jangka Panjang	750,03	706,41
Aset Tetap	1.567,97	1.184,30
Aset Lainnya	438,63	278,20
Kewajiban	1.947,37	1.796,08
Kewajiban Jangka Pendek	246,44	201,34
Kewajiban Jangka Panjang	1.700,93	1.594,74
Ekuitas Dana Neto	1.076,07	627,61
Ekuitas Dana Lancar	40,81	83,46
Ekuitas Dana Investasi	1.035,26	544,15

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2011 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp98,98 triliun, sedangkan pada awal tahun 2011 terjadi koreksi tambah sebesar Rp0,03 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2011 menjadi Rp99,01 triliun.

Selama TA 2011 terjadi kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp32,78 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp117,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp131,39 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp1,31 triliun, penurunan karena penggunaan SAL

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

sebesar Rp40,32 triliun, dan kenaikan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp1,29 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2011 menjadi Rp107,84 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp6,61 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,29 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,25 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6,33 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,10 triliun. Selama tahun 2011 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp0,17 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp121,26 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2011 dan TA 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung *)	98,98	46,06
Koreksi Saldo Awal	0,03	20,99
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi	99,01	67,05
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	32,78	33,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(117,62)	(80,04)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	131,39	91,55
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	1,31	2,93
Penggunaan SAL	(40,32)	(17,35)
Penyesuaian Pembukuan	1,29	(1,18)
Kenaikan (Penurunan) Kas	8,83	29,11
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	107,84	96,16

*) Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2011 sebesar Rp98,98 triliun berasal dari Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU Tahun 2010 sebesar Rp96,16 triliun ditambah dengan Rekening Khusus Rp2,82 triliun.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

**LAPORAN REALISASI APBN
(AUDITED)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

Uraian	Catatan	Anggaran	TA 2011 (Audit)		TA 2010 (Audit)	
			Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran
A. Pendapatan Negara dan Hibah						
I. Penerimaan Perpajakan						
1. Pajak Dalam Negri	B.2.1.1	878.685.216.762.000	873.873.882.389.361	99.45	723.306.668.621.738	
2. Pajak Pengeluaran Internasional	B.2.1.1.1	831.745.348.856.000	816.752.426.342.423	99.56	654.292.124.931.291	
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak						
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2	46.939.868.126.000	54.121.466.056.958	115.30	28.914.533.690.448	
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.1	286.567.317.002.000	331.471.821.098.730	115.67	268.941.856.298.841	
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.2	191.976.022.718.000	213.873.349.552.827	111.38	168.825.442.370.286	
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.3	26.835.823.000.000	26.163.973.126.600	97.74	30.086.632.694.265	
III. Penerimaan Hibah						
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	B.2.2	1.169.914.639.272.000	1.210.599.652.359.415	103.48	995.271.511.391.343	
B. Belanja Negara						
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	906.243.422.687.800	883.721.886.196.519	97.30	697.406.380.187.177	

lihat Catatan atas Laporan Kewangan yang mencantumkan bagian yang tak terpisahkan dari laporan kewangan ini .5

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Uraian	Catatan	Anggaran	TA 2011 (Audit)		TA 2010 (Audit)	
			Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	164.068.938.020.000	175.737.918.416.015	95,46	148.078.064.096.609	
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	142.355.864.901.000	124.639.479.502.304	87,57	97.596.038.399.825	
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	144.571.840.017.000	117.834.532.071.332	81,52	80.287.065.885.665	
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	106.563.810.504.000	93.261.919.811.886	87,50	88.363.233.764.097	
5. Subsidi	B.2.2.1.5	238.486.978.142.000	295.358.279.636.324	123,86	192.707.049.527.199	
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	426.192.193.000	300.108.798.353	70,42	70.008.777.575	
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	77.487.135.177.000	71.104.328.162.347	91,79	68.611.111.986.287	
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	14.302.662.733.800	5.465.369.795.958	38,21	21.672.897.947.920	
II. Transfer ke Daerah					344.727.611.830.379	
1. Dana Perimbangan					99,71	
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1	347.538.605.495.000	341.246.213.954.316	99,92	316.711.293.079.068	
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1	98.772.092.547.000	96.906.981.961.318	100,14	92.163.481.233.068	
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.2	225.533.712.048.000	225.533.712.048.000	100,00	203.571.490.627.200	
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyelesaian	B.2.2.2.1.3	25.232.800.900.000	24.803.508.925.000	98,30	20.956.311.168.000	
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2	64.969.286.333.200	64.078.556.677.474	98,63	28.016.318.801.311	
b. Dana Penyelesaian	B.2.2.2.2.1	10.421.312.983.000	10.421.312.983.000	100,00	9.089.613.680.000	
III. Surplus Belanja Negara	B.2.2.2.2.2	54.541.973.340.200	53.657.237.984.474	98,37	18.916.705.121.311	
			(47.504.353.285)		(16.772.272.739)	
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	1.320.751.314.516.000	1.294.959.166.475.024	98,05	1.042.117.219.744.817	
D. Pembimpinan	B.2.4	(150.836.675.244.000)	(84.399.493.115.609)	55,95	(46.845.708.353.474)	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang memuatkan bagian yang tak terpaksakan dari laporan keuangan ini .7.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Uraian	Catatan	Anggaran	TA 2011 (Audit)		TA 2010 (Audit)	
			Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran
I. Pembayaran Dalam Negeri (Neto)						
1. Retensi Pemerintah	B.2.4.1.1	153.613.307.023.000	148.748.024.850.068	96.83	96.118.516.369.932	
2. Penetapan Cicilan Pengembalian Penerimaan Pinjaman	B.2.4.1.2	40.574.043.032.000	40.319.043.049.000	99.37	22.189.312.607.078	
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	8.176.680.057.000	8.608.845.485.486	105.29		
4. Sursi Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	1.380.690.442.000	1.597.981.517.178	114.91	3.232.148.153.135	
Penerimaan Surat Berharga Negara		126.653.893.000.000	119.884.365.458.065	94.64	91.102.598.250.248	
Pengeluaran Surat Berharga Negara	B.2.4.1.5	1.452.125.992.000	207.136.113.196.150		197.634.217.942.000	
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.6	(21.112.428.300.000)	(87.271.747.737.085)		(17.531.619.891.752)	
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.7	(804.000.000.000)	819.382.641.633	42.65	393.806.359.471	
7. Kewajiban Pinjaman		(2.617.700.000.000)	(119.643.883.312.264)	93.04	(19.789.149.000.000)	
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(2.617.700.000.000)	(2.617.700.000.000)	100.00	(11.000.000.000.000)	
B.2.4.2		(2.776.631.779.000)	(11.798.165.225.648)		641.03	(4.566.504.969.317)
B.2.4.2.1		56.182.884.835.000	33.747.178.723.921		60.07	54.794.790.200.207
B.2.4.2.1.1		19.201.800.000.000	15.286.144.513.219		79.50	28.974.644.488.116
B.2.4.2.1.2		36.981.084.835.000	18.481.034.210.702		49.97	25.820.145.711.091
B.2.4.2.2		(11.724.776.614.000)	(4.223.841.471.298)		36.02	18.728.763.587.689
B.2.4.2.3		(47.234.740.000.000)	(47.322.502.478.271)		100.19	(50.632.531.581.836)
Jumlah Pembayaran (D.I + D.II)		150.836.675.244.000	136.948.889.624.420	86.82	91.552.011.400.615	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembayaran Anggaran SilPA (SikPA) (D+C)	B.2.5		46.549.376.508.811		44.706.303.047.141	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini .8

**NERACA
(AUDITED)**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

II. NERACA (AUDITED)

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

(Dalam
Rupiah)

Urutan	Catatan	31 Des 2011 (Audited)	31 Des 2010 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	82.453.918.298.407	82.430.710.192.763
Rekening Kas di KPPN	C.2.2	11.870.556.947.661	9.218.612.887.732
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.3	6.615.552.720.213	8.539.601.162.593
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	292.795.937.959	519.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	252.800.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	6.766.875.778.441	8.662.179.999.211
Kas pada BLU	C.2.7	13.019.388.257.063	7.340.595.820.681
Jumlah Kas dan Bank		121.261.988.260.888	117.332.963.446.378
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	1.409.995.648.910	1.876.259.417.429
Rutang			
Piutang Pajak	C.2.9	108.063.462.383.641	70.945.271.446.620
Piutang Bukan Pajak	C.2.10	19.885.890.412.635	9.020.978.486.579
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.11	-	66.404.443
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.12	60.470.939.992	38.591.410.963
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	C.2.13	-	4.842.752.393.007
Uang Muka Belanja	C.2.14	1.279.165.315.147	614.122.632.355
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.15	1.216.391.989.142	1.121.930.274.893
Piutang Lain-lain	C.2.16	24.977.956.337.945	12.589.882.121.588
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	C.2.17	4.462.395.347.776	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang	C.2.18	(75.330.131.480.506)	-
Jumlah Piutang (Bersih)		84.615.601.245.772	99.173.594.170.448
Investasi Jangka Pendek			
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.19	170.553.016.059	30.750.000.000
Investasi Jangka Pendek Lainnya	C.2.20	135.839.486.878	-
Jumlah Investasi Jangka Pendek		306.392.502.937	30.750.000.000
Persediaan	C.2.21	59.214.846.453.160	36.366.060.681.005
Jumlah Aset Lancar		260.807.824.111.647	254.779.627.714.280
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	C.2.22	-	43.387.037.827.876
Dana Bergulir	C.2.23	8.195.256.111.510	3.891.209.869.656
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.24	4.749.737.167.996	98.464.787.895
Jumlah Investasi Non Permanen		12.944.993.279.506	47.356.712.585.427
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.25	738.991.554.233.014	564.087.107.302.153
Investasi Permanen BLU	C.2.26	6.637.194.600	6.637.194.600
Investasi Permanen Lainnya	C.2.27	87.609.772.784	94.959.618.306.997
Jumlah Investasi Permanen		737.085.801.200.298	659.053.362.803.650
Jumlah Investasi Jangka Panjang		750.030.794.479.804	706.410.075.389.077
Aset Tetap	C.2.28		
Tanah		806.436.356.598.744	565.920.545.473.098
Peralatan dan Mesin		184.052.199.595.042	150.868.673.195.411
Gedung dan Bangunan		152.223.086.918.162	137.042.921.053.205
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		347.164.628.245.235	276.682.171.786.874
Aset Tetap Lainnya		11.517.129.897.802	7.748.128.178.913

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Des 2011 (Audited)	31 Des 2010 (Audited)
Konstruksi Dalam Pengajaran		65.780.773.332.785	46.038.727.718.084
Jumlah Aset Tetap		1.587.974.174.587.750	1.184.381.187.405.585
Aset Lainnya			
Piutang Jangka Panjang		1.375.031.741	1.377.894.323
Tagihan Penjualan Angsuran		249.626.424.418	38.234.179.361
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		3.737.310.550.736	
Piutang Jangka Panjang Lainnya		3.988.312.006.895	39.612.173.684
Jumlah Piutang Jangka Panjang		212.907.765.825	212.609.665.200
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
Penerusan Pinjaman		48.540.275.969.109	2.070.158.163.656
Aset Tak Berwujud		12.406.618.813.595	9.351.448.050.646
Dana yang Diberikan Penggunaannya		37.253.051.374.408	40.987.103.326.394
Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan		19.320.332.310.233	18.459.000.085.715
Dana Perjaminan		75.371.634.076	71.139.792.697
Aset KKKS		150.508.980.296.216	68.224.330.326.991
Aset Eks BPPN		67.543.984.466.405	29.203.047.197.602
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		14.762.445.010.365	
Aset Lain-lain		103.892.977.283.230	109.579.037.246.507
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya		(19.970.874.008.863)	
Jumlah Aset Lainnya		438.634.382.921.494	278.197.482.029.092
JUMLAH ASET		3.823.447.178.100.695	2.423.688.352.538.014
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.31	1.755.574.896.285	1.575.434.547.871
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.32	31.780.634.369.020	31.370.392.714.561
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.33	704.437.258.982	3.547.727.872.825
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.34	108.777.089.896.825	88.286.391.827.798
Utang Biaya Pinjaman	C.2.35	21.924.038.335.465	20.281.543.289.213
Utang Subsidi	C.2.36	29.767.908.999.742	22.161.795.155.886
Utang SBN Jangka Pendek	C.2.37	39.408.181.897.000	29.235.009.035.000
Pendapatan Diterima di Mula	C.2.38	8.639.914.082.680	119.116.551.668
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.39	5.667.100.837.136	4.766.549.847.266
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		246.444.888.163.115	201.343.968.842.088
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	C.2.40	1.085.324.545.750.561	987.172.961.936.007
Utang Kepada Dana Persiapan dan THT	C.2.41	11.822.231.224.875	8.389.364.871.001
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.2.42	877.330.765.232	367.365.935.508
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.43	5.033.082.825.744	3.095.222.852.622
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		1.103.057.191.068.402	999.024.915.595.136
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.44	571.982.048.619.444	569.983.008.549.466
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.45	28.889.179.304.040	25.728.322.825.757
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		597.871.227.923.484	595.709.331.375.223
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.700.928.418.989.888	1.594.734.248.970.359
JUMLAH KEWAJIBAN		1.947.373.299.153.001	1.798.078.287.812.447
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.46	58.656.722.496.082	52.382.103.135.529
SLPA (SKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.47	48.432.649.228.692	46.527.600.199.917
Dana Lancar Lainnya	C.2.48	451.833.801.148	1.540.934.451.110
Cadangan Piutang	C.2.49	84.574.619.543.073	100.141.379.244.383
Cadangan Persediaan	C.2.50	59.214.846.453.180	36.386.060.681.005
Pendapatan yang Ditangguhan	C.2.51	3.810.469.839.673	4.210.269.507.402
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.52	(204.483.864.343.763)	(149.818.772.353.919)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	Catatan	31 Des 2011 (Audited)	31 Des 2010 (Audited)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diberikan	C.2.53	(6.321.674.877.095)	(119.116.551.668)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.2.54	1.276.453.004.389	614.122.632.355
Selisih Kurs Bagian Lancar	C.2.55	(2.798.692.210.245)	(8.282.009.832.937)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		40.813.342.835.093	83.462.571.113.177
Ekuitas Dana Investasi			
Dinvesitasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.56	750.030.794.479.804	702.836.007.101.463
Dinvesitasikan dalam Aset Tetap	C.2.57	1.587.974.174.587.750	1.184.301.167.405.585
Dinvesitasikan dalam Aset Lainnya	C.2.58	417.130.365.123.476	246.554.471.882.238
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.59	(1.679.033.615.946.059)	(1.498.908.975.231.842)
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	C.2.60	(20.841.184.232.370)	(90.635.097.545.054)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.035.260.534.012.601	544.147.573.812.390
EKUITAS DANA NETO		1.076.073.876.847.694	627.610.144.725.567
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.823.447.176.108.695	2.423.088.352.538.014

**LAPORAN ARUS KAS
(AUDITED)**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**III. LAPORAN ARUS KAS (*AUDITED*)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan			
a. Pajak Penghasilan	D.2.1	431.121.712.728.316	354.152.324.675.100
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		277.800.076.679.384	219.536.218.197.355
c. Pajak Bumi dan Bangunan		29.893.164.324.396	28.580.589.978.740
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		(730.151.679)	8.026.429.073.342
e. Cukai		77.010.010.613.795	66.165.922.512.567
f. Pajak Lainnya		3.928.192.148.211	3.371.209.407.180
g. Pajak Pendapatan Internasional		54.121.466.056.958	28.656.900.712.960
Total Penerimaan Perpajakan		873.873.882.399.381	708.491.594.557.244
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2	213.823.348.552.827	168.825.442.320.286
a. Penerimaan Sumber Daya Alam		28.183.973.126.800	30.096.832.604.265
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		69.226.130.305.985	59.184.782.520.535
c. PNBP Lainnya		20.103.995.586.771	10.590.842.035.270
d. Penerimaan BLU		331.337.448.572.183	268.677.979.570.356
Total PNBP		4.258.217.536.874	3.022.986.580.763
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	1.209.469.558.508.440	980.192.560.688.363
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)			
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	175.745.947.140.204	148.072.602.131.332
2. Belanja Barang	D.2.5	124.159.163.392.116	97.587.913.734.089
3. Bunga Utang	D.2.6	93.260.261.464.346	88.381.042.974.863
4. Subsidi	D.2.7	295.358.422.916.324	177.891.975.462.704
5. Belanja Hibah	D.2.8	300.108.798.355	70.008.777.575
6. Bantuan Sosial	D.2.9	71.076.290.233.168	68.595.486.637.272
7. Belanja Lain-Lain	D.2.10	5.464.234.053.592	21.686.884.908.929
8. Bagi Hasil Pajak	D.2.11	41.525.561.098.164	45.815.708.635.828
9. Bagi Hasil Cukai	D.2.12	1.408.448.764.184	1.202.111.025.283
10. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.13	53.974.986.297.954	45.185.743.030.483
11. Dana Alokasi Umum	D.2.14	225.533.712.049.000	203.570.976.808.500
12. Dana Alokasi Khusus	D.2.15	24.802.229.752.980	20.958.311.188.000
13. Dana Otonomi Khusus	D.2.16	10.421.312.993.000	9.099.613.680.000
14. Dana Penyesuaian	D.2.17	53.657.183.069.474	18.918.610.308.811
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		1.176.687.862.019.860	946.994.969.283.449
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		32.781.696.488.577	33.197.591.404.914
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.18	134.372.526.547	263.876.638.486

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -14-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	Catatan	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		134.372.526.547	263.876.638.486
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Modal	D.2.18	117.759.087.730.733	80.307.176.396.873
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		117.759.087.730.733	80.307.176.396.873
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		(117.624.715.204.186)	(80.043.299.758.387)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.20	249.672.520.403.981	193.449.285.061.684
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.21	33.747.178.723.921	54.794.790.200.206
3. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.22	8.608.845.495.456	57.831.783.320
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		292.028.544.623.338	248.301.707.025.210
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.23	89.889.447.737.085	77.531.619.691.752
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.24	47.322.502.478.271	50.632.531.581.836
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.25	19.200.357.712.264	19.799.149.000.000
4. Penerusan Pinjaman	D.2.26	4.223.841.471.298	8.786.395.351.008
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		160.636.149.398.918	150.749.695.624.596
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		131.392.395.224.420	91.552.011.400.614
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fikih Ketiga (Neto)	D.2.27	1.081.050.588.587	619.814.108.170
2. PFK Financing dan PFK Lainnya (Neto)	D.2.28	-	(34.367.584.001)
3. Kiriman Uang (Neto)	D.2.29	12.817.535.129	2.110.479.145.563
4. Transito (Neto)	D.2.30	219.674.491.857	231.461.078.546
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		1.313.542.615.553	2.927.386.748.278
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS			
Penggunaan SAL		47.862.918.124.364	47.633.689.795.418
Penyesuaian Pembukuan		(40.319.043.049.000)	(17.347.846.818.000)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI		1.287.457.711.323	(1.178.259.859.686)
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN, BLU, DAN HIBAH LANGSUNG		8.831.333.786.686	29.107.483.117.733
Koreksi Saldo Awal		47.862.918.124.364	47.633.689.795.418
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN, BLU, DAN HIBAH LANGSUNG SETELAH KOREKSI		(40.319.043.049.000)	(17.347.846.818.000)
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, BLU, DAN HIBAH LANGSUNG		98.985.089.736.159	46.062.746.044.414
Rekening Khusus	C.2.3	26.188.864.543	20.990.525.740.042
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.4	26.188.864.543	20.990.525.740.042
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.5	282.795.837.959	518.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.6	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.7	6.327.755.218.087	8.603.994.085.726
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1	100.924.894.157	53.015.078.502
Kas pada BLU yang telah Didepositakan (Investasi Jangka Pendek)	C.2.18	(170.553.016.059)	-
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		121.261.988.260.868	117.332.963.445.378

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -15-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(AUDITED)**

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)**A. PENJELASAN UMUM****A.1. DASAR HUKUM**

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbeniharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akuatil).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Indonesia dan Perekonomian Global

Dengan semakin terkoneksinya perekonomian antar negara dan antar kawasan, kinerja perekonomian nasional dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global. Dalam tahun 2011 perekonomian dunia belum menunjukkan perbaikan, bahkan beberapa negara di kawasan Eropa semakin memburuk kondisinya, sehingga merevisi target pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Belum pulihnya kondisi perekonomian kawasan Eropa ditunjukkan oleh masih tingginya angka pengangguran yang mencapai 10,4 persen pada akhir tahun 2011 dan rasio utang terhadap PDB di beberapa negara Eropa semakin meningkat selama tahun 2011. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi negara-negara maju disesuaikan hanya 2,8 persen, negara-negara berkembang 6,4 persen, dan negara-negara ASEAN 5 dapat tumbuh sebesar 4,8 persen.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan volume perdagangan global mencapai 6,9 persen pada tahun 2011 lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 7,5 persen. Melemahnya permintaan global menyebabkan eksport negara-negara kawasan Asia

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

mengalami tekanan sehingga ekspor China menurun 13,4 persen dan ekspor Jepang turun 2,7 persen dari tahun sebelumnya.

Tekanan pada perekonomian Eropa dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global juga menyebabkan pergeseran arus modal mengalami penyesuaian. Perbedaan respon kebijakan antar negara-negara maju terkait krisis Eropa mengakibatkan masih derasnya arus modal masuk ke negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia, terutama dalam bentuk portofolio.

Walaupun terjadi perlambatan ekonomi global di tahun 2011, perekonomian nasional mampu berakselerasi, yang didukung oleh tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar Rupiah yang stabil, dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Pencapaian ini juga didukung oleh kinerja neraca pem-bayarannya yang surplus. Selain didukung oleh perkembangan ekonomi makro yang cukup baik, hal ini tidak lepas dari keberhasilan berbagai langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengamankan pelaksanaan APBN 2011 dengan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat dan memperlancar pelaksanaan belanja negara, maupun mengupayakan pemenuhan sasarannya pemberian anggaran dengan risiko rendah selama tahun 2011, sehingga realisasi anggaran negara tahun 2011 tetap dapat dijaga pada tingkat yang aman.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011

Pada tahun 2011 perekonomian nasional mampu tumbuh 6,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN seperti Singapura (6,5 persen), Malaysia dan Vietnam masing-masing tumbuh 5,1 dan 5,7 persen, Thailand (0,5 persen), dan Filipina (3,5 persen).

Di sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 didorong oleh meningkatnya investasi, ekspor dan konsumsi. Dalam periode tersebut investasi tumbuh 8,8 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,7 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 3,2 persen, ekspor tumbuh 13,6 persen, dan impor tumbuh 13,3 persen. Membuktikannya kinerja ekspor didorong oleh meningkatnya harga komoditas di pasar global, masih kuatnya permintaan ekspor komoditas primer, serta deversifikasi pasar eksport ke negara *emerging market*. Sementara tingginya pertumbuhan investasi terutama didukung oleh investasi langsung (PMA). Konsumsi masyarakat tetap kuat seiring dengan terjadinya daya beli masyarakat dan meningkatnya belanja pemerintah.



Grafik 1: Sumber-Sumber Pertumbuhan PDB 2008-2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung keyakinan konsumen yang cukup tinggi seperti tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen oleh BI yang naik menjadi 116,1 pada Oktober 2011. Tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah turut mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2011. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peran investasi dan ekspor yang meningkat walaupun tingkat ekspor di triwulan.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011

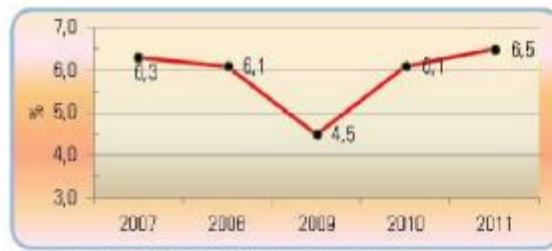
Pada tahun 2011 perekonomian nasional mampu tumbuh 6,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN seperti Singapura (6,5 persen), Malaysia dan Vietnam masing-masing tumbuh 5,1 dan 5,7 persen, Thailand (0,5 persen), dan Filipina (3,5 persen).

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 didorong oleh meningkatnya investasi ekspor dan konsumsi. Dalam periode tersebut investasi tumbuh 8,8 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,7 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 3,2 persen, ekspor tumbuh 13,6 persen, dan impor tumbuh 13,3 persen. Membuktikan kinerja ekspor di dorong oleh meningkatnya harga komoditas di pasar global, masih kuatnya permintaan ekspor komoditas primer, serta diversifikasi pasar ekspor ke negara *emerging market*. Sementara tingginya perlumbuhan investasi terutama didukung oleh investasi langsung (FPIA). Konsumsi masyarakat tetap kuat seiring dengan terjadinya daya beli masyarakat dan meningkatnya bolaria pemerintah.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung keyakinan konsumen yang cukup tinggi seperti tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen oleh BI yang naik menjadi 116,1 pada Oktober 2011. Tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah turut mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2011. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peran investasi dan ekspor yang meningkat walaupun tingkat ekspor di triwulan terakhir menghadapi tantangan akibat penurunan akselerasi perekonomian global. Sementara itu tingkat pertumbuhan impor melambat walaupun masih tetap pada level yang tinggi. Kinerja ekspor didukung oleh pertumbuhan Industri Pengolahan yang menghasilkan komoditas yang diperdagangkan secara internasional juga ditunjang oleh sektor lainnya seperti sektor Pertanian serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Tingkat pertumbuhan di tahun 2011 ini semakin berkualitas yang diindikasikan salah satunya dengan berkurangnya jumlah pengangguran terbuka menjadi 6,56 persen dari total jumlah penduduk.

Tren pertumbuhan ekonomi tahun 2007-2011

Selama periode 2007 – 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sebesar 5,9 persen. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di atas 6 persen, kecuali tahun 2009 yang mengalami perlambatan sebagai dampak dari krisis global tahun 2008-2009. Pada tahun 2007, perekonomian nasional tumbuh sebesar 6,3 persen, kemudian sedikit mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi 6,1 persen. Di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5 persen dan di tahun berikutnya kembali meningkat menjadi 6,1 persen dan 6,5 persen di tahun 2011.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2007 – 2011

*PDB atas harga yang berlaku
2011*

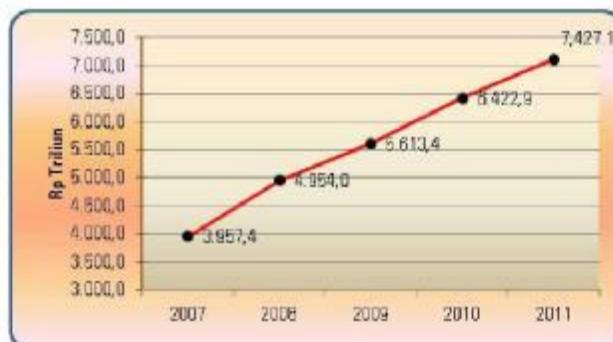
Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dinyatakan dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sesuai dengan pendekatan produksi, penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usahasektor. Dari pendekatan pendapatan, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dari pendekatan pengeluaran, PDB adalah gabungan dari jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan eksport neto.

Walaupun nilai PDB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 senilai Rp2.463,2 triliun, PDB atas harga berlaku mencapai Rp7.427,1 triliun, lebih besar dari target di APBN-P 2011 sebesar Rp7.227,9 Triliun. Nilai PDB harga berlaku tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 13,6 persen dibandingkan tahun 2010 yang mencapai nilai sebesar Rp6.422,9 triliun.

PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kedua jenis PDB ini menjadi indikator yang digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi (PDB atas dasar harga berlaku), dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (PDB atas dasar harga konstan).

Apabila dilihat dari trennya, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, nilai PDB atas dasar harga berlaku turut mengalami peningkatan 87 persen dengan rata-rata pertumbuhan 17,05 persen per tahun. Pada tahun 2007 nilai PDB sebesar Rp3.957,4 triliun kemudian meningkat menjadi Rp4.954,0 triliun pada tahun 2008. Di tahun 2009 PDB tumbuh sebesar Rp3.813,4 triliun, Rp6.422,9 triliun pada tahun 2010, dan di tahun 2011 PDB Indonesia tumbuh menjadi Rp7.427,1 triliun (lihat Grafik 3).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

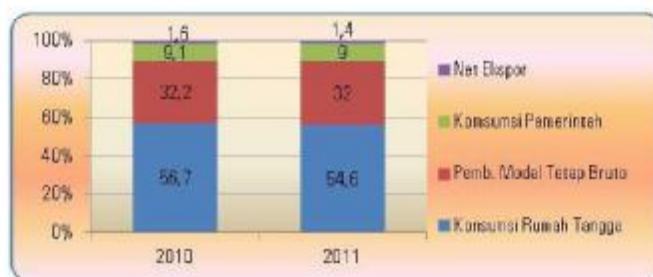


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 3: Trend PDB Harga Berlaku Tahun 2007-2011

Struktur PDB menurut komponen penggunaan

Sementara itu bila dilihat dari struktur PDB menurut penggunaan, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar, walaupun kontribusinya mengalami penurunan dari 56,7 persen dalam tahun 2010 menjadi 54,6 persen dalam tahun 2011. Peran konsumsi pemerintah relatif turun dari 9,1 persen di tahun 2010 menjadi 9 persen di tahun 2011, begitu juga pembentukan modal tetap brutto/investasi tunai dibanding tahun lalu dari sebesar 32,1 persen menjadi 32,0 persen. Komponen ekspor dan impor meningkat dari masing-masing sebesar 24,6 persen dan 22,9 persen menjadi 26,3 persen dan 24,9 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik/BPK

Grafik 4. Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2010 dan 2011

Konsumsi rumah tangga pada 2011 tetap kuat yang didukung oleh meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen, tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah, serta relatif stabilitas rupiah dengan kecenderungan menguat, turut pula mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat di tahun 2011. Selain itu rendahnya inflasi dan menurunnya suku bunga kredit juga mendorong meningkatnya pertumbuhan konsumsi. Salah satu indikator yang mendukung akelerasi pertumbuhan konsumsi antara lain penjualan motor dan mobil yang tetap tinggi yaitu sebesar 11,9 persen dan 16,4 persen. Konsumsi pemerintah dalam tahun 2011 tumbuh 3,2 persen yang didukung oleh meningkatnya penyerapan anggaran, terutama belanja yang telah terikat seperti belanja pegawai dan subsidi.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**Laju Pertumbuhan dan Struktur PDB menurut lapangan usaha**

Dari sisi produksi, semua sektor mengalami pertumbuhan. Dua sektor yang padat tenaga kerja yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan tumbuh cukup kuat. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (10,7 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (9,2 persen), sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan (6,8 persen), serta sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa masing-masing 6,7 persen. Sektor-sektor lainnya tumbuh antara 1,4 persen sampai dengan 6,2 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh meningkatnya pertumbuhan subsektor alat angkut, subsektor makanan dan minuman, dan subsektor tekstil. Faktor lain yang ikut mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain meningkatnya konsumsi, pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi. Laju pertumbuhan masing-masing sektor dalam membentuk PDB (harga konstan) menurut lapangan usaha terlihat pada Grafik 5.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011

Struktur pembentukan PDB menurut lapangan usaha, dalam tahun 2011 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perikanan, sektor hotel dan restoran, serta sektor pertambangan dan penggalian. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan peranan pada beberapa sektor yaitu peran sektor industri pengolahan turun dari 24,8 persen menjadi 24,3 persen, sektor pertanian turun dari 15,3 persen menjadi 14,7 persen, dan sektor konstruksi turun dari 10,3 persen menjadi 10,2 persen. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan perannya terhadap pembentukan PDB yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang peranan terhadap pembentukan PDB tidak berubah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa. Rincian kontribusi masing-masing sektor pada penekukuman atau struktur PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2010 dan 2011 terlihat pada Grafik 6.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

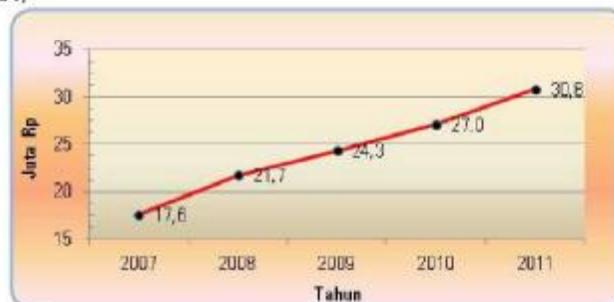


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Perbandingan Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha 2010 dan 2011

PDB per Kapita tahun 2011

Kebijakan-kebijakan pemerintah juga ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan PDB per kapita. PDB per kapita yang merupakan PDB atau dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk, pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 13,8 persen menjadi Rp30,8 juta atau USD3.542,9, dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2010 sebesar Rp27,0 juta atau USD3.004,9 (lihat Grafik 7).



Sumber : Badan Pusat Statistik

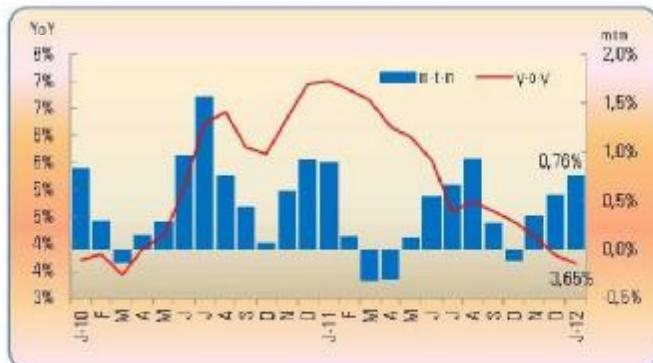
Grafik 7. Perkembangan PDB Per Kapita Tahun 2007 – 2011

Inflasi

Stabilitas ekonomi makro tercermin pada tingkat inflasi yang rendah serta stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam tahun 2011, laju inflasi dapat dikendalikan pada level yang rendah yaitu 3,7 persen (yoj), dan berada dibawah sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 5,7 persen. Selain itu, inflasi dalam tahun 2011 jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Rendahnya inflasi tersebut bersumber dari terjaganya inflasi inti dan inflasi pangan pada level yang rendah, serta minimalnya inflasi *administered prices*. Dalam tahun 2011, inflasi inti mencapai 4,3 persen (yoj) jauh lebih rendah dari inflasi tahun-tahun sebelumnya sebesar 6,5 persen (yoj). Hal ini dikarenakan menguatnya nilai tukar rupiah serta menurunnya ekspektasi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

inflasi. Sementara rendahnya inflasi pangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi serta stabilisasi harga pangan. Dalam tahun 2011, volume impor bahan pangan khususnya bawang merah, bawang putih, dan Kentang meningkat cukup tinggi. Selain itu, kondisi cuaca yang lebih kondusif juga ikut mendorong peningkatan produksi komoditas pangan terutama aneka bumbu-bumbuan seperti cabai dan bawang. Cabai merah yang dalam tahun sebelumnya menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi, dalam tahun 2011 ini harganya relatif terjaga seiring dengan melimpahnya pasokan dari dalam negeri. Terkendalinya inflasi tersebut utamanya didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang semakin baik, yang antara lain dilakukan melalui forum TPI (Tim Pengendalian Inflasi) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

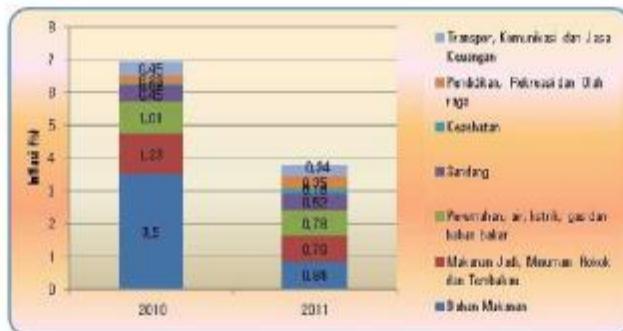


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 8. Laju Inflasi Tahun 2010 dan 2011*Andil inflasi tahun 2011*

Sementara itu bila dilihat dari andil/sumbangan inflasi selama tahun 2011 sebesar 3,79 persen, kelompok bahan makanan memberikan andil 0,84 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,78 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,78 persen, kelompok sandang sebesar 0,52 persen, kelompok sandang Rp. 0,18 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,35 persen, serta kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil inflasi sebesar 0,34 persen. Andil inflasi kelompok bahan makanan menurun cukup signifikan dibandingkan andil di tahun 2010 sebesar 3,50 persen.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 9. Andil Inflasi Tahun 2010 dan 2011

Lebih spesifik, jenis barang dan jasa yang berkontribusi utama terhadap inflasi selama tahun 2011 di antaranya adalah harga komoditas beras dan emas perhiasan, sama seperti tahun 2010 serta rokok kretek filter, tarif sewa rumah, tarif angkutan udara, dan ikan segar.

Inflasi di beberapa (66) Kabupaten/kota tahun 2011

Dari survei yang dilakukan oleh BPS terhadap 66 kabupaten/kota, pada bulan Desember 2011 seluruh kabupaten/kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Kupang sebesar 2,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 138,37 dan terendah terjadi di kota Tanjung Pinang sebesar 0,02 persen dengan IHK 129,86. Dari 66 kabupaten/kota basis perhitungan inflasi, 64 kabupaten/kota mencatat inflasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya bahkan beberapa daerah di Jawa, Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia mengalami penurunan laju inflasi yang lebih dalam dibandingkan nasional. Faktor koreksi harga yang terjadi pada komoditas bahan makanan berdampak pada meredanya tekanan kenaikan inflasi. Dukungan dari masuknya pasokan pangan dari sumber lainnya yang cenderung meningkat turut mempengaruhi terjadinya pasokan bahan makanan. Selain itu, peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) turut menjaga kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan terutama bahan pangan pokok dan pengendalian inflasi secara keseluruhan.

Boks 1. Penerbitan SPN 3 bulan

SUN seri variable rate (VR) adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara (SBN) yang memiliki tingkat bunga mengambang yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 yang merupakan bagian program rekapitalisasi perbankan. Sesuai dengan ketentuan dan persyaratannya, tingkat bunga yang digunakan mengacu pada hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan.

Namun demikian, kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan derasnya modal asing yang masuk dalam pasar keuangan di Indonesia dan untuk melakukan mitigasi risiko volatilitas nilai tukar dan tingkat bunga, antara lain: (1) secara bertahap BI tidak lagi melakukan lelang SBI 1, 3 dan 6 bulan secara regular (penonaktifan) dan fokus pada penerbitan SBI 9 bulan; (2) penerapan *one-month holding period* atas SBI, yang dilanjutkan dengan *six-month holding period* atas SBI; dan (3) memperkenalkan instrumen moneter jangka pendek yang tidak dapat diperdagangkan berupa *Term Deposit* (TD) dengan tenor tertentu, khusus untuk bank domestik. Akibat penerapan kebijakan tersebut, lelang SBI 3 bulan dihentikan sejak lelang terakhir tanggal 13 Oktober 2010 dengan tingkat bunga SBI 3 bulan sebesar 6,37 persen. Oleh karena itu diperlukan tingkat bunga acuan baru untuk pembayaran kupon SUN seri VR sebagai pengganti SBI 3 bulan. Hal ini sesuai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

dengan ketentuan dan persyaratan SUN jenis VR sebagai berikut:

1. Apabila selama 6 (enam) bulan kalender berturut-turut tidak terdapat suatu hasil lelang atas Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 3 bulan, maka penentuan tingkat bunga obligasi didasarkan pada hasil lelang surat utang lain dari Pemerintah dengan jangka waktu 3 bulan (catatan: SPN 3 bulan) dimana sistem pelelangannya setara dengan lelang Sertifikat Bank Indonesia dimaksud.
2. Apabila pelelangan surat utang lainnya dari Pemerintah tersebut tidak dilakukan maka hasil pelelangan Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 3 bulan yang terakhir digunakan untuk menghitung tingkat bunga obligasi dimaksud.
3. Dasar perhitungan tingkat bunga obligasi tersebut akan diumumkan melalui media elektronik dan media cetak selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum diberlakukannya tingkat bunga obligasi pengganti.

Setelah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, pelaku pasar, serta investor SBN, Pemerintah pada akhirnya menetapkan penggunaan SPN 3 bulan sebagai acuan baru pembayaran bunga SUN jenis VR. Adapun pertimbangan penggunaan SPN 3 bulan adalah:

1. Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan SUN jenis VR.
2. Langkah awal untuk mengembangkan pasar SPN jangka pendek (3 bulan).
3. Suku bunga yang terbentuk transparan, akuntabel dan kompetitif.
4. Dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN.
5. Dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti acuan tingkat bunga dalam asumsi makro APBN.

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2012**Kinerja SBN**

Meskipun perekonomian global masih diliputi ketidakpastian, namun pasar SBN tetap tumbuh positif. Dengan meredanya sentimen global, mendorong pelaku asing menambah eksposurnya di pasar SBN. Aksi beli asing terutama terjadi pada instrumen SBN jangka pendek dan menengah. Selain didukung oleh faktor makro dan risiko fiskal yang terkendali, minat beli asing juga terkait dengan imbal hasil yang menarik, baik secara nominal maupun ril serta pencapaian *investment grade*. Secara keseluruhan, pergerakan imbal hasil SBN cenderung turun untuk keseluruhan tenor yang mencapai 146 bps menjadi 5,88 persen jika dibandingkan dengan akhir tahun 2010 sebesar 7,3 persen. Penurunan BI rate sebesar 25 bps pada saat gejolak eksternal mulai mereda turut mendorong penurunan imbal hasil SBN. Secara rata-rata bulanan, imbal hasil SBN selama tahun 2011 untuk tenor jangka pendek, menengah, dan panjang masing-masing turun sebesar 37 bps, 59 bps dan 56 bps. Menununnya *yield* tersebut berdampak pada kewajiban Pemerintah untuk membayar biaya bunga menjadi lebih rendah dalam penerbitan surat utang yang baru, sehingga mengurangi beban pembayaran bunga pada APBN.

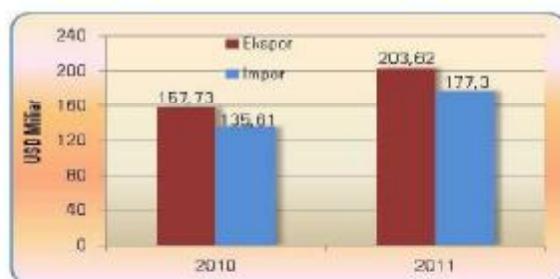
Kinerja ekspor dan impor

Walaupun pada akhir tahun 2011 kinerja ekspor mengalami perlambatan, namun secara keseluruhan ekspor tumbuh 29,0 persen. Peningkatan ekspor ini didukung oleh meningkatnya harga dan permintaan barang primer serta diversifikasi negara tujuan ekspor ke *emerging market*. Komoditi ekspor yang meningkat signifikan antara lain bahan bakar mineral (16,9 persen), lemak dan minyak hewan/nabati (13,4 persen), karet dan barang dari karet (8,9 persen), mesin/peralatan listrik (6,9 persen), dan bijih, kerak, dan abu logam (4,5 persen). Sementara itu, berdasarkan pangannya ekspor terbesar ditujukan ke China (13,3 persen), Jepang (11,3 persen), Amerika Serikat (9,7 persen), India (8,2 persen), dan Singapura (6,9 persen).

Nilai impor tahun 2011 meningkat sebesar 30,69 persen bila dibandingkan dengan impor pada periode yang sama tahun 2010. Komoditi impor yang mengalami peningkatan cukup signifikan antara lain impor mesin dan peralatan mekanik, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja,

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

kendaraan bermotor dan bagiannya, plastik dan barang dari plastik, serta bahan kimia organik. Peningkatan impor komoditi-komoditi tersebut sejalan dengan meningkatnya kegiatan dalam negeri dan ekspor. Dilihat dari pangannya, selama tahun 2011 impor didominasi oleh komoditi-komoditi yang berasal dari China sebesar 18,69 persen, diikuti oleh Jepang sebesar 14,14 persen, Amerika Serikat sebesar 7,81 persen, Singapura sebesar 7,64 persen, Thailand sebesar 7,51 persen, Korea Selatan 5,44 persen, dan Malaysia sebesar 4,22 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 10. Perbandingan Eksport Impor Tahun 2010 dan 2011

Nilai tukar rupiah

Nilai tukar Rupiah pada semester I 2011 mengalami apresiasi terkait dengan melimpahnya ekses likuiditas global dan masih menariknya imbal rupiah. Namun pada semester II, apresiasi rupiah tersebut tertahan oleh meningkatnya kebutuhan valas di dalam negeri dan imbas meningkatnya risiko global sebagai akumulasi oleh berlanutnya krisis utang di Eropa, dan melambatnya perkembangan Amerika Serikat. Selama tahun 2011, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp 8.742/USD, atau menguat 3,84 persen dibandingkan dengan rata-rata tahun 2010 sebesar Rp 8.078/USD. Untuk menjaga keseimbangan pasar domestik, Bank Indonesia terus memonitor perkembangan nilai tukar Rupiah dan memastikan kecukupan likuiditas Rupiah dan valas. Membaiknya fundamental ekonomi serta meningkatnya kepercayaan investor global telah memberikan sentimen positif terhadap penguatan rupiah dan inflasi dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 11. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Tahun 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**Boks 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Pasal 23B Amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23B Undang Undang Dasar 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri walaupun pengaturan mata uang pernah diatur dalam UUDS tahun 1950. Terkait Mata Uang, diatur tersebut dalam berbagai aturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Negara dengan sistem bank sentral yang independen, penandatanganan mata uang umumnya dilakukan oleh bank sentral bersama dengan pemerintah. Indonesia menerapkan sistem perekonomian dimana Bank Sentral bersifat independen, sehingga penandatanganan mata uang dilakukan bersama antara Pemerintah dengan Bank Sentral.. Kemudian penyebarluasan Republik Indonesia dan penggunaan lambang Negara Indonesia pada Mata Uang, sepatutnya Pemerintah sebagai wakil negara turut menandatangani Mata Uang.

RUU tentang Mata Uang disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 3 Mei 2011. UU Nomor 7 Tentang Mata Uang mengatur bahwa BI perlu berkoordinasi dengan Pemerintah dalam perencanaan, pencetakan dan pemusnahan Rupiah. Namun aturan pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan Rupiah akan tetap menjadi otoritas penuh Bank Indonesia, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan Rupiah, BPK melakukan audit secara periodik paling tidak satu kali dalam satu tahun. Keberadaan UU ini tidak akan memangkas kewajiban utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, misalnya terkait pelemahan atau penguatannya. UU tentang Mata Uang juga mengatur bahwa pemberantasan Rupiah palsu akan dilakukan oleh sebuah badan tersendiri. Badan tersebut terdiri atas unsur Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Pengaturan macam dan harga mata uang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh Negara. Penggunaan Rupiah dalam UU ini pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan mengajak orang/badan menggunakan Rupiah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan martabat bangsa di tingkat nasional maupun internasional.

Sumber: NK RAPBN 2012

Boks 3. Tax Holiday 2011

Kebijakan pemerintah mengenai pemberian *tax holiday* yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 telah ditunggu oleh investor potensial. Fasilitas ini terbatas untuk investasi industri-industri 'pionir' yang meliputi industri metal dasar, industri refinerasi minyak dan turumannya, industri mesin, industri sumber daya yang terbarukan, serta industri peralatan telekomunikasi.

Kebijakan ini ditujukan untuk perusahaan yang telah didirikan setelah tanggal 15 Agustus 2010

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

{satu tahun sebelum kebijakan ini dikeluarkan} dan total investasi harus melebihi Rp1 triliun dan disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Minimum 10 persen dari investasi ini harus didepositokan di bank di Indonesia dan tidak ditarik sampai produksi secara komersial dimulai.

Adapun fasilitas yang diberikan adalah:

1. Dikecualikan dari pajak penghasilan untuk perusahaan antara 5 sampai dengan 10 tahun sejak produksi secara komersial dimulai.
2. Tambahan insentif akan diberikan selama 2 tahun setelah berakhirnya masa pertama pemberian *tax holiday* dalam bentuk pengurangan 50% pajak penghasilan untuk perusahaan.

Ruang lingkup dari insentif ini dapat diperluas untuk industri lain dan waktu untuk insentif ini masih dapat diperpanjang.

Koadaan domestik dan laju investasi

Kinerja investasi selama tahun 2011 dipertahankan dengan iklim investasi yang kondusif, kuatnya fundamental perekonomian dan optimisme pelaku usaha. Pencapaian tersebut juga didukung oleh makin baiknya pelayanan investasi di daerah dengan semakin banyaknya Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang telah diimplementasikan oleh berbagai pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta koordinasi pusat dan daerah yang semakin baik. Kemajuan implementasi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) secara umum memberikan optimisme terhadap kinerja perekonomian domestik ke depan. Implementasi proyek-proyek besar juga memberikan stimulus bagi perekonomian daerah di tengah risiko rambatan dari tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Berbagai proyek infrastruktur, khususnya terkait transportasi, yang telah diinisiasi pada tahun 2011 menunjukkan kuatnya komitmen terhadap pembangunan konektivitas.

Peningkatan realisasi investasi tersebut disamping peningkatan penanaman modal dalam negeri dan pemerataan sebaran wilayah koridor ekonomi juga terdapat hilirisasi atau pengembangan nilai tambah dari kugiran investasi seperti sektor perlakuan dan perlambungan.

Di kuartal keempat tahun 2011, Indonesia mendapatkan *Investment grade* dengan rating BBB- dari *Fitch Rating* yang naik satu peringkat dari sebelumnya BB+, lebih cepat dari ekspektasi. Di awal tahun 2012, lembaga rating lainnya, yaitu *Moodys rating*, mensikan rating Indonesia dari BAA menjadi BAA3. Kenaikan *Investment grade* ini membuat risiko investasi berkurang dan semakin memikat investor asing ke pasar Indonesia. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus mencapai tingkat perlumbuhan ekonomi yang masih tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain didasarkan pada kinerja perekonomian dan likuiditas eksternal yang lebih kuat, hal ini didukung oleh rasio utang publik yang rendah dengan tren yang turun menurun serta kebijakan makro yang berhati-hati. Dengan peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi *Investment Grade* akan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia dalam menghadapi gejolak perekonomian global.

Selain itu, kinerja investasi didukung juga oleh sumber pembiayaan. Di tahun 2011, kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jenis kredit lainnya. Sebagai sumber pembiayaan investasi, masih didukung oleh modal sendiri dan penyisihan laba yang memberikan kontribusi sebesar 65,2 persen. Pertumbuhan investasi masih didominasi oleh investasi bangunan, investasi mesin, dan investasi alat angkut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**Indeks Harga Saham Gabungan**

Fundamental makro ekonomi yang kuat berdampak positif terhadap perkembangan pasar saham domestik dan tercapainya *investment grade* juga menciptakan optimisme di pasar saham. Arus modal asing yang masuk ke pasar finansial baik ke pasar saham maupun pasar obligasi terus mengalami peningkatan secara persisten. Kinerja pasar saham domestik mampu tumbuh positif meskipun pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) diwarnai oleh beberapa gejolak akibat dari peningkatan risiko eksternal. Kinerja positif IHSG ini terutama selain didukung oleh kondisi makro ekonomi yang kondusif juga didorong oleh kinerja emiten yang stabil serta kebijakan perekonomian yang akomodatif. IHSG pada akhir tahun 2011 ditutup pada level 3.822, meningkat 3,2 persen dari posisi tahun sebelumnya sebesar 3.704. Pencapaian tersebut menempatkan IHSG pada level yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja indeks di negara kawasan setelah Filipina (4,1%).

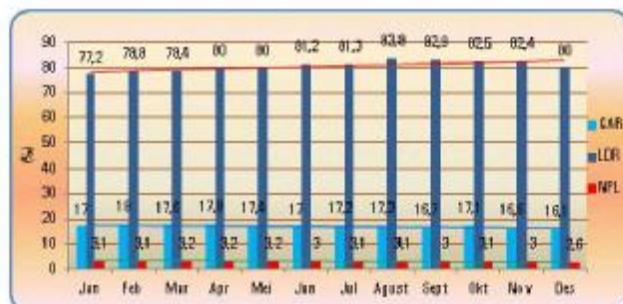


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 12. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2011**Kinerja perbankan**

Meskipun terjadi risik di pasar global, stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dan industri perbankan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Hal ini tercerminkan dari tingginya rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) perbankan yang mencapai 16,1 persen pada Desember 2011 dengan rata-rata sebesar 17,25 persen. Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) per Desember 2011 mencapai 80,0 persen dengan rata-rata sebesar 80,77 persen, angka ini lebih baik apabila dibandingkan pencapaian tahun 2010 sebesar 77,16 persen. Kemudian untuk rasio kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) terkendali di bawah 5,0 persen yakni berada di kisaran 3,0 persen sampai dengan 3,2 persen dan pada Desember 2011 berada pada level 2,6 persen dengan rata-rata 3,1 persen. Angka ini lebih baik apabila dibandingkan dengan NPL tahun 2010 yang berada di kisaran 2,9 persen sampai dengan 4,0 persen dan pada Desember 2010 berada pada level 2,9 persen dengan rata-rata 3,51 persen. Sementara itu, intermediasi perbankan juga semakin membaik, tercerminkan dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Desember 2011 angka pertumbuhan kredit berada pada level 24,5 persen (yoy), lebih besar dari pertumbuhan tahun sebelumnya (22,8 persen). Sampai dengan Desember 2011, kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 33,2% (yoy), 21,4% (yoy), dan 24,1% (yoy). Meningkatnya kredit perbankan ini sejalan dengan menurunnya suku bunga kredit modal kerja (KMK) turun menjadi 12,16 persen, kredit investasi (KI) turun menjadi 12,04 persen, dan kredit konsumsi turun menjadi 14,15 persen.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 13. Tren CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2011

Neraca Pembayaran Indonesia

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) selama tahun 2011 masih mencatat surplus yang cukup besar meski menghadapi tekanan pada semester kedua. Tekanan tersebut terutama terjadi pada transaksi modal dan finansial seiring dengan masih terjadinya ketidakpastian pasar keuangan dan ekonomi global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami deficit di akhir triwulan ketiga yang lebih banyak disebabkan oleh imbas negatif dari pasar utang di Eropa yang memicu sebagian investor asing keluar dari pasar saham dan surat utang negara. Peningkatan volume impor di triwulan terakhir 2011 menambah tekanan terhadap neraca. Akan tetapi kenaikan peringkat Indonesia menjadi *investment grade* dan prospek ekonomi Indonesia yang cukup kuat, turut membanjirkan keluaranya dana asing jangka pendek dan masih meningkatnya aliran FDI (*Foreign Direct Investment*) di triwulan terakhir 2011. Di sisi lain, minat investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi langsung dan pemberian kredit kepada sektor swasta masih tetap tinggi. Level arus masuk modal langsung yang cukup tinggi mampu menahan laju penurunan kinerja transaksi modal dan finansial menjadi tidak terlalu dalam.



Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 14. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan 2009-2011

Cadangan devisa di akhir tahun setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah

Kinerja perekonomian yang cukup kuat telah menjadi salah satu pendorong kepercayaan investor asing dan derasnya aliran dana internasional ke pasar domestik. Derasnya arus modal asing masuk ke Indonesia baik investasi portofolio maupun FDI, telah mampu meningkatkan posisi cadangan devisa Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2011, cadangan devisa mencapai USD110,1 miliar atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Cadangan devisa ini secara nominal naik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar USD96,2 miliar walaupun menurun dari nominal cadangan devisa pada akhir semester pertama

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

2011 sebesar USD119,66 miliar. Cadangan devisa yang dimiliki tersebut sebagian besar berbentuk surat-surat berharga (*securities*) dan sisanya ditempatkan dalam bentuk *currency and deposits, monetary gold and special drawing rights*.



Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia

Grafik 15. Cadangan Devisa Triwulanan 2009-2011

Lifting minyak

Meskipun produksi minyak meningkat setelah selesainya perbaikan beberapa sumur produksi yang sebelumnya mengalami gangguan seperti pada ladang minyak Belisa – Conoco Philips, West Madura – Pertamina EP, dan Blok Mahakam, realisasi lifting minyak mentah Indonesia dalam tahun 2011 sebesar 898 ribu barel per hari, lebih rendah dari target APBN-P 2011 sebesar 945 ribu barel per hari dan juga lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 954 ribu barel per hari. Penyebab utama tidak tercapainya target lifting dikarenakan antara lain karena penghentian produksi secara tidak terduga (*unplanned shutdown*), penurunan kinerja sumur secara alamiah, serta belum beroperasi sepenuhnya blok migas Cepu seperti yang diharapkan.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak internasional pada awal tahun 2011 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2010. [2] Realisasi harga minyak mentah Indonesia dalam tahun 2011 rata-rata mencapai USD111,5/barel, lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar USD95,0/barel dan rata-rata harga minyak mentah Indonesia tahun 2010 yang sebesar USD79,4 per barel. Harga rata-rata ICP di bulan April 2011 mencapai angka tertinggi yaitu USD123,36/barel dan terendah di bulan Januari 2011 sebesar USD97,09/barel. Walaupun lifting minyak tidak dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, peningkatan ICP ini mendukung penerimaan pajak penghasilan migas di tahun 2011.

Rasio utang terhadap PDB

Indikator penguatan perekonomian domestik yang lain juga ditunjukkan oleh pengendalian rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2011 sebesar 24,6 persen. Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 26 persen dan tahun 2009 sebesar 28 persen. Angka rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun yang turut membangun kesiambungan fiskal.

Tema RKP 2011 dan percapatan prioritas pembangunan nasional

APBN 2011 yang disusun sepenuhnya berdasarkan RPJM 2010-2014 dan RKP 2011 menjadi lebih bermakna dikarenakan melanjutkan pelaksanaan reformasi gelombang kedua seiring dengan masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

RKP 2011 disusun dengan tujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang, dengan menekankan pada peringkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, peringkatkan daya saing perekonomian, serta visi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

mis, agenda, dan prioritas pembangunan. Berkaitan dengan itu, RKP 2011 menetapkan tema "Percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan didukung oleh pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah".

Terkait tema dimaksud, RKP 2011 menetapkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan sebagai landasan operasional yaitu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintah yang baik, dan gender. Sejalan dengan itu ditetapkan juga sebelas prioritas pembangunan nasional yang meliputi (1) reformasi birokrasi dan tata kelola, (2) pendidikan, (3) kesehatan dan kependudukan, (4) penanggulangan kemiskinan, (5) ketahanan pangan, (6) infrastruktur, (7) iklim investasi dan iklim usaha, (8) energi, (9) lingkungan hidup, (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik, serta (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2011 diarahkan terutama untuk mendukung kejalan ekonomi nasional dengan total fokus kepada tiga sasaran utama yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (*pro growth*), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro job*), dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*). Tiga pilar pemhangunan tersebut menjadi strategi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang mampu memfasilitasi pertumbuhan sektor riil sekaligus manajemen pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan upaya untuk mencapai keseimbangan fiskal ditempuh melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja negara, pengelolaan defisit anggaran melalui pembiayaan yang *non budgetable*, serta penurunan rasio utang secara bertahap.

Berberapa point penting dari strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi 2011 dilakukan melalui: (1) peringkatkan daya tarik investasi, (2) peningkatan daya saing ekspor, (3) revitalisasi industri manufaktur (4) revitalisasi perikanan, perikanan dan kehutanan, (5) peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, dan (6) peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif. (7) Selain dari itu Pemerintah menyusun Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan harapan akan menjaga sektor riil tetap tumbuh.

Boks 4. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Pemerintah bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan "*Not Business as Usual*", dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang kongkrit dan terukur. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan adanya MP3EI, diharapkan Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan, terutama mendorong nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek.

MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. MP3EI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) karena merupakan komitmen nasional yang berkaitan dengan perubahan iklim global.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

MP3EI menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif. Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, MP3EI mengembangkan tiga strategi utama yaitu strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, strategi memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara local dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*) serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Terkait penguatan konektivitas nasional, terdapat tiga prinsip. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter-modal supply chain system* yang menghubungkan *hinterland* dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Konektivitas nasional yang lemah bukan hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga akan melemahkan daya saing, yang pada akhirnya menyebabkan penanggulangan kemiskinan berjalan relatif lambat. Penguatan konektivitas nasional diselenggarakan sejalan dengan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada, maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Sehingga kedepannya di setiap wilayah akan dikembangkan produk yang menjadi unggulan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, sebanyak 94 proyek kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur telah diground breaking dengan nilai Rp. 490,5 triliun dan 22 peraturan yang sudah diperbaiki. Implementasi MP3EI direncanakan untuk dilaksanakan di dalam tiga fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:

Fase 1 (2011 – 2015), kegiatan difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI. Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada pelaksanaan berbagai rencana aksi yang harus diselesaikan hingga 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategik dapat terlaksana serta menjadi dasar bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada fase-fase berikutnya.

Fase 2 (2016-2020), kegiatan akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah.

Fase 3 (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Bappenas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

RKP, Kemiskinan dan Pengangguran

Ketiga pilar pembangunan ini (*pro growth, pro job* dan *pro poor*) merupakan pendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan banyak kesempatan kerja sehingga makin banyak keluarga Indonesia yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan keluar dari kemiskinan. Di tahun 2011 Pemerintah terus berupaya melakukan akelerasi perekonomian melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan program-program perbaikan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa untuk tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 29,89 juta orang (12,36 persen dari total penduduk). Angka ini menurun dibandingkan dengan angka di tahun 2010 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 31,02 juta orang (13,33 persen dari total penduduk). Penurunan ini didukung oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin di desa dari 19,93 juta di tahun 2010 menjadi 18,87 juta di tahun 2011. Hal ini menunjukkan berhasilnya program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara bertahap, terutama di pedesaan. Penurunan penduduk miskin di pedesaan tersebut berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat pedesaan sebagai tanda terlihat dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Indeks NTP menunjukkan daya tukar dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP meningkat dari 102,75 pada tahun 2010 menjadi 105,75 pada Desember 2011.

Dalam hal program pengurangan pengangguran, prosentase tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,14 persen (8,32 juta orang) di periode Agustus 2010 menjadi 6,56 persen (7,70 juta orang) pada periode yang sama di 2011. Tingkat pengangguran ini jauh berkurang dari presentase tingkat pengangguran terbuka di tahun 2007 (9,11 persen).

KOMPOSISI REALISASI APBN TAHUN ANGGARAN 2011

Realisasi konsumsi pemerintah di tahun 2011 tercapai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sampai dengan akhir Desember 2011, belanja pemerintah mencapai 98,05 persen lebih tinggi dari pernyataan di tahun 2010 sebesar 92,5 persen. Belanja mengikat seperti honoraria pegawai, subsidi, dan pembayaran bunga tulung memperlihatkan daya serap yang tinggi. Di tahun 2011, belum tiskul dalam bentuk subsidi melebihi pagu anggaran, hal ini disebabkan oleh peningkatan harga ICP dan peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi akibat belum diterapkannya pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi. Secara nominal, total realisasi belanja pemerintah mencapai Rp1.295 triliun, lebih tinggi 24,26 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp1.042,1 triliun.

Sedangkan untuk defisit anggaran, yang dalam APBN-P 2011 ditetapkan sebesar Rp150,8 triliun (2,08 persen terhadap PDB), realisasinya mencapai Rp84,40 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Lebih rendahnya realisasi defisit anggaran dalam pelaksanaan APBN-P 2011 tersebut terutama berkaitan dengan leluampauanya target pendapatan negara dan hibah, dan realisasi belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pegunya.

1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pembangunan Pendapatan Negara dan Hibah

Dalam tahun 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.210,60 triliun atau 103,48 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,91 triliun. Jumlah ini berarti mengalami kenaikan Rp215,3 triliun (21,64 persen) dari realisasi 2010 sebesar Rp995,27 triliun.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2011) pendapatan negara dan hibah cenderung mengalami peningkatan (lihat tabel 1). Kecuali tahun 2009 yang mengalami perlambatan,

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

peningkatan tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi yang baik selama 5 tahun terakhir dan didukung oleh pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,7 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 38,68 persen sebelum mengalami penurunan 13,53 persen di tahun berikutnya.

**Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2007 – 2011
(triliun Rupiah)**

Urutan	2007		2008		2009		2010		2011	
	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real
Pendapatan Negara Dan Hibah	694,08	707,81	884,99	881,60	871,00	848,76	992,40	985,27	1.168,81	1.210,60
1. Penerimaan Perpajakan	482,01	480,99	609,23	656,70	651,95	619,92	743,33	723,31	878,69	873,87
a. Pajak Dalam Negeri	474,55	470,05	580,25	622,36	631,83	601,25	720,76	684,39	831,74	819,75
b. Pajak Perdagangan Internasional	17,48	20,94	28,98	36,34	20,02	18,67	22,56	28,91	46,94	54,12
2. PNBP	198,25	215,12	282,81	320,60	218,04	227,17	247,18	268,94	286,66	331,47
a. Penerimaan SDA	115,05	132,99	192,79	224,48	138,85	138,98	164,72	168,83	191,98	219,82
b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	21,80	23,22	31,24	29,08	28,61	26,05	29,50	30,10	28,84	28,18
c. PNBP Lainnya	47,71	42,88	68,78	83,32	44,88	53,80	43,48	59,43	50,34	89,38
d. Pendapatan BLU	-	2,13	-	3,73	5,89	8,37	9,49	10,59	15,42	20,10
3. Hibah	3,82	1,70	2,95	2,30	1,01	1,67	1,90	3,02	4,66	5,25

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Peningkatan realisasi pendapatan negara terutama didorong oleh dipertahankannya pertumbuhan ekonomi nasional serta didukung oleh pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan perpajakan dalam negeri, perpajakan perdagangan internasional dan penerimaan sumber daya alam sebagai penyumbang pendapatan terbesar.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011

Di tahun 2011 perpajakan tetap menunjukkan sebagai kontributor utama realisasi pendapatan negara dan hibah. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp873,87 triliun (99,45 persen dari sasarannya APBN-P 2011 sebesar Rp878,69 triliun), atau naik sebesar Rp150,6 triliun (20,82 persen) dari realisasi 2010 sebesar Rp723,3 triliun.

Membaiknya kondisi perekonomian domestik yang didukung dengan penerapan beberapa kebijakan perpajakan serta kenaikan harga minyak mentah Indonesia (CPI) berdampak pada meningkatnya tingkat penerimaan negara. Dari sektor perpajakan semua komponen penerimaan mencatat perbaikan. PPh dan PPN mengalami peningkatan kinerja sejalan dengan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini didukung juga oleh penggalian potensi perpajakan baik melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan juga terjadi pada pajak perdagangan internasional yaitu bea masuk dan bea keluar seiring dengan kenaikan realisasi impor dan penyusuaian tarif bea masuk. Selain itu, meningkatnya rata-rata harga minyak mentah dari USD79,4 per barel pada tahun 2010 menjadi USD111,5 per barel pada tahun 2011 mendorong peningkatan pendapatan pajak penghasilan migas.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Kebijakan umum di bidang perpajakan

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pertumbuhan penerimaan perpajakan juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan perpajakan secara konsisten. Secara umum, kebijakan perpajakan ditujukan untuk optimalisasi penerimaan melalui upaya perbaikan sistem dan administrasi perpajakan, termasuk di dalamnya keabeanan dan cukai. Upaya perbaikan sistem dan administrasi perpajakan tersebut tersebut dilakukan melalui pelaksanaan: (1) reformasi di bidang administrasi; (2) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan; dan (3) reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan di tahun 2011, Pemerintah melanjutkan beberapa kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (a) penggalian potensi perpajakan, termasuk Sensus Pajak Nasional (SPN); (b) peningkatan kualitas pemeriksaan pajak; (c) penyempurnaan mekanisme atas keberatan dan banding dalam proses pengadilan pajak; (d) peningkatan pengawasan dan pekayuan di luar negeri; (e) perbaikan sistem informasi; (f) konsistensi pelaksanaan Road Map Cukai Hasil Tembakau; dan (g) pemberian insentif perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Dalam upaya mendukung dunia usaha dan sektor-sektor tertentu yang bersifat strategis, Pemerintah memberikan insentif berupa pajak ditanggung Pemerintah (DTP) atas PPh, PPN dan Bea masuk guna memudahkan investasi dan kegiatan dunia usaha serta stabilisasi harga di dalam negeri. Insentif PPh DTP di antaranya ditujukan untuk pengembangan usaha pertambangan dan untuk menarik investor asing yang akan berinvestasi pada obligasi Pemerintah. Sedangkan fasilitas PPN DTP ditujukan untuk menarik investasi di sektor eksplorasi migas, maupun untuk menunjang kebutuhan masyarakat terkait dengan pemberian fasilitas PPN DTP untuk BBM bersubsidi. Namun dalam perkembangannya, sesuai dengan rekomendasi BPK dan persetujuan DPR RI, pemberian fasilitas dalam bentuk PPN DTP diperlakukan sejak pertengahan tahun 2011. Sementara itu, insentif berupa bea masuk DTP diberikan untuk industri-industri yang mempunyai kriteria tertentu: (a) memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen; (b) meningkatkan daya saing; (c) meningkatkan penerapan tenaga kerja; dan (d) meningkatkan pendapatan negara.

Pada bulan Agustus 2011, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa tax holiday bagi industri pionir melalui pererbitan PMK Nomor 130/PMK.01/2011 dan pada bulan Desember 2011 Pemerintah juga menambahkan alternatif fasilitas pajak selain tax holiday dengan diterbitkannya PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Untuk mencegah dampak keruinaan hulu pangan yang terjadi sejak awal tahun, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan, di antaranya berupa kebijakan penyusutan 57 pos tarif bea masuk atas biji gandum, bahan baku ternak, pupuk, produk pangan dan bahan baku pangan menjadi nol persen. Selain itu dalam upaya meningkatkan daya saing dan melindungi industri dalam negeri, Pemerintah telah memberikan insentif bea masuk berupa penyusutan 190 pos tarif bea masuk atas bahan baku industri tertentu, jasa pelayaran, dan industri perfilman.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**Boks 5. Sensus Pajak Nasional**

Sensus Pajak adalah kegiatan penyisiran dan pencacahan terhadap potensi pajak (wajib pajak dan objek pajak) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka ekstensifikasi menjerang wajib pajak yang belum terdaftar dan objek pajak yang belum dipajakil serta intensifikasi (optimasi) pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajakil. Kegiatan Sensus Pajak ini merupakan perluasan/pengembangan ke arah yang lebih komprehensif dari kegiatan *canvassing* pajak yang telah dilakukan DJP selama ini.

LATAR BELAKANG

Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia (wajib pajak orang pribadi maupun badan) yang melaporkan SPT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan populasi orang pribadi maupun badan usaha.

HASIL YANG AKAN DICAPAI

1. Perluasas basis pajak (WP dan objek pajak).
2. Peningkatan penerimaan pajak.
3. Peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa.
4. Pemutakhiran dan pertukaran data WP.

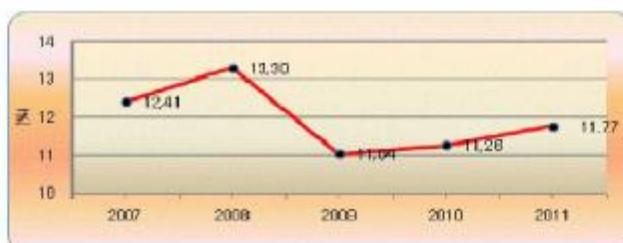
SASARAN

1. Yang belum ber-NPWP, diberikan NPWP.
2. Yang belum menyerahkan SPT, diimbau untuk menyerahkan SPT (membayar pajak).
3. Yang sudah membayar namun belum optimal, agar membayar sesuai dengan ketentuan.
4. Memperluas basis pemajakan (semua lapisan kelompok dan bidang usaha).

Tax ratio

Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) tahun 2011 mencapai 11,77 persen mengalami Peningkatan jika dibanding tahun 2010 sebesar 11,26 persen dan tahun 2009 sebesar 11,04 persen. Kenaikan *tax ratio* di tahun 2011 ini didukung oleh realisasi penerimaan PPh Non-migas mencapai Rp354,68 triliun atau 96,7 persen dari target APBN-P sebesar Rp366,75 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp298,17 triliun, kinerja penerimaan PPh Non-Migas tahun 2011 tersebut lebih tinggi sebesar Rp56,5 triliun (18,95 persen). Sedangkan untuk penerimaan PPn, realisasi mencapai Rp277,80 triliun atau 93,08 persen dari target APBN-P 2011 sebesar Rp298,44 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2010 sebesar Rp230,6 triliun, kinerja penerimaan PPn tahun 2011 tersebut berarti lebih tinggi sebesar Rp47,2 triliun (20,47 persen). Kenaikan *tax ratio* juga ditunjukkan oleh realisasi penerimaan cukai yang mencapai Rp77,01 triliun (113,1 persen dari target), pajak perdagangan internasional Rp54,12 triliun (115,3 persen dari target), PBB Rp29,89 triliun (102,6 persen dari target), dan pajak lainnya Rp3,9 triliun (93,8 persen dari target).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

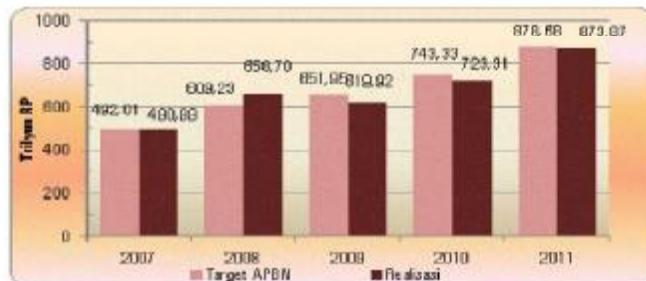


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 16. Tren Tax Ratio Tahun 2007-2011

Tren realisasi penerimaan perpajakan selama 5 tahun terakhir

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan perpajakan sangat mendominasi penerimaan negara walaupun jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan perpajakan, sedikit mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp873,87 triliun atau meningkat sebesar 77,98 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2007 yang sebesar Rp490,99 triliun. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2008 yaitu sebesar 108,12 persen akan tetapi pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi menjadi sebesar 95,09 persen. Di tahun 2010 terjadi sedikit peningkatan realisasi penerimaan perpajakan menjadi 97,3 persen, dan di tahun 2011 meningkat menjadi 99,45 persen. Target dan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2007-2011 dapat dilihat pada grafik 17.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 17. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2007-2011

Realisasi PNBP tahun 2011

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp331,47 triliun (115,67 persen dari dasaran APBN-P 2011 sebesar Rp286,57 triliun). Jumlah ini naik Rp62,5 triliun (23,25 persen) dari realisasi PNBP tahun 2010 sebesar Rp268,94 triliun. Pencapaian realisasi PNBP yang cukup signifikan tersebut, terutama berkaitan dengan terlampauiya dasaran hampir semua jenis PNBP, baik yang berasal dari sumber daya alam (SDA) migas dan non-migas, maupun PNBP lainnya.

Nilai realisasi PNBP tahun 2011 tersebut berasal dari realisasi penerimaan SDA sebesar Rp213,82 triliun yang merupakan sumber utama penerimaan PNBP, realisasi penerimaan laba BUMN senilai Rp28,18 triliun, realisasi PNBP lainnya sebesar Rp69,37 triliun dan realisasi

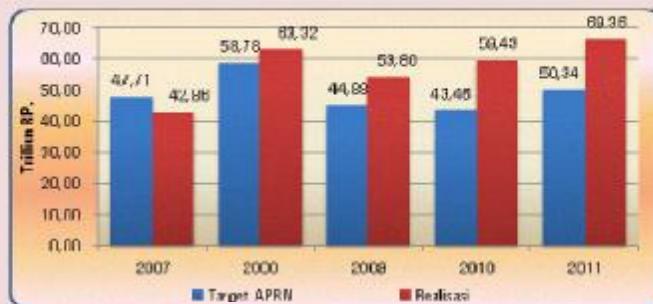
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

pendapatan BLU sebesar Rp20,10 triliun.

Realisasi PNBP tersebut adalah hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah di bidang PNBP tahun 2011 diantaranya (1) peningkatan sumber daya alam yang didukung insentif fiskal; (2) pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif; (3) meningkatkan fungsi pelayanan pada PNBP K/L; dan (4) melakukan penyempurnaan peraturan mengenai tarif PNBP pada K/L (dihat tabel 1).

Boks 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2007, pada umumnya PNBP lainnya cenderung berfluktuasi (lihat Grafik 18). Tren peningkatan semenjak tahun 2009 mencerminkan kontribusi keberhasilan kebijakan-kebijakan Pemerintah menyangkut PNBP, juga mengindikasikan masih terdapatnya potensi PNBP lainnya yang dapat terus ditingkatkan.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 18. Realisasi PNBP Lainnya tahun 2007-2011

PNBP lainnya terdiri atas: (1) pendapatan penjualan dan sewa; (2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (7) pendapatan iuran dan denda; dan (8) pendapatan lain-lain. Pengelolaan atas sumber PNBP lainnya tersebut dilaksanakan oleh K/L terkait, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi PNBP lainnya dari K/L antara lain: (1) jumlah objek pengenaan PNBP; (2) tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah; (3) kualitas pelayanan yang diberikan dan administrasi pengelolaan PNBP yang secara tidak langsung meningkatkan jumlah objek pengenaan; dan (4) upaya optimalisasi yang dapat dilakukan, melalui peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Selama tahun 2007-2011, PNBP lainnya, yang sebagian besar merupakan bagian dari kelompok penerimaan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,97 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 47,73 persen. Selama kurun waktu tersebut, secara khusus Pemerintah melakukan optimalisasi PNBP lainnya melalui (1) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing K/L; (2) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP pada K/L; dan (3) peningkatan akurasi target dan penyusunan pagu penggunaan PNBP dari K/L yang realistik serta

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

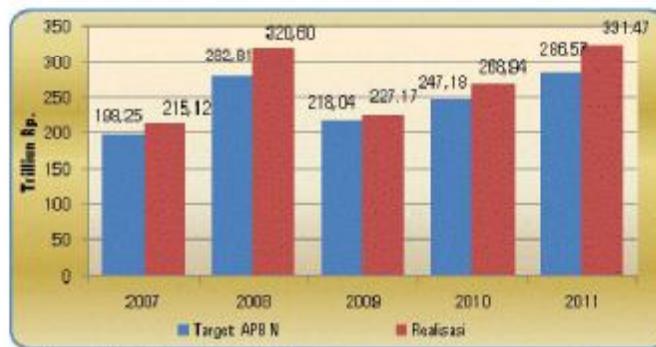
pelaporannya.

Di tahun 2011 target PNBP lainnya yang tercantum dalam APBN-P tahun 2011 sejumlah Rp60,34 triliun dengan realisasi senilai Rp69,36 triliun (137,8 persen). Realisasi PNBP lainnya pada tahun 2011 ini didominasi oleh realisasi pendapatan jasa yang mencapai Rp26,63 triliun, pendapatan penjualan dan sewa yang mencapai Rp21,65 triliun, pendapatan bunga sebesar Rp4,8 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp11,56 triliun. Keempat sumber penerimaan PNBP lainnya ini berkontribusi sebesar 93,34 persen dari total penerimaan PNBP lainnya.

Sumber : *Nota Keuangan RAPBN 2011 dan 2012/Kementerian Keuangan*

Tren realisasi PNBP selama 5 tahun terakhir

Dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan PNBP, selama tahun 2007-2011 secara umum realisasi penerimaan PNBP melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan PNBP meningkat menjadi 108,51 persen dari pagu sebesar Rp198,25 triliun. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2008 yaitu sebesar 113,36 persen dari pagu sebesar Rp282,81 triliun, sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi penerimaan PNBP menjadi sebesar 104,19 persen dari pagu sebesar Rp218,04 triliun. Kemudian untuk tahun 2010 realisasi penerimaan PNBP kembali meningkat menjadi 108,80 persen dari pagu sebesar Rp247,18 triliun. Sedangkan pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 115,67 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp331,47 triliun. Sebagai kontributor terbesar untuk penerimaan PNBP, SDA migas menjadi faktor penting yang menentukan naik turunnya penerimaan PNBP. Tren peningkatan SDA migas tersebut dipengaruhi oleh perkembangan beberapa faktor, seperti (a) jumlah rata-rata lifting minyak bumi harian, (b) peningkatan ICP, dan (c) penguatan nilai rupiah.



Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan*

Grafik 19. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2007-2011

Realisasi hibah tahun 2011

Komitmen akan kesediaan negara atau lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia adalah penentu besarnya penerimaan hibah. Di samping itu penerimaan hibah harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Indonesia dengan pihak donor. Realisasi penerimaan hibah di tahun 2011 mencapai Rp5,25 triliun yang berarti mencapai 112,6 persen dari sasaran APBN-P 2011 sebesar Rp4,66 triliun, atau naik 73,8 persen dari realisasi hibah tahun 2010 sebesar Rp3,0 triliun. Lebih tingginya realisasi penerimaan hibah juga dikarenakan semakin baiknya mekanisme pelaporan dan pengesahan hibah-hibah langsung kepada KIL.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)*Tren realisasi penerimaan hibah 2007-2011*

Selama tahun 2007-2011 realisasi penerimaan hibah secara nominal dan tingkat pencapaian targetnya mengalami fluktuasi. Setelah realisasi turun menjadi Rp1,70 triliun (44,50 persen di tahun 2007, realisasi hibah meningkat menjadi Rp2,30 triliun (77,97 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan hibah kembali mengalami penurunan menjadi Rp1,67 triliun (165,35 persen), dan naik kembali pada 2010 menjadi sebesar Rp3,02 triliun (158,95 persen) selanjutnya di tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi Rp5,25 triliun (112,66 persen). Di samping komitmen dari pemberi bantuan terutama terkait perubahan iklim (*climate change*), faktor yang mendorong meningkatnya realisasi penerimaan hibah antara lain bersumber dari penerapan kebijakan Pemerintah tentang sistem akuntansi hibah yang wajibkan semua penerimaan hibah dicatat dalam APBN.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan
Grafik 20. Target dan Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2007-2011

2. BELANJA NEGARA*Hubungan belanja negara dengan kondisi eksternal*

Target maupun realisasi belanja negara memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Kecenderungan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang terkait dengan ekonomi makro seperti harga minyak mentah (ICP), nilai tukar Rupiah, dan perkembangan tingkat suku bunga, juga banyak ditentukan oleh kebijakan di bidang pembelanjaan yang diambil oleh Pemerintah. Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi, Pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat eksansif dengan meningkatkan volume belanja khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, agar mampu berperan dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomi makro. Sedangkan dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat tingginya permintaan agregat, Pemerintah akan meluncurkan kebijakan kontraktif yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sangat berperan dalam stabilisasi bagi perekonomian atau menjadi *counter cyclical* yang efektif dalam meredam gejolak ekonomi.

Realisasi belanja negara tahun 2011

Dalam tahun 2011, realisasi belanja negara mencapai Rp1.295,00 triliun, atau 98,05 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,75 triliun. Jumlah tersebut naik Rp252,9 triliun atau 24,26 persen dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp1.042,12 triliun.

Belanja Pemerintah menurut organisasi

Belanja Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh masing-masing K/L yang merupakan entitas pengelola anggaran Pemerintah. Eksekusi belanja Pemerintah pusat menurut organisasi tersebut

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

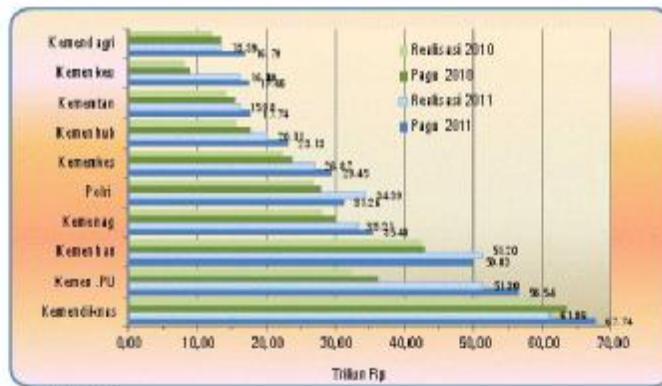
10 K/L yang memiliki alokasi anggaran belanja terbesar dalam APBN-P tahun 2011

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Sesuai dengan prinsip *let the managers manage*, setelah reformasi manajemen keuangan negara, setiap K/L bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi anggaran belanja yang dikelola.

Dalam melaksanakan ketiga pilar pembangunan (*pro growth, pro job dan pro poor*) dan melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan, anggaran dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga. Adapun sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar adalah:

- 1). Kementerian Pendidikan Nasional alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp67,74 triliun – (14,68 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,14 persen atau Rp61,06 triliun
- 2). Kementerian Pekerjaan Umum alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp56,54 triliun (12,25 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,73 persen atau Rp51,30 triliun
- 3). Kementerian Pertahanan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp50,03 triliun (10,84 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 102,34 persen atau Rp51,20 triliun
- 4). Kementerian Agama alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp35,40 triliun (7,67 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 93,81 persen atau Rp33,21 triliun
- 5). Kepolisian Negara Republik Indonesia alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp31,26 triliun (6,77 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 110,01 persen atau Rp34,39 triliun
- 6). Kementerian Kesehatan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp28,43 triliun (6,38 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 91,24 persen atau Rp26,67 triliun
- 7). Kementerian Perhubungan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp23,13 triliun (5,01 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 86,94 persen atau Rp20,11 triliun
- 8). Kementerian Pertanian alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp17,74 triliun (3,78 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,08 persen atau Rp16,98 triliun
- 9). Kementerian Keuangan alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp17,46 triliun (3,84 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 82,21 persen atau Rp14,11 triliun
- 10). Kementerian Dalam Negeri alokasi anggaran pada APBN 2011 sebesar Rp16,79 triliun (3,63 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 79,75 persen atau Rp13,39 triliun.

Kementerian Perkebunan Nasional tetap merupakan kementerian yang memperoleh alokasi anggaran terbesar, walaupun untuk peringkat kedua diduduki oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah di tahun sebelumnya ada di peringkat ketiga setelah Kementerian Pertahanan. Grafik K/L yang menerima alokasi anggaran belanja terbesar menurut organisasi dapat dilihat pada grafik 21.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Sumber: LIKI

Grafik 21. KJL Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar

Realisasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi

Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp883,72 triliun, atau secara nominal naik sebesar Rp186,3 triliun (26,7 persen) dari realisasi 2010 sebesar Rp697,4 triliun. Realisasi tersebut menunjukkan daya serap anggaran sebesar 97,30 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp808,2 triliun. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp175,74 triliun (95,46 persen dari target) (lihat grafik 22). Sedangkan realisasi belanja barang Rp124,64 triliun (87,57 persen dari pagu). Realisasi belanja modal Rp117,85 triliun (81,52 persen dari pagu), lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2010 (84,5 persen terhadap pagu). Hal ini antara lain berkaitan dengan kebijakan optimalisasi dan efisiensi terhadap pembangunan gedung kantor; rendahnya realisasi penyerapan pinjaman luar negeri dan adanya reorganisasi di beberapa KJL.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 22 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2011 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Sedangkan realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp93,26 triliun (87,5 persen dari pagu) antara lain berkaitan dengan lebih rendahnya tingkat bunga SPN 3 bulan, penghematan beban bunga akibat pengurangan target penerbitan SBN dan lebih rendahnya penarikan pinjaman luar negeri.

Terkait subsidi, realisasi subsidi mencapai Rp295,36 triliun (123,86 persen dari pagu) atau naik Rp102,7 triliun dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp192,7 triliun, terutama berkaitan dengan lebih tingginya beban subsidi listrik dan subsidi BBM serta subsidi pangan. Hal ini terutama

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

disebabkan oleh lebih tingginya realisasi ICP (USD111,6 per barel) dibandingkan dengan asumsi APBN-P 2011 (USD95,0 per barel), tidak terpenuhinya rencana penggunaan energi input subsidi listrik dan adanya tambahan raskin ke-13.

Realisasi bantuan sosial mencapai Rp71,10 triliun (91,79 persen dari pagu) terutama berkaitan dengan tidak terealisasinya kegiatan PNPM mandiri dan pembatalan kegiatan yang tidak prioritas. Sedangkan realisasi belanja lain-lain mencapai Rp5,47 triliun (38,21 persen terhadap pagu), lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp21,7 triliun (65,8 persen terhadap pagu). Hal ini antara lain berkaitan dengan tidak terserapnya cadangan anggaran risiko fiskal, lebih rendahnya penyerapan cadangan anggaran keperluan mendesak dan belanja penunjang serta dilakukannya realokasi anggaran dari bagian anggaran (BA) belanja lainnya ke BA belanja subsidi dan BA KJL.

Secara persentase, kontribusi belanja Pemerintah Pusat terbesar berdasarkan klasifikasi ekonomi selama tahun 2011 adalah realisasi belanja subsidi sebesar 33,42 persen (lebih besar dibandingkan proporsi di tahun 2010 sebesar 27,63 persen) diikuti oleh realisasi belanja pegawai sebesar 19,89 persen, diikuti dengan belanja barang sebesar 14,10 persen, belanja modal sebesar 13,34 persen. Sedangkan belanja pembayaran bunga utang sebesar 10,55 persen, belanja bantuan sosial sebesar 8,05 persen, belanja lain-lain sebesar 0,62 persen dan belanja hibah 0,03 persen dari total belanja. Persentase belanja lain-lain semakin berkurang dari 3,11 persen di tahun sebelumnya menjadi 0,62 persen dikarenakan antara lain banyaknya belanja lainnya yang dapat reklassifikasi.

Tren realisasi belanja berdasarkan jenis belanja selama 5 tahun terakhir

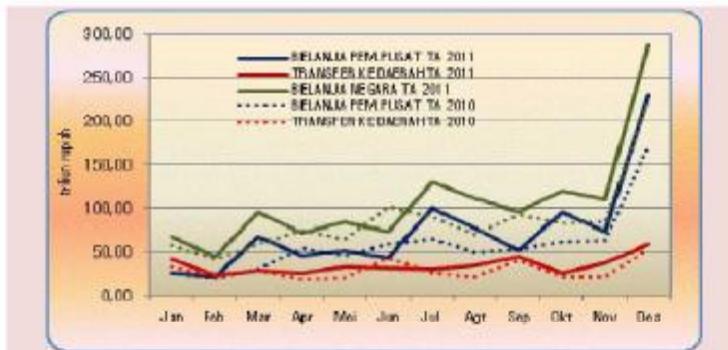
Sejak tahun 2007, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja bersifat mengikat, yakni belanja pegawai, transfer ke daerah, subsidi, dan pembayaran bunga, rata-rata mencapai 73,55 persen dari total belanja Pemerintah Pusat. Di tahun 2011 khususnya belanja mengikat tersebut mencapai 75,34 persen dari total belanja Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya merupakan realisasi belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lain-lain. Besarnya kontribusi realisasi belanja dimaksud menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, belanja Pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengeluaran-pengeluaran yang bersifat belum mengikat terbatas. Dengan keterbatasan dimaksud Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan *quality of spending* agar tepat sasaran dan juga memperluas ruang gerak (*fiscal space*) Pemerintah dalam rangka melakukan intervensi fiskal, yang antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara.

Boks 7. Tren Penyerapan Anggaran Belanja TA 2011

Kecenderungan peningkatan belanja Pemerintah dari tahun ke tahun memiliki implikasi terhadap makro ekonomi yakni pada sektor riil yang berpengaruh pada konsumsi, investasi dan pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seharusnya dibarengi dengan pola penyerapan dana yang responsif terkait peran APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Fenomena kecenderungan penyerapan anggaran tereskalsasi pada akhir tahun menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran. Salah satu kendala yang ditengarai menjadi penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja negara adalah kesiapan KIL dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta kesiapan dalam menyediakan berbagai dokumen pencairan.

Mencermati hal tersebut Pemerintah berupaya terus memperbaiki tren pencairan dana yang antara lain dilakukan melalui percepatan proses kerja dalam area pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja KJL.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 23. Trend Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2010

Dari grafik di atas belanja negara yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah memperlihatkan pergerakan secara perlahan pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli, selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan September dan meningkat tajam kembali dari bulan November dengan nilai realisasi tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp290,643 triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp107,92 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 24. Trend Belanja Pegawai Bulanan TA 2011

Belanja pegawai pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp175,74 triliun atau 95,46 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp184,09 triliun, secara nominal meningkat sebesar Rp27,7 triliun atau 18,68 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp148,08 triliun. Hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi belanja pegawai tahun 2011 di antaranya adalah adanya penghematan cadangan anggaran pegawai baru, honorarium dan vakasi, serta belum terserapnya anggaran remunerasi K/L. Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2011 tren belanja pegawai berfluktuasi tipis dengan nominal yang hampir sama, dan pada bulan Juli dan Agustus 2011 mengalami peningkatan cukup tajam yang dipengaruhi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara serta pembayaran gaji bulan September dilakukan di bulan Agustus dikarenakan libur cuti bersama terkait hari raya dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp23,22 triliun dan 21,64 triliun. Selanjutnya dari bulan Oktober sampai Desember tingkat serapan cenderung mendatar atau

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

meningkat tipis. Secara umum tren ini tidak jauh berbeda dengan tren tahun sebelumnya.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 25. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2011

Pagu belanja barang pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp142,34 triliun atau meningkat sebesar Rp29,75 triliun atau 26,42 persen dibanding pagu tahun 2010 sebesar Rp112,59 triliun. Belanja barang terealisasi sebesar Rp124,64 triliun atau 87,57 persen dari pagu, yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yang terealisasi sebesar Rp97,60 triliun. Adapun tren belanja barang pada tahun 2011 tidak banyak berbeda dengan tren tahun sebelumnya, terutama terjadi peringkatan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Secara nominal, realisasi terendah terjadi pada awal tahun anggaran (bulan Januari) sebesar Rp0,92 triliun, lebih rendah dari realisasi periode sebelumnya Rp0,74 triliun. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp38,66 triliun, jauh lebih tinggi dari realisasi Desember tahun sebelumnya sebesar Rp25,63 triliun. Rendahnya tingkat serapan belanja barang ditengarai masih terkait dengan kesiapan KIL dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta tingginya tingkat kehati-hatian pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 26. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2011

Alokasi anggaran belanja modal pada tahun 2011 sebesar Rp144,57 triliun yang berarti naik tajam sebesar Rp49,55 triliun atau 52,15 persen dibanding pagu tahun 2010 sebesar Rp95,02 triliun. Adapun realisasi belanja modal tahun 2011 sebesar Rp117,85 triliun atau 81,52 persen dari pagunya, lebih rendah dari penyerapan tahun sebelumnya sebesar 84,50 persen. Secara umum tren realisasi belanja modal tidak jauh berbeda dengan tren realisasi belanja yakni

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

sepanjang tahun mengalami fluktuasi dan meningkat secara signifikan pada bulan Desember. Realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,59 triliun, relatif tidak jauh berbeda dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya dan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp60,97 triliun, jauh lebih besar dibandingkan realisasi Desember 2010 sebesar Rp32,63 triliun. Rata-rata realisasi bulanan di tahun 2011 sebesar **Rp9,96**, sudah jauh lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata penyerapan tahun sebelumnya sebesar Rp6,69 triliun. Rendahnya tingkat realisasi belanja modal pada tahun 2011 terjadi antara lain karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan/proyek yang terkendala iklim/cuaca, bencana alam dan masalah dalam pengadaan/pembebasan lahan, serta penghematan anggaran dari pelaksanaan tender.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Kesehatan
Grafik 27. Trend Belanja Subsidi Bulanan TA 2011

Pagu belanja subsidi pada tahun 2011 senilai Rp238,47 triliun atau meningkat sebesar Rp37,21 triliun (18,49 persen) dibanding yang dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp201,26 triliun. Realisasi belanja subsidi mencapai Rp295,36 triliun atau 123,86 persen dari pagu APBN-P 2011 yang berarti mengalami kenaikan realisasi sebesar **Rp102,7** triliun atau 53,27 persen dibanding realisasi tahun lalu yang berada pada level Rp192,71 triliun. Adapun tren penyerapan belanja subsidi sepanjang tahun 2011 berfluktuasi. Penyerapan baru mulai terealisasi pada bulan Maret dan kemudian turun sampai bulan Juni serta meningkat secara tajam pada bulan Desember sebesar Rp94,46 triliun atau 39,61 persen dari total pagu. Penyerapan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar Rp0,07 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp94,46 triliun. Secara umum, nilai serapan per bulan untuk belanja subsidi rata-rata Rp24,61 triliun. Realisasi subsidi melampaui pagu terutama terkait dengan lebih tingginya beban subsidi energi, terutama dengan naiknya harga ICP di akhir periode, dan subsidi non-energi yang diakibatkan antara lain oleh tambahan subsidi kewajiban pelayanan umum (*public service obligation/PSO*) dan tambahan subsidi pajak.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
Grafik 28. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2011

Pada tahun 2011 belanja bantuan sosial menerima alokasi anggaran sebesar Rp77,47 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp6,30 triliun atau 8,85 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp71,17 triliun. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp71,10 triliun atau 91,79 persen dari pagu APBN-P 2011 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2,49 triliun atau 3,63 persen dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp68,61 triliun. Tren belanja bantuan sosial berfluktuasi sepanjang tahun 2011, penyerapan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,01 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp23,47 triliun dan secara rata-rata penyerapan belanja bantuan sosial per bulan Rp5,93 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
Grafik 29. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2011

Alokasi anggaran belanja pembayaran bunga utang pada tahun 2011 mencapai Rp106,58 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp0,93 triliun atau 0,88 persen bila dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp105,65 triliun. Realisasi belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp93,26 triliun atau 87,50 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2011 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4,9 triliun atau 5,52 persen dibanding realisasi tahun 2010 yang mencapai Rp88,38 triliun. Peningkatan besaran pembayaran bunga utang seiring dengan peningkatan outstanding utang dari tahun ke tahun, dimana sebagai konsekuensinya, beban utang dari tahun ke tahun mengalami

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

peningkatan. Realisasi pembayaran bunga utang tahun 2011 berfluktuasi dengan rata-rata bulanan sebesar Rp7,77 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 30. Trend Belanja Lain-lain Bulanan TA 2011

Pada tahun 2011 belanja lain-lain mendapatkan alokasi sebesar Rp14,30 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp18,62 triliun atau 56,56 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp32,92 triliun. Belanja lain-lain terealisasi sebesar Rp5,47 triliun atau 38,21 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2011 atau mengalami penurunan sebesar Rp16,2 triliun atau 74,78 persen dibanding realisasi tahun 2010 sebesar Rp21,67 triliun. Trend penyerapan belanja lain-lain sepanjang tahun 2011 berfluktuasi dan realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,04 triliun, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp1,52 triliun. Secara rata-rata penyerapan belanja lain-lain per bulan selama tahun 2011 adalah sebesar Rp0,45 triliun. Secara nominal rendahnya realisasi anggaran belanja lain-lain tahun 2011 dibanding realisasi tahun 2010 disebabkan antara lain karena telah direlokasikannya beberapa pos anggaran dari belanja lain-lain ke belanja K/L, seperti pendanaan untuk biaya pemungutan PBB, anggaran beberapa komite/lembaga dan sebagian belanja penunjang.

Kontribusi belanja Pemerintah dan Belanja Model terhadap perekonomian

Sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan RPJMN tahun 2010-2014 yang menetapkan 3 (tiga) agenda yang menjadi misi pembangunan yaitu (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Agenda yang dituangkan dalam besaran dan kebijakan alokasi belanja negara memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan. Sejalan dengan itu, maka baik pagu maupun realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2011 diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pencapaian misi tersebut. Peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk melakukan stimulus bagi perekonomian terutama melalui belanja negara, dengan rata-rata kontribusi 17,88 persen terhadap PDB di lima tahun terakhir. Kebijakan fiskal yang ekspansif bagi perekonomian terlihat dari perkembangan realisasi belanja negara dan defisit (lihat tabel 2).

Realisasi belanja negara tahun 2007 sebesar Rp257,65 triliun atau sekitar 19,15 persen PDB. . Sementara itu, pada tahun 2008, realisasi belanja negara menjadi 19,90 persen PDB, secara nominal meningkat sebesar 30,10 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja negara tahun 2007. Kemudian belanja negara tahun 2009 (16,70 persen PDB) turun sebesar 4,90 persen

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

dibanding tahun sebelumnya dan meningkat di tahun 2010 sebesar 11,17 persen (16,23 persen PDB). Di tahun 2011, realisasi belanja naik 24,27 persen menjadi Rp 1.295,00 triliun (17,4 persen PDB) yang terdiri dari belanja Pemerintah pusat Rp 883,72 triliun (11,9 persen PDB), dan transfer ke daerah mencapai Rp 411,32 triliun (5,5 persen PDB.)

Kontribusi pos belanja modal dalam APBN memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor riil terutama melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Secara nominal realisasi belanja modal tahun 2007-2011 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, (tetapi rasio belanja modal terhadap PDB mengalami perurunan walaupun kembali naik di tahun 2011). Keterbatasan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal seiring dengan semakin sempitnya ruang gerak yang dimiliki Pemerintah terkait dengan *fiscal space*. *Fiscal space* terhadap PDB selama periode 2007-2011 berturut-turut adalah 5,48 persen, 4,93 persen, 5,17 persen, 4,86 persen, dan 5,14 persen. Sedangkan rasio realisasi belanja modal terhadap PDB dalam kurun waktu 2007-2011 adalah 1,62 persen, 1,47 persen, 1,35 persen, 1,25 persen, dan 1,63 persen. Walaupun secara nominal realisasi belanja modal meningkat dari tahun ke tahun, namun secara rata-rata rasio belanja modal terhadap PDB telah mencapai sekitar 1,46 persen.

**Tabel 2. Perkembangan Belanja Negara tahun 2007-2011
(triliun Rupiah)**

Urutan	2007		2008		2009		2010		2011	
	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB
Belanja Negara	757,65	19,15	985,73	19,80	937,38	16,70	1.042,12	16,23	1.295,00	17,4
Belanja Pemerintah Pusat	504,82	12,75	693,38	14,00	628,01	11,20	697,41	10,88	883,72	11,9
Transfer ke Daerah	253,28	6,40	292,43	5,80	308,56	5,50	344,73	5,37	411,32	5,5
Suspen	(0,24)	(0,01)	(0,06)	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)	0,00	(0,05)	0,01
Surplus/Defisit	(49,84)	(1,28)	(4,12)	(0,08)	(88,82)	(1,58)	(46,85)	(0,73)	(84,38)	(1,1)
Belanja Modal	66,29	1,62	72,77	1,47	75,87	1,35	80,28	1,25	117,85	1,6
PDB	3.957,4	4,954	5.613,4	5,613,4	6.422,9	7.427,1				

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Boks 8. Fiscal Space

Fiscal space secara umum merupakan ketersediaan alokasi anggaran yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu tanpa mengakibatkan permasalahan terhadap kesinambungan posisi keuangan Pemerintah. Dalam konteks APBN, fiscal space dihitung dari pengurangan total anggaran belanja dengan jumlah belanja yang telah terikat, seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah. Fiscal space berguna untuk melihat kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran negara pada belanja-belanja yang bersifat belum terikat seperti pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perluasan fiscal space antara lain dapat ditempuh dengan: (1) meningkatkan pendapatan negara; (2) menajamkan prioritas belanja negara antara lain melalui pemotongan belanja negara yang bukan prioritas, penurunan belanja subsidi dan penyesuaian berkala pembayaran bunga utang; dan (3) meningkatkan efisiensi melalui peningkatan good governance dan pemberantasan korupsi.

Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar realisasi belanja Pemerintah Pusat merupakan belanja terikat. Anggaran belanja terikat selama kurun waktu 2007-2011 menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata sebesar 13,32 persen terhadap PDB, yang berturut-turut mulai dari tahun 2007 adalah Rp 535,66 triliun (13,54 persen terhadap PDB), Rp 745,15 triliun (15,04

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

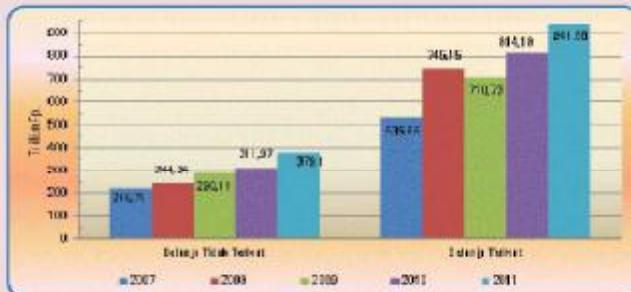
persen terhadap PDB), Rp710,73 triliun (12,66 persen terhadap PDB), Rp814,18 triliun (12,68 persen terhadap PDB), dan Rp941,65 triliun (12,68 persen terhadap PDB). Secara nominal, anggaran belanja terikat pada tahun 2011 meningkat tajam sebesar lebih dari 75 persen dibanding nominal tahun 2007. Sedangkan fiscal space selama kurun waktu 2007-2011 mengalami peningkatan, pada tahun 2007 sebesar Rp216,71 triliun, kemudian pada tahun 2008 menjadi Rp244,34 triliun, pada tahun 2009 sebesar Rp290,11 triliun, pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp311,97 triliun, dan di tahun 2011 meningkat menjadi Rp379,1 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa tren fiscal space terhadap PDB, sepanjang periode 2007-2011 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata 5,11 persen terhadap PDB dan di tahun 2011 rasio mencapai 5,10 persen.

Mencermati masih terbatasnya space yang dimiliki, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dari belanja negara (*quality of spending*). Diharapkan melalui kualitas belanja negara yang memadai, maka instrumen fiskal menjadi lebih efektif yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Tabel 3. Fiscal Space terhadap PDB Tahun 2007-2011

No	Uraines	Page TA 2007 (Rp triliun)	Page TA 2008 (Rp triliun)	Page TA 2009 (Rp triliun)	Page TA 2010 (Rp triliun)	Page TA 2011 (Rp triliun)
1.	Total Belanja Negara	762,37	805,49	1.000,84	1.126,15	1.320,75
2.	Total Belanja Terikat (Non-discretionary spending)	535,86	745,15	710,73	814,18	941,65
a.	Belanja Pegawai	92,84	123,54	133,71	162,66	184,08
b.	Belanja Pembayaran Bunga	83,65	94,79	109,89	108,65	108,58
c.	Belanja Subsidi	105,07	234,40	168,12	201,26	238,47
d.	Transfer ke Daerah	254,20	292,42	309,31	344,61	412,51
3.	Total Belanja Negara – Total Belanja Terikat	216,71	244,34	290,11	311,97	379,1
4.	Rasio Belanja Terikat terhadap Total Belanja Negara	71,20	75,31	71,01	72,30	71,30
5.	Rasio Belanja Tidak Terikat terhadap Total Belanja Negara	28,80	24,69	28,99	27,70	28,70
6.	Pendapatan Domestik Bruto/PDB (Rupiah)	3.957,4	4.954,0	5.613,4	6.422,9	7.427,1
7.	Rasio Belanja Terikat terhadap PDB (%)	13,54	15,04	12,88	12,88	12,88
8.	Rasio Belanja Tidak Terikat (Fiscal Space) terhadap PDB (%)	5,48	4,93	5,17	4,86	5,10

Sumber : Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 31. Belanja Tidak Terikat dan Belanja Terikat Tahun 2007-2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Realisasi transfer ke daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal telah memasuki dasawarsa yang kedua. Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang dianut Pemerintah antara lain untuk mengurangi vertical dan horizontal fiscal imbalance, meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendukung *fiscal sustainability* dalam kebijakan ekonomi makro. Transfer ke daerah yang salah satu sumber pendanaan daerah semakin meningkat seiring dengan naiknya pendapatan negara.

Realisasi transfer ke daerah dalam tahun 2011 mencapai Rp411,3 triliun (99,7 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp412,5 triliun), atau naik Rp66,6 triliun (19,36 persen) dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp344,7 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari dana perimbangan, dana Otsus dan penyesuaian. Realisasi dana Perimbangan sebesar Rp347,25 triliun atau hampir sama dengan pagu APBN-P 2011 sebesar Rp347,5 triliun. Hal ini terutama berkaitan dengan sedikit lebih rendahnya realisasi DAK berkenaan dengan adanya beberapa daerah yang tidak memenuhi persyaratan sedangkan realisasi DAU sesuai dengan pagu, sementara realisasi DBH sedikit di atas pagu.

Untuk dana otsus dan penyesuaian terealisasi sebesar Rp64,1 triliun atau 98,6 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp64,97 triliun. Realisasi otsus sesuai pagu, selisih terutama berkaitan dengan lebih rendahnya realisasi dana penyesuaian, khususnya dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID), dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPIDI), dan bantuan operasional sekolah (BOS).



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan
Grafik 32. Trend Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2011

Tren serapan transfer ke daerah tersebut tidak berbeda jauh dengan tren belanja Pemerintah Pusat yakni berfluktiasi sepanjang tahun 2011. Untuk dana perimbangan, pada awal tahun terjadi penyerapan sebesar Rp37,66 triliun atau 10,84 persen terhadap total realisasi dana perimbangan, selanjutnya berfluktiasi dengan kenaikan di bulan terakhir pada masing-masing triwulan dan pada akhir tahun terjadi penyerapan tertinggi sebesar Rp47,28 triliun atau 13,61 persen dari total pagu dana perimbangan. Secara nominal, dana perimbangan terserap sebesar Rp347,25 triliun dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp28,94 triliun, lebih besar dari atara rata tahun sebelumnya sebesar Rp26,39 triliun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 33. Trend Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2011

Untuk penyerapan dana otonomi khusus dan penyesuaian, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mulai direalisasikan di bulan Februari, di tahun 2011 dapat direalisasikan mulai awal tahun. Penyerapan tertinggi ada di bulan Juli (Rp9,86 triliun), September (Rp10,07 triliun), dan Desember (Rp10,64 triliun). Secara nominal, dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp5,34 triliun . Dana otonomi khusus dan penyesuaian terserap sebesar Rp64,08 triliun, jauh lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp28,02 triliun.

3. PEMBIAYAAN

Dampak kebijakan stimulus fiskal terhadap defisit APBN

Peningkatan defisit fiskal utamanya merupakan implikasi dari kebijakan stimulus fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun kebijakan fiskal ekspansif memiliki kecenderungan terjadinya defisit, Pemerintah terus berupaya menjaga defisit fiskal pada tingkat yang relatif rendah. Di samping itu, upaya perhitungan besaran dan realisasi defisit ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan tanpa merusak indikator makroekonomi seperti inflasi. Defisit yang meningkat juga diseimbangkan dengan kebijakan di bidang pendapatan yang mengupayakan peningkatan pendapatan negara terutama yang berasal dari dalam negeri. Defisit anggaran meningkat secara tajam di tahun 2007 antara lain terkait erat dengan meningkatnya harga-harga komoditas internasional terutama harga minyak dunia yang mengakibatkan meningkatnya beban subsidi Pemerintah. Stimulus fiskal Pemerintah diberikan dalam bentuk (1) insentif perpajakan; (2) optimisasi belanja negara untuk pembangunan; (3) pengalokasian belanja negara dalam rangka meningkatkan *purchasing power* dari masyarakat yang berpenghasilan rendah; dan (4) dukungan Pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui *Public-Private Partnership* (PPP).

Sumber-sumber pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan terus digali untuk menutup defisit anggaran. Sumber pembiayaan itu sendiri berasal dari sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian, Pemerintah menekankan sumber pembiayaan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan APBN. Adapun sumber pembiayaan luar negeri juga digali dengan memperhatikan dan mempertahankan penurunan rasio utang terhadap PDB secara berkesinambungan (*debt sustainability*).

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan pembiayaan dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan utang dan non utang. Pada tahun 2011 sumber pembiayaan didominasi oleh sumber pembiayaan utang yang diakibatkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan non utang yang antara

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

lain dipengaruhi oleh kebijakan penerimaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk sumber yang berasal dari utang, Pemerintah menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Utang Negara (SUNI), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen utama.

Realisasi pembentukan APBN

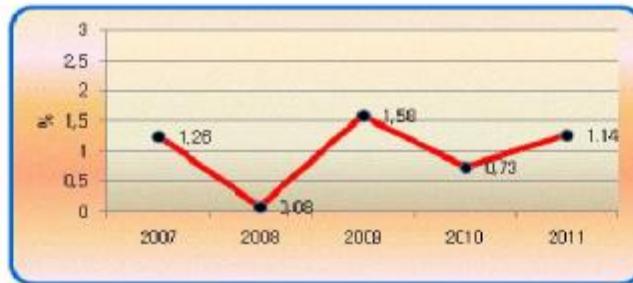
Realisasi pembentukan anggaran pada tahun 2011 mencapai Rp130,95 triliun, lebih rendah Rp19,88 triliun (13,18 persen) dari target APBN-P 2011 sebesar Rp150,8 triliun. Untuk realisasi pembentukan dalam negeri mencapai Rp148,75 triliun, lebih rendah Rp4,86 triliun (3,16 persen) dari target APBN-P 2011 sebesar Rp153,6 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh pengurangan target penerbitan SBN neto sebesar Rp19,15 triliun, lebih rendahnya penarikan pinjaman dalam negeri, dan tidak ada realisasi untuk kewajiban penjaminan.

Realisasi pembentukan luar negeri mencapai negatif Rp17,80 triliun, turun Rp15,02 triliun dari target APBN-P 2011 sebesar negatif Rp2,78 triliun. Hal ini terutama berkaitan dengan pembatalan penarikan pinjaman program Low Carbon and Resilient Development Program, lebih rendahnya penarikan pinjaman proyek, dan lebih rendahnya penarikan penerusan pinjaman.

Selain itu di tahun 2011 Pemerintah juga berusaha mengurangi jumlah pinjaman luar negerinya dengan cara melakukan debt swap, seperti realisasi pengalihan pinjaman untuk proyek Junior Secondary Education (23 juta Euro), Housing and Settlement (1,8 juta euro dan USD7,5 juta), Debt2Health (AUD7,5 juta), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (10 juta Euro), dan Tropical Forest Conservation (USD6,4 juta).

Rasio defisit terhadap PDB

Rasio defisit terhadap PDB menunjukkan salah satu indikator kesinambungan fiskal. Selama tahun 2007-2011 rasio tersebut berada di bawah level 3 persen dengan rata-rata sebesar 0,96 persen. Rasio defisit terhadap PDB berfluktuatif dengan defisit terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp4,12 triliun atau 0,08 persen terhadap PDB atau 4,36 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp94,50 triliun, sedangkan defisit tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp88,62 triliun atau 1,58 persen terhadap PDB atau 68,25 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P 2009 sebesar Rp129,84 triliun. Untuk tahun 2011 rasio defisit terhadap PDB sebesar 1,14 persen.



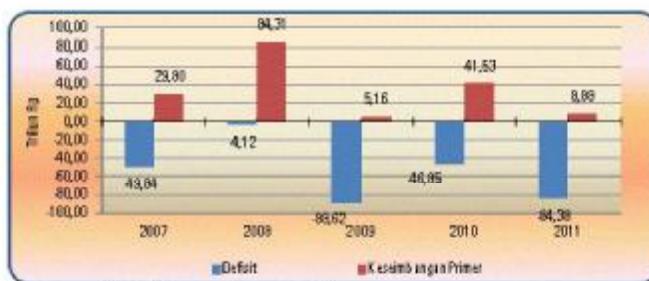
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
Grafik 34. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB
 tahun 2007-2011

Keseimbangan primer

Keseimbangan primer diperoleh dari pendapatan termasuk hibah dikurangi dengan pengeluaran yang tidak memiliki komponen bunga (pinjaman neto). Pada tahun 2011, keseimbangan primer terealisasi sebesar Rp8,88 triliun yang berarti mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yang berada pada posisi Rp41,53 triliun. Perubahan ini dipengaruhi antara lain oleh naiknya

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

pembayaran kewajiban bunga utang dan membesarnya defisit anggaran. Pembayaran bunga utang pada tahun 2011 sebesar Rp93,26 triliun yang berarti mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yang mencapai Rp88,38 triliun. Sementara itu, defisit anggaran pada tahun 2011 berada pada level Rp84,38 triliun yang lebih tinggi dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp46,77 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
Grafik 35. Defisit dan Keseimbangan Primer Tahun 2007-2011

Perkembangan surplus/defisit, pembiayaan, SIKPA/SILPA

Surplus/defisit menunjukkan perbedaan antara seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran. Sedangkan SILPA (selisih lebih pembiayaan anggaran)/SIKPA (selisih kurang pembiayaan anggaran) merupakan selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan. Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir realisasi anggaran pemerintah pusat menghasilkan SILPA. SILPA yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya. Penambahan SILPA tahun anggaran berjalan dengan saldo SILPA tahun sebelumnya menghasilkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah.

Pada tahun 2007 realisasi APBN mengalami SiKPA sebesar Rp7,39 triliun, sedangkan SiLPA tahun 2008 sebesar Rp79,95 triliun. SiLPA tersebut menjadi SAL tahun 2008 yang digunakan untuk kegiatan tahun 2009 yakni terutama terkait dengan PNPM. Pada tahun 2009, realisasi pembiayaan lebih tinggi dibanding realisasi defisit sehingga terjadi SILPA sebesar Rp23,96 triliun dan pada tahun 2010 realisasi APBN mengalami SILPA sebesar Rp44,71 triliun. Untuk tahun 2011 jumlah SILPA berkurang menjadi Rp46,55 triliun. Selama tahun 2007 - 2011, SiLPA rata-rata sebesar Rp37,56 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
Grafik 36. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2007-2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Suspen

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah, diperlukan keandalan data dan informasi yang antara lain tercermin dari besaran nilai suspen. Suspen merupakan selisih pencatatan transaksi keuangan antara Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan walaupun mekanisme saling uji (*check and balance*) terus diupayakan. Pada tahun 2011 nilai suspen berada pada posisi negatif Rp47,50 miliar atau sebesar 0,0037 persen dari total realisasi belanja negara.

Boks 9. Dampak APBN Terhadap Sektor Ril Tahun 2007-2011

APBN sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, digunakan Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan APBN dapat mempengaruhi kondisi perekonomian melalui peran strategis yang dimiliki berupa kebijakan yang bersifat eksansif pada saat ekonomi lesu ataupun kontraktif pada saat ekonomi sedang *overheating*. Besaran dan alokasi pada APBN berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor ril, sektor moneter, dan sektor lainnya. Kebijakan anggaran pada sisi penerimaan bertujuan untuk mendorong aktivitas perekonomian melalui kebijakan perpajakan, sedangkan yang dilakukan dari sisi belanja diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Implikasi besaran APBN utamanya terhadap sektor ril dapat diketahui terutama dari dua komponen yakni konsumsi Pemerintah dan pembentukan modal domestik bruto. Pada tahun 2011, komponen konsumsi Pemerintah berada di level Rp588,08 triliun atau 7,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini mengalami peningkatan 16,16 persen dari realisasi konsumsi Pemerintah tahun 2010. Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp202,171 triliun atau 2,7 persen terhadap PDB yang bersumber dari realisasi belanja modal Pemerintah Pusat yang mencapai Rp117,85 triliun (1,6 persen PDB) dan realisasi belanja modal dari anggaran yang ditransfer ke daerah sebesar Rp84,32 triliun (1,1 persen PDB). Dengan demikian, dampak APBN TA 2011 terhadap sektor ril mencapai Rp790,26 triliun atau sebesar 10,64 persen dari PDB, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 10,2 persen dari PDB.

Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB pada tahun 2011 sebesar 32 persen atau Rp2.378,3 triliun, hal ini berarti kontribusi Pemerintah dalam membentuk PDB adalah sebesar 2,7 persen atau sebesar Rp202,17 triliun dan selebihnya sebesar Rp2.176,13 triliun disumbang oleh sektor swasta.

Tabel 4. Dampak APBN Terhadap Sektor Ril Tahun 2007-2011

Kategori	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
	Rp. 1000 Miliar	% PDB								
1. Konsumsi Pemerintah (obj)	306,22	7,7	362,96	7,3	463,09	8,2	500,40	7,9	588,08	7,3
a. Belanja Barang & Jasa	327,62	8,3	380,51	8,0	464,13	8,8	511,41	8,4	632,62	8,9
Belanja Pergawai	90,31	2,3	112,85	2,3	127,87	2,3	146,08	2,2	175,74	2,4
Belanja Barang	92,93	1,3	102,96	1,3	80,87	1,4	87,80	1,6	125,65	1,7
Belanja Pada Daerah	186,01	4,3	187,36	4,0	246,86	4,4	274,56	4,5	327,00	4,4
Belanja Lainnya	15,58	0,4	20,38	0,6	36,83	0,7	21,67	0,3	5,44	0,07
b. Pendapatan Barang & Jasa	21,49	0,6	23,93	0,7	31,09	0,6	30,01	0,5	44,76	0,6
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto	145,66	3,7	167,81	3,8	187,99	3,9	160,88	2,4	202,17	2,7
Pemerintah Pusat	64,13	1,6	72,77	1,5	75,87	1,4	60,29	1,2	117,96	1,6
Pemerintah Daerah	91,27	2,1	95,04	1,9	81,72	1,1	70,57	1,1	84,22	1,1
Jumlah 1 dan 2	452,07	11,4	530,80	10,7	600,04	10,7	667,38	10,2	790,26	10,84

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 5. Presentase Anggaran Dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2011

Uraian	2011			
	APBN-P	persen thd PDB	Realisasi	persen thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	1.169,91	15,8	1.210,60	16,3
1. Penerimaan Perajakan	879,69	11,8	873,87	11,8
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	831,75	11,2	819,75	11,0
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	46,94	0,6	54,12	0,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	288,57	3,9	331,47	4,5
a. Penerimaan SDA	191,98	2,6	213,83	2,9
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	28,84	0,4	28,18	0,4
c. Pendapatan PNBP lainnya	50,34	0,7	59,37	0,9
d. Pendapatan BLU	15,42	0,2	20,10	0,3
3. Penerimaan Hibah	4,66	0,1	5,25	0,07
Belanja Negara	1.320,75	17,8	1.284,89	17,4
1. Belanja Pemerintah Pusat	908,24	12,2	883,72	11,8
a. Belanja Pegawai	184,09	2,5	175,74	2,4
b. Belanja Barang	142,34	1,9	124,84	1,7
c. Belanja Modal	144,57	1,9	117,85	1,6
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	108,58	1,4	93,26	1,3
a. Belanja Subsidi	238,47	3,2	295,38	4,0
f. Belanja Hibah	0,43	0,01	0,30	0,004
g. Belanja Bantuan Sosial	77,47	1,1	71,10	1,0
h. Belanja Lain-lain	14,30	0,2	5,47	0,1
2. Transfer ke Daerah	412,51	5,6	411,32	5,6
a. Dana Perimbangan	347,54	4,7	347,25	4,7
i. Dana Bagi Hasil	96,77	1,3	96,91	1,3
ii. Dana Alokasi Umum	225,53	3,0	225,53	3,0
iii. Dana Alokasi Khusus	25,23	0,3	24,80	0,3
b. Otonomi Khusus dan Penyelesaian	64,97	0,9	64,08	0,9
i. Dana Otonomi Khusus	10,42	0,1	10,42	0,1
ii. Dana Penyelesaian	54,99	0,7	53,68	0,7
Difisit Anggaran	(150,84)	(2,0)	(84,40)	(1,1)
Pembayaran	160,84	2,0	130,85	1,8

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Tabel 6
Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2007-2011

No	Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	Ket
1	Nilai PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	1.964,0	2.082,1	2.177,0	2.310,7	2.463,2	(1)
2	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	3.957,4	4.954,0	5.613,4	6.422,8	7.427,1	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	16,4	21,7	24,3	27,0	30,8	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	6,3	6,1	4,5	6,1	6,5	(1)
5	Inflasi (%)	6,6	11,1	2,78	6,98	3,79	(1)
6	Total ekspor (USD miliar)	113,9	136,8	116,48	157,73	203,62	(1)
7	Eksport Non Migas (USD miliar)	81,9	107,8	97,47	129,68	162,02	(1)
8	Total Impor (USD miliar)	74,4	126,8	96,88	135,61	177,30	(1)
9	Impor Non Migas (USD miliar)	52,5	98,3	77,87	108,24	136,81	(1)
10	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	56,8	51,6	68,1	96,2	110,1	(2)
11	Rupiah USD	9.419,0	10.950	10.468	9.078	8.775	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	707,81	981,80	848,76	995,27	1.210,80	(4)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	757,95	985,73	937,38	1.042,12	1.294,98	(4)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

14	Dekat Angsuran (Rp Triliun)	149,84	14,12	188,92	148,85	(84,38)	(4)
15	Uang Bantuan (Rp Triliun)						
a.	Arti Sempit (M1)	469,8	465,4	506,06	518,45	613,45	(2)
b.	Arti Luas (M2)	1.888,1	1.693,9	1.695,06	2.206,02	2.707,81	(2)
16	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	787,1	1.315,7	1.408,67	1.796,0	2.117,95	(2)
17	Suku Bunga (% per tahun)						
a.	SBI 1 bulan	9,75	9,2	6,46	6,32		(2)
b.	SBI 3 bulan		10,75	6,59	6,57		(2)
c.	Deposito 1 bulan	8,96	8,2	6,87	6,78	6,35	(2)
d.	Kredit Modal Kerja	15,1	15,2	13,69	12,83	12,16	(2)
e.	Kredit Investasi	15,1	14,4	12,86	12,28	12,04	(2)
18	IHSO BEJ	1.805,5	1.365,0	2.534,0	3.704	3.822	(2)
19	Harga Minyak (USD/Barrel)	72,3	96,13	61,5	79,4	111,5	(5)
20	Ukuran Minyak (Barrel/hari)	908	931	552	554	898	(3)
21	Rasio Utang terhadap PDB (DSR, %)	36,0	33	28	26	25,4	(3)

Keterangan:

Sumber :

- (1) Badan Pusat Statistik
- (2) Bank Indonesia
- (3) Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
- (4) Laporan Realisasi APBN, Kementerian Keuangan
- (5) Kementerian ESDM

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)**A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga (K/L), beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepada satuan kerja termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Untuk LKPP Tahun 2011, entitas pelaporan keuangan tingkat K/L dan BUN, serta entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup, meliputi:

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2011	2010
1	BA.001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA.002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA.004	Badan Pemeriksa Keuangan	70	36
4	BA.005	Mahkamah Agung	1.602	802
5	BA.006	Kepala Daerah	517	517
6	BA.007	Sekretariat Negara	17	17
7	BA.010	Kementerian Dalam Negeri	763	750
8	BA.011	Kementerian Luar Negeri	142	142
9	BA.012	Kementerian Pertahanan	258	244
10	BA.013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	753	756
11	BA.015	Kementerian Keuangan	1.067	1.069
12	BA.018	Kementerian Pertanian	2.733	1.967
13	BA.019	Kementerian Pemuda dan Olahraga	109	178
14	BA.020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	93	92
15	BA.022	Kementerian Perhubungan	680	676
16	BA.023	Kementerian Pendidikan Nasional	396	377
17	BA.024	Kementerian Kesehatan	1.185	448
18	BA.025	Kementerian Agama	6.961	4.381
19	BA.026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.009	802
20	BA.027	Kementerian Sosial	284	206
21	BA.029	Kementerian Kehutanan	403	358
22	BA.032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	746	698
23	BA.033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.024	1.072
24	BA.034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA.035	Kementerian Koordinator Bidang Perkembangan	2	1
26	BA.036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	1
27	BA.040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	210	68
28	BA.041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA.042	Kementerian Riset dan Teknologi	5	11
30	BA.043	Kementerian Lingkungan Hidup	48	48
31	BA.044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	36	44
32	BA.047	Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Perindustrian Anak	7	7
33	BA.048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	1
34	BA.050	Badan Intelijen Negara	1	1
35	BA.051	Lembaga Sandi Negara	1	1
36	BA.052	Dewan Kehormatan Nasional	1	1
37	BA.054	Badan Pusat Statistik	484	484
38	BA.055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1	1
39	BA.056	Badan Persemaian Nasional	461	460
40	BA.057	Perpustakaan Nasional	35	34
41	BA.059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	60	58

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2011	2010
42	BA.060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.133	1.072
43	BA.063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	39	38
44	BA.064	Lembaga Kehakiman Nasional	1	1
45	BA.065	Badan Koordinasi Persemanan Modal	38	38
46	BA.066	Badan Narkotika Nasional	74	11
47	BA.067	Kementerian Pemariganan Daerah Tertinggal	40	175
48	BA.068	Badan Kependidikan dan Kebudayaan Nasional	42	42
49	BA.074	Kemisi Nasional Huk Asasi Manusia	1	1
50	BA.075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	183	187
51	BA.076	Komisi Perlindungan Umum	531	532
52	BA.077	Mahkamah Konstitusi	1	1
53	BA.078	Pusat Pengeluaran dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
54	BA.079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50	50
55	BA.080	Badan Tenaga Nukir Nasional	21	22
56	BA.081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	18
57	BA.082	Lembaga Penelitian dan Aplikasi Nasional	19	19
58	BA.083	Badan Koordinasi Survei dan Penetanan Nasional	1	4
59	BA.084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
60	BA.085	Badan Pengawas Tenaga Nukir	3	3
61	BA.086	Lembaga Administrasi Negara	13	13
62	BA.087	Arsip Nasional Republik Indonesia	34	33
63	BA.088	Badan Kegawaiian Negara	13	13
64	BA.089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	31	31
65	BA.090	Kementerian Pendidikan	311	185
66	BA.091	Kementerian Penanaman Rakyat	42	40
67	BA.092	Kementerian Permaian dan Olahraga	34	34
68	BA.093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
69	BA.095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
70	BA.103	Komisi Yudisial	1	1
71	BA.103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
72	BA.104	Badan Nasional Pemantapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	24	24
73	BA.105	Badan Pengembangan Lampung Sidrap	1	1
74	BA.106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
75	BA.107	Badan SAR Nasional	25	25
76	BA.108	Komisi Pengawas Persaringan Usaha	1	1
77	BA.109	Badan Pengembangan Wilayah Sumatera "	1	-
78	BA.110	Ombudsman RI "	1	-
79	BA.111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan "	32	-
80	BA.999	Bendahan Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA.999.01	Pengeluaran Utang **)	1	1
	BA.999.02	Hibah **)	1	2
	BA.999.03	Investasi Pemerintah **)	4	1
	BA.999.04	Penerimaan pajamaan **)	1	1
	BA.999.05	Transfer ke Daerah **)	3	3
	BA.999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain **)	-	127
	BA.999.07	Belanja Subsidi **)	15	7
	BA.999.08	Belanja Lain-lain **)	180	664
	BA.999.99	Transaksi khusus **)	-	-
	BA.999..	Badan Lainnya	-	-
		Jumlah Satker	25.143	20.248

*) Bagian Anggaran tersebut baru terbentuk sejak tahun anggaran 2011

**) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBNM.

LKPP Tahun 2011 ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

- transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi Pemerintah, seperti pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), Otorita Asahan, LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI); dan
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, seperti Badan Pengelola Minyak dan Gas (BPMIGAS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia.

LKPP Tahun 2011 ini tidak mencakup entitas:

- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- Unit Badan Lainnya yang belum menyajikan/menyampaikan laporan keuangan.

Namun, penyertaan modal jangka panjang pemerintah pada perusahaan negara (BUMN) dan Non BUMN, dan BHMN, nilainya disajikan sebagai investasi pemerintah dan dijelaskan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

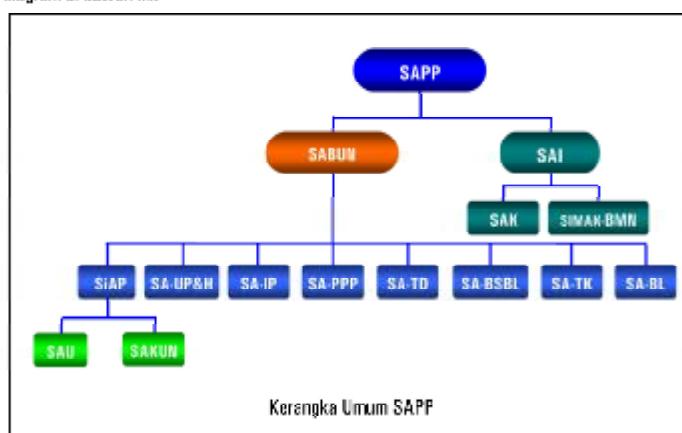
Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai amanah diberikan oleh dituh dengun PMK Nomur 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 jenjang subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk memukulkan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IPI), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TDI), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 jenjang subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. Selain Laporan Arus Kas, Menteri Keuangan selaku BUN juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca atas transaksi Utang Pemerintah, Hibah, Penerusan Pinjaman, Investasi/Penyaluran Modal, Transfer ke Daerah, Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, dan Pembiayaan yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

diagram di bawah ini.



Alur Penyusunan LKPP

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kumpilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan KIL dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Perbiayaan.

 - Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit oleh)

APBN TA 2011 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomabel atas seluruh penerimaan uang yang nil masuk ke Kas Negara atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai pengujii (kontrol) data BUN.

- Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2011 berdasarkan komplisi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai pengujii (kontrol) data belanja K/L. Apabila terjadi perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data K/L dengan data BUN, perbedaan tersebut disajikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai "Sisipan."
- Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2011 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang nil masuk ke atau keluar dari Kas Negara.

2. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh K/L dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran – Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Data mengenai Kas di Bandarara Penerimaan, Kas di Bandarara Pengeluaran, dan Kas pada BLU dilacak pada Neraca K/L yang dikurangi melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2011 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000980, rekening 600.502411980, rekening 600.502111980, rekening 519.000122980, rekening 608.001411980, rekening 603.000111980, rekening SAL, dan rekening Penempatan Uang Negara), termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah serta pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan aplikasi sistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapkan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II (Pernyataan SAP (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2011 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang memberi beban rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)**(2) Belanja**

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomijenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Utang. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit oleh)

dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.
 - Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.
 - Kas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara disajikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.
 - Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pungutan beban yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan, dana lancar BLU, serta kas dari hibah langsung dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Termasuk dalam Kas Lainnya dan Setara Kas adalah rekening catatan sifatnya PSD dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disetorkan ke kas negara.
 - Kas pada BLU yang disajikan merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Kas di BLU yang merupakan dana kelulusan yang belum digulirkan/investasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.
 - Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
 - Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan peragihannya. Termasuk dalam pns Piutang adalah Piutang Pajak, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tunjulan Ganti Rugi (ITGR), Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal pelaporan. LKPP Tahun 2011 ini telah menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atau piutang dengan mempertimbangkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada CatLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka Belanja.
 - Piutang macet K/L yang dialihkan pengarhanya kepada Kementerian Keuangan pada LKPP Tahun 2011 disajikan dalam kelompok piutang awalnya (sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya) dengan penyisihan 100%, sedangkan pada LKPP Tahun 2010 disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain.
 - Termasuk dalam persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fisik pada tanggal pelaporan, kecuali untuk persediaan dalam bentuk beras.
- Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti dorasirampasan.

b. Investasi

*Investasi Jangka Panjang terdiri dari
Investasi Non Permanen
dan Investasi Permanen*

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan yang ada di BLU.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) **Investasi Non Permanen**

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negaraiklaerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota kooperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSMS), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP); atau nasabah BPR, kelompok petani, nelayan, dan kelompok usaha lainnya.
- Investasi Non Permanen Lainnya berupa dana pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIPI) yang telah diinvestasikan.

Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

(ii) **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha atau badan hukum lainnya.

- Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada perusahaan negara yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.
- PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan).
- Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDSI) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja K/L yang diserahkan kepada BUMN di masing-masing sektor. Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen Berita Sosial Tenaga Operasi (BASTO). Metode penentuan BPYBDS masih variatif, sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- PMN pada BHMN Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor) disajikan sebesar kekayaan bersih (ekuitas) PTN tersebut posisi per 31 Desember 2010 dikurangi dengan kas yang telah disahkan sebagai pendapatan tahun anggaran 2011 pada Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan Promissory Notes. Di sisi lain, Promissory Notes tersebut disajikan sebagaimana kewajibannya.
- Pada LKPP Tahun 2010, investasi pada badan-badan lainnya yang tidak termasuk perusahaan negara, seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran disajikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Pada LKPP Tahun 2011, investasi pada BI dan LPS disajikan sebagai bagian dari Investasi Pemilikan PMN, sedangkan investasi pada Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran direklasifikasi sebagai bagian dari Aset Lainnya.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *nor earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L per 31 Desember 2011 dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2011.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambahan nilai Aset Tetap.

SAP telah mengatur mengenai depreciasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepreciasi.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depreciasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusutan LKPP Tahun 2011, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang belum disusutkan/didepreciasi. Hal ini disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan penyusutan serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum ditetapkan. Penerapan penyusutan aset tetap akan dilaksanakan mulai pelaporan keuangan tahun 2013. Untuk tahun 2011, penyusutan aset tetap dilaksanakan untuk satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU yang telah melaksanakan sistem

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Nilai perolehan, penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap pada satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU diungkapkan dalam CaLK.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Jangka Panjang Lainnya, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau dafar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).
- Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana relawan, Dana Alredi Umut, dana Binau, Penyalenggaran Iuran Haji, dan kas besi perwakilan RI di luar negeri, serta dana lain yang sementara. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada rekening cadangan subsidi/PSO dan rekening cadangan Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2011 disajikan sebesar dana cadangan yang sampai dengan akhir Februari 2012 telah disalurkan kepada pihak ketiga/pemerintah daerah. Sementara itu, rekening cadangan subsidi/PSO dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disertorkan ke kas negara disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas dengan akun lawan Pendapatan yang Ditangguhkan.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

manfaat jangka panjang, serta hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

- Aset KKKS dan Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) pada LKPP Tahun 2010 disajikan pada kelompok Aset Lain-lain, sedangkan pada LKPP Tahun 2011 disajikan terpisah dari Aset Lain-lain.
- Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah, dan dapat diyakini keberadaan dan keandalan nilainya. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyakini, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESOM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.

- Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan seluruh nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal bedan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan berlindung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), seperti Otorita Batam, maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Pada LKPP Tahun 2010, nilai kekayaan bersih (ekuitas) pada Otorita Asahan, Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran dianjukan sebagai Inventari Permanen Lainnya.

- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemiliran dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dilakukan Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum dicapai status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Temasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan, seluruh piutang penerusinan pinjaman, piutang jangka panjang. Pada LKPP Tahun 2010, penerusan pinjaman yang berasal dari NPPP tahun 2009 dan setelah tahun 2009 disajikan sebagai Aset Lainnya, sedangkan penerusinan pinjaman yang berasal dari NPPP sebelum tahun 2009 disajikan sebagai Investasi Non Permanen. Pada LKPP Tahun 2011, termasuk dalam kelompok Penerusan Pinjaman adalah reklasifikasi Rekening

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) dari Investasi Jangka Panjang.

- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 pada LKPP tahun sebelumnya disajikan sebagai Dana Bergulir, dan pada LKPP Tahun 2011 disajikan sebagai Aset Lainnya.
- TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 ini telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Phak Ketiga, Utang Perhitungan Fikih Ketiga (PPFK), Bagian Lainnya Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perhendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Utang PPK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PPK yang belum disulorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tenggat pelaporan.
- SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.
- Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit eksport, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Uang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal 31 Desember 2011 disajikan sebagai berikut:

- *Fixed Rate (FR) Bonds* adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindah tanggalkan ke pemilikannya di pasar sekunder.
- *Obligasi Negara Efek (ORI)* adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau peranangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penurutuan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan setbulan sekali (setiap bulan). ORI dapat diperdagangkan dan dipindah tanggalkan ke pemilikannya di pasar sekunder.
- *Variable Rate (VR) Bonds* adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka 3 (tiga) hulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) hulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindah tanggalkan ke pemilikannya di pasar sekunder.
- *Zero Coupon (ZC) Bonds* adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi 31 Desember 2011, terdapat 2 seri ZC dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,25 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Zero Coupon dapat diperdagangkan dan dipindah tanggalkan ke pemilikannya di pasar sekunder.
- *Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)* merupakan jenis surat utang yang tidak dapat dipurdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SSBID1
- *SU-002 dan SU-004* adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

(sebelumnya 2018).

- **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. angsuran pokok SU007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUNI) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun.
- **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang berasal dari mata uang asing yang dapat dipergantikan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai punggungan bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah turlan lu aset yang menjadi dasar penurunan sukuk, serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pada akhir tahun 2011, terdapat 11 seri *fixed rate* SBSN dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12%. Selain itu terdapat 7 seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2021 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampai dengan 8,00%

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pemeliharaan, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya sekin perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyusulkan nilai tersebut kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pembi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dilihat berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liability* (*unfunded liability*) berupa kewajiban pensiun PNS diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan *Past service liability* terkait Tabungan Hari Tua PNS disajikan dalam Neraca.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

(6) Kewajiban Kontinjenси

*Kewajiban kontinjenси
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

Kewajiban kontinjenси merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjenси pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Prayek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tarif sebaik akibat adanya konsilai harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit eksport untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjenси Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

Kewajiban Kontinjenси terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyudian 1998/1999 disajikan dalam Note.

(7) Ekuitas Dana

*Ekuitas Dana terdiri dari
Ekuitas Dana Lancar dan
Ekuitas Dana Investasi*

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Khusus untuk akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya (kelompok Aset Lainnya-aset tidak lancar) berupa dana pihak ketiga yang dikelola Pemerintah seperti dana Bapertarum, serta dana yang akan diserahkan kepada pihak ketiga seperti dana rekening cadangan Dana Bagi Hasil dan rekening cadangan subsidi, mempunyai akun lawan kewajiban jangka pendek.

(8) Kurs Mata Uang Asing

Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut;
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Pendekuran yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penurunan.

Transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, seperti USD dan Yen, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Namun, transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjalankan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs luar *spot rate* pada tanggal transaksi. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah hanya membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011:

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Dolar Amerika Serikat (USD)	1	9.003,02	8.801,32
Umar Arab Saudi (GDP)	1	0,207,88	0,192,61
Dolar Canda (CAD)	1	0,681,52	0,626,37
Franz Swiss (CHF)	1	0,936,07	0,900,14
Yuan China (CNH)	1	1.433,10	1.337,64
Kroner Denmark (DKK)	1	1.579,22	1.602,75
Euro (EUR)	1	11.438,46	11.549,45
Pound Sterling Inggris (GBR)	1	13.968,77	13.893,00
Yen Jepang (JPY)	100	11.581,32	11.228,83
Korean Won (KRW)	1	7,84	7,97

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2011 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam valas, bagian lancar penerusan pinjaman dan utang luar negeri disajikan pada ekuitas dana lancar, sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri dan SBN Valas disajikan pada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

ekuitas dana investasi.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas):

- a. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- kurs transaksi pada saat konversi dikurangi kurs tengah BI hari sebelumnya dikalikan dengan mata uang asing yang dikonversi;
- ditambah dengan proporsi akumulasi selisih kurs yang belum terealisasi sampai dengan hari sebelumnya dari mata uang asing yang dikonversi terhadap total mata uang asing.

Selisih kurs untung diakui sebagai PNBP Lainnya, sedangkan selisih kurs rugi diakui sebagai Belanja Lain-lain, dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- b. Selisih kurs yang belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Salaih kurs yang belum terealisasi tersebut disajikan pada Neraca sebagai penambahan atau pengurang ekuitas setelah memperhitungkan proporsi selisih kurs dari mata uang asing yang telah terealisasi.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas:

Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

- a. *Outstanding* valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan.

- b. Kurs penarikan terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Loan* yang penarikannya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004
- *Loan* yang penarikannya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai rupiah dengan valas pada tanggal pernikinan terakhir.
- Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* (2011) maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.

(9) Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggrae Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah 4 (empat) tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR-NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2011, Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga aset kewajiban eks BRR NAD-Nias yang disajikan pada LKPP Tahun 2011 ini adalah aset kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK dikurangi dengan aset kewajiban yang telah diserahkan kepada pihak lain sampai dengan 31 Desember 2011.

(10) Daftar Perubahan Kebijakan Akuntansi

*Daftar Perubahan
Kebijakan Akuntansi*

Pada LKPP Tahun 2011 terdapat beberapa perubahan kebijakan akuntansi dari LKPP Tahun 2010, yaitu:

No.	Kebijakan Akuntansi	UKPP Tahun 2011	UKPP Tahun 2010
1.	Inisiatif Negara Mengurangi Peraninta (Faqih RMITP dan Be Mesuk) Mengurangi Peraninta (RMITP)	Pendapatan Pajak CIIA Pendapatan BMN-RMF, Balai Seksi Pajak CIIA, dan Balai Audit RMN-RMF dapatkan pada laporan keuangan Anggaran dan laporan Arus Kas	Pemerasatan Pajak JIIA Pencairan BMN-RMF, Balai Seksi Pajak CIIA, dan Balai Audit RMN-RMF ternyata dibatalkan oleh Laporan keuangan Anggaran dan tidak diperbarui oleh Laporan Arus Kas
2.	Inisiatif Pengelarahan Hibah dalam Bentuk Sarang Nias	Pendapatan Hibah dan Bantuan Borang Nias oleh pandapat hibah dalam bentuk barang-barang dilaikkan pada Laporan Pendek Anggaran dan tidak dilaikkan pada Laporan Arus Kas	Hanya pengelarahan di Balai
3.	Fengavelan Dana Telangan Kewajiban Uang Muka dari Dilengkapi B.I.N	Dicatat sebagai Pencairan Penbiayaan	Dicatat sebagai Kriman Uang Muka dari menteri dan dikemasukan SII PG
4.	Kas di rekening	<p>* Menteri Keuangan CIIA Jl. Jati II No. 1 Bandung Pembentahanan: Limik Wersampung Penyerahan: Dina Telangan dan Pencairan Kas RPR (Nomor 503.00000488C);</p> <p>* Menteri Kesehatan Penyaluran Uang RBN (Nomor: EC2-00001300)</p> <p>* Seluruh klaus Menteri swayasa: Kas dan Pencairan Sistem PT Telekom di Pasar Domestik (Nomor 510.000239980)</p> <p>* BUN Untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan (Nomor 502.000002980)</p> <p>* Rekening Dapkap U/Pembungkaran Hibah Dan Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam National Dalam Valuta</p>	<p>Dicatat pada Aset lainnya sebagai "Jenis yang Diberikan Penggunaannya"</p> <p>Dicatat pada Aset Lainnya sebagai "Cas di Rekening Pemerintah lainnya"</p>

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

	USD Rp2.074411980)	(Nomor	
5.	Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Bagi Hasil	Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disertakan ke kas negara diajukan sebagai "Kas Lainnya dan Setara Kas" dengan akun lawan "Pendapatan yang Ditangguhkan". Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Bagi Hasil yang sampai dengan akhir Februari 2012 disalurkan kepada pihak ketiga berdasarkan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" dengan akun lawan "Jangka Kurang" dan Utang Kepada Pihak Ketiga".	Salinannya disajikan pada "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" dengan akun lawan "Utang Subsidi" dan "Utang Kepada Pihak Ketiga".
6.	Pengeluaran KU yang dikenakan pengeluaran kepada Kementerian Keuangan	Disejalkan dalam sejupuk pengeluaran sebagai Aset Lainnya atau Pendapatan lainnya dengan persentase 100%	Disediakan dalam kelimai: Aset Lainnya
7.	Investasi pada R. Pertama Permininan Simpulan (RPS), Otorita Asahan, Ambar Batam, Tanur Miri Indonesia, Indah (IMI), Dosen Pengembang Daerah Menggalas Warabeku, dan Yayasan Anugerah Veteran	Investasi pada R. Pertama Permininan Simpulan (RPS) disajikan sebagai Investasi Lainnya dan investasi pada Unit Penempahan Jangka Panjang (UPJ) dan Aset Lainnya pada Unit Penempahan Jangka Panjang akan Iuran Konversi dan Aset Lainnya	Salinannya disajikan sebagai "Investasi Penempahan Lainnya"
8.	Peningkatan dana investasi Ritel dan Perbaikan Daerah (DIPRD)	Disejalkan dalam sejupuk Aset Lainnya Perbaikan Prasarana	Disediakan secara bagian dari investasi Jangka Panjang
9.	Evaluasi Baperituan	Dana ditunjukkan dalam JELK setiap manfaat pelaksanaan undang-undang Dana Persiapan pada FT sepanjang	Disediakan secara "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" dengan akun lawan "Jangka Kepada Pihak Ketiga"
10.	Aset KOKS dan Aset Eks PPRA	Disejalkan pada Aset Lainnya non tercatat dan sejupuk Aset Lain	Disediakan dalam kelimai: "Aset Sintetis"
11.	Aset KUKM, KKPA Bagi Hasil Bank Muamalat, Dana Inisiatif Lingkungan	Disejalkan pada Aset Lainnya sebagai "Piutang Jangka Panjang"	Disediakan pada pada Aset Lainnya sebagai "Aset Lain-lain"
12.	Endowment Fund (Dana Pengembangan Pendidikan)	Disejalkan pada Aset Lainnya sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya"	Disediakan pada pada Aset Lainnya sebagai "Aset Lain-lain"
13.	Metode perhitungan selisih kurs kas dalam mata uang asing	Uhat Kebijakan Akuntansi Mata Uang Asing	Selisih kurs terrealisasi dihitung dari: kurs transaksi pada saat konversi dikurangi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/teg*)

			kurs tengah BI hari sebelumnya dikalikan dengan mata uang asing yang dikonversi. Kurs yang belum terealisasi pada tanggal pelaporan dihitung dari perjabaran kurs tengah BI pada tanggal pelaporan dibandingkan dengan perjabaran kurs tengah BI hari sebelumnya.
14.	Metode perhitungan selisih kurs utang dalam mata uang asing	Lihat Kebijakan Mata Uang Asing	Selisih kurs yang belum terealisasi dihitung dari selisih nilai buku utang pada tanggal 30/09/11 dengan kurs tengah BI ambil tanggal 30/09/11 dikonversi dan penambahan dan pengurangan dengan jumlah tersebut

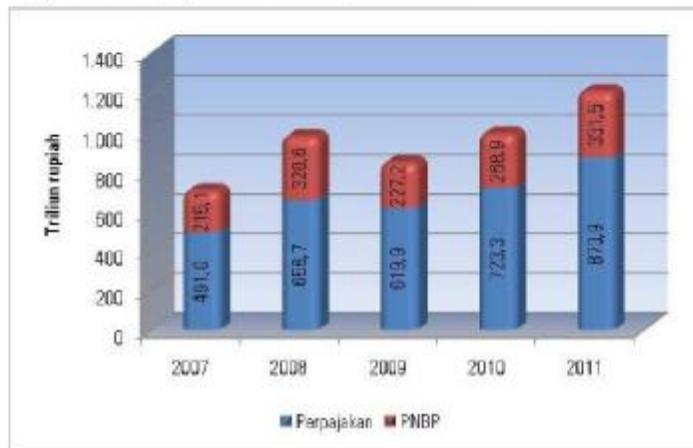
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2011 adalah sebesar Rp1.210.599.653.359.415 atau mencapai 103,48 persen dari target APBN-P TA 2011 sebesar Rp1.169.914.639.272.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perajakan sebesar Rp873.873.892.399.381, PNBP sebesar Rp331.471.821.098.730, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.253.839.861.304. Dalam realisasi Penerimaan Perajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebesar Rp3.415.120.010.065 serta dalam Pendapatan Hibah termasuk Pendapatan Hibah non kas (barang/jasa/surat berharga) sebesar Rp995.722.324.430.

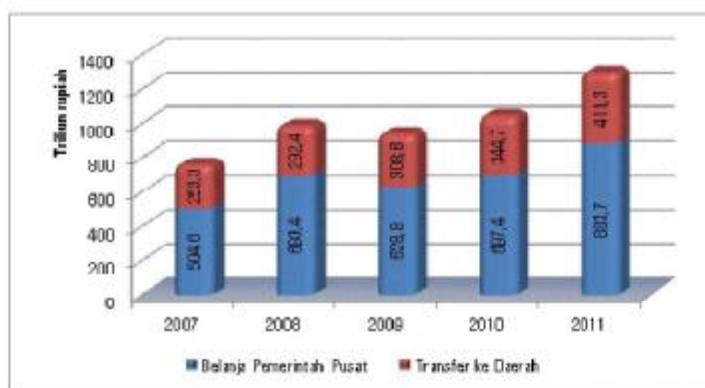
Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 mengalami kenaikan Rp215.328.141.968.072 atau 21,64 persen jika dibandingkan dengan TA 2010. Perkembangan realisasi Penerimaan Perajakan dan PNBP sejak TA 2007 terlihat pada Grafik 37.



Grafik 37: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perajakan dan PNBP TA 2007 - 2011

Realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.294.999.146.475.024 atau 98,05 persen dari jumlah yang diangarkan dalam APBN-P TA 2011 sebesar Rp1.320.751.314.516.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp1.042.117.219.744.817. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp883.721.886.196.519, Transfer ke Daerah sebesar Rp411.324.764.631.790, dan terdapat Suspen sebesar minus Rp47.504.353.285. Suspen tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas Negara dan menurut Kementerian Negara/Lembaga. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2007 dapat dilihat pada Grafik 38.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Auditasi)



Grafik 38: Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2007 - 2011

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.210.599.653.359.415 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.294.999.146.475.024, maka terjadi Defisit Anggaran pada TA 2011 sebesar Rp84.399.493.115.609

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2011 adalah sebesar Rp130.948.869.624.420, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp148.748.034.850.068 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp17.799.165.225.648.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2011 sebesar Rp46.549.376.508.811.

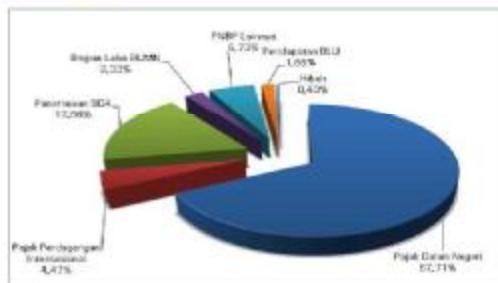
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.210,60 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 adalah sebesar Rp1.210.599.653.359.415, berarti mencapai 103,48 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.189.914.639.272.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 39.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**Grafik 39: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011****B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan**

*Penerimaan Perpajakan
Rp873,87 triliun*

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2011 adalah sebesar Rp873.873.892.399.381 atau mencapai 99,45 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp878.685.216.762.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2011 lebih besar Rp150.567.223.777.642 atau 20,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.338.636.314.000, dan Bea Masuk DTP sebesar Rp76.483.696.085.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Penerimaan Pajak Dalam Negeri Rp819,75 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp819.752.426.342.423 atau mencapai 98,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp831.745.348.636.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2011 lebih besar Rp125.360.291.411.132 atau 18,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
PPh Migas	73.095.496.754.938	56.872.731.112.807
PPh Nonmigas	354.683.553.082.514	295.268.135.134.989
PPh Fiskal	4.026.576.864	11.458.427.304
PPh Ditanggung Pemerintah	3.338.636.314.000	2.893.212.477.088
PPN dan PPnBM	277.800.076.679.384	230.604.864.967.823
PBB	29.893.164.324.396	28.580.589.978.740
BPHTB	(730.151.679)	8.026.429.073.342
Cukai	77.010.010.613.795	66.165.922.512.567
Pajak Lainnya	3.928.192.148.211	3.968.791.246.631
Jumlah	819.752.426.342.423	694.392.134.831.291

Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.338.636.314.000 dalam bentuk Subsidi.

Peningkatan Pendapatan Pajak Dalam Negeri disebabkan antara lain oleh kenaikan PPh Migas karena adanya pertumbuhan positif pada penerimaan yang berasal dari penerimaan PPh Minyak Bumi dan Gas Alam berupa kenaikan harga minyak dunia.

Pada TA 2011 tidak terdapat penerimaan BPHTB, karena sejak TA 2011 pemungutan BPHTB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah setempat. Realisasi negatif atas BPHTB merupakan pengembalian atas BPHTB tahun anggaran sebelumnya.

Kenaikan Pendapatan Cukai pada TA 2011 disebabkan oleh peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Januari 2011 sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Selain itu, kenaikan juga disebabkan peningkatan efektivitas pengawasan peredaran MMEA melalui pelekatkan pita cukai.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional Rp54,12 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 adalah sebesar Rp54.121.466.056.958, atau mencapai 115,30 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp46.939.868.126.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 lebih besar Rp25.206.932.366.510 atau naik 87,18 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk	25.265.863.309.375	20.016.826.394.532
Bea Keluar	28.855.802.747.583	8.897.707.295.916
Jumlah	54.121.466.056.958	28.914.533.690.448

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2011, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp76.483.696.085.

Kenaikan Pendapatan Bea Masuk pada TA 2011 tersebut disebabkan oleh meningkatnya importasi yang ditunjukkan dengan naiknya *Dutiable Import* sebesar USD30,46 miliar atau 27,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana nilai *Dutiable Import* tahun 2011 sebesar USD140,83 miliar sedangkan tahun 2010 sebesar USD110,37 miliar.

Kenaikan Pendapatan Bea Keluar pada TA 2011 disebabkan kenaikan tarif Bea Keluar CPO pada tahun 2011, kenaikan Harga Patokan Eksport (HPE) CPO dan turunannya sebagai dampak meningkatnya harga CPO di pasar internasional, dan kenaikan volume eksport CPO dan turunannya pada tahun 2011.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp331,47 triliun

Realisasi PNBP TA 2011 adalah sebesar Rp331.471.821.098.730 atau mencapai 115,67 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp286.567.317.002.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2011 lebih besar Rp62.529.964.889.888 atau 23,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp213,82 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2011 adalah sebesar Rp213.823.349.552.827, atau mencapai 111,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp191.976.022.718.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2011 lebih besar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rp44.997.907.232.541 atau 26,65 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	141.303.493.452.283	111.814.923.202.135
Pendapatan Gas Alam	52.187.085.923.633	40.918.314.502.416
Pendapatan Pertambangan Umum	16.368.789.735.678	12.646.750.881.580
Pendapatan Kehutanan	3.216.476.006.406	3.009.672.120.638
Pendapatan Perikanan	183.802.161.080	91.995.180.732
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	562.702.273.747	343.786.432.785
Jumlah	213.823.349.552.827	168.825.442.328.286

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Peningkatan Pendapatan Minyak Bumi pada TA 2011 terutama disebabkan oleh naiknya harga rata-rata minyak mentah Indonesia, yaitu tahun 2010 rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai USD78,07/barrel sementara pada tahun 2011 harganya naik hingga pada level USD109,94/barrel. Peningkatan Pendapatan Gas Alam pada TA 2011 antara lain disebabkan peningkatan pada penerimaan LNG sebagai akibat kenaikan rata-rata ICP tahun 2011 dari tahun 2010.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

*Bagian Pemerintah atas
Laba BUMN Rp28,18
triliun*

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2011 adalah sebesar Rp28.183.973.126.600 atau mencapai 97,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp28.835.823.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2011 lebih kecil Rp1.912.959.567.665 atau turun 6,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	3.627.944.571.970	3.622.669.340.835
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	24.556.028.554.630	26.474.263.353.430
Jumlah	28.183.973.126.600	30.096.932.694.265

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2011 tersebut, sebesar 78,50 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
1	PT Pertamina	5.623.103.550.000
2	PT PLN	4.545.000.000.000
3	PT Telkom	3.056.196.863.756
4	PT Perusahaan Gas Negara	2.141.920.001.444
5	PT Freeport Indonesia	1.761.137.250.000
6	PT Bank Mandiri	1.688.383.760.000
7	PT Bank Rakyat Indonesia	980.560.000.000
8	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	838.674.325.125
9	PT Semen Gresik	751.098.836.530
10	PT Bank Negara Indonesia	738.263.011.873
Total 10 BUMN		22.124.337.598.728

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya Rp69.36
triliun

Realisasi PNBP Lainnya TA 2011 adalah sebesar Rp69.360.502.832.532 atau 137,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp60.339.436.023.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2011 lebih besar Rp9.931.863.673.512 atau naik 16,71 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	21.650.214.589.444	16.498.911.495.199
Pendapatan Jasa	26.634.516.584.922	25.416.545.489.101
Pendapatan Bunga	4.893.239.511.754	7.352.406.187.084
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	240.761.503.805	166.607.987.382
Pendapatan Pendidikan	2.965.915.235.801	2.983.449.653.789
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	92.848.578.390	213.767.299.728
Pendapatan Iuran dan Denda	1.319.106.624.583	704.797.429.654
Pendapatan Lain-lain	11.563.901.203.833	6.092.153.717.133
Jumlah	69.360.502.832.532	59.428.639.159.020

Pendapatan lain-lain dari penerimaan bukan pajak lainnya berasal dari pendapatan penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp7.986.615.365.380, pendapatan pelunasan piutang sebesar Rp26.715.895.818, pendapatan dari penutupan rekening sebesar Rp628.093.309.285, pendapatan dari selisih kurs sebesar Rp2.713.540.544.637 serta pendapatan lain-lain sebesar Rp208.936.088.712.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU
Rp20,10 triliun

Realisasi Pendapatan BLU TA 2011 adalah sebesar Rp20.103.995.586.771 atau 130,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp15.416.035.261.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2011 lebih besar Rp9.513.153.551.501 atau naik 89,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	17.215.810.879.582	9.509.402.889.281
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	102.760.116.486	65.209.252.626
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	503.261.094.628	312.384.162.788
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	17.821.832.190.698	9.906.996.304.065
Pendapatan Hibah BLU	167.462.819.227	34.976.353.539
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	647.963.491.201	172.630.678.219
Pendapatan BLU Lainnya	1.467.137.085.647	476.238.698.847
Jumlah	20.103.995.586.771	10.590.842.035.270

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Peningkatan Pendapatan BLU TA 2011 terutama disebabkan diakunya pendapatan pada 7 (tujuh) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sebagai Pendapatan BLU sebesar Rp5.484.567.614.814.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah
Rp5.25 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2011 adalah sebesar Rp5.253.939.861.304 atau 112,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.662.105.508.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2011 lebih besar Rp2.230.953.300.541 atau naik 73,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2011 termasuk realisasi Pendapatan Hibah Non Kas (barang dan jasa) sebesar Rp552.196.724.430. Pendapatan Hibah Non Kas tersebut dicatat dengan jumlah yang sama pada sisi belanja. Pendapatan Hibah Non Kas tidak dicatat pada Laporan Arus Kas.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.2. Belanja Negara

Belanja Negara
Rp1.294.98 triliun

Realisasi Belanja Negara TA 2011 adalah sebesar Rp1.294.999.146.475.024 atau 98,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.320.751.314.516.000. Belanja Negara TA 2011 lebih besar Rp252.881.926.730.207 atau naik 24,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2010. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah
Pusat Rp883,70 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 adalah sebesar Rp883.721.886.196.519 atau 97,30 persen dari APBN-P sebesar Rp908.243.422.687.800. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 lebih besar Rp186.315.506.009.342 atau 26,72 persen dari Realisasi TA 2010.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

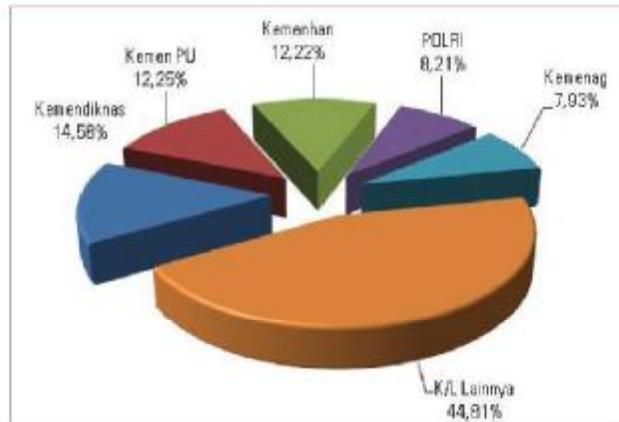
Belanja Pemerintah Pusat
menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp464.848.316.511.891 atau 52,60 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2011 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp418.873.569.684.629. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp81.060.518.204.464 atau 14,57 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 40.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)



Grafik 40: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2011

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

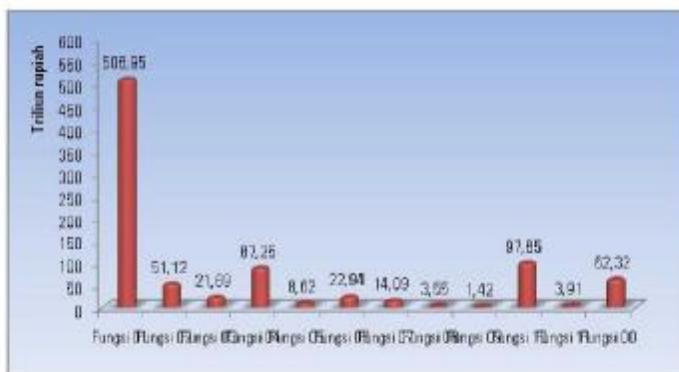
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2011 dan 2010 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 8.

Tabel 7
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2011 dan TA 2010
(Dalam Rupiah)

Kode	Urutan Fungsi	TA 2011 (Audit/ea)	TA 2010 (Audit/ea)
01	Pelayanan Umum	508.945.453.827.554	471.567.571.038.893
02	Pertahanan	51.126.989.252.897	17.080.482.218.813
03	Ketertiban dan Keamanan	21.691.237.866.477	13.635.412.297.368
04	Ekonomi	87.246.161.514.834	92.178.365.060.333
05	Lingkungan Hidup	8.616.096.671.607	6.548.610.980.550
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	22.937.807.929.477	20.053.181.892.237
07	Kesehatan	14.088.769.296.193	18.753.019.106.219
08	Pariwisata dan Budaya	3.553.493.017.287	1.408.581.931.374
09	Agama	1.424.732.819.450	676.756.933.633
10	Pendidikan	97.854.046.904.341	90.818.313.948.039
11	Kependidikan dan Perlindungan Sosial	3.908.376.361.626	3.341.614.948.781
00	Tidak ada fungsi	62.337.761.975.876	911.369.817.150
	Total	893.721.886.198.818	697.486.386.187.177

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Auditasi)

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2011 dapat terlihat pada Grafik 41.



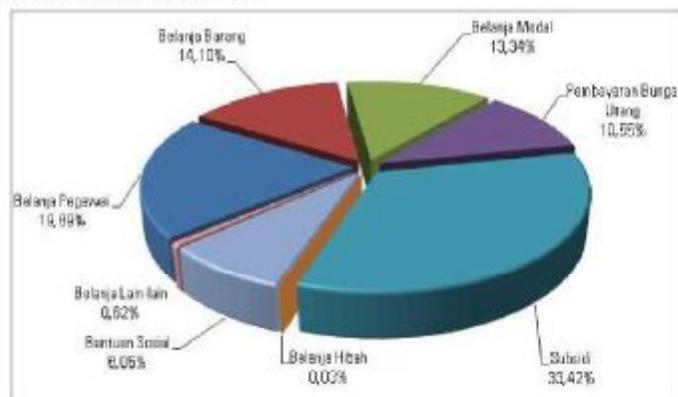
Grafik 41: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2011

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 42.



Grafik 42: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp175,74 triliun*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2011 adalah sebesar Rp175.737.918.419.015 yang berarti 95,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp184.088.939.020.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2011 lebih besar Rp27.659.634.320.406 atau 18,68 persen dari realisasi TA 2010. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.445.102.508.675	42.378.927.317.781
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	40.263.378.647.670	37.026.799.873.139
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	819.043.806.833	727.848.865.884
Belanja Gaji Dokter PTT	771.007.436.015	680.976.740.462
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	248.860.447.822	165.773.820.773
Belanja Honorarium	1.369.522.161.066	1.453.910.313.846
Belanja Lembur	501.542.768.155	468.392.462.505
Belanja Vakasi	217.880.587.087	248.540.481.180
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	20.337.894.683.749	12.163.454.097.369
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	59.472.181.551.185	50.605.032.969.737
Belanja Asuransi Kesehatan	2.141.251.233.920	1.818.913.001.200
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	150.578.864.996	129.298.057.338
Belanja Cadangan Perubahan Sharing	(374.730.220)	-
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dep. Hub. Pada PT KAI	(39.347.938)	202.215.097.395
Jumlah	175.737.918.419.015	148.078.084.098.009

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp124,64 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2011 adalah sebesar Rp124.639.479.502.304 yang berarti 87,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp142.335.864.901.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2011 lebih besar Rp27.042.641.102.479 atau naik 27,71 persen dari Realisasi TA 2010. Dalam Belanja Barang TA 2011 termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp469.912.832.050. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang Operasional	21.729.366.193.581	20.052.908.959.051
Belanja Barang Non Operasional	42.942.839.212.826	31.489.642.277.566
Belanja Barang Penunjang Kegiatan DKUTP	82.251.235.675	-
Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan	2.054.644.291.841	-
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah	2.167.190.771	-
Belanja Jasa	16.360.913.536.031	12.122.304.052.583
Belanja Pemeliharaan	9.284.580.642.833	7.809.477.752.715
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.919.945.204.322	16.772.900.020.797
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.719.352.848.549	1.542.375.569.738
Belanja Barang BLU	12.543.409.145.875	7.807.229.767.375
Jumlah	124.639.479.502.304	97.596.838.399.825

Belanja Barang BLU sebesar Rp12.543.409.145.875 terdiri dari:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	4.336.578.718.401	2.544.506.232.879
Belanja Barang	4.590.288.645.438	2.754.048.722.902
Belanja Jasa	1.498.345.274.987	1.086.257.340.653
Belanja Pemeliharaan	421.634.028.720	289.313.699.206
Belanja Perjalanan	348.829.623.278	175.855.804.442
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.349.732.855.051	947.247.967.293
Jumlah	12.543.409.145.875	7.807.229.767.375

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

*Belanja Modal Rp117.854.532.071.332
triliun*

Realisasi Belanja Modal TA 2011 adalah sebesar Rp117.854.532.071.332 yang berarti 81,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp144.571.840.017.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2011 lebih besar Rp37.567.466.385.667 atau 46,79 persen dari Realisasi TA 2010. Dalam Belanja Modal TA 2011 tidak termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp82.283.892.380.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.488.566.777.978	1.783.053.776.727
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.946.011.361.882	28.282.275.864.330
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.705.816.487.069	16.553.253.478.159
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.586.433.921.962	30.165.754.367.386
Belanja Modal Fisik Lainnya	3.342.382.032.693	2.328.404.969.088
Belanja Modal BLU	1.785.321.489.748	1.176.323.230.975
Jumlah	117.854.532.071.332	80.287.065.885.665

Belanja Modal BLU terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Modal Tanah	60.615.528.743	79.579.479.251
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	802.897.438.638	565.857.865.080
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	707.889.155.393	479.744.809.743
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.102.737.074	14.313.393.755
Belanja Modal Fisik Lainnya	181.836.629.900	36.827.683.186
Jumlah	1.785.321.489.748	1.176.323.230.975

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

*Pembayaran Bunga
Utang Rp93.261.919.810.886
triliun*

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2011 adalah sebesar Rp93.261.919.810.886 yang berarti 87,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp106.583.810.504.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2011 lebih besar Rp4.878.686.046.789 atau lebih besar 5,52 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	57.210.627.839.839	54.560.273.882.081
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	25.547.246.289.356	26.212.133.864.479
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	4.768.589.586.200	2.750.895.750.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Belanja Pembayaran Imbalan SBSN LN	514.876.089.450	513.188.205.250
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	3.236.157.587.300	2.073.333.477.100
Belanja Pembayaran Discount SUN LN	373.805.800.000	177.338.000.000
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	310.812.680.000	737.473.500.000
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	51.466.619.000	36.888.773.200
Belanja Pembayaran Denda (Imbalan Bunga Pajak)	1.247.388.871.387	1.321.487.211.917
Belanja Pembayaran Baya Penerimaan Hibah	1.235.358.354	-
Jumlah	93.261.810.810.886	88.383.233.764.007

B.2.2.1.5. Subsidi

Subsidi Rp295,36 triliun

Realisasi Subsidi TA 2011 adalah sebesar Rp295.358.229.636.324 yang berarti 123,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp238.466.978.142.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2011 ini lebih besar Rp102.651.180.109.125 atau 53,27 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Subsidi Premium	79.782.409.098.742	38.137.806.140.189
Subsidi Minyak Solar	53.345.090.871.434	21.851.803.691.510
Subsidi Minyak Tanah	9.441.089.427.448	7.609.567.317.106
Subsidi Biji	22.592.749.563.351	14.852.055.677.068
Subsidi Pangan	18.539.282.621.000	15.163.810.327.000
Subsidi Listrik	90.447.485.461.301	57.601.620.070.361
Subsidi Benih	96.813.542.095	2.177.487.899.740
Subsidi Pupuk	16.344.587.997.389	18.410.887.761.046
Belanja Subsidi PPh	3.398.838.314.000	2.893.212.477.088
Belanja Subsidi PPn	-	11.066.846.770.488
Belanja Subsidi Pajak Lainnya	-	597.581.839.451
Belanja Subsidi BM	73.117.386.000	257.632.877.488
Belanja Subsidi PT KAI	630.870.912.779	535.000.000.000
Belanja Subsidi PT PEI	872.752.505.000	600.000.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	256.844.900.000	175.000.000.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	73.358.751.500	63.884.220.380
Subsidi Bunga KPR	611.843.137.443	415.988.562.859
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	179.388.458.289	132.058.678.059
Subsidi Bunga Kredit Program Bis KBLI	10.070.776.218	-
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	74.504.074.566	42.323.334.937
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Perjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	624.185.242.603	223.183.797.257
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	-	2.303.401.488
Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nas	2.780.047.151	3.442.236.760
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	20.080.545.778	3.680.340.105
Belanja Subsidi Kredit Resi Gedung	128.971.207	1.188.849
Jumlah	295.358.229.636.324	192.707.049.527.198

Terlampaunya realisasi Belanja Subsidi dari anggaran dalam APBN-P dapat terjadi sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Dalam realisasi subsidi TA 2011 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2011, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSO sebesar Rp8.895.590.963.425. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima. Rincian penempatan dana atas realisasi subsidi TA 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Subsidi Premium	33.101.320.803
Subsidi Minyak Tanah	248.585.387.648
Subsid Minyak Solar	112.845.701.482
Subsidi LPG	348.690.214.585
Subsidi Listrik	284.141.726.587
Subsidi pupuk	3.344.529.740.510
Subsidi Benih	80.942.298.990
Subsidi PT Pos Indonesia	64.260.500.000
Subsidi PT PELNI	136.752.605.000
Subsidi PT KAI	159.902.285.000
Subsidi Pangan	4.100.839.284.800
Jumlah	8.895.590.983.425

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp300,11 miliar

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp300.108.798.353 yang berarti 70,42 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp426.192.193.000. Realisasi belanja Hibah tersebut terdiri dari:

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Local Basic Education Capacity (L-BEC)	45.937.448.826
Air Minum	161.677.000.000
Air Limbah Terpusat	16.030.000.000
Water and Sanitation Program, Sub Programe D-Sanitation City Pilot Projects (Wasap-D)	6.287.150.700
Investment Enhancement Grant (IEG)	43.389.800.400
Mass Rapid Transit (MRT)	6.777.398.429
Pembangunan Cardiac Centre at Shifa Hospital Gaza	19.999.999.998
Jumlah	300.108.798.353

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp71,10 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2011 adalah sebesar Rp71.104.328.162.347 yang berarti 91,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp77.467.135.177.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2011 lebih besar Rp2.493.216.176.060 atau lebih besar 3,63 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audit/ea</i>)
Belanja Bantuan Kompeniasi Kenaikan Harga BBM	6.246.014.890.528	4.606.123.632.500
Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga Guru	32.091.722.341.802	37.805.677.677.567
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.729.510.000	965.937.110.000
Belanja Bantuan Beasiswa	4.685.060.080.695	4.779.029.074.747
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	146.690.983.500	78.921.402.400
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	27.931.108.346.822	20.572.423.089.073
Jumlah	71.104.328.162.347	68.611.111.986.287

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp5,44 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2011 adalah sebesar Rp5.465.369.795.958 yang berarti 38,21 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp14.302.662.733.800. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2011 lebih kecil Rp16.207.618.151.962 atau lebih kecil 74,78 persen dari Realisasi TA 2010. Rincian Belanja lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja untuk Rekonstruksi Aceh	-	1.076.511.756
Belanja Kerjasama Teknis Internasional	13.893.595.128	-
Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri	9.778.482.000	-
Belanja Baya/Uaha/Pungut PBH untuk DJP	-	946.476.175.056
Belanja Non Modal-Otorita Batam	557.785.893	845.925.755
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	360.991.025.539	909.200.000.000
Jasa Surveyor	-	232.979.742.237
Jasa Perpendidikan	199.847.380.770	102.072.122.875
Belanja TVRI	685.547.340.402	571.871.726.475
Belanja RRI	677.104.143.519	558.912.123.288
Dana Cadangan Risiko Kenakan Harga Tanah	406.145.000.000	358.183.000.000
Belanja Lain-lain	3.111.505.042.707	17.991.370.620.678
Jumlah	5.465.369.795.958	21.672.987.947.820

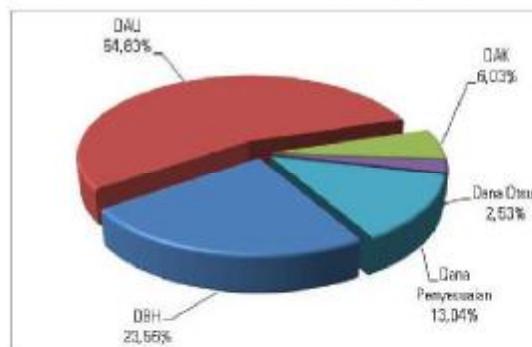
Penurunan realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2011 disebabkan adanya penataan akun-akun pada Belanja Lain-lain sesuai dengan *nature of transaction*-nya, bahwa kegiatan yang tidak memenuhi karakteristik dibayai dari Belanja Lain-lain harus dianggarkan pada belanja KJL yang bersangkutan.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp411,32 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011 adalah sebesar Rp411.324.764.631.790, yang berarti 99,71 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp412.507.891.828.200. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011 ini lebih besar Rp86.597.152.801.411 atau 19,32 persen dari Realisasi TA 2010. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Komposisi realisasi Transfer untuk Daerah TA 2011 disajikan pada Grafik 43.



Grafik 43: Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**B.2.2.2.1. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan
Rp347,25 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2011 adalah sebesar Rp347.246.213.954.316 yang berarti 99,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp347.538.605.495.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2011 ini lebih besar Rp30.534.920.925.248 atau 9,64 persen dari realisasi TA 2010. Dana Perimbangan terdiri dari *i*) Dana Bagi Hasil (DBH), *ii*) Dana Alokasi Umum (DAU), dan *iii*) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

DBH Rp96,91 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2011 adalah sebesar Rp96.908.991.981.316 atau 100,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp96.772.092.547.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2011 ini lebih besar Rp4.725.500.747.448 atau naik 5,13 persen dari realisasi TA 2010. Terlampaunya realisasi DBH dari anggarannya tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dibagikan yang melampaui anggarannya. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11.525.556.919.178, Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp1.408.448.764.184 dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp53.974.986.297.954.

Urutan	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	13.237.326.489.261	10.931.465.581.702
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	28.281.482.563.025	27.146.941.959.903
DBH Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.747.876.892	7.737.248.068.834
Jumlah DBH Pajak	41.525.556.919.178	45.815.855.610.439
DBH Cukai	1.408.448.764.184	1.202.111.025.283
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	20.634.080.735.284	20.567.117.652.257
DBH SDA Gas Bumi	16.672.249.768.993	14.629.244.504.747
DBH SDA Pertambangan Umum	14.488.126.522.475	7.790.420.800.000
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	519.987.115.194	305.837.001.838
DBH SDA Kehutanan	1.512.465.063.891	1.753.104.639.304
DBH SDA Perikanan	138.077.102.117	120.000.000.000
Jumlah DBH SDA	53.974.986.297.954	45.165.724.598.146
Total DBH	96.908.991.981.316	92.183.491.233.868

Dalam realisasi DBH SDA sebesar Rp53.974.986.297.954, terdapat Rp9.899.647.659.901 yang sampai dengan akhir TA 2011 dananya masih tersimpan pada rekening dana cadangan (*escrow account*), karena masih menunggu identifikasi daerah penerima. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena masih dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi daerah penerima oleh DJPK, pemerintah daerah, dan pihak kementerian terkait. Setelah rekonsiliasi/verifikasi selesai, maka dana cadangan DBH tersebut akan dibayarkan kepada pemerintah daerah.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

DAU Rp225,53 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2011 adalah sebesar Rp225.533.712.048.000, atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp225.533.712.048.000. Hal

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

ini berarti realisasi DAU TA 2011 ini lebih besar Rp21.962.221.420.800 atau naik 10,79 persen dari realisasi TA 2010.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

DAK Rp24,80 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2011 adalah sebesar Rp24.803.509.925.000, atau 98,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp25.232.800.900.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2011 ini lebih besar Rp3.847.198.757.000 atau 18,36 persen dari realisasi TA 2010.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pada TA 2011, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, serta sarana dan prasarana perdesaan.

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp64,08 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2011 adalah sebesar Rp64.078.550.677.474 atau 98,63 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp64.969.286.333.200. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2011 ini lebih besar Rp36.062.231.876.163 atau lebih besar 128,72 persen dari realisasi TA 2010. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp10,42 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2011 adalah sebesar Rp10.421.312.993.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp10.421.312.993.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2011 ini lebih besar Rp1.321.699.313.000 atau lebih besar 14,52 persen dari realisasi TA 2010.

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Transfer Dana Otsus Untuk NAD	4.510.658.496.500	3.849.806.840.000
Transfer Otsus Untuk Papua	3.957.469.547.560	3.404.884.788.000
Transfer Dana Otsus untuk Papua Barat	1.963.196.946.960	1.754.842.052.000
Jumlah	10.421.312.993.000	9.009.613.680.000

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian Rp53,66 triliun

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2011 adalah sebesar Rp53.657.237.684.474, yang berarti 98,37 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp54.547.973.340.200. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2011 ini lebih besar Rp34.740.532.563.163 atau lebih besar 183,65 persen dari realisasi TA 2010. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2011 terdiri dari:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Uraian	Jumlah (Rp)
Dana Penyesuaian Lainnya	78.907.877.152
Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	3.679.526.736.060
Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000
Dana Tunjangan Profesi Guru	18.510.236.637.649
Dana Bantuan Operasional Sekolah	16.329.888.218.250
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	7.636.043.988.000
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	6.136.834.227.363
Jumlah	53.657.237.884.474

B.2.2.3. Suspen

Suspen minus Rp50,03 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspen belanja TA 2011 adalah sebesar minus Rp47.504.353.285, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga *)	Selisih (BUN - K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	175.745.947.140.204	175.737.918.419.015	8.028.721.189
Belanja Barang	124.159.183.392.116	124.168.586.670.254	(10.403.278.138)
Belanja Modal	117.759.087.730.733	117.772.248.176.952	(13.160.448.219)
Pembayaran Bunga Utang	93.260.261.464.346	93.261.918.810.886	(1.658.346.540)
Subsidi	295.358.422.916.324	295.358.229.836.324	193.280.000
Belanja Hibah	300.108.798.355	300.108.798.352	2
Belanja Bantuan Sosial	71.076.280.233.168	71.104.326.162.347	(28.037.829.179)
Belanja Lain-lain	5.464.234.053.592	5.465.369.705.958	(1.135.742.366)
Total	883.123.515.728.838	883.160.680.472.080	(46.173.743.251)
Transfer keDaerah			
Dana Bagi Hasil	96.808.986.158.302	96.808.981.881.316	4.176.986
Dana Alokasi Umum	225.533.712.048.000	225.533.712.048.000	0
Dana Alokasi Khusus	24.802.228.752.980	24.803.508.925.000	(1.280.172.020)
Dana Diteruni Khusus	10.421.312.983.000	10.421.312.983.000	0
Dana Penyesuaian	53.657.183.089.474	53.657.237.884.474	(54.615.000)
Total	411.323.434.021.766	411.324.764.631.780	(1.330.610.034)
Suspen			(47.504.353.285)

*) Data K/L tidak termasuk Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pendapatan Hibah Non Kas (Barang/Jasa)

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran Rp84,40 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2011 adalah sebesar Rp84.399.493.115.610, yang berarti 55,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp150.836.675.244.000, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	TA 2011 (Audit)	TA 2010 (Audit)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210.528.653.358.415	905.271.511.381.343
Belanja Negara	(1.294.999.146.475.020)	(1.042.117.218.744.817)
Defisit Anggaran	(84.399.493.115.605)	(46.845.708.353.474)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

B.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan (Neto)
Rp130,85 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2011 adalah sebesar Rp130.948.869.624.420 yang berarti 86,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp150.836.675.244.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri Rp148,75 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp148.748.034.850.068, yang berarti 96,83 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp153.613.307.023.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, dan (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah Rp40,32 triliun

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang terkait dengan penerimaan dan pengembaliannya dari rekening-rekening pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan sebagai BUN. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah TA 2011 adalah sebesar Rp40.319.043.049.000, yang berarti 99,37 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp40.574.043.832.000. Rincian pembiayaan Rekening Pemerintah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Penerimaan dari Rekening SAL	40.319.043.049.000	17.347.946.816.000
Penerimaan dari Rekening Dana Investasi	-	4.841.365.789.078
Jumlah	40.319.043.049.000	22.189.312.607.078

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp8,61 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2011 adalah sebesar Rp8.608.845.495.456, yang berarti 105,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp8.176.680.057.000. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	47.857.804.846
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	363.489.013.668
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	6.873.012.881.438
Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	18.872.303.278
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	75.477.991.357
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	479.070.633.171
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	780.985.268.000
Total	8.608.845.495.456

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada LKPP Tahun 2010 sebesar Rp57.631.763.320 disajikan sebagai pengurang dari Penerusan Pinjaman (Pembiayaan Luar Negeri).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi**

Pembayaan Privatisasi
dan Penjualan Aset
Program Restrukturisasi
Rp1,6 triliun

Realisasi Pembayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2011 sebesar Rp1.597.981.517.178 atau 114,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.390.690.442.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN. Rincian realisasi pembayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penerimaan Hasil Privatisasi	425.044.145.867
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	330.323.053
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelasaian Aset Eks BPPN	801.228.042.527
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelasaian Aset Bekas Milik Eks BDL	371.379.005.731
Jumlah	1.597.981.517.178

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara
(Neto) Rp119.88 triliun

Realisasi Pembayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2011 adalah sebesar Rp119.864.365.459.065 atau 94,64 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp126.653.893.000.000. Pembayaan dari SBN mencakup Penerbitan SBN dalam valas sesuai dengan perjalanan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 yang menyatakan bahwa Surat Berharga Negara (Neto) merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar Internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	40.000.000.000.000	29.795.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	110.614.000.000.000	84.020.000.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.817.637.491.000	1.701.033.244.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	22.951.410.000.000	28.968.080.000.000
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	56.028.950.000	109.996.698.000
Penerbitan/Penjualan SUN Perbandahanrahan – DN	1.320.000.000.000	-
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	21.441.988.580.150	25.041.328.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	9.035.050.295.000	-
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – DN	-	-
Total Penerimaan	207.136.113.186.150	167.634.217.842.000
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(38.045.000.000.000)	(24.700.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(42.980.975.945.085)	(40.154.415.022.752)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(4.163.986.000.000)	(7.120.585.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(2.029.197.408.000)	(1.750.849.867.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek	-	(2.350.000.000.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	-	(336.000.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- JI Panjang	(52.588.386.000)	(119.780.002.000)
Total Pengeluaran	(87.271.747.737.085)	(76.631.619.691.752)
Jumlah SBN (Neto)	119.864.365.459.065	91.102.598.200.248

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

8.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

*Pinjaman Dalam Negeri
(Neto) Rp619,39 miliar*

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp619.382.641.633, yang berarti 42,65 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar minus Rp1.452.125.992.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN. Pada TA 2011 belum ada pembayaran cicilan Pinjaman Dalam Negeri tersebut.

8.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

*PMN/ Investasi
Pemerintah Rp19,64
triliun*

Realisasi pengeluaran Pembentukan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2011 adalah sebesar Rp19.643.883.312.264, yang berarti 93,04 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp21.112.426.300.000. Rincian Pengeluaran Pembentukan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2011 adalah:

Urutan	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	9.295.783.312.264	6.038.600.000.000
Investasi Pemerintah	1.000.000.000.000	927.500.000.000
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal	1.126.500.000.000	-
Pembentukan Kredit Investasi Pemerintah	550.000.000.000	-
Investasi Pemerintah yang dipinjamkan kepada BUMN	-	7.500.000.000.000
Dana Bergulir	7.671.600.000.000	5.333.049.000.000
Jumlah	19.643.883.312.264	19.799.149.000.000

PMN untuk BUMN sebesar Rp9.295.783.312.264, terdiri dari:

Urutan	Jumlah (Rp)
Penyertaan pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	1.500.000.000.000
Penyertaan pada PT Pupuk Iskandar Muda	1.338.047.600.800
Penyertaan pada PT Sarana Multigriya Financial	1.000.000.000.000
Penyertaan pada PT Geo Dipa Energy (Pendapatan Hibah Surat Berharga)	443.525.600.000
Penyertaan pada PT Inhutani I	5.000.000.000
Penyertaan pada PT Dirgantara Indonesia	1.188.496.918.621
Penyertaan pada PT PAL (Persero)	648.330.000.000
Penyertaan pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	561.000.000.000
Penyertaan pada PT Askrindo	800.000.000.000
Penyertaan pada Perum Jamin Krido	1.200.000.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit SBSN III	100.000.000
Penyertaan pada Lembaga Internasional	611.283.192.842
Jumlah	9.295.783.312.264

Investasi Pemerintah sebesar Rp1.000.000.000.000 dialokasikan kepada BLU Pusat Investasi Pemerintah dan ditujukan untuk mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan lainnya.

Dana Bergulir sebesar Rp7.671.600.000.000 dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Urutan	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Pembentukan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat	3.571.600.000.000
BLU LPDB Kementerian Koperasi dan UKM	250.000.000.000
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT Kementerian PU	3.850.000.000.000
Jumlah	7.671.600.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan**

Kewajiban Penjaminan
Rp0

Pada TA 2011 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Kewajiban Penjaminan, sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp904.000.000.000.

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional
Rp2,62 triliun

Realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2011 adalah sebesar Rp2.617.700.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.617.700.000.000. Alokasi dana pengembangan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Pembiayaan LN (Neto)
minus Rp17,80 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2011 adalah sebesar minus Rp17.799.165.225.648, yang berarti 641,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp2.776.631.779.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman LN
Rp33,75 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp33.747.178.723.921 yang berarti 60,07 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp56.182.884.835.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Penarikan Pinjaman
Program Rp15,27 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2011 adalah sebesar Rp15.266.144.513.219, yang berarti 79,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp19.201.800.000.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	873.386.325.700	4.566.102.579.700
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	-	2.709.800.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	10.758.748.187.519	15.338.031.909.416
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	3.634.000.000.000	6.340.810.000.000
Jumlah	15.266.144.513.219	28.974.644.489.116

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp12.802.085,740. Selisih ini disebabkan dan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perpendidaraan selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran 999.01. Rincian perbedaan tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	Data BUM	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari DECF	873.396.325.700	873.396.740.250	414.550
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	10.758.748.187.519	10.729.345.687.229	29.402.560.290
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	3.634.090.000.000	3.650.600.000.000	(16.600.000.000)
Jumlah	15.268.144.513.219	15.253.342.427.429	12.802.085.740

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Penarikan Pinjaman Proyek Rp18.481.034.210.702

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2011 adalah sebesar Rp18.481.034.210.702, yang berarti 49,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp36.981.084.835.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun BAPPENAS berdasarkan usulan dari kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audit/ea)	TA 2010 (Audit/ea)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	9.046.106.089.582	13.648.925.389.889
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.246.144.127.735	7.895.635.711.316
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Bispar	4.188.783.993.385	3.972.357.132.656
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	-	203.227.477.230
Jumlah	18.481.034.210.702	26.820.145.711.001

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.02 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp41.088.303.118 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Data BUM	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	8.046.106.089.582	8.699.904.555.330	(653.798.465.748)
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.246.144.127.735	4.540.756.344.060	705.397.782.667
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Bispar	4.188.783.993.385	2.488.245.426.970	1.702.536.566.415
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	0	1.713.041.580.416	11.713.041.580.416
Jumlah	18.481.034.210.702	18.439.947.507.594	41.088.303.118

Perbedaan penarikan pinjaman luar negeri disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah
NoD 2010 SP3 2011	59.202.012.292
NoD 2011 yang tidak dapat diidentifikasi sehingga tdk diterbitkan Sp3	(13.543.343.534)
SP3 atas WA 2010 belum diterbitkan karena tidak ada DIPA 2011	(4.514.331.286)
Selisih Kurs	(58.034.353)
Total	41.088.303.118

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman**

Penerusan Pinjaman
Rp4,22 triliun

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2011 adalah sebesar Rp4.223.841.471.298, yang berarti 36,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp11.724.776.614.000. Rincian Penerusan Pinjaman (Neto) adalah sebagai berikut (dalam Rpl):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(116.927.902.886)	(88.078.795.670)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	-	(8.155.932.230)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(4.106.913.568.432)	(8.238.430.908.741)
Penerusan Pinjaman LN TAYL kepada BUMN	-	(471.729.714.367)
Total	(4.223.841.471.298)	(8.786.395.351.008)

Penerusan Pinjaman TA 2010 di atas tidak termasuk Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada tahun 2010 sebesar Rp57.631.763.320. Penerusan Pinjaman Tahun 2010 yang disajikan pada LKPP Tahun 2010 adalah sebesar Rp8.728.763.587.688, yang berasal dari Penerusan Pinjaman Rp8.786.395.351.008 dikurangi dengan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pererusus Pinjaman sebesar Rp57.631.763.320.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN
Rp47,32 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2011. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2011 adalah sebesar minus Rp47.322.502.478.271 yang berarti 100,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp47.234.740.000.000.

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rpl):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	391.165.555.858	10.503.057.712
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	9.038.453.328.006	8.950.355.084.608
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	2.275.910.434.365	6.557.480.862.982
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	35.618.983.160.042	35.114.181.976.504
Jumlah	47.322.502.478.271	60.632.631.661.836

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

SiLPA Rp46,57 triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp44.399.493.115.609 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp130.948.869.624.420 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp46.549.376.508.811, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rpl):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210.599.653.359.415	995.271.511.391.343
Belanja Negara	1.294.999.148.475.024	1.042.117.219.744.817
Surplus (Defisit)	(84.399.493.115.609)	(46.845.708.363.474)
Pembiayaan Neto	130.948.869.624.420	91.652.011.400.615
SiLPA (SiKPA)	46.549.376.508.811	44.706.393.047.141

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit oleh)

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 47 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambahan atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2011.

2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Dekonsentrasi	Realisasi TA 2011 (dalam Rp)	Urusan Bersama
		Tugas Pembantuan		
010	Kementerian Dalam Negeri	1.033.811.643.094	255.207.064.588	8.118.064.292.749
018	Kementerian Pertanian	1.480.874.048.287	8.075.012.960.725	-
019	Kementerian Perindustrian	98.264.273.677	-	-
020	Kementerian ESDM	32.367.349.596	-	-
023	Kementerian Pendidikan Nasional	14.191.388.782.648	41.008.439.960	-
024	Kementerian Kesehatan	582.432.992.437	3.447.961.988.043	-
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	207.251.401.888	1.194.553.375.834	-
027	Kementerian Sosial	490.481.171.537	113.964.684.797	-
029	Kementerian Kehutanan	143.578.827.164	1.099.826.482	-
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	271.323.468.846	693.853.406.868	-
033	Kementerian Pekerjaan Umum	145.808.825.084	1.988.117.430.446	4.740.000.000
040	Kementerian Kebudayaan & Pariwisata	61.504.983.399	188.471.344.166	-
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	14.823.442.466	-	-
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	120.518.481.791	-	-
057	Perpustakaan Nasional	122.248.417.243	-	-
085	Badan Koordinasi Penanaman Modal	9.283.983.552	-	-
087	Kementerian PDT	917.834.375	284.176.069.460	-
088	BKKBN	11.414.521.815	-	-
090	Kementerian Perdagangan	52.584.428.359	640.465.446.924	-
091	Kementerian Perumahan Rakyat	42.904.672.458	-	-
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	171.437.223.286	-	-
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	7.839.029.561	128.134.934.600	-
Total		19.291.063.571.121	14.617.828.983.083	8.122.804.292.749

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyektor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2011, terdapat 124 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU. Seratus dua puluh empat Satker BLU tersebut berasal dari 19 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Keuangan	2
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	4
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Kementerian Perhubungan	7
7	Kementerian Pendidikan Nasional	22
8	Kementerian Kesehatan	51
9	Kementerian Agama	12
10	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3

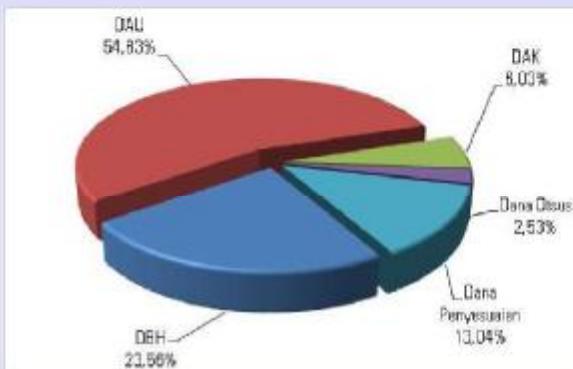
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

11	Kementerian Kehutanan	1
12	Kementerian Pekerjaan Umum	1
13	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1
14	Kementerian Koperasi dan UKM	2
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
16	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
17	Lembaga Penerbangan Antarkosmos Nasional	1
18	Kementerian Perumahan Rakyat	1
19	POLRI	9
Jumlah BLU		124

Ditinjau dari bidang layanan, dari 124 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

- a. 117 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. 2 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
- c. 5 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus.

Berdasarkan laporan keuangan 124 BLU, total pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp25.603.187.141.663. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 44.



Grafik 44: Komposisi Pendapatan BLU TA 2011

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2011 dapat dilihat pada Grafik 45.
(dalam miliar rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

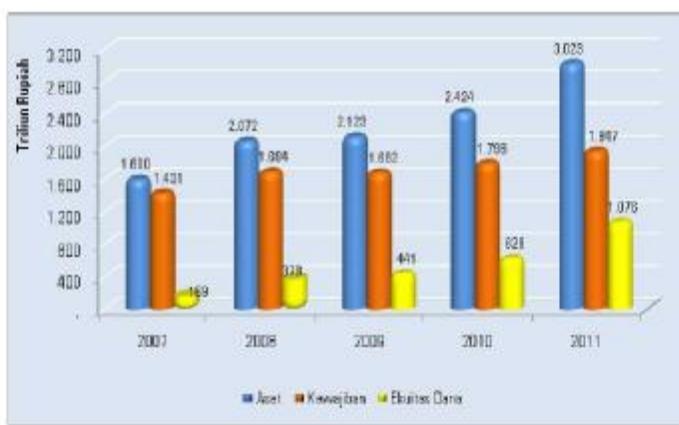
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Aset Lancar	266.807.824.111.647	254.779.627.714.260
Investasi Jangka Panjang	750.030.794.479.804	706.410.075.389.077
Aset Tetap	1.567.974.174.587.750	1.184.301.167.405.585
Aset Lainnya	438.634.382.921.484	278.197.482.029.092
Jumlah Aset	3.023.447.176.100.695	2.423.688.352.538.014
Kewajiban Jangka Pendek	246.444.880.163.115	201.343.960.842.088
Kewajiban Jangka Panjang	1.700.928.418.889.886	1.594.734.246.870.358
Jumlah Kewajiban	1.947.373.299.153.001	1.796.078.207.812.447
Ekuitas Dana Lancar	40.813.342.935.093	83.462.571.113.177
Ekuitas Dana Investasi	1.035.260.534.012.601	544.147.573.612.390
Jumlah Ekuitas Dana Neto	1.076.073.876.947.694	627.610.144.725.587
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.023.447.176.100.695	2.423.688.352.538.014

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Grafik 46.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir



Grafik 46: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2007 – 2011

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu meningkat. Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 naik 71,76% persen dari posisi 31 Desember 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**C.2. PENJELASAN PER POS NERACA****C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia**

*Rekening Kas BUN di BI
Rp82,45 triliun*

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp82.453.918.298.407 dan Rp82.430.710.192.763 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Rekening	31 Desember 2011 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2010 <i>(Audited)</i>
Rekening BUN No. 502.000.000980	2.361.060.658.952	2.120.438.712.433
Rekening KUN dalam Valuta USD No. 600.502411980	8.471.861.158	15.198.974.591
Rekening KUN dalam Valuta YEN No. 600.502111980	1.068.162.472.870	
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah No. 519.000122980	4.790.148.872.968	9.320.901.792.905
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD No. 608.001411980	23.301.820.888.188	15.985.142.184.422
Rekening Penempatan dalam Valuta YEN No. 608.000111980		2.300.652.032.330
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah No. 519.000124880	8.482.000.708	608.723.757
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD No. 609.022411980		425.842.836.125
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURD No. 609.000991980		35.322.305
Rekening SAL No. 500.000002980	48.905.945.197.525	49.437.756.688.925
Rekening Khusus	2.390.016.547.054	2.824.334.833.070
Rekening RDI/RPD		
Jumlah	82.453.918.298.407	82.430.710.192.763

Seluruh saldo Rekening Kas BUN di BI merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada Daftar 4.

C.2.2. Rekening Kas di KPPN

*Rekening Kas di KPPN
Rp11,87 triliun*

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp11.870.556.947.661 dan Rp9.218.612.887.732 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Daftar 5.

C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp6,62 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp6.615.552.720.213 dan Rp8.539.601.162.593 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Bank	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Bank Indonesia	6.558.844.586.613	7.744.826.703.919
2. Bank Umum	56.708.133.600	794.774.458.674
Jumlah	6.615.552.720.213	8.539.601.162.593

Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.

- Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari (dalam Rpl):

Rekening	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Rekening RDI/RPD	-	106
Rekening Pemas Bumi (No. 508.000084980)	197.980.188.008	208.604.971.388
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (No. 800.000411980)	6.237.138.752.226	7.308.488.402.783
Rekening Pemerintah Lain	123.745.646.379	227.733.329.642
Jumlah	6.558.844.586.613	7.744.826.703.919

Pada LKPP Tahun 2010, Rekening RDI/RPD merupakan bagian dari Rekening Pemerintah Lainnya di BI. Pada LKPP Tahun 2011, Rekening RDI/RPD direklasifikasi menjadi bagian dari Rekening Kas BUN di Bank Indonesia.

Rincian lebih lengkap masing-masing RPL di BI dapat dilihat pada Daftar 6.

Khusus Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp6.237.138.752.226 merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 800.000411.908, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract/Kontrak Kura Sama* dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Transaksi imbalan arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Pemas Bumi disajikan pada Catatan Penting Lainnya.

- Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp56.708.133.600 merupakan Kas pada BA B90.D4 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa:
 - Rekening Induk Dana Lingkungan (IRDL) sebesar Rp7.113.244.925,59.
 - Rekening KUMK sebesar Rp10.775.822.226,33.
 - 15 rekening lainnya merupakan rekening pemerintah lainnya sebagai penampungan transaksi dari program/kegiatan yang masih berlangsung sebesar Rp8.819.068.447,79.

Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada Daftar 7.

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp292.800 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp292.795.937.959 dan Rp518.919.028.152 merupakan kas yang dikusai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada Daftar 8.

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp252,90 miliar*

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp252.900.321.124 dan Rp632.344.354.246 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada Daftar 8.

C.2.6. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp8.76 triliun*

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp8.756.875.778.441 dan Rp8.652.179.999.211 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dana lancar BLU, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Negara	2.367.515.283.884	684.910.710.051
Kas yang Belum dibayarkan kepada Pihak Ketiga	3.943.049.544.201	7.524.295.136.562
Dana Lancar Lainnya (termasuk Hibah langsung K/L)	443.880.163.197	440.323.355.419
Dana Lancar BLU	2.850.797.179	2.860.797.178
Jumlah	8.756.875.778.441	8.652.179.999.211

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. K/L	1.830.725.363.653	1.328.563.654.746
2. BUN	4.926.160.414.788	7.323.616.344.465
Jumlah	8.756.875.778.441	8.652.179.999.211

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada Daftar 8.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp4.926.160.414.788 terdiri dari:

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Bagian Anggaran (BA) 999.03 sebesar Rp1.912.974.670 merupakan kas atas pengembalian program dana bergulir yang saat ini masih tertampung dalam rekening LPT Indak;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.05 sebesar Rp393.906.986.740 merupakan kas yang terdapat pada Rekening Dana Cadangan DBH sebagai sisa atas dana cadangan yang tidak disalurkan ke RKUD, dan telah disetor ke Kas Negara pada akhir Februari 2012;

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

3. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp1.371.744.022.079 merupakan kas yang terdapat pada Rekening Dana Cadangan PSDI/Subsidi sebagai sisa atas dana cadangan yang tidak disalurkan ke pihak ketiga, dan telah disetor ke Kas Negara pada akhir Februari 2012;
4. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp3.158.586.431.299. Kas tersebut sebagian besar merupakan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan disalurkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Instansi yang menangani bencana dalam TA 2011 dan pengembalian belanja tunjangan kinerja dari beberapa K/L serta pendapatan bunga dari jasa giro yang belum disetor ke kas negara.

C.2.7. Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp13.02
triñun

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp13.019.388.257.063 dan Rp7.340.595.820.681 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L, yang terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	529.314.721.403	479.821.501.506
2. BLU di Kementerian Keuangan	2.168.961.124.597	1.085.722.227.076
3. BLU di Kementerian Pertanian	3.468.155.684	2.556.689.136
4. BLU di Kementerian Perindustrian	20.011.012.451	15.834.915.124
5. BLU di Kementerian ESDM	18.498.791.552	15.443.167.078
6. BLU di Kementerian Perhubungan	132.850.346.828	83.038.372.556
7. BLU di Kementerian Pendidikan Nasional	4.497.263.942.144	1.181.521.468.379
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.056.474.212.524	972.325.591.499
9. BLU di Kementerian Agama	160.067.061.688	132.236.879.094
10. BLU di Tenaga Kerja dan Transmigrasi	714.874.920	584.424.668
11. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	311.877.696.631	133.025.374.471
12. BLU di Kementerian Riset	1.587.736.326	734.444.972
13. BLU di Kementerian Negara KUKM	222.839.454.602	132.325.739.980
14. BLU di Kementerian Kominfo	3.710.216.850.149	3.083.818.144.970
15. BLU di Kepolisian RI	31.085.827.403	13.845.569.596
16. BLU di BPPT	7.013.147.687	7.849.782.111
17. BLU di LAPAN	1.856.045.700	1.518.809.599
18. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	145.089.354.794	8.281.730.687
Jumlah	13.019.388.257.063	7.340.595.820.681

Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp13.089.016.578.965 (lihat *Catatan D.7*). Dari Kas pada BLU tersebut sebesar Rp170.553.016.059 telah didepositakan dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan (disajikan pada Investasi Jangka Pendek BLU - lihat *Catatan C.2.19*). Dengan demikian, terdapat Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp100.924.694.157, yaitu berasal dari (Rp13.019.388.257.063+Rp170.553.016.059 - Rp13.089.016.578.965).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**C.2.8 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)**

Uang Muka dari Rekening BUN Rp1.41 triliun

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.408.995.648.910 dan Rp1.876.259.417.429 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut (dalam Rp):

<i>Lender</i>	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. IBRD	434.796.198.957	887.745.480.535
2. ADB	557.243.342.772	361.921.824.683
3. DECF/JBIC	14.116.106.369	36.290.835.084
4. Lainnya	402.840.000.812	690.301.277.127
Jumlah	1.408.995.648.910	1.876.259.417.429

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1.408.995.648.910 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Saldo tersebut berasal dari saldo akhir tahun 2010 sebesar Rp1.876.259.417.429 ditambah dengan koreksi saldo awal tahun 2011 sebesar Rp446.511.277.373 dikurangi dengan penggunaan Uang Muka dari Rekening BUN selama tahun 2011 sebesar Rp912.775.045.892.

C.2.9. Piutang Pajak

*Piutang Pajak
Rp108.063 triliun*

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp108.063.462.383.641 dan Rp70.945.271.446.620. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah Rp60.246.153.293.302 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp108.063.462.383.641 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp47.817.309.090.339. Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

<i>Uraian</i>	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	86.801.366.456.341	54.008.060.540.425
Penyisihan	(46.205.692.087.023)	-
Nilai Bersih	40.595.674.369.318	
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	21.262.095.927.300	16.937.210.906.195
Penyisihan	(1.611.617.003.316)	-
Nilai Bersih	19.650.478.923.984	
Piutang Pajak (Bruto)	108.063.462.383.641	70.945.271.446.620
Penyisihan	(47.817.309.090.339)	-
Piutang Pajak (Bersih)	60.246.153.293.302	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp86.801.366.456.341 dan Rp54.008.060.540.425 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2011. Rincian Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Tabel 8
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak
(Dalam Rp)

**Piutang Pajak pada
Ditjen Pajak**

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.085.087.787.115	1.268.408.447.889
2.	Piutang PPh Pasal 22	406.665.742.712	483.960.766.219
3.	Piutang PPh Pasal 23	1.871.735.365.857	2.203.941.764.322
4.	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.011.913.424.152	1.011.934.207.338
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	14.272.978.070.717	14.375.139.273.281
6.	Piutang PPh Pasal 26	2.831.091.117.252	1.707.425.467.877
7.	Piutang PPn Final dan Fiskal LN	517.874.742.847	756.662.431.444
8.	Piutang PPn Dalam Negeri	42.235.408.556.549	13.758.554.551.125
9.	Piutang PPnBM Dalam Negeri	208.754.851.900	279.736.078.188
10.	Piutang PBB Pedesaan	2.401.385.978.918	1.617.432.558.023
11.	Piutang PBB Perkotaan	11.291.484.268.102	9.391.433.663.020
12.	Piutang PBB Perkebunan	384.209.918.227	388.198.560.617
13.	Piutang PBB Kehutanan	630.580.993.822	617.951.905.189
14.	Piutang PBB Pertambangan	5.602.915.905.581	4.029.788.497.473
15.	Piutang BPHTB	-	101.220.473.265
16.	Piutang PTLL	691.914.937	2.240.673.780
17.	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.876.627.837.656	2.016.033.203.388
	Jumlah	86.801.366.456.341	54.008.060.540.425

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Umur Piutang	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Kuning dari 1 Tahun	19.470.734.026.870	17.268.606.805.688
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	37.888.573.637.081	11.089.789.076.321
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	8.503.983.799.836	7.425.345.018.956
5 Tahun atau Lebih	20.938.074.992.554	18.224.349.638.997
Jumlah	86.801.366.456.341	54.008.060.540.425

- 1) Dari nilai piutang pajak sebesar Rp86.801.366.456.341 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp46.205.692.087.023. Nilai piutang yang disisihkan tersebut termasuk piutang yang telah diluwarsa penagihannya sebesar Rp6.217.999.181.660. Selama tahun 2011 atas nilai piutang pajak yang telah diluwarsa tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp489.005.652.771. Selama tahun 2011, tidak ada nilai piutang pajak yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapus bukukan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

- 2) Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp43.454.095.270.562.
- 3) Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikemasukan dari lelang sebesar Rp899.286.399.952 dan dari piutang pajak sebesar Rp1.559.825.874.452. Dari aset wajib pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak terlajih sebesar Rp237.836.727.323.
2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp21.262.095.027.300 dan Rp16.837.210.806.195 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat diterimakan dan belum dilaksanakan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak (nilai awal sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 9.

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Umur Piutang	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Kurang dari 1 Tahun	19.648.918.985.526	15.549.337.791.645
1 Tahun s.d 2 Tahun	217.268.179.964	156.486.135.015
2 Tahun s.d 3 Tahun	103.555.167.086	409.426.853.939
Di atas 3 Tahun	1.292.355.584.744	821.961.125.586
Jumlah	21.262.095.027.300	16.837.210.806.195

Tabel 9
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai
(Dalam Rp)

*Plutang Pajak pada
Ditjen Bea dan Cukai*

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1	Plutang PPh Pasal 22 Impor	45.892.299.214	57.174.873.159
2	Plutang PPN Dalam Negeri	3.146.810.248.970	2.809.131.803.212
3	Plutang PPN Impor	240.582.576.649	264.640.361.368
4	Plutang PPN Lainnya	13.975.000	24.934.000
5	Plutang PPnBM Impor	26.715.140.404	20.402.870.885
6	Plutang PPnBM Lainnya	-	-
7	Plutang Cukai Hasil Tembakau	15.612.436.025.861	12.846.209.894.700
8	Plutang Cukai Ethyl Alkohol	869.000.000	-
9	Plutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.108.046.600	2.989.599.100

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

10	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	102.598.902.174	2.899.526.340
11	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	46.930.933.374	1.100.948.557
12	Piutang Bunga Penagihan PPNI	9.710.326.332	5.821.080.805
13	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	16.882.000	-
14	Piutang Bea Masuk	851.036.853.853	700.809.407.559
15	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	773.536.566.838	445.108.152.433
16	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	173.032.494.314	179.085.323.887
17	Piutang Pajak/Pungutan Eksport	222.279.975.975	1.623.559.853
18	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	6.238.348.382	33.897.172
	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	288.539.360	175.305.275
Jumlah		21.262.086.927.300	16.937.210.906.196

C.2.10. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp19,89 triliun*

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp19.885.890.412.635 dan Rp9.020.978.486.579. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp9.632.493.510.011, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp19.885.890.412.635 dikurangi penyisihan sebesar Rp10.253.396.902.624. Piutang tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	13.798.526.308.176	3.442.928.032.948
Penyisihan	(9.835.371.734.586)	-
Nilai Bersih	3.861.154.573.590	
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	6.089.364.104.459	5.578.050.463.631
Penyisihan	(318.025.168.036)	-
Nilai Bersih	5.771.338.936.421	
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	19.885.890.412.635	9.020.978.486.579
Penyisihan	(10.253.396.902.624)	-
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	9.632.493.510.011	

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Daftar 9.

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2011 terdiri dari (dalam Rp):

*Piutang Bukan Pajak di
BUN Rp6,09 triliun*

	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Piutang Dividen dan Denda pada BA. 899.03:		
Nilai Bruto	54.914.355.161	188.176.874.089
Penyisihan	(51.548.429.777)	-
Nilai Bersih	3.365.925.384	-
2. Piutang pada BA 999.07:		
Nilai Bruto	878.939.064.800	980.788.242.276
Penyisihan	(4.394.895.474)	-
Nilai Bersih	874.544.399.326	-
3. Piutang pada BA 999.08:		

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Nilai Bruto	7.438.160.200	187.584.222.817
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	7.438.160.200	-
4. Piutang PT PPA pada BA 999.99:		
Nilai Bruto I	2.786.071.531	2.121.512.481
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	2.786.071.531	-
5. Piutang Migas pada BA 999.39:		
Nilai Awal	5.145.286.422.787	4.278.399.501.958
Penyisihan	(262.082.042.787)	-
Nilai Bersih	4.883.204.379.980	-
Piutang PNBP (Bruto)	6.088.364.104.458	6.678.950.453.531
Penyisihan	(318.026.169.038)	-
Piutang PNBP (Bersih)	5.771.338.936.421	-

1. Piutang Dividen dan Denda (BA 999.03) terdiri dari:

a. Piutang Lancar sebesar Rp3.382.839.582 terdiri dari (dalam Rp):

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak tertagih (0,5%)		Nilai Bersih
		Tertagih	0,5%	
1. PT PDI P Batam	85.865.000	429.325	85.435.675	
2. PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	28.854.203	134.271	28.719.932	
3. PT. Perkebunan Nusantara IX	1.460.120.379	7.250.602	1.442.869.777	
4. Perum Perumnas	600.000.000	3.000.000	597.000.000	
5. PT. Perkebunan Nusantara II	800.000.000	4.000.000	796.000.000	
6. PT Inhutani I	300.000.000	1.500.000	298.500.000	
7. PT Inhutani V	120.000.000	600.000	119.400.000	
Jumlah	3.382.838.582	16.814.108	3.366.024.384	

b. Piutang Muccel sebesar Rp1.531.515.579 terdiri dari (dalam Rp):

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (100%)		Nilai Bersih
		Tertagih	100%	
1. PT. Iskaksaka	8.081.154.634	8.081.154.634	-	-
2. PT. Bina Karya	588.826.103	588.826.103	-	-
3. PT. Gobi Fostera	806.746.788	806.746.788	-	-
4. PT. Industri Semen Nusantara	19.588.922.144	19.588.922.144	-	-
Jumlah	51.531.515.579	51.531.515.579	-	-

2. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) terdiri dari

- Piutang pada Kementerian Keuangan sebesar Rp387.038.818.793 yang merupakan kelebihan pembayaran terhadap subsidi Minyak Tanah kepada PT Perlamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2010.
 - Piutang pada Kementerian Pertanian sebesar Rp56.786.969.165 merupakan kelebihan pembayaran subsidi pupuk berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2010 yang berasal dari BUMN Operator Subsidi Pupuk PT Pupuk Iskandar Muda.
 - Piutang pada Perum Bulog sebesar Rp435.113.206.842 merupakan kelebihan pembayaran atas subsidi pangan berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2011.
3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp7.438.160.200 merupakan piutang pada Perum BULOG.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

4. Piutang PT PPA sebesar Rp2.786.071.531 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Saldo Awal (1)	2.121.512.481	8.832.512.481
Koreksi Saldo Awal (2)	755.838	
Pemasukan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Dividen saham yang dikelola	38.000.000.000	300.000.000.000
Dividen atas saham yang dikelola	466.040.291	7.752.000.000
Pokok dan bunga atas obligasi yang dikelola	-	-
Pokok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	156.974.861.111	116.517.000.000
Reserve/Bunga Obligasi		
Penjualan dari right saham	384.000.000	
HPA aset lainnya	67.000.000	
Jumlah HPA	195.440.801.492	431.832.912.481
Data Cadangan Biaya Pengelolaan	2.627.252.574	
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	690.848.836	2.519.000.000
Jumlah Pencairan (3)	198.758.802.811	433.851.512.481
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat dipersihkan kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	100.414.306	212.000.000
Imbalan Pengelolaan Aset	59.337.375.238	52.731.000.000
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	5.033.737.524	5.273.000.000
PPN atas Pengantaran Biaya Pengelolaan	10.641.430	21.000.000
Biaya aset periode sebelumnya	-	26.026.000.000
Imbalan Kinerja	1.363.897.000	9.888.000.000
PPN Imbalan Kinerja	136.399.700	986.000.000
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan khusus	-	-
Jumlah Pengurangan (4)	56.981.886.188	99.117.000.000
HPA yang harus disetor ke Pemerintah (5) = (1) + (2) + (3) - (4)	143.899.105.832	338.734.512.481
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (6)	141.113.034.491	336.613.000.000
Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) - (6)	2.786.071.531	2.121.512.481

5. Piutang Migas pada BA 999.99 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Piutang pada PT Pertamina	625.801.383.360	1.315.721.773.272
Piutang Migas Lainnya	4.519.485.029.407	2.962.677.728.686
Piutang Migas (Bruto)	5.145.286.422.767	4.278.399.501.958
Penyisihan	(262.082.042.787)	-
Piutang Migas (Netto)	4.883.204.379.980	-

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp0

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp65.404.443. Pada tahun 2010, Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca yang berada di BAPPENAS dan untuk tahun 2011 seluruhnya sudah dilunasi.

C.2.12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TGR Rp80.47 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp60.470.939.992 dan Rp38.591.410.963 merupakan saldo

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tagihan TGR pada K/L dan BUN yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp9.225.983.342 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp60.470.939.992 dikurangi penyisihan sebesar Rp51.244.956.650.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dan BUN dapat dilihat pada Daftar 10.

C.2.13. Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang

Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Rp0

Jumlah Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp4.842.752.393.007. Saldo per 31 Desember 2010 merupakan bagian lancar Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah (RDI/RPD) dan SLA kepada pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Jangka Panjang RDI/RPD direklasifikasi menjadi Aset Lainnya (*lihat Catatan C.2.28*), sehingga bagian lancarnya tidak lagi disajikan pada akun Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang, melainkan pada akun Bagian Lancar Penerusan Pinjaman.

C.2.14. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Rp1,28 triliun

Uang Muka Belanja per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.279.165.315.147 dan Rp614.122.632.355 merupakan uang muka dan/atau pembayaran teman yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa K/L. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka Belanja. Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Daftar 11.

C.2.15. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU Rp1,22 triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.216.391.989.142 dan Rp1.121.930.274.893. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.016.932.672.808 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.216.391.989.142 dikurangi penyisihan sebesar Rp199.459.316.334. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari piutang kegiatan operasional BLU sebesar Rp1.177.422.667.288, dan non operasional BLU sebesar Rp38.969.321.854.

Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	250.799.471.050	259.178.487.979
2. BLU di Kementerian Keuangan	14.938.119.944	1.800.000
3. BLU di Kementerian Perindustrian	2.465.889.970	1.585.267.809
4. BLU di Kementerian ESDM	14.319.049.849	-
5. BLU di Kementerian Perhubungan	409.502.500	-
6. BLU di Kementerian Diknas	170.476.463.630	42.200.064.389
7. BLU di Kementerian Kesehatan	651.984.000.111	751.575.087.778
8. BLU di Kementerian Agama	1.911.791.625	2.640.363.334

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

9. BLU di Kementerian PU	46.058.787.010	30.669.411.038
10. BLU di Kementerian Risetek	-	92.820.000
11. BLU di Kementerian KUKM	2.298.548.194	566.979.362
12. BLU di Kepolisian RI	13.590.873.945	6819.067.311
13. BLU di BPPT	5.779.508.330	1.745.454.370
14. BLU di LAPAN	246.647.687	-
15. BLU di Kemen Perumahan Rakyat	2.154.033.443	7.769.980.831
Jumlah Nilai Bruto	1.177.422.607.288	1.104.842.774.199
Penyisihan	(198.298.929.069)	-
Jumlah Nilai Bersih	979.123.738.229	-

Piatang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	13.079.384.966	10.463.985.064
2. BLU di Kementerian Keuangan	22.027.746.408	6.146.237.068
3. BLU di Kementerian Perhubungan	62.895.200	-
4. BLU di Kementerian Kesehatan	3.462.783.610	223.938.493
5. BLU di Kementerian Agama	335.446.062	253.340.069
6. BLU di LAPAN	2.065.808	-
Jumlah Nilai Awal	38.989.321.854	17.087.500.694
Penyisihan	(1.160.387.275)	-
Jumlah Nilai Bersih	37.828.934.579	-

C.2.16. Piatang Lain-lain

Piatang lain-lain Rp24.991.547.100.126

Piatang Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp24.977.956.337.945 dan Rp12.589.882.121.588 merupakan piatang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piatang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Saldo Piatang Lain-lain per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7.991.547.100.126 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.977.956.337.945 dikurangi penyisihan sebesar Rp16.986.409.237.819. Piatang Lain-lain terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piatang	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Piatang di K/L:		
Nilai Bruto	12.678.235.141.724	298.809.311.019
Penyisihan	(6.040.484.808.807)	-
Nilai Bersih	6.637.750.332.917	-
Piatang di BUN:		
Nilai Bruto	12.299.721.196.221	12.293.072.810.569
Penyisihan	(10.945.924.429.012)	-
Nilai Bersih	1.353.796.767.209	-
Nilai Bruto	24.977.956.337.945	12.589.882.121.588
Penyisihan	(16.986.409.237.819)	-
Nilai Bersih	7.991.547.100.126	-

1. Piatang di K/L terdiri dari (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. BPK	-	408.856
2. Kejaksaan Agung	12.678.235.141.724	287.253.600.095
3. BRR NAD - Nias	-	516.988.200
4. Badan SAR	-	9.038.433.888
Nilai Piutang Bruto	12.678.235.141.724	296.809.311.019
Penyisihan	(6.040.484.808.807)	-
Nilai Piutang Bersih	8.637.750.332.917	-

2. Piutang yang berada di BUN terdiri dari (dalam Rp):

Piutang pada BUN	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
a. Piutang pada BA 999.04		
Nilai Bruto	716.768.609.336	677.748.511.678
Penyisihan	(33.351.190.384)	(53.567.641.189)
Nilai Bersih	683.417.418.942	624.180.870.487
b. Piutang pada BA 999.05		
Nilai Bruto	419.570.214.233	359.541.843.144
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	419.570.214.233	-
c. Piutang pada BA 999.07		
Nilai Bruto	-	171.965.009.682
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	-	-
d. Piutang pada BA 999.08		
Nilai Bruto	174.775.083.008	-
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	174.775.083.008	-
e. Piutang pada BA 999.99 - Bank Dalam Likuidasi		
Nilai Bruto	10.953.666.946.224	11.137.384.987.276
Penyisihan	(10.912.573.238.818)	-
Nilai Bersih	41.093.707.606	-
f. Piutang pada BA 999.99 - Belanja Pensiun		
Nilai Bruto	34.940.343.422	-
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	34.940.343.422	-
Nilai Piutang Bruto	12.299.721.196.221	12.293.072.810.569
Penyisihan	10.945.924.429.012	-
Nilai Piutang Bersih	1.353.796.767.209	-

a. Piutang Lain-lain pada BA 999.04 per 31 Desember 2011 sebesar Rp716.768.609.336 merupakan piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman, terdiri dari:

- Potensi Tunggakan dapat ditagih sebesar Rp302.910.522.083 yang merupakan bagian hak tagih pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih pada 2011. Berdasarkan Peraturan Perbendaharaan No. 12/PB/2011 mengenai kualitas dan penyisihan piutang, piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di bawah 12 [dua belas] bulan per tanggal neraca dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

atas 12 (dua belas) bulan per tanggal neraca diklasifikasikan pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih terdiri dari piutang pada:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	139.127.816.804
BUMD	109.830.433.263
Penda	40.842.037.443
Lainnya	13.110.234.773
Nilai Bruto	302.910.522.083
Penyisihan	(31.281.899.958)
Nilai Bersih	271.628.622.125

- Piutang Bunga sebesar Rp341.086.208.549 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	290.339.333.795
BUMD	24.581.038.281
Penda	9.703.257.611
Lainnya (Channeling dan KUMK SUP 005)	16.462.578.862
Nilai Bruto	341.086.208.549
Penyisihan	(1.705.431.043)
Nilai Bersih	339.380.777.506

- Piutang Denda yang telah diterbitkan Surat Tagihannya sebesar Rp72.771.878.704.

- b. Piutang Lain-lain pada BA 999.05 sebesar Rp419.570.214.233 terdiri dari piutang lebih salur DBH Pajak sebesar Rp10.388.396.634, piutang lebih salur DBH SDA sebesar Rp110.600.169.551, dan piutang atas sisa DPPID yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp298.581.648.048.
- c. Piutang Lain-lain pada BA 999.08 per 31 Desember 2011 sebesar Rp174.775.083.006 merupakan piutang pada Kementerian Pertanian berupa cadangan benih yang berada di penangkaran yang merupakan nilai stock Cadangan Benih Nasional (CBN) yang sementara digunakan oleh PT Sang Hyang Seri (SHS) sebanyak 9.334.187 kg dalam 4 (empat) komoditas. Berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2010, persediaan di penangkaran dan benih yang rusak dimasukkan di akun Piutang Lain-lain pada Ditjen Tanaman Pangan yang semula disajikan BA 999.07 di ubah menjadi BA 999.08. Nilai per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp171.965.009.662.
- d. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	8.298.437.312.747	8.382.155.353.798
5 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.655.229.633.477	2.755.229.633.478
Nilai Bruto	10.953.666.946.224	11.137.384.987.276
Penyisihan	(10.912.573.238.618)	-
Nilai Bersih	41.093.707.606	-

1). Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Urutan	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Dana BLBI BDL yang di-cesse-kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.063.363.877)	(228.063.363.877)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.483.070)	(323.144.483.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	(140.764.168.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	(84.175.667.811)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041.051)	-
Nilai Bruto	8.268.437.312.747	8.382.155.363.788
Pemisahan	(8.257.343.805.141)	-
Nilai Bersih	41.093.707.606	-

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah cp. Kementerian Keuangan dengan, 1 (satu) BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada Daftar 12.

- 2). Piutang pada 5 BDL Eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap 5 BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Urutan	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Total dana BLBI BDL yang di-cesse-kan	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(26.500.000.000)	(26.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.964.470)	(366.663.964.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.889.652.865)	(146.889.652.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011	(100.000.000.000)	-
Nilai Bruto	2.695.229.633.477	2.755.229.633.477
Pemisahan	(2.665.229.633.477)	-
Nilai Bersih	-	-

Seluruh Piutang pada 5 BDL diklasifikasikan pada kelompok dengan kualitas macet, sehingga disisihkan seluruhnya.

- c. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang Belanja Pension sebesar Rp34.940.343.422 terdiri dari:

- 1). Kelebihan droping ke PT Taspen (Persero) bulan November 2011 ke PT Taspen (Persero) sebesar Rp2.580.094.035 yang terdiri dari belanja PNS Daerah Rp1.813.828.466, TNII/Polri (lama) Rp335.240.048, Hakim Rp50.466.468, Tunjangan veteran Rp277.288.840, dan Tunjangan PKRI/KNIP Rp103.270.213. Kelebihan pencairan ini telah disetor ke Kas Negara oleh PT Taspen (Persero) dengan bukti SSBP No. 2/TSP/112011 tanggal 25 Januari 2012.
- 2). Kelebihan droping ke PT Taspen (Persero) Desember 2011 sebesar Rp5.513.193 yang terdiri dari Hakim Rp1.292.429 dan Tunjangan PKRI/KNIP Rp4.220.764.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit oleh)

Kelebihan pencairan ini telah disetor ke Kas Negara oleh PT Taspen (Persero) dengan bukti SSBP No. 1/TSP/112011 tanggal 4 Januari 2012.

- 3). Kelebihan pencairan iuran asuransi kesehatan veteran non tuvet sebesar Rp22.674.141.694. Kelebihan pencairan ini telah disetor ke Kas Negara oleh PT Askes (Persero) dengan bukti SSBP No. 1/ASK/0212 tanggal 16 Februari 2012.
- 4). Saldo uang pensiun yang tidak diambil melalui PT Asabri (Persero) untuk bulan Januari s/d Desember 2011 sebesar Rp9.680.594.500.

C.2.17. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman Rp4.46 triliun

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.462.395.347.776 merupakan potensi kewajiban pokok Penerusan Pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2012. Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Jangka Panjang RDI/RPD direklasifikasi menjadi Aset Lainnya (*lihat Catatan C.2.29.*), sehingga bagian lancarnya disajikan pada akun Bagian Lancar Penerusan Pinjaman. Pada LKPP Tahun 2010, Bagian Lancar Penerusan Pinjaman disajikan pada akun Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.440.083.371.037 yang berasal dari nilai bruto Rp4.462.395.347.776 dikurangi penyisihan sebesar Rp22.311.976.739, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
BUMN	3.822.754.353.377
BUMD	453.602.028.304
Pemda	76.293.160.709
Lebihnya	109.745.805.386
Nilai Bruto	4.462.395.347.776
Penyisihan	(22.311.976.739)
Nilai Bersih	4.440.083.371.037

C.2.18. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp75.33 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2011 sebesar Rp75.330.131.480.506 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. Piutang Pajak	47.817.309.090.339
2. Piutang Bukan Pajak	10.253.396.902.624
3. Bagian Lancar TPITGR	51.244.956.650
4. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	22.311.976.739
5. Piutang dari kegiatan BLU	199.459.316.334
6. Piutang Lain-Lain	16.906.409.237.820
Penyisihan Piutang	75.330.131.480.506

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp47.817.309.090.339 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp10.253.396.902.624 dapat dilihat pada Daftar 9.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp51.244.956.650 dapat dilihat pada Daftar 10.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp22.311.976.739 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp199.459.316.334 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. BLU & Kementerian Negara	16.882.151.804
2. BLU & Kementerian Keuangan	549.626.745
3. BLU & Kementerian Perindustrian	3.197.577
4. BLU & Kementerian Sosial	2.980.627.333
5. Kementerian Pertahanan	42.724.116
6. BLU & Kementerian Kesehatan	2.733.427.337
7. BLU & Kementerian Kesehatan	175.966.188.976
8. BLU & BPPT	28.887.572
9. HU & LKAN	146.626.828
10. BLU & Kementerian Permahan Rakyat	0.770.137
Jumlah	199.459.316.334

6. Penyisihan Piutang Tidak Terlaiyah untuk Piutang Lain-Lain sebesar Rp16.986.409.237.820 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. Kepakasaan Agung	6.040.454.805.305
2. BA 999.04	33.351.190.394
3. BA 999.99 – Piutang Bank Dalam Likuidasi	10.912.573.238.610
Jumlah	16.986.409.237.820

C.2.19. Investasi Jangka Pendek BLU

*Investasi Jangka Pendek
BLU Rp170,55 miliar*

Jumlah Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp170.553.016.059 dan Rp30.750.000.000, merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam tahun 2011 berupa Deposito berjangka 12 bulan. Nilai Investasi Jangka Pendek tersebut berada di BLU pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp70.553.016.059 dan BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp100.000.000.000.

C.2.20. Investasi Jangka Pendek Lainnya

*Investasi Jangka Pendek
Lainnya Rp135,84 miliar*

Jumlah Investasi Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp135.839.486.878 dan Rp0. Nilai Investasi Jangka Pendek tersebut berada pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp135.839.486.878 yang terdapat pada Universitas Indonesia sebesar Rp11.992.500.000, Universitas Gadjah Mada sebesar Rp17.151.108.203, dan Institut Teknologi Bandung Rp106.695.878.675.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

C.2.21. Persediaan

Persediaan
Rp59,21 triliun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp59.214.846.453.160 dan Rp36.366.060.681.005 dan merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Persediaan	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Persediaan di K/L	59.048.193.411.852	33.071.754.378.769
Persediaan di BLU	590.795.321.790	457.683.029.189
Persediaan di BUN	2.575.857.719.518	2.836.623.273.047
Jumlah	59.214.846.453.160	36.366.060.681.005

Persediaan di K/L per 31 Desember 2011 terbesar herada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp48.209.249.007.353, POLRI sebesar Rp4.248.580.229.080, Kementerian Perhubungan sebesar Rp749.249.628.830, Kementerian Kesehatan sebesar Rp490.573.034.841, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp733.794.093.748, BKBN sebesar Rp666.545.768.411, Komisi Pemilihan Umum Rp485.017.642.483. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada Daftar 13.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.575.857.719.518 terdiri dari:

1. Persediaan pada BA 999.07 sebesar Rp4.841.100.000. Penurunan Persediaan disebabkan mulai tahun 2011 nilai persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) yang berada di gudang PT Sang Hyang Sri (Panarmi) pada Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 969380) BA 999.07 dipindahkan ke Satker Ditjen Tanaman Pangan (Kode Satker 958099) BA 999.08.
2. Persediaan pada BA 999.08 sebesar Rp2.571.016.619.518, merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca K/L dan Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 089.08), yaitu:
 - a. Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Penum Bulng per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.443.905.411.611, setara dengan Kuantum 378.838.048.31 Kg dikalikan dengan harga perolehan persediaan yang terakhir yaitu Rp6.450/Kg. Sedangkan nilai stock CBP berdasarkan harga perolehan per tahun dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Tahun	Kuantum (Kg)	Harga Perolehan per Kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2007	0	1.619.09	0
2	2008	4'367.103,62	4.800,00	20.740.742.408
3	2009	18'319.192,01	5.570,00	100.100.000.001
4	2011	125.329.760,69	6.450,00	1.001.000.000.001
	Jumlah	378.838.048,31		2.205.707.423.438

Realisasi penyaluran CBP pada Tahun 2011 sebesar 235.739.492,66 kg berdasarkan *Delivery Order (DO)* terdiri dari penyaluran Bencana Alam sebanyak 14.767.990,20 Kg dan penyaluran Operasi Pasar Murni Tahun 2011 sebanyak 221.795.094,46 Kg.

- b. Persediaan di berbagai instansi lainnya pengguna BA 999.08 sebesar Rp127.511.207.907.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**C.2.22. Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD)**

RDI/RPD direklasifikasi sebagai bagian Aset Lainnya

Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 31 Desember 2011 disajikan pada kelompok Aset Lainnya (*lihat Catatan C.2.29.*). Sedangkan saldo per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp43.367.037.927.876, berasal dari nilai bruto Rp43.584.962.741.584 dikurangi penyisihan Rp217.924.813.708.

C.2.23. Dana Bergulir

Dana Bergulir
Rp8,19 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp8.195.256.111.510 dan Rp8.891.209.869.656 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Kementerian Perindustrian	-	3.469.232.868
2. Kementerian Kehutanan	4.223.566.054	486.591.360
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	12.206.756.931
4. Kementerian Lingkungan Hidup	49.306.342.015	49.447.128.945
5. Kementerian Koperasi dan UKM	2.050.276.290.128	2.113.145.137.627
6. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	3.872.785.113.151	246.832.814.636
7. Kementerian Pekerjaan Umum	2.218.664.800.164	1.465.642.207.289
Jumlah	8.195.256.111.510	8.891.209.869.656

Dari Dana Bergulir sebesar Rp8.195.256.111.510, terdapat Dana Bergulir yang sumber pembiayaannya berasal dari BA 999.03 sebesar Rp7.293.444.736.358 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan Kementerian Kehutanan.

Periklisan masing-masing dana bergulir adalah:

1. Dana bergulir di Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp3.469.232.868. Dana bergulir ini merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil yang dikelola oleh 15 LPT-Indag. Pada Tahun 2011, Dana Bergulir di Kementerian Perindustrian direklasifikasi menjadi Aset lain-lain karena sudah tidak memenuhi karakteristik dana bergulir.
2. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.223.566.054 adalah dana bergulir yang dikelola oleh Puslit Pembangunan Pemuliharaan Hutan yang berasal dari BA 999.03.
3. Dana Bergulir di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp0 dan Rp12.206.756.931. Dana Bergulir tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang digulirkan melalui koperasi usaha bersama (KUB) pada 13 pelabuhan. Pada Tahun 2011, Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan direklasifikasi menjadi Aset lain-lain karena Program penyaluran dana bergulir tersebut sudah berhenti dan dananya tidak digulirkan lagi.
4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp49.306.342.015 dan Rp49.447.128.945 merupakan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

dana KLH yang diempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup. Dana ini berasal dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS).

5. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.050.276.290.126. Dari dana tersebut, dana bergulir sebesar Rp852.505.033.137 merupakan dana pemerintah yang dikelola Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga koperasi sebagai stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM juga mengelola dana bergulir yang berasal dari BA 999.03 sebesar Rp1.197.771.256.989 yang disalurkan kepada Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Nilai yang disajikan tersebut berdasarkan hasil inventarisasi pihak independen atas perkembangan nilai dana bergulir sesuai dengan nilai bersih yang dapat direfleksikan yaitu jumlah yang terdapat dalam rekening penguluran dan tagihan yang diperkirakan dapat tertagih. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, bahwa seluruh dana bergulir harus diinventarisasi dan disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat dinalisasikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jumlah dana bergulir tersebut semula disajikan pada tahun 2007 sebesar Rp3.085.849.168.350 yang hasilnya antara lain dari helanja hantuan sosial, belanja subsidi, dan helanja modal dari APBN TA 2000 s.d. 2007 yang tidak jelas perlakuananya sebagai dana bergulir atau bantuan sosial sehingga perlu dilakukan koreksi pembukuan.
6. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.872.785.113.151 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03. Pembiayaan perumahan ini merupakan dana yang digulirkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH).
7. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.218.664.800.164 merupakan hak tagihan BLU BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol.

C.2.24. Investasi Non Permanen Lainnya

*Investasi Non Permanen
Lainnya Rp4,75 triliun*

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp4.749.737.167.996 dan Rp88.464.787.895 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa K/L atau BUN, yaitu (dalam Rp):

Urutan	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Kementerian Perindustrian	37.380.370.139	49.464.787.895
BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kamenkeu	4.701.776.528.784	49.000.000.000
Perguruan Tinggi Eks BHMN	10.680.269.073	-
Jumlah	4.749.737.167.996	98.464.787.895

Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu pengembalian sampai dengan 5 (lima) tahun.

Nilai Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) merupakan nilai investasi atau pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi BLU PIP. Rincian investasi non permanen lainnya pada BLU PIP adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
Pinjaman kepada PT Nindya Karya (Persero) untuk proyek rehabilitasi Bendungan Gintung dan Pekerjaan Sipil Bendungan dan Jaringan Irigasi Utama pada Sub Proyek Irrigasi Batang Anai	2.000.000.000
Pinjaman kepada PT Nindya Karya (Persero) untuk proyek pembangunan Jalan dan Jembatan Melinggi I Mandailing dan Proyek Siwalima Utara	2.000.000.000
Pinjaman kepada Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kproyek Penganggaran Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Rakyat	191.000.000.000
Pinjaman kepada Pemda Provinsi Sulawesi Selatan untuk kproyek Kebutuhan Lengkap	7.489.148.300
Pinjaman kepada Pemda Provinsi Sumatera Selatan	7.489.148.300
Untuk Dapat (RS.C) Type C di Kabupaten Sukabumi	1.499.976.528.784
Pinjaman kepada PT PLN (Persero)	1.499.976.528.784
Jumlah	4.781.778.528.784

Investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Perpustakaan Tinggi Eks Badan Hukum Milik Negara sebesar Rp10.580.269.073. Perpustakaan Tinggi Eks, BHMN yang memiliki investasi jangka panjang yang dilaporkan sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah:

- a. Universitas Indonesia dengan nilai sebesar Rp1.802.144.073 lendir dari investasi pada obligasi sebesar Rp763.125.000 dan investasi pada reksadana sebesar Rp839.019.073.
- b. Institut Teknologi Bandung dengan nilai sebesar Rp8.978.125.000 merupakan investasi dalam bentuk obligasi.

C.2.25. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

PMN Rp 736,99 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp736.991.554.233.014 dan Rp564.087.107.302.153 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, Lembaga Internasional, Badan Usaha Lainnya, BI, dan LPS dengan jumlah (dalam Rp):

PMN	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. BUMN	589.766.661.926.137	523.294.056.385.721
2. BHMN	1.168.034.176.846	2.193.481.021.163
3. Non BUMN	4.281.956.608.163	3.869.599.282.340
4. Lembaga Internasional	35.495.913.032.610	34.629.850.632.928
5. Badan Usaha Lainnya	224.634.258	120.000.000
6. Bank Indonesia	89.572.275.000.000	-
7. Lembaga Penjamin Simpanan	18.726.488.855.000	-
Jumlah	736.991.554.233.014	564.087.107.302.153

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

PMN pada BUMN

- Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp589.766.661.926.137 dan Rp523.294.056.365.721 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 tersebut merupakan nilai PMN pada 141 BUMN sebesar Rp573.317.888.010.561 dan 5 BUMN/Lembaga dibawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp16.448.773.915.576. Status laporan keuangan pada 141 BUMN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah
Audited 2011	119	560.647.212.986.595
Unaudited 2011	17	11.103.091.629.773
LK Audited 2010	3	1.630.723.136.338
Unaudited 2010	1	7.247.092.217
Audited 2005	1	(70.387.634.362)
Jumlah	141	573.317.888.010.561

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada Daftar 14.A.

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPTYBDS) pada 24 BUMN dengan nilai sebesar Rp44.364.558.169.478,40.

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2011 termasuk PMN pada 5 BUMN sebesar Rp16.448.773.915.576 yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp2.195.528.404.151, PT Sarana Multigriya Financial sebesar Rp2.508.007.653.072, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp6.963.944.000.000, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp3.703.788.479.000, dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp1.077.505.379.353. (Daftar 14.B.)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam Daftar 14.A.

PMN pada BHMN

- PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebesar Rp1.168.034.176.846 merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

BHMN	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
a. Institut Pertanian Bogor (IPB)	879.080.915.526	1.101.497.542.000
b. Universitas Airlangga	412.443.985.336	1.188.424.915.202
c. BP MIGAS	(123.490.724.016)	(86.441.436.039)
Jumlah	1.168.034.176.846	2.193.481.021.163

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelola sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PTN BHMN ditetapkan sebagai penguruan tinggi yang diwajibkan oleh Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menetapkan pendekatan PT BHMN menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pula Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), namun pelaksanaan pengalihan status tersebut masih memerlukan langkah-langkah, yaitu:

- Penetapan melalui Peraturan Pemerintah mengenai PTN BHMN Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Pendidikan Indonesia menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU.

Penetapan pengalihan seluruh kekayaan masing-masing PTN BHMN menjadi kekayaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU.

Mengingat pelaksanaan PPK BLU masih memerlukan proses lebih lirik, maka selama masa transisi nilai PMN pada PTN BHMN tetap disajikan dalam laporan keuangan BA 999.03 sebesar nilai aktiva bersih. Nilai investasi pada IPB dan Unair per 31 Desember 2011 merupakan nilai investasi berdasarkan aktiva bersih (ekuitas) per 31 Desember 2010 setelah ditambah/dikurangi dengan penyesuaian yang diperlukan. Aset dan kewajiban yang diperoleh IPB dan Unair selama tahun 2011 telah disajikan pada Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

3. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp4.261.956.608.163, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan persentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2011 disebabkan oleh:

- a. Perubahan total ekuitas pada Non-BUMN dengan kepemilikan Pemerintah antara 20% sampai dengan 50%, karena perhitungan Pemerintah menggunakan metode ekuitas;
- b. Penjualan kepemilikan Pemerintah pada PT Jakarta International Hotel Development, Tbk senilai Rp18.539.927.809, dan penjualan kepemilikan Pemerintah pada PT Kertas Basuki Rachmat senilai Rp2.632.500.000;
- c. Pengurangan persentase kepemilikan Negara pada PT Kertas Padalarang,

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

diakibatkan pelaksanaan *debt swap* hutang PT Kertas Padalarang menjadi modal Perum Peruri, sehingga kepemilikan pemerintah pada PT Kertas Padalarang menjadi terdilusi.

- d. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Dollar Amerika. Per tanggal 30 Desember 2011 kurs tengah BI adalah USD-Rp9.068, sedangkan per tanggal 31 Desember 2010 adalah USD-Rp8.991. Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport dan PT Indonesia Asahan Aluminium. Pada kedua perusahaan tersebut, Laporan Keuangan disajikan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam mata uang Rupiah, untuk menghitung nilai kepemilikan Pemerintah;
- e. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia. Per tanggal 30 Desember 2011 kurs tengah BI adalah MYR-Rp2.852,925, sedangkan per tanggal 31 Desember 2010 adalah MYR-Rp2.915,85. Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di Asean Bintulu Fertilizer, mengingat nilai kepemilikan Pemerintah disajikan pada mata uang Ringgit Malaysia.

Pada non-BUMN dengan kepemilikan Negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak terpengaruh pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas pada Non-BUMN tersebut dapat dilihat pada Daftar 15.

*Penyertaan pada
Lembaga Internasional*

- 4. Penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp35.495.913.032,610 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk *promissory notes*. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2011. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada Daftar 16.

Sampai dengan 31 Desember 2011, dari total penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp35.495.913.032,610, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp25.928.353.496,005 di antaranya sebesar Rp25.871.090.740,489 kepada *International Monetary Fund (IMF)*. Rincian *promissory notes* per Lembaga Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No.	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)
1.	International Monetary Fund	25.871.090.740,489
2.	International Bank for Reconstruction and Development	39.174.191.965
3.	International Development Association	5.173.139.668
4.	Multilateral Investment Guarantee Agency	10.292.343.224
5.	Common Fund for Commodities	2.623.060.659
Jumlah total		25.928.353.496,005

Penyertaan dalam bentuk *Promissory Notes* disajikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan C.2.38 dan Catatan C.2.44.

*PMN pada Badan Usaha
Lainnya*

- 5. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebesar Rp224.634.258 merupakan Investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN. Perusahaan penerbit SBSN terdiri atas 4 (empat) perusahaan, yaitu Perusahaan Penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

I, Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III. Nilai kepemilikan Negara pada masing-masing perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000, Rp10.000.000, Rp104.634.258, dan Rp100.000.000.

PMN pada BI

6. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp89.572.275.000.000 dan Rp0 (nilai PMN pada Bank Indonesia per 31 Desember 2010 sebesar Rp68.798.801.000.000 dilaporkan sebagai Investasi Permanen Lainnya. *Lihat Catatan C.2.27*). Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

PMN pada LPS

7. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp16.726.488.855.000 dan Rp0 (nilai PMN pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2010 sebesar Rp11.298.734.420.000 dilaporkan sebagai Investasi Permanen Lainnya. *Lihat Catatan C.2.27*). Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan.

C.2.26. Investasi Permanen BLU

*Investasi Permanen BLU
Rp6,64 miliar*

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 yang berjumlah Rp6.637.194.500 dan Rp6.637.194.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Semana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%.

C.2.27. Investasi Permanen Lainnya

*Investasi Permanen
Lainnya Rp87,61 triliun*

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp87.609.772.784 dan Rp94.959.618.306.997 merupakan nilai PMN pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*). Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp87.609.772.784 merupakan penyertaan atau kepemilikan Perguruan Tinggi Eks. BHMN pada beberapa Perusahaan, yaitu Universitas Gajah Mada sebesar Rp60.566.530.103, Institut Teknologi Bandung sebesar Rp26.465.824.601, dan Universitas Indonesia sebesar Rp587.418.080 (setelah dikurangi hak minoritas sebesar Rp3.690.732).

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp94.959.618.306.997 merupakan investasi pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Taman Mini Indonesia Indah, Otorita Asahan, BP Gedung, Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran.

Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Permanen Lainnya pada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) direklasifikasi menjadi Investasi Permanen PMN (*Lihat Catatan C.2.25*), sedangkan Investasi Permanen Lainnya pada Taman Mini Indonesia Indah, Otorita

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Asahan, BP Gedung Marggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya (*Lihat Catatan C.2.29*). Rincian Investasi Permanen Lainnya pada lembaga-lembaga tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. Bank Indonesia	-	88.798.801.000,000
2. Otorita Batam	-	14.058.084.887,589
3. LPS	-	11.298.734.420,000
4. Taman Mini Indonesia Indah	-	33.041.277,896
5. Otorita Asahan	-	737.240.235,575
6. BP Gedung Marggala Wanabakti	-	23.634.260,978
7. Yayasan Gedung Veteran	-	10.082.224,959
Jumlah	94.959.618.308,997	

C.2.28. Aset Tetap

Aset Tetap Rp1.567,97 triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.567.974.174.587,750 dan Rp1.184.301.167.405,585 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan).

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Tanah	806.436.356.598,744	565.920.545.473,098
Peralatan dan Mesin	184.862.199.595,042	150.888.673.195,411
Gedung dan Bangunan	152.223.086.918,162	137.042.921.053,205
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	347.164.628.245,235	276.682.171.786,874
Aset Tetap Lainnya	11.517.129.897,802	7.748.128.178,913
Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.780.773.322,765	46.038.727.718,084
Jumlah	1.567.974.174.587,750	1.184.301.167.405,585

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp142.559.447.179,471, dengan rincian (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
Tanah	108.693.570.123,457	107.957.793.253,986
Peralatan dan Mesin	12.275.080.859,622	8.490.665.409,433
Gedung dan Bangunan	16.538.052.792,384	13.083.319.031,366
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.128.925.602,545	968.311.649,972
Aset Tetap Lainnya	458.589.026,465	429.004.262,220
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.607.228.774,998	2.651.180.143,537
Jumlah	142.559.447.179,471	133.580.273.750,513

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp383.673.007.162,165 atau 32,40% dari nilai per 31 Desember 2010. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp117,85 triliun, koreksi penambahan saldo awal hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada Kementerian

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Pekerjaan Umum berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, koreksi penambahan hasil IP pada Kementerian Perhubungan berupa Tanah dan Jalan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap yang diperoleh dari hibah dan lain-lain.

Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam LKPP merupakan konsolidasian dari LKKL dan LKBUN, yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Laporan BMN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Perbedaan nilai antara LKKL dengan LBUN disajikan pada Catatan Penting Lainnya.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada Daftar 17.

C.2.29. Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp438,63 triliun*

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp438.634.382.921.494 dan Rp278.197.482.029.092. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 berasal dari nilai bruto sebesar Rp458.605.047.654.502 dikurangi penyisihan sebesar Rp19.970.874.008.883.

Aset Lainnya terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	1.375.031.741	1.377.994.323
2. Tagihan Turutang Ganti Rugi	249.626.424.418	38.234.179.361
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	3.737.310.550.736	-
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	212.907.765.825	212.809.685.200
5. Penerusan Pinjaman	46.540.275.969.109	2.070.158.163.656
6. Aset Tak Berwujud	12.406.618.813.595	9.351.448.050.646
7. Aset yang Dibatasi Penggunaannya	37.253.051.374.408	40.987.103.326.394
8. Dana Kelolaan BLU	19.320.332.310.233	18.459.000.085.715
9. Dana Perjaminan	75.371.634.076	71.135.792.697
10. Aset KKKS *)	150.508.980.296.216	68.224.330.326.991
11. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi) *)	67.543.984.466.405	29.203.047.197.602
12. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	14.762.445.010.365	-
13. Aset Lain-lain	105.992.977.283.250	109.579.037.246.507
Jumlah	458.605.256.930.377	278.197.482.029.092
Penyisihan	[19.970.874.008.883]	-
Nilai Bersih	438.634.382.921.494	-

*) Saldo Aset KKKS dan Aset Eks BPPN per 31 Desember 2010 disajikan pada kelompok Aset Lain-lain

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

TPA Rp1,38 miliar

Saldo TPA per 31 Desember 2011 adalah Rp1.375.031.741, sedangkan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.377.994.323. Saldo per 31 Desember 2011 tersebut berada di Kementerian Kementerian Negara KUKM sebesar Rp1.375.031.741.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan TGR Rp249,63 miliar

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp249.626.424.418 dan Rp38.234.179.361. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp82.616.345.025 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp249.626.424.418 dikurangi penyisihan sebesar Rp157.010.079.393. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada Daftar 18.

3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp3,74 triliun

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.737.310.550.736 dan Rp0 merupakan piutang jangka panjang yang berada pada Kementerian Kehutanan dan BA 999.04. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp3.340.385.470.226, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.737.310.550.736 dikurangi penyisihan sebesar Rp36.925.080.510. Pada LKPP Tahun 2010, Piutang Jangka Panjang Lainnya dilaporkan dalam Aset Lain-lain. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya:

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2011 (Audited)		31 Desember 2010 (Audited)
1. Kementerian Kehutanan	758.821.015.245		-
2. BA BUN 999.04	2.978.489.535.491		-
Nilai Bruto	3.737.310.550.736		-
Penyisihan pada BA 999.04	(396.925.080.510)		-
Nilai Bersih	3.340.385.470.226		-

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp758.821.015.245. Nilai tersebut terdiri dari piutang Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mendapatkan reschedule pembayaran sebesar Rp445.483.161.236 dan yang tidak mendapatkan reschedule pembayaran sebesar Rp313.337.854.009. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp376.788.382.412, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp758.821.015.245 dikurangi penyisihan sebesar Rp382.032.632.833.
2. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04 sebesar Rp2.978.489.535.491 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
1. CJMK	2.929.780.000.000
2. CPTP Baji Itei Bruk Niwakai	3.000.000.000
3. Doma Induk Ungkungan	63.709.835.491
Nilai Bruto	2.978.489.535.491
Penyisihan piutang tidak tertagih	(14.892.447.678)
Nilai Bersih	2.963.597.087.813

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp212,81 miliar

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp212.907.765.825 dan Rp212.609.665.200 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2010 <i>(Audited)</i>
1. Kementerian Pendidikan Nasional	298.100.625	
2. Kementerian Kebudayaan dan Periwisata	128.982.165.200	128.982.165.200
3. Kementerian Negara PPNI BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
Jumlah	212.907.765.825	212.809.665.200

5. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman
Rp46,54 triliun

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp46.540.275.969.109 dan Rp2.070.158.163.656 merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Meningkatnya nilai Penerusan Pinjaman tersebut karena adanya reklasifikasi dari Investasi RDI/RPD yang pada LKPP Tahun 2010 disajikan pada Investasi Non Permanen. Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2011 tersebut terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	Jumlah
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	44.083.413.855.680
Penerusan Pinjaman kepada BUMD	1.406.255.914.320
Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	422.494.717.139
Penerusan Pinjaman Lainnya	618.111.481.970
Nilai Bruto	46.540.275.969.109
Penyisihan	(232.701.379.846)
Nilai Bersih	46.307.574.589.263

6. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp12,41 triliun

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp12.406.618.813.595 dan Rp9.351.448.050.646 merupakan aset yang berupa *software*, biaya survei/penelitian, dan hak paten yang berada di KIL dan BUN. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Daftar 19.

7. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya Rp37,25
triliun

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp37.253.051.374.408 dan Rp40.987.103.326.394, terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2010 <i>(Audited)</i>
1. Kementerian Luar Negeri	325.201.782.094	366.264.294.334
2. Kementerian Pertahanan	5.763.321.157.149	2.549.198.826.943
3. Kementerian ESDM	-	6.229.158.015
4. Kementerian Pendidikan Nasional	266.446.173.044	-
5. Kementerian Kesehatan	2.033.538.302.485	-
6. Kementerian Agama	3.244.412.872.238	2.617.237.058.588
7. Kementerian Kehutanan	50.000.899	5.998.376.112
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	87.114.525.722	87.380.711.730
9. Kementerian Lingkungan Hidup	-	23.480.476.922
10. BUN	25.532.966.560.779	35.331.330.423.750
Jumlah	37.253.051.374.408	40.987.103.326.394

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp325.201.782.094 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18(424)0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membaiayai perwakilan apabila remise (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.763.321.157.149 merupakan dana devisa berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga.
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp266.446.173.044 adalah Dana Ahadi pada Universitas Airlangga.
4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.033.538.302.485 merupakan dana Bansuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2011.
5. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp3.244.412.872.236 terdiri dari:
 - a. Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp2.077.597.299.329, merupakan dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemajuan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji.
 - b. Aset bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp1.166.815.572.907. BPIH mengelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang.
6. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp50.000.899 merupakan Deposito Terbku DANA Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS).
7. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp87.114.525.722 berupa Dana Penguatan Modal (DPM) dan Dana Ekonomi Produktif (DEP) merupakan bagian dari program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat.
8. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp25.532.966.560.779, terdiri dari (dalam Rp):
 - a. Rekening Cadangan
 - b. Rekening Retur
 - c. Escrow Bank Mutuara
 - d. Aset Bersih Beperaturan
 - e. Rekening Lainnya
 - f. BA 999.03
 - g. BA 999.08

Uraian	31 Desember 2011 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2010 <i>(Audited)</i>
Rekening Retur	-	410.881.635.675
Rekening Cadangan	21.576.465.726.102	31.077.734.977.042
Escrow Bank Mutuara	156.694.824.182	155.364.266.014
Aset Bersih Beperaturan	-	3.551.726.799.462
Rekening Lainnya	149.465.989.003	-
BA 999.03	3.643.972.716.732	-
BA 999.08	6.367.305.761	135.622.745.537
Jumlah	25.532.966.560.779	35.331.330.423.750

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

- a. Saldo Rekening Retur pada akhir tahun 2011 disetorkan ke Kas BUN di BI, sehingga bersaldo nihil per 31 Desember 2011.
- b. Rekening Cadangan sebesar Rp21.576.465.725.102 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari (dalam Rpl):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Rekening Cadangan Reboisasi	4.548.878.110.595	4.548.878.110.595
Rekening Cadangan Subsidi/PSO	7.523.848.941.348	16.767.875.871.035
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	9.905.740.873.181	8.374.050.605.673
Rekening Cadangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG	..	1.388.930.389.798
Jumlah	21.576.465.725.102	31.077.734.871.042

- Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.548.878.110.595 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 dan No. 02/Menlhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
- Rekening Cadangan Subsidi/PSO adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa pagu DIPA subsidi/PSO yang belum dapat dicairkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Pencairan dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSO dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, kecuali rekening cadangan Subsidi/PSO yang berkaitan dengan BULOG pencairannya menunggu hasil audit BPK.

Rincian Rekening Cadangan Subsidi yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Subsidi Premium	31.066.361.825	2.113.237.391.617
Subsidi Minyak Tanah	238.205.878.679	595.865.914.429
Subsidi Minyak Solar	110.794.727.694	874.288.783.467
Subsidi LPG	348.690.214.595	1.043.741.129.751
Subsidi Listrik	284.141.726.597	271.474.935.357
Subsidi Pangan	3.880.034.930.700	4.234.526.934.429
Subsidi Bensin	38.807.101.708	1.457.623.456.172
Subsidi Pupuk	2.250.517.999.430	5.067.111.215.930
Subsidi Minyak Goreng
Subsidi PELNI	124.457.848.380	50.000.000.000
Subsidi PT XAI	152.468.942.728	134.350.003.664
Subsidi PT Pas dan Giro	64.260.500.000	43.750.000.000
PSD Perum BULOG	..	14.081.909.276
Subsidi Bunga Kredit Program	..	767.823.194.853
Jumlah	7.523.848.941.348	16.767.875.871.035

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Total rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO adalah sebesar Rp8.895.590.963.425. Dari jumlah tersebut, yang disajikan dalam Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebesar Rp7.523.846.941.346 karena telah disalurkan kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Februari 2012, sementara sisanya sebesar Rp1.371.744.022.079 disajikan dalam Kas Lainnya dan Setara Kas karena telah disetorkan ke Kas Negara sampai akhir Februari 2012.

- Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil sebesar Rp9.505.740.673.161 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perpendidahaaraan yang digunakan untuk menampung sisa penerimaan sumber daya alam setiap tahun yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan yang belum disalurkan kepada Pemerintah Daerah karena belum teridentifikasi daerah penghasilnya. Rincian Rekening Cadangan DBH yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut

Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
1. Dana Cadangan DBH Mengikuti Rm 15%	3.173.743.651.674
2. Dana Cadangan DBH Gas Duri 20%	3.656.064.630.726
3. Dana Cadangan DBH Iuran Tengah	19.230.800.813
4. Dana Cadangan DBH Pemahi	2.572.034.450.026
5. Dana Cadangan DBH III 1/3-JPH	23.157.369.128
6. Dana Cadangan JPH FGJH	114.411.969.846
7. Dana Cadangan DBH Dana Pekerjaan	122.480.418.268
8. Dana Cadangan JPH Perikanan	18.310.647.130
Total	8.606.710.673.161

Total Rekening Cadangan DBH adalah sebesar Rp9.899.647.659.901. Dari jumlah tersebut, yang disajikan dalam Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebesar Rp9.505.740.673.161 karena telah disalurkan kepada pemda sampai dengan akhir Februari 2012, sementara sisanya sebesar Rp393.908.988.740 disajikan dalam Kas Lainnya dan Setara Kas karena telah disalurkan ke Kas Negara sampai akhir Februari 2012.

- c. Rekening escrow Bank Mutiara sebesar Rp156.694.824.182 adalah Rekening escrow pada rekening No. 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (duki Bank Century) yang setara dengan USD 17.279.976,20. Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.
- d. Rekening Lainnya yang digunakan untuk tujuan tertentu adalah sebesar Rp149.465.989.003 dengan rincian sebagai berikut:

Urutan Rekening	Jumlah (Rp)
1. Menteri Keuangan C.U Jenderal Perpendidhaaraan Jlnbu. Menampung Pengembalian Dana Talsungan Dan Pencairan Aset BPR Nomor 500.000004980	52.065.962.115
2. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara nomor 502.000001980	0
3. BUN Untuk Obligasi Dlm Rangka Perjanjian nomor 502.000002980	83.489.078.438
4. Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham PT Telkom Di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.339.269.645
5. Rekening Depkeu U/Penempungan Hibah Dari luar Negeri Dlm Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD nomor 502.074411980	2.572.258.804
Total	149.465.989.003

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

e. Aset Bapertarum tidak disajikan lagi dalam neraca. *Lihat Catatan Penting Lainnya.*

f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 terdiri dari:

1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bengulir atas *Debt Nature Swap* sebesar Rp24.911.006.842,93 yang terdiri atas:

- Dana pada rekening penampungan anggaran *Debt Nature Swap* Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp452.994.640,06 yang terdiri dari sisa anggaran *Debt Nature Swap* Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp1.933.128,38, dan jasa giro setelah dikurangi administrasi sebesar Rp451.061.511,68.
- Dana pada rekening penampungan dana pokok dan bagi hasil sebesar Rp24.468.012.202,87 yang terdiri dari dana pangembalian dana pokok dan bagi hasil sebesar Rp24.219.632.050,87, dan dana jasa giro setelah dikurangi administrasi sebesar Rp238.380.152.

Pada LKPP Tahun 2010, dana *Debt Nature Swap* disajikan pada Dana Bengulir. Karena dana tersebut sudah tidak digulirkan kembali maka pada LKPP Tahun 2011 disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp3.617.700.000,00 yang merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sehingga bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk menyiapkan keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang nuak.

Endowment Fund IDana Pengembangan Pendidikan Nasional berasal dari realisasi atas anggaran yang telah ditekankan pada Bagian Anggaran 999.03. Sesuai dengan PMK Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyedian, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan, dinyatakan bahwa BLU di bidang pendidikan yang mengebla DPPN adalah satuan kerja (satker) yang menerapkan prinsip pengelolaan keuangan BLU.

Pada LKPP Tahun 2010, dana pengembangan pendidikan nasional dilaporkan sebagai bayaran dari Aset Lain-lain. Pada LKPP Tahun 2011, dana pengembangan pendidikan nasional direklasifikasi menjadi Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

3) Setoran dividen PT Sarinah sebesar Rp1.361.709.888,90.

Setoran dividen PT Sarinah oleh Bank Mandiri disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya dengan nomor rekening 502.000.002, dimana seharusnya ditutorkan ke rekening kas umum negara 502.000.000.980. Berdasarkan hal tersebut, setoran dividen sarinah tersebut tampaung terlebih dahulu pada Rekening Pemerintah Lainnya, dan akan dilaporkan sebagai pendapatan dan dapat digunakan sebagai kas pemerintah setelah dana tersebut dipindahkan ke Rekening Kas Umum Negara.

g. Dana sebesar Rp6.367.305.761 pada BA 999.08 merupakan dana devisa berupa LIC yang belum dicairkan oleh pihak ketiga pada Kementerian Pertahanan yang sumber dananya berasal dari BA 999.08.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

8. Dana Kelolaan BLU Yang Belum Digulirkan/Disalurkan

Dana Kelolaan BLU yang
Belum Digulirkan
Rp19,32 triliun

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp19.320.332.310.233 dan Rp18.459.000.085.715 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Kementerian Keuangan	10.352.269.122.760	12.878.500.000.000
2. Kementerian Kehutanan	2.010.359.132.946	2.014.116.107.640
3. Kementerian Koperasi dan UKM	644.504.967.842	295.810.000.000
4. Kementerian Perumahan Rakyat	2.381.863.886.849	2.436.216.185.364
5. Kementerian Pekerjaan Umum	3.931.335.199.836	834.357.792.711
Jumlah	19.320.332.310.233	18.459.000.085.715

Dana kelolaan pada masing-masing BLU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Kelolaan pada Kementerian Keuangan berada di BLU Pusat Investasi Pemerintah yang disimpan pada rekening giro dan deposito, dengan rincian (dalam Rp):

Nama Bank	Saldo
1. Giro di Bank BRI (RIDI)	953.471.216
2. Giro di Bank BRI (Geothermal)	500.000.000
3. Giro Dollar AS di Bank BRI*	1.815.651.544
4. Deposito BRI (9 Bilyet)	4.245.000.000.000
5. Deposito Bank Mandiri (5 Bilyet)	2.088.000.000.000
6. Deposito BTN (5 Bilyet)	800.000.000.000
7. Deposito BNI (4 Bilyet)	688.000.000.000
8. Deposito BCA (4 Bilyet)	1.215.300.000.000
9. Deposito BCA Sumut (1 Bilyet)	459.300.000.000
10. Deposito Bank BJB (2 Bilyet)	575.000.000.000
11. Deposito Bank Alangka Syariah (1 Bilyet)	134.000.000.000
12. Deposito Bank Muamalat (3 Bilyet)	242.000.000.000
13. Deposito Bank Nagari (1 Bilyet)	3.000.000.000
Jumlah	10.352.269.122.760

2. Dana Kelolaan pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.010.359.132.946 berada di BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang disimpan di 1 rekening Bank BRI.
3. Dana Kelolaan pada Kementerian Koperasi UKM berada di BLU Lembaga Pengelola Dana Bengkulu KUKM. Dana ini terdapat pada 32 rekening giro sebanyak Rp244.504.967.842, dan 3 rekening deposito sebesar Rp400.000.000.000.
4. Dana Kelolaan pada Kementerian Perumahan Rakyat berada di BLU Pusat Pembiayaan Perumahan dengan sebagai berikut (dalam Rp):

Nama Bank	Saldo
1. BNI	26.752.277
2. BTN Syariah	7.102.056
3. BUKOPIN	2.288.472
4. Mandiri	1.000.000
5. Bank Riau Kepri	276.732.800
6. Bank Riau Kepri Syariah	1.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

7. Bank Sumut	1.271.785.664
8. Bank Sumut Syariah	350.687.250
9. Bank Kaltim	1.881.413.500
10. Bank Sumsel Babel	103.107.449
11. Bank NTT	88.564.652
12. Bank DIY	51.889.700
13. BNI	196.334.003
14. BUKOPIN	660.000.000
15. BUKOPIN	1.049.220.000.000
16. BTN	404.960.000.000
17. BTN	1.670.000.000
18. BTN	8.870.000.000
19. BNI Syariah	299.790.000.000
20. BNI Syariah	1.460.000.000
21. Mandiri	1.030.000.000.000
22. Mandiri	510.000.000.000
23. BNI	500.000.000.000
24. Pendapatan dari perolehan sasaran kerangka Ceta Kelasan	154.770.774
Total	2.381.803.888.848

5. Dana Kelolaan pada Kementerian Pekerjaan Umum berada di BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT adalah (dalam Rp):

Nama Bank	Saldo
1. Bni bank Mandiri Acc. No. 12810114815383	7.461.416.875
2. Bni ESI Acc. No. 30703133-01-007751-31-3	21.723.446.446
3. Bni ESI Acc. No. 5822522232	11.056.271.432
4. Deposito Bank Mandiri	965.000.000.000
5. Deposito BNI	150.000.000.000
6. Deposito BTN	200.000.000.000
7. Deposito BRI	2.326.000.000.000
8. Deposito BRI Syariah	253.000.000.000
Jumlah	3.931.335.199.836

9. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan
Rp 75,37 miliar

Dana Penjaminan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp75.371.634.076 dan Rp71.135.792.897 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai penjaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin. Dana penjaminan tersebut dikelola oleh perusahaan penjamin, yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia.

10. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS Rp 150,51
triliun

Aset KKKS per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp150.508.980.296.216 dan Rp88.224.330.326.991. Nilai Aset KKKS per 31 Desember 2011 tersebut berupa tanah dengan luas 667.919.254 m² sebesar Rp14.362.284.169.984 yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS sebagai hasil inventarisasi terhadap 44 KKKS, dan aset lain non tanah sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Rp136.146.696.126.232 berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian pada 76 KKKS.

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2011 disajikan pada Daftar 20.

Terdapat aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2011, yaitu:

1. Aset sumur yang tidak digunakan sebanyak 623 sumur pada 19 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.119.972.096.205.
2. Aset *Subsequent Expenditure* sebanyak 13.897 item pada 34 KKKS dengan nilai sebesar Rp44.345.555.350.377.
3. Aset Kondisi Rusak Berat 21.505 item pada 52 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.313.308.913.398.
4. Aset yang dalam proses penghapusan pada KKKS Pertamina Hulu Energi West Madura *Offshore* (dh. Kodeco Energy) senilai Rp.927.406.395.
5. Aset Non Tanah sejumlah 368 item pada 5 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.382.453.216.163.
6. Aset perolehan di atas tahun 2011 52 KKKS senilai USD2,363,329,180 belum dimasukkan dalam Neraca.
7. Aset dengan nilai wajar negatif sejumlah 209 item dengan nilai perolehan negatif sebesar USD24,019,980 yang merupakan koreksi atas nilai perolehan aset.

11. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN Rp87,54 triliun

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp87.543.984.466.405 dan Rp29.203.047.197.602 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih), sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero).

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2011 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
Pinjaman yang Diberikan	7.585	35.465.120.460.776
Tagihan PKPS	23	29.606.876.725.368
Aset Non Inti-Properti	1.643	1.981.229.805.153
Aset Non Inti-Inventaris	36.985	12.135.475.108
Penempatan Antar Bank dan Nostro	n.a.	478.622.000.000
Jumlah		87.543.984.466.405

Termasuk di dalam Aset Eks BPPN tersebut adalah tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp29.606.876.725.368 yang merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA), *Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement* (MRNIA), dan piutang BPPN kepada eks PSP Bank Buku Kegiatan Usaha (BBKU) dan *Bank Take Over* (BTO) II dalam perjanjian Akta Pengakuan Uang (APU).

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada Daftar 21.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**12. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya**

*Aset Lainnya dari Unit
Pemerintah Lainnya
Rp14.76 triliun*

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp14.762.445.010.365 dan Rp0. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. Otorita Batam	13.922.723.215.421	-
2. Taman Mini Indonesia Indah	42.277.377.168	-
3. Otorita Asahan	746.947.319.389	-
4. BP Gedung Manggala Wanabakti	21.352.889.643	-
5. Yayasan Gedung Veteran	11.120.585.877	-
6. Badan Amil Zakat	16.313.704.645	-
7. Badan Wakaf Indonesia	1.709.818.222	-
Jumlah	14.762.445.010.365	-

Pada LKPP Tahun 2010, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada Otorita Batam, Taman Mini Indonesia Indah, Otorita Asahan, BP Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran dilaporkan pada Investasi Non Permanen Lainnya. Nilai yang disajikan pada Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya tersebut merupakan nilai ekuitas.

13. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain Rp105.992
triliun*

Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp105.992.977.283.250 dan Rp109.579.037.246.507 merupakan aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp86.808.739.814.116, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp105.992.977.283.250 dikurangi penyisihan atas piutang pada BA 999.04 sebesar Rp19.184.237.469.134. Berikut rincian Aset Lain-lain (dalam Rp):

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1. K/L	36.908.907.616.802	56.966.506.583.499
2. BA BUN 999.03	142.127.657.545	1.000.000.000.000
3. BA BUN 999.04	19.419.108.122.985	2.934.581.997.850
4. BA BUN 999.08	46.701.991.089	30.415.353.808
5. BA BUN 999.99	49.476.131.894.229	48.647.523.311.350
Nilai Bruto	105.992.977.283.250	109.579.037.246.507
Penyisihan pada BA 999.04	(19.184.237.469.134)	-
Nilai Bersih	86.808.739.814.116	

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp36.908.907.616.802. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada Daftar 19.
 2. Aset lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp142.127.657.545 terdiri dari:
 - a. Piutang PNBP berupa dividen sebesar Rp99.272.957.696.
- Piutang Dividen yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun terdiri dari pokok sebesar Rp70.002.808.923 dan denda sebesar 29.270.148.773.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Piutang ini merupakan piutang pada 6 BUMN, yaitu PT Pengelolaan Daerah Industri Batam, PTPN IX, Perum Perumnas, PTPN II, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V.

- b. Reklasifikasi dari dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp12.206.756.931.

Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Penikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan sejak tahun 2004. Program PUPTSK tersebut adalah Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI), Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI), Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS), dan Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

- c. Aset eks dana bergulir pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp30.647.942.918

Piutang pada Kementerian Perindustrian merupakan piutang atas program dana bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh LPT Indag. Sampai dengan 31 Desember 2011, piutang pada LPT Indag yang telah diserahkan kepada KPKNL adalah sebesar Rp5.583.933.590 dan yang belum diserahkan ke KPKNL adalah sebesar Rp25.064.009.328.

- 3. Aset Lain-Lain BA BUN 999.04 per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp19.419.108.122.985, sedangkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp234.870.653.851 berasal dari nilai bruto sebesar Rp19.419.108.122.985 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp19.184.237.469.134. Rincian Aset lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut:

- Aset Lainnya RDI sebesar Rp18.482.484.846.746 yang terdiri dari (dalam Rp):

Urutan	Jumlah
1.Tunggakan yang akan dielakkan karena restrukturisasi dan piutang yang tertinggal baik dari satuan kerja	10.187.787.006.715
2.Tunggakan dalam proses PMI	44.707.776.045
3.Tunggakan racetan tunggakan BB0380U-ECL	2.183.723.103.734
4.Tunggakan Eks Imor Timur	6.308.184
5.Tunggakan konsumsi bencana	11.169.766.038
Nilai Bruto	18.482.484.846.746
Penyisihan	(19.419.108.122.985)
Nilai Bersih	00.205.001.550

- Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp836.623.176.238, yang terdiri dari (dalam Rp):

Urutan	Jumlah
1. P3T Peraturan	307.968.001.305
2. UP2 Peleburan	224.388.303.783
3. Peternakan	97.279.411.673
4. Kredit Lainnya Pedesaan	2.068.512.000
5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi	5.270.305.000
6. Dana Cadangan Risiko	100.560.171.016
7. Dana Jaminan Uang	48.824.352.738
8. Dana Kelolaan	4.342.720.062
9. Dana Risiko	15.724.678.088
Nilai Bruto	836.623.176.238
Penyisihan	(768.018.513.945)
Nilai Bersih	00.604.662.293

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

4. Aset Lain-lain yang berasal dari Bagian Anggaran 999.08 sebesar Rp46.701.991.689 berada di beberapa K/L atau lembaga sebagai berikut (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Pertanian	-	550.074.000
2. Kementerian Perhubungan	-	9.403.159.985
3. LPP TVRI	4.129.603.585	343.084.000
4. LPP RI	26.787.998.211	4.352.223.463
5. Otorita Batam	15.766.812.350	15.766.812.350
6. Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP	37.677.543	-
Jumlah	46.701.991.689	30.415.353.888

5. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp49.476.131.894.229, terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2010 (<i>Audited</i>)
1. PT PPA (Persero)	2.644.490.527.174	2.614.411.741.232
2. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	1.484.449.098.120	1.749.873.770.941
3. Aset eks Pertamina	43.984.876.106.228	44.283.237.799.177
4. Piutang Migas	1.362.316.162.707	-
Jumlah	49.476.131.894.229	48.847.523.311.350

- 1). Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp2.644.490.527.174 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PT PPA (Persero) menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada Daftar 22.
- 2). Aset lain-lain eks PT PPA sebesar Rp1.464.449.098.120 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjuniyan PT PPA lalu peruntama diselenggarakan. Mulusi aset tersebut selama tahun 2011 sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Saldo Awal	Kulit/Kuang	Saldo Akhir
		Unit	Unit	Unit
1	Aset Negara	100.000.000.000	/	100.000.000.000
2	Aset Properti	3.79 1.622.676.05.720	27 266.424.621.104	3.162 1.222.280.612.650
3	Salai Bumi	0 8.657.242.200	-	0 8.657.242.200
4	Piutang Seluruhnya	27 22.400.000.000	-	21 22.400.000.000
	Jumlah	3.803 1.748.873.770.841	34 266.424.622.821	3.468 1.464.449.098.120

- 3). Aset eks Pertamina sebesar Rp13.884.876.106.228 merupakan nilai aset sebagai akibat penetapan Nama Penyertaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset eks Pertamina per 31 Desember 2011 tersebut terdiri atas:

- a. Aktiva Tetap LNG BADAK-Bontang Rp16.302.447.401.562 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp11.029.729.944.488.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2011 untuk pembangunan LNG Badak, sedangkan untuk pembangunan LNG Arun sudah lunas. Adapun sumber

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

dana untuk pembayaran pinjaman dimaksud berasal dari hasil penjualan gas LNG Arun dan LNG Badak sehingga kemungkinan *default* atas pembayaran tersebut sangat kecil.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai peranggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008.

Nilai aset kilang LNG Arun berdasarkan hasil penilaian DJKN per 17 Maret 2011 dan kilang LNG Badak hasil penilaian DJKN per 12 Nopember 2011. Inventarisasi dan penilaian terhadap aktiva kilang LNG Arun dilakukan oleh PT Arun NGL, Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sejak tanggal 15 Desember 2010, sedangkan terhadap aktiva kilang LNG Badak dilakukan oleh PT Badak NGL, Kanwil XIII DJKN Samarinda dan KPKML Bontang sejak tanggal 1 Nopember 2010. Saat ini Laporan Inventarisasi dan Penilaian aktiva kilang LNG Arun dan LNG Badak sedang dalam tahap penyelesaian oleh masing-masing Tim Pelaksana.

- b. Aktiva Tetap yang tidak diajukan kepada PT Pertamina (Persero) pada 1 lokasi dengan nilai sebesar Rp15.379.053.000 di Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat yang telah dinilai oleh Tim Penilaian DJKN.
- c. Aset Eks PT Pertamina yang dipunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp16.242.092.564.001:

Aset Eks PT Pertamina yang tidak diajukan dalam LKPP Tahun 2011 adalah Aset yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp16.242.092.564.001 karena belum dilakukan IP. Terhadap aset ini Menteri Keuangan melalui surat Nomor:S-23!MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Isu-Isu Pemilir Pertamina, Pertamina diminta untuk melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tersebut. Hasil inventarisasi dan penilaian aset dimaksud telah dimintakan kepada PT Pertamina dengan surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor 3865/KN/2010 tanggal 1 Juli 2010, namun PT Pertamina belum menyampaikan rincian aset hasil inventarisasi, melainkan masih berupa pengelompokan aset.

Aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP termasuk dikenakan sewa karena Pertamina EP dalam hal ini selaku KKKS. Pihak PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 11051CD0000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 mengenai permohonan PT Pertamina untuk menurunkan skema sewa atas penggunaan BMN berupa aset eks KKKS Pertamina atas sebagian dari BMN senilai Rp18.226.357.000.000 dan kemudian telah disetujui pemohonan pengenaan sewa tersebut oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-23!MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 yang menjelaskan bahwa Pemerintah menyetujui usulan Pertamina untuk menerapkan skema sewa atas sebagian aset yang digunakan oleh Pertamina EP.

Kemudian berdasarkan surat Nomor S-533/KN/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks KKKS Pertamina Senilai Rp16.226.357.000.000, dijelaskan bahwa pihak PT Pertamina telah membukukan Beban Sewa atas peralatan yang harus disewa pada Laporan Keuangan Audited PT Pertamina (Persero) tahun 2003 sampai dengan 2009. Namun pihak PT Pertamina sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran atas nilai sewa tersebut kepada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

negara, sehingga Pemerintah meminta PT Pertamina untuk dengan segera menyetorkan beban sewa tersebut ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang (Kode Akun 423151). Namun pihak Pertamina (Persero) belum dapat melakukan pembayaran karena belum adanya kontrak perjanjian sewa menyewa antara pemerintah dengan Pertamina (Persero). Saat ini Pemerintah sedang melakukan kajian atas permasalahan ini.

d. Aset Eks PT Pertamina berupa 9 (sembilan) Aset Tetap sebesar Rp395.227.143.177 terdiri dari:

(1). Aset di Jalan Abdul Muis 68:

Menteri Keuangan dengan surat Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009 telah menutuskan pengembalian sewa atas penggunaan sebagian aset di Jl. Abdul Muis 68 untuk SPBU COCO Pertamina. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga telah menyampaikan surat permintaan kepada PT Pertamina c.q. Pertamina Retail Untuk SPBU COCO Pertamina dan kantor PT Mitra Tours & Travel sebagai pengguna BMN agar melakukan penyeituruan uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara

(2). BMN Lain yang digunakan oleh Pertamina (Bandung, Rawa munggu, dsb):

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyampaikan surat permintaan kepada PT Pertamina agar melakukan penyetoran uang sewa BMN ke Rekening Kas Umum Negara sebagai kompensasi atas digunakannya BMN dimaksud dalam kegiatan operasional Pertamina.

(3). Aset di Jalan Taruyung yang digunakan Jakarta Internasional School (JIS):

Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada JIS nomor S-341/MK.6/2010 tanggal 27 September 2010 bahwa usulan JIS untuk mendapatkan diskon tarif sewa sebesar 80% dari nilai sewa tanah belum dapat disetujui. Sewa BMN yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp118.275.283.825. Pihak JIS hanya bersedia melakukan pembayaran sewa Rp23.655.056.765 sebagai niat baik untuk melanjutkan pemakaian BMN tersebut sambil menunggu penetapan tarif definitif. Pada tanggal 4 Oktober 2011, JIS menyampaikan permohonan pemhayaran sewa 50% dari tarif PMK 98/2007 dengan pemhayaran tahunan. Pada tanggal 11 Juni 2012, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan usulan penyelesaian:

- Sewa periode 1 Mei 2008 - 30 April 2012, JIS membayar sewa sebesar Rp34.820.227.080 (susai 98/PMK.06/2007).
- Dalam hal JIS hanya mampu membayar 50%, sisanya tagihan sewa akan diserahkan penagihannya ke PUPN untuk dicicil sesuai kemampuan JIS.
- Sewa 1 Mei 2012 - 30 April 2017, sesuai ketentuan PMK Tarif Sewa, yaitu Tarif 50% untuk Lembaga Pendidikan Asing yang Nirlaba (Revisi RPMK Tarif Sewa sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan).

Terhadap permasalahan ini, Kementerian Keuangan akan menyampaikan surat kepada Presiden untuk meminta persetujuan pemberian keringanan (dispensasi) tarif sewa BMN oleh JIS.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Aset Eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp16.242.092.564.001 dan berupa 9 (sembilan) Aset Tetap sebesar Rp395.227.143.177 belum dilakukan IP.

- 4). Aset Lain-Lain berupa Piutang Migas sebesar Rp1.362.316.162.707 merupakan piutang jangka panjang yang berasal dari reklasifikasi piutang migas jangka pendek pada satker PNBP Khusus DJA. Aset tersebut berasal dari saldo piutang TPPI tahun 2010 yang direklasifikasi berdasarkan skema pembayaran oleh TPPI melalui cicilan sebesar USD1,5 juta per bulan yang disepakati dalam *Amendment Sales Agreement*.

C.2.30. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya
Rp19.970.874.008.883*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp19.970.874.008.883 terdiri dari (dalam Rp):

Urutan	Jumlah
1. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	157.010.079.393
2. Penerusan Pinjaman	232.701.379.846
3. Piutang Jangka Panjang	396.925.080.510
4. Aset Lain-lain	19.184.237.469.134
Jumlah	19.970.874.008.883

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lainnya.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp157.010.079.393 dapat dilihat pada Daftar 18.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerusan Pinjaman sebesar Rp232.701.379.846 merupakan Penyisihan Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang sebesar Rp396.925.080.510 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Kementerian Kehutanan sebesar Rp382.032.632.833 dan pada Piutang Jangka Panjang BA 999.04 sebesar Rp14.892.447.677.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp19.184.237.469.134 merupakan Penyisihan Aset Lain-lain pada BA 999.04.

C.2.31. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PK)

*Utang PFK Rp1.76
triliun*

Utang PFK per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.755.574.696.265 dan Rp1.575.434.547.871 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Urutan	31 Desember 2010 "	Transaksi Tahun 2011		31 Desember 2011
		Penerimaan	Pengeluaran	
PK: 10% Gaji PMG	1.205.691.029.549	10.207.157.990.800	16.122.953.021.019	1.080.049.006.221
PK: 2% Baji Tanaman	(3.338.330.078)	4.398.810.710	3.340.112.178	2.279.971.694
PK: 2% Jumatras, Pemas	241.806.007.498	2.167.163.634.328	2.038.704.143.102	31.639.796.694
PK: 2% As. Bahan Bakar PTT	5.298.012.248	11.720.264.804	12.088.157.460	4.921.120.594
PK: 2% Julus TM Paitu	55.828.168	0.249.703.210	0.209.478.003	(583.661.621)
PK: Lain-Lain	36.203.776.488	382.412.080.403	380.709.777.027	29.023.046.635
PK: Boking	12.135.040.026	221.084.624.310	302.884.026.026	17.084.510.295
JUMLAH	1.593.984.119.478	19.003.988.389.524	18.852.277.812.157	1.166.674.996.268

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Perbedaan posisi saldo akhir tahun 2010 pada LKPP Tahun 2010 dengan saldo awal tahun 2011 terjadi karena ada koreksi penambahan Penerimaan PFK eks PNS PT KAI sebesar Rp8.449.571.069 dan koreksi PFK Penutupan Rekening sebesar Rp538.

C.2.32. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp31.78 triliun

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp31.780.634.369.020 dan Rp31.370.392.714.561 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2011 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2010 <i>(Audited)</i>
K/L	8.854.090.097.568	2.671.573.478.397
BUN	22.926.544.271.452	28.688.819.236.164
Jumlah	31.780.634.369.020	31.370.392.714.561

1. Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp8.854.090.097.568 antara lain berupa dana yang harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada Daftar 23.
2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp22.926.544.271.452, terdiri dari (dalam Rp):

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2011 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2010 <i>(Audited)</i>
BA 999.05	18.292.725.677.411	15.798.435.847.230
BA 999.08	3.495.984.368.048	8.709.596.834.582
BA 999.99 (Transaksi Khusus)	-	3.551.726.799.462
Utang terkait Retur SP20	1.137.834.225.983	639.068.754.870
Jumlah	22.926.544.271.452	28.688.819.236.164

- a. Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemda penerima sebesar Rp18.292.725.677.411. Dari jumlah utang tersebut, sebesar Rp8.505.740.673.161 merupakan kewajiban terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan yang dananya masih disimpan pada Rekening Cadangan. *Lihat Catatan C.2.29*

Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp18.292.725.677.411, adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Jenis Kewajiban	Jumlah
1.	Kurang Salur DBH BP PBB 2009, 2010, dan 2011	12.085.015.695
2.	Kurang Salur DBH PBB TA 2011	204.829.900.242
3.	Kurang Salur DBH PBB TA 2010	46.852.747.482
4.	Kurang Salur DBH BPMTB TA 2010	230.813.021.056
5.	Kurang Salur DBH CHT 2010	46.726.348.608
6.	Dana Cadangan TA 2011	9.505.740.673.161
7.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH SDA Migrasi	3.837.974.325.181
8.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH SDA Pertambangan Umum	700.000.145.345
9.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH SDA Kehutanan	24.470.448.544
10.	Kewajiban Transfer Destinasi DBH SDA Pemas Bumi	24.969.958.292

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

11. Kewajiban Transfer Dicantum DBH SDA Perikanan	6.476.333.602
12. Kewajiban Transfer Dicantum DBH PPh TA 2008-2010	2.679.064.626.378
13. Kewajiban Transfer Dicantum DBH Pajak TA 2011	871.438.363.103
14. Kewajiban Transfer Dicantum DBH CHT TA 2011	91.584.683.712
Total	18.292.725.677.411

- b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.495.984.368.048, diantaranya berupa:
 - Utang Kepada Pihak Ketiga pada BNPB sebesar Rp3.156.450.194.500 merupakan dana yang akan disalurkan kepada BPBD atau Instansi yang menangani bencana tahun 2011.
 - Utang Kepada Pihak Ketiga pada Sekretariat Negara sebesar Rp339.296.000.000 berupa utang pembayaran termin III dalam rangka pengadaan Pesawat Kepresidenan BB-J-2.
 - Utang Kepada Pihak Ketiga pada LPP TVRI dan LPP RRI sebesar Rp120.129.875 dan Rp104.030.673.
 - Utang Kepada Pihak Ketiga pada LPP RRI sebesar Rp14.014.000 merupakan kekurangan rapel beras.
- c. Utang pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) berada di BAPERTARUM tidak diajukan lagi dalam neraca. *Lihat Catatan Penitrig Lanjutnya.*
- d. Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Retur SP2D merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D sebesar Rp1.137.834.225.003. Jumlah ini berasal dari Utang s/d Tahun 2010 sebesar Rp228.178.119.185 ditambah penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening tahun berjalan sebesar Rp5.156.956.594.762 dikurangi pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening sebesar Rp4.247.596.582.982, dan utang kepada pihak ketiga yang disebut rekening retur yang berasal dari retur SP2D karena kesalahan nama dan nomor rekening yang tercantum dalam SP2D sebesar Rp296.095.018 *Catatan D.2.2.* Pada tahun 2010, Utang terkait Retur SP2D terdapat pada Rekening BUN di BI dan Rekening Retur.

C.2.33. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang Kelebihan
Pembayaran Pendapatan
Rp704.44 miliar*

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp704.437.258.982 dan Rp3.547.727.872.825 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyelot namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Urutan	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
SPM d/t yang belum diterbitkan SP2Dnya pada Kementerian Keuangan	704.320.653.778	329.105.656.431
Kelebihan atas pembayaran Jasa Kesiagaan dan PT Admiral Lines pada Kementerian Perhubungan	116.103.388	-
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian Agama	501.818	-
Kelebihan Pendapatan Dividen BUMN (BA 999.03)	3.218.622.014.394	-
Jumlah	704.437.258.982	3.547.727.872.825

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Kelebihan Pendapatan Dividen Interim BUMN (BA 999.03) untuk tahun 2011 disajikan sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

C.2.34. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

*Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang
Rp106.777.089.696.825*

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp106.777.089.696.825 dan Rp88.286.391.827.798 merupakan utang Pemerintah yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:		
BA 999.01	48.296.753.806.497	48.875.144.963.748
BA 999.08		92.000.000.000
Subtotal	48.296.753.806.497	46.967.144.963.748
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:		
BA 999.01 - Surat Berharga Negara (SBN)	58.344.807.418.456	41.292.929.030.085
BA 999.01 - Pinjaman Dalam Negeri	135.658.235.872	26.240.423.965
Utang pada PDRRI	70.236.000	77.420.000
Subtotal	58.480.335.890.328	41.318.246.874.060
Jumlah	106.777.089.696.825	88.286.391.827.798

Bagian Lancar Pinjaman pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000 terdapat pada Sekretariat Negara untuk pengadaan *green aircraft* pesawat kepresidenan. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tahun 2011, sehingga saldo per 31 Desember 2011 nihil.

Bagian Lancar SBN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis SBN	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
I. Fixed Rate Bonds dan OBI		
Nominal	27.683.468.000.000	22.570.875.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(67.374.007.000)	(38.046.915.000)
Nilai bersih (nilai buku)	27.616.093.993.000	22.534.828.085.000
II. Variable Rate		
Nominal	4.368.483.000.000	8.031.686.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	4.368.483.000.000	8.031.686.000.000
III. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Nominal yg harus diamortisasi	4.104.803.288.456	3.795.739.845.085
Accrued Interest	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	4.104.803.288.456	3.795.739.845.085
IV. OBI		
Nominal	21.028.495.000.000	8.890.895.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	21.028.495.000.000	8.890.895.000.000
V. ZERO COUPON		
Nominal	1.249.000.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	(100.287.864.000)	-
Nilai bersih (nilai buku)	1.148.732.136.000	-
Total SBN (I + II + III + IV + V)	58.344.807.418.456	41.292.929.030.085

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Catatan:

- Fixed Rate Bond terdiri dari 4 seri Fixed Rate Bond;
- ORI terdiri dari 2 seri, yaitu ORI 003 dan ORI 004;
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004 dan SU-007

Rincian lebih lanjut Bagian Lancar Utang Obligasi Dalam Negeri dapat dilihat pada Daftar 24.A.

Bagian Lancar Pinjaman Dalam Negeri merupakan bagian lancar pinjaman antara Pemerintah RI sebagai penerima pinjaman dengan PT BNI Persero dan PT BRI Persero dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan POLRI.

Bagian Lancar Utang pada POLRI merupakan bagian lancar atas utang terkait perolehan kendaraan pada BLU di POLRI.

C.2.35. Utang Biaya Pinjaman

*Utang Biaya Pinjaman
Rp21.92 triliun*

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp21.924.038.335.465 dan Rp20.261.543.289.213 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Urutan	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN	19.275.822.333.294	17.691.280.724.779
Utang Bunga Pinjaman LN	2.648.216.002.171	2.570.262.564.434
Jumlah	21.924.038.335.465	20.261.543.289.213

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut:

*Utang Bunga Obligasi
dan pinjaman dalam
negeri*

1. Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri (DN) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp19.275.822.333.294 dan Rp17.691.280.724.779 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Urutan	31 December 2011 (Audited)	31 December 2010 (Audited)
Fixed Rate Bonds	13.328.508.989.302	11.903.224.814.208
ORI	180.003.432.705	168.952.880.315
SBSN	795.615.939.740	569.482.461.220
Variable Rate Bonds	723.777.587.150	1.041.661.480.732
SUP kepada BI	82.027.721.892	82.872.507.968
SBW Valas	4.163.545.829.445	3.914.829.869.620
Pinjaman Dalam Negeri	1.342.833.580	6.714.714
Jumlah	19.275.822.333.294	17.691.280.724.779

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada Daftar 24.B.

*Utang Bunga Pinjaman
Luar Negeri*

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.648.216.002.171 dan Rp2.570.262.564.434 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Urutan	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Utang Bilateral	1.233.987.416.238	1.089.088.332.647
Kredit Komersial	59.850.891.093	57.013.952.710
Kredit Eksport	394.040.840.947	382.096.139.330
Multilateral	980.337.063.893	1.022.084.139.747
Jumlah	2.648.216.002.171	2.570.262.564.434

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Auditasi)**C.2.36. Utang Subsidi**

Utang Subsidi Rp29,77 triliun
Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp29.767.908.989.742 dan Rp22.161.795.155.886, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Auditasi)	31 Desember 2010 (Auditasi)
Utang Subsidi PSD yang Belum Disalurkan (BULOG, PT Pelni, PT KAI, PT Pos)	4.221.221.930.818	3.859.013.047.361
Utang Subsidi Listrik	12.101.688.160.781	9.358.748.506.021
Utang Subsidi BBM dan LPG	8.966.000.950.449	5.229.785.718.162
Utang Subsidi Pupuk dan Benih	4.077.250.619.191	3.524.386.273.598
Utang Subsidi Bunga Kredit Program KBL	401.767.308.503	189.883.610.743
Jumlah	29.767.908.989.742	22.161.795.155.886

Dari Utang Subsidi per 31 Desember 2011 sebesar Rp29.767.908.989.742, sebesar Rp8.895.590.963.425 dananya sudah dicairkan dari Kas Negara namun belum dibayarkan dan masih disimpan pada Rekening Cadangan. (*Lihat Catatan C.2.29*)

C.2.37. Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek Rp39,41 triliun
Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp39.408.181.897.000 dan Rp29.235.009.035.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek ini terdiri dari utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sampai akhir tahun 2011, terdapat 17 (tujuh belas) seri SPN dan 2 (dua) SBSN. Rincian SBN Jangka Pendek dapat dilihat dalam Daftar 25.

C.2.38. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp8,64 triliun
Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp8.639.914.082.680 dan Rp119.118.551.668 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barangjasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2011 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.040.228.256.095 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi.

Termasuk dalam Pendapatan Diterima di Muka adalah penerimaan dividen interim BUMN sebesar Rp2.318.040.768.528, yaitu pada:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. PT Freeport	1.761.137.260.000
2. PT Socfin Indonesia	101.807.134.500
3. Perum Pegadian (Persero)	160.000.000.000
4. PT Bakti Asam (Persero)	164.992.132.750
5. PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	160.104.261.278
Jumlah	2.318.040.768.528

Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada Daftar 23.

C.2.39. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp5,69 triliun
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

sebesar Rp5.687.100.837.136 dan Rp4.786.549.847.266, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2010 <i>(Audited)</i>
1. MA	3.000.000	19.618.900
2. Kementerian Pertahanan	35.170.771.795	5.448.966.363
3. Kementerian Hukum dan HAM	9.578.250	-
4. Kementerian Keuangan	4.155.000	4.155.000
5. Kementerian Pertanian	18.000.000	52.000.000
6. Kementerian Pendidikan Nasional	33.980.928.430	-
7. Kementerian Kesehatan	580.448.931	688.273.071
8. Kementerian Agama	36.373.668	4.042.740
9. Kementerian Kehutanan	-	2.500.000.000
10. Kementerian Pekerjaan Umum	14.766.663.894	10.975.304.123
11. Dewan Ketahanan Nasional	107.426.414	22.006.020
12. Perpustakaan Nasional RI	-	13.654.800
13. BKKBN	10.456.764	-
14. KPU	6.699.168	544.180
15. Kementerian Perumahan Rakyat	1.333.290	-
16. BNP2TKI	-	15.538.380
17. BPLS	29.321.813.475	30.879.257
18. BA 999.03	39.174.191.965	40.000.000.000
19. BA 999.08	-	32.279.769.182
20. BA 999.99	212.347.602.839	-
21. Kewajiban terkait Rekening Migas	5.321.563.393.453	4.694.495.095.450
Jumlah	5.687.100.837.136	4.786.549.847.266

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.03 merupakan Utang *Promissory Notes* yang terkait dengan penyerapan Pemerintah pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun sebelum tanggal neraca. *Promissory Notes* sebesar Rp39.174.191.965 adalah yang akan dibayarkan kepada *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* pada tahun 2012.

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.99 pada 31 Desember 2011 sebesar Rp212.347.602.839 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Saluran daging sapi yang diexport ke PT Taspen November 2011	53.487.640
2. Saluran daging sapi yang diexport ke PT Taspen Desember 2011	12.137.041.234
3. Biaya jasa tukang kayu yang belum dibayarkan	16.263.638.376
Jumlah	212.347.602.839

Kewajiban terkait Rekening Migas (No.600.0004/1.980) 31 Desember 2011 sebesar Rp5.321.563.393.453 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.0004/1.980 per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp6.237.138.752.226. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp5.321.563.393.453 dan sisanya sebesar Rp915.575.358.773 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	2.311.480.414.804	1.461.702.817.856
DMO Fee dan Fee lainnya	1.049.837.988.783	379.216.579.658
DMO Fee PT Pertamina EP	811.426.338.384	1.994.285.015.542
Underfunding KKKS	574.381.770	6.019.436.827
Reimbursement PPN	967.384.581.751	839.198.801.438
PORD	3.911.179.881	10.005.175.358
Retur atas penyelesaian kewajiban kontrakual pemerintah yang belum dibayarkan kembali		4.066.668.771
PBB Migas	188.089.438.000	-
Jumlah	6.321.663.393.463	4.694.496.095.460

C.2.40. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara

Utang Jangka Panjang
DN SBN Rp1.085.322.000

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.085.324.545.750.551 dan Rp887.172.961.936.007 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2011 ini terdiri dari SBN Berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp889.420.622.052.551 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp195.903.923.698.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis SBN	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
I. Fixed Rate Bonds		
<i>Principle Outstanding</i>	446.842.288.000.000	377.152.742.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	(4.160.639.225.000)	(5.846.038.629.000)
<i>Nilai Bersih (Nilai Buku)</i>	442.672.648.775.000	371.506.733.371.000
II. ORI		
<i>Principle Outstanding</i>	21.589.875.000.000	31.741.370.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
<i>Nilai Bersih (Nilai Buku)</i>	21.589.875.000.000	31.741.370.000.000
III. Zero Coupon Bonds		
<i>Principle Outstanding</i>	1.263.000.000.000	2.512.000.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	(104.785.143.000)	(373.721.118.000)
<i>Nilai Bersih (Nilai Buku)</i>	1.158.234.857.000	2.138.278.881.000
IV. Variable Rate Bonds		
<i>Principle Outstanding</i>	130.684.933.000.000	138.763.416.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
<i>Nilai Bersih (Nilai Buku)</i>	130.684.933.000.000	138.763.416.000.000
V. Sarat Utang Pemerintah kepada BI		
<i>Principle Outstanding</i>	240.451.634.074.551	244.636.437.384.007
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
<i>Nilai Bersih (Nilai Buku)</i>	240.451.634.074.551	244.636.437.384.007
VI. SBSN		
<i>Principle Outstanding</i>	52.552.970.000.000	38.489.850.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	300.328.346.000	55.583.479.000
<i>Nilai Bersih (Nilai Buku)</i>	52.853.298.346.000	38.555.433.479.000
Subtotal SBN Desminasi Republik	888.420.622.052.551	825.341.669.095.007
VII. Obligasi Negara dalam Valas		
<i>Principle Outstanding</i>	207.278.012.102.053	176.800.327.246.903
<i>Accrued Indebtude</i>	(11.648.312.102.053)	(14.824.427.246.903)
<i>Net Unamortized Premium (Discount)</i>	274.123.686.000	(14.607.159.000)
Subtotal Obligasi Negara dalam Valas	195.803.823.088.000	161.631.282.841.000
Total SBN Jangka Panjang	1.085.324.545.750.551	887.172.961.936.007

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 34 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2041.
- *ORI* terdiri dari 3 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2013.
- *Zero Coupon Bonds* terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 dan 2013.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 14 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2012 – 2020.
- *Fixed Rate Bonds*, *ORI*, *Zero Coupon Bonds*, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindai tanggantik kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007 dan SRB01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2033. SUP tidak dapat diperdagangkan (*non-tradeable*).
- Pelunasan SRBI dapat berasal dari surplus BI yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter BI kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar charge kepada BI sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.
- SBSN terdiri dari 8 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2013 – 2036, 6 seri SOHI dengan masa jatuh tempo 2012-2021 dan 2 seri Sukuk Ritel (SR-001 dan SR-002) dengan dengan masa jatuh tempo tahun 2013 -2014.
- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 12 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2038, 2 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019 dan 2020, dan 1 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2014.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada Daftar 26.

C.2.41. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
Rp11,82 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp11.822.231.724.875 dan Rp8.389.364.871.001 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 9 Tahun 2007	1.638.443.906.070
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 14 Tahun 2008	2.450.505.392.359
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 8 Tahun 2009	3.024.845.340.493
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 25 Tahun 2010	1.275.570.232.079
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No.11 Tahun 2011	3.432.868.863.874
Jumlah	11.822.231.724.875

Nilai *Unfunded Liability* atas Program THT sebesar Rp11.822.231.724.875 merupakan nilai yang ditetapkan PT Taspen per 31 Desember 2011. Pemerintah dapat menyesuaikan besaran *Unfunded Liability* tersebut. Pelunasan *Unfunded Liability* akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

- a. Audit menyeluruh (*due diligence*) atas PT Taspen (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan
- b. Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**C.2.42. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan**

*Utang Jangka Panjang
DN Perbankan Rp877,33
miliar*

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp877.330.765.232 dan Rp367.365.935.506. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan (BUMN) yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang tersebut adalah pinjaman antara Pemerintah RI sebagai penerima pinjaman dengan PT. BNI Persero dan PT. BRI Persero dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan POLRI.

Perhitungan saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Urutan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2010 Jangka Panjang	367.365.935.506
Saldo per 31 Desember 2010 Bagian Lancar	26.240.423.965
Total Pinjaman per 31 Desember 2010	393.606.359.471
Penarikan Pinjaman Tahun 2011	619.382.641.633
Pelunasan Tahun 2011	-
Saldo per 31 Desember 2011	1.012.989.001.104
Bagian Lancar (Disejajaskan pada Kewajiban Jangka Pendek)	(135.658.235.872)
Utang Jangka Panjang	877.330.765.232

C.2.43. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

*Utang Jangka Panjang
DN Lainnya Rp5.03
triliun*

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp5.033.082.825.744 dan Rp3.095.222.852.622, yang terdiri dari:

Jenis Utang	31 Desember 2011 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2010 <i>(Audited)</i>
Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional	2.826.956.396.636	2.826.956.396.636
Kewajiban Kontinjenji atas Risk Sharing Kredit Program Kredit Usaha Tani (IKUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.169	-
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	294.198.701.949	268.266.455.986
Jumlah	5.033.082.825.744	3.095.222.852.622

- Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional

Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.635, termasuk diantaranya Rp2.764.860.843.169 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyelesaikan nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit) -

mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat No. S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan.

Pemerintah dan BI telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu Rekening Koran, Wajib transaksi, Sumbu dari BI ke Kementerian Keuangan dan sebaliknya, faksimili, SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah Rp46.356.797.131 hanya diklukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

• Kewajiban Kontinjenasi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu akim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada pelaku yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primul LSM guna membantu usaha taninya dalam rangka intensifikasi padat, peluwija dan holtikultura. Terdapat 2 jalinan pula dalam penyaluran KUT, yaitu pula *executing* dan pula *co-executing*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *co-executing* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyakur tagen *co-executing* ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian risiko *sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5,00% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XVII/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.358,78, terdapat pelunasan JBI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI sebesar Rp1.068.960.318.699,61, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp6.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok IRDKKI sebesar Rp10.223.568.235,53. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar RpRp3.659.191.822.314,56. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban Kontinjenasi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 ($52,25\% \times \text{Rp}3.659.191.822.314,56$).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai Kewajiban Kontinjenasi atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp294.198.701.949 adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp105.400.185.359, Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp70.531.073.604, Kementerian Kehutanan sebesar Rp118.153.090.986, dan POLRI sebesar Rp114.352.000.

- Utang pada Kementerian Luar Negeri merupakan sisa cicilan sewa beli yang belum dibayarkan.
- Utang pada Kementerian Pendidikan Nasional merupakan Utang Jangka Panjang pada UI sebesar Rp64.239.125.494 dan ITB sebesar Rp6.291.948.110.
- Utang pada Kementerian Kehutanan merupakan utang yang timbul berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1731K/Pdt/2006 tanggal 29 November 2007 yang memutuskan Tergugat (Menteri Kehutanan) untuk membayar kerugian materil sebesar Rp118.153.090.986. Putusan tersebut berdasarkan gugatan dari PT Benua Indah yang kepada Menteri Kehutanan yang menerbitkan keputusan penghentian sementara Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- Utang pada POLRI merupakan utang terkait perolehan kendaraan pada BLU di POLRI.

C.2.44. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

*Utang Jangka Panjang
LN Perbankan Rp571,88
triliun*

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp571.982.048.619.444 dan Rp569.983.008.549.466 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	(Audited)	(Audited)
Bilateral	306.805.883.874.544	304.131.160.950.816
Multilateral	197.266.978.813.746	192.151.937.241.884
Kredit Ekspor	63.352.838.534.316	69.553.738.449.152
Kredit Komersial	4.526.337.396.838	4.146.171.807.814
Jumlah	571.982.048.619.444	569.983.008.549.466

C.2.45. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

*Utang Jangka Panjang
Luar Negeri Lainnya
Rp25,89 triliun*

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp25.889.179.304.040 dan Rp25.728.322.825.757, dengan rincian (dalam Rp):

	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya untuk pengadaan <i>green aircraft</i> pesawat kepresidenan	0	339.296.000.000
Utang Promissory Notes		
International Monetary Fund	25.871.090.740.489	25.329.806.542.486

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

International Bank for Reconstruction and Development	-	39.174.191.965
International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency	10.292.343.224	10.204.946.838
Common Fund for Commodities	2.623.060.659	2.668.004.800
Subtotal Utang <i>Promissory Notes</i>	25.889.179.304.040	25.387.026.825.757
Total Utang Jangka Panjang Lainnya	25.889.179.304.040	25.728.322.825.757

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya untuk pengadaan *green aircraft* pesawat kepresidenan sebesar Rp339.296.000.000 pada tahun 2011 telah direklasifikasi sebagai bagian dari Utang Kepada Pihak Ketiga.

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya dalam bentuk *Promissory Notes* terkait dengan Penyertaan Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan, sedangkan yang akan jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rekapitulasi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10
Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*
(Dalam Rp Juta)

Posisi Utang Luar negeri, SBN, dan PN	Jenis Utang	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (LN):				
Utang LN – Bagian Lancar	48.286.753,81	46.875.144,95	1.421.608,86	
Utang LN – Jangka Panjang	571.982.048,62	569.983.008,55	1.998.040,07	
Utang Bunga LN	2.648.216,00	2.570.262,58	77.953,44	
Total Utang LN	622.827.018,43	619.428.416,06	3.498.602,37	
Surat Berharga Negara (SBN):				
Bagian Lancar SBN-Rupiah	58.344.607,42	41.292.829,03	17.051.678,39	
SPN	30.509.891,90	29.235.009,04	1.274.882,86	
SBSN Jangka Pendek Rupiah	8.898.290,00	-	8.898.290,00	
SBSN Jangka Panjang Rupiah	836.587.325,71	788.786.235,82	49.781.090,09	
SBSN Jangka Panjang Valas	180.887.600,00	155.987.142,84	24.880.457,16	
SBSN Jangka Panjang Rupiah	62.863.298,35	38.555.433,48	14.287.865,87	
SBSN Jangka Panjang Valas	14.982.200,00	5.844.160,00	9.118.050,00	
Utang Bunga SBN	18.275.822,33	17.681.274,01	1.584.548,32	
Total SBN dan Bunga	1.202.079.033,71	1.075.392.174,02	126.686.869,69	
Promissory Notes (PN):				
PN Jangka Pendek	39.174,18	40.000,00	(825,71)	
PN Jangka Panjang	25.889.179,30	25.387.026,83	502.152,47	
Total PN	25.928.353,50	25.427.026,83	501.326,67	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 11
Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

*Posisi Utang Luar negeri
Menurut Valuta Asing*

Valuta	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)
ACU	279.847.434	266.422.922	13.424.512
AOB	108.582.229	144.585.129	(35.002.900)
AUD	351.410.728	281.268.328	60.142.400
CAD	138.742.057	157.186.495	(18.444.438)
CHF	240.740.150	295.245.679	(54.505.529)
CNY	1.550.083.480	1.426.321.707	121.761.773
DKK	42.745.717	51.754.847	(9.009.230)
EUR	4.429.525.292	5.436.029.192	(1.006.503.900)
GBP	383.482.315	458.110.017	(94.617.702)
JPY	2.307.420.817.502	2.803.746.051.062	(296.325.233.560)
KRW	189.956.918.440	191.069.958.110	(1.103.039.670)
KWD	8.758.800	11.538.000	(2.781.200)
SAR	100.075.674	117.840.333	(17.564.659)
SDR	2.144.885.272	2.154.118.494	(9.233.222)
USD	21.811.471.763	22.927.432.636	(1.115.960.883)
WBO	208.130.040	710.986.276	(504.236.236)

C.2.46. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

*SAL Setelah
Penyesuaian Rp58.66
triun*

Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2011 dan TA 2010 adalah sebesar Rp58.666.722.496.062 dan Rp52.382.103.135.529. SAL TA 2011 setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL TA 2011 sebesar Rp98.909.703.335.446, ditambah selisih lebih kas tahun lalu Rp39.873.345.073, dikurangi pengurusan SAL sebesar Rp40.319.043.049.000, dan ditambah penyesuaian lainnya sebesar Rp26.188.864.543. Pada TA 2011 terdapat Sisa Lebih Pembiaayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp45.549.376.508.811 dan selisih kurs sebesar Rp235.078.083.137, sehingga SAL per 31 Desember 2011 setelah selisih kurs adalah sebesar Rp105.324.449.807.891. Sementara itu, SAL menurut fisik adalah sebesar Rp105.341.875.060.003, sehingga terdapat selisih lebih fisik SAL dibandingkan catatannya sebesar Rp17.425.252.112.

Rincian penghitungan SAL sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Saldo Anggaran Lebih TA 2011 dan TA 2010

Urutan	TA 2011 (Rp)	TA 2010 (Rp)
Saldo Awal SAL	98.909.703.335.446	86.523.822.425.759
Pembatalan dan Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	39.873.345.073	261.781.092.126
Pengurusan SAL	(40.319.043.049.000)	(117.347.946.616.000)
Koreksi Saldo Awal Kas KPPN	(205.049.095)	7.566.387.318
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	29.654.437.138	112.445.204.316
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah di K/L	(180.523.530)	-
Penyesuaian Rekening Khusus	2.824.834.833.970	
SAL setelah Penyesuaian	58.666.722.496.062	52.382.103.135.529
SILPA (SiLPA) Sebelum Penyesuaian	46.549.376.508.811	44.706.303.847.141
Penyesuaian SiLPA (SiLPA):		
Penyesuaian Pengembalian Pendekatan Tahun Lalu	(102.384.746.613)	(168.929.200.391)
Penyesuaian Uang Persediaan	(551.062.742)	169.536.628.423
Penyesuaian Rekening Petak	(216.316.851)	241.705.699
Penyesuaian Pendekatan Anggaran lain-lain	(52.392)	(1.024.810)
Penyesuaian Dana Talangan (Banking)	-	1.830.450.103.855
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	(372.860.700)	-
Penyesuaian Kas KPPN	2.12.666.914	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Penyesuaian Transfer	4.176.986	-
Penyesuaian Kas pada BLU	(376.080.500)	-
Penyesuaian Kas di BUN	(13.084.014.611)	-
Total Penyesuaian SILPA	(116.727.280.119)	1.821.297.152.776
SILPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian (A)	46.432.649.228.692	46.527.600.199.917
Saldo Akhir SAL	105.489.371.724.754	96.909.703.335.446
Selisih Kurs		
Selisih kurs s.d. periode sebelumnya	(1.165.106.908.600)	-
Selisih kurs kas di BUN	1.374.044.061.486	(1.143.096.103.819)
Selisih kurs Kas Hibah Sumatera	-	(2.193.033.895)
Selisih kurs Kas Hibah ESSP	-	(6.097.690.894)
Selisih kurs Rekening Khusus Pinjaman dan Hibah	29.340.930.289	-
Selisih Kurs	235.876.483.137	(1.165.106.908.600)
Saldo Akhir SAL dan Selisih Kurs	105.324.448.807.891	97.740.596.426.838
Fisik Kas SAL:		
Rekening SAL di BI	48.806.845.187.825	48.437.786.698.026
Rekening BUN di BI	31.557.956.553.828	30.168.816.058.068
Rekening KPPN 2)	11.870.558.947.061	9.216.812.887.732
Rekening khusus	2.390.016.547.054	2.824.334.833.970
Kas di Bendahara Pengeluaran	292.761.782.989	518.914.873.152
Kas pada BLU yang telah disahkan 3)	13.089.016.578.965	7.287.580.742.179
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan 4)	429.120.562.354	48.185.813.468
Total Fisik Kas	106.135.404.170.346	99.504.004.809.311
Penyesuaian Fisik Kas		
Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	99.079.811.815	60.077.829.666
Utang PFK	(1.756.574.698.286)	(1.576.434.547.871)
Utang kepada Fisik Ketiga (SP2D Retur)	(1.137.834.225.893)	(228.178.119.195)
Total Penyesuaian Fisik Kas	(2.793.579.110.343)	(1.723.534.837.480)
Fisik Kas setelah Penyesuaian (B)	105.341.875.860.803	97.780.469.771.811
Salisih Kas Lebih/Kurang (A-B)	(17.425.252.112)	(8.873.345.073)

Catatan:

- 1). Penyesuaian Uang Muka BUN pada tahun 2011 tidak diperlukan sebagai penambahan/pengurang SILPA karena sudah diakui sebagai pembayaran.
- 2). Kas di KPPN termasuk kas yang terdapat di rekening penempungan Rp291.857.468 juta.
- 3). Kas BLU sebesar Rp13.089.016.578.965 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D Pengesahan dan koreksi saldo awal.
- 4). Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan berdasarkan laporan KPPN yang melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung K/L dan balanja yang dilakukan atas pendapatan hibah tersebut.

C.2.47. SILPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian

SILPA setelah
Penyesuaian Rp46.432.
448.228.692

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp46.432.649.228.692 dan Rp46.527.600.199.917 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2011 setelah dilakukan penyesuaian-penesuaian, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.210.689.653.358.415	1.018.730.892.888.817
Belanja Negara	1.284.889.146.476.020	1.063.576.541.020.291
Surplus (Defisit)	(64.399.493.115.610)	(46.845.708.353.474)
Pembiayaan Neto	130.948.869.624.420	91.562.011.400.815
SILPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	46.549.376.608.811	44.708.303.047.141
Penyesuaian SILPA:		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(102.384.748.613)	(168.829.200.391)
Penyesuaian Uang Persediaan	(551.052.742)	159.535.528.423
Penyesuaian Retur	(216.316.651)	241.745.699
Penyesuaian Dana Telanggan (Backlog)	-	1.830.450.103.855

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

Pendapatan Anggaran Lain-lain	(52.302)	(1.024.810)
Penyesuaian Hibah Langsung	372.860.700	.
Penyesuaian Kas KPPN	212.666.914	.
Penyesuaian Transfer	4.176.988	.
Penyesuaian Kas pada BLU	(375.080.500)	.
Penyesuaian Kas di BUN	(13.064.014.611)	.
Total Penyesuaian SILPA	(116.727.280.119)	1.821.297.162.776
SILPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	46.432.648.228.682	46.527.600.199.917

C.2.48. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya
Rp451.83 miliar

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp451.833.601.148 dan Rp1.540.934.451.110, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Rekening Pemerintah Lainnya (Rek. Penerimaan Pertimbangan dan perikman, dan RPL pada BA 999.04)	180.453.779.979	1.022.507.788.422
Investasi Jangka Pendek pada Kem. Pendidikan Nasional	135.839.486.878	.
Kas lainnya setara kas pada Kem. Koperasi dan UKM	2.650.797.179	.
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SILPA	100.924.694.157	55.085.975.081
Investasi Jangka Pendek BLU	-	30.750.000.000
Kas Hibah Langsung yang belum disahkan *	12.626.616.173	392.137.441.936
Koreksi skun dana yang digunakan untuk pembayaran utang jangka pendek - Komunitas Koperasi dan UKM	-	.
Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.03	1.912.974.820	.
Selisih Kas Lebih (Kurang) Tahun ini	17.425.252.112	39.873.346.073
Jumlah	451.833.601.148	1.540.934.451.110

Catatan:

* Kas Hibah Langsung yang belum disahkan merupakan selisih antara Kas Hibah Langsung pada neraca dengan kas hibah langsung yang disahkan KPPN.

C.2.49. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang
Rp84,57 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp84.574.619.543.073 dan Rp100.141.379.244.383 merupakan akun lawan dari Piutang setelah penyisihan dikurangi dengan Uang Muka Belanja selain Persekot Gaji, dan ditambah Uang Muka dari Rekening BUN, dan selisih kurs atas Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dalam valas.

C.2.50. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan
Rp59,21 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp59.214.846.453.160 dan Rp36.366.060.681.005 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

C.2.51. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang
Ditangguhkan Rp 3,81
triliun

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp3.810.469.839.673 dan Rp4.210.269.507.402 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta pendapatan dan piutang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas (dalam Rp):

Akun Lawan	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas ¹⁾	2.367.515.283.884	684.910.710.051
Rek. Migas No. 600.000411.980	915.575.358.774	2.613.993.307.333
Rek. Penerimaan Pemas Bumi	197.960.188.008	208.604.971.388
Aset Lainnya ²⁾	75.156.978.014	70.416.164.364
Setoran dividen PT Sarinah ³⁾	1.361.709.889	-
Jumlah	3.810.469.839.873	4.210.269.507.402

Catatan:

- 1). *Kas Lainnya dan Setara Kas* merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disalurkan, pengembalian belanja, pengutang pajak dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Pengeluaran. (lihat Catatan C.2.6)
- 2). Merekapkan aset lain-lain BLU PIP Kementerian Keuangan berupa bunga deposito 12 bulanan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp1 triliun sebesar Rp70.000.000.000 dan bunga diterima dimuka dari deposito 1 bulanan Rp70 miliar sebesar Rp5.155.978.014.
- 3). Setoran dividen PT Sarinah oleh Bank Mandiri disertorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya dengan nomor rekening 502.000.002, di mana sebagianya disertorkan ke Rekening Kas Umum Negara 502.000.000.980. Berdasarkan hal tersebut, setoran dividen Sarinah tersebut terlampau terlebih dahulu pada Rekening Pemerintah Lainnya, dan akan disajikan sebagai pendapatan dan dapat digunakan sebagai kas pemerintah selisih dana tersebut dipindahkan ke Rekening Kas Umum Negara.

C.2.52. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek minus
Rp204,48 triliun

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp204.483.884.343.763 dan minus Rp149.918.772.353.919. Perkiraa tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Total Utang Jangka Pendek	246.444.860.163.115	201.343.980.842.088
Dikurangi:		
Utang PFK	(1.765.574.696.268)	(1.575.434.547.871)
Utang karena Kesiabilitan Pemindahbukuan Rekening BUMN dan Rekening Petur	(1.137.834.225.983)	(639.058.754.870)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas	(3.943.053.899.201)	(7.530.524.448.577)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan RPL (Rek. Migr)	(5.321.563.393.453)	(4.694.496.098.490)
Utang Subsidi yang merupakan akun lawan Rekening Cedangan Subsidi	(7.523.846.941.346)	(16.144.595.658.372)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Rekening Cedangan Dana Bagi Hasil	(9.505.740.673.161)	(8.374.050.605.673)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Rekening Cedangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalihan Minyak Tanah ke LPG	-	(1.288.930.389.738)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan	-	(3.551.726.799.482)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Aset Bersih Beperluan		
Pendapatan Diterima di Muka yang merupakan akun		
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	Rp6.321.674.677.095	(119.116.551.668)
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	13.207.284.640.602	(7.407.254.636.488)
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan		
Dana yang Diutamai Penggunaannya pada BPKH	11.166.815.572.907	-
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan		
Dana yang Diutamai Penggunaannya pada DAU	12.077.597.299.329	-
Jumlah	264.483.884.343.783	149.518.772.353.919

C.2.53. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan minus Rp6,32 triliun

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp6.321.674.677.095 dan minus Rp119.116.551.668. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2011 merupakan akun lawan dari total Pendapatan Diterima di Muka yang sebesar Rp8.639.914.082.680 dikurangi dengan penerimaan dividen interim BUMN sebesar Rp2.318.040.768.528 dan Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Keuangan (BLU PIP) sebesar Rp198.637.057 berupa kelebihan pembayaran cicilan pinjaman dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp1,28 miliar

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.276.453.004.389 dan Rp114.122.632.355 merupakan akun lawan dari Uang Muka Belanja. Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2011 merupakan akun lawan dari Uang Muka Belanja sebesar Rp1.279.165.315.147 dikurangi Persekut Gaji pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.712.310.768.

C.2.55. Selisih Kurs Bagian Lancar

Selisih Kurs Bagian Lancar minus Rp2,80 triliun

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp2.798.692.210.245 dan minus Rp8.282.009.832.937 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri	(3.207.284.640.602)
Selisih kurs atas Rekening BUM di BI dalam valas *	235.078.083.137
Selisih kurs pada aset Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	173.524.347.220
Jumlah	(2.798.692.210.245)

Catatan:

*1 Selisih kurs ini termasuk Selisih Kurs sampai dengan periode sebelumnya (31 Desember 2010) sebesar minus Rp1.169.100.908.608 dan selisih kurs tahun berjalan untuk Rekening KUN sebesar Rp1.374.844.081.456 dan selisih kurs tahun berjalan untuk Rekening Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp29.340.930.299.

C.2.56. Diiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp750,03 triliun

Jumlah Perkiraaan Diiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp750.030.794.479.804 dan Rp702.836.007.101.463

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.57. Diiinvestasikan dalam Aset Tetap

Diiinvestasikan dalam
Aset Tetap Rp1.567,97
triliun

Jumlah Diiinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.567.974.174.587.750 dan Rp1.184.301.167.405.585 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

C.2.58. Diiinvestasikan dalam Aset Lainnya

Diiinvestasikan dalam
Aset Lainnya Rp417,13
triliun

Jumlah Diiinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp417.130.365.123.476 dan Rp246.554.471.882.238 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. Jumlah tersebut merupakan akun lawan dari Aset Lainnya dikurangi dengan bagian Aset Lainnya yang merupakan kontra akun dari utang, seperti rekening cadangan, dan selisih kurs atas Penerusan Pinjaman dalam valas.

C.2.59. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Panjang minus
Rp1.670,03 triliun

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp1.679.033.615.946.059 dan minus Rp1.498.908.975.231.842 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.103.067.191.066.402	999.024.915.595.138
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	597.871.227.923.484	585.709.331.375.223
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(21.894.803.043.827)	(95.825.271.738.517)
Jumlah	1.678.033.615.946.059	1.498.908.975.231.842

C.2.60. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian
Jangka Panjang minus
Rp20,84 triliun

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar minus Rp20.841.184.232.370 dan minus Rp90.835.097.545.054 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BII). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas *)	(21.894.803.043.827)
Selisih kurs pada aset atas Investasi Jangka Panjang dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman	1.053.818.811.457
Jumlah	(20.841.184.232.370)

*) Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas terdiri dari selisih kurs Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar minus Rp33.542.357.145.880 dan selisih kurs Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Valas sebesar Rp11.647.584.102.053.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Rekening Migas**

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp6.237.138.752.226. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening No. 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract/Kontrak Kerja Sama* dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2011.

Tabel 13
Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2011 dan 2010

URAIAN	31-12-2011 (Auditasi)		31-12-2010 (Auditasi)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	812.887.134,11	7.308.488,40	827.926.468,88	8.710.682,28
II. Pergerakan:				
1. Pencairan PPN/Migas dan Penitiban Bagi Pemerintah	10.181.922.911,17	188.180.968,80	15.012.325.736,86	144.239.191,04
2. Kursi Kurs Pembukuan Individu (k)	268.772.216,00	2.334.984,98	-	11.312.480,27
3. Retur/Pengembalian karena salah ukuran (k)	3.333.279,19	29.410,87	-	-
4. Pengembalian Denda/Tulungan	-	-	-	-
5. Kontribusi Pendekatan	-	-	714.029.934,98	311.826,38
6. Penitiban/penitiban	-	-	4.332.818,98	39.644,86
7. Selisih Kurs Pembukuan Kredit (k)	-	8.030.944,38	-	-
Total Pergerakan	19.486.027.801,38	176.881.828,23	16.631.894.022,29	155.304.133,72
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran beban tan dengan APBN/APBD	-	-	-	-
a. Bagi Hasil PBB/Migas ke Pemerintah (k)	2.311.713.026,64	20.216.871,77	-2.180.329.632,00	19.296.722,82
b. Pajak Penangkongan Jatah non PPN & ABT	8.398.470,35	82.348,05	7.719.818,98	89.411,03
c. Pendekatan	-	-	-	-
d. Penitiban/penitiban ke Pem. Wilayah/UM No.600.000.41111980	-	-	-	-
• PPN Minyak Bumi (411111)	2.937.007.000,07	25.948.762,13	2.510.288.110,18	22.825.341,00
• PPN Gas Alas (411112)	5.376.346.944,17	47.193.704,83	3.967.161.871,40	36.038.390,02
• Penitiban Minyak Bumi (421111)	130.810.400,98	1.261.752,30	707.093.880,31	8.925.373,31
• Penitiban Gas Alas (421112)	6.355.466.802,38	52.187.046,32	4.024.632.964,06	40.916.314,80
• Penitiban Migas teluknya (422139)	5.271.780,82	40.162,47	16.771.704,03	166.037,20
• PPN Pert 25 (4111128)	-	-	-	-
Sub Total Pengeluaran beban tan dengan APBN/APBD	16.705.949.124,38	146.936.026,77	13.949.626.705,47	126.300.336,42
2. Pengeluaran non APBN/APBD				
a. Pembayaran PPN ke Kontraktor	865.936.080,76	7.933.872,95	805.313.981,18	7.956.317,56
b. Pembayaran CDM Fee (9102, k)	1.358.737.748,19	11.985.167,84	863.293.036,40	7.022.400,00
c. Pembayaran Fee Pengelolaan Migas Tahun 2007 & 2008 kepada PT Pertamina (Pemerintah)	-	-	147.393.894,22	1.324.948,71
d. Pembayaran Fee / Anggaran BFM/ESD	196.721.923,43	1.365.824,42	120.982.831,87	1.100.418,71
e. Pembayaran Underrating (10103)	161.548.921,45	1.465.027,02	124.737.316,19	1.127.042,04
f. Pengembalian Denda Dikti & Cess kepada PT Pertamina (Pemerintah)	-	-	-	-
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2.940.400.541,42	22.339.864,73	2.081.707.785,24	18.860.139,03
3. Kontribusi Pendekatan Denda (k)	268.772.216,00	2.324.916,07	713.938.620,06	306.947,31
4. Kontribusi Denda/Pembakuan Denda	-	6.443.326,17	-	11.880.031,04
5. Pengeluaran lain-lain (k)	831.764,04	5.049,22	1.065.195,00	9.596,60
6. Administrasi Bank (k)	129,80	2,29	84,00	5,39
7. Retur/Pengembalian karena salah ukuran	3.333.279,19	29.408,77	-	-
Total Pengeluaran	19.586.026.609,03	186.153.176,08	16.745.337.343,87	157.314.334,83
IV. Kesiapan Pemerintah (I + III - II)	(125.048.955,87)	(1.071.346,46)	(114.893.321,89)	(11.416.253,88)
V. Saldo Akhir (I + IV - II)	687.518.565,64	6.237.139,79	812.881.134,11	7.308.488,40

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Penjelasan:

- a) Rekening valas No.600.000411980 merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh penerimaan negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.
- b) Koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia
Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD269,772,216.00 atau setara dengan Rp2.334.484.482.709 merupakan koreksi-koreksi kredit yang dialihbentuk adanya koreksi pembukuan ganda atau koreksi karena kesalahan posting, yang terdiri dari :
 - Koreksi atas double pembukuan/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran penerimaan migas dari KKKS sebesar US\$116,132,704.00 atau setara dengan Rp1.019.645.141.120.
 - Koreksi pembukuan karena salah posting oleh BI (seharusnya penerimaan ini tidak masuk ke rekening migas No.600.000411980 karena peruntukannya bukan sebagai penerimaan migas) yaitu sebesar US\$15,631,601.00 atau setara dengan Rp134.181.662.984.
 - Koreksi atas double pembukuan/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran PPI migas bulan Juli 2011 sebesar USD138,007,911.00 atau setara dengan Rp1.180.657.678.605.
 Atas penerimaan-penerimaan tersebut, telah dikoreksi kembali oleh Bank Indonesia dan menjadi koreksi pembukuan debit sebagaimana dijelaskan pada poin e).
- c) Retur/Pengembalian Kredit/Debit karena salah rekening
Retur/Pengembalian Kredit/Debit karena salah rekening sebesar USD3,333,274.19 atau ekivalen Rp29.410.874.996 merupakan transaksi retur atas pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas yang disebabkan karena kesalahan rekening pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:
 - Retur pembayaran reimbursement PPN Migas sebesar USD3,216,764.91 atau setara dengan Rp28.373.689.574.
 - Retur pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD116,509.28 atau setara dengan Rp1.037.185.422.
- d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit/Debit
Merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas No.600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.
- e) Pembayaran DMO Fee KKKS
Dalam pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD1,356,737,746.19 atau setara dengan Rp11.985.167.638.753.00 termasuk didalamnya pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina (Persero) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD542,582,127.05 atau setara dengan Rp4.729.970.475.662, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Oktober 2010 s.d.Maret 2011 sebesar USD366,551,681.41 yang sebagian diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD363,465,153.21, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN No.600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD363,465,153.21 atau setara Rp3.015.057.756.881
 - Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Juli s.d. Oktober

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit oleh)

2011 sebesar USD296,715,938.72 yang sebagian diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD189,116,973.84, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Valas No.600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD189,116,973.84 atau setara Rp1.714.912.718.781.

- f) Koreksi Pembukuan Debit oleh Bank Indonesia
Adalah pembetulan/jurnal koreksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai tindak lanjut atas koreksi pembukuan kredit sebagaimana dimaksud pada poin b) sebesar USD269,772,216.00 ekivalen Rp2.324.516.072.015 dengan rincian sebagai berikut:
 - Koreksi atas double pencatatan/ dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran penerimaan migas dan KKKS sehingga perlu didebit kembali atas double pencatatan tersebut yaitu sebesar US\$116,132,704.00 atau setara dengan Rp1.012.793.311.584.
 - Koreksi pembukuan karena salah posting oleh Bank Indonesia sebesar US\$15,631,601.00 atau setara dengan Rp134.791.295.423.
 - Koreksi atas double pembukuan/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran PPh migas bulan Juli 2011 sebesar USD138,007,911.00 atau setara dengan Rp1.180.657.678.605.
- g) Pengeluaran Lain-lain
Pengeluaran lain-lain sebesar USD631,784.04 atau setara dengan Rp5.689.215.280 merupakan pengeluaran pemindahbukuan ke rekening Pajak No.600.500411980 sebagai PPh Uplift (MAP 411126) dalam rangka Sunset Policy (Pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2006) atas KKKS BUT Pacific Oil and Gas Jambi Merang Ltd.
- h) Administrasi Perbankan
Biaya administrasi perbankan sebesar USD129.50 atau setara dengan Rp2.253.645 merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang direturn.
- i) Saldo Akhir
Saldo akhir sebesar USD687,818,565.53 atau setara dengan Rp6.237.138.752.226 (ekivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp9.068/USD), termasuk pendapatan yang ditunda sebesar USD100,967,728.14 dan sisanya sebesar USD586,850,837.39 akan digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2011 yang belum diselesaikan sampai akhir Desember 2011.

2. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.3 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp187.960.188.008 dan Rp208.604.971.388. Rekening Panas Bumi (No. 508.0000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit) *(Audit)*

		URAIAN	31 December 2011	31 December 2010
I.	Saldo Awal: "		208.804.971.388	190.538.788.839
II.	Penerimaan:			
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi		888.462.528.861	803.357.858.826
	2. Koreksi Pembukuan Kredit		-	-
	Total Penerimaan		888.462.528.861	803.357.858.826
III.	Pengeluaran:			
	1. Pembayaran PBB Panas Bumi		200.894.853.819	160.258.219.624
	2. Pembayaran kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi		149.510.184.676	281.346.804.029
	3. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN		562.702.273.747	343.786.432.784
	4. Penjaman untuk Dana Tambang		-	-
	5. Koreksi Pembukuan debit		-	-
	Total Pengeluaran		909.167.312.242	785.331.456.438
IV.	Kesalahan Penurunan (I - III)		(10.544.782.380)	17.386.202.488
V.	Saldo Akhir (I + IV) "		197.960.188.008	208.804.971.388

Penjelasan:

- 1) Rekening No. 508.000084980 adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.
- 2) Pembayaran kembali PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp149.510.184.676 adalah Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya pada Tahun 2010.
- 3) Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rekening KUN sebesar Rp562.702.273.747
- 4) Saldo awal sebesar Rp208.804.971.388 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:
 - a. Cadangan pembayaran kembali (reimbursement) PPN panas bumi kepada Pengusaha panas bumi yaitu PT Pertamina (Persero) Area Geothermal Hulu Kamojang, Chevron Geothermal Selak,Ltd, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd dan Dayabumi Selak Pratama, Ltd sebesar Rp204.832.699.830
 - b. Cadangan Pembayaran PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy sebesar Rp3.772.271.568. PBB atas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PT Geodipa Energy belum dapat dibayarkan karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk bedan usaha tersebut.
- 5) Saldo akhir sebesar Rp197.960.188.008 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:
 - a. Cadangan untuk pembayaran kembali (reimbursement) PPN panas bumi tahun 2010 dan 2011 kepada pengusaha panas bumi yaitu PT Pertamina (Persero), Chevron Geothermal Selak, Ltd, dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd sebesar Rp189.874.992.053.
 - b. Cadangan untuk Pembayaran PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp8.085.195.955 untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy yang belum dapat dibayarkan karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk bedan usaha tersebut dengan rincian:
 - 1). PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 sebesar Rp3.772.271.568 dan;
 - 2). PBB pertambangan panas bumi Tahun 2011 sebesar Rp4.312.924.397.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

3. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka melanjutkan penertiban rekening Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta untuk memenuhi amanat undang-undang yang menjadi landasan bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah lanjutan penertiban rekening pemerintah pada seluruh instansi K/L melalui penerbitan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu:

- PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- PMK Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Kementerian Keuangan melalui Tim Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang dibentuk oleh Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah penertiban rekening yaitu:

- a. Mendata rekening-rekening di 76 (K/L) dan BUN yang berjumlah 46.586 rekening, dan dari jumlah tersebut telah ditutup 9.275 rekening, dan yang masih tidak selesai proses pembahasan/penyesuaianya adalah sebanyak 3.007 rekening .
- b. Rekening operasional K/L (untuk digunakan permanen dan/atau sementara masih perlu ditindaklanjuti) yang dikelola oleh K/L per 31 Desember 2011 sebanyak 34.304 rekening. Masih terdapat rekening operasional yang belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN. Pada tahun 2011, TPRP ditugaskan untuk tenus mencari keterangan terhadap rekening operasional K/L yang belum mendapat persetujuan dari BUN.
- c. Terhadap rekening yang dibukukan sebanyak 3.096 rekening, 195 rekening diketik kembali, 1.344 rekening sudah ditutup dan 1.557 rekening yang masih dibukukan karena belum ada klarifikasi dan permintaan pengaktifan kembali dari K/L yang bersangkutan atau rekening tersebut tidak memenuhi syarat untuk diketik kembali. Dari rekening yang masih dibukukan disusulkan ditutup. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Atas Pengenaan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Tim akan segera mengusulkan penutupan terhadap rekening yang masih dibukukan dan tidak mendapatkan tanggapan/responds dari K/L sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- d. Rekening yang diinvestigasi 4.774 rekening, 3.921 rekening dinyatakan telah selesai, dan 853 rekening masih dalam proses, karena belum semua APIP K/L telah tuntas melakukan penyelidikan terhadap keseluruhan rekening yang diserahkan oleh Tim maupun rekening tambahan yang ditemukan dalam proses penyelidikan.

Rekening pada 76 KL akan segera diserahkan kepada Direktorat Pengelolaan Kas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit oleh)

Negara (Dit. PKN) - Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang secara struktural bertugas membina dan memonitor ketertiban KL dalam mengelola rekening Pemerintah agar tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Penertiban Rekening Pemerintah pada TA 2011 dikhawasukan untuk perbaikan/*Updating* data; Tindak lanjut terhadap rekening-rekening diinvestigasi; Penyusunan daftar rekening yang telah disetujui; Inventarisasi Rekening Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk Rekening Kas Umum Negara (RKUN); Percepatan penyelesaian data rekening pada 43 K/L, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian RI; dan Pengujian/pengkajian ulang rekening-rekening yang telah diberi persetujuan.

Laporan lengkap mengenai Penertiban Rekening Pemerintah Tahun 2011 disajikan tersendiri dalam bentuk Suplemen.

4. Penertiban Barang Milik Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarnya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (iv) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 jo. Keppres 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, fisik maupun hukum.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31 Maret 2011 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Hasil inventarisasi dan penilaian sampai dengan 31 Desember 2011 telah dibukukan pada LKKL sebesar Rp440.902.630.297.224. Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN disajikan pada Daftar 27.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit) -**5. Laporan Barang Milik Negara**

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2011, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih sebesar Rp3.025.983.193,491, dengan rincian (dalam Rpi):

Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL *)	Data LBMN *)	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Tanah	798.886.004.632.352	799.062.941.380.530	(16.176.758.178)
Peralatan dan Mesin	181.679.638.279.748	182.424.429.489.822	(744.791.180.067)
Gedung dan Bangunan	150.137.352.355.416	150.963.232.507.670	(825.889.152.254)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	344.701.632.477.202	346.443.268.369.488	(1.741.635.082.206)
Aset Tetap Lainnya	11.466.797.338.012	11.607.019.863.044	(140.222.545.032)
Kerentaksi Dalam Penggunaan	63.692.939.001.971	63.098.664.943.530	594.274.058.441
Jumlah	1.350.573.384.004.708	1.353.599.556.554.080	(3.025.983.193.368)

*) tidak termasuk aset tetap yang ada di BRR NAD-Nias dan BA BUN.

Penjelasan selisih:

1. Selisih pada Tanah, antara lain:

- Tanah pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp83.763.886.845 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DKTP yang akan diserahkan ke pemda.
- Tanah pada LBMN Bappenas sebesar Rp83.647.500.000 direklasifikasi sebagai Aset Lainnya pada Neraca karena merupakan aset kemitraan.

2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:

- Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Kesehatan sebesar Rp596.298.315.540 dicatat sebagai KDP pada Neraca.
- Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp148.120.150.190 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DKTP yang akan diserahkan ke pemda.

3. Gedung dan Bangunan, antara lain:

- Gedung dan Bangunan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp824.308.143.329 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DKTP yang akan diserahkan ke pemda.
- Gedung dan Bangunan pada Neraca Kementerian Keuangan sebesar Rp82.620.304.120 masih dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya dalam LBMN.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:

- Jalan Irigasi dan Jaringan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp1.081.596.037.491 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DKTP yang akan diserahkan ke pemda.
- Jalan Irigasi dan Jaringan pada LBMN Kementerian ESDM sebesar Rp659.004.283.359 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DKTP yang akan diserahkan ke pemda.

5. Aset Tetap Lainnya, antara lain:

- Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp49.369.926.181 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DKTP yang akan diserahkan ke pemda.
- Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Keuangan sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rp92.620.304.120 dicatat sebagai Gedung dan Bangunan dalam Neraca.

6. Konstruksi Dalam Pengrajan, antara lain:

- KDP sebesar Rp596.298.315.540 pada Neraca Kementerian Kesehatan dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada LBMN.
- KDP pada LBMN Kementerian Diknas sebesar Rp154.827.447.604 tidak tercatat pada Neraca.

6. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada KIL antara lain:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK RI, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- b. Kementerian Perhubungan berupa Dua Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- c. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah. Berdasarkan buku barang bersejarah Museum KAA Bandung Aset bersejarah di museum tersebut dikelompokkan menjadi 6 kelompok:
 - Koleksi dengan bahan dasar logam sebanyak 17 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar kayu sebanyak 64 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar tekstil sebanyak 498 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar kertas sebanyak 207 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar audio visual sebanyak 139 unit
 - Koleksi dengan bahan dasar lain-lain sebanyak 16 unit
- d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 - Arsip Konvensional sebanyak 27.910 lembar.
 - Arsip Kartografi dan Karsitekturan sebanyak 110.736 lembar.
 - Arsip Film sebanyak 58.800 reel.
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 13.648 reel.
 - Arsip Video sebanyak 30.250 kaset.
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 37.369 kaset.
 - Arsip Optical Disc sebanyak 427 kopling.
 - Arsip foto sebanyak 341.131 lembar (negatif foto) dan 200.000 lembar (positif foto).
 - Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.
- e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffles, Makam Belanda (Santiong) dan Patung Kepala Sapi.
- f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

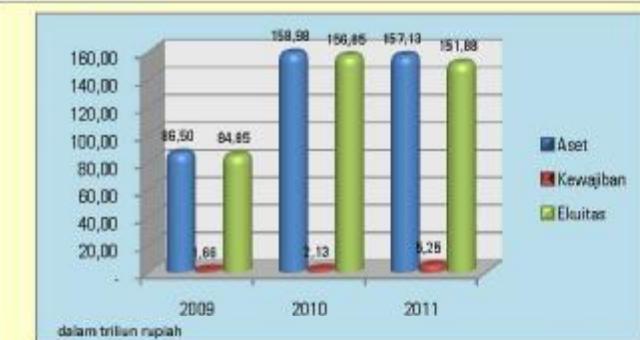
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 598 Benda Cagar Budaya (BCB), yang dikelompokkan menjadi:

- Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb).
 - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- Aset Bersejarah yang dikelola Kementerian Budpar sebanyak 27.031 unit yang tergolong dalam Candi, Tugu Peringatan, Bangunan Bersejarah, tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi serta aset tetap lainnya.
- h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.733 eksemplar naskah kuno.
 - i. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah dengan rincian:
 - Tugu Peringatan sebanyak 1 Unit
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 4 Unit
 - Eksakta sebanyak 13 Unit.
 - j. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan sebanyak 5 unit serta 1 Unit Makam Bersejarah.
 - k. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
 - l. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 - Tugu Peringatan sebanyak 14 unit
 - Bangunan Bersejarah sebanyak 4 unit
 - Aset Eksakta sebanyak 2 unit
 - Aset Non-Eksakta sebanyak 7 unit.

7. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan dalam grafik di bawah ini:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)



Grafik 47: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum
31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

Iktisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Daftar 28.

8. Penerapan Penyusutan Aset Tetap pada Badan Layanan Umum

Sesuai dengan amanat PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, seluruh Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengrajaan dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Untuk penerapan penyusutan Aset Tetap telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Untuk Tahun 2011 yang diwajibkan untuk menerapkan penyusutan Aset Tetap adalah Satuan Kerja dengan pola pengelolaan keuangan BLU yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan. Penyusutan Aset Tetap Satker BLU tersebut diungkapkan pada CaLK masing-masing LKKL. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap pada 65 Satuan Kerja Badan Layanan Umum disajikan pada Daftar 28.

9. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Masa tugas BRR berlaku 4 (empat) tahun dan pengakhiran masa Tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009.

Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2011, LK Likuidasi belum diterbitkan, namun LK Penutup per 31 Desember 2011 telah disusun, sehingga Neraca BRR NAD-Nias yang disajikan dalam LKPP Tahun 2011 masih merupakan Neraca Penutup per 31 Desember 2011. Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (*Audited*) dan Neraca penutup per 31 Desember 2011.

**NERACA
BRR NAD-NIAS**

Urutan	31 Des 2008 (<i>Audited</i>)	31 Des 2011
Aset		
Aset Lancar		
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200	-
Uang Muka Belanja	24.546.204.400	-
Belanja Dibayar Di Muka	2.148.584.510	-
Persediaan	78.951.123.713	78.951.123.713
Jumlah Aset Lancar	106.163.880.823	78.951.123.713
Aset Tetap		
Tanah	572.821.718.812	526.785.787.623
Peralatan Dan Mesin	1.538.603.845.802	771.847.388.434
Gedung Dan Bangunan	3.351.088.589.510	1.191.902.923.089
Jalan Irigasi Dan Jaringan	4.771.805.420.047	1.894.182.520.918
Aset Tetap Lainnya	27.483.007.111	20.908.386.326
Konstruksi Dalam Pengajaran	1.049.831.238.560	1.026.148.271.124
Jumlah Aset Tetap	11.311.544.820.842	5.431.771.255.523
Aset Lainnya		
Aset Lain-Lain	881.364.928.291	485.603.480.566
Jumlah Aset Lainnya	881.364.928.291	485.603.480.566
Jumlah Aset	12.079.073.627.056	6.886.326.059.802
Kewajiban		
Ekuitas Dana		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Piutang	27.212.757.110	-
Cadangan Persediaan	78.951.123.713	78.951.123.713
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	106.163.880.823	78.951.123.713
Ekuitas Dana Investasi		
Dimvestasikan Dalam Aset Tetap	11.311.544.820.842	5.431.771.255.523
Dimvestasikan Dalam Aset Lainnya	881.364.928.291	485.603.480.566
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.972.909.747.133	5.917.374.736.089
Jumlah Ekuitas Dana	12.079.073.627.056	6.886.326.059.802
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12.079.073.627.056	6.886.326.059.802

Perubahan nilai aset tetap dan aset lainnya dari Neraca per 31 Desember 2008 (*Audited*) menjadi Neraca Penutup per 31 Desember 2011 adalah karena adanya koreksi dan penghapusan buku.

10. Unit Badan Lainnya

Dalam rangka penataan pelaporan keuangan Unit Badan Lainnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya (UBL) difinisikan sebagai unit organisasi yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung fungsi K/L di

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

mana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab langsung kepada pimpinan K/L tertentu. Nomenklatur UBL tersebut bermacam-macam, antara lain akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja. Termasuk dalam UBL adalah yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Pembentukan ini ada yang bersifat jangka pendek, namun ada pula yang bersifat jangka panjang mengingat pembentukan UBL tergantung dari kebutuhan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Hingga akhir tahun 2011, Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi 101 lembaga non struktural atau terdapat peningkatan 11 lembaga non struktural yang sebagian besar baru dibentuk pada tahun 2011. Dari 101 lembaga tersebut, lebih dari sepertiganya (35 lembaga) merupakan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang. Menilik legalitas pembentukannya, sebanyak 20% dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden sebanyak 60% dan 20 % berdasarkan peraturan presiden.

Komposisi sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional LNS bisa dikategorikan dalam 3 jenis:

1. Sekitar 75% (68 LNS) dibayai dari APBN. Sebanyak 43 Sekretariat LNS merupakan Satker yang berada dibawah Kementerian Negara/Lembaga (K/L). sedangkan 25 Sekretariat LNS dibayai dari Kegiatan K/L. Dari 43 satker tersebut, diantaranya adalah 13 Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET) yang didanai APBN melalui Dana Dekonsentrasi di SKPD Dinas PU & Kimpraswil.
2. Tiga LNS yakni: Baperlamar, Badan Pengelola Dana Abadi Umat, dan Otorita Asahan. mendanai kegiatannya dari penerimaan tertentu tanpa kucuran dana dari APBN.
3. Empat Lembaga Non Struktural yang menerima dana dari APBN dan Non APBN yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

Enam LNS saat ini sudah tidak aktif lagi namun peraturan perundang-undangan tentang pembentukan LNS tersebut belum dicabut. Sedangkan 8 LNS belum aktif karena belum lama dibentuk pemerintah dan 10 LNS yang baru dibentuk pada tahun 2011 .

Lembaga Non Struktural yang dibayai dari APBN murni, akuntansi atas transaksi keuangan dan laporan keuangannya sudah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lembaga non struktural yang menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi tersendiri, pengurusan administrasi keuangannya ditangani oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural K/L yang menaungi dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit oleh)

Yayasan di lingkungan K/L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 memasukkan yayasan di lingkungan K/L dalam ruang lingkup keuangan negara. Terdapat kata "pihak lain" pada butir g dan l yaitu:

- "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah".
- "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 2 butir l UU 17/2003 meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan/yayasan di lingkungan kementerian negaralembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan negara di atas, yayasan di lingkungan kementerian/lembaga adalah yayasan yang terafiliasi dengan kementerian negaralembaga, yang menurut Akta Notaris dan Anggaran Dasarnya didirikan atau dipimpin oleh pejabat pemerintah aktif di kementerian negaralembaga tertentu atau yayasan yang menerima dan memanfaatkan aset negara dalam melaksanakan kegiatannya. Identifikasi atas yayasan di lingkungan kementerian negaralembaga ini diperlukan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan melalui transparasi dan akuntabilitas sektor publik.

Identifikasi lebih lanjut atas yayasan di lingkungan kementerian negaralembaga dipisahkan dari yayasan-yayasan yang bersangkutan dibawah institusi TNI. Hal ini karena karena Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini ada 900-an unit bisnis baik berupa yayasan maupun koperasi di bawah naungan TNI yang telah teridentifikasi oleh Badan Pengelola Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk disorahkan kepada Presiden. Selanjutnya yayasan maupun koperasi tersebut ditransformasikan dalam korporasi atau dimasukkan dalam mekanisme APBN, sehingga TNI bisa berkonsentrasi mengembangkan profesionalitas tentara dan meninggalkan bisnis.

Sejauh ini, yayasan dalam lingkup keuangan negara yang sudah teridentifikasi dan sebagian menyampaikan laporan keuangan yakni:

1. Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMII yang mengelola Taman Mini Indonesia Indah.
2. Yayasan Sarana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang berada di Kementerian Kehutanan.
3. Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung "Graha Purna Yudha" di Jalan Sudirman. Semanggi – Jakarta Pusat.
4. Yayasan Kesejahteraan Pegawai BhumiBhakti Adhiguna di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

5. Yayasan Gedung Arsip Nasional RI
6. Yayasan Yustitia Dharmayukti Karini di lingkungan Mahkamah Agung
7. Yayasan Puma Bhakti (YARNATI) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
8. Yayasan Pengembangan BUMN di lingkungan Kementerian Negara BUMN

Penyajian UBL dalam Laporan Keuangan

Berikut adalah perlakuan penyajian UBL pada LKPP disesuaikan dengan karakteristik/jenis dari UBL dimaksud, yaitu:

No.	Jenis UBL	Penyajian Dalam LKPP
1	UBL Sebagai Satuan Kerja K/L	Laporan Keuangan tergabung dalam UKKL yang bersangkutan
2	UBL Sebagai Bagian dari Satker K/L	Laporan Keuangan tergabung dalam UKKL yang bersangkutan
3	UBL Non Satker yang juga bertindak sebagai Satuan Kerja/Bagian Satuan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - UBL tersebut Otorita Batam dan Badan Wakaf Indonesia. - Sebagai Satuan Kerja/Bagian Satuan Kerja Laporan Keuangannya tergabung dalam UKKL yang bersangkutan. - Nilai ekuitas di luar yang diperoleh dari APBN disajikan pada Neraca sebagai "Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya"
3	UBL Non Satker	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 UBL yang seharusnya tidak termasuk dalam definisi UBL, yaitu LPS dan BPMIGAS karena merupakan kelаяan negara yang dipisahkan, dan disajikan di Neraca sebagai investasi Permanen. - 2 UBL, yaitu Otorita Asahan dan Baznas, disajikan pada Neraca sebagai "Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya" - 1 UBL, yaitu BAPERTARUM-PNS hanya diungkapkan dalam Cai.K. - 1 UBL, yaitu BP DAU, sebagai pengelola dana masyarakat disajikan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" melalui Laporan Keuangan Kementerian Agama (BA 025).
4	UBL sudah menjadi Bagian Anggaran tersendiri untuk TA 2011	UBL tersebut adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
5	Yayasan	<p>Disajikan pada Neraca sebagai "Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Pemerintah Lainnya"</p> <p>Berurut 3 Yayasan yang disajikan pada LKPP Tahun 2011, yaitu Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMII yang mengelola TMII, Yayasan Carana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung "Graha Purna Yudha"</p>
6	Tidak Aktif	Hanya diungkapkan dalam Cai.K

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

Sampai dengan akhir Tahun 2011, total Aset Bersih UBL sebesar Rp34,32 triliun. Pemilik aset terbesar: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS, LPP RRI, dan LPP TVRI.

Pada tahun anggaran 2012 untuk LPP TVRI dan LPP RRI juga telah ditetapkan menjadi Bagian Anggaran tersendiri.

Iktisar Laporan Keuangan Badan Lainnya disajikan dalam Daftar 29.

11. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang diteribkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK No. 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
2. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
3. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyotornya ke Kas Negara;
4. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
5. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Sampai dengan 31 Desember 2011, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 61 aset dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2009: 2 aset menjadi BMN dan 3 aset dilepaskan ke pihak ketiga/swasta (total 5 aset)
2. Tahun 2010: 6 aset menjadi BMN dan 14 aset menjadi BMD (total 20 aset)
3. Tahun 2011: 7 aset menjadi BMN, 28 aset menjadi BMD, dan 1 aset dilepas ke pihak ketiga (total 36 aset).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Rincian ABMA/C disajikan pada Daftar 30.

12. Kewajiban Kontinjensi

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan mempertimbangkan besarnya ketbutuhan dana investasi, Pemerintah memberikan dukungan berupa:

- a. Jaminan kewajiban pembayaran BUMN/BUMD kepada kreditur atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
- b. Jaminan pembayaran BUMN kepada investor swasta atas kewajiban –kewajiban tertentu dalam perjanjian jual beli listrik.

Jaminan atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur bertujuan memberikan kepastian pembayaran kembali sehingga dapat menarik minat investor/kreditor untuk menyalurkan dananya. Disamping itu dengan adanya Jaminan Pemerintah, maka risiko investor/kreditor dalam pemberian pinjaman menjadi lebih rendah yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya pinjaman/harga jual beli listrik.

Proyek-proyek yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (FTP I) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero)
2. Program percepatan penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh PDAM
3. Program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (FTP III) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero)
4. Proyek Central Java Power Plant (CJPP) yang merupakan salah satu project show case program kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha Swasta (KPS)

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada investor/kreditor akan timbul jika pihak yang dijamin (PT PLN (Persero) dan PDAM) tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian atas timbulnya kewajiban Pemerintah baik dari sisi kapan terjadinya maupun nilai kewajiban yang timbul. Oleh karena itu, perhitungan alokasi anggaran dalam APBN didasarkan pada estimasi besaran jumlah kewajiban PT PLN (Persero) dan PDAM kepada kreditur pada tahun berjalan dikalikan dengan probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut.

Pengelolaan Kewajiban Kontijensi TA 2011

Sampai dengan Desember 2011, bentuk penjaminan Pemerintah yang telah dilakukan untuk keempat program pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Untuk program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, telah diterbitkan sebanyak 30 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan Pemerintah untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp36.216.962.894.355 dan USD3.958.718.574.
2. Untuk program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 3 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 3 PDAM (Kab. Bogor, Kab. Ciamis dan Kab. Lombok Timur). Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

Rp50.187.000.000 (lima puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

3. Untuk proyek Central Java Power Plant (CJPP), berupa *Guarantee Agreement* yang telah ditandatangani antara PT PII dan Pemerintah selaku penjamin dengan PT Bhimasena Power Indonesia, dimana PT PII menjamin maksimal sebesar Rp300 miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah sebesar asumsi nilai proyek Rp30 triliun dikurangi penjaminan PT PII Rp300 miliar. Sampai dengan saat ini, penjaminan proyek PLTU Jawa Tengah belum efektif mengingat PT Bhimasena Power Indonesia belum mendapatkan pendanaan (*financial close*) dan masih terdapat syarat administratif yang belum dipenuhi.
4. Untuk program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas, sampai saat ini masih dalam proses evaluasi dan penerbitan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKA).

Alokasi anggaran kewajiban kontijensi penjaminan Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

Program	Exposure (Rp)	x	Probability Default	x	(100 % -)	Recovery Rate	=	Expected Loss (Rp)
Penjaminan PT PLN	5.927 miliar	x	15 %	x	(100 % -)	0 %		- 889 miliar
Penjaminan PDAM	28 miliar	x	16,98%	x	(100 % -)	0 %		- 4,75 miliar

Exposure pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditor pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp5.927 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 15% dan *recovery rate* sebesar 0% maka *expected loss* kewajiban kontijensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp889 miliar sehingga anggaran kontijensi penjaminan Pemerintah untuk PT PLN (Persero) yang dialokasikan dalam APBN TA 2011 adalah sebesar Rp889 miliar.

Exposure pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditor pada program percepatan penyediaan air minum untuk tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp28 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 16,98% dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontijensi yang mungkin timbul di tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp4,75 miliar. Namun untuk meningkatkan kepercayaan perbankan atas penjaminan Pemerintah untuk PDAM, maka alokasi anggaran kontijensi penjaminan Pemerintah untuk program percepatan penyediaan air minum dalam APBN TA 2011 ditetapkan menjadi sebesar Rp10 Miliar.

Untuk penjaminan proyek FTP II, Pemerintah menyediakan dana penjaminan pemerintah dalam APBN terkait jaminan kelayakan usaha melalui dana subsidi listrik (PSO). Sedangkan alokasi anggaran penjaminan untuk proyek Central Java Power Plant (CJPP), akan mulai dilakukan tahun 2013 dengan asumsi penjaminan Pemerintah efektif pada Oktober 2012 (setelah *financial close* tercapai).

Sampai dengan Desember 2011, alokasi anggaran penjaminan Pemerintah dalam APBN tidak dicairkan, dengan kata lain tidak terjadi gagal bayar pihak yang dijamin (PT PLN (Persero) dan PDAM).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit) -

13. *Unfunded Liability atas Program Tabungan Hari Tua (THT)*

Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil, disamping Negara dapat menanggung pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan PNS, juga melibatkan PNS dalam menanggung pembiayaan untuk penyelenggarannya melalui iuran PNS bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1974, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran 10% dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3% dari 10% tersebut merupakan iuran THT. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 PP No. 25 Tahun 1981, Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima peserta setiap bulan tanpa pangan, satu dan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.06/2002, skema THT adalah manfaat pasti, di mana setiap PNS pada saat pensiun atau meninggal dunia akan menerima manfaat asuransi dwiguna dan atau manfaat asuransi kematian dan formulanya sudah ditetapkan.

Pasal 14 PP 25 Tahun 1981 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara asuransi sosial yaitu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggung jawab penuh untuk itu.

Sesuai dengan Pasal 1 poin 3 PMK 65 Tahun 2008, Utang Kepada Dana Pensiun dan THT adalah pos belanja yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah dalam rangka penyesuaian perhitungan besarnya manfaat THT PNS dan Hakim.

Pada Laporan Keuangan PT TASPER (program THT) Tahun 2011 diungkapkan bahwa terdapat Piutang *Past Service Liability* (PSL) Pemberi Kerja atas THT yang diestimasi, akibat kenaikan gaji pokok PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
PSL Pemberi Kerja akibat PP 9/2007	1.638.443.906.070
PSL Pemberi Kerja akibat PP 14/2008	2.450.505.392.359
PSL Pemberi Kerja akibat PP 8/2009	3.024.845.340.493
PSL Pemberi Kerja akibat PP 25/2010	1.275.570.232.079
PSL Pemberi Kerja akibat PP 11/2011	3.432.866.853.874
Total	11.822.231.724.875

Pelunasan *Unfunded Liability* tersebut akan dilakukan Pemerintah apabila dinilai perlu setelah dilakukan:

- Audit menyeluruh (*due diligence*) atas PT Tapen (Persero) oleh auditor dan aktuaris independen; dan
- Pemisahan kekayaan dan kewajiban Program THT non-PNS dari kekayaan dan kewajiban Program THT PNS sesuai dengan PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua PNS.

Selanjutnya, guna meningkatkan kemanfaatan program pensiun dan program THT bagi PNS, Pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Perumusan dan penetapan program THT PNS baru yang mampu meningkatkan manfaat THT bagi PNS;

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit oleh)

- b. Perumusan dan penetapan mekanisme program THT PNS baru yang lebih efisien dan akuntabel serta sesuai dengan *international best practices*;
- c. Pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif atas PT Taspen (Persero).

14. *Past Service Liabilities* Program Pensiun

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun JandaDuda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun. Pada APBN-PTA 2011 pembayaran pensiun 100% beban APBN. Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2008, Pemerintah meminta PT TASPEN melakukan *sharing* terhadap pembayaran manfaat pensiun seperti pada tabel berikut ini:

No.	Periode	Sharing (%)		Sharing (Rp)	
		APBN	TASPEN	APBN	TASPEN
1	Januari - Maret 1994	0%	100%	-	684.484.404.672
2	April 1994 - Maret 1997	77,50%	22,50%	10.320.490.487.535	3.251.694.491.668
3	April 1997 - Desember 1998	77%	23%	4.166.873.000.000	1.443.702.023.854
4	Januari 1999 - Desember 2002	75%	25%	38.808.429.790.888	10.629.716.358.793
5	Januari 2003 - Desember 2005	79%	21%	45.267.251.395.247	10.380.704.931.390
6	Januari - Desember 2006	82,50%	17,50%	10.983.960.941.237	3.772.133.279.016
7	Januari - Desember 2007	85,80%	14,50%	23.342.832.127.664	3.476.643.628.139
8	Januari - Desember 2008	91%	9%	30.715.162.662.604	2.630.389.160.583
Total				171.805.126.465.068	36.256.866.286.113

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT. Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2010 terdapat kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp1.809,42 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputra Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa *past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp70,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp1.879,64 triliun. Saldo *past service liabilities* ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2011.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2011 diketahui bahwa jumlah dana titipan atas iuran program pensiun sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp42,20 triliun. Rincian Dana Program pensiun per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

A. Saldo per 31 Desember 2010	28.722.730.784.872
B. Penerimaan:	
Penerimaan Iuran Peserta	6.603.299.827.280
Penerimaan Dana dari Pemerintah	51.851.747.080.880
Hasil Investasi	3.148.394.364.877
Kenaikan Nilai Investasi	4.628.274.804.132
Pendapatan Lain-lain	13.136.741.576
Total Penerimaan	88.242.854.729.556
C. Pengeluaran:	
Pembayaran Mantsat Pensiun	51.843.560.831.851
Beban Operasional	800.975.111.740
Total Pengeluaran	52.444.525.943.591
D. Perubahan Dana (B-C)	13.798.328.784.964
E. Koreksi Dana Bersih	(317.803.038.071)
F. Saldo per 31 Desember 2011 (A+D+E)	42.203.486.531.765

15. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum)

Bapertarum PNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994. Tabungan Perumahan diwajibkan kepada setiap PNS yang dipotong dari gaji masing-masing PNS. Untuk mengelola tabungan tersebut dibentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS dengan tujuan membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan. Pemotongan gaji untuk tabungan perumahan tersebut efektif pada pemotongan gaji bulan Februari 1993 untuk pemotongan gaji bulan Januari dan Februari 1993 dan berakhir bulan yang bersangkutan berhenti menjadi PNS.

Dana yang terkumpul dari pemotongan tabungan tersebut disetor ke rekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama Bapertarum PNS pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dana tabungan tersebut setinggi-tingginya sebesar 60% dari jumlah dana tabungan dipergunakan untuk membantu seluruh PNS untuk uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah bagi pegawai yang belum memiliki rumah maupun membantu sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah di daerah tempat bekerja. Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah tabungan disimpan dalam bentuk deposito atau jenis lain yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pada LKPP Tahun 2011, Aset Bersih Bapertarum tidak disajikan lagi di Neraca, hal ini konsisten dan sama dengan perlakuan akuntansi untuk dana iuran pensiun yang dikelola PT TASPEN dan PT ASKES. Berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum-PNS Tahun 2011, aset sebesar Rp6.807.063.950.338,73, kewajiban Rp2.860.286.664.356,29, dan ekuitas bersih sebesar Rp3.946.777.285.982,44.

16. Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, dan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Dana Program Kemitraan BUMN bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, dan dari pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Untuk Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% dan hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Pelaksanaan dan Pengelolaan dana tersebut berada di BUMN Pembina (BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL), Koordinator BUMN Pembina (BUMN yang ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu), BUMN Penyalur (BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran), atau Lembaga Penyalur (badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran) namun otoritas penggunaannya berada pada Kementerian Negara BUMN. Sampai dengan 31 Desember 2011 Dana PKBL BUMN berjumlah Rp833.328.094.726.

Selain dana PKBL BUMN juga terdapat Dana Bantuan Tunai BUMN Peduli, yaitu Dana yang dikumpulkan dari dana BL BUMN Peduli dan merupakan bagian dari Dana Program Bina Lingkungan pada BUMN Pembina. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, saldo Dana Bantuan Tunai BUMN Peduli adalah sebesar Rp14.180.502.976.

17. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2010

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemerintah telah melakukan tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010. Tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada Daftar 31.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit/ea)

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN**Pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Cadangan DBH**

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2012, dari total dana cadangan subsidi/PSO dan dana cadangan DBH sebesar Rp18.795.238.623.326, yang telah disalurkan kepada pihak ketiga sebesar Rp17.029.587.614.507 dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.765.651.008.819, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rpk):

No.	Jenis Cadangan	Jumlah Yang Telah Disairkan Kepada Pihak Ke-3	Dana Cadangan yang Disetorkan Kas Negara	Jumlah Cadangan
1	Subsidi POS	64.260.500.000	0	64.260.500.000
2	Subsidi PT PELNI	124.457.849.390	12.294.655.610	136.752.505.000
3	Subsidi PERUM BULOG	3.880.034.638.700	220.894.648.100	4.100.839.284.800
4	Subsidi PT KERETA API	152.484.842.728	7.433.342.272	159.902.285.000
5	Subsidi Energi	1.013.499.809.390	14.894.441.735	1.028.384.351.125
6	Subsidi Pupuk	2.250.517.999.430	1.094.011.241.080	3.344.528.740.510
7	Subsidi Benih	38.607.101.708	22.335.195.282	60.942.296.890
8	DBH Perikanan	15.348.647.120	0	15.348.647.120
9	DBH Pertambangan Umum	2.547.225.300.908	381.340.670.725	2.628.566.051.714
10	DBH Kehutanan	266.068.504.643	12.666.316.015	272.834.800.658
11	DBH SDA	8.663.098.060.409	0	8.663.098.060.409
	Jumlah	17.029.587.614.507	1.765.651.008.819	18.795.238.623.326

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS****D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS****SALDO AWAL KAS**

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2011 sebesar Rp99,01 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2011 adalah sebesar Rp99.011.278.600.702 yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2010 setelah disesuaikan dengan koreksi saldo awal kas pada TA 2011. Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rpi):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU:		
Kas BUN di BI	79.806.375.358.793	32.165.520.242.213
Kas di KPPN	9.218.612.887.732	8.308.379.301.298
Kas Rekening Khusus	2.624.334.833.970	-
Kas pada BLU	7.287.580.742.179	5.567.846.500.943
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	48.185.913.485	-
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Sebelum Penyesuaian	98.985.099.730.159	46.082.746.044.414
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Saldo Awal Rekening SAL	-	5.870.514.138.408
Penyesuaian Saldo Awal Rekening	-	-
Penempatan pada Bank Umum	-	15.000.000.000.000
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU *)	26.554.437.138	112.445.204.316
Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN **)	(365.572.595)	7.566.397.318
Total Penyesuaian Saldo Awal	26.188.864.543	20.990.525.740.042
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Koreksi	99.011.278.600.702	67.053.271.784.456

Keterangan:

*) Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU sebesar Rp26.554.437.138 merupakan penyesuaian atas Kas pada BLU berdasarkan data dari KPPN setempat, yaitu:

KPPN	Jumlah (Rpi)
KPPN Padang	(23.171.138)
KPPN Serang	(79.313.662)
KPPN Bandung I	(279.729.486)
KPPN Manado	(480.728.973)
KPPN Bengkulu	(319.298.813)
KPPN Mataram	3.672.732.535
KPPN Tegal	753.018.497
KPPN Semarang II	4.021.931.355
KPPN Semarang I	968.870.991
KPPN Surabaya II	460.938.396
KPPN Makassar II	6.325.198.394
KPPN Jakarta II	8.281.781.687
KPPN Jakarta III	3.262.229.373
Total	26.554.437.138

**) Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN sebesar minus Rp365.572.595 merupakan penyesuaian atas Kas KPPN, yaitu:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Balikpapan	3.050.150
KPPN Palopo	(78.444.835)
KPPN Sijunjung	(146.700.000)
KPPN Manra	(10.523.500)
KPPN Mamuju	(132.954.410)
Total	(385.572.595)

PERUBAHAN KAS

Kenaikan Kas pada TA
2011 sebesar Rp8.83
triñun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2011 dan TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	32.781.698.488.577	33.187.581.404.814
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(117.624.715.204.186)	(80.043.299.758.397)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan	131.392.395.224.420	91.552.011.400.614
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Aktivitas Non Anggaran	1.313.542.615.653	2.927.388.748.278
Koreksi Pembukuan:		
Penggunaan SAL *)	(40.319.043.049.000)	(17.347.946.818.000)
Penyesuaian Pembukuan **)	1.287.457.711.323	(1.178.259.859.886)
Kenaikan (Penurunan) Kas	8.831.333.786.696	29.107.483.117.733

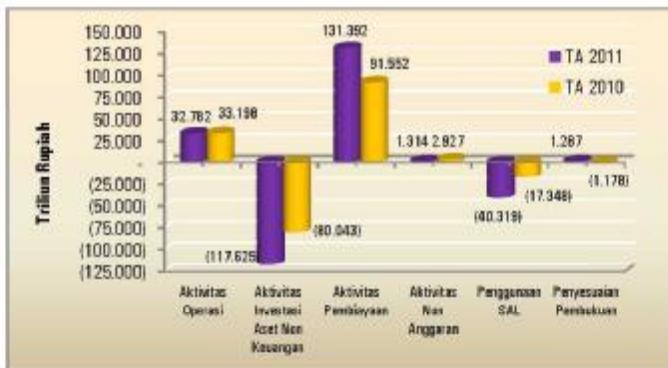
*) Penggunaan SAL pada saat yang bersamaan diakui juga sebagai Penerimaan Pembiayaan.

**) Penyesuaian Pembukuan terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pengembalian Pendapatan TA yang lalu	(102.364.748.513)	(168.929.200.391)
Koreksi Uang Persediaan	(561.052.742)	159.535.528.423
Koreksi Rekening 'r'	(216.316.651)	241.745.699
Selisih Kurs Kas BUN	1.404.184.991.745	(1.169.106.909.807)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	(52.302)	(1.024.810)
Koreksi Kas Hibah Langsung	(372.860.700)	-
Koreksi Kas pada BLU	(375.080.500)	-
Koreksi Transfer	4.176.986	-
Koreksi Kas KPPN	212.686.534	-
Koreksi Pembulatan	77	-
Koreksi Kas di BUN	(13.084.014.611)	(1.178.259.859.886)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	1.287.457.711.323	(1.178.259.859.886)

Komposisi Anus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 48.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Grafik 48: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2011 sebesar Rp121.261.988.260.868 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Kas BUN, KPPN, BLU & Hibah Langsung*)	107.842.612.387.387	96.160.754.802.189
Rekening Khusus	-	2.824.334.833.970
Rekening Pemerintah Lainnya	6.615.552.720.213	8.539.601.162.593
Kas di Bendahara Pengeluaran	292.795.937.959	518.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	252.900.321.124	632.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas**)	6.327.755.216.087	8.603.994.085.726
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	100.924.694.157	53.015.078.502
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(170.853.016.059)	-
Jumlah Saldo Akhir Kas	121.261.988.260.868	117.332.963.445.378

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan Hibah Langsung terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	82.453.918.298.407	79.606.375.358.793
Rekening Kas di KPPN	11.870.556.947.661	9.218.612.887.732
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	13.089.016.578.965	7.287.580.742.179
Hibah Kas Langsung KL yang Sudah Disahkan	429.120.562.354	40.185.813.485
Jumlah	107.842.612.387.387	96.160.754.902.189

Rekening Kas BUN di BI pada TA 2011 termasuk Rekening Khusus sebesar Rp2.390.016.546.991.

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2011 sebesar Rp13.089.016.578.965 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp143.539.893.732 oleh Satker BLU.

**) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6.327.755.216.087 berasal dari saldo sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Rp6.756.875.778.441 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung KIL yang sudah disahkan sebesar Rp429.120.562.354.

*** Kas pada BLU sebesar Rp100.924.694.157 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN dan beberapa koreksi dengan perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut KIL, Dikurangi:	13.019.388.257.063	7.340.595.820.681
Kas pada BLU yang telah disimpan	(170.553.016.059)	-
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	13.089.016.578.965	7.287.580.742.178
Kas pada BLU yang belum disahkan KPPN	100.924.694.157	63.016.078.502

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp13.089.016.578.965 berasal dari perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Saldo awal BLU	7.287.580.742.179	5.867.846.500.943
Koreksi Tambah Saldo Awal Kas pada BLU	26.554.437.138	112.445.204.318
Pendapatan BLU	20.103.995.566.771	10.580.942.036.270
Belanja BLU	(14.328.739.108.623)	(8.983.552.998.350)
Koreksi Pembukuan Kas pada BLU	(376.080.500)	-
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	13.089.016.578.965	7.287.580.742.179

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2011 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi
sebesar Rp32,78
triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2011. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp32.781.696.488.577, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.209.469.568.508.440	980.192.560.688.363
Dikurangi Arus Kas Keluar	(1.176.687.862.019.860)	(946.994.969.283.449)
Arus Kas Bersih	32.781.696.488.577	33.197.591.404.914

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2010, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp415.894.916.338.

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
Perpajakan
Rp873.873 triliun*

Penerimaan Perpajakan pada TA 2011 sebesar Rp873.873.892.399.381 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp819.752.426.342.423 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp54.121.466.056.958. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2011 setelah dikurangi pengembalian

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPH)	431.121.712.728.316	354.152.324.675.100
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	277.800.076.679.384	219.538.218.197.355
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.893.164.324.396	28.580.588.978.740
Bee Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(730.151.679)	8.028.429.073.342
Cukai	77.010.010.613.795	66.165.922.512.567
Pajak Lainnya	3.928.192.148.211	3.371.209.407.180
Jumlah Penerimaan Pajak DN	819.752.426.342.423	879.834.693.844.284
Pajak Perdagangan Internasional		
Bee Masuk	25.265.863.309.375	19.769.193.417.044
Bee Keluar	28.856.602.747.583	8.897.707.295.916
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	54.121.466.056.958	28.656.900.712.960
Penerimaan Perpajakan	873.873.892.399.381	708.491.594.557.244

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan dalam TA 2011 lebih besar Rp165.382.297.842.137 atau 23,34 persen dari Penerimaan Perpajakan dalam TA 2010.

a. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) pada TA 2011 adalah sebesar Rp431.121.712.728.316 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2011 dan TA 2010 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	25.941.792.126.888	22.833.341.093.125
PPh Gas Alam	47.153.704.628.050	36.039.390.019.682
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah *)	3.338.636.314.000	-
Jumlah PPh Migas	76.434.133.068.938	58.872.731.112.887
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	66.751.563.274.222	55.331.533.581.255
PPh Pasal 22	4.946.489.944.246	4.737.703.749.312
PPh Pasal 22 Impor	28.291.747.589.939	23.601.167.040.565
PPh Pasal 23	18.702.757.359.018	18.277.579.888.579
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3.287.028.613.473	2.934.981.111.137
PPh Pasal 25/29 Badan	154.609.563.580.738	131.480.615.289.276
PPh Pasal 26	27.239.272.568.180	20.958.300.304.414
PPh Final dan Fiskal LN	50.818.584.952.948	39.926.176.715.682
PPh Non Migas Lainnya	40.572.806.616	31.535.882.073
Jumlah PPh Non Migas	354.687.579.659.378	295.279.593.562.293
Jumlah Pajak Penghasilan	431.121.712.728.316	354.152.324.675.100

*) Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) pada TA 2010 tidak disajikan pada Laporan Arus Kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

namun hanya disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. PPh DTP pada TA 2011 dicatat dan disajikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2011 lebih besar Rp76.989.388.053.216 atau 21,73 persen dari penerimaan TA 2010.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2011 adalah sebesar Rp277.800.076.679.384. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	165.218.964.383.262	131.879.564.017.016
PPN dan PPnBM impor	112.374.211.359.301	87.495.388.460.763
PPN dan PPnBM lainnya	206.900.936.821	163.265.719.576
Jumlah PPN dan PPnBM	277.800.076.679.384	219.538.218.197.355

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2011 lebih besar Rp58.261.858.482.029 atau 26,54 persen dari TA 2010.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2011 adalah sebesar Rp29.893.164.324.396. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
PBB Pedesaan	1.177.346.608.822	1.231.724.807.759
PBB Perkotaan	6.603.174.032.018	6.379.133.976.045
PBB Perkebunan	985.954.945.312	906.563.035.437
PBB Kehutanan	251.302.697.483	231.794.826.611
PBB Pertambangan	397.819.412.898	499.103.659.423
PBB Migas	20.477.786.627.863	19.332.269.873.465
Jumlah PBB (Neto)	29.893.164.324.396	28.588.589.978.740

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2011 lebih besar Rp1.312.574.345.656 atau 4,59 persen dari TA 2010.

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2011 adalah sebesar minus Rp730.151.679, sedangkan Penerimaan TA 2010 sebesar Rp8.026.429.073.342. Realisasi Penerimaan BPHTB TA 2011 merupakan pengembalian BPHTB tahun anggaran yang lalu. Penerimaan BPHTB tidak dicatat lagi dikarenakan mulai tahun 2011 Penerimaan BPHTB diserahkan ke pemerintah daerah.

e. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2011 adalah sebesar Rp77.010.010.613.795, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Cukai Hasil Tembakau	73.251.428.868.906	63.285.281.573.097
Cukai Ethyl Alkohol	152.953.431.380	145.871.055.229
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.583.211.248.830	2.697.254.271.105
Denda Administrasi Cukai	11.381.400.196	12.995.359.858
Cukai Lainnya	11.035.664.483	14.520.253.278
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	77.010.010.613.795	66.165.922.512.587

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2011 lebih besar Rp10.844.088.101.228 atau 16,39 persen dari Penerimaan Cukai TA 2010.

f. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2011 adalah sebesar Rp3.928.192.148.211. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penjualan Benda dan Bea Materai	3.609.605.383.070	3.340.690.298.878
Pendapatan PPn Batubara	61.093.244	5.049.944
Pajak Tidak Langsung	1.826.035.898	907.491.220
Bunga Penagihan Pajak		
- Bunga Penagihan PPn	84.726.712.822	(18.094.935.596)
- Bunga Penagihan PPN	224.199.680.642	47.163.985.911
- Bunga Penagihan PPnBM	204.067.285	443.759.337
- Bunga Penagihan PTLL	7.569.195.450	93.757.488
Jumlah Pajak Lainnya	3.928.192.148.211	3.371.209.407.100

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2011 lebih besar Rp556.982.741.031 atau 16,52 persen dari TA 2010.

g. Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2011 adalah sebesar Rp54.121.466.056.958, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp25.265.863.309.375 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp28.856.602.747.583. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rpi):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Bea Masuk		
Bea Masuk	23.783.424.990.710	18.569.690.058.915
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	3.173.020.085	2.061.591.716
Pendapatan Denda Administrasi	391.846.604.781	540.590.656.021
Pabean		
Bea Masuk dalam rangka KITE	946.688.042.226	566.917.871.634
Denda atas sanksi administrasi	15.000.000	10.000.000
Bea Masuk - Ditanggung Pemerintah *)	73.310.676.000	-
Pabean Lainnya	67.424.975.573	49.923.238.758
Jumlah Bea Masuk	25.265.863.309.375	19.759.193.417.044
Bea Keluar	28.856.602.747.583	8.897.707.295.916
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	54.121.466.056.958	28.656.900.712.900

*) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) pada TA 2010 tidak disajikan pada Laporan Arus Kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

namun hanya disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. BM DTP pada TA 2011 dicatat dan disajikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 lebih besar Rp25.464.565.343.998 atau 88,86 persen dari TA 2010.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP sebesar
Rp331,34 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2011 adalah sebesar Rp331.337.448.572.183, yang berarti lebih besar Rp62.659.469.001.827 atau 23,32 persen dari TA 2010 sebesar Rp268.677.979.570.356.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan dari Sumber Daya Alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2011 adalah sebesar Rp213.823.349.552.827. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi SDA, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	141.303.483.452.283	111.814.923.202.135
Pendapatan Gas Alam	52.187.085.923.633	40.918.314.502.416
Pendapatan Pertambangan Umum	16.369.789.735.678	12.646.750.881.580
Pendapatan Kehutanan	3.216.476.006.406	3.008.672.120.638
Pendapatan Perikanan	183.802.161.080	91.995.180.732
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	562.702.273.747	343.788.432.785
Jumlah Penerimaan SDA	213.823.349.552.827	188.825.442.320.286

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2011 lebih besar Rp44.997.907.232.541 atau 26,65 persen dari TA 2010.

b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2011 adalah sebesar Rp28.193.973.126.600, yang berarti lebih kecil Rp1.912.959.567.665 atau 6,36 persen dari TA 2010 sebesar Rp30.096.932.694.285. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

c. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2011 adalah sebesar Rp69.226.130.305.985. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sisaan	9.525.540.319.958	6.304.681.982.848
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	11.803.480.967.212	9.782.852.016.185
Pendapatan Sewa	188.810.775.728	147.500.857.682
Pendapatan Jasa I	16.222.028.858.308	16.735.427.684.773

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Pendapatan Jasa II	1.371.822.067.319	1.867.632.340.637
Pendapatan Jasa Luar Negeri	454.063.043.127	688.638.910.955
Pendapatan Jasa Perbankan	698.213.800	598.750.769
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Panempatan Uang Kepolisian	4.935.359.321.429	3.468.219.982.039
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.295.511.200.017	2.551.632.939.518
Pendapatan Jasa Layanan Tel	-	144.628.206.658
Pendapatan Jasa Kepolisian II	95.821.898.822	43.535.283.500
Pendapatan Jasa Lainnya	258.310.892.000	116.335.390.253
Pendapatan Bunga	2.169.804.446.254	3.869.469.830.064
Pendapatan Gain On Bond Redemption	780.000.000	48.397.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.722.674.065.500	3.445.549.357.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	240.761.503.805	166.607.987.382
Pendapatan Pendidikan	2.985.915.235.801	2.983.448.553.758
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sisaan Hasil Korupsi	92.848.578.390	213.787.299.728
Pendapatan Iuran dan Denda	1.319.106.824.593	704.797.429.654
Pendapatan dari Penerimaan Kembal TAYL	7.986.815.385.380	5.763.384.770.255
Pendapatan Pelunasan Piutang	28.715.895.818	47.908.471.893
Pendapatan dari Penutupan Rekening	628.093.309.285	11.789.234.305
Pendapatan Selisih Kurs	2.713.540.544.637	64.500.000.000
Pendapatan Lain-lain	208.836.088.712	204.501.240.681
Jumlah PNBP Lainnya	69.226.130.305.988	59.164.762.520.535

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2011 lebih besar Rp10.061.367.785.450 atau 17,01 persen dari TA 2010.

d. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2011 adalah sebesar Rp20.103.995.586.771, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	17.821.832.190.696	9.906.996.304.665
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	167.482.819.227	34.976.353.539
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	647.563.491.201	172.630.678.219
Pendapatan BLU Lainnya	1.467.137.085.647	476.238.698.847
Jumlah Penerimaan BLU	20.103.995.586.771	10.590.842.035.270

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2011 lebih besar Rp9.513.153.551.501 atau 89,82 persen dari TA 2010.

D.2.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah sebesar Rp4.258 triliun

Penerimaan Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp4.258.217.536.874. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri - Perorangan	34.102.500	-
Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	25.000.000
Hibah Dalam Negeri Lainnya	-	254.107.349.174
Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	166.310.915.813	98.867.782.983
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pendpa	287.158.580.076	70.236.704.605
Hibah Dalam Negeri Langsung - Pendpa	10.000.000.000	-
Jumlah Hibah Dalam Negeri	463.503.598.389	423.238.836.762
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri - Perorangan	-	235.708.020
Hibah Luar Negeri - Bilateral	323.935.838.288	253.114.484.199
Hibah Luar Negeri - Multilateral	2.389.886.678.488	1.804.063.783.311
Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	7.198.973.228	542.343.768.481
Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan	-	-
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	112.795.829.856	-
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	918.255.288.945	-
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	42.642.352.680	-
Jumlah Hibah Luar Negeri	3.794.713.038.486	2.589.747.724.001
Jumlah Hibah	4.268.217.536.874	3.022.986.560.763

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2011 lebih besar Rp1.235.230.976.111 atau 40,86 persen dari TA 2010.

Penerimaan Hibah tersebut tidak termasuk Pendapatan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp552.196.724.430 serta Pendapatan Hibah dalam bentuk Surat Berharga sebesar Rp433.525.600.000. Pendapatan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa dan Surat Berharga tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

D.2.4. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
sebesar Rp175,75
triliun*

Belanja Pegawai pada TA 2011 adalah sebesar Rp175.745.947.140.204, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	49.438.707.054.822	42.465.549.827.688
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Poli	40.253.949.624.738	36.935.432.979.430
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	819.040.106.833	727.783.954.393
Belanja Gaji Dokter PTT	771.007.436.015	680.958.920.462
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	248.984.377.220	165.888.295.443
Belanja Honorarium	1.368.820.236.166	1.444.890.460.937
Belanja Lembur	501.557.316.856	470.289.735.805
Belanja Vakasi	217.977.946.087	248.539.701.180
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	20.363.825.257.336	12.171.280.231.935
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	59.470.665.084.274	50.603.760.868.126
Belanja Asuransi Kesehatan	2.141.251.233.920	1.816.913.001.200
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	160.576.864.996	128.299.057.338
Belanja Cedangan Perubahan Sharing	(374.730.220)	-
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI	(40.668.838)	202.215.097.395
Total Belanja Pegawai	175.745.947.140.204	148.072.602.131.332

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2011 lebih besar Rp27.673.345.008,872 atau 18,69 persen dari TA 2010.

D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang sebesar Rp124,16 triliun

Belanja Barang pada TA 2011 adalah sebesar Rp124.159.163.392,116 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Barang	86.807.896.651.991	51.545.119.285.391
Belanja Jasa	15.888.779.363.493	12.122.676.491.688
Belanja Pemeliharaan	9.284.459.416.087	7.809.363.480.993
Belanja Perjalanan	19.635.213.116.970	18.303.524.718.632
Belanja Barang BLU	12.543.014.843.575	7.807.229.767.375
Jumlah Belanja Barang	124.159.163.392.116	97.587.913.734.089

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2011 ini lebih besar Rp26.571.249.658.027 atau 27,23 persen dari TA 2010.

Belanja Barang tersebut tidak termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp469.912.832.050. Belanja Barang dari hibah dalam bentuk Barang/Jasa tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp93,26 triliun

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2011 sebesar Rp93.260.261.464.346 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp4.879.218.489.683 atau 5,52 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2010 sebesar Rp88.381.042.974.663.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp79.615.326.431.749 dan Rp13.644.935.032,597 dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp79.615.326.431.749 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara DN	57.210.627.839.839	54.560.273.382.091
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	4.768.589.586.200	2.760.995.750.000
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara DN	3.238.157.597.300	2.073.333.477.100
Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption	310.612.680.000	737.473.500.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

Belanja Pembayaran Discount SBSN DN	51.466.619.000	36.998.773.200
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	11.900.654.889.891	11.833.182.927.198
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas	514.676.089.460	513.199.205.260
Belanja Pembayaran Discounr Obligasi Negara Valas	373.905.900.000	177.338.000.000
Belanja Pembayaran Denda	1.247.399.871.387	1.319.296.422.615
Belanja Terkait Pendapatan Hibah	1.235.358.882	-
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	79.815.328.431.749	73.802.092.037.454

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp13.644.935.032.597 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Belanja Bunga Pinjaman Program	3.540.016.135.917	3.551.962.345.689
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	10.104.918.896.680	11.026.988.591.520
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	13.644.935.032.597	14.578.950.937.209

D.2.7. Subsidi

Subsidi sebesar
Rp295,38 triliun

Belanja Subsidi pada TA 2011 sebesar Rp295.358.422.916.324 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	165.161.338.980.975	82.351.322.825.873
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	123.428.269.621.815	93.343.805.878.147
Subsidi Non BBM - Pajak *)	3.411.846.890.000	-
Subsidi Non BBM - Lainnya	-	-
Subtotal	126.840.216.611.815	93.343.805.878.147
Subsidi dalam Rangka PSO	1.833.928.069.279	1.373.894.220.390
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	293.835.483.662.089	177.069.022.924.410
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	1.522.939.254.255	822.952.538.294
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	1.522.939.254.255	822.952.538.294
Jumlah Belanja Subsidi	295.358.422.916.324	177.891.975.462.704

*) Subsidi Pajak (PPh Dranggung Pemerintah dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) tidak disajikan pada Laporan Arus Kas TA 2010, namun hanya disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Subsidi Pajak pada TA 2011 dicatat dan disajikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan demikian, Subsidi TA 2011 ini lebih besar Rp117.466.447.453.620 atau 66,03 persen dari Subsidi TA 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**D.2.8. Belanja Hibah**

Belanja Hibah sebesar Rp300,11 miliar

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2011 terdapat belanja hibah negara kepada pemerintah daerah sebesar Rp300.108.798.355. Belanja hibah TA 2011 lebih besar Rp230.100.020.780 atau 328,67 persen dari TA 2010 sebesar Rp70.008.777.575.

D.2.9. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial sebesar Rp71,08 triliun

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp71.076.290.233.168 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Kompensasi Kenaikan Harga BBM	6.244.225.314.365	4.608.087.845.000
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	32.069.345.814.817	37.604.432.063.192
Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.830.500.000	965.889.642.762
Bersiswa	4.684.535.971.423	4.775.195.414.218
Lembaga Peribadatan	146.686.993.700	79.907.018.380
Lembaga Sosial Lainnya	27.927.665.638.863	20.561.954.653.740
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	71.076.290.233.168	68.595.466.637.272

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2011 ini lebih besar Rp2.480.823.595.896 atau 3,62 persen dari TA 2010.

D.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain sebesar Rp5,46 triliun

Belanja Lain-lain pada TA 2011 adalah sebesar Rp5.464.234.053.592, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Rekonstruksi Aceh	-	1.052.074.256
Kerjasama Teknis Internasional	10.000.000.000	-
Pemilu Tahunan	-	(2.040.000)
Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	9.778.482.000	-
Cadangan Dana Reboisasi	-	(3.329)
Belanja OBH Biaya Upah Pungut PBB untuk DJP	(10.650.875)	942.264.497.985
Belanja Dana Penunjang (PHLN)	-	1.199.027.080
Belanja Non Modal-Otorita Batam	557.785.883	845.925.755
Belanja karena rugi selisih kurs	360.991.025.539	909.200.000.000
Jasa Surveyor	-	232.979.742.237
Jasa Perpendidikan	199.847.380.770	102.072.122.675
Belanja untuk LPP TVRI	685.547.340.402	571.869.960.625
Belanja untuk LPP RRI	677.107.093.980	558.918.956.130
Dana Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah	408.145.000.000	388.183.000.000
Belanja Lainnya	3.114.270.595.883	17.988.301.645.511
Jumlah Belanja Lain-lain	5.464.234.053.592	21.866.884.908.929

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2011 mengalami penurunan sebesar Rp16.202.650.855.337 atau 74,78 persen dari TA 2010. Penurunan realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2011 disebabkan adanya penataan akun-akun pada Belanja Lain-lain sesuai dengan *nature of transaction*-nya, bahwa kegiatan yang tidak memenuhi karakteristik dibayai dari Belanja Lain-lain harus dianggarkan pada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

belanja K/L yang bersangkutan.

D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak

DBH Pajak sebesar Rp41.53 triliun

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2011 adalah sebesar Rp41.525.561.096.164, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	13.237.326.489.261	10.931.465.581.702
Bagi Hasil PBB	28.281.486.730.011	27.108.379.095.361
Bagi Hasil BPHTB	6.747.876.892	7.775.883.958.765
Jumlah Bagi Hasil Pajak	41.525.561.096.164	45.815.708.635.828

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2011 lebih kecil Rp4.290.147.539.664 atau 9,36 persen dari TA 2010.

D.2.12. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

DBH Cukai Tembakau sebesar Rp1.41 triliun

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.408.448.784.184, sedangkan pada TA 2010 sebesar Rp1.202.111.025.283. Dengan demikian DBH Cukai Tembakau TA 2011 lebih besar Rp206.337.738.901 atau 17,17 persen dibandingkan DBH Cukai Tembakau TA 2010.

D.2.13. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH SDA sebesar Rp53.97 triliun

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2011 adalah sebesar Rp53.974.986.297.954, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Minyak Bumi	20.634.080.735.284	20.567.117.852.257
Bagi Hasil Gas Alam	16.672.249.758.993	14.629.244.504.747
Bagi Hasil Pertambangan Limur	14.498.126.522.475	7.790.420.800.000
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	519.987.115.194	305.855.434.155
Bagi Hasil Kehutanan	1.512.465.063.891	1.763.104.639.304
Bagi Hasil Penitanan	138.077.102.117	120.000.000.000
Jumlah Bagi Hasil SDA	53.974.986.297.954	45.165.743.838.463

Dengan demikian, DBH SDA TA 2011 lebih besar Rp8.809.243.267.491 atau 19,50 persen dari TA 2010.

D.2.14. Dana Alokasi Umum

DAU sebesar Rp225.53 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2011 sebesar Rp225.533.712.048.000, jumlah tersebut lebih besar Rp21.962.735.239.500 atau 10,79 persen dari TA 2010 sebesar Rp203.570.976.808.500.

D.2.15. Dana Alokasi Khusus

DAK sebesar Rp24,80 triliun

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsikabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2011 sebesar Rp24.802.229.752.980, jumlah tersebut lebih besar Rp3.845.918.584.980 atau 18,35 persen dari TA 2010 sebesar Rp20.956.311.168.000.

D.2.16. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10,42 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2011 sebesar Rp10.421.312.993.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.321.699.313.000 atau 14,53 persen dari TA 2010 sebesar Rp9.099.613.680.000.

D.2.17. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp53,66 triliun

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2011 adalah sebesar Rp53.657.183.069.474, lebih besar Rp34.738.572.760.663 atau 183,62 persen dari TA 2010 sebesar Rp18.918.610.308.811.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar Rp117,62 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2011 merunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp117.624.715.204.186, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Urutan	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Arus Masuk	134.372.526.547	263.876.638.486
Dikurangi Arus Keluar	117.769.087.730.723	80.307.176.396.873
Arus Kas Bersih	(117.624.715.204.186)	(80.043.299.758.387)

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2011 lebih besar Rp37.581.415.445.799 atau 46,95 persen dari TA 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

D.2.18. Penjualan Aset

Penjualan Aset
sebesar Rp134,37
miliar

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah, gedung, bangunan dan tanah, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2011 adalah sebesar Rp134.372.526.547, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	2.725.200.373	92.412.745.784
Penjualan Kendaraan Bermotor	1.807.702.673	2.169.006.285
Penjualan Sewa Beli	40.584.546.231	43.296.161.610
Penjualan Aset Tetap Lainnya	898.345.500	143.252.500
Penjualan Aset Lainnya	88.356.731.770	125.855.472.307
Jumlah Penjualan Aset	134.372.526.547	283.876.038.406

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2011 lebih kecil Rp129.504.111.939 atau 49,08 persen dari TA 2010.

D.2.19. Belanja Modal

Belanja Modal
sebesar Rp117,76
triliun

Belanja Modal pada TA 2011 adalah sebesar Rp117.759.087.730.733 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.174.518.573.375	1.801.599.831.427
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.599.152.098.168	28.288.339.011.892
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.298.877.877.836	16.534.548.831.437
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.570.778.106.938	30.184.518.770.901
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.342.236.811.366	2.321.846.720.441
Belanja Modal BLU	1.785.724.263.048	1.176.323.230.975
Jumlah Belanja Modal	117.759.087.730.733	80.307.176.396.873

Belanja Modal ini pada TA 2011 lebih besar Rp37.451.911.333.860 atau 46,64 persen dari TA 2010.

Belanja Modal tersebut tidak termasuk hibah dalam bentuk Barang/Jasa sebesar Rp82.283.892.380. Belanja Modal dari hibah dalam bentuk Barang/Jasa tersebut disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp32.781.696.488.577 dan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp117.624.715.204.186 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp84.843.018.715.609 Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Kenaikan Kas dari
Aktivitas Pembiayaan
sebesar Rp131,39
triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendamaian defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2011 adalah sebesar Rp131.392.395.224.420, yang berasal dari (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Arus Masuk	292.028.544.623.338	248.301.707.025.210
Dikurangi Arus Keluar	(160.636.148.398.918)	(156.749.685.624.596)
Arus Kas Bersih	131.392.395.224.420	91.552.011.400.814

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembayaran TA 2011 lebih besar Rp39.840.383.823.806 atau 43,52 persen dari TA 2010.

D.2.20. Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri

Penerimaan
Pembayaran DN
sebesar Rp249,67
triliun

Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri dalam TA 2011 adalah sebesar Rp249.672.520.403.961, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Rekening Pemerintah	40.319.043.049.000	22.189.312.607.078
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	1.597.981.517.178	3.232.148.153.135
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	207.136.113.196.150	167.834.217.942.000
Pinjaman Dalam Negeri	619.382.841.633	393.806.356.471
Jumlah Penerimaan Pembayaran DN	249.872.520.403.961	193.449.285.061.684

Penerimaan Pembayaran Dalam Negeri dalam TA 2011 lebih besar Rp56.223.235.342.277 atau 29,06 persen dibandingkan dengan TA 2010.

a. Rekening Pemerintah

Penerimaan pembayaran dari Rekening Pemerintah pada TA 2011 sebesar Rp40.319.043.049.000 merupakan penerimaan pembayaran karena penggunaan SAL, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan dari Rekening SAL	40.319.043.049.000	17.347.946.818.000
Penerimaan dari Rekening Dana Investasi	-	4.841.365.789.078
Total Penerimaan dari Rekening Pemerintah	40.319.043.049.000	22.189.312.607.078

Penerimaan pembayaran dari Rekening Pemerintah TA 2011 lebih besar Rp18.129.730.441.922 atau 81,71 persen dari TA 2010.

b. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.597.981.517.178, berarti lebih kecil Rp1.634.166.635.957 atau 50,56 persen dari penerimaan pada TA 2010 sebesar Rp3.232.148.153.135. Penerimaan ini berasal dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi dan penjualan/penyelesaian aset eks BPPN dan aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Rincian Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan Hasil Privatisasi	425.044.145.867	2.088.694.387.048
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	330.323.053	133.448.541.746
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian aset	801.228.042.527	747.760.020.064

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audited*)

eks BPPN		
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BOL)	371.379.005.731	252.245.204.277
Total Penerimaan	1.597.981.517.178	3.232.148.153.135

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valas. Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2011 sebesar Rp207.136.113.196.150, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Penerbitan/Penjualan SPN	40.000.000.000.000	29.795.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	110.514.000.000.000	84.020.000.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.817.637.491.000	1.701.033.244.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - DN	24.327.428.850.000	27.076.856.698.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - Valas	30.477.036.855.150	25.041.326.000.000
Total Penerimaan SBN	207.136.113.196.150	167.634.217.942.000

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2011 lebih besar Rp39.501.895.254.150 atau 23,56 persen dibanding TA 2010.

d. Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri merupakan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dariBUMN dan dari Pemerintah Daerah. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri pada TA 2011 sebesar Rp619.382.641.633, lebih besar Rp225.776.282.162 atau 57,36 persen dari TA 2010 sebesar Rp393.806.359.471,

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan
Pembiayaan LN
sebesar Rp33.75
triunan

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2011 sebesar Rp33.747.178.723.921 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (<i>Audited</i>)	TA 2010 (<i>Audited</i>)
Pinjaman Program	15.266.144.513.219	28.974.644.489.116
Pinjaman Proyek	18.481.034.210.702	25.820.145.711.080
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	33.747.178.723.921	54.794.780.200.206

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2011 lebih kecil Rp21.047.611.476.285 atau 38,41 persen dari TA 2010.

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2011 adalah sebesar Rp15.266.144.513.219, dengan rincian (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Program Bilateral	873.396.325.700	7.296.002.579.700
Program Multilateral	14.392.748.187.519	21.678.641.909.418
Jumlah Pinjaman Program	15.266.144.513.219	28.974.644.489.116

Dengan demikian, Pinjaman Program TA 2011 lebih kecil Rp13.708.499.975.897 atau 47,31 persen dari TA 2010.

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2011 adalah sebesar Rp18.481.034.210.702, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	9.046.106.089.582	13.648.925.389.888
Pinjaman Proyek dari Multilateral	5.246.144.127.735	7.995.635.711.316
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Eksport	4.188.783.993.385	3.972.357.132.656
Pinjaman Proyek Lainnya	-	203.227.477.230
Jumlah Pinjaman Proyek	18.481.034.210.702	25.820.145.711.090

Dengan demikian, Pinjaman Proyek TA 2011 lebih kecil Rp7.339.111.500.388 atau 28,42 persen dibandingkan TA 2010.

D.2.22. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan
Pengembalian
Penerusan Pinjaman
sebesar Rp8.61 triliun

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2011 sebesar Rp8.608.845.495.456 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	1.334.486.195.806	57.831.271.296
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	7.274.358.299.860	482.024
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	8.608.845.495.456	57.631.763.320

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2011 lebih besar Rp8.551.213.732.136 atau 14.837,68 persen dari TA 2010.

D.2.23. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rp89.889.
892 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2011 adalah sebesar Rp89.889.447.737.085 yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional	2.617.700.000.000	1.000.000.000.000
Pelunasan Surat Perbandaran Negara	38.045.000.000.000	24.700.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	49.174.159.351.085	49.025.829.689.752
Pelunasan SBSN	52.588.386.000	2.805.790.002.000
Jumlah Pembiayaan Dalam Negeri	89.889.447.737.085	77.531.619.691.752

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit)

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2011 lebih besar Rp12.357.828.045.333 atau 15,94 persen dibandingkan TA 2010.

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar Rp47,32
triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2011 sebesar Rp47.322.502.478.271 merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Pinjaman Program	9.429.608.883.864	8.960.958.742.350
Pinjaman Projek	37.892.893.584.407	41.671.672.839.486
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	47.322.502.478.271	50.632.531.581.836

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2011 lebih kecil Rp3.310.029.103.565 atau 6,54 persen dibandingkan dengan TA 2010.

D.2.25. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/Investasi
Pemerintah sebesar
Rp19,20 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. PMN/Investasi Pemerintah dalam TA 2011 adalah sebesar Rp19.200.357.712.264, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	8.240.874.519.422	4.038.500.000.000
Penyertaan Modal Negara untuk Badan Internasional	611.283.192.842	-
Penyertaan Modal Negara Lainnya	100.000.000	2.000.100.000.000
Investasi Pemerintah untuk BLU PIP	2.676.500.000.000	8.427.500.000.000
Dana Bergulir	7.671.600.000.000	5.333.049.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	19.200.357.712.264	19.799.149.000.000

Dengan demikian, PMN/Investasi Pemerintah TA 2011 lebih kecil Rp598.791.287.736 atau 3,02 persen dari TA 2010.

D.2.26. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman
sebesar Rp4,22 triliun

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2011 adalah sebesar Rp4.223.841.471.298. Jumlah tersebut lebih kecil Rp4.562.553.879.710 atau 51,93 persen dibandingkan dengan TA 2010 sebesar Rp8.786.395.351.008.

Dengan Anus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp131.392.395.224.420 dan defisit anggaran sebesar Rp84.843.018.715.609, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2011 sebesar Rp46.549.376.508.811.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN**

*Kenaikan Kas dari
Aktivitas
Nonanggaran sebesar
Rp1,31 triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2011, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp1.313.542.615.553, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	1.081.050.588.567	619.814.108.170
PK (Pre-financing) (Neto)	-	(34.367.584.001)
Kiriman Uang (Neto)	12.817.535.129	2.110.479.145.563
Transito (Neto)	219.674.491.857	231.461.078.546
Arus Kas Bersih	1.313.542.615.553	2.927.386.748.278

Dengan demikian, Arus Keluar Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2011 lebih kecil Rp1.613.844.132.725 atau 55,13 persen dari TA 2010.

D.2.27. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

*PK (Neto) sebesar
Rp1,08 triliun*

Perhitungan Fihak Ketiga (PK) dalam TA 2011 sebesar Rp1.081.050.588.567 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SPD) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya, serta penerimaan dan pengeluaran karena kesalahan rekening pihak ketiga. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PK pada TA 2011 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
PK terkait Pengakuan Utang PK		
Penerimaan		
Penerimaan PK 10% Gaji	16.206.213.608.950	14.364.213.100.694
Penerimaan PK 2% Gaji Terusan	4.188.354.645	2.603.737.080
Penerimaan PK Beras BULOG	221.958.477.499	194.517.894.374
Penerimaan PK 2% Penda	2.188.134.244.756	1.957.723.651.041
Penerimaan PK Penutupan Rekening	0	538
Penerimaan PK Lain-lain	382.182.686.930	380.422.971.142
Jumlah Penerimaan PK	19.002.577.373.781	16.899.461.354.878
Pengeluaran		
Pengembalian Penerimaan PK 10% Gaji	(16.122.609.531.270)	(13.748.824.194.032)
Pengembalian Penerimaan PK 2% Gaji Terusan	(3.131.896.112)	(6.197.747.721)
Pengembalian Penerimaan PK Beras BULOG	(202.664.679.214)	(198.652.974.400)
Pengembalian Penerimaan PK 2% Penda	(2.112.561.113.844)	(1.914.952.896.918)
Pengembalian Penerimaan PK Lain-lain	(390.528.377.554)	(383.707.083.883)
Jumlah Pengeluaran PK	(18.830.686.796.994)	(16.230.134.996.754)
Jumlah PK terkait Pengakuan Utang PK (Neto)	171.680.576.787	669.345.458.124
PK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur		
Penerimaan Non Anggaran PK karena Kesalahan Rekening	5.156.956.594.762	303.806.199.164
Pengeluaran Non Anggaran PK karena Kesalahan Rekening	(4.247.606.582.962)	(353.338.649.118)
Jumlah PK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur (Neto)	809.360.011.780	(48.532.348.954)
PK (Neto)	1.081.050.588.567	619.814.108.170

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (*Audit/ea*)

Dengan demikian, Perhitungan Pihak Ketiga (PK) dalam TA 2011 lebih besar Rp461.236.480.397 atau 74,42 persen dari TA 2010.

Jumlah PK terkait Pengakuan Utang PK (Neto) sebesar positif Rp171.690.576.787 menjadi perhitungan penambahan saldo Utang PK pada Neraca. Sedangkan jumlah PK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur (Neto) sebesar positif Rp909.360.011.780 menjadi perhitungan penambahan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Neraca.

D.2.28. PFK *Prefinancing* dan PFK Lainnya

PK Prefinancing sebesar Rp0

PK Prefinancing dan PFK Lainnya merupakan transaksi yang dilakukan BUN berupa *prefinancing* (pembentukan pendahuluan), penerimaan/pengembalian dana talangan, dan pembayaran rekening khusus kosong (reksus kosong). Dalam TA 2011 tidak terdapat transaksi PFK Prefinancing dan PFK Lainnya, sedangkan pada TA 2010 sebesar minus Rp34.367.584.001, yang berasal dari Pembayaran dari Rekening BUN ke Reksus Kosong.

D.2.29. Kiriman Uang

Kiriman Uang sebesar Rp12.82 miliar

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2011 sebesar Rp12.817.535.129 antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan sebagai Kuasa BUN dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2011 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan adanya transaksi kiriman uang antar rekening pada akhir tahun, belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, dan ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Urutan	TA 2011 (Audit/ea)	TA 2010 (Audit/ea)
Penerimaan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Penerimaan Kiriman Uang	1.614.190.734.757.419	1.325.869.913.002.688
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	2.610.402.584.608.159	1.838.812.447.284.623
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	7.707.811.003.417	422.938.867.167
Penerimaan Pemindahbukuan	1.226.031.858.891.404	563.561.129.420.368
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	3.194.863.328.067.827	2.430.648.501.857.462
Kuriski Pengeluaran Pemindahbukuan	78.142.502.443	300.188.447.031
Jumlah Penerimaan KU	8.647.074.461.250.749	6.547.635.116.989.339
Pengeluaran Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Pengeluaran Kiriman Uang	(1.614.187.903.052.304)	(1.325.868.446.857.022)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	(2.610.420.628.956.605)	(1.836.821.363.734.337)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	(7.674.627.347.317)	(169.533.624.894)
Pengeluaran Pemindahbukuan	(1.220.037.708.442.162)	(951.564.706.149.508)
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	(3.194.863.328.067.817)	(2.430.648.501.857.463)
Kuriski Penerimaan Pemindahbukuan	(77.846.827.425)	(301.086.540.642)
Jumlah Pengeluaran KU	(8.647.081.843.715.820)	(6.545.574.637.793.778)
Jumlah KU (Netto)	12.817.535.129	2.110.479.145.863

Dengan demikian, KU masuk neto dalam TA 2011 lebih kecil Rp2.097.681.610.434 atau 99,39 persen dari TA 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)**D.2.30. Transito**

*Transito Rp219.674.491.857
miliar*

Transito (Neto) TA 2011 sebesar Rp219.674.491.857 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Bulan	TA 2011 (Audited)	TA 2010 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah	16.851.328.468.000	14.615.756.922.810
Penerimaan Pengembalian UP Dana PHLN	191.628.475.969	180.924.620.174
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNBP (Swadaya)	1.088.585.569.045	800.285.940.550
Penerimaan Pengembalian UP TAYL	530.569.235.964	921.474.659.792
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak	490.558.929	75.345.533
Jumlah Penerimaan Transito	18.662.621.307.827	16.518.516.479.799
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana Rupiah	(17.109.180.321.510)	(15.292.756.972.416)
Pengeluaran UP Dana PHLN	(190.387.646.486)	(183.710.889.707)
Pengeluaran UP Pengguna PNBP (Swadaya)	(1.164.453.438.445)	(823.849.322.851)
Pengeluaran Pengembalian Setoran Sisa UPTUP TAYL	21.774.580.470	13.660.763.720
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	(510.000.000)	(400.000.000)
Jumlah Pengeluaran Transito	(18.442.946.815.376)	(16.287.055.481.253)
Jumlah Transito (Neto)	219.674.491.857	23.146.078.546

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2011 lebih kecil Rp11.786.586.689 atau 5,09 persen dari TA 2010.

PRASIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DAFTAR

Lif. 1. 6

LAPORAN REALISASI KUNCIERAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN BUDBUDAN 2011 DAN 2012
[dalam rupiah]

ESTATE PLANNING FOR THE RETIRED COUPLE

גָּמְלֵן

Taf. 1. 4

LAPORAN REALISASI ANGARAN PEMERINTAH PADA TAHUN PUSAT
TAHUN BUDBUDAN 2011 DAN 2012
[Lembaran 1]

JOURNAL

Lif. 1. 6

LAPORAN REALISASI KUNGGULAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN AKADEMİK 2011 DAN 2012
[dalam rupee]

卷之三

1. 6

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN BUDBUDAN 2011 DAN 2012
[dalam juta]

REVIEWS OF BOOKS

לטראות

1.4

LAPORAN REALISASI KUNGGULAN PENDIDAKATAN PANCAS UTAM PUAT TAHUN AKADEMIK 2011 DAN 2012
[Jalur upiah]

Digitized by srujanika@gmail.com

11

LAPORAN REALISASI KINERJA RAN PENGETAHUAN PUSAT
TAHUN KUBBURN 2011 DAN 2012
[Lanjutkan halaman]

卷之三

LAPORAN REALISASI KUNJUNGAN PENILAIAN PENCERITAHAN PUSAT
TAHUN AKADEMIK 2011 DAN 2012
Ideas in English

גָּמְנִיתָן

Lif. 1. 6

**LAPORAN REALISASI KUNCIERAH PEMERINTAH PUSAT
TAHUN BUDBUDAN 2011 DAN 2012**
[Jelang nupisah]

卷之三

LAPORAN REALISASI KUNJEL RAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN BUDGETAN 2011 DAN 2012
Isteban Iupiash

[Page 104]

Fig. 1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN BUDBUDAN 2011 DAN 2012
[dalam juta]

REVIEWS OF BOOKS

၁၇၅

235.3. 1.6

LAPORAN REALISASI KUNGGULAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN AKADEMİK 2011 DAN 2012
[dalam rupiah]

ג' ינואר

Fig. 1.4

LAPORAN REALISASI ANGARAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN BUDBUDAN 2011 DAN 2012
[Lembaran 1]

JOURNAL

1.6

LAPORAN REALISASI KINERJA RAH PENDIDAKAN POMPA UTAH PU5AT
TAHUN AKADEMIK 2011 DAN 2012
[dalam jumlah]

Ergonomics in Design, Vol. 21, No. 1, March 2010, 1–11. © 2010 Taylor & Francis

www.djpp.depdukham.go.id

ג'נ'ז'ה

**RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
A	BUMN Perbankan	
1	PT. Bank Bukopin	22.537.414.557,42
2	PT. Bank Mandiri	1.688.383.780.000,00
3	PT. Bank Nagara Indonesia	738.289.011.872,50
4	PT. Bank Rakyat Indonesia	980.580.000.000,00
5	PT. Bank Tabungan Negara	198.200.385.540,00
	JUMLAH DIVIDEN BUMN PERBANKAN	3.827.944.571.989,92
B	BUMN NON PERBANKAN	
1	Perum Jambirindu	29.877.778.000,00
2	Perum Pegarindian	878.889.612.191,00
3	Perum Perumnas	800.000.000,00
4	Peruri Peruri	60.000.000.000,00
5	PT. Adhi Karya	28.710.000.000,00
6	PT. Aneka Tambang	438.402.000.000,00
7	PT. Angkasa Pura I	122.799.940.000,00
8	PT. Angkasa Pura II	436.112.126.213,00
9	PT. ASDP	14.425.305.000,00
10	PT. ASEI	14.436.450.000,00
11	PT. Balai Pustaka	300.000.000,00
12	PT. Bhanda Ghara Raksa	3.079.813.139,00
13	PT. Bio Farma	24.567.251.500,00
14	PT. Biro Klasifikasi Indonesia	7.244.871.025,00
15	PT. Bukit Asam	838.674.325.125,00
16	PT. Dahanu	5.944.000.000,00
17	PT. Erzapuri Indonesia	1.761.137.250.000,00
18	PT. Indosat	48.248.018.750,00
19	PT. Inhutani	5.300.000.000,00
20	PT. Inhutani V	20.000.000,00
21	PT. INTI	458.569.151,00
22	PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung	8.255.808.370,50
23	PT. Jasa Marga	503.078.702.408,00
24	PT. Jasa Raharja	304.492.000.000,00
25	PT. Jasindo	38.850.324.400,00

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
26	PT. Kawasan Berikat Nusantara	10.627.784.434,00
27	PT. Kawasan Industri Makassar	356.262.112,00
28	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	284.482.692,00
29	PT. KIM	1.348.188.085,00
30	PT. Kimia Farma	41.858.500.000,00
31	PT. Kliring Berjangka Indonesia	10.337.089.272,00
32	PT. Krakatau Steel	75.720.000.000,00
33	PT. LEN Industri	2.750.213.864,00
34	PT. Pelabuhan Indonesia I	28.139.591.000,00
35	PT. Pelabuhan Indonesia II	525.279.509.000,00
36	PT. Pelabuhan Indonesia III	224.219.482.000,00
37	PT. Pelabuhan Indonesia IV	55.087.383.000,00
38	PT. Pembangunan Perumahan	35.884.151.718,00
39	PT. Pengembangan Pariwisata Bali	10.016.728.218,00
40	PT. Perkebunan Nusantara II	800.000.000,00
41	PT. Perkebunan Nusantara III	284.304.741.340,00
42	PT. Perkebunan Nusantara IV	217.107.566.539,00
43	PT. Perkebunan Nusantara IX	25.018.120.379,31
44	PT. Perkebunan Nusantara V	68.312.383.172,01
45	PT. Perkebunan Nusantara VI	48.399.825.120,00
46	PT. Perkebunan Nusantara VII	75.973.160.102,00
47	PT. Perkebunan Nusantara VIII	28.243.395.702,00
48	PT. Perkebunan Nusantara X	27.156.410.428,00
49	PT. Perkebunan Nusantara XI	8.030.021.197,00
50	PT. Perkebunan Nusantara XII	20.199.006.644,90
51	PT. Perkebunan Nusantara XIII	50.629.490.000,00
52	PT. Permodalan Nasional Madani	2.067.000.000,00
53	PT. Persero Batam	85.885.000,00
54	PT. Pertamina	5.623.103.550.000,00
55	PT. Pertami	4.179.187.952,00
56	PT. Perusahaan Gas Negara	2.141.920.001.443,72
57	PT. Perusahaan Pengelola Aset	24.394.757.376,00
58	PT. PLN	4.545.000.000.000,00
59	PT. Pupuk Sriwidjaya	588.257.000.000,00
60	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	21.366.216.000,00
61	PT. Rekayasa Industri	192.196.900,00
62	PT. Surya Hyang Seri	4.317.284.530,66
64	PT. Semen Baturaja	50.182.161.252,42
65	PT. Semen Grasik	751.098.836.530,00

LAPORAN KOGAB BUMN PEMERINTAH PADA TAHUN 2011 (ANGGARAN)

DAFTAR 1.B

**RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
66	PT. Socfin Indonesia	101.807.134.500,00
67	PT. Sucotinda	1.908.884.698,00
68	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut	7.853.182.866,00
69	PT. Surveyor Indonesia	8.707.635.143,00
70	PT. Telkom	3.058.198.803.758,28
71	PT. Timah	308.079.200.000,00
72	PT. Wijaya Karya	68.336.000.000,00
73	PT. Yodya Karya	218.878.408,00
JUMLAH DIVIDEN BUMN NON PERBANKAN		24.556.028.554.628,80
JUMLAH SELURUHNYA		28.183.973.126.598,70

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN ESelon I
TAHUN & MIGRASI 2011**
(dalam rupiah R)

KODE BA ESelon I	BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DILAKUKAN DI BANKNI AGGREGATI
001	RAHASIA PEMERINTAH DAN RAKYAT	411.11.1540.000	320.190.132.487	321.500.437	320.906.304.291	301.383.372.711
1	SEBELAH KIRI ESELON I	56.505.050.000	6.26.58.1.515	6.233.710	5.122.357.015	1.182.649.955
2	KE-2	32.126.201.000	7.51.327.15.2.77	7.51.326.2.7	7.51.326.2.7	7.51.326.2.7
003	DEWAN PEMERINTAH RAKYAT	2.441.44.134.000	1.397.548.941.921	14.331.68.2.20	1.342.916.293.701	1013.167.340.291
1	SEBELAH KIRI ESELON I	326.352.158.000	325.616.21.7.51	325.616.21.7.51	325.616.21.7.51	325.616.21.7.51
2	KE-2	1.481.135.158.000	1.416.52.15.2.44	1.416.52.15.2.44	1.416.52.15.2.44	1.416.52.15.2.44
004	BADAN PEMERINTAH KECAMATAN	2.821.103.153.000	2.101.633.166.319	17.591.1.37.2.14	2.107.267.021.011	1.932.130.103.851
1	SEBELAH KIRI ESELON I	325.831.825.000	6.4.554.35.1.25	7.5.347.67.0	6.07.457.31.105	493.17.901.7.25
2	KE-2	152.261.310.000	145.226.304.70	145.226.304.70	145.226.304.70	145.226.304.70
005	MAMAKAHAN ADUANG	6.056.3.01.100	4.240.631.550.013	5.611.106.748	4.339.901.351.325	1.132.142.543.671
1	KE-2	3.028.111.000	3.038.9.1.14.5.01	3.038.9.1.14.5.01	3.038.9.1.14.5.01	3.038.9.1.14.5.01
2	KE-2	3.028.111.000	3.028.111.000	3.028.111.000	3.028.111.000	3.028.111.000
3	PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN PENDIDIKAN DAN KERJA	140.76.810.000	101.745.12.2.70	851.19.8.76	7.17.138.78.192	4.6.557.40.106
4	LEMBARAN	39.019.100.000	61.141.30.1.16	7.14.19.9.1	51.142.20.165	1.5.349.828.002
5	DIREKTORAT JENDERAL DILAKUKAN PADA PEMERINTAH DAERAH	2.43.7.3.3.4.7	3.2.20.7.0	1.2.26.7.0	1.1.21.15.1.23.3	1.1.21.15.1.23.3
6	HAKIM PADA PENGADILAN MILITER DAN PENGADILAN MILITER KERJA SAMA	62.6.1.17.5.140	494.111.6.1.147	51.122.6.1.147	47.111.6.1.147	47.111.6.1.147
7	DILAKUKAN PADA PENGADILAN MILITER KERJA SAMA	35.100.000.000	2.2.85.9.95.5.0	2.2.85.9.95.5.0	2.2.85.9.95.5.0	14.11.8.35.7.8
8	KEJARIAN KEDUGA	2.381.153.156.100	3.312.160.12.95.6.17	1.047.0.05.4.35	3.311.318.95.117	465.39.126.5.17
9	KE-JENAZAH JASA SOS	2.340.52.150.000	1.1.2.34.9.2.2	1.1.2.34.9.2.2	1.1.2.34.9.2.2	40.35.2.30.2.17
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.031.149.149.100	1.111.130.9.97.2.70	2.01.150.7.19	1.111.003.93.134	1.027.145.93.134
1	KE-2	1.1.2.34.9.2.2	1.1.2.34.9.2.2	1.1.2.34.9.2.2	1.1.2.34.9.2.2	1.1.2.34.9.2.2
2	SEBELAH KIRI ESELON I	57.559.12.1.00	8.558.552.78	13.145.0.9	14.11.8.35.4.35	14.11.8.35.4.35
3	KE-2	4.01.65.122.6.100	3.1.736.55.680	18.125.3.65	37.148.72.103	37.148.72.103

JN-A-14112

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN DAN ESelon I
TAHUN KALIGARAN 2011
(dalam rupiah)**

KODE BA ESelon I	BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DILASIK BAHAN AKSESORI
1.	SISTEM INFORMASI DEB	133.018.100.000	117.708.115.638	-	22.730.616.858	33.189.571.052
25	ESPP JPK K LTB	32.473.149.000	21.482.124.904	-24.329.300	5.133.004.404	13.141.302.206
36	PENGJUMLAHAN PEGAWAI	16.262.721.000	16.077.521.016	-	44.357.552.6	44.357.552.6
7	PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT	46.204.946.000	31.716.731.055	61.321.734	31.161.709.371	13.173.101.000
28	UNIT KEGIATAN SPESIAL BUDAYA DAN KEBUDAYAAN DAN PEMERINTAHAN U.P.P.P.I	70.351.02.000	47.310.771.327	22.305.161.016	43.771.102.255	33.982.861.542
9	UBAHAN PERMOLEHAN SASSION KEBUTUHAN DPL	5.000.000.000	3.659.713.517	923.132.016	3.347.558.230	33.756.411.570
010	IMPLEMENTASI DINAMIKA MEGAWATI	10.129.143.172.000	13.321.000.977.037	2.314.503.741	12.305.293.309.431	33.400.239.930.644
1	SISTEM INFORMASI KEDILAKUAN	1.136.16.8.2.000	24.250.16.2.008	155.795.652	23.176.434.000	0.3.5.57.0.0.0
22	IMPLEMENTASI RUMAH	38.706.62.7.006	41.365.333.933	47.3.5.78	43.310.53.835	43.7.55.10.0.0
23	IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING	198.941.391.002	145.912.45.1.002	26.340.119	143.552.391.901	13.912.10.14.53
24	IMPLEMENTASI TATA KELOLA	11.652.173.002	4.7.152.394.726	1.012.178.223	41.142.11.313	4.7.152.394.726
75	IMPLEMENTASI SISTEM KASIR DAN KASIR	11.652.011.046.000	9.39.000.000.000	1.4.34.3.4.4	9.38.439.14.16	9.38.439.14.16
36	IMPLEMENTASI ANALOGIKA DPL	21.463.000.000	21.758.00.000	192.753.931	21.175.757.391	11.886
77	IMPLEMENTASI CARA	31.050.032.006	23.322.713.17	592.261.708	216.226.656.326	15.657.586.176
38	IMPLEMENTASI SISTEM PENGETAHUAN	4.546.994.2.604	3.365.113.46.4.0	92.300.01	3.325.160.36.4.1	3.325.160.36.4.1
39	IMPLEMENTASI SISTEM PENGETAHUAN	21.20.000.000	21.20.773.772	38.528.23	52.052.1.619	52.052.1.619
11	HARGA P-MH DILAKUKAN PADA 2012	51.19.100.000	41.861.175.042	1.301.011	47.158.118.161	11.224.461.472
72	IMPLEMENTASI SISTEM DPL	119.58.3.8.000	47.739.751.11	2.253.330	47.706.507.761	13.139.221.619
011	IMPLEMENTASI DINAMIKA MEGAWATI	5.651.16.172.100	4.115.663.53.205	9.612.310.944	4.105.449.59.761	1.163.841.260.731
21	IMPLEMENTASI KEDILAKUAN	4.3.1.291.2.2.008	3.421.7.1.2.005.294	1.054.212.7.2	3.411.1.62.5.2	1.154.955.12.0
22	IMPLEMENTASI CARA	42.080.000.002	31.653.381.619	4.423.3.59	31.330.568.390	15.731.41.810
23	IMPLEMENTASI HARGA	26.101.000.000	24.926.154.17	1.125.111.111	24.541.916.17	1.125.111.111
24	IMPLEMENTASI KEDILAKUAN	55.768.239.000	31.257.833.50	1.3.381.59	31.353.759.121	1.3.377.46.329
35	IMPLEMENTASI CARA	143.652.816.002	28.915.305.240	251.236.185	28.713.265.161	67.270.53.325

JN-A-141/P-2/2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN DAN ESelon I
TAHUN KEGIATAN 2011
(dalam rupiah R)

KODE BA ESelon I	BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DILAKUKAN AGARAN
36	DEBITUR TEGERI PERFORMA STANDING TRANSIP BJI	37.79.78.000	37.81.74.056	41.138.722	51.583.337.309	1.161.657.801
37	UPB (U.P.-JAKSO) JURUM LAY-EN-JAM (TINER/PASU)	39.390.000.000	23.052.521.649	95.201.940	23.151.649.035	1.132.403.942
38	DEBITUR TEGERI PERFORMA STANDING TRANSIP BJI	35.662.257.000	41.613.321.653	7.143.63	41.465.168.926	1.127.751.722
39	DEBITUR TEGERI PERFORMA STANDING TRANSIP BJI	37.457.310.000	37.32.162.673	27.201.956	17.220.829.617	1.142.461.323
40	E5000 PENGETAHUAN CAK PENDER 3412547 3304244	22.432.7.600	7.70.158.092	92.501.27	17.124.657.420	1.122.655.722
41	IMPLEMENTASI PERENCANAAN	50.033.173.531.000	51.360.069.533.453	138.021.143.110	51.201.502.331.353	1.167.713.883.53
42	IMPLEMENTASI PERENCANAAN	4.310.139.346.000	3.11.108.344.000	16.496.572.041	3.10.549.500.421	1.104.511.151.651
43	KETAKSONGAN DAN KONSEP	5.13.15.102.000	3.822.46.217.638	6.39.535.52	5.80.135.527.17	1.121.783.539
44	KETAKSONGAN DAN KONSEP	2.512.541.223.000	2.461.958.492.276	74.401.346.865	2.407.232.644.51	1.107.232.644.51
45	KARYA SISWA	1.126.247.542.000	946.15.220.049	2.394.51.220.049	942.120.220.049	302.040.192.054
46	KARYA SISWA	7.43.167.133.000	8.061.270.56.267	1.157.10.238	8.061.25.16.233	59.157.11.233
47	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	9.211.018.000	0.44.100.69.772.429	80.221.69.34	6.314.340.091.6131	1.103.049.077.038
48	SOPRE WILK X-KODI	1.10.821.182.000	1.35.258.363.158	62.333.253.834	57.755.151.806	1.05.071.151.806
49	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	18.610.000.000	25.760.51.2339	13.201.655	21.342.410.738	1.167.181.762
50	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	39.725.500.000	31.011.223.156	16.84.12.151	91.148.91.4219	1.199.881.4219
51	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	1.6.27.3.68.700	92.0.6.25.597	1.12.061	35.155.21.110	1.147.51.150
52	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	18.441.216.000	17.001.209.454	1.16.31.901.710	11.148.591.618	1.148.591.618
53	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	1.38.169.000.000	34.847.402.17	21.130.71	74.435.51.220	1.127.501.70
54	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	17.421.407.000	33.657.191.160	53.343.718	33.511.114.816	1.15.940.235.74
55	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	28.340.000.000	25.012.13.420	1.5.10.12	21.351.901.000	1.12.981.902
56	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	45.250.000.000	41.41.12.3358	22.08.059	41.155.05.519	1.14.126.21
57	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	21.340.000.000	2.419.46.471	381011	1.14.126.21	1.121.781.700
58	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	36.100.000.000	15.22.702.119	1.331.207.10	7.150.725.509	1.15.921.91
59	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR	17.457.467.497.100	16.175.399.561.451	75.611.446.163	16.100.322.391.721	1.157.332.261.711
60	IMPLEMENTASI KINERJA DAN HAK ASAS INI MUSIAR					

JN-A-1112-2-24

SFT47 2.1

**LAPORAN KEUSAHAANGGARAN PEMERINTAH PUSAT
MENURUT DAERAH ESELON I
TAHUN BUDGET 2011**

KODE BAI ESBELTU	BAGAN ANGGARAN & ESBELTU	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS INI BAWAH AMGRABAJU	
						00504-257-81	00504-257-81
1.	SEPERENDEK-ENDEKA	5.210.554.200,000	3.861.871.782.128	8.702.165,00	3.861.773.001,19	3.111.311.700,00	6.122.660.000,00
2.	MEWAH UNTUK MANGKU	1.72.040.000,000	9.151.942.213	31.000.000,00	9.151.942.213	14.140.571.181	6.255.875.000,00
3.	01.10.5.361.711	1.23.159.257.000	4.755.53.123	325.000,000	4.755.53.123	5.367.640.172.226	3.645.640.000,00
4.	01.10.4.PAP.BE	5.235.615.257.000	3.307.013.295.810	1.427.000,000	3.307.013.295.810	3.295.609.000,00	3.043.209.591.182
5.	01.10.4.PAP.BD.CUR.01	1.22.750.139.000	735.641.14.511	1.427.000,000	735.641.14.511	1.225.640.000,000	1.211.3.382.810,00
6.	01.10.8.PSP.MENGAJU.KB.W.M.GA	1.82.000.000,000	5.21.753.20	302.81.000	5.21.753.20	1.4.341.20.160	1.4.341.20.160
7.	11.1.HPK.MA.1.651.11.07.5	116.511.000,000	10.419.104,04	41.000,000	10.419.104,04	116.511.000,000	116.511.000,000
8.	01.10.8.PSP.MD.1.651.11.07.5	1.425.419.100.000	305.519.512.519	307.385.159	307.385.159	307.1.000.607.719	307.1.000.607.719
9.	01.10.8.PSP.MD.1.651.11.07.5	3.65.158.000.000	54.8.158.15.700	42.000,000	54.8.158.15.700	54.4.358.15.700	54.4.358.15.700
10.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.39.226.148.000	34.049.44.000	21.30.000	34.049.44.000	1.39.226.148.000	1.39.226.148.000
11.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	4.2.12.16.000	301.3.36.7.40	69.3.36.7.40	301.3.36.7.40	305.11.68.3.7.40	305.11.68.3.7.40
12.	ENDU KEB. MATAI S.I.	15.97.148.40.000	1.148.148.40.000	2.000,000	1.148.148.40.000	3.71.2.000.000,00	3.71.2.000.000,00
13.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	12.7.01.123.810.000	15.81.245.03.31	1.10.105.314	15.81.245.03.31	15.985.808.871.052	15.985.808.871.052
14.	SEPERENDEK-FERENDEK	5.67.701.900.000	401.56.95.154	555.000.000	401.56.95.154	555.000.000	555.000.000
15.	MEWAH UNTUK ABDIK.	5.1.30.0.000.000	91.24.5.45.7.70	75.624.151	91.24.5.45.7.70	91.11.9.16.42.0	91.11.9.16.42.0
16.	01.10.4.PAP.MD.PN.GA	2.26.9.33.61.000	265.5.10.0.00	1.21.10.12.2.1	265.5.10.0.00	265.5.10.0.00	265.5.10.0.00
17.	11.1.HPK.MA.1.651.11.07.5	4.46.65.15.000	342.1.19.141	11.1.19.141	342.1.19.141	4.4.15.6.19.141	4.4.15.6.19.141
18.	01.10.4.PSP.MD.1.651.11.07.5	1.75.10.2.1.000	845.38.55.00.000	133.7.33.3.7	845.38.55.00.000	845.38.55.00.000	845.38.55.00.000
19.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	5.21.754.200.000	703.1.74.78.250	388.76.904	703.1.74.78.250	703.1.74.78.250	703.1.74.78.250
20.	01.10.4.PSP.MD.1.651.11.07.5	5.1.10.0.00.000	301.12.12.14.000	94.12.12.14.000	301.12.12.14.000	301.12.12.14.000	301.12.12.14.000
21.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.1.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
22.	01.10.4.PSP.MD.1.651.11.07.5	5.1.10.2.1.000	201.4.15.1.0.0.02	100.4.15.1.0.0.02	201.4.15.1.0.0.02	201.4.15.1.0.0.02	201.4.15.1.0.0.02
23.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
24.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
25.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
26.	SEPERENDEK-FERENDEK	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
27.	MEWAH UNTUK ABDIK.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
28.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
29.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
30.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
31.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
32.	SEPERENDEK-FERENDEK	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
33.	MEWAH UNTUK ABDIK.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
34.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
35.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
36.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
37.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
38.	SEPERENDEK-FERENDEK	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
39.	MEWAH UNTUK ABDIK.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
40.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
41.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
42.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
43.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
44.	SEPERENDEK-FERENDEK	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
45.	MEWAH UNTUK ABDIK.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
46.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
47.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
48.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
49.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
50.	SEPERENDEK-FERENDEK	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
51.	MEWAH UNTUK ABDIK.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
52.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
53.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
54.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
55.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
56.	SEPERENDEK-FERENDEK	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
57.	MEWAH UNTUK ABDIK.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
58.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
59.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
60.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
61.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
62.	SEPERENDEK-FERENDEK	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
63.	MEWAH UNTUK ABDIK.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
64.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
65.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
66.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
67.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
68.	SEPERENDEK-FERENDEK	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
69.	MEWAH UNTUK ABDIK.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
70.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
71.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
72.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
73.	IMPLEMENTASI PERTANIAN	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
74.	SEPERENDEK-FERENDEK	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
75.	MEWAH UNTUK ABDIK.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
76.	BAJU PANGGAMA SAKA WILAYAH LAMONGAN KAB. KEDIRI	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
77.	GUDU PENGARAH DILAKUKAN TEGAL	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000
78.	ENDU KEB. MATAI S.I.	1.10.10.2.1.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000	100.1.1.0.0.000

四二

۲۷۷

**KEGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
UT BA DAN ES ELCH I
JANGGAHAN 2011**
Jazilam nufia k

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN ESelon I
TAHUN BUDAYA 2011
(dalam rupiah R)**

KODE BA ESelon I	BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DILAKUKAN DI BANK BNI AGGREGATI
1	SISTEM INFORMASI	457.036.200.000	345.450.153.10	35.335.670	311.117.250.905	357.833.777.025
2	KOPERASI DAN BUMN	5.01.030.000	4.251.463.140	-24.32.192	4.226.742.162	421.259.461.925
3	DILIKUH BUDAYA DAN KULTUR	2.17.265.187.000	20.1.623.530.005	36.328.117	201.325.066.886	1.01.70.513.322
4	PERENCANAAN DAN KINERJA	7.15.000.000	6.607.323.328.55	923.515.755	6.697.337.751.55	375.175.651.55
5	DILIKUH BUDAYA DAN KULTUR	5.150.208.700.000	4.912.673.30.550	5.422.700.01	4.924.359.15.317	405.939.66.050
6	DILIKUH BUDAYA DAN KULTUR	4.15.512.21.000	3.662.208.172.7	52.261.720	3.683.433.224.182	1.265.316.653.316
7	PERENCANAAN DAN KINERJA	1.16.341.400.000	111.261.16.000	111.261.16.000	111.261.16.000	1.16.341.400.000
8	PERENCANAAN DAN KINERJA	2.741.585.500.000	2.361.3.7.5.051	221.3.6.27	2.361.10.056.827	215.770.881.79
9	DEPARTEMEN PERIODIK KANTORASIAL	17.701.059.000.000	61.927.296.231.750	166.111.20.746	61.000.513.704.454	6.630.430.238.531
10	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	1.25.489.159.000	1.425.30.912	1.425.30.912	1.425.30.912	1.425.30.912
11	INSTIUTUT STATAUTI	2.10.500.000.000	31.338.78.052	2.397.217.06	28.941.516.906	487.25.16.571
12	LEMBAGA PENGETAHUAN DAN KINERJA	1.11.000.000.000	1.1.61.946.5.200	2.301.546.39	1.1.61.946.39	1.1.61.946.39
13	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	3.1.50.771.362.000	3.1.50.771.362.00	3.1.50.771.362.00	3.1.50.771.362.00	3.1.50.771.362.00
14	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	3.11.00.771.13.000	3.12.33.53.7.000	25.381.15.17	3.12.33.53.7.000	3.12.33.53.7.000
15	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	1.11.91.365.900.000	1.11.91.365.900.000	1.11.91.365.900.000	1.11.91.365.900.000	1.11.91.365.900.000
16	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	2.4.51.17.62.000	2.2.761.1.88.73.058	22.761.1.88.73.058	22.761.1.88.73.058	22.761.1.88.73.058
17	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	1.8.61.2.30.000	1.8.61.2.30.000	1.8.61.2.30.000	1.8.61.2.30.000	1.8.61.2.30.000
18	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	3.518.555.175.000	3.8.45.1.51.5.40	2.0.03.315.94.70	3.8.45.1.51.5.40	3.8.45.1.51.5.40
19	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	79.407.738.800.000	26.657.936.382.438	50.931.948.919	26.657.936.382.438	26.657.936.382.438
20	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	2.5.22.100.000.000	2.441.16.02.28.160	6.391.242.100	2.441.16.02.28.160	2.441.16.02.28.160
21	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	26.550.000.000	22.650.000.000	1.93.21.00.000	22.650.000.000	22.650.000.000
22	INSTIUTUT STATAUTI	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000
23	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	1.11.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000
24	DEPARTEMEN KINERJA DAN KINERJA	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000	1.1.00.00.000.000
25	INSTIUTUT STATAUTI	17.10.00.000.000	17.10.00.000.000	17.10.00.000.000	17.10.00.000.000	17.10.00.000.000

www.618361985.com

**LAPORAN REALISASI BANTUAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2011**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN BUDAYA DAN ESILON I
(dalam rupiah R)**

KODE BA ESILON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DILAKUKAN DI BAHANH AGGREGAT
027	DEPARTEMEN SOSIAL	4,111,627,352,000	3,669,245,556,814	11,111,820,413	3,457,408,531,413	164,183,255,814
1	DEP. KEPER. & KEL. M.	2,019,135,000	2,548,253,139	948,939,110	21,138,236,929	-1,319,038,611
2	INST. TUT. JUDIKAL	23,457,918,000	27,823,155,015	325,22,000	2,581,53,635	1,133,47,385
3	DEP. KEPER. Sosial & Sosial	72,721,815,000	604,510,182,005	6,821,801,592	622,317,738,387	32,007,206,173
4	DEP. KEPER. Sosial & Sosial	755,919,822,000	71,017,465,700	2,934,512,403	754,023,936,512	7,095,631,210
5	DEP. KEPER. Sosial & Sosial	1,158,735,910,000	1,052,454,553,210	2,093,205,617	2,083,150,285,519	13,280,36,711
11	HUKUM & HAM	1,101,112,141,200	1,101,112,141,200	0	1,101,112,141,200	1,101,112,141,200
029	DEPARTEMEN KEDIDUCKAMAAN	5,673,740,552,000	4,093,223,216,000	8,013,504,013	4,056,705,839,701	11,163,917,000,204
1	SPR. KEP. & KEL. M.	411,762,556,000	305,353,412,733	33,361,828	324,343,761,455	10,53,504,025
2	KEPER. UMKM & KEL. M.	36,240,100,000	35,946,401,114	1,392,361,119	44,456,261,114	13,326,191,044
3	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	311,076,631,000	221,620,304,070	30,308,107	221,350,510,669	40,773,11,311
4	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	2,331,014,221,000	2,319,654,284,719	1,000,216,149	2,308,511,828,760	10,000,000,000
5	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	1,378,591,710,000	1,294,050,153,523	1,238,610,004	02,511,715,29	20,625,650,671
6	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	310,701,641,000	312,735,385,654	1,352,437,710	337,735,700,706	121,735,136,706
7	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	641,702,016,000	777,036,302,068	31,836,011	71,136,261,019	64,036,261,015
8	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	233,613,311,000	217,675,383,731	3,301,500	21,159,140,117	1,332,22,636
032	DEPARTEMEN RELATIAN DIL PERILAKU	0,545,110,12,000	5,179,271,910,148	3,671,631,813	5,116,003,371,347	123,370,772,814
1	SOPER. KEP. & KEL. M.	1,08,821,190,000	92,021,025,2316	33,55,89,551	92,311,51,561,760	1,520,183,200
2	KEPER. KEL. M.	11,130,010,000	11,130,010,000	10,337,761	51,130,010,011	3,135,761,011
3	KEPER. KEL. M.	1,240,012,24,200	1,240,012,24,200	91,1,240,012,24	1,240,012,24,200	1,24,012,24,200
4	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	1,129,614,53,000	1,012,41,163,551	11,129,614,52	0,125,125,125	16,129,614,52
5	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	457,010,000,000	3,221,756,1379	43,30,1860	1,221,756,1379	12,120,000,000
6	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	315,55,000,000	2,730,821,180	5,2,700,821	37,157,380,805	82,728,47,315
7	DEP. KEPER. UMKM & KEL. M.	325,623,000,000	632,315,244,073	2,325,623,000	632,136,244,073	63,256,623,000

JN-A-1112-245

NFT#728

**KEGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
UT BA DAN ESLOH I
JANGGAHAN 2011**

**LAPORAN REALISASI BUDGET PADA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN ANGGARAN DAN ESelon I
TAHUN KALIGARAN 2011
(dalam rupiah)**

KODE BA ESelon I	BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DILAKUKAN DI BANK BNI AGGREGATI
36	DEPARTemen PERENCANAAN	562.100.000.000	507.478.865.571	33.531.810	511.165.826.661	91.811.631.336
10	EJECUTIF, PENGETAHUAN SAINS DAN TEKNOLOGI JCN - DEPARTEMEN	110.341.063.000	231.516.391.150	-28.501.024	231.345.491.024	64.949.471.404
041	DEPARTEMEN BADAN URAPAN MULIA (BUPRA)	141.941.15.000	112.331.247.473	2.013.108.512	100.380.771.301	34.571.422.104
-1	DEPARTEMEN KINERJA RUMAH DAN KEGIATAN	146.751.105.000	111.023.522.477	2.061.409.832	93.959.772.701	34.271.451.771
042	DEPARTEMEN RISTEK DAN TEKNOLOGI	671.301.615.000	133.101.815.198	2.911.031.111	130.180.381.017	40.305.230.932
-1	DEPARTEMEN RISTEK DAN TEKNOLOGI	539.352.617.000	632.315.125.128	2.832.332.3	63.160.338.077	45.222.238.832
043	DEPARTEMEN KINERJA RUMAH DAN KEGIATAN HICUP	974.319.017.000	910.139.437.167	131.172.440	919.053.791.427	111.053.310.111
-1	DEPARTEMEN KINERJA RUMAH DAN KEGIATAN HICUP	518.007.000	822.337.473.012	13.253.867.0	855.153.730.125	5.855.153.679
044	DEPARTEMEN KEPRESIDIAN UIN ■■■	1.015.669.566.000	132.325.255.238	34.511.75	93.248.331.454	73.421.321.531
-1	KEPRESIDIAN DAN KINERJA UIN ■■■	1.15.616.216.000	935.252.305.159	24.5.31.72	915.246.351.404	11.141.322.516
047	DEPARTEMEN PEMERDIDAYAN DAN PEREKRUITAMAN PEMERINTAHAN DAN KINERJA	161.547.075.000	157.110.670.718	1.045.130.011	156.005.510.993	15.501.076.133
-1	DEPARTEMEN PEMERDIDAYAN DAN PEREKRUITAMAN PEMERINTAHAN DAN KINERJA	151.941.570.000	141.131.9.41	1.165.500.019	95.258.461.151	10.158.125.114
048	DEPARTEMEN PEMERDIDAYAN DAN PEREKRUITAMAN PEMERINTAHAN DAN KINERJA	154.370.14.000	94.110.12.139	1.144.130.73	93.410.074.001	80.105.020.081
-1	DEPARTEMEN PEMERDIDAYAN DAN PEREKRUITAMAN PEMERINTAHAN DAN KINERJA	155.370.14.000	94.550.12.636	1.14.137.734	93.416.074.902	85.964.074.902
050	BANDAR INTERNASIONAL	1.323.009.943.000	1.197.737.390.008	13.151.912	1.397.774.731.024	20.328.201.974
-1	BANDAR INTERNASIONAL	1.33.10.161.300	29.87.394.556	37.138.62	29.87.394.556	15.335.201.936
051	LEMBAGA SAMEDI NEGARA	74.043.943.000	72.191.030.113	1.931.920.113	719.161.721.054	31.471.801.311
-1	LEMBAGA SAMEDI NEGARA	750.568.563.000	721.027.38.167	1.935.355.69	31.161.721.067	31.161.721.067
052	DEPARTEMEN KETUA INTERNASIONAL	31.371.79.000	36.182.241.138	73.481.970	36.270.751.113	11.100.955.581
-1	DEPARTEMEN KETUA INTERNASIONAL	31.371.79.000	35.731.65.149	2.481.12.30	35.731.65.149	11.100.955.581
054	BADAN PUSAT STATistik	2.284.149.949.100	2.082.000.320.007	511.086.114	2.402.240.089.103	187.751.310.005
-1	BADAN PUSAT STATistik	2.34.40.129.000	2.34.00.129.000	31.367.18	2.34.00.129.000	10.761.21.951
055	DEPARTEMEN PRABAPERINAS	711.745.10.000	563.573.838.111	1.241.13.75	52.000.533.955	1174.115.185.011
-1	DEPARTEMEN PRABAPERINAS	716.30.00.000	543.37.264.101	1.257.149.735	54.250.264.339	114.615.165.641

LAPORAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN ANGGARAN & ESELON I
TAHUN BUDAYA 2011
(dalam rupiah R)

LAPORAN KELUARGA PENDUDUK TAHUN 2011

KODE BAGAN ANGGARAN & ESELON I	BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DITAS DI BAWAH AGGREGATI
056 BAGAN PERITAHBAN MUSIKAL	3.654.403.143.000	2.461.771.208.531	3.611.084.137	2.457.388.114.000	1.137.304.025.601	
-1 E-JUKE PENYARAHAN & KONTROL	1.150.401.143.000	2.601.117.403.121	2.918.384.21	2.458.459.114.400	1.035.412.810	
097 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	431.049.310.000	401.156.360.109	111.541.219	401.850.315.731	301.591.994.271	
-1 PERPUSTAKAAN YANG LAIN	451.000.000	401.005.552.549	35.507.110	401.507.551.730	37.007.501.570	
059 DEPARTEMEN KOMunikasi DAN INfOrmatika	3.491.003.838.100	2.147.916.167.98	9.211.207.118	2.142.124.911.121	11.043.916.211	
-1 SBePENRUM, E-KERJA	1.171.738.100	85.652.221.77	31.821.310	85.568.661.7	Q3.570.000.833	
-2 KINEMA DAN KULTUREL	1.043.100.000	5.941.741.00	1.361.121	1.311.941.50	1.161.941.50	
-3 DILOGO, DODA, TOL, SUMBER DAYA	750.190.00.000	8.1.036.10.33.0	2.028.512.00	811.127.380.0.5	74.512.500.0.5	
-7 DITJEN APRIL 63 F PM C156	128.190.248.000	64.376.225.003	21.32.0	54.83.314.285	24.05.433.102	
-5 DITJEN BUDI PENGETAHUAN DAN KETAMADUAN	1.10.109.109.109	30.109.104.11	24.2.31.130	30.109.104.11	Q3.121.204.061	
-6 DODA, DILOGO, DODA, TOL, SUMBER DAYA DAN KINEMA	1.50.118.652.000	1.1.10.55.110	155.26.16.11	1.1.10.55.110	1.1.10.55.110	
-7 HAM, KINEMA DAN KULTUREL	1.50.118.652.000	1.1.10.55.110	1.1.10.55.110	1.1.10.55.110	Q3.121.204.061	
000 DEPARTEMEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	31.201.140.000.100	34.157.046.181.037	12.011.145.010	34.157.046.181.037	3.135.307.370.021	
-1 KEPRI SINGKAPAN REPUBLIK INDONESIA	31.201.140.000.100	34.157.046.181.037	62.395.118.16	34.157.046.181.037	3.3.31.2.27.31	
062 BAGAN SPESIALNAS DAN MANKINDRI	924.000.000.000	370.172.329.418	31.110.090.711	304.322.231.171	109.3.177.70.222	
-1 BAGAN SPESIALNAS DAN MANKINDRI	924.000.000.000	77.152.336.76	5.13.38.6.1	77.152.336.76	16.07.76.233	
064 LEMBAGA KETAHAMAN NASIONAL	733.020.028.000	708.301.903.308	41.347.64.50	707.288.421.131	29.291.198.271	
-1 LEMBAGA KETAHAMAN NUSANTARA, D	1.13.828.028.000	295.321.033.50	33.1.1.5.29	295.321.033.50	33.1.1.5.29	
085 BAGAN KODOMOS PEMERINTAH NUSANTARA	511.893.146.000	457.165.552.831	1.111.9.28.749	456.643.403.433	5.4.1.48.73.561	
-1 BAGAN KALIFUSIUS PEMERINTAH NUSANTARA	511.893.146.000	4.1.1.25.398.015	1.1.2.20.149	4.1.1.25.398.015	0.5.24.9.25.514	
006 BAGAN BANTU THA ASOSIAL	071.046.319.000	770.189.045.214	811.121.019.2	770.189.045.214	106.10.10.46.201	
-1 BAGAN BANTU THA ASOSIAL	071.046.319.000	1.1.10.55.110	1.1.10.55.110	1.1.10.55.110	206.10.10.46.201	
097 DEPARTEMEN PEMBANGUNAN DAERAH TERITAS	1.28.857.157.000	1.113.701.051.515	911.761.91	1.113.701.051.515	149.75.86.265	
-1 DEPARTEMEN PEMBANGUNAN DAERAH TERITAS	1.28.857.157.000	1.1.10.55.110	451.761.91	1.1.10.55.110	245.75.86.265	

JN-A-1112-242

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN DAN ESelon I
TAHUN & MIGRASI 2011**
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS DIL BAHANH AGGREGATI
068	BAKAN KORDON ASIL BERPENGARUH PADA INSTITUSI	2.561.322.067.000	2.356.038.831.581	2.734.855.132	2.353.301.881.565	163.180.024.555
-1	EJAU, KUCHING, SABAH, BERPENGARUH PADA INSTITUSI	2.516.304.167.000	2.415.059.524.957	2.533.341.32	2.415.059.524.957	12.080.024.952
074	IKOMSI NASIONAL HAM ASASI MANUSIA	51.582.255.000	55.115.385.710	211.121.03	55.115.385.710	3.034.431.473
-1	KOMSIL ESTONIA, HAM, 312, HAM, SIC	57.759.518.000	56.565.502.10	237.177.932	56.565.502.10	15.194.103.373
075	BAKAN METEOROLOGI, KIMATOLOGI DAN GEOSISTEKA	1.311.340.132.000	1.103.726.925.789	111.971.314	1.108.959.381.403	103.186.476.991
-1	BADM, METEOROLOGI, KIMATOLOGI DAN GEOSISTEKA	1.172.332.000	1.057.756.225.789	53.210.320	1.057.756.225.789	20.756.717.325
076	BAKAN PEMERINTAH DAERAH	1.081.297.310.000	104.275.223.477	2.111.050.49	104.275.223.477	141.731.917.323
-1	BAKAN PEMERINTAH DAERAH	1.081.297.310.000	104.275.223.477	2.111.050.49	104.275.223.477	141.731.917.323
077	BAKHAMAHION STUTIUSRI	921.956.16.000	784.775.523.552	3.304.552	784.775.523.552	21.711.571.039
-1	KAKI, 4-1200, 1211, 1211	237.476.521.448	215.941.514	237.111.293.244	215.941.514	50.124.933.151
078	BAKAN PENAPERIT DAN ANALISIS TRAFIK DAN UDARA	251.596.310.000	241.416.321.540	126.281.014	241.416.321.540	42.124.521.144
-1	P-1200, P-1201-1202, P-1203-1204, P-1205-1206, P-1207-1208	211.906.016.000	181.117.533.116	314.501.235	176.622.832.981	50.162.573.111
079	LEMBAGA DAN PEREGULASI INDONESIA	81.743.245.000	48.101.515.706	144.901.011	48.101.515.706	41.652.101.704
-1	PEREGULASI INDONESIA	81.743.245.000	48.101.515.706	144.901.011	48.101.515.706	41.652.101.704
080	BAKAN TEKNOLOGI INOVASI NASIONAL	69.230.020.000	172.198.208.416	713.591.17	171.910.009.231	31.120.972.003
-1	TEKNOLOGI INOVASI NASIONAL	69.230.020.000	172.198.208.416	713.591.17	171.910.009.231	31.120.972.003
081	BAKAN PERENCANAAN DAN KAJIAN TERAPAN TEKNOLOGI	582.311.718.000	1.010.739.847.609	917.571.717	1.001.450.561.610	17.023.031.248
-1	PERENCANAAN DAN KAJIAN TERAPAN TEKNOLOGI	533.761.256.000	1.001.358.473.607	927.571.551	1.001.358.473.607	7.633.651.560
082	LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN AUTARIAH NATIONAL	485.541.154.000	403.513.183.496	134.835.315	403.313.378.191	62.187.293.011
-1	LA-N	425.201.154.000	401.512.183.496	134.835.315	401.512.183.496	62.187.293.011
083	BAKAN KADEMIK SURVEY DAN PERENCANAAN MASDAH	511.141.010.000	137.139.146.556	911.301.17	438.116.751.111	73.012.246.583
-1	PERENCANAAN MASDAH	511.141.010.000	137.139.146.556	911.301.17	438.116.751.111	73.012.246.583
084	BAKAN STANDARISASI NASIONAL	218.151.000	75.18.408.107	111.001.18	74.956.350.561	17.155.731.411
-1	STANDARISASI NASIONAL	218.151.000	75.18.408.107	111.001.18	74.956.350.561	17.155.731.411

JN-A-11/P-24

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN ESelon I
TAHUN ANGGARAN 2011
(dalam rupiah)

KODE BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DILAKUKAN DI BANK BNI
KODE BAGAN ANGGARAN & ESELON II					AGGREGAT
035 BANDA PENGETAHUAN TENDA KUNCI	71.785.000.000	69.132.720.166	61.511.113	69.337.068.334	17.441.381.266
-1 E-JUDI PENGETAHUAN TENDA KUNCI	16.493.461.000	16.942.423.050	61.938.134	55.124.008.345	1.441.491.266
036 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	246.545.072.000	250.332.983.403	211.761.119	250.305.217.074	5.389.745.471
-1 LEmbaga Administrasi Negara	146.370.000.000	147.523.584.377	251.265.510	251.165.711.325	5.610.565.323
037 KEPERLUAN PENGETAHUAN	193.180.945.000	141.148.705.819	411.791.012	140.795.713.827	11.421.576.732
-1 KEPERLUAN PENGETAHUAN	102.182.758.000	91.237.933.018	932.290.000	91.107.933.018	1.127.621.033
038 KEPERLUAN REPUBLIK INDONESIA	474.429.739.000	491.140.739.377	512.174.014	490.594.191.804	23.998.100.189
-1 KEPERLUAN REPUBLIK INDONESIA	474.302.338.000	451.007.310.622	521.120.114	451.006.310.622	21.636.101.122
039 BANDA PENGETAHUAN KERANGGAN DAN PEMBANGUNAN	116.256.813.000	144.379.064.317	4.061.120.113	140.006.334.991	23.739.461.591
-1 BANDA PENGETAHUAN KERANGGAN DAN PEMBANGUNAN	116.456.714.000	744.072.164.717	2.058.750.32	742.019.354.391	21.519.461.591
090 IMPLEMENTASI PENGETAHUAN	2.041.176.340.100	2.375.141.662.701	3.211.476.112	2.371.813.101.001	77.163.105.101
-1 IMPRO. 2016 - K-MIHI	500.924.746.000	306.646.751.001	1.744.501.017	304.441.941.41	20.027.431.284
12 DILOGIC - JICLOV - KEGIATAN DILOGIC KSEI	175.814.700.000	104.259.571.000	236.387.001	91.726.571.002	6.012.435.512
3 DILOGIC - JICLOV - KEGIATAN DILOGIC KSEI	118.628.437.000	65.239.724.000	291.361.751	55.118.728.351	4.969.361.351
-1 DILOGIC - JICLOV - KEGIATAN DILOGIC KSEI	111.224.940.000	91.311.054.000	36.311.000	31.176.121.002	4.312.828.000
5 INSTITUT KEDOKTERAN	30.118.000.000	31.630.330.000	30.791.500	2.356.350.167	1.411.882.833
-5 INSTITUT KEDOKTERAN	29.116.172.000	30.164.000.000	36.312.000	14.528.000.000	1.246.000.000
6 INSTITUT KEDOKTERAN	23.568.300.000	35.425.332.501	30.3.500	35.171.011.11	1.526.581.656
-6 INSTITUT KEDOKTERAN	23.519.662.000	35.425.332.501	31.791.000	35.171.000.000	1.510.271.207
7 INSTITUT KEDOKTERAN	211.981.9.000	14.120.323.000	12.384.900	12.384.900	0.156.347.622
-7 INSTITUT KEDOKTERAN	200.121.49.000	2.392.270.555.000	511.005.011	2.392.210.311.004	11.934.100.937.001
8 INSTITUT KEDOKTERAN	1.437.171.000	2.361.265.000	311.310.000	2.361.265.000	1.000.000.000
-8 INSTITUT KEDOKTERAN	1.437.171.000	2.361.265.000	311.310.000	2.361.265.000	1.000.000.000
91 DESENTEKAN PENGETAHUAN SANTAI	4.903.349.000.000	4.123.500.905.712	2.511.150.249	4.053.921.704.003	187.601.250.531
-91 DESENTEKAN PENGETAHUAN SANTAI	4.428.500.000.000	4.025.5.005.712	2.351.150.249	4.025.5.005.712	3.747.500.000

LAPORAN KELANGGAN PENDAPAT PPN, SPT T-BK 20 | 6550720

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN ESelon I
TAHUN KALIGARAN 2011
(dalam rupiah R)**

LAPPAR 2 A

KODE BA ESelon I	BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS DIL BAHANH AUGUSTUS
093	IIOMSI PEMERINTAHAN KERUPUK	516.589.336.000	301.048.372.110	713.851.114	301.228.414.035	176.360.841.515
-1	KUR SBYA 2011 ASUM KIPUS	5.03.22.00.000	30.142.12.719	41.134.63.949	33.128.416.425	24.320.341.922
095	DEWAN PEMERINTAHAN DEPARTEMEN	1.157.11.772.100	362.339.313.738	9.111.630.017	353.000.977.061	103.120.739.531
-1	SEBESAR SEBELAS PERSEN DEWAH	750.680.00.000	375.47.355.051	31.201.554	343.265.750.173	31.265.513.177
-2	DEWAN PERWILAYAHAN DAN DERAH (DPD)	157.00.772.000	273.759.153.059	0.973.435.120	251.785.649.510	47.256.734.084
100	IIOMSI PUDOKSA RI	711.18.312.010	68.162.241.320	311.680.015	68.611.548.225	11.011.745.255
-1	KIN SHILOH 2011	8.11.10.29.000	1.411.452.56.114	38.134.340.111	38.111.452.349	1.111.11.12.125
103	BAGAN WASTON AL PEMERINTAH BENCANA	031.160.032.000	1.342.355.749.110	9.411.508.512	1.352.800.451.007	39.150.113.307
-1	F-2010 MASTEN 2 PERIODIK PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN YANG	338.850.322.000	745.365.754.440	9.405.203.829	735.350.435.907	204.050.111.372
104	BAGAN WASTON AL PERIFERATAN DAN PENGETAHUAN YANG	422.740.047.000	370.459.500.210	149.217.013	370.559.234.702	48.350.502.391
-1	SISTEM INFORMASI LIDAH DUTA	43.705.137.000	371.413.302.110	1.193.771.128	371.559.220.702	415.715.563.236
105	BAGAN WASTON AL PERIFERATAN DAN PENGETAHUAN YANG	1.284.800.317.000	372.765.601.304	71.301.327.0	471.383.794.014	124.196.927.921
-1	EDUCY T-2011 GS-LYAHAN LAMPUNG (T-2011)	1.326.38.3.700	311.38.30.351	293.1.350	271.138.30.351	7.4.1.18.36.358
106	LEMBAGA KERJAKAMI PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN YANG	216.362.959.000	173.491.275.475	2.071.1.40.533	171.469.131.559	38.152.486.101
-1	LEMBAGA KERJAKAMI PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN YANG	310.365.900.000	1.1.01.1.34.012	210.4.101.152	1.1.01.1.34.012	61.943.491.110
107	BAGAN SANITASIAL	1.321.133.13.000	1.153.343.13.000	1.153.343.13.000	1.153.343.13.000	175.461.348.181
-1	HAMIM SENTRAL 11 M	1.249.19.10.000	1.1.1.1.1.34.4.151	51.211.112	1.1.1.1.1.34.4.151	2.15.1.1.1.34.4.151
108	IIOMSI PEMERINTAH PERSAWIANSAN USAHA	1.1.020.034.000	89.255.571.115	711.805.130	88.000.765.005	1113.555.576.005
-1	EDU STAFERANAS PERSATUAN TUGU TUGU	1.1.1.1.1.34.1.007	61.755.11.146	71.301.111	51.755.11.146	1.555.11.146
109	BAGAN WASTON BIRUAN WILAYAH SURABAYA	291.240.000.000	09.146.823.319	14.823.010	09.200.00.31.3	123.399.938.001
-1	EDUCY T-2011 GS-LYAHAN SURABAYA (T-2011)	1.1.1.20.000.000	01.25.255.119	51.255.000	35.120.00.03.9	203.22.00.03.9
110	AMBULUSAN REPUBLIK INDONESIA	11.317.321.000	10.18.278.181	11.687.730	10.18.278.181	103.18.278.181
-1	OMTS 2011 T-2011 DOOR 30	16.512.30.000	5.578.36.1	28.38.250	15.526.60.601	17.38.25.169
111	BAGAN WASTON PENGELOLA PERBANTASAN	454.000.000.000	314.433.275.159	2.351.020.555	312.119.19.213	144.119.20.19.1

JN-A-11/P-242

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGAN ANGGARAN & ESELON I
TAHUN KALIGARAN 2011
(dalam rupiah)

LEMBAR 2 A

KODE BAGAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DITAS DI BAHANH AUGUSTUS
1. BAGAN ANGGARAN & ESELON I	15.000.000.000	3.455.733.619	2.305.300.676	31.701.63.833	31.830.501.177
999 BENDAHARA UNTUK MELAKUKAN TRANSFER	400.350.41.143.400	409.165.073.723.491	317.431.11.010	409.348.311.511.991	18.112.046.701.091
1. PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN	0.533.81.5.100	30.7.3.30.401.159	2.383.200.071	92.01.15.301.145	111.57.52.323.855
2. PELAKU DAN PEMERINTAH	273.25.671.145.000	201.746.165.710	7	201.746.165.710	201.746.165.710
2.1 PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN	42.192.193.000	29.1.13.23.535.324	20.01.229.65.322	29.1.13.23.535.322	29.1.13.23.535.322
2.2 PELAKU DAN PEMERINTAH	10.238.43.2.8.100	10.7.1.1.30.3.3.6	8.766.721.159	10.7.1.1.30.3.3.6	10.7.1.1.30.3.3.6
2.3 INFORMASI DAN KINERJA	10.7.1.1.30.3.3.6	10.7.1.1.30.3.3.6	7.6.1.1.3.1.15.411	7.6.1.1.3.1.15.411	7.6.1.1.3.1.15.411
2.4	913.743.472.821.000	134.102.205.841.455	1.116.370.15.195	133.791.236.191.619	133.791.236.191.619
					24.12.153.491.781

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEKAUJA PERIODE IAH PUSAT
PERENCANAAN DAN BUDGETING

111

卷之三

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBANTUAN PERERUPAH PUSAT
MENURUT JENIS PEMERINTAH

גנדי

卷之三

LAPORAN REALISASI BUDGET PENGETAHUAN PUSAT
MENURUT JENIS PEMERINTAH

11

LAPORAN REALISASI KEGIATAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUSEUNGSI
TAHUN BUDGET 2011
dalam rupiah.

KODE FUNGSI SUSUNGSI	FUNGSI/SUSUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS IDI BAWAH ANGGARAN
011	PELAYANAN UMUM LIMDAK EXECUTIF DAN LEGISLATIF	600.465.106.102.800	600.316.716.371.388	370.201.743.846	600.846.463.027.664	61.600.661.636.246
0101	PELAYANAN UMUM	30.717.866.361.000	08.070.075.494.767	08.070.075.494.767	08.070.075.494.767	13.691.327.213.863
0102	PELAYANAN LITAM	12.153.725.130.000	12.153.725.130.000	12.153.725.130.000	12.153.725.130.000	03.4.387.751.532
0104	PERILAKU PASCA DIAFRONTASI	2.395.261.310.000	2.395.261.310.000	2.395.261.310.000	2.395.261.310.000	0.126.389.76.354
0105	PRAMANDI FISIKITAL	136.300.578.410.000	82.037.317.020.276	2.801.783.347	82.134.729.063.006	14.916.648.354.865
0106	PEMERINTAHAN PUBLIK	2.729.221.439.000	1.916.406.461.596	3.671.232.940	1.916.388.72.096	19.1.332.65.305
0107	PERENCANAAN DAN KINERJA	1.713.467.747.3.084.1.000	200.317.517.000	8.336.862.570	113.003.12.177.01	96.676.673.758
0108	PELAYANAN LITAM DILAKUKAN	3.5.133.05.733.600	3.1.4.832.357.32.35	33.04.149.359	33.053.382.74.3.35	38.35.755.2.554.062
0109	KERJA MINGGU	7.313.310.000	-	9.313.310.000	-	9.313.310.000
02	PERTHAKAAN	49.954.107.640.000	51.278.348.264.199	1.573.350.01.292	51.120.988.252.097	1.166.884.61.937
0201	PERTHAKAAN NEGARA	45.213.465.288.000	48.803.397.03.382	145.881.18.0.7.8	45.803.395.12.264	1.788.658.823.244
0202	ULAMAT PADA PEMERINTAH	2.356.028.182.000	4.2.6.933.346.539	44.1294.21.9	4.2.6.933.342.316	460.1.796.80.5
0204	LITERASI SAINS DAN TEKNOLOGI	100.610.160.000	17.002.068.760	86.206.300	173.307.039.460	71.771.25.622
03	KETERIBATAN DAN KEAMANAN	74.378.143.707.000	71.117.319.061.668	76.581.196.191	71.169.1.731.365.477	2.657.504.34.5.73
0311	KEPOLISIAN	11.809.445.8.100	10.068.463.21.6.330	6.076.736.3.9	10.062.672.692.741	1.233.530.386.2.38
0312	PEMBANGUNAN BENDAAN	303.850.320.000	1212.355.7.1.4.18	9.45.53.305.542	1.232.300.33.507	33.4.150.1.5.90.7
0315	PEMBANGUNAN HUKUM	2.315.695.450.000	2.310.538.067.543	3.3.1.63.70	2.311.538.067.543	1.088.740.0.512
0316	PERADILAN	6.111.33.30.1.000	4.736.002.71.770	6.002.470.770	4.730.202.20.000	01.301.33.686.00.00
0318	LITERASI SAINS DAN TEKNOLOGI	25.413.9.1.000	24.39.1.49.1.223	28.14.1.123	28.13.9.333.0	1.1465.15.20.0
0319	KETERTIBAN DAN KINERJA	2.321.106.372.000	2.135.367.040.370	1.000.000	2.132.510.340.707	7.164.077.50.2.13
04	ECONOMI	103.317.687.624.000	87.364.468.761.382	86.326.246.518	87.246.61.514.034	18.071.658.008.188
0401	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN UMKM, KOPERASI DAN LAIN	2.385.131.788.000	2.073.773.45.334	2.206.339.387	2.215.512.382.237	26.619.12.5.32

25.7.1706-251.

B-4371

**LAPORAN REALISASI KANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUSAHNGSI
TAHUN ANGGARAN 2011
dalam unit**

卷之三

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN BUDGET 2011
dalam rupiah.

KODE FUNGSI SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	PERLAKUAN DI ATAS 101 BAWAH ANGGARAN
07	KESEHATAN	14.616.386.704,000	14.183.506.677,006	74.689.020.672	14.006.766.266.163	(720.617.607.807)
07.01	07.01.01 PENYELEKSIAN, PESERTAMATI	1.783.830.288,000	8.772.213.758	8.772.213.758	1.523.223.473	(284.428.351.531)
07.02	07.02.01 PENYESIATAN DAN PELAKUKAN KEGIATAN	8.345.114.610,000	4.739.145.464	4.739.145.464	3.138.17.145.293	(46.336.721.717)
07.05	07.05.01 PELAYANAN KEPERLUAN MASA DEPAN	321.667.751,000	322.363.824.747	3.044.076.270	1.319.315.820.313	(87.637.707.616)
07.04	07.04.01 PELAYANAN KEPERLUAN DESENTRALIZASI	2.945.322.367,000	2.356.303.931.547	2.356.303.931.547	2.356.303.931.547	(150.020.094.528)
07.05	07.05.02 PENGETAHUAN	41.604.410,000	341.410.961.366	> NFI. NFI. F.74	361.381.120.172	(79.860.275.016)
07.06	07.06.01 KESATUAN LAIN-LAIN	81.889.598,000	388.312.310.313	0.002.193.508	353.133.385.315	(123.868.865.853)
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	3.698.821.826,000	3.666.826.866.445	3.172.036.166	\$ 663.465.617.267	(340.368.860.713)
08.01	08.01.01 KEGIATAN PENDIDIKAN, KULTUR, BUDAYA	1.735.352.383,000	1.292.711.056.351	1.251.510.163.733	120.156.349.641	(262.510.010)
08.02	08.02.01 PEMERIKSAAN, PENINJAUAN DAN PERENCANAAN	843.101.000	7.943.300.300	7.943.300.300	7.943.300.300	(762.510.010)
08.04	08.04.01 PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN	68.769.000,000	34.386.310.312	26.148.148	31.372.381.631	(62.077.236.356)
08.05	08.05.01 PELAKUKAN KEGIATAN	1.313.318.100,000	1.042.254.344	2.314.905.500	1.330.085.326,8	(61.660.861.042)
08.06	08.06.01 PARIWISATA DAN BUDAYA	422.330.880,000	388.360.254.710	262.647,0	303.427.653.993	(63.168.273.011)
09	AGAMA	1.663.070.483,000	1.029.657.081.237	1.798.161.787	1.420.732.811.060	(128.231.873.600)
09.11	09.11.01 KEGIATAN RELIGIUS DAN PENGALAMAN	721.741.801,000	710.346.511.536	> KAI. KAI. 744	716.346.511.536	(46.035.461.666)
09.02	09.02.01 KEGIATAN DILAKUKAN PADA ZAMAN	60.423.352,000	58.278.737.833	'35.457.450	\$ 8.137.315.463	(5.328.545.877)
09.03	09.03.01 KEGIATAN DILAKUKAN PADA ZAMAN	71.359.359,000	57.300.811.592	5.356.352	31.252.239.933	(10.451.061.042)
09.04	09.04.01 PELAKUKAN KEGIATAN DILAKUKAN PADA ZAMAN	387.062.312,000	631.760.030.136	' E.C. 046.4E	E93.34.242.174,6	(87.412.071.233)
10	PENDIDIKAN	107.616.568.579,000	98.004.265.001.272	180.201.006.931	\$ 71.361.006.500.341	(9.822.611.569.600)
10.01	10.01.01 KEGIATAN DILAKUKAN PADA ZAMAN	701.317.777,000	-	-	-	(281.118.777,000)
10.02	10.02.01 KEGIATAN DILAKUKAN PADA ZAMAN	22.160.434.367,000	20.575.305.921.238	20.575.305.921.238	20.477.337.379.823	(1.082.857.394.177)
10.03	10.03.01 KEGIATAN DILAKUKAN PADA ZAMAN	11.636.652.484,000	H 4.41.461.861.861	22.47.463.650.500	8.461.75.443.263	(1.282.461.144.622)
10.04	10.04.01 KEGIATAN DILAKUKAN PADA ZAMAN	1.393.363.847,000	1.473.311.889.322	25.594.7.050	1.473.311.889.322	(25.594.7.050)

KL - 4570
LAJU PERALIHAN KUNCI GARMAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUGSI SUBSUNGSI
TAHUN KALENDARIAH 2011
idamuninah'

04-05-2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Data Rujiah)

No.	Wewah	Pajak	SDA	Gulai	Jamih	DAU	DAK	Total Dana Pembiangan
		3	4	5	6 = 3 + 5	7	8	6 + 7 + 8
1	Transaksi Jasa Keh. Jam. Jambam	1.164.648.814.163	1.852.811.149.847	1.005.831.046.128	8.463.184.646.111	317.613.401.000	12.305.310.383.022	13.793.288.465.332
2	Transaksi Jasa Kts Jaya	1.725.452.167.337	63.503.349.639	7.395.831.055	1.764.740.432.359	1.484.512.475.000	3.105.300.415.274	3.105.300.415.274
3	Transaksi Jasa Kts Bait	543.870.243.307	71.157.021.610	6.380.213.495	622.133.668.672	7.713.311.62.000	70.572.250.000	70.572.250.000
4	Transaksi Jasa	2.381.789.110.956	11.168.991.861.48	1.374.736.131.566	4.527.397.417.700	310.834.495.000	1.790.246.751.011	1.790.246.751.011
5	Transaksi Imp. & Exp. Dik.	337.608.533.21	2.316.861.712.8	1.861.731.870	3.155.731.821.389	14.107.275.000	5.686.314.9.069	5.686.314.9.069
6	Transaksi Pend.	311.850.368.419	1.614.813.181.111	1.141.018.111	3.291.638.419.411	42.107.171.000	7.14.381.1.4.01	7.14.381.1.4.01
7	Transaksi Pend. Bait	1.78.5.2.378.553	5.953.151.36.235	781.672.652	3.612.34.500.000	381.952.50.000	14.34.31.446.333	14.34.31.446.333
8	Transaksi Pend. Bait	295.282.912.291	1.676.018.28.1.71	1.038.916.28.1.74	2.898.448.540.740	228.651.401.000	3.681.392.5.114	3.681.392.5.114
9	Transaksi Pend. Uuu	2.536.889.735.568	77.512.251.72	5.151.152.251.310	3.651.582.000.000	42.111.300.000	1.455.310.000.813	1.455.310.000.813
C	Transaksi Pend. Hm	351.145.114.114	41.145.114.114	1.022.315.114.114	1.022.315.114.114	3.062.520.322.655	3.062.520.322.655	3.062.520.322.655
1	Transaksi Pend. Kt.	8.754.628.385.414	1.91.141.412.31	1.791.877.476	9.647.385.414.116	1.312.223.675.000	3.13.375.819.015	3.13.375.819.015
2	Transaksi Pend. Emas	3.381.176.175.662	1.21.161.21.161	113.375.633.468	52.1.380.016.388	44.903.050.000	27.335.385.3.883	27.335.385.3.883
3	Transaksi Pend. Emas	1.386.231.192.303	1.08.039.345.112	1.47.531.237	1.301.324.918.199	3.368.350.000	9.386.051.1.303	9.386.051.1.303
4	Transaksi Pend. Tm	2.302.468.633.573	86.332.632.526	314.385.871.2	2.302.358.055.517	21.352.435.000.000	2.314.331.584.517	2.314.331.584.517
5	Transaksi Pend. Tm	314.310.145.910	1.46.112.131.79	1.41.112.131.79	2.10.145.112.131.79	2.10.145.112.131.79	2.10.145.112.131.79	2.10.145.112.131.79
6	Transaksi Pend. T.m	3.125.546.320.73	738.336.045.883	732.361.831.351	4.677.332.738.715	23.352.384.735.000	2.116.234.275.000	2.116.234.275.000
7	Transaksi Pend. Ed. S.	322.602.144.015	130.310.285.661	621.124.936.336	3.388.44.1.25.00	362.712.40.000	9.646.304.94.035	9.646.304.94.035
8	Transaksi Pend. Mts	390.635.337.286	74.034.92.577	1.42.870.454	1.411.420.45.11	1.84.023.475.000	3.323.231.08.12	3.323.231.08.12
9	Transaksi Pend. Sd	501.136.235.240	1.053.40.22.11	3.689.338.5.134	4.689.338.5.134	286.693.250.000	3.792.317.0.134	3.792.317.0.134
10	Transaksi Pend. Ind	2.361.748.285.119	21.816.111.111	23.251.111.111	3.112.148.24.111	3.112.148.24.111	2.354.186.501.121	2.354.186.501.121
11	Transaksi Pend. Uts	338.115.373.616	13.355.98.1.13	1.334.251.6.7	4.01.125.00.298	76.155.00.000	3.014.170.30.233	3.014.170.30.233
12	Transaksi Pend. Pend	1.091.111.373.688	2.739.7.2.608	1.129.1.373.646	1.158.726.7.2.600	1.129.600.000	2.382.238.73.449	2.382.238.73.449
13	Transaksi Pend. Tm	338.168.522.17	30.123.72.18	1.161.192.173	4.50.177.5.1.89	5.01.100.00.000	3.155.188.5.159	3.155.188.5.159

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Data Rujiah)

04-07-04

No.	Wewenah	Dana Bantuan			DAN	BAT	Total Dana Perimbanginan
		Pajak	SDA	Gulir			
1	2	3	4	5	6 = 2 + 4 - 5	7	8 = 0 + 1 + 7 - 6
24	Transf. Jaminan Sistem	1.164.012.881.004	36.180.000.039	8.734.000.000	1.161.257.172.627	1.161.257.172.627	1.254.552.233.531
25	Transf. Jaminan Bpt.	194.551.541.759	2.821.000.505	57.178.605.284	1.905.316.065.000	300.312.600.000	2.251.129.611.234
26	Transf. Jaminan Tim. pda	180.700.253.470	1.227.863.3.400	43.522.716.350	1.860.388.6.000	52.884.075.000	5.066.186.466.865
27	Transf. Jamin. Pem. Pd. P	931.217.933.635	2.503.326.697	3.011.192.152	3.857.350.582.000	388.013.600.000	4.295.965.111.001
28	Transf. Jamin. Tempat Berlatih	374.519.315.058	2.07.582.000.418	150.300.733.267	4.618.788.6.300	3.012.231.6.033	3.012.231.6.033
29	Transf. Jamin. Pengemb. nkr	43.998.234.448	11.110.000.833	1.342.884.448	48.348.744.448	1.14.888.171.001	1.14.888.171.001
30	Transf. Jamin. Bpt. U	33.161.533.013	48.37.654.633	4.20.30.468.200	50.639.250.000	5.100.178.216.843	5.100.178.216.843
31	Transf. Jamin. Bpt. U 2	15.618.19.311.146	25.340.000.650	3.45.73.624.112	3.45.73.624.112	5.084.196.16.014	5.084.196.16.014
32	Transf. Jamin. Bpt. U	1.235.027.300.894	1.391.191.861.598	1.230.318.821.510	1.232.301.715.000	1.390.330.082.912	1.390.330.082.912
33	Transf. Jamin. Bpt. U 2	33.7.411.000.614	1.18.4.000.000.000	1.033.150.832.24	1.18.4.000.000.000	7.25.318.942.711	7.25.318.942.711
34	Total	41.575.556.914.173	53.374.336.291.554	1.408.443.764.134	96.908.991.981.316	295.523.119.048.000	347.246.913.954.216
		30.0 LAK				94.803.509.979.000	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 3 + 4 + 5 + 6
			PPI Prioritas	PPI	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	7
59	Provinsi Bengkulu Barat	115.984.114.368	51.718.375.188	64.164.838.410	115.364.114.368	
60	Gab. Lingga	24.461.637.213	2.064.021.391	21.793.716.522	24.461.637.213	
61	Gab. Agam	22.109.802.121	2.089.199.495	19.219.814.211	22.109.802.121	
62	Gab. Kepulauan Mentawai	18.161.417.772	1.773.207.187	7.833.110.392	18.161.417.772	
63	Gab. Pasir Panjang	2.007.442.810	2.044.101.105	10.423.407.322	21.167.442.110	
64	Gab. Pesisir Selatan	22.957.789.446	2.304.481.034	23.359.212.312	22.367.789.446	
65	Gab. Pesisir Barat	26.072.027.631	2.125.051.592	17.273.207.260	23.823.027.631	
66	Gab. Empat Lawang	2.540.309.953	2.380.261.793	1.363.166.590	21.340.309.953	
67	Gab. Situbondo	20.067.712.640	2.151.201.204	8.281.510.475	20.967.712.640	
68	Gab. Sumbawa Barat	17.021.016.350	3.114.410.021	14.063.898.407	17.021.016.350	
69	Gab. Ende (TTL)	14.880.114.848	1.135.851.330	9.063.316.511	14.880.114.848	
70	Gab. Padang Pariaman	10.981.040.450	2.001.225.001	4.001.510.510	9.981.040.450	
71	Gab. Padang	82.100.517.910	10.030.471.420	33.002.124.420	82.100.517.910	
72	Gab. Padangpanjang	15.263.823.035	2.1.181.001	2.586.252.322	15.263.823.035	
73	Gab. Sumbawa	17.040.097.679	2.049.821.009	15.041.712.381	17.040.097.679	
74	Gab. Sidoarjo	14.719.293.359	2.047.132.023	12.047.886.354	14.719.293.359	
75	Gab. Maluku	20.474.488.108	3.117.021.001	17.062.241.126	20.474.488.108	
76	Gab. Pesisir Barat	24.986.843.108	3.127.035.227	21.493.006.341	24.986.843.108	
77	Gab. Flores Timur	23.71.818.245	2.183.044.985	9.173.531.580	23.71.818.245	
78	Gab. Etalik Sitoro	24.798.643.108	2.236.231.293	22.162.406.186	24.798.643.108	
79	Provinsi Riau	467.571.410.718	146.617.373.004	378.916.643.214	467.571.410.718	
80	Gab. Bengkalis	229.057.822.116	48.801.381.084	223.892.111.183	229.057.822.116	
81	Gab. Indragiri Hulu	66.396.694.143	8.247.881.373	51.148.705.170	66.396.694.143	
82	Gab. Kampar	60.839.910.837	0.6.16.1.301	71.0.3.32.376	60.839.910.837	
83	Gab. Kampar Kiri Hulu	16.716.007.022	11.043.003.001	14.003.174.267	16.716.007.022	
84	Gab. Kepulauan Siquijor	29.054.010.0115	8.209.182.705	37.889.501.314	43.854.010.0115	
85	Gab. Pelalawan	24.009.143.252	10.001.195.804	11.117.124.390	14.809.143.252	
86	Gab. Polman	93.520.738.123	7.127.287.057	182.193.440.276	193.520.738.123	
87	Gab. Batang	22.014.932.961	0.001.142.004	11.004.932.961	12.214.932.961	
88	Gab. Simeulue	217.949.10.823	2.210.10.823	19.148.114.394	217.949.10.823	
89	Gab. Deli Serdang	61.455.107.812	10.67.881.173	43.003.311.285	61.455.107.812	
90	Gab. Sambutan	22.918.207.110	16.401.170.192	16.201.166.417	12.108.207.110	
91	Gab. Kepulauan Meranti	94.796.070.017	6.872.746.877	82.387.101.275	94.796.070.017	
92	Provinsi Kepulauan Riau	218.472.383.115	75.736.219.888	14.781.079.515	218.472.383.115	
93	Gab. Bintan	79.722.481.531	8.693.101.723	73.003.356.586	79.722.481.531	
94	Gab. Karimun	20.400.501.235	5.611.132.602	2.3.657.190.466	20.400.501.235	
95	Gab. Minahasa Utara	16.607.429.224	10.201.031.002	6.2.271.786.724	16.607.429.224	
96	Gab. Berau	14.395.856.116	16.123.091.141	10.127.312.316	14.395.856.116	
97	Gab. Republik Aceh	37.000.010.016	0.001.001.001	69.000.011.246	1.580.300	77.500.010.016
98	Gab. Tapanuli Selatan	17.096.806.222	6.800.157.181	4.1.31.114.392	51.96.806.222	
99	Gab. Lingga	12.400.769.919	8.1.371.663	42.074.768.464	82.400.769.919	
100	Provinsi Jambi	172.004.101.110	31.212.310.018	18.002.004.710	172.101.000.010	
101	Gab. Batanghari	93.847.486.531	2.1.212.384.357	91.127.704.530	93.847.486.531	
102	Gab. Duri	37.120.007.218	4.348.076.046	25.004.096.704	37.120.007.218	
103	Gab. Muaro Jambi	19.729.716.832	1.004.893.054	1.3.221.080.501	19.729.716.832	
104	Gab. Musi Rawas	20.610.118.656	8.137.6.274	35.610.161.565	39.310.418.156	
105	Gab. Musi Rawas Utara	83.498.894.923	4.1.13.811.183	73.378.285.712	83.498.894.923	
106	Gab. Sungai Penuh	59.817.569.526	2.586.575.006	57.720.216.506	58.817.569.526	
107	Gab. Terengganu Besar	80.734.924.052	3.004.197.017	0.2.101.747.105	91.174.924.052	
108	Gab. Terengganu Besar	107.738.733.022	4.031.241.007	45.103.505.200	107.738.733.022	
109	Gab. Teluk	42.304.501.818	2.1.5.001.001	33.602.304.167	42.304.501.818	
110	Gab. Jambi	14.020.000.011	14.227.002.045	45.931.16.100	14.020.000.011	
111	Gab. Singkep Barat	15.011.351.021	4.001.2.321	1.001.515.196	15.011.351.021	
112	Provinsi Sumatera Selatan	379.811.101.143	81.348.010.421	208.278.110.232	379.811.100.043	
113	Gab. Lahat	10.446.917.214	8.091.172.731	9.384.746.384	10.446.917.214	
114	Gab. Musi Banyuasin	20.030.020.052	0.071.802.171	20.073.020.052	20.030.020.052	
115	Gab. Musi Rawas	174.367.959.010	4.001.267.061	173.371.031.006	174.367.959.010	

JENIS PEMERINTAHAN DAERAH X 1000.000.000

Rp. 14.12.12

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pajak	Realisasi				
			PPI Prioritas	PER	BPNP	Total	
1	2	3	4	5	6	3 + 4 + 5 + 6	
113	Gab. Muara Enim	214.912.769.928	14.273.481.393	203.333.382.436	214.812.160.528		
113	Gab. Ogan Komering Ulu	42.000.000.076	6.001.041.171	32.173.165.406	42.140.104.310		
115	Gab. Ogan Komering Ulu	84.336.776.118	8.891.381.987	72.347.488.311	84.336.776.798		
115	Gab. Pesisir Selatan	15.740.727.127	12.181.172.443	12.445.371.556	15.740.727.107		
121	Kota Padang Panjang	21.716.308.110	3.221.117.064	24.479.111.034	21.716.308.100		
121	Kota Lubuk Linggau	30.211.22.866	5.301.021.162	24.963.056.706	30.211.22.866		
125	Gab. Padang Barat	58.065.31.051	9.774.182.021	49.033.151.219	58.065.31.051		
125	Gab. Empat Lawang	28.475.479.112	3.071.022.001	22.494.467.562	28.475.479.112		
124	Gab. Padang Selatan	14.110.758.131	5.701.504.291	103.103.755.339	14.110.758.131		
124	Gab. Ogan Ilir	66.702.008.312	8.061.301.082	62.121.126.401	66.702.008.312		
125	Gab. OKU Timur	26.885.581.713	4.381.571.123	22.707.588.716	26.885.581.713		
125	Gab. OKU Selatan	30.047.987.221	6.091.101.812	25.064.983.206	30.047.987.221		
128	Provinsi Bengkulu Selatan	50.011.817.200	11.439.039.000	39.979.237.312	50.011.817.200		
125	Gab. Batang Toru	38.025.53.519	8.221.691.971	33.181.455.318	38.025.53.519		
131	Gab. Deli Serdang	30.007.380.030	2.291.375.394	29.085.21.274	30.007.380.030		
131	Kota Pangkal Pinang	33.757.488.246	6.931.135.446	28.825.21.130	33.757.488.246		
132	Gab. Dompak Selatan	20.410.3.090.9	1.031.174.141	20.000.104.362	20.410.3.090.9		
133	Gab. Banting Terbang	30.410.847.032	2.671.964.461	27.755.882.363	30.410.847.032		
134	Gab. Pauh	35.870.8.010.132	8.070.181.003	31.111.159.377	35.870.8.010.132		
134	Gab. Bintan	30.007.380.030	2.291.375.394	29.085.21.274	30.007.380.030		
135	Gab. Lingga	33.757.488.246	6.931.135.446	28.825.21.130	33.757.488.246		
135	Gab. Bintan Tengah	20.410.3.090.9	1.031.174.141	20.000.104.362	20.410.3.090.9		
135	Gab. Lingga Selatan	19.709.634.652	1.123.102.003	8.071.354.117	19.709.634.652		
135	Gab. Pengerang Ilir	26.726.716.651	2.710.861.907	24.965.206.780	26.726.716.651		
135	Gab. Pengerang Laut	22.211.653.035	2.013.177.111	23.101.716.335	22.211.653.035		
141	Gab. Lingga Utara	27.019.9.000.078	8.201.102.141	14.021.189.144	27.019.9.000.078		
141	Gab. Kuantan	2.513.029.035	1.191.124.582	23.357.206.385	23.357.206.385		
142	Gab. Sebatik	2.659.009.076	1.071.080.390	23.164.179.300	23.164.179.300		
142	Gab. Melaka Utara	26.686.597.024	1.032.031.951	21.003.286.206	26.686.597.024		
143	Gab. Lebong	26.008.429.011	1.064.071.071	22.074.163.326	26.008.429.011		
144	Gab. Berapit Sungai	14.112.18.424	1.391.102.493	12.884.317.391	14.112.18.424		
145	Gab. Kerinci	27.511.714.130	1.181.131.273	23.387.432.112	27.511.714.130		
147	Provinsi Lampung	127.318.721.119	41.241.440.003	87.074.272.076	127.318.721.119		
148	Gab. Lamongan Barat	3.340.587.754	2.182.137.771	23.167.546.746	31.166.187.274		
148	Gab. Lamongan Selatan	33.810.12.116	1.680.187.003	25.140.395.355	33.810.12.116		
150	Gab. Lamongan Tengah	14.926.434.816	5.881.801.984	48.033.125.234	54.836.434.818		
151	Gab. Lamongan Utara	39.010.507.625	5.551.073.645	82.520.427.560	93.570.507.605		
152	Gab. Lamongan Timur	30.308.319.622	4.024.049.142	78.024.421.204	81.334.420.427		
153	Gab. Tenggarong	26.014.737.152	2.510.894.873	23.387.312.315	25.314.357.107		
154	Gab. Tenggarong Barat	29.730.080.073	4.205.101.002	25.003.101.576	29.730.080.073		
154	Gab. Way Kanan	36.395.15.114	2.884.131.274	33.127.743.242	36.395.15.114		
155	Gab. Pesawaran	20.930.628.116	2.8.051.001	22.893.734.380	23.360.628.118		
157	Gab. Piringkuh	14.670.70.020	2.113.030.087	12.169.47.422	14.670.70.020		
158	Gab. Musi	17.618.790.341	1.194.624.187	5.024.186.104	17.618.790.341		
158	Gab. Langkat Batang Jaya	10.208.642.610	1.071.072.001	7.147.110.200	10.208.642.610		
162	Gab. Bantaeng Selatan	63.767.300.140	18.871.282.009	44.892.016.081	63.767.300.140		
163	Gab. Nias Selatan	29.768.813.276	8.041.5.593	20.113.595.581	29.768.813.276		
163	Provinsi DKI Jakarta	87.848.273.421.633	6.041.610.333.000	2.006.598.516.073	6.346.434.726	8.754.121.355.419	
163	Provinsi Aceh Besar	974.458.101.339	501.810.358.103	475.767.847.981	38.291.519	374.491.395.203	
164	Gab. Dairi	20.274.12.072	2.065.124.201	10.023.110.380	12.281.101.003	123.160.420.231	
165	Gab. Pakpak Bharat	351.626.365.620	15.861.073.001	23.173.132.706	364.536.455.500		
165	Gab. Bugu	20.058.513.521	45.194.745.601	152.101.785.105	193.530.313.510		
167	Gab. Samosir	10.616.700.010	12.271.251.001	45.301.441.102	6.616.700.010		
168	Gab. Cilegon	10.905.718.131	17.551.161.003	6.163.152.274	6.163.152.274		
168	Gab. Cirebon	10.106.306.148	13.348.101.001	62.009.206.481	10.106.306.148		
170	Gab. Gorontalo	84.130.01.632	14.822.051.493	63.307.201.395	1.100.000	84.130.01.632	
171	Gab. Inhu	10.404.249.014	11.045.001.004	10.107.162.001	12.108.226	12.108.226	
172	Gab. Karo	250.676.124.138	12.061.641.051	193.8.248.582	253.216.124.138		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011**
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 3 - A + B + C
			A	B	C	
123	Gab Buriram	48.136.826.352	12.181.952.423	31.963.186.537	48.136.826.352	48.136.826.352
124	Gab Majalengka	60.202.004.719	11.8.000.204	69.002.716.436	03.502.504.719	
125	Gab Ponorogo	17.514.340.151	21.051.401.230	48.956.359.496	71.111.040.876	
126	Gab Sidoarjo	10.131.623.450	14.781.261.303	157.541.382.184	173.131.633.481	
127	Gab Subang	10.136.302.211	12.161.388.041	11.181.134.204	08.126.132.211	
128	Gab Sumedang	13.769.219.029	14.351.782.713	38.477.486.514	62.591.219.229	
129	Gab Tasikmalaya	50.070.514.445	15.001.112.103	45.863.457.454	55.839.154.573	
130	Gab Batang Barat	6.271.384.512	16.565.146.891	42.201.114.591	61.037.084.512	
131	Gab Brebes	358.717.016.523	55.071.151.163	201.143.507.156	310.329.112.400	
132	Gab Bondowoso	102.000.000.000	40.000.000.000	121.874.141.714	102.000.000.000	
133	Gab Blitar	96.505.123.947	91.114.811.573	83.183.425.505	93.505.117.514	
134	Gab Cirebon	42.009.066.054	11.001.032.122	26.063.400.174	42.100.116.004	
135	Gab Cirebon	10.300.000.000	11.225.048.824	74.014.000.104	10.300.000.000	
136	Gab Sukabumi	32.251.507.033	11.201.185.000	4.001.386.256	32.551.107.253	
137	Gab Ciamis	42.300.001.721	10.000.000.000	20.000.000.000	42.300.001.721	
138	Gab Tasikmalaya	49.818.207.556	11.134.813.273	23.883.386.246	43.818.307.086	
139	Gab Bogor	20.308.417.830	8.000.000.000	10.124.016.100	29.122.431.100	
140	Provinsi Banten	341.027.154.577	211.052.448.736	138.985.444.241	341.137.054.577	
141	Gab Lebak	50.517.000.000	17.001.000.000	37.000.166.754	50.517.000.000	
142	Gab Pandeglang	20.041.803.148	10.593.866.981	34.409.336.168	50.041.803.148	
143	Gab Serang	18.638.206.170	10.184.101.577	41.000.204.102	78.358.106.720	
144	Gab Tangerang	217.200.000.000	21.041.601.330	163.000.206.368	21.700.000.000	
145	Gab Cilacap	97.003.304.529	47.947.967.004	54.173.142.510	97.300.304.519	
146	Gab Tegal	253.115.210.036	10.071.580.000	173.013.114.506	253.475.210.500	
147	Gab Ciamis	37.026.147.213	10.204.161.205	24.000.000.000	37.230.147.213	
148	Gab Tegal	83.227.811.621	10.3.301.204	1.2.800.146.510	83.422.811.601	
149	Provinsi Jawa Tengah	810.788.102.824	242.410.001.218	268.330.312.410	110.281.242.824	
150	Gab Batu	40.694.174.912	8.072.131.045	34.175.336.306	43.594.174.912	
151	Gab Demak	10.244.600.141	14.202.000.000	6.188.200.000	08.244.600.141	
152	Gab Bojonegoro	36.698.489.176	1.972.161.185	32.191.737.153	35.998.489.176	
153	Gab Blora	14.328.021.073	1.132.061.357	10.200.000.000	24.260.021.073	
154	Gab Kudus	28.225.647.250	1.291.421.141	31.960.121.141	30.225.647.250	
155	Gab Pekalongan	76.101.800.671	7.901.834.887	53.7.7.000.726	95.101.800.671	
156	Gab Cirebon	67.810.255.530	50.000.000.000	80.177.368.500	87.810.255.530	
157	Gab Dolok	37.810.367.239	6.074.194.000	31.143.167.200	37.810.367.239	
158	Gab Cirebon	58.750.550.361	8.777.101.002	53.901.161.361	93.750.550.361	
159	Gab Jepara	10.986.100.772	8.122.000.000	41.271.147.747	6.1.10.100.772	
160	Gab Kuningan	58.000.000.531	1.070.1.000.000	30.1.1.000.000	58.000.000.531	
161	Gab Rembang	45.42.269.640	0.021.021.244	39.21.323.704	45.42.269.640	
162	Gab Pemalang	44.5.14.609.090	1.21.921.361	36.13.838.176	44.14.310.100	
163	Gab Pati	58.006.900.018	1.691.004.000	36.000.000.100	58.006.900.000	
164	Gab Purworejo	02.247.0.247.000	10.021.004.000	45.20.0.000.000	02.247.0.247.000	
165	Gab Magetan	43.010.879.112	1.3.1.341.100	31.12.1.341.100	43.010.879.112	
166	Gab Ponorogo	46.919.0.000.000	0.162.0.000.000	30.0.0.164.000	46.919.0.000.000	
167	Gab Patuk	30.930.300.159	0.121.0.001.000	22.004.429.162	30.930.300.160	
168	Gab Pekalongan	70.910.73.366	8.049.586.703	30.0.1.100.000	93.100.73.366	
169	Gab Kulon Progo	36.846.218.532	1.991.1.234.000	33.9.1.795.107	35.846.218.532	
170	Gab Ponorogo	20.600.000.747	8.002.6.4.000	37.700.100.746	37.700.100.746	
171	Gab Purbalingga	36.36.000.821	1.001.1.1.000	33.001.104.000	36.36.000.821	
172	Gab Surabaya	20.613.614.616	9.11.1.51.205	33.153.125.351	39.313.614.616	
173	Gab Sidoarjo	37.012.613.535	3.275.601.321	32.697.106.196	37.512.613.535	
174	Gab Sukoharjo	42.667.007.150	11.131.1.001.000	31.12.1.341.100	42.667.007.150	
175	Gab Tulungagung	7.382.409.537	8.593.001.173	35.200.551.406	45.582.409.537	
176	Gab Probolinggo	34.220.014.840	1.801.0.001.000	29.0.1.000.000	34.220.014.840	
177	Gab Wonogiri	39.832.354.111	6.322.142.673	33.008.212.266	38.832.354.111	
178	Gab Wates	36.267.004.173	1.491.0.001.000	30.0.1.100.000	36.267.004.173	
179	Gab Ngawi	19.419.477.129	6.692.1.1.100	1.2.2.1.367.212	19.419.477.129	
180	Gab Pekalongan	29.133.680.730	1.981.0.001.000	17.572.510.355	31.133.680.730	
181	Gab Pekalongan	29.133.680.730	1.981.0.001.000	17.572.510.355	31.133.680.730	
182	Gab Salatiga	19.029.682.121	5.390.1.001.000	12.000.1.1.100	18.319.682.121	
183	Gab Semarang	98.117.315.751	36.861.101.000	131.177.136.476	188.077.175.476	

JAKARTA PUSAT 12 JULI 2012 X 000.1400020

D.14.12

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011**
(Dalam Rupiah)

No.	Bentuk	Pajak	Realisasi			
			PPI Prioritas	PER	BPNP	Total
			5	6	7 = 4 + 5 + 8	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 8
203	Gra Sumbawa	86.610.194.854	19.231.551.402	45.434.535.442	61.270.194.394	
204	Gra Tiga	23.737.726.716	6.081.31.262	1.309.406.464	22.107.730.100	
233	Provinsi DI Yogyakarta	79.987.201.998	49.316.547.024	32.576.313.734	79.987.201.998	
235	Gab Bantul	47.874.743.811	9.861.187.137	31.887.476.316	41.514.748.351	
237	Gab Gunung Kidul	30.612.120.128	6.405.401.261	2.001.117.300	38.112.120.128	
238	Gab Kulon Progo	26.645.812.641	5.861.184.398	2.296.516.252	25.645.812.641	
239	Gab Sleman	18.301.861.845	5.127.510.215	1.611.351	23.301.861.845	
241	Gra Pagi-Warta	80.359.787.156	12.083.662.007	33.361.215.306	63.250.787.006	
241	Provinsi Jawa Timur	749.274.401.389	587.550.491.001	186.794.179.281	749.274.401.389	
242	Gab Gresik	26.810.280.0	6.021.100.000	1.420.15.000	26.810.280.0	
243	Gab Pasuruan	85.024.51.803	8.991.181.272	53.333.510.357	85.024.51.803	
244	Gab Blitar	14.040.000.216	2.005.4.400	32.042.186.116	34.040.000.216	
245	Gab Mojokerto	10.216.116.004	1.101.321.307	10.001.125.107	10.216.116.004	
246	Gab Batu	3.318.928.172	6.281.681.023	25.500.105.162	31.519.128.112	
247	Gab Giri	13.739.619.150	10.891.621.107	95.411.113.220	13.739.619.150	
248	Gab Jember	10.144.17.018	13.412.171.024	55.883.506.394	73.144.17.018	
249	Gab Jember	10.147.436.019	8.291.800.184	45.000.446.416	63.147.436.119	
251	Gab Probolinggo	88.078.994.073	7.962.162.571	63.125.327.434	68.078.994.073	
251	Gab Lamongan	89.801.555.120	1.801.185.193	81.801.185.193	89.801.555.120	
252	Gab Lumajang	28.827.536.648	1.181.176.000	31.861.187.000	38.827.536.648	
253	Gab Malang	35.050.012.331	6.731.502.007	33.629.463.385	37.250.012.331	
254	Gab Magetan	34.869.738.510	1.391.182.008	21.000.201.216	34.869.738.510	
255	Gab Madiun	86.423.718.120	13.431.181.157	77.987.167.113	85.423.718.120	
255	Gab Mojokerto	1.030.936.015	10.651.51.235	82.3.321.1714	71.120.36.359	
257	Gab Ngawi	40.607.000.023	3.371.001.172	41.217.116.201	40.607.000.023	
258	Gab Kepulauan	23.807.898.615	1.712.17.892	33.183.106.196	43.126.106.355	
261	Gab Pati	33.216.200.054	6.091.100.005	21.102.198.150	34.216.200.054	
262	Gab Purworejo	12.696.918.017	6.121.181.002	41.973.126.174	52.696.918.017	
263	Gab Pesawaran	7.704.20.240	1.046.1.02.192	6.1.91.103.154	7.704.20.240	
264	Gab Pemalang	49.480.21.742	1.0.1.18.182	41.45.188.182	49.480.21.742	
265	Gab Purbalingga	57.031.101.121	11.12.185.204	39.6.510.102.102	51.121.101.121	
266	Gab Sampang	62.126.942.120	6.201.17.000	51.101.17.148	62.126.942.120	
267	Gab Salatiga	16.416.812.557	41.771.931.103	145.647.177.262	168.416.812.557	
268	Gab Situbondo	39.716.310.526	8.241.1.00.100	22.1.905.100	33.716.310.526	
267	Gab Sukoharjo	39.197.163.173	7.291.192.235	131.038.835.306	5.426.382	138.197.163.173
268	Gab Tulungagung	37.007.260.502	8.001.173.601	31.180.217.410	37.007.260.502	
269	Gab Trenggalek	84.043.007.020	10.4.1.17.171	94.253.043.102	94.043.007.020	
270	Gab Cilacap	78.457.759.150	6.787.181.073	99.083.152.100	48.457.759.150	
271	Gra Blitar	23.717.467.774	1.061.002.023	19.361.486.761	22.717.467.774	
272	Gra Kediri	37.234.939.108	14.161.1.12.125	23.036.115.172	37.234.939.108	
273	Gra Kediri	20.714.560.842	6.497.189.009	82.312.312.366	23.214.560.842	
274	Gra Kediri	97.328.104.121	20.000.100.000	48.000.102.101	67.328.104.121	
275	Gra Kediri	24.815.1.00.143	7.473.1.00.100	7.3.883.102.174	24.815.1.00.143	
276	Gra Kediri	22.110.480.040	10.061.001.000	11.141.100.102	22.110.480.040	
277	Gra Probolinggo	29.234.18.121	6.705.104.455	22.111.141.124	29.234.18.121	
278	Gra Situbondo	30.685.317.965	15.005.6.2.001	31.688.306.702	30.685.317.965	
279	Gra Bima	26.147.384.631	5.432.461.101	23.036.410.364	26.147.384.631	
280	Provinsi Kalimantan Barat	159.574.169.116	38.414.310.550	98.155.758.518	198.574.169.016	
201	Gab Deli Serdang	26.010.076.118	2.002.002.202	23.2.1.014.102	25.120.10.408	
261	Gab Tanah	27.761.038.001	2.371.181.001	39.173.152.305	41.761.038.001	
262	Gab Rega Raya	52.06.066.718	2.041.001.101	49.195.706.321	52.126.066.706	
263	Gab Rejang Lebong	0.000.0.0.0.0	0.000.0.0.0.0	0.000.0.0.0.0	0.000.0.0.0.0	
264	Gab Pesisir Selatan	18.472.000.942	2.681.17.100	3.103.176.254	18.472.000.942	
265	Gab Simeulue	32.120.661.224	2.861.162.002	24.163.194.302	32.120.661.224	
267	Gab Aceh Selatan	42.567.310.258	4.225.001.903	33.342.216.301	42.567.310.258	
268	Gab Simeulue	40.000.488.811	3.006.100.000	42.000.100.100	40.000.488.811	
269	Gra Panca	17.188.929.643	19.071.005.541	31.161.370.302	51.188.929.543	
270	Gra Simeulue	10.450.200.004	3.952.100.505	17.001.100.302	9.450.100.504	
291	Gab Aceh Besar	38.189.210.212	1.2.1.92.100	21.028.210.100	28.189.210.212	
292	Gab Aceh Besar	3.526.032.777	1.181.100.203	3.101.100.103	3.126.032.777	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

JENIS PEMERINTAHAN DAERAH X 1000.000.000

Rp.14.12

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pajak	Realisasi			
			PPI Prioritas	PER	BPTP	Total
1	2	3	4	5	6	3 + 4 + 5 + 6
353	Gab. Merauke Utara	2.938.509.143	3.007.861.101	18.933.348.542	21.538.309.743	
354	Gab. Dolokay Kepulauan Utara	10.000.000.016	1.211.124.001	3.069.426.126	3.100.100.114	
355	Provinsi Gorontalo	27.083.348.123	1.572.778.289	17.519.517.913	27.181.345.323	
356	Gab. Pidie Jaya	20.919.439.759	1.201.372.102	13.178.278.479	23.318.429.279	
357	Gab. Gorontalo	10.100.000.000	0.100.461.146	1.007.883.117	1.010.464.163	
358	Gab. Bone	2.051.511.143	1.007.082.063	1.004.421.276	2.012.511.243	
359	Gab. Pidie	2.529.800.625	1.318.515.593	202.318.595	21.529.300.313	
360	Gab. Gorontalo Utara	18.229.716.091	1.120.442.003	17.103.226.411	18.350.716.297	
361	Gab. Pesisir Selatan	29.417.745.510	1.073.465.221	21.103.195.596	29.417.745.510	
362	Provinsi Sulawesi Tenggara	74.088.478.110	11.745.712.211	64.340.176.204	74.481.612.626	
363	Gab. Buton	37.218.477.141	3.204.101.003	25.003.450.571	39.518.477.171	
364	Gab. Dergut Keulevan	20.300.000.130	1.091.404.001	20.703.201.100	20.300.400.130	
365	Gab. Donggala	23.710.000.170	1.431.144.213	22.221.001.284	23.711.144.210	
366	Gab. Toli-Toli	20.368.910.512	1.651.041.821	3.301.818.712	23.520.110.354	
367	Gab. Lampung	27.767.336.730	1.491.167.013	28.269.770.742	27.767.336.730	
368	Gab. Minahasa	50.550.000.420	1.097.732.871	48.962.175.506	50.550.000.420	
369	Gab. Pesisir	32.010.000.011	1.160.166.109	30.002.130.480	32.100.000.011	
370	Gab. Palu	38.238.846.001	10.391.802.003	12.833.237.786	430.540	28.238.287.337
371	Gab. Paitchau	28.805.000.016	1.041.157.785	17.165.000.516	33.305.000.016	
372	Gab. Sigi	19.705.769.439	1.451.176.449	13.352.106.411	19.705.769.439	
373	Gab. Timor Leste	26.750.000.242	1.341.000.971	25.401.018.137	25.750.000.242	
374	Provinsi Sulawesi Selatan	228.144.171.112	81.743.710.118	181.001.710.028	12.167.010	228.161.846.036
375	Gab. Bone	26.750.686.126	2.611.174.441	22.137.127.581	21.750.336.126	
376	Gab. Barru	25.862.570.516	3.0.1.803.175	22.673.306.407	25.362.370.500	
377	Gab. Luwu	40.600.000.014	1.140.100.001	42.010.000.100	40.600.000.014	
378	Gab. Poso	30.860.472.621	1.351.501.621	23.5.3.137.521	30.860.472.621	
379	Gab. Lampung	30.430.100.211	2.004.100.109	22.874.100.208	30.430.100.209	
380	Gab. Gowa	34.752.384.159	4.830.941.973	33.1.1.143.810	34.752.384.159	
381	Gab. Jeneponto	21.008.028.24	3.002.221.307	24.000.221.307	21.009.221.303	
382	Gab. Luwu	25.111.212.174	21.002.182.393	22.000.212.174	25.111.212.174	
383	Gab. Tana Toraja	36.510.158.738	3.054.201.302	33.305.158.738	35.510.158.428	
384	Gab. Minas	30.140.125.916	1.060.000.001	22.004.126.112	30.140.125.916	
385	Gab. Sanggau dan Rejang	34.117.835.451	8.000.000.001	27.005.110.277	34.117.835.451	
386	Gab. Pinrang	29.502.161.821	5.500.201.824	25.000.161.824	29.502.161.824	
387	Gab. Setiajar	33.486.896.018	21.1.001.003	22.804.894.516	33.486.896.018	
388	Gab. Tololelo Pelega	37.210.000.213	5.140.002.651	33.573.117.581	37.210.000.213	
389	Gab. Singkil	28.704.000.111	2.840.000.123	21.002.000.108	28.704.000.111	
390	Gab. Supiori	27.700.290.030	3.380.851.873	23.683.851.873	27.700.290.030	
391	Gab. Tana	23.102.400.654	3.101.001.274	19.0.7.106.100	22.102.400.604	
392	Gab. Tana Toraja	27.314.126.151	2.286.821.873	17.125.116.118	27.314.126.151	
393	Gab. Wajo	69.006.028.212	4.134.001.305	65.000.028.212	69.006.028.212	
394	Gab. Maros	24.001.000.214	4.000.000.007	19.000.000.207	24.001.000.204	
395	Gab. Tana Uai	17.833.410.930	2.332.000.001	1.043.000.001	17.833.410.930	
396	Gab. Kotabaru	24.830.419.026	4.441.200.174	10.004.100.112	24.830.419.026	
397	Gab. Palopo	20.014.040.121	4.290.000.293	17.123.000.138	20.014.040.121	
398	Gab. Luwu Timur	55.811.568.651	16.843.181.103	30.000.000.006	55.811.568.651	
399	Provinsi Sulawesi Barat	35.298.476.113	7.518.338.407	27.700.347.612	35.298.476.113	
400	Gab. Majene	30.007.760.656	1.671.871.103	25.000.760.500	30.007.760.600	
401	Gab. Mamuju	30.166.421.021	3.022.201.005	24.300.127.102	30.166.421.021	
402	Gab. Pidie Jaya	28.822.813.016	2.001.151.874	25.121.121.104	28.822.813.016	
403	Gab. Maros	25.058.630.512	2.142.100.574	23.303.036.505	25.058.630.512	
404	Gab. Mamuju Utara	36.024.612.210	1.139.100.212	24.420.100.100	36.024.612.210	
405	Provinsi Sulawesi Tengah	64.300.129.317	10.000.831.375	4.000.100.102	64.301.027.597	
406	Gab. Luwu	20.401.600.012	1.001.000.006	16.000.200.100	20.401.600.012	
407	Gab. Bone	21.865.400.279	1.001.400.103	23.178.396.406	21.865.400.279	
408	Gab. Kotabola	36.238.047.093	3.000.222.001	31.000.240.004	36.238.047.093	
409	Gab. Manado	20.869.205.712	1.000.140.204	13.9.2.200.476	20.869.205.712	
410	Gab. Enrekang	30.130.010.112	8.721.100.503	24.000.000.006	30.130.010.112	
411	Gab. Bone Barito	21.927.212.659	2.000.000.005	16.000.100.102	21.927.212.659	
412	Gab. Bone Selatan	27.833.606.011	1.813.372.671	21.800.100.107	27.833.606.011	

• 15 • 中国书画函授大学教材·国画·花鸟

Babu et al.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Page	Penilaian		Penilaian		Total
			4	PPI Penilaian	5	PPI	3 + 4 + 5 + 6
413	Glo. Bantul	22.292.033.350	1.067.020.073	21.024.308.332	22.292.033.350		
414	Glo. Banjarnegara	19.901.819.070	902.323.451	3.0.319.422	21.024.308.332	21.024.308.332	
415	Glo. Batang	1.785.310.850	984.486.881	1.702.382.206	1.785.310.850	1.785.310.850	
416	Glo. Blitar	27.067.728.821	1.172.461.074	19.945.706.717	27.067.728.821	27.067.728.821	
417	Glo. Bojonegoro	26.026.000.440	1.021.081.448	20.083.011.180	26.026.000.440	26.026.000.440	
418	Glo. Probolinggo	15.257.115.172	61.013.416.488	57.073.240.014	15.257.115.172	15.257.115.172	
419	Glo. Ponorogo	22.058.762.746	97.061.672.193	98.173.315.302	22.058.762.746	22.058.762.746	
420	Glo. Sampang	27.145.021.976	4.462.801.887	1.674.324.086	27.145.021.976	27.145.021.976	
421	Glo. Pekalongan	34.284.754.646	1.705.191.003	23.827.706.355	34.284.754.646	34.284.754.646	
422	Glo. Gresik	20.380.936.410	0.141.401.060	2.028.644.842	20.380.936.410	20.380.936.410	
423	Glo. Jember	27.197.451.128	5.271.837.585	17.021.306.310	27.197.451.128	27.197.451.128	
424	Glo. Pasuruan	26.209.000.626	6.225.099.073	23.042.006.006	26.209.000.626	26.209.000.626	
425	Glo. Blitar	10.302.040.622	4.911.301.001	1.043.002.004	10.302.040.622	10.302.040.622	
426	Glo. Trenggalek	29.309.933.432	8.905.293.901	22.046.507.471	29.309.933.432	29.309.933.432	
427	Glo. Cirebon	16.600.210.130	1.201.185.101	1.130.110.211	16.600.210.130	16.600.210.130	
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	86.383.586.124	45.739.624.371	48.629.951.153	86.383.586.124	86.383.586.124	
429	Glo. Lombok	20.211.100.612	2.401.001.389	1.000.000.386	20.211.100.612	20.211.100.612	
430	Glo. Dompu	19.998.486.178	3.212.331.255	1.748.100.002	19.998.486.178	19.998.486.178	
431	Glo. Lombok - Barat	2.801.715.036	0.595.201.142	0.329.451.132	2.801.715.036	2.801.715.036	
432	Glo. Lombok - Timur	34.148.757.938	4.624.217.948	28.022.138.396	34.148.757.938	34.148.757.938	
433	Glo. Lombok - Tengah	30.600.315.040	5.383.167.804	25.757.582.196	30.600.315.040	30.600.315.040	
434	Glo. Sumbawa	34.609.269.613	6.112.707.084	33.002.206.008	34.609.269.613	34.609.269.613	
435	Glo. Mataram	37.374.620.118	14.731.381.001	13.881.973.710	37.374.620.118	37.374.620.118	
436	Glo. Lombok - Utara	17.385.100.626	2.681.071.083	1.801.122.315	17.385.100.626	17.385.100.626	
437	Glo. Bima	22.000.247.711	1.001.071.401	1.102.106.281	22.000.247.711	22.000.247.711	
438	Glo. Sumba - Barat	50.013.7.510	53.125.295.875	53.125.295.875	50.013.7.510	50.013.7.510	
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	99.262.200.447	24.318.400.420	62.849.300.027	99.262.200.447	99.262.200.447	
440	Glo. Aceh	19.085.279.640	1.177.088.872	1.167.386.788	19.085.279.640	19.085.279.640	
441	Glo. Deli	21.078.630.130	2.010.000.130	1.000.000.130	21.078.630.130	21.078.630.130	
442	Glo. Aceh	17.5.253.745.846	2.055.442.131	1.147.136.725	17.5.253.745.846	17.5.253.745.846	
443	Glo. Aceh Timur	10.587.563.240	1.634.871.051	1.035.187.085	10.587.563.240	10.587.563.240	
444	Glo. Aceh Tengah	20.210.117.912	1.152.002.104	1.042.239.237	20.210.117.912	20.210.117.912	
445	Glo. Aceh Selatan	17.730.116.646	1.724.593.162	1.507.116.396	17.730.116.646	17.730.116.646	
446	Glo. Aceh Barat	15.735.717.850	2.071.395.183	1.269.132.574	15.735.717.850	15.735.717.850	
447	Glo. Aceh	15.207.260.931	1.231.866.432	1.382.401.023	15.207.260.931	15.207.260.931	
448	Glo. Simeulue	10.512.050.738	1.672.151.245	1.801.114.515	10.512.050.738	10.512.050.738	
449	Glo. Sumba - Utara	14.624.000.470	1.461.436.084	1.115.330.524	14.624.000.470	14.624.000.470	
450	Glo. Sumba - Timur	22.701.6.042	1.765.861.173	2.189.308.796	22.701.6.042	22.701.6.042	
451	Glo. Flores - Tengah Selatan	26.000.077.733	1.215.007.205	2.145.307.467	26.000.077.733	26.000.077.733	
452	Glo. Flores - Tengah Barat	2.727.408.150	1.474.007.192	2.038.047.222	2.727.408.150	2.727.408.150	
453	Glo. Sumba	3.812.267.131	16.451.601.422	12.241.214.301	3.812.267.131	3.812.267.131	
454	Glo. Maluku	18.807.442.018	1.261.477.003	1.112.101.030	18.807.442.018	18.807.442.018	
455	Glo. Halmahera	16.782.194.529	962.062.142	1.013.132.396	16.782.194.529	16.782.194.529	
456	Glo. Sumba - Tengah	13.032.700.440	0.710.071.705	1.001.100.702	13.032.700.440	13.032.700.440	
457	Glo. Sumba - Barat Daya	18.344.639.372	695.067.005	1.043.130.325	18.344.639.372	18.344.639.372	
458	Glo. Maluku Tengah	17.018.231.510	805.955.103	1.333.131.496	17.018.231.510	17.018.231.510	
459	Glo. Sumba - Sulawesi	11.642.947.018	782.061.102	1.062.236.516	11.642.947.018	11.642.947.018	
460	Glo. Maluku Barat	17.558.822.005	1.147.504.593	1.001.118.318	17.558.822.005	17.558.822.005	
461	Provinsi Nusa Tenggara	26.181.104.147	11.188.148.817	8.049.218.020	11.188.148.817	11.188.148.817	
462	Glo. Maluku Tenggara Barat	26.813.736.672	803.211.882	25.137.215.702	26.813.736.672	26.813.736.672	
463	Glo. Maluku Tengah	24.708.566.632	1.125.230.011	42.933.350.351	24.708.566.632	24.708.566.632	
464	Glo. Maluku Tenggara Utara	26.412.407.233	1.139.167.006	23.017.312.043	26.412.407.233	26.412.407.233	
465	Glo. Ende Raya	10.36.809.138	851.651.585	8.541.352.506	10.36.809.138	10.36.809.138	
466	Glo. Ambon	9.216.308.010	803.947.008	21.034.039.200	9.216.308.010	9.216.308.010	
467	Glo. Bima - Bagian Barat	24.987.440.532	957.904.872	24.003.335.742	24.987.440.532	24.987.440.532	
468	Glo. Bima - Bagian Tengah	12.620.136.158	771.000.068	11.162.231.811	12.620.136.158	12.620.136.158	
469	Glo. Maluku Barat Daya	24.148.22.932	1.041.963.713	22.702.104.088	24.148.22.932	24.148.22.932	
470	Glo. Buton Selatan	15.737.037.853	863.857.004	17.371.156.581	15.737.037.853	15.737.037.853	
471	Glo. Republik Riau	28.925.100.926	821.046.073	29.994.257.926	28.925.100.926	28.925.100.926	
472	Glo. Riau	13.010.337.530	631.301.301	12.373.186.312	13.010.337.530	13.010.337.530	

DEPARTEMEN KESATUAN KERJA DAN PENGEMBANGAN Sosial dan Pemerintahan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

Ur.	Daerah	Page	Realisasi				Total
			PPh Perdagangan	PBB	BPHTB		
1	2	3	4	5	6	7	7 + 4 + 6 + 8
473	Provinsi Maluku Utara	47.085.385.811	14.118.053.345	52.173.310.511	77.814		87.145.443.640
474	Gdi. Ambon & sebgln	32.010.331.735	1.354.259.708	31.153.331.553			33.312.831.730
475	Gdi. Jayawijaya	21.729.355.497	1.171.010.609	26.101.201.982			23.162.000.497
476	Gdi. Minahasa	42.803.554.381	9.264.831.26	35.148.101.620			42.301.257.831
477	Gdi. Makassar Selatan	42.781.175.524	1.335.079.057	40.311.102.863			42.162.029.826
478	Gdi. Idam Kabbaran	20.914.302.174	1.045.000.402	26.301.125.112	310.813		29.465.000.000
479	Gdi. Sulawesi Sel.	31.830.385.105	1.378.016.113	30.165.371.087			31.331.369.178
480	Gdi. Palu Wanta	14.292.375.563	924.123.509	10.469.193.302			14.392.696.853
481	Gdi. Sulawesi Selatan	42.306.1.123	1.323.125.926	35.173.361.066			42.301.011.823
482	Gdi. Sulawesi Teng.	32.303.733.105	5.123.928.533	26.129.307.076			32.301.136.139
483	Gdi. Sulaw.	12.614.321.992	1.363.071.249	11.223.285.068	1.828.344		12.314.821.932
484	Gdi. C. Laut	16.465.587.503	1.358.071.060	16.350.351.000	1.858.343		16.881.522.526
485	Provinsi Papua	209.221.796.195	93.378.012.407	179.142.783.781	4.483.210		288.228.421.195
486	Gdi. Jayapura	22.034.401.389	1.173.109.018	16.860.117.280			23.134.421.036
487	Gdi. Jayapura	31.026.211.351	2.223.142.710	31.104.371.632			31.131.011.351
488	Gdi. Jayawijaya	21.040.421.601	1.162.116.040	24.103.356.411			21.142.228.041
489	Gdi. Merauke	21.702.324.305	5.123.106.734	17.202.313.761			51.192.324.305
490	Gdi. Mimika	117.381.185.784	67.162.759.719	84.571.157.705			162.131.186.784
491	Gdi. M. Sel.	31.653.321.305	2.801.030.00	26.701.101.300			31.191.820.308
492	Gdi. Papua	50.824.534.335	2.393.056.003	16.593.352.156			20.334.242.230
493	Gdi. Papua Barat	19.910.211.612	1.371.258.244	16.334.336.861			19.641.339.912
494	Gdi. Jayaw. Yapan	21.300.243.355	247.913.424	32.323.339.151			31.301.024.955
495	Gdi. Jayapura	36.510.3.123	5.3.912.088	20.502.301.140	16.558.302		33.301.020.29
496	Gdi. Samosir	20.590.3.438	1.773.056.290	21.123.321.740			38.192.014.030
497	Gdi. Keerom	32.20.274.513	1.363.070.000	30.173.361.736			39.172.071.515
498	Gdi. Wahgi	40.864.377.113	1.163.756.088	35.185.402.131			43.561.801.218
499	Gdi. Agamungga Bintangor	49.789.342.411	2.143.035.909	41.184.477.810			46.970.049.411
500	Gdi. Tololela	33.533.341.135	1.573.123.007	31.162.381.152			33.131.541.738
501	Gdi. Boven Digoel	48.057.371.372	3.269.259.708	44.785.307.568			48.357.871.276
502	Gdi. Misig	48.62.3.351.371	2.303.146.1	46.271.201.360			48.341.356.871
503	Gdi. Samarai	43.044.385.353	2.192.128.039	40.362.451.321			43.344.656.313
504	Gdi. Asmat	4.42.3.322.174	1.521.223.65	4.4.3.345.918			4.431.622.579
505	Gdi. Mamberluatu Biak	32.31.3.373.105	1.401.146.627	36.313.391.142			32.1.373.105.30
506	Gdi. Morotai dan Togian	12.482.351.484	1.161.821.792	10.494.471.114	1.828.344		12.482.901.424
507	Gdi. Waisai	13.67.4.321.364	1.9.985.004	12.604.385.110	1.020.345		13.711.421.321
508	Gdi. Jayaw.	21.410.305.504	1.301.46.016	16.504.307.960	1.858.343		21.411.820.531
509	Gdi. Jayaw. Jayap.	10.406.211.222	1.904.12.007	16.461.154.100			10.406.022.622
510	Gdi. Jayaw.	20.03.1.103.122	1.861.073.667	16.378.101.172	1.030.344		20.031.801.720
511	Gdi. Tami	14.671.135.184	1.301.328.037	12.351.377.361			14.351.136.398
512	Gdi. Supiori	19.22.3.307.443	1.103.010.900	12.591.151.046			19.21.060.455
513	Provinsi Papua Barat	193.481.304.904	19.371.322.011	173.311.037.189			193.471.304.909
514	Gdi. Sorong	123.976.785.413	2.973.821.639	12.397.150.179			123.975.789.418
515	Gdi. West Papua	11.176.3.1.301	4.043.472.057	9.143.301.125			10.176.316.053
516	Gdi. Puncak Jaya	56.400.301.905	1.909.011.900	51.131.1.1.810			55.409.025.900
517	Gdi. Sorong	41.500.329.1.71	1.365.022.929	46.163.325.1.042			51.131.250.921
518	Gdi. Boven Digoel	32.008.362.372	1.103.020.078	36.199.302.670			42.331.261.407
519	Gdi. Raja Ampat	27.314.337.735	1.469.227.116	15.341.162.671			27.314.827.736
520	Gdi. Teluk Arfak	180.088.272.002	5.008.12.000	12.102.212.004			18.186.212.858
521	Gdi. Teluk Cemara	36.125.241.332	1.261.163.735	31.163.367.103			36.121.047.858
522	Gdi. Tambrauw	28.646.384.357	828.374.954	27.318.303.363			28.646.384.357
523	Gdi. West Papua	31.40.3.307.302	821.171.867	30.373.3.1.002			31.491.151.959
524	Gdi. Karimun	30.212.381.332	1.407.014.94	28.201.331.726			30.212.781.930
525	Gdi. Ende	-	-	-	0		0
526	Gdi. Ende dan Sapele	-	-	-	0		0
527	Gdi. Ende dan Sapele	JUMLAH	41.918.928.404.416	13.237.328.419.261	28.231.412.983.029	8.747.378.192	41.928.398.919.178

卷之三

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DATA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Selanjutnya]

卷之三

LAPORAN KEGIATAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN

LAPORAN KEAUSAHAWANAN TRANSFER DAYA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Balai Rappah]

No.	Dauhah	Pemda	Penyaluran				Penerimaan	Rakitan	Total
			4	Gej. Benih	Pembangunan	T			
1	P.d. satuan Bal	2	51 - 03.234	38.452.068	40.259.755	28.179.212	0	182.445.813	18
2	P.d. satuan Bal	2	607.316.013	38.621.065	50.259.755	0	182.326.561	573.256.613	593.756.613
3	P.d. satuan Bal	3	261.313.015	2.000.31.012	1.196.33.002	0	103.38.601	2.001.21.012	2.001.21.012
4	P.d. satuan Bal	3	161.441.011	0	0	0	0	0	0
5	P.d. satuan Bal	3	24.411.419	0	21.458.451	0	2.74.348.441	2.74.348.441	2.74.348.441
6	P.d. satuan Bal	3	5.81.351.051	38.521.064	40.360.355	0	5.465.315.800	5.465.315.800	5.465.315.800
7	P.d. satuan Bal	3	2.691.311.133	59.621.065	40.360.355	20.120.011	0	2.101.20.011	2.101.20.011
8	P.d. satuan Bal	3	166.303.027	20.621.065	40.360.355	71.143.153	0	101.38.601	201.38.601
9	P.d. satuan Bal	3	824.526.225	0	44.720.312	0	271.26.628	1.107.31.627	1.107.31.627
10	P.d. satuan Bal	3	27.326.225	0	40.360.355	0	5.465.315.800	32.791.31.800	32.791.31.800
11	P.d. satuan Bal	3	57.311.313	38.521.064	40.360.355	0	5.465.315.800	57.311.313	57.311.313
12	P.d. satuan Bal	3	92.318.112	59.621.064	52.355.803	0	182.326.561	1.007.326.561	1.007.326.561
13	P.d. satuan Bal	3	20.214.079	38.521.064	40.360.355	0	182.326.561	563.326.561	563.326.561
14	P.d. satuan Bal	3	603.215.823	20.621.065	40.360.355	0	101.38.601	271.26.628	603.215.823
15	P.d. satuan Bal	3	29.311.313	39.621.064	40.360.355	0	182.326.561	3.74.348.441	3.74.348.441
16	P.d. satuan Bal	3	18.411.343	0	21.458.451	0	101.38.601	2.74.348.441	2.74.348.441
17	P.d. satuan Bal	3	20.214.079	38.521.064	40.360.355	0	182.326.561	563.326.561	563.326.561
18	P.d. satuan Bal	3	403.203.012	35.371.303	40.360.355	0	507.24.743	571.326.823	571.326.823
19	P.d. satuan Bal	3	66.405.841	10.212.062	40.360.355	0	4.46.310.602	271.26.628	603.215.823
20	P.d. satuan Bal	3	74.194.313	65.2.1.041	21.458.451	0	101.38.601	2.74.348.441	341.16.313
21	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
22	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
23	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
24	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
25	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
26	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
27	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
28	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
29	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
30	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
31	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
32	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
33	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
34	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
35	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
36	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
37	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
38	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
39	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
40	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
41	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
42	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
43	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
44	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
45	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
46	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
47	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
48	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
49	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
50	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
51	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
52	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
53	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
54	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
55	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
56	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
57	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
58	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
59	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
60	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
61	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
62	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
63	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
64	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
65	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
66	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
67	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
68	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
69	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
70	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
71	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
72	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
73	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
74	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
75	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
76	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
77	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
78	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
79	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
80	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
81	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
82	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
83	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
84	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
85	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
86	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
87	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
88	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
89	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
90	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
91	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
92	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
93	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
94	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
95	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
96	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
97	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
98	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
99	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
100	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
101	P.d. satuan Bal	3	1.391.100	0	0	0	0	1.391.100	1.391.100
102	P.d. satuan Bal</td								

LAPORAN

LAPORAN REALISASI LAMPGARAN TRANSFER DANNA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Balai Rappah]

No.	Dauhuh	Pemda	Rahasi				Rahasi	Rahasi	Rahasi	Rahasi	Total
			Waduk Sari	Gorontani	Pelabuhan Ratu	Tanah					
1			1	507.570,2	38.452.068	40.259.755	0	0	51.428.503	57.252.813	18
57	Kab. Bone		52	621.550,12	35,2 - 603	40.259.755	0	0	48.756.561	57.256.240	57.451.152
58	Kab. Maros										BBR.01.1.802
69	PLM/PLB Bantuan Bantul		804.647.082			7.490.778.701	0	0	2.761.241.102		
H.	Kab. Tana Toraja		1.713.55.346			1.713.55.346	0	0	1.713.55.346		1.713.55.346
H'	Kab. Gorontalo		1.281.411.141			1.281.411.141	0	0	1.281.411.141		1.281.411.141
H''	Kab. Gowa		4.723.710.815			4.723.710.815	0	0	4.723.710.815		4.723.710.815
G1	Kab. Bone Maros		1.321.345.049			1.321.345.049	0	0	1.321.345.049		1.321.345.049
G2	Kab. Maros Palopo		1.367.167.072			1.367.167.072	0	0	1.367.167.072		1.367.167.072
G3	Kab. Maros Sulawesi		1.363.120.019			1.363.120.019	0	0	1.363.120.019		1.363.120.019
G4	Kab. Bone Sulawesi		3.065.198.173			3.065.198.173	0	0	3.065.198.173		3.065.198.173
G5	Kab. Bone		1.905.311.121			1.905.311.121	0	0	1.905.311.121		1.905.311.121
G6	Kab. Maros		1.323.384.875			1.323.384.875	0	0	1.323.384.875		1.323.384.875
G7	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G8	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G9	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G10	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G11	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G12	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G13	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G14	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G15	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G16	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G17	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G18	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G19	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G20	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G21	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G22	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G23	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G24	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G25	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G26	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G27	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G28	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G29	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G30	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G31	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G32	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G33	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G34	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G35	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G36	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G37	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G38	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G39	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G40	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G41	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G42	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G43	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G44	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G45	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G46	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G47	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G48	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G49	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G50	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G51	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G52	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G53	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G54	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G55	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G56	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G57	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G58	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G59	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G60	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G61	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G62	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G63	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G64	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G65	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G66	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G67	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G68	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G69	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G70	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G71	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G72	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G73	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G74	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G75	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G76	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G77	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G78	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G79	Kab. Maros		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G80	Kab. Maros Palopo		1.231.342.949			1.231.342.949	0	0	1.231.342.949		1.231.342.949
G81	Kab. Maros Sulawesi		1.231.342.94								

卷之六

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DATA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Selanjutnya]

• 148

LAPORAN REALISASI LANGGARAN TRANSFER DANNA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Balai Rappah]

No.	Darah	Periode	Penerima				Realisasi				Total
			Waduk Sari	4	Graf Beni	Pelabuhan Ratu	T	Perse. Gun	Im. Infrastruktur	Hulu Pemban	
1			248.903.958.130	80.378.237.444	151.082.455.141	0	4.884.521.069	1.084.010.204.451	271.726.673	271.726.673	1.084.010.204.451
112	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	211.165.516.561	12.552.710.015	114.652.510.952	115.535.612.554	0	55.572.026	23.381.325.351	271.726.673	271.726.673	23.381.325.351
113	Pd. Jati	100.131.131.134	301.283.371.021	110.136.132.177	21.064.994.022	0	23.381.325.351	40.064.016.023	271.726.673	271.726.673	40.064.016.023
114	Pd. Keti	78.116	7.797.14.888	7.797.14.888	7.797.14.888	0	2.741.321.187	2.741.321.187	2.741.321.187	2.741.321.187	2.741.321.187
115	Kpd. Tana Toraja	100.131.131.134	208.131.131.134	91.131.131.134	15.101.131.134	0	11.111.131.134	11.111.131.134	11.111.131.134	11.111.131.134	11.111.131.134
116	Kpd. Bone	111.561.751.751	31.651.751.751	36.888.211.907	31.813.211.907	0	1.511.751.751	572.758.873	144.872.712.729	572.758.873	144.872.712.729
117	Kpd. Maros	62.152.622.622	62.152.622.622	71.253.322.119	22.061.322.119	0	39.415.322.323	271.36.673	190.841.210.012	271.36.673	190.841.210.012
118	Kpd. Kendari	113.351.722.722	34.617.722.722	70.320.311.624	21.205.320.342	0	20.411.311.624	271.36.673	143.235.180.012	271.36.673	143.235.180.012
119	Kpd. Paitom	12.343.122.122	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	12.343.122.122	12.343.122.122	12.343.122.122	12.343.122.122	12.343.122.122
120	Kpd. Paitom Barat	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	10.122.322.121	572.758.873	144.872.712.729	572.758.873	144.872.712.729
121	Kpd. Ampana	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	10.122.322.121	10.122.322.121	10.122.322.121	10.122.322.121	10.122.322.121
122	Kpd. Ampana	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	10.122.322.121	572.758.873	144.872.712.729	572.758.873	144.872.712.729
123	Kpd. Ampana	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.511.751.751	145.314.318.420	572.758.873	572.758.873	145.314.318.420
124	Kpd. Maros	62.152.622.622	62.152.622.622	71.253.322.119	22.061.322.119	0	2.624.317.623	271.36.673	190.841.210.012	271.36.673	190.841.210.012
125	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	9.411.311.624	144.872.712.729	144.872.712.729	144.872.712.729	144.872.712.729
126	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.111.311.624	2.741.321.187	144.872.712.729	2.741.321.187	144.872.712.729
127	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	572.758.873	145.314.318.420	572.758.873	145.314.318.420	572.758.873
128	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	141.122.021.021	11.529.119.184	145.801.935.121	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	572.758.873	155.965.152
129	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	141.122.021.021	11.529.119.184	145.801.935.121	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	572.758.873	155.965.152
130	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
131	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
132	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
133	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
134	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
135	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
136	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
137	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
138	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
139	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
140	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
141	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
142	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
143	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
144	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
145	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
146	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
147	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
148	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
149	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
150	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
151	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
152	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
153	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
154	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
155	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
156	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
157	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
158	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
159	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
160	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
161	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
162	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
163	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
164	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
165	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
166	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152
167	Kpd. Maros	113.351.722.722	34.617.722.722	30.220.311.624	21.205.320.342	0	1.521.812	155.965.152	572.758.873	572.758.873	155.965.152

14744 • J. Neurosci., July 1, 2009 • 29(27):14737–14744

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DATA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAJUH ANGGARAN 2011
Dalam Rupiah

No.	District	Peta	Waktu Bumi	Graf Bumi	Pembangunan Bumi	Perbaikan Bumi	Penanaman Bumi	Penanaman Padi	Hulu Padi Bumi	Hulu Padi Bumi	Total
1											11
40	Kab. Bantul	2	3.251.71.732				3.010.12.24.432		..-18.912	578.38.832	3.421.114.832
41	Kab. Sleman		3.321.20.732				3.261.20.732		3.061.-35.432	578.36.232	3.061.20.732
42	Kab. Kulon Progo		3.251.40.164				3.230.23.10.842		3.101.70.352	578.20.532	3.061.20.164
43	Kab. Yogyakarta	1	1.141.71.111				1.121.10.47.111		1.111.94.311	578.14.632	1.111.94.111
44	Kab. Kulon Progo		1.130.18.111				1.128.10.98.111		1.101.70.111	578.10.111	1.101.70.111
45	Kab. Kulon Progo		1.170.21.831				1.169.12.35.831		1.150.70.831	578.08.831	1.149.70.831
46	Kab. Kulon Progo		2.350.20.832				2.313.20.832		2.310.70.832	578.20.832	2.309.70.832
47	Pek. Bantul Langit	1	10.146.24.167				10.145.20.173		10.146.70.173	578.16.173	10.146.16.173
48	Pek. Bantul Langit		10.291.32.272				20.016.10.232		1.125.10.232	578.02.232	11.867.10.232
49	Kab. Sleman		15.201.55.532				15.178.31.176		1.158.0.111	578.31.176	15.158.31.176
50	Kab. Sleman		15.242.10.148				15.258.24.564		1.159.0.114	578.24.564	15.259.0.114
51	Kab. Sleman		15.252.38.562				15.258.24.852		1.159.0.114	578.24.852	15.259.0.114
52	Kab. Sleman		61.752.0.152				61.750.0.152		1.157.17.052	578.0.152	61.758.0.152
53	Kab. Sleman		61.752.0.156				61.750.0.156		1.157.17.056	578.0.156	61.758.0.156
54	Kab. Sleman		1.170.12.152				1.168.12.152		1.168.12.152	578.12.152	1.169.12.152
55	Kab. Sleman		1.170.12.156				1.168.12.156		1.168.12.156	578.12.156	1.169.12.156
56	Kab. Sleman		1.170.12.161				1.168.12.161		1.168.12.161	578.12.161	1.169.12.161
57	Kab. Sleman		1.170.12.165				1.168.12.165		1.168.12.165	578.12.165	1.169.12.165
58	Kab. Sleman		1.170.12.169				1.168.12.169		1.168.12.169	578.12.169	1.169.12.169
59	Kab. Sleman		1.170.12.173				1.168.12.173		1.168.12.173	578.12.173	1.169.12.173
60	Kab. Sleman		1.170.12.177				1.168.12.177		1.168.12.177	578.12.177	1.169.12.177
61	Kab. Sleman		1.170.12.181				1.168.12.181		1.168.12.181	578.12.181	1.169.12.181
62	Kab. Sleman		1.170.12.185				1.168.12.185		1.168.12.185	578.12.185	1.169.12.185
63	Kab. Sleman		1.170.12.189				1.168.12.189		1.168.12.189	578.12.189	1.169.12.189
64	Kab. Sleman		1.170.12.193				1.168.12.193		1.168.12.193	578.12.193	1.169.12.193
65	Kab. Sleman		1.170.12.197				1.168.12.197		1.168.12.197	578.12.197	1.169.12.197
66	Kab. Sleman		1.170.12.201				1.168.12.201		1.168.12.201	578.12.201	1.169.12.201
67	Kab. Sleman		1.170.12.205				1.168.12.205		1.168.12.205	578.12.205	1.169.12.205
68	Kab. Sleman		1.170.12.209				1.168.12.209		1.168.12.209	578.12.209	1.169.12.209
69	Kab. Sleman		1.170.12.213				1.168.12.213		1.168.12.213	578.12.213	1.169.12.213
70	Kab. Sleman		1.170.12.217				1.168.12.217		1.168.12.217	578.12.217	1.169.12.217
71	Kab. Sleman		1.170.12.221				1.168.12.221		1.168.12.221	578.12.221	1.169.12.221
72	Kab. Sleman		1.170.12.225				1.168.12.225		1.168.12.225	578.12.225	1.169.12.225
73	Kab. Sleman		1.170.12.229				1.168.12.229		1.168.12.229	578.12.229	1.169.12.229
74	Kab. Sleman		1.170.12.233				1.168.12.233		1.168.12.233	578.12.233	1.169.12.233
75	Kab. Sleman		1.170.12.237				1.168.12.237		1.168.12.237	578.12.237	1.169.12.237
76	Kab. Sleman		1.170.12.241				1.168.12.241		1.168.12.241	578.12.241	1.169.12.241
77	Kab. Sleman		1.170.12.245				1.168.12.245		1.168.12.245	578.12.245	1.169.12.245
78	Kab. Sleman		1.170.12.249				1.168.12.249		1.168.12.249	578.12.249	1.169.12.249
79	Kab. Sleman		1.170.12.253				1.168.12.253		1.168.12.253	578.12.253	1.169.12.253
80	Kab. Sleman		1.170.12.257				1.168.12.257		1.168.12.257	578.12.257	1.169.12.257
81	Kab. Sleman		1.170.12.261				1.168.12.261		1.168.12.261	578.12.261	1.169.12.261
82	Kab. Sleman		1.170.12.265				1.168.12.265		1.168.12.265	578.12.265	1.169.12.265
83	Kab. Sleman		1.170.12.269				1.168.12.269		1.168.12.269	578.12.269	1.169.12.269
84	Kab. Sleman		1.170.12.273				1.168.12.273		1.168.12.273	578.12.273	1.169.12.273
85	Kab. Sleman		1.170.12.277				1.168.12.277		1.168.12.277	578.12.277	1.169.12.277
86	Kab. Sleman		1.170.12.281				1.168.12.281		1.168.12.281	578.12.281	1.169.12.281
87	Kab. Sleman		1.170.12.285				1.168.12.285		1.168.12.285	578.12.285	1.169.12.285
88	Kab. Sleman		1.170.12.289				1.168.12.289		1.168.12.289	578.12.289	1.169.12.289
89	Kab. Sleman		1.170.12.293				1.168.12.293		1.168.12.293	578.12.293	1.169.12.293
90	Kab. Sleman		1.170.12.297				1.168.12.297		1.168.12.297	578.12.297	1.169.12.297
91	Kab. Sleman		1.170.12.301				1.168.12.301		1.168.12.301	578.12.301	1.169.12.301
92	Kab. Sleman		1.170.12.305				1.168.12.305		1.168.12.305	578.12.305	1.169.12.305
93	Kab. Sleman		1.170.12.309				1.168.12.309		1.168.12.309	578.12.309	1.169.12.309
94	Kab. Sleman		1.170.12.313				1.168.12.313		1.168.12.313	578.12.313	1.169.12.313
95	Kab. Sleman		1.170.12.317				1.168.12.317		1.168.12.317	578.12.317	1.169.12.317
96	Kab. Sleman		1.170.12.321				1.168.12.321		1.168.12.321	578.12.321	1.169.12.321
97	Kab. Sleman		1.170.12.325				1.168.12.325		1.168.12.325	578.12.325	1.169.12.325
98	Kab. Sleman		1.170.12.329				1.168.12.329		1.168.12.329	578.12.329	1.169.12.329
99	Kab. Sleman		1.170.12.333				1.168.12.333		1.168.12.333	578.12.333	1.169.12.333
100	Kab. Sleman		1.170.12.337				1.168.12.337		1.168.12.337	578.12.337	1.169.12.337
101	Kab. Sleman		1.170.12.341				1.168.12.341		1.168.12.341	578.12.341	1.169.12.341
102	Kab. Sleman		1.170.12.345				1.168.12.345		1.168.12.345	578.12.345	1.169.12.345
103	Kab. Sleman		1.170.12.349				1.168.12.349		1.168.12.349	578.12.349	1.169.12.349
104	Kab. Sleman		1.170.12.353				1.168.12.353		1.168.12.353	578.12.353	1.169.12.353
105	Kab. Sleman		1.170.12.357				1.168.12.357		1.168.12.357	578.12.357	1.169.12.357
106	Kab. Sleman		1.170.12.361				1.168.12.361		1.168.12.361	578.12.361	1.169.12.361
107	Kab. Sleman		1.170.12.365				1.168.12.365		1.168.12.365	578.12.365	1.169.12.365
108	Kab. Sleman		1.170.12.369				1.168.12.369		1.168.12.369	578.12.369	1.169.12.369
109	Kab. Sleman		1.170.12.373				1.168.12.373		1.168.12.373	578.12.373	1.169.12.373
110	Kab. Sleman		1.170.12.377				1.168.12.377		1.168.12.377	578.12.377	1.169.12.377
111	Kab. Sleman		1.170.12.381				1.168.12.381		1.168.12.381	578.12.381	1.169.12.381
112	Kab. Sleman		1.170.12.385				1.168.12.385		1.168.12.385	578.12.385	1.169.12.385
113	Kab. Sleman		1.170.12.389				1.168.12.389		1.168.12.389	578.12.389	1.169.12.389
114	Kab. Sleman		1.170.12.393				1.168.12.393		1.168.12.393	578.12.393	1.169.12.393
115	Kab. Sleman		1.170.12.397				1.168.12.397		1.168.12.397	578.12.397	1.169.12.397
116	Kab. Sleman		1.170.12.401				1.168.12.401		1.168.12.401	578.12.401	1.169.12.401
117	Kab. Sleman		1.170.12.405				1.168.12.405		1.168.12.405	578.12.405	1.169.12.405
118	Kab. Sleman		1.170.12.409				1.168.12.409		1.168.12.409	578.12.409	1.169.12.409
119	Kab. Sleman		1.170.12.413				1.168.12.413		1.168.12.413	578.12.413	1.169.12.413
120	Kab. Sleman		1.170.12.417				1.168.12.417		1.168.12.417	578.12.417	1.169.12.417
121	Kab. Sleman		1.170.12.421				1.168.12.421		1.168.12.421	578.12.421	1.169.12.421
122	Kab. Sleman		1.170.12.425				1.168.12.425		1.168.12.425	578.12.425	1.169.12.425
123	Kab. Sleman		1.170.12.429				1.168.12.429		1.168.12.429	578.12.429	1.169.12.429
124	Kab. Sleman		1.170.12.433				1.168.12.433		1.168.12.433	578.12.433	1.169.12.433
125	Kab. Sleman		1.170.12.437				1.168.12.437		1.168.12.437	578.12.437	1.169.12.437
126	Kab. Sleman		1.170.12.441				1.168.12.441		1.168.12.441	578.12.441	1.169.12.441
127	Kab. Sleman		1.170.12.445				1.168.12.445		1.168.12.445	578.12.445	1.169.12.445
128	Kab. Sleman		1.170.12.449				1.168.12.449		1.168.12.449	578.12.449	1.169.12.449
129	Kab. Sleman		1.170.12.453				1.168.12.453		1.168.12.453	578.12.453	1.169.12.453
130	Kab. Sleman		1.170.12.457				1.168.12.457		1.168.12.457	578.12.457	1.169.12.457
131	Kab. Sleman		1.170.12.461				1.168.12.461		1.168.12.461	578.12.461	1.169.12.461
132	Kab. Sleman		1.170.12.465				1.168.12.465		1.168.12.465	578.12.465	1.169.12.465
133	Kab. Sleman		1.170.12.469</								

57

卷之六

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DATA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAHAN 2011
[Selangor Rujukan]

מִשְׁנָה בְּבֵית הַמִּלְאָקֶת

134

卷六

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
Balai Rappali

卷之三

LAPORAN

LAPORAN REALISASI LANGGARAN TRANSFER DANNA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Balai Pengadaan]

No.	Dauhah	Pemda	Rakitasi				Rakitasi	Rakitasi	Rakitasi	Rakitasi	Rakitasi	
			Waduk Bumi	Graf Bumi	Pembangunan	Perbaikan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	Kab. Tangerang	671.82.22.1	84.427.008	8.328.961	44.552.523	0	50.43.731	573.258.813	782.254.73			
215	Kab. Tangerang	671.82.102.126	65.631.005	8.328.961	44.552.523	0	90.135.924	273.256.673	1.205.523.12			
226	Kab. Tangerang	732.108.015	65.631.005	3.310.962	44.052.523	0	40.1.96.2	40.1.96.2	40.1.96.2			
157	Kab. Tangerang	732.108.015	3.310.962	17.1.27.1	27.1.28.1	0	11.1.96.1	27.1.28.1	40.1.96.2			
128	Kab. Tangerang	732.108.015	3.310.962	17.1.27.1	27.1.28.1	0	11.1.27.1	27.1.28.1	40.1.96.2			
198	Kab. Tangerang	732.108.015	3.310.962	17.1.27.1	27.1.28.1	0	11.1.27.1	27.1.28.1	40.1.96.2			
350	Kab. Majalengka	671.82.22.1	84.427.008	8.328.961	44.552.523	0	50.43.731	573.258.813	782.254.73			
230	Kab. Majalengka	671.82.102.121	65.631.005	3.310.962	44.052.523	0	80.1.96.2	273.256.673	782.254.73			
231	Kab. Majalengka	671.82.102.121	65.631.005	3.310.962	44.052.523	0	80.1.96.2	273.256.673	782.254.73			
132	Kab. Majalengka	1.067.210.121	65.631.005	281.127.62	44.052.523	0	40.1.26.2	27.1.26.2	1.161.26.2			
125	Kab. Majalengka	1.067.210.121	65.631.005	281.127.62	44.052.523	0	40.1.26.2	27.1.26.2	1.161.26.2			
294	Kab. Majalengka	1.067.210.121	65.631.005	281.127.62	44.052.523	0	80.1.96.2	573.258.813	782.254.73			
355	Provinsi Jawa Barat	11.81.156.2	8.328.962	8.328.962	44.552.523	0	50.43.731	573.258.813	782.254.73			
120	P. B. Serang	25.1.102.121		36.1.24	50.1.26.2	0	11.1.60.2	27.1.26.2	27.1.26.2			
127	P. B. Serang	25.1.102.121		36.1.24	50.1.26.2	0	11.1.60.2	27.1.26.2	27.1.26.2			
134	P. B. Serang	25.1.102.121		36.1.24	50.1.26.2	0	11.1.60.2	27.1.26.2	27.1.26.2			
250	P. B. Serang	25.1.102.121		36.1.24	50.1.26.2	0	11.1.60.2	27.1.26.2	27.1.26.2			
240	P. B. Serang	25.1.102.121		36.1.24	50.1.26.2	0	11.1.60.2	27.1.26.2	27.1.26.2			
144	Bantul Daerah Istimewa	11.121.146.216	40.017.055	0	6.011.152	0	4.121.120	12.681.372	15.018.202.842			
142	Bantul Daerah Istimewa	11.121.146.216	1.11.10.1.101	1.11.10.1.101	1.11.10.1.101	0	2.11.10.1.101	2.11.10.1.101	2.11.10.1.101			
141	Bantul Daerah Istimewa	11.121.146.216	1.11.10.1.101	1.11.10.1.101	1.11.10.1.101	0	2.11.10.1.101	2.11.10.1.101	2.11.10.1.101			
144	Bantul Daerah Istimewa	1.11.10.1.101	1.11.10.1.101	1.11.10.1.101	1.11.10.1.101	0	1.11.10.1.101	1.11.10.1.101	1.11.10.1.101			
246	Bantul Daerah Istimewa	1.12.051.10.001	22.510.351.003	36.0.316.003	13.26.345	0	1.20.10.001	27.1.26.2	27.1.26.2			
245	Bantul Daerah Istimewa	1.12.051.10.001	22.510.351.003	36.0.316.003	13.26.345	0	2.11.10.001	27.1.26.2	27.1.26.2			
247	Bantul Daerah Istimewa	1.12.051.10.001	22.510.351.003	36.0.316.003	13.26.345	0	2.11.10.001	27.1.26.2	27.1.26.2			
746	Kab. Lampung	F.20.1.102.121	1.543.113.019	1.520.457.003	84.1.524.552	53.023.14	0	20.1.26.2	573.258.813	9.232.017		
249	Kab. Lampung	F.20.1.102.121	1.543.113.019	1.520.457.003	84.1.524.552	53.023.14	0	20.1.26.2	573.258.813	9.232.017		
250	Kab. Lampung	F.20.1.102.121	1.543.113.019	1.520.457.003	84.1.524.552	53.023.14	0	20.1.26.2	573.258.813	9.232.017		
251	Kab. Lampung	F.20.1.102.121	1.543.113.019	1.520.457.003	84.1.524.552	53.023.14	0	20.1.26.2	573.258.813	9.232.017		
252	Kab. Lampung	F.20.1.102.121	1.543.113.019	1.520.457.003	84.1.524.552	53.023.14	0	20.1.26.2	573.258.813	9.232.017		

LAPORAN KEAUSAHAWANAN TRANSFER DAYA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Balai Rappah]

No.	Dari	Pada	Rakitan				Rakitan				Rakitan				Rakitan			
			Waktu Bakti	Gej. Beni	Pelatihan	Waktu	Penyebarluasan	Waktu	Penyebarluasan	Waktu	Penyebarluasan	Waktu	Penyebarluasan	Waktu	Penyebarluasan	Waktu	Penyebarluasan	
1			1	4	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	R&B - 214614		2.564.319.949	1.652.427.863	641.734.352	90.032.112												
153	R&B - 226610		5.691.201.322	2.650.637.863	641.734.352	215.726.111												
216	R&B - 26610		3.253.341.214	2.650.637.863	641.734.352	13.26.434												
155	R&B - 226610		4.57.181.3	2.650.637.863	641.734.352	12.1.14.28.1												
128	R&B - 226610		1.207.431.114	2.650.637.863	641.734.352	2.11.14.28.1												
357	R&B - 226610		1.807.760.121	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
210	R&B - 226610		1.117.198.173	2.650.637.863	641.734.352	13.26.434												
219	R&B - 226610		1.373.123.349	2.650.637.863	641.734.352	87.078.123												
220	R&B - 226610		1.223.382.122	2.650.637.863	641.734.352	13.26.434												
196	R&B - 226610		1.581.360.171	2.650.637.863	641.734.352	91.1.14.28.1												
282	R&B - 226610		1.351.381.13	2.650.637.863	641.734.352	2.12.14.28.1												
265	R&B - 226610		1.587.152.442	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
274	R&B - 226610		1.223.216.012	2.650.637.863	641.734.352	13.26.434												
285	R&B - 226610		1.223.418.019	1.101.8.16.0	641.734.352	1.17.14.28.1												
194	R&B - 226610		1.201.141.611	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
267	R&B - 226610		1.223.370.079	2.650.637.863	640.120.193	13.26.434												
288	R&B - 226610		1.223.216.122	2.650.637.863	641.734.352	17.17.15.24												
218			16.121.162.111	2.116.721.168	641.734.352	13.26.434												
111	R&B - 226610		1.211.151.177	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
151	R&B - 226610		1.223.418.019	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
312	R&B - 226610		1.223.315.179	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
232	R&B - 226610		1.223.316.029	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
234	R&B - 226610		1.223.163.023	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
216	R&B - 226610		1.223.300.174	2.650.637.863	641.734.352	27.0.2.1.1												
218	R&B - 226610		1.223.315.179	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
219	R&B - 226610		1.223.315.179	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
212	R&B - 226610		1.223.315.179	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
219	R&B - 226610		1.223.315.179	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												
219	R&B - 226610		1.223.315.179	2.650.637.863	641.734.352	1.17.14.28.1												

LAPORAN KEGIATAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN

LAPORAN REALISASI LANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Balai Pengelola]

No.	Dari	Pada	Penyaluran				Penerimaan	Total
			Waktu Salin	Gej. Beni	Pembangunan	Penyebarluasan		
1	Pemerintah Provinsi	2	35.510.131.710	28.450.401.131	0	5.391.621.128	32.212.021.051	18
151	Pk. 310.32615		3.05.312.515	2.092.217.517	0	80.395.905	271.256.573	4.054.501.527
312	Pk. 312.12		6.05.310.177	4.38.510.133	0	3.204.30.303	7.807.320.343	7.807.320.343
751	Pk. 312.11.6		1.10.310.947	1.28.157.741	0	1.185.15.115	2.74.328.623	2.74.328.623
94	Pk. 312.11.7		21.20.310.957	0	0.10.110.112	0	1.19.100.111	18.226.47.147
395	Pk. 312.11.8		5.67.310.957	4.00.336.335	0	10.10.11.11	572.598.873	4.00.336.335
216	Pk. 312.12.2		4.03.310.957	2.06.26.113	0	59.10.11.12	217.36.623	1.002.300.123
217	Pk. 312.12.3		7.07.310.957	1.13.232.152	0	2.01.01.38.862	271.36.623	10.821.70.719
210	Pk. 312.12.4		10.72.310.957	4.12.232.45	0	1.72.10.11.11	271.36.623	12.12.31.463
396	Pk. 312.12.5		5.12.310.957	3.11.232.335	0	80.10.11.11	572.598.873	4.71.34.733
260	Pk. 312.12.6		2.01.310.957	2.05.232.957	0	80.10.11.11	271.36.623	4.70.33.226
291	Pk. 312.12.7		4.15.310.957	4.14.232.013	0	572.598.873	572.598.873	5.15.34.333
182	Pk. 312.12.8		8.30.310.957	4.00.238.444	0	6.27.10.00.009	271.36.623	10.703.12.045
363	Pk. 312.12.9		4.09.310.957	3.45.238.115	0	1.18.11.11.10	572.598.873	3.45.238.115
391	Pk. 312.12.10		4.10.310.957	4.11.232.151	0	1.11.11.11.11	271.36.623	10.71.34.314
256	Pemerintah Pusat		10.710.248.473	98.582.177.181	0	28.501.161.138	152.818.439.013	152.818.439.013
298	Pk. 312.13.1		58.525.315.32	23.510.212.17	0	4.02.10.24.24	572.598.873	5.15.34.333
265	Pk. 312.13.2		41.90.310.957	32.06.216.113	0	21.20.10.02.012	271.36.623	16.321.10.012
194	Pk. 312.13.3		3.02.310.957	1.14.25.61.114	0	1.14.11.11.11	572.598.873	4.15.34.333
700	Pk. 312.13.4		12.14.310.957	1.45.11.11.11	0	1.45.11.11.11	271.36.623	10.811.11.111
201	Pk. 312.13.5		12.15.310.957	1.60.10.11.11	0	1.51.20.11.11	271.36.623	12.15.31.521
202	Pk. 312.13.6		21.02.310.957	20.02.232.02	0	2.02.10.24.24	271.36.623	21.004.10.012
303	Pk. 312.13.7		10.03.310.957	13.10.230.117	0	16.4.20.11.11	271.36.623	17.004.11.112
701	Pk. 312.13.8		15.11.310.957	1.51.130.874	0	1.51.13.11.11	271.36.623	11.801.50.317
205	Pk. 312.13.9		55.80.310.957	5.10.152.612	0	5.11.11.10.005	572.598.873	50.101.80.005
206	Pk. 312.13.10		55.21.310.957	5.16.152.612	0	8.45.11.11.11	572.598.873	55.201.22.523
207	Pk. 312.13.11		12.001.310.957	4.207.237.013	0	2.385.43.213	271.36.623	11.803.481.123

LAP-IP-JP-151.

卷六

LAPORAN REALISASI BUDGET TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
Balai Pengelolaan
Balai Pengelolaan

卷之三

卷之三

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Selanjutnya]

FEB. 81, 1972.

卷之三

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DATA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAHAN 2011
[Selangor Rujukan]

FEB. 8, 1972.

LAPORAN KEGIATAN PENGETAHUAN WILAYAH DAN SUMBER ALAM

LAPORAN KEAUSAHAWANAN TRANSFER DATA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Balai Rappah]

No.	Dari	Pada	Pada				Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan	
			Waktu	Bulan	Tahun	No.							
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	1.7.23.25.32.32	107.4.2.001	1.421.02.2.07	0	3.345.91.0	571.2.28.8.3	1.81.3.22.22					
103	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	2.221.515.515	3.470.345.906	1.251.015.015	0	3.295.024	271.2.26.6.3	4.16.2.10.02.2					
104	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	1.7.1.18.02.02	107.4.2.001	1.201.046.045	0	3.38.024	271.2.26.6.3	1.73.2.0.6.3					
105	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	1.204.310.310	107.4.2.001	1.181.1.181	0	3.34.101	271.2.26.6.3	1.95.1.15.7					
106	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	1.7.1.30.01.01	107.4.2.001	1.124.1.124	0	3.34.101	271.2.26.6.3	1.97.1.24.0.5					
107	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	1.7.23.25.32.32	107.4.2.001	1.986.710.735	0	3.36.024	571.2.28.8.3	1.70.1.36.2.5					
108	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	28.02.346.346	107.4.2.001	21.01.2.001	0	1.03.01.00.0	271.2.26.6.3	28.12.16.3.2					
109	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	111.61.61.61.6		34.201.01.01	0	101.451.00.4		18.05.0.0.0					
110	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	29.1.20.1.20		-0001	0	5.7.141.30.1	271.2.26.6.3	30.12.0.0.7					
111	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	1.101.358.358		15.32.2.035	0	901.34.02.1	571.2.28.8.3	1.91.1.36.0.1					
102	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	267.366.366		222.32.2	0	55.1.17.0.2	271.2.26.6.3	28.1.36.3.2					
103	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	31.1.39.1.39		170.0.0.0.0	0	571.2.28.8.3	554.1.33.0.7						
104	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	31.2.36.1.36		1.178.1.4.1.4	0	77.1.20.0.0.0	271.2.26.6.3	36.1.20.0.0.5					
105	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	31.21.20.1.21.2		25.698.0.0.0.0	0	10.1.0.0.0.0.0		35.7.14.0.0.0					
106	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	31.167.1.167.1		111.16.1.11.1	0	1.1.1.1.1.1.1		11.1.16.3.8.1.3					
107	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	5.063.101.01.54		1.952.32.0.0.2	0	11.1.15.23.7		6.3.1.40.0.1.2					
108	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	10.501.459.459.53		21.095.0.0.0.0.0	0	135.1.36.2.52		55.25.1.25.4.2					
109	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	31.08.1.31.0.8		4.00.2.21.0.0.0	0	271.2.26.6.3		271.2.26.6.3					
110	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	31.18.1.31.1.8		1.161.0.0.0.0.0	0	1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1					
111	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	31.2.36.1.36		1.17.1.35.1.34	0	1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1					
112	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	31.25.2.25.2		1.18.1.34.1.34	0	1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1					
113	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	1.36.1.16.1.16		1.17.1.35.1.34	0	1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1					
114	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	1.3.26.1.26.1.2		1.18.1.34.1.34	0	1.1.1.1.1.1.1		1.1.1.1.1.1.1					
115	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	2.00.1.20.1.20.1		4.137.2.0.3.8.7	0	31.1.36.2.7.7	271.2.26.6.3	4.734.1.33.0.7					
116	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	5.30.1.35.1.35		1.16.1.34.1.34	0	2.1.31.0.0.0.0	271.2.26.6.3	4.73.1.34.0.7					
117	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	6.03.1.38.1.38		1.16.1.34.1.34	0	104.1.11.0.0.0.0	271.2.26.6.3	1.37.1.38.0.7					
118	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	6.03.1.38.1.38		8.03.1.35.1.35	0	104.1.11.0.0.0.0	271.2.26.6.3	1.37.1.38.0.7					
119	Kab. Sumbar ^{Sumbar}	257.1.26.1.26.1		257.1.26.1.26.1	0	271.2.26.6.3		271.2.26.6.3					

LAP-IPB-JA-58-

LAPORAN KEGIATAN PENGETAHUAN WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

LAPORAN KEAUSAHABAN TRANSFER DANNA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
Bulan Februari

No.	Darah	Peta	WILAYAH BANTU				GEOPOLITIK				PERENCANAAN				IMPLEMENTASI				HAL PELAKU			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	K.L. Sungai	2	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
450	K.L. Sungai	3	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
451	K.L. Sungai	4	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
452	K.L. Sungai	5	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
453	K.L. Sungai	6	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
454	K.L. Sungai	7	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
455	K.L. Sungai	8	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
456	K.L. Sungai	9	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
457	K.L. Sungai	10	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
458	Pembinaan Tegakan Hutan	11	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
459	K.L. Sungai	12	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
460	K.L. Sungai	13	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
461	K.L. Sungai	14	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
462	K.L. Sungai	15	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
463	K.L. Sungai	16	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
464	K.L. Sungai	17	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
465	K.L. Sungai	18	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
466	K.L. Sungai	19	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
467	K.L. Sungai	20	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
468	K.L. Sungai	21	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
469	K.L. Sungai	22	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
470	K.L. Sungai	23	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
471	K.L. Sungai	24	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
472	K.L. Sungai	25	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
473	K.L. Sungai	26	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
474	K.L. Sungai	27	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
475	K.L. Sungai	28	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
476	K.L. Sungai	29	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
477	K.L. Sungai	30	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
478	K.L. Sungai	31	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
479	K.L. Sungai	32	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
480	K.L. Sungai	33	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
481	K.L. Sungai	34	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
482	K.L. Sungai	35	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
483	K.L. Sungai	36	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
484	K.L. Sungai	37	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
485	K.L. Sungai	38	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
486	K.L. Sungai	39	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
487	K.L. Sungai	40	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
488	K.L. Sungai	41	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
489	K.L. Sungai	42	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
490	K.L. Sungai	43	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
491	K.L. Sungai	44	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
492	K.L. Sungai	45	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
493	K.L. Sungai	46	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
494	K.L. Sungai	47	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
495	K.L. Sungai	48	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
496	K.L. Sungai	49	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
497	K.L. Sungai	50	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
498	K.L. Sungai	51	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
499	K.L. Sungai	52	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
500	K.L. Sungai	53	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
501	K.L. Sungai	54	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
502	K.L. Sungai	55	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
503	K.L. Sungai	56	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
504	K.L. Sungai	57	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
505	K.L. Sungai	58	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
506	K.L. Sungai	59	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
507	K.L. Sungai	60	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
508	K.L. Sungai	61	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
509	K.L. Sungai	62	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
510	K.L. Sungai	63	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
511	K.L. Sungai	64	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
512	K.L. Sungai	65	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
513	K.L. Sungai	66	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
514	K.L. Sungai	67	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
515	K.L. Sungai	68	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
516	K.L. Sungai	69	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
517	K.L. Sungai	70	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
518	K.L. Sungai	71	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
519	K.L. Sungai	72	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
520	K.L. Sungai	73	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
521	K.L. Sungai	74	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
522	K.L. Sungai	75	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
523	K.L. Sungai	76	247.59.63.64							0									271.25.8.5	271.25.8.5		
524	K.L. Sungai	77	247.59.63.64																			

LAPORAN KEGIATAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN

LAPORAN KEAUSAHAWANAN TRANSFER DAYA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Balai Pengelola]

No.	Dari	Tujuan	Pengaruh				Pembentukan dan Pengembangan	Pengaruh	Hasil Penilaian	Total
			1	2	3	4				
1	Pd. Tbk		88.33%				78.64%	5	54.08%	18
448	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
449	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
450	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
451	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
452	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
453	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
454	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
455	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
456	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
457	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
458	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
459	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
460	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
461	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
462	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
463	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
464	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
465	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
466	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
467	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
468	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
469	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
470	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
471	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
472	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
473	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
474	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13
475	Pd. Tbk	Pd. Tbk	33.33%				71.64%	3	57.13%	13

LAP-IP-JB-582.

卷之三

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
(Balai Rujukan)

-32-
2. -3.

LAPORAN KEGIATAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN

LAPORAN KEAUSAHABAN TRANSFER DAYA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2011
[Balai Pengabdian]

No.	Dari/ke	Pada	Penyaluran			Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Total
			4	Gej. Beni	Gej. Bumi				
1		2				2.235.250,-	0	303.456.390,-	303.691.640,-
104	P.d. "Makassar"		10.832.520,-			571.258.813		19.822.520,-	19.822.520,-
315	P.d. "Makassar" & K.p.		32.815.505.222			271.256.612		35.561.301.871	35.561.301.871
206	P.d. "Gagelto Kebuli"		16.631.500.012			1.394.025.327		18.037.501.522	18.037.501.522
117	K.p. "Tritis"					1.394.025.327		271.256.612	271.256.612
818	K.p. "Tritis"					1.394.025.327		271.256.612	271.256.612
316	K.p. "Tritis"					1.394.025.327		271.256.612	271.256.612
310	K.p. "Isi - 45"					2.161.018.322		52.756.810	52.756.810
210	K.p. "Isi - 45"					1.394.025.327		271.256.612	271.256.612
211	K.p. "Isi - 45"					1.394.025.327		271.256.612	271.256.612
312	K.p. "Isi - 45"					1.394.025.327		271.256.612	271.256.612
613	Balai Pengabdian		510.318.204.916	401.720.028.106	61.361.601.720	2.172.022.610	0	12.184.601.188	416.310.561.188
314	K.p. "Isi - 45"		26.152.362.512	2.229.015.4227	1.208.734.062	433.122.512	0	8.535.350.253	54.154.231.253
315	P.d. "Makassar"		5.007.580.0	4.759.027.942	1.602.322.863	86.220.012	0	4.711.482.971	57.159.813
316	P.d. "Makassar"		12.325.201.912	4.710.027.042	1.025.322.063	41.146.212	0	1.139.121.871	15.867.338.7
317	P.d. "Makassar"		1.259.280.135	4.329.019.186	1.025.322.063	34.120.012	0	1.139.121.871	15.867.338.7
318	P.d. "Makassar"		1.761.101.134	4.710.027.042	1.025.322.063	51.124.012	0	1.139.121.871	15.867.338.7
319	P.d. "Makassar"		11.594.357.328	3.626.027.395	1.025.322.063	5.974.829.832	0	5.501.328.832	15.965.446.072
320	P.d. "Makassar"		45.025.201.612	3.025.954.050	1.025.322.063	80.125.122	0	25.810.252	45.125.100.052
321	P.d. "Makassar"		1.202.317.023	4.710.027.042	1.025.322.063	274.122.022	0	1.015.121.872	274.122.022
322	K.p. "Kepengrahan"		11.111.118.313	1.916.617.144	1.025.322.063	51.124.012	0	1.139.121.871	15.867.338.7
323	K.p. "Kepengrahan"		1.761.101.134	1.716.617.144	1.025.322.063	484.101.134	0	1.139.121.871	15.867.338.7
324	K.p. "Kepengrahan"		10.827.310.132	4.759.027.942	51.028.131	211.26.610.132	0	1.139.121.871	15.867.338.7
325	Catatan Kepengrahan		3.986.657.368.131	20.514.000.076.234	15.172.248.718.913	14.481.265.224.476	51.028.131	1.139.121.871	45.891.356.131
JUMLAH			52.874.816.287.864	20.514.000.076.234	15.172.248.718.913	14.481.265.224.476	51.028.131	1.139.121.871	45.891.356.131

LAPORAN REALISASI BAGIAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

10-1AH3.D

LAPORAN REALISASI BAGIAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	915.443.887	915.443.887
2	Kab. Aceh Barat	50.857.993	50.857.993
3	Kab. Aceh Besar	50.857.993	50.857.993
4	Kab. Aceh Selatan	50.857.003	50.857.003
5	Kab. Aceh Singkil	50.857.993	-
6	Kab. Aceh Tengah	244.118.370	244.118.370
7	Kab. Aceh Tenggara	50.857.993	-
8	Kab. Aceh Timur	50.857.993	50.857.993
9	Kab. Aceh Utara	50.857.993	-
10	Kali. Bireun	50.857.993	-
11	Kab. Pidie	244.118.370	244.118.370
12	Kab. Simeulue	50.857.993	22.217.997
13	Kota Banda Aceh	50.857.993	50.857.993
14	Kota Sabang	50.857.993	50.857.993
15	Kota Langsa	50.857.993	50.857.993
16	Kota Lhokseumawe	50.857.003	50.857.003
17	Kali. Nagan Raya	50.857.993	-
18	Kab. Aceh Jaya	50.857.993	50.857.993
19	Kab. Pidie Jaya	244.118.370	244.118.370
20	Kab. Aceh Barat Daya	50.857.993	50.857.993
21	Kab. Gayo Luos	244.118.370	244.118.370
22	Kab. Aceh Tamiang	50.857.993	-
23	Kab. Bener Meriah	244.118.370	-
24	Kota Suhulussalam	50.857.993	50.857.993
25	Provinsi Sumatera Utara	3.099.972.655	3.099.972.655
26	Kab. Asahan	128.399.082	60.178.072
27	Kab. Dair	337.548.484	140.838.784
28	Kab. Deli Serdang	230.557.747	102.822.474
29	Kab. Tanah Karo	714.800.008	714.800.000
30	Kab. Labuhan Batu	113.560.335	2.922.474
31	Kab. Langkat	151.299.996	2.922.474
32	Kab. Mandailing Natal	104.014.701	104.014.701
33	Kab. Nias	86.485.412	42.273.157
34	Kab. Simalungun	1.102.120.778	1.102.120.778
35	Kab. Tapanuli Selatan	103.425.339	2.922.474
36	Kali. Tapanuli Tengah	107.588.935	107.588.935
37	Kab. Tapanuli Utara	815.750.320	815.750.320

10-1AH1-24-086.-

LAPORAN KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA 14-JUNI 2011 (AKTUALISASI)

14-TAH3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
38	Kab. Toba Samosir	92.942.183	44.289.279
39	Kota Binjai	99.261.974	2.922.474
40	Kota Medan	270.029.944	270.029.944
41	Kota Pematang Siantar	716.641.200	78.062.380
42	Kota Sibolga	94.227.867	20.623.587
43	Kota Tanjung Balai	90.829.370	90.029.370
44	Kab. Batu Bara	110.778.402	4.808.088
45	Kab. Labuhan Batu Utara	107.852.128	27.017.505
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	105.504.835	105.504.835
47	Kab. Pailang Lawas Utara	100.524.430	100.524.430
48	Kab. Padang Lawas	100.555.000	100.555.000
49	Kab. Nias Utara	85.049.081	-
50	Kab. Nias Barat	85.945.347	-
51	Kota Tebing Tinggi	98.626.863	98.626.863
52	Kota Pidang Sidempuan	99.190.143	2.922.474
53	Kab. Pakpak Bharat	87.631.889	40.474.838
54	Kab. Nias Selatan	99.713.908	2.922.474
55	Kab. Humbang Hasundutan	329.989.015	329.989.015
56	Kah. Serdang Bedagai	171.075.042	171.075.042
57	Kab. Samosir	95.721.148	14.720.704
58	Kota Gunung Sitoli	84.800.787	84.800.787
59	Provinsi Sumatera Barat	1.617.664.928	1.617.664.928
60	Kab. Limapuluh Kota	1.358.086.141	1.358.086.141
61	Kah. Agam	224.591.161	224.591.161
62	Kab. Kepulauan Mentawai	85.140.260	85.140.260
63	Kah. Padang Pariaman	85.140.260	85.140.260
64	Kab. Pasaman	211.045.894	211.045.894
65	Kab. Pesisir Selatan	85.140.260	85.140.260
66	Kab. Sijunjung	85.140.260	85.140.260
67	Kab. Solok	243.688.205	243.688.205
68	Kah. Tanah Datar	235.376.935	235.376.935
69	Kota Bukit Tinggi	85.140.260	85.140.260
70	Kota Padang Panjang	85.140.260	85.140.260
71	Kota Pidang	85.140.260	85.140.260
72	Kota Payakumbuh	246.365.602	246.365.602
73	Kota Sawahlunto	232.214.489	232.214.489
74	Kota Solok	85.140.260	85.140.260

10-TAH1-SM-00E-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

10-1AB3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
75	Kota Pariaman	85.140.260	85.140.260
76	Kab. Pasaman Barat	85.140.260	85.140.260
77	Kah. Dharmasraya	85.140.260	85.140.260
78	Kab. Solok Selatan	85.140.260	85.140.260
79	Provinsi Riau		
80	Kab. Bengkalis		
81	Kab. Indragiri Hilir		
82	Kab. Indragiri Hulu		
83	Kab. Kampar		
84	Kah. Kuantan Singingi		
85	Kab. Pelalawan		
86	Kab. Rokan Hilir		
87	Kab. Rokan Hulu		
88	Kah. Siak		
89	Kota Dumai		
90	Kota Pekanbaru		
91	Kah. Kepulauan Meranti		
92	Provinsi Kepulauan Riau	494.990.801	494.990.801
93	Kah. Bintan	82.498.467	82.498.467
94	Kab. Natuna	82.498.467	41.249.233
95	Kab. Karimun	82.498.467	82.498.467
96	Kota Batam	659.987.735	659.987.735
97	Kab. Kepulauan Anambas	82.498.467	82.498.467
98	Kota Tanjung Pinang	82.498.467	41.249.233
99	Kab. Lingga	82.498.467	82.498.467
100	Provinsi Jambi	680.702.719	680.702.719
101	Kab. Batunghari	66.070.272	-
102	Kab. Bungo	66.070.272	66.070.272
103	Kab. Kerinci	680.930.959	680.930.959
104	Kab. Merangin	66.070.272	66.070.272
105	Kah. Muaro Jambi	66.070.272	33.035.195
106	Kab. Sarolangun	66.070.272	66.070.272
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	66.070.272	33.035.195
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	66.070.272	33.035.195
109	Kab. Tebo	66.070.272	-
110	Kota Jambi	66.070.272	66.070.272
111	Kota Sungai Penuh	66.070.272	-

10-1AB1-35-087-

LAPORAN REALISASI DANA BAGI HASIL CUKAI PADA TAHUN ANGGARAN 2011

10-1 APR 3.0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
112	Provinsi Sumatera Selatan	628.277.573	-
113	Kab. Lahat	209.425.857	-
114	Kah. Musi Banyuasin	41.885.171	-
115	Kab. Musi Rawas	41.885.171	41.885.171
116	Kah. Muara Enim	41.885.171	41.885.171
117	Kab. Ogan Komering Ilir	41.885.171	-
118	Kab. Ogan Komering Ulu	41.885.171	18.288.050
119	Kota Palembang	41.885.171	-
120	Kota Pagar Alam	209.425.857	91.490.252
121	Kota Lubuk Linggau	209.425.857	209.425.857
122	Kota Pekanbaru	41.885.171	-
123	Kab. Empat Lawang	41.885.171	41.885.171
124	Kab. Banyuasin	41.885.171	41.885.171
125	Kah. Ogan Ilir	41.885.171	-
126	Kali. OKU Timur	209.425.857	91.490.252
127	Kab. OKU Selatan	209.425.857	209.425.857
128	Provinsi Bangka Belitung		
129	Kab. Bangka		
130	Kah. Belitung		
131	Kota Pangkal Pinang		
132	Kab. Bangka Selatan		
133	Kab. Bangka Tengah		
134	Kab. Bangka Barat		
135	Kah. Belitung Timur		
136	Provinsi Bengkulu		
137	Kah. Bengkulu Selatan		
138	Kab. Bengkulu Utara		
139	Kab. Rejang Lebong		
140	Kota Bengkulu		
141	Kab. Kaur		
142	Kah. Seluma		
143	Kab. Mukomuko		
144	Kab. Lebong		
145	Kab. Bengkulu Tengah		
146	Kab. Kepahiang		
147	Provinsi Lampung	983.405.224	983.405.224
148	Kab. Lampung Barat	80.307.032	80.307.032

10-1 APR 1.2.2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

10-1AH3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
149	Kab. Lampung Selatan	142.932.742	142.932.742
150	Kab. Lampung Tengah	428.099.289	428.099.289
151	Kab. Lampung Utara	109.383.737	109.383.737
152	Kab. Lampung Timur	526.500.705	526.500.705
153	Kab. Tanggamus	215.622.254	215.622.254
154	Kab. Tulung Bawang	70.243.230	-
155	Kab. Way Kanan	78.188.632	78.188.632
156	Kab. Pesawaran	154.115.744	154.115.744
157	Kab. Pringsewu	183.256.250	183.256.250
158	Kali. Mesuji	70.243.230	70.243.230
159	Kab. Tulang Bawang Barat	70.243.230	70.243.230
160	Kota Bandar Lampung	70.243.230	70.243.230
161	Kota Metro	84.221.983	84.221.983
162	Provinsi DKI Jakarta	1.720.872.475	1.720.872.475
163	Provinsi Jawa Barat	33.979.946.712	33.979.946.712
164	Kab. Bandung	2.550.627.824	2.550.627.824
165	Kali. Bekasi	13.102.588.290	13.102.588.290
166	Kab. Bogor	1.204.889.883	1.204.889.883
167	Kab. Ciamis	1.870.886.933	1.870.886.933
168	Kab. Cianjur	1.883.825.209	1.883.825.209
169	Kab. Cirebon	2.177.207.251	2.177.207.251
170	Kab. Garut	8.986.425.304	8.986.425.304
171	Kab. Indramayu	1.315.414.755	1.120.831.474
172	Kab. Karawang	8.478.123.889	8.478.123.889
173	Kab. Kuningan	1.718.640.622	1.718.640.622
174	Kab. Majalengka	5.534.696.136	5.534.696.136
175	Kab. Purwakarta	1.824.190.888	1.824.190.888
176	Kab. Subang	2.137.568.140	2.137.568.140
177	Kab. Sukabumi	1.545.714.460	1.545.714.460
178	Kab. Sumedang	6.363.375.804	6.363.375.804
179	Kab. Tasikmalaya	1.757.456.561	1.757.456.561
180	Kab. Bandung Barat	1.464.262.342	1.464.262.342
181	Kota Bandung	1.642.420.488	1.642.420.488
182	Kota Bekasi	1.388.240.810	1.388.240.810
183	Kota Bogor	1.242.459.258	1.242.459.258
184	Kota Cirebon	5.335.707.817	5.335.707.817
185	Kota Depok	1.660.750.153	1.660.750.153

LAPORAN KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA 14-JUNI 2011 (AKTUALISASI)

14-TAH3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
186	Kota Sukabumi	1.610.150.455	1.610.150.455
187	Kota Cimahi	1.332.113.722	1.332.113.722
188	Kota Tasikmalaya	1.615.290.976	1.615.290.976
189	Kota Banjar	1.553.124.104	1.553.124.104
190	Provinsi Banten	588.632.000	588.632.000
191	Kab. Lebak	98.105.400	49.052.700
192	Kab. Pandeglang	98.105.400	-
193	Kab. Serang	558.510.700	558.510.700
194	Kab. Tangerang	98.105.400	-
195	Kota Cilegon	98.105.400	-
196	Kota Tangerang	98.105.400	-
197	Kota Serang	226.333.137	226.333.137
198	Kota Tangerang Selatan	98.105.400	49.052.700
199	Provinsi Jawa Tengah	102.752.820.771	102.752.820.771
200	Kab. Banjarnegara	3.442.985.085	3.442.985.085
201	Kab. Banyumas	3.200.063.537	3.200.063.537
202	Kab. Batang	5.114.554.883	5.114.554.883
203	Kab. Blora	4.918.402.487	4.918.402.487
204	Kab.Boyolali	8.436.773.703	8.436.773.703
205	Kab. Brebes	3.163.886.592	3.163.886.592
206	Kab. Cilacap	3.187.630.762	3.187.630.762
207	Kab. Demak	8.499.585.182	8.499.585.182
208	Kab. Grobogan	4.712.738.509	4.712.738.509
209	Kab. Jepara	9.936.470.657	9.936.470.657
210	Kab. Karanganyar	4.736.712.795	4.736.712.795
211	Kab. Kebumen	3.655.899.701	3.655.899.701
212	Kab. Kendal	18.173.028.630	18.173.028.630
213	Kab. Klaten	8.866.326.884	8.866.326.884
214	Kab. Kudus	60.824.479.283	60.824.479.283
215	Kab. Magelang	7.513.805.137	7.513.805.137
216	Kab. Pati	4.485.589.900	4.485.589.900
217	Kab. Pekalongan	3.180.534.126	3.180.534.126
218	Kab. Pemalang	3.206.232.744	3.206.232.744
219	Kab. Purbalingga	3.088.558.757	3.088.558.757
220	Kab. Purworejo	3.696.282.179	3.696.282.179
221	Kab. Rembang	3.328.315.227	3.328.315.227
222	Kab. Semarang	3.868.501.033	3.868.501.033

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

10-1AH3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
223	Kab. Brangas	3.529.158.424	3.529.158.424
224	Kab. Sukoharjo	3.821.384.952	3.821.388.530
225	Kah. Tegal	3.480.913.618	3.480.913.618
226	Kab. Temanggung	13.765.366.802	13.765.366.802
227	Kah. Wonogiri	3.132.684.090	3.132.684.090
228	Kab. Wonoosobo	5.909.799.874	5.909.799.874
229	Kota Magelang	3.085.761.481	3.085.761.481
230	Kota Pekalongan	3.053.738.877	3.053.738.877
231	Kota Salatiga	3.587.606.084	3.587.606.084
232	Kota Semarang	8.101.014.119	8.101.014.119
233	Kota Surakarta	3.661.370.677	3.661.370.677
234	Kota Tegal	3.194.835.312	3.194.835.312
235	Provinsi DI Yogyakarta	6.054.769.655	6.054.769.655
236	Kah. Bantul	4.036.513.103	4.036.513.103
237	Kali. Gunung Kidul	2.018.258.551	2.018.258.551
238	Kab. Kulon Progo	3.027.384.828	3.027.384.828
239	Kali. Sleman	2.825.559.173	2.825.559.173
240	Kota Yogyakarta	2.220.082.207	2.220.082.207
241	Provinsi Jawa Timur	219.703.158.430	219.703.158.430
242	Kab. Bangkalan	6.379.295.707	6.379.295.707
243	Kab. Banyuwangi	7.436.230.204	7.436.230.204
244	Kab. Blitar	9.929.049.772	9.929.049.772
245	Kab. Bojonegoro	20.787.812.828	20.787.812.828
246	Kah. Bondowoso	13.200.976.906	13.200.976.906
247	Kab. Gresik	6.417.876.783	6.417.876.783
248	Kah. Jember	12.866.496.343	12.866.496.343
249	Kab. Jombang	11.147.481.862	11.147.481.862
250	Kab. Kodiri	27.325.003.438	27.325.003.438
251	Kab. Lumajang	12.787.520.935	12.787.520.935
252	Kab. Lumajang	7.716.040.323	7.716.040.323
253	Kah. Madiun	7.667.273.767	7.667.273.767
254	Kab. Magetan	6.843.044.757	6.843.044.757
255	Kab. Malang	32.413.320.448	32.413.320.448
256	Kab. Mojokerto	7.970.152.318	7.970.152.318
257	Kah. Nganjuk	12.117.757.947	12.117.757.947
258	Kali. Ngrahi	11.034.191.817	11.034.191.817
259	Kab. Pacitan	6.636.581.326	6.636.581.326

10-1AH3.D-281-

LAPORAN KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA 14-JUNI 2011 (AKTUALISASI)

14-TAR3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
260	Kab. Pamekasan	28.020.125.932	28.020.125.932
261	Kab. Pasuruan	26.389.414.585	26.389.414.585
262	Kah. Ponorogo	7.421.826.798	7.421.826.798
263	Kab. Probolinggo	16.500.263.842	16.500.263.842
264	Kah. Sampang	7.484.690.048	7.484.690.048
265	Kab. Siduarius	13.018.055.908	13.018.055.908
266	Kab. Situbondo	8.388.216.633	8.388.216.633
267	Kab. Sumbawa	15.426.472.807	15.426.472.807
268	Kab. Trenggalek	6.814.737.160	6.814.737.160
269	Kali. Tulian	8.848.420.478	8.848.420.478
270	Kab. Tulungagung	16.085.226.658	16.085.226.658
271	Kota Blitar	8.105.860.495	8.105.860.495
272	Kota Kediri	53.521.087.830	53.521.087.830
273	Kota Madiun	6.118.903.304	6.118.903.304
274	Kota Malang	21.000.755.508	21.000.755.508
275	Kota Mojokerto	7.100.310.414	7.100.310.414
276	Kota Pekalongan	8.170.534.397	8.170.534.397
277	Kota Probolinggo	5.948.038.072	5.948.038.072
278	Kota Surabaya	19.806.258.084	19.806.258.084
279	Kota Batu	6.539.629.554	6.539.629.554
280	Provinsi Kalimantan Barat		
281	Kab. Bengkayang		
282	Kab. Landak		
283	Kah. Kapuas Hulu		
284	Kab. Ketapang		
285	Kah. Pontianak		
286	Kab. Sambas		
287	Kab. Sanggau		
288	Kab. Sintang		
289	Kota Pontianak		
290	Kota Singkawang		
291	Kab. Kayong Utara		
292	Kab. Kubu Raya		
293	Kab. Sekadau		
294	Kab. Melawi		
295	Provinsi Kalimantan Tengah	567.746.039	567.746.039
296	Kab. Barito Selatan	43.672.772	-

10-148134-282-

LAPORAN KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA 14-JUNI 2011 (AKTUALISASI)

14-TAB3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
297	Kab. Barito Utara	43.672.772	-
298	Kab. Kapuas	43.672.772	-
299	Kah. Kotawaringin Barat	43.672.772	19.078.985
300	Kah. Kotawaringin Timur	43.672.772	43.672.772
301	Kota Palangkaraya	43.672.772	19.078.985
302	Kab. Barito Timur	43.672.772	19.078.985
303	Kab. Murung Raya	43.672.772	-
304	Kab. Pulang Pisau	756.994.718	756.994.718
305	Kab. Gunung Mas	43.672.772	-
306	Kali. Lamandau	43.672.772	-
307	Kab. Sukamara	43.672.772	-
308	Kab. Katingan	43.672.772	-
309	Kab. Seruyan	43.672.772	-
310	Provinsi Kalimantan Selatan		
311	Kali. Banjar		
312	Kab. Barito Kuala		
313	Kali. Hulu Sungai Selatan		
314	Kab. Hulu Sungai Tengah		
315	Kah. Hulu Sungai Utara		
316	Kab. Kotabaru		
317	Kab. Tabalong		
318	Kab. Tanah Laut		
319	Kab. Tapin		
320	Kota Banjarbaru		
321	Kota Banjarmasin		
322	Kah. Balangan		
323	Kab. Tanah Bumbu		
324	Provinsi Kalimantan Timur		
325	Kab. Berau		
326	Kab. Bulungan		
327	Kah. Kutai Kartanegara		
328	Kab. Kutai Barat		
329	Kab. Kutai Timur		
330	Kab. Malinau		
331	Kab. Nunukan		
332	Kali. Pasir		
333	Kota Balikpapan		

10-TAB1-34-083-

LAPORAN KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA 14-JUNI 2011 (AKTUALISASI)

14-TAR3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
334	Kota Buntang		
335	Kab. Tana Tidung		
336	Kota Samarinda		
337	Kota Tarakan		
338	Kah. Penajam Paser Utara		
339	Provinsi Sulawesi Utara	470.912.235	470.912.235
340	Kab. Bolaang Mongondow	33.636.588	16.818.283
341	Kub. Minahasa	33.636.588	16.818.293
342	Kab. Sangihe	33.636.588	16.818.283
343	Kota Bitung	33.636.588	16.818.293
344	Kota Manado	33.636.588	16.818.203
345	Kab. Kepulauan Talaud	33.636.588	16.818.283
346	Kub. Minahasa Selatan	33.636.588	16.818.293
347	Kah. Minahasa Tenggara	33.636.588	16.818.283
348	Kali. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	33.636.588	16.818.293
349	Kota Kotamobagu	33.636.588	16.818.203
350	Kali. Buluang Mungunduwa Timur	827.882.980	827.882.980
351	Kub. Buluang Mungunduwa Selatan	33.636.588	16.818.293
352	Kota Tomohon	33.636.588	16.818.283
353	Kab. Minahasa Utara	33.636.588	16.818.293
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	33.636.588	16.818.283
355	Provinsi Gorontalo		
356	Kab. Bone		
357	Kah. Gorontalo		
358	Kota Gorontalo		
359	Kah. Pohuwato		
360	Kub. Gurontalo Utara		
361	Kab. Bone Bolango		
362	Provinsi Sulawesi Tengah	649.558.538	649.558.538
363	Kab. Banggai	81.184.817	81.184.817
364	Kah. Banggai Kepulauan	81.184.817	81.184.817
365	Kab. Buol	288.682.683	288.682.683
366	Kab. Toli-Toli	288.682.683	288.682.683
367	Kab. Donggala	81.184.817	81.184.817
368	Kab. Morowali	81.184.817	81.184.817
369	Kali. Poso	81.184.817	81.184.817
370	Kota Palu	288.682.683	288.682.683

14-TAR14-281-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

10-TAR3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
371	Kab. Parigi Moutung	81.194.817	81.194.817
372	Kab. Sigi	81.194.817	81.194.817
373	Kah. Tejo Una Una	81.194.817	81.194.817
374	Provinsi Sulawesi Selatan	2.492.246.875	2.492.246.875
375	Kah. Bantaeng	111.172.375	111.172.375
376	Kab. Barru	118.481.974	118.481.974
377	Kab. Bone	676.178.338	676.178.338
378	Kab. Bulukumba	189.104.153	73.875.213
379	Kab. Enrekang	103.843.619	103.843.619
380	Kali. Gowa	103.843.619	103.843.619
381	Kab. Jenepono	103.843.619	103.843.619
382	Kab. Luwu	104.215.604	45.527.863
383	Kab. Luwu Utara	103.843.619	103.843.619
384	Kah. Maros	103.843.619	103.843.619
385	Kali. Pangkajene Kepulauan	104.933.470	104.933.470
386	Kab. Pinrang	103.843.619	103.843.619
387	Kali. Selaway	103.843.619	103.843.619
388	Kab. Sidrap Rappang	103.843.619	103.843.619
389	Kah. Sinjai	547.615.124	547.615.124
390	Kab. Suppeng	2.294.921.917	2.294.921.917
391	Kab. Takalar	103.843.619	103.843.619
392	Kab. Tana Toraja	114.911.802	114.911.802
393	Kab. Wajo	118.853.538	118.853.538
394	Kota Pare-pare	103.843.619	103.843.619
395	Kab. Toraja Utara	104.807.365	45.830.067
396	Kota Makassar	103.843.619	103.843.619
397	Kota Palopo	103.843.619	103.843.619
398	Kab. Luwu Timur	103.843.619	103.843.619
399	Provinsi Sulawesi Barat		
400	Kab. Majene		
401	Kah. Mamuju		
402	Kab. Polewali Mandar		
403	Kab. Mamasa		
404	Kab. Mamuju Utara		
405	Provinsi Sulawesi Tenggara		
406	Kali. Buton		
407	Kab. Konawe		

10-TAR1-34-0246-

LAPORAN KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA 14-JUNI 2011 (AKTUALISASI)

14-TAR3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
408	Kab. Kulaka		
409	Kab. Muna		
410	Kota Kendari		
411	Kota Bau-bau		
412	Kah. Konawe Selatan		
413	Kab. Bumbana		
414	Kab. Konawe Utara		
415	Kab. Bulun Utara		
416	Kab. Wakatobi		
417	Kali. Kulaka Utara		
418	Provinsi Bali	2.573.157.820	2.573.157.820
419	Kab. Badung	285.906.424	285.906.424
420	Kab. Bangli	308.834.774	308.834.774
421	Kah. Buleleng	3.369.578.755	3.369.578.755
422	Kali. Gianyar	800.517.853	800.517.853
423	Kab. Jembrana	285.906.424	285.906.424
424	Kali. Karangasem	297.571.410	297.571.410
425	Kab. Klungkung	285.906.424	285.906.424
426	Kah. Tabanan	285.906.424	285.906.424
427	Kota Denpasar	285.906.424	285.906.424
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	45.182.630.275	45.182.630.275
429	Kab. Bima	8.925.497.449	8.925.497.449
430	Kab. Dompu	3.838.170.588	3.838.170.588
431	Kah. Lombok Barat	10.670.555.325	10.670.555.325
432	Kab. Lombok Tengah	21.084.854.823	21.084.854.823
433	Kah. Lombok Timur	39.158.552.211	39.158.552.211
434	Kab. Sumbawa	7.151.723.959	7.151.723.959
435	Kota Mataram	4.858.553.085	4.858.553.085
436	Kab. Lombok Utara	4.947.581.257	4.947.581.257
437	Kota Bima	3.081.431.648	3.081.431.648
438	Kah. Sumbawa Barat	3.598.136.954	3.598.136.954
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	860.054.374	860.054.374
440	Kab. Alor	53.731.660	53.731.660
441	Kab. Belu	218.288.755	218.288.755
442	Kab. Ende	44.261.314	-
443	Kali. Flores Timur	40.954.970	-
444	Kab. Kupang	40.054.070	17.801.680

10-1AB1-24-28E-

LAPORAN KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA 31 DESEMBER 2011

10-TAB3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
445	Kab. Lembata	429.415.734	-
446	Kab. Manggarai	40.954.970	-
447	Kah. Ngada	40.954.970	-
448	Kab. Sikka	117.662.484	-
449	Kah. Sumba Barat	167.511.830	167.511.830
450	Kab. Sumba Timur	89.152.835	89.152.835
451	Kab. Timor Tengah Selatan	40.005.482	-
452	Kab. Timor Tengah Utara	40.954.970	-
453	Kota Kupang	40.954.970	-
454	Kali. Reute Nilaun	40.954.970	17.891.680
455	Kab. Napoko	40.954.970	-
456	Kab. Sumba Tengah	40.954.970	-
457	Kab. Sumba Barat Daya	310.886.981	135.819.147
458	Kah. Manggarai Timur	40.954.970	-
459	Kali. Salu Raijua	80.295.585	-
460	Kab. Manggarai Barat	65.021.208	65.021.208
461	Provinsi Maluku		
462	Kab. Maluku Tenggara Barat		
463	Kah. Maluku Tengah		
464	Kab. Maluku Tenggara		
465	Kab. Pulau Buru		
466	Kota Ambon		
467	Kab. Seram Bagian Barat		
468	Kah. Seram Bagian Timur		
469	Kab. Maluku Barat Daya		
470	Kah. Buru Selatan		
471	Kab. Kepulauan Aru		
472	Kota Tual		
473	Provinsi Maluku Utara		
474	Kab. Halmahera Tengah		
475	Kah. Halmahera Barat		
476	Kota Ternate		
477	Kab. Halmahera Timur		
478	Kota Tidore Kepulauan		
479	Kab. Kepulauan Sula		
480	Kali. Pulau Muriolai		
481	Kab. Halmahera Selatan		

10-TAB1-35-087-

LAPORAN KEDUDUKAN PEMERINTAH PADA 14-JUNI 2011 (AKTUALISASI)

14-TAR3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
482	Kab. Halmahera Utara		
483	Kab. Yalimo		
484	Kab. Lanny Jaya		
485	Provinsi Papua		
486	Kab. Biak Numfor		
487	Kab. Jayapura		
488	Kab. Jayawijaya		
489	Kab. Merauke		
490	Kab. Mimika		
491	Kali. Malire		
492	Kab. Paniai		
493	Kab. Puncak Jaya		
494	Kab. Kepulauan Yapen		
495	Kota Jayapura		
496	Kali. Sarmi		
497	Kab. Keerom		
498	Kali. Yahukimo		
499	Kab. Pegunungan Bintang		
500	Kab. Telikara		
501	Kab. Beoven Digel		
502	Kab. Mappi		
503	Kab. Asmat		
504	Kab. Waropen		
505	Kab. Mamberamo Raya		
506	Kab. Mamberamo Tengah		
507	Kab. Mfuga		
508	Kab. Ougiyu		
509	Kab. Intan Jaya		
510	Kab. Puncuk		
511	Kab. Deiyai		
512	Kab. Supiori		
513	Provinsi Papua Barat		
514	Kab. Serong		
515	Kab. Manokwari		
516	Kab. Fak Fak		
517	Kota Sorong		
518	Kab. Sorong Selatan		

10-TAR1-35-088-

LAPORAN KEJURUAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (A200720)

DAFTAR 30

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
519	Kab. Raja Ampat		
520	Kab. Teluk Bintuni		
521	Kah. Teluk Wondama		
522	Kab. Tambrauw		
523	Kab. Maybrat		
524	Kab. Kaimana		
525	Dana Cadangan		
JUMLAH		1.415.973.003.052	1.408.448.784.184

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 (RANCANGAN)

DMTARO.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	718.848.172.000	718.848.172.000	60.811.300.000	60.811.300.000
2	Kab. Aceh Barat	367.377.154.000	267.377.759.000	33.230.700.000	28.260.700.000
3	Kab. Aceh Besar	461.068.982.000	452.053.289.000	21.686.700.000	21.686.700.000
4	Kab. Aceh Selatan	308.001.558.000	307.001.558.000	44.185.700.000	44.185.700.000
5	Kab. Aceh Singkil	29.702.821.000	29.702.821.000	39.232.000.000	39.232.000.000
6	Kab. Aceh Tenggara	300.089.261.000	300.089.261.000	31.485.000.000	31.485.000.000
7	Kab. Aceh Tengah	345.178.284.000	245.173.287.000	33.836.300.000	28.866.300.000
8	Kab. Aceh Timur	641.119.241.000	441.119.241.000	61.652.200.000	61.652.200.000
9	Kab. Aceh Jaya	440.356.177.000	440.356.177.000	34.513.800.000	34.513.800.000
10	Kab. Bireun	780.010.588.000	180.010.589.000	24.572.000.000	19.572.000.000
11	Kab. Aceh Utara	407.595.029.000	407.595.029.000	39.501.700.000	39.501.700.000
12	Kab. Aceh Singkil	266.019.629.000	266.019.629.000	50.029.000.000	50.029.000.000
13	Kota Banda Aceh	606.331.023.000	405.381.627.000	29.637.200.000	28.637.200.000
14	Kota Bireun	741.038.681.000	741.038.681.000	28.826.800.000	28.826.800.000
15	Kota Langsa	236.505.408.000	236.505.409.000	26.665.800.000	26.665.800.000
16	Kota Unoksumene	315.410.071.000	315.410.071.000	21.805.500.000	21.805.500.000
17	Kab. Nagan Raya	351.210.473.000	331.210.473.000	31.831.800.000	31.831.800.000
18	Kab. Aceh Jaya	265.317.500.000	265.317.500.000	33.753.200.000	33.753.200.000
19	Kab. Aceh Jaya	265.713.281.000	255.713.281.000	48.150.800.000	48.150.800.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	235.720.062.000	235.720.062.000	42.650.700.000	42.650.700.000
21	Kab. Geyo Lues	291.310.455.000	291.310.455.000	34.037.700.000	34.037.700.000
22	Kab. Aceh Tsing	306.322.167.000	306.322.167.000	33.526.100.000	33.526.100.000
23	Kab. Beni Merik	265.311.068.000	265.311.068.000	33.151.700.000	33.151.700.000
24	Kota Sijunjung	186.851.029.000	186.851.029.000	30.171.700.000	30.171.700.000
25	Provinsi Sumatera Utara	948.887.504.000	948.887.504.000	38.495.500.000	38.495.500.000
26	Kab. Asahan	523.502.037.000	523.502.037.000	50.636.000.000	50.636.000.000
27	Kab. Leir	314.322.003.000	314.322.003.000	44.158.400.000	44.158.400.000
28	Kab. Deli Serdang	385.039.680.000	385.039.680.000	67.163.300.000	67.163.300.000
29	Kab. Tapanuli Tengah	141.830.819.000	141.830.819.000	42.453.100.000	42.453.100.000
30	Kab. Labuhanbatu	370.080.810.000	370.080.810.000	45.520.700.000	45.520.700.000
31	Kab. Langkat	680.304.284.000	680.304.284.000	53.829.500.000	53.829.500.000
32	Kab. Mandailing Natal	455.398.638.000	455.398.638.000	48.436.400.000	48.436.400.000
33	Kota Nias	285.935.711.000	285.935.711.000	54.936.900.000	54.936.900.000
34	Kab. Simalungun	896.561.269.000	896.561.269.000	73.959.400.000	73.959.400.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	370.142.555.000	370.142.555.000	44.554.100.000	44.554.100.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	343.968.098.000	343.968.098.000	52.309.400.000	52.309.400.000
37	Kab. Tapanuli Utara	408.030.072.000	408.030.072.000	58.002.100.000	58.002.100.000
38	Kota Tulu Samosir	311.486.155.000	311.486.155.000	51.448.900.000	51.448.900.000
39	Kota Einai	336.976.724.000	336.976.724.000	25.236.900.000	25.236.900.000
40	Kota Meulaboh	886.892.413.000	886.892.413.000	61.564.300.000	61.564.300.000
41	Kota Parapat: Bintan	362.722.110.000	362.722.110.000	24.784.000.000	24.784.000.000
42	Kota Sibolga	246.506.013.000	246.506.013.000	22.757.000.000	22.757.000.000
43	Kota Tarutung: Batur	325.735.155.000	275.733.522.000	20.158.800.000	20.158.800.000
44	Kab. Batu Baru	306.130.936.000	296.180.939.000	33.945.300.000	29.211.725.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	346.964.165.000	346.964.165.000	47.451.000.000	47.342.525.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	267.177.150.000	267.177.150.000	35.441.200.000	35.441.200.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	262.768.244.000	262.768.244.000	47.739.200.000	44.769.200.000
48	Kab. Padang Lawas	242.724.117.000	248.724.117.000	40.026.800.000	40.026.800.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 RISETEDY

DMFTAR.GE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
48	Kab. Nias Utara	291.050.167,000	291.858.167,000	53.814.330,000	52.989.000,000
50	Kab. Nias Barat	193.565.081,000	193.335.081,000	63.821.130,000	47.867.725,000
51	Kota Toba Lintang	261.130.549,000	261.130.549,000	22.081.120,000	21.081.103,000
52	Kota Padang Selatan	308.201.584,000	308.201.584,000	25.538.330,000	25.588.300,000
53	Kab. Padang Barat	198.734.619,000	198.401.619,000	23.841.000,000	22.071.000,000
54	Kab. Nias Selatan	315.180.854,000	315.180.854,000	54.221.330,000	54.221.300,000
55	Kab. Humbang Hasundutan	313.562.208,000	313.562.208,000	31.613.800,000	31.612.800,000
56	Kab. Aceh Selatan	458.429.768,000	458.429.768,000	66.764.200,000	66.764.203,000
57	Kali Samar	203.201.578,000	203.201.578,000	35.631.330,000	35.631.300,000
58	Kota Bungur ardi	261.131.275,000	261.131.275,000	50.790.730,000	50.790.700,000
59	Provinsi Sumatera Barat	784.880.886,000	784.880.886,000	40.733.300,000	40.733.300,000
60	Kab. Limapuluh Kota	467.088.452,000	467.088.452,000	46.701.330,000	46.701.300,000
61	Kab. Aceh	380.438.115,000	380.438.115,000	43.884.100,000	43.884.100,000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	323.157.862,000	323.157.862,000	47.274.800,000	47.274.800,000
63	Kab. Padang Pariaman	464.501.502,000	464.500.502,000	66.638.430,000	66.638.400,000
64	Kab. Pasaman	363.169.548,000	363.169.548,000	41.528.830,000	41.528.800,000
65	Kab. Pesisir Selatan	514.412.081,000	514.412.081,000	77.487.030,000	77.487.000,000
66	Kab. Sijunjung	321.319.955,000	321.319.955,000	42.072.300,000	42.072.300,000
67	Kab. Buleleng	440.060.500,000	440.060.500,000	52.035.000,000	52.035.000,000
68	Kab. Tapanah Jutor	432.385.43,000	432.385.43,000	47.837.100,000	47.837.100,000
69	Kota Bukit Tinggi	273.012.100,000	273.012.100,000	23.820.700,000	23.820.700,000
70	Kota Payakumbuh	295.871.127,000	295.871.127,000	17.862.030,000	17.862.030,000
71	Kota Padang	7.1.130.925,000	7.1.130.925,000	50.431.700,000	50.431.700,000
72	Kota Pematangsiantar	280.336.056,000	280.336.056,000	21.152.800,000	21.152.800,000
73	Kota Sawahlunto	225.231.346,000	225.231.346,000	26.056.030,000	26.056.030,000
74	Kota Sibok	227.235.270,000	227.235.270,000	19.827.200,000	19.827.200,000
75	Kota Pariaman	263.010.622,000	263.010.622,000	21.846.330,000	21.846.330,000
76	Kab. Pasaman Barat	105.247.973,000	105.247.973,000	53.579.830,000	43.939.325,000
77	Kab. Dharmasraya	298.421.965,000	298.421.965,000	37.138.000,000	37.138.000,000
78	Kab. Solok Selatan	264.231.286,000	264.231.286,000	37.668.000,000	37.668.000,000
79	Provinsi Riau	380.051.123,500	380.051.123,500	56.823.400,000	56.823.400,000
80	Kab. Bengkalis	100.412.024,000	100.412.024,000	19.685.030,000	19.685.030,000
81	Kab. Indragiri Hilir	673.482.644,000	673.482.644,000	65.771.730,000	65.771.730,000
82	Kab. Ingris Hulu	62.150.000,000	62.150.000,000	11.356.000,000	11.356.000,000
83	Kab. Pakpak Bharat	440.088.186,000	440.088.186,000	28.080.830,000	28.080.830,000
84	Kab. Samosir Singaraja	431.224.655,000	431.224.655,000	19.901.100,000	19.901.100,000
85	Kab. Pesisir Selatan	363.741.023,000	363.741.023,000	17.9.023.000,000	17.9.023.000,000
86	Kab. Batang Toru	186.078.028,000	186.078.028,000	13.158.830,000	13.158.830,000
87	Kab. Aceh Tengah	375.358.003,000	375.358.003,000	4.347.000,000	4.347.000,000
88	Kab. Simeulue	80.812.581,000	80.812.581,000	13.465.530,000	13.465.530,000
89	Kota Dumai	245.131.346,000	245.131.346,000	4.148.700,000	4.148.700,000
90	Kota Pariaman	186.819.055,000	186.819.055,000	17.432.500,000	17.432.500,000
91	Kab. Bungo	241.235.822,000	241.235.822,000	45.312.930,000	45.312.930,000
92	Provinsi Kepulauan Riau	395.745.542,000	395.745.542,000	21.903.200,000	21.903.200,000
93	Kab. Bintan	184.785.553,000	184.785.553,000	15.910.830,000	15.910.830,000
94	Kab. Natuna	21.908.237,000	21.908.237,000	26.315.500,000	27.228.200,000
95	Kab. Kerinci	195.814.082,000	195.814.082,000	3.856.700,000	3.856.700,000
96	Kota Batam	316.771.074,000	316.771.074,000	38.197.330,000	38.197.330,000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 (SAKIPED)

DMFTAROLE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
91	Kab. Reguleran Aren Bes	208.075.222,000	208.875.222,000	34.289.300,000	25.713.750,000
98	Kota Tarutung	252.716.560,000	252.716.560,000	2.441.200,000	2.277.300,000
99	Kab. Unjza	200.961.641,000	200.841.641,000	4.814.900,000	4.814.900,000
100	Provinsi Jambi	683.882.413,000	683.882.413,000	24.736.800,000	24.736.800,000
101	Kab. Bengkalis	344.952.857,000	344.952.857,000	31.436.000,000	31.436.000,000
102	Kab. Kuningan	316.428.056,000	316.428.056,000	48.855.400,000	48.855.400,000
103	Kab. Kuningan	365.273.971,000	365.273.971,000	73.033.200,000	73.033.200,000
104	Kab. Meulaboh	1.631.1254,000	1.631.1254,000	46.386.700,000	46.386.700,000
105	Kali Mireng Jambi	371.132.568,000	371.132.568,000	44.546.700,000	44.546.700,000
106	Kab. Serdang gun	363.196.573,000	363.196.573,000	72.177.000,000	72.177.000,000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	216.522.187,000	216.522.187,000		
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	281.719.563,000	281.719.563,000	3.330.900,000	3.330.900,000
109	Kab. Tebo	325.792.480,000	325.792.480,000	42.356.700,000	42.356.700,000
110	Kota Lubuk Linggau	441.764.298,000	441.764.298,000	34.875.700,000	34.875.700,000
111	Kota Gempai Penuh	257.770.767,000	257.770.767,000	50.552.000,000	50.552.000,000
112	Provinsi Sumatera Selatan	648.813.301,000	648.813.301,000	32.287.000,000	32.287.000,000
113	Kab. Lahat	425.522.358,000	425.522.358,000	49.212.900,000	49.212.900,000
114	Kab. Musi Banyuasin	295.120.161,000	295.120.161,000	61.809.000,000	61.809.000,000
115	Kab. Musi Rawas	467.449.549,000	467.449.549,000	67.010.900,000	67.010.900,000
116	Kab. Muara Enim	463.445.263,000	463.445.263,000	41.740.800,000	41.740.800,000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	670.312.000,000	670.312.000,000	66.445.100,000	66.445.100,000
118	Kab. Ogan Komering Ilir	375.426.825,000	375.426.825,000	3.777.000,000	3.777.000,000
119	Kota Padang	767.313.729,000	767.313.729,000	27.639.100,000	27.639.100,000
120	Kota Pagar Alam	231.466.239,000	231.466.239,000	21.946.700,000	21.946.700,000
121	Kota Lubuk Linggau	267.774.762,000	267.774.762,000	26.660.100,000	26.660.100,000
122	Kota Pabuaran	247.370.277,000	247.370.277,000	22.557.100,000	22.557.100,000
123	Kab. Lampung Selatan	238.431.184,000	238.431.184,000	41.633.800,000	41.633.800,000
124	Kab. Bengkulu	530.761.721,000	530.451.721,000	73.770.800,000	73.770.800,000
125	Kab. Ogan Ilir	363.061.153,000	363.061.153,000	41.681.800,000	41.681.800,000
126	Kab. O.U Timur	456.012.767,000	453.812.767,000	56.734.000,000	56.734.000,000
127	Kab. O.U Selatan	338.910.827,000	338.910.827,000	45.206.500,000	45.206.500,000
128	Provinsi Bangka Belitung	481.688.916,000	481.688.916,000	23.841.200,000	17.880.900,000
129	Kota Rumbai	325.188.554,000	325.188.554,000	39.857.500,000	35.891.500,000
130	Kab. Belitung	280.922.544,000	280.922.544,000	40.657.200,000	40.657.200,000
131	Kota Pringsewu	277.488.653,000	277.488.653,000	23.732.100,000	17.828.226,000
132	Kab. Rambutan Selatan	221.438.729,000	221.438.729,000	31.824.800,000	31.824.800,000
133	Kab. Daengkuang	295.390.958,000	295.390.958,000	27.724.000,000	27.724.000,000
134	Kab. Rambutan Barat	265.451.548,000	265.451.548,000	31.259.300,000	23.426.478,000
135	Kab. Belitung Timur	261.911.574,000	261.911.574,000	29.368.000,000	26.338.300,000
136	Provinsi Bengkulu	607.388.038,000	607.388.038,000	36.809.800,000	36.809.800,000
137	Kab. Bengkulu Selatan	322.434.462,000	322.434.462,000	37.642.700,000	37.642.700,000
138	Kab. Bengkulu Utara	374.568.555,000	374.568.555,000	51.058.800,000	51.058.800,000
139	Kab. Pidie Jaya	374.729.864,000	374.729.864,000	43.034.100,000	40.084.100,000
140	Kota Aceh Besar	397.870.445,000	397.870.445,000	27.371.300,000	27.371.300,000
141	Kab. Aceh	248.921.574,000	248.921.574,000	36.438.800,000	36.438.800,000
142	Kab. Aceh Utara	287.006.554,000	287.006.554,000	38.380.200,000	36.360.200,000
143	Kab. Mukomuko	285.130.275,000	285.130.275,000	37.742.000,000	34.712.400,000
144	Kab. Lebong	241.212.067,000	241.212.067,000	26.259.800,000	26.269.800,000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 RISETED

DMFTAROLE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
145	Kab. Bengkuk. Tengah	254.180.857.000	264.133.587.000	59.685.230.000	59.895.300.000
146	Kab. Kepahiang	264.750.012.000	264.750.012.000	33.841.300.000	33.841.300.000
147	Provinsi Lampung	768.873.038.000	768.873.038.000	42.210.200.000	42.210.200.000
148	Kab. Lampung Selatan	402.720.810.000	402.786.810.000	53.226.200.000	53.226.200.000
149	Kab. Lampung Tengah	574.756.089.000	574.456.589.000	79.457.700.000	79.457.700.000
150	Kab. Lampung Utara	705.179.583.000	705.179.583.000	104.395.300.000	104.395.300.000
151	Kab. Lampung Barat	562.365.682.000	562.355.682.000	67.137.700.000	67.137.700.000
152	Kab. Lampung Timur	627.844.989.000	627.844.989.000	62.658.300.000	46.939.825.000
153	Kab. Tanggamus	446.288.554.000	443.939.554.000	75.750.000.000	75.750.000.000
154	Kab. Tulung Barawang	701.382.837.000	701.382.837.000	11.337.700.000	11.334.400.000
155	Kab. Way Kanan	366.389.282.000	366.369.282.000	50.080.000.000	50.080.000.000
156	Kab. Aceh Besar	372.847.754.000	372.847.754.000	68.638.800.000	68.638.800.000
157	Kab. Fringgau	366.214.178.000	366.214.178.000	69.287.200.000	69.287.200.000
158	Kab. Mesui	268.175.517.000	268.173.817.000	48.058.900.000	48.058.900.000
159	Kab. Tulung Barawang Barat	284.455.820.000	284.455.820.000	60.901.100.000	60.901.100.000
160	Kota Bandar Lampung	825.925.790.000	825.925.790.000	39.112.300.000	39.112.300.000
161	Kota Metro	271.523.683.000	271.523.683.000	21.527.800.000	21.527.800.000
162	Provinsi DKI Jakarta	209.309.442.000	209.309.442.000	-	-
163	Provinsi Jawa Barat	1.181.553.108.000	1.181.553.108.000	45.784.800.000	45.784.800.000
164	Kab. Bandung	1.203.023.247.000	1.203.023.247.000	100.035.000.000	100.035.000.000
165	Kab. Bekasi	680.732.734.000	680.732.734.000	73.837.100.000	73.832.300.000
166	Kab. Bogor	1.326.864.652.000	1.326.864.652.000	104.859.000.000	105.746.200.000
167	Kab. Ciamis	363.316.825.000	363.316.825.000	85.270.700.000	85.270.700.000
168	Kab. Cipayung	966.056.245.000	966.046.245.000	100.135.300.000	100.132.300.000
169	Kab. Cirimekar	350.384.908.000	350.384.908.000	76.614.800.000	76.614.800.000
170	Kab. Garut	1.141.265.938.000	1.141.255.938.000	111.050.100.000	111.350.100.000
171	Kab. Ingeran	923.092.851.000	923.093.851.000	18.243.700.000	16.242.700.000
172	Kab. Kerawang	314.032.255.000	314.052.255.000	81.771.000.000	81.771.000.000
173	Kab. Kuningan	722.472.887.000	722.473.887.000	69.431.200.000	68.431.200.000
174	Kab. Majalengka	711.740.072.000	711.750.072.000	68.834.700.000	68.334.700.000
175	Kab. Purwakarta	517.917.234.000	517.7317.234.000	10.008.000.000	10.008.000.000
176	Kab. Subang	746.151.215.000	745.151.215.000	52.450.400.000	52.450.400.000
177	Kota Sukabumi	392.076.825.000	392.076.825.000	116.457.000.000	116.457.000.000
178	Kab. Sumedang	721.147.647.000	721.147.647.000	72.082.200.000	72.034.200.000
179	Kota Tasikmalaya	801.978.856.000	801.679.856.000	28.080.300.000	28.080.300.000
180	Kab. Bandung Barat	862.914.928.000	862.914.928.000	82.614.000.000	82.614.000.000
181	Kota Ganesung	1.305.982.541.000	1.305.832.541.000	59.077.400.000	44.930.100.000
182	Kota Bandung	757.182.222.000	757.182.222.000	52.38.000.000	35.096.000.000
183	Kota Bogor	470.156.909.000	470.156.909.000	11.306.000.000	6.524.650.000
184	Kota Cimahi	415.003.057.000	415.007.057.000	4.871.000.000	4.871.000.000
185	Kota Cirebon	534.132.221.000	534.102.221.000	13.980.200.000	14.201.200.000
186	Kota Sukabumi	350.018.367.000	350.513.357.000	13.645.100.000	13.645.100.000
187	Kota Cimahi	354.972.241.000	354.972.241.000	1.938.000.000	1.988.000.000
188	Kota Tasikmalaya	706.026.063.000	706.026.063.000	31.507.900.000	31.504.900.000
189	Kota Cirebon	236.029.814.000	235.029.814.000	20.658.000.000	20.665.000.000
190	Provinsi Banten	460.389.089.000	460.389.089.000	45.179.800.000	45.179.800.000
191	Kab. Lebak	661.738.026.000	661.403.928.000	71.147.300.000	71.147.300.000
192	Kab. Pandeglang	724.364.721.000	724.356.721.000	91.799.500.000	91.799.500.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 RISETED

DMFTAR.GE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
192	Kab. Serang	826.724.712.000	826.024.712.000	84.533.430.000	84.585.800.000
193	Kab. Tangerang	720.007.083.000	720.007.083.000	63.669.100.000	61.521.360.000
194	Kota Cilegon	376.592.008.000	376.592.008.000	3.944.430.000	3.964.400.000
195	Kota Tangerang	554.331.553.000	554.331.553.000	11.816.130.000	11.810.103.000
196	Kota Serang	365.006.818.000	365.006.818.000	47.241.100.000	47.241.100.000
197	Kota Tangerang Selatan	472.345.838.000	472.345.838.000	57.938.000.000	57.980.000.000
198	Provinsi Jawa Tengah	1.278.180.223.000	1.278.180.223.000	51.789.800.000	51.789.800.000
199	Kab. Banjarnegara	962.384.672.000	962.384.672.000	66.376.800.000	66.376.800.000
200	Kab. Cilacap	855.891.823.000	855.891.823.000	83.867.700.000	83.807.600.000
201	Kab. Batang	772.338.223.000	772.338.223.000	57.250.000.000	57.250.000.000
202	Kab. Blora	547.431.940.000	547.431.940.000	77.112.000.000	77.114.800.000
203	Kab. Brebes	641.731.653.000	641.731.653.000	67.125.300.000	67.125.300.000
204	Kab. Cirebon	300.571.669.000	300.571.669.000	69.339.500.000	69.339.500.000
205	Kab. Gresik	877.475.472.000	877.475.472.000	102.082.500.000	102.082.500.000
206	Kab. Demak	544.720.064.000	544.720.064.000	67.064.200.000	67.064.200.000
207	Kab. Grobogan	888.360.009.000	888.360.009.000	19.230.000.000	19.280.800.000
208	Kab. Jepara	585.436.113.000	585.436.113.000	73.705.000.000	73.705.000.000
209	Kab. Klaten	577.830.067.000	577.830.067.000	53.160.900.000	53.160.900.000
210	Kab. Kulon Progo	752.339.067.000	752.339.067.000	79.186.800.000	79.186.800.000
211	Kab. Kuningan	565.335.365.000	565.335.365.000	67.371.800.000	67.367.800.000
212	Kab. Kondel	793.938.625.000	793.938.625.000	80.051.300.000	80.064.300.000
213	Kab. Paten	485.046.653.000	485.046.653.000	33.321.200.000	33.321.200.000
214	Kab. Pekalongan	606.269.306.000	606.269.306.000	78.356.500.000	78.356.500.000
215	Kab. Pemalang	692.522.882.000	692.522.882.000	66.388.800.000	66.338.800.000
216	Kab. Pemalang	563.949.031.000	563.949.031.000	63.713.900.000	63.713.900.000
217	Kab. Pekalongan	672.810.577.000	672.810.577.000	67.451.500.000	67.464.500.000
218	Kab. Pemalang	623.234.288.000	623.234.288.000	67.544.100.000	67.544.100.000
219	Kab. Purbalingga	586.119.412.000	586.119.412.000	60.956.000.000	60.956.000.000
220	Kab. Purworejo	488.031.872.000	488.031.872.000	62.241.000.000	62.241.000.000
221	Kab. Rembang	560.130.051.000	560.130.051.000	69.014.500.000	69.014.500.000
222	Kab. Serang	618.724.280.000	618.724.280.000	71.624.300.000	71.624.300.000
223	Kab. Sragen	565.131.680.000	565.131.680.000	49.1.623.000.000	49.1.623.000.000
224	Kab. Sukoharjo	704.172.600.000	704.172.600.000	81.335.200.000	81.335.200.000
225	Kab. Tegal	283.232.052.000	283.232.052.000	57.046.800.000	57.046.800.000
226	Kab. Temanggung	602.358.252.000	602.358.252.000	77.032.700.000	77.032.700.000
227	Kab. Wonogiri	486.047.108.000	486.047.108.000	62.295.200.000	62.295.200.000
228	Kab. Yogyakarta	292.750.559.000	292.750.559.000	24.849.100.000	24.849.100.000
229	Kota Palu	293.728.044.000	293.728.044.000	24.878.500.000	24.878.500.000
230	Kota Pariaman	262.810.211.000	262.810.211.000	23.541.400.000	23.541.400.000
231	Kota Pekalongan	7.5.868.867.000	7.5.868.867.000	48.401.500.000	48.401.500.000
232	Kota Pematangsiantar	474.040.649.000	474.040.649.000	34.856.300.000	34.856.300.000
233	Kota Tegal	265.571.164.000	265.571.164.000	23.559.100.000	23.559.100.000
234	Provinsi DI Yogyakarta	620.812.378.000	620.812.378.000	19.489.800.000	19.489.800.000
235	Kab. Bandarlampung	625.052.065.000	625.052.065.000	45.925.000.000	45.925.400.000
236	Kab. Garut	576.300.004.000	576.300.004.000	69.188.700.000	69.188.700.000
237	Kab. Lampung Selatan	444.247.738.000	444.247.738.000	43.343.900.000	43.343.900.000
238	Kab. Lampung Utara	622.130.583.000	622.130.583.000	42.650.500.000	42.650.500.000
239	Kota Padalarang	426.338.833.000	426.338.833.000	1.752.100.000	1.752.100.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 RISETED

DMFTAR.GE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
241	Provinsi Jawa Timur	1.347.601.898.000	1.347.601.898.000	66.031.200.000	66.031.200.000
242	Kab. Bengkulu	565.076.728.000	565.076.728.000	88.339.300.000	88.339.300.000
243	Kab. Bone, Wang	375.552.045.000	375.552.045.000	81.931.200.000	81.931.200.000
244	Kali Niter	RBP 032.033.000	RBP 032.033.000	88.864.500.000	88.864.500.000
245	Kab. Blitar	665.559.925.000	665.559.925.000	67.937.100.000	67.937.100.000
246	Kab. Bondowoso	540.234.195.000	540.234.195.000	88.848.700.000	88.848.700.000
247	Kab. Gresik	561.331.041.000	561.331.041.000	46.338.800.000	46.338.800.000
248	Kab. Jember	1.368.232.334.000	1.368.232.334.000	88.610.000.000	88.610.000.000
249	Kali Jember	RBP 076.742.000	RBP 076.742.000	43.082.300.000	43.082.300.000
250	Kab. Kediri	791.520.267.000	791.520.267.000	77.463.200.000	77.463.200.000
251	Kab. Lamongan	800.181.048.000	800.181.048.000	88.238.100.000	88.238.100.000
252	Kab. Lumajang	RNG 121.873.000	RNG 121.873.000	46.906.900.000	46.906.900.000
253	Kab. Madura	923.294.18.000	923.294.18.000	93.109.900.000	93.109.900.000
254	Kab. Magetan	546.588.852.000	546.588.852.000	58.836.800.000	58.836.800.000
255	Kab. Madiun	1.345.301.624.000	1.345.301.624.000	103.465.000.000	103.465.000.000
256	Kab. Mojokerto	598.917.083.000	598.917.083.000	57.904.300.000	57.904.300.000
257	Kab. Ngawi	666.916.553.000	666.916.553.000	61.747.700.000	61.747.700.000
258	Kab. Ngawi	664.720.260.000	664.720.260.000	66.770.300.000	66.770.300.000
259	Kab. Pandeglang	400.075.505.000	400.075.505.000	54.079.200.000	54.079.200.000
260	Kab. Pamekasan	573.349.051.000	573.349.051.000	65.844.700.000	65.844.700.000
261	Kab. Pasuruan	714.539.608.000	714.539.608.000	75.436.300.000	75.436.300.000
262	Kab. Probolinggo	634.712.282.000	634.712.282.000	74.787.300.000	74.787.300.000
263	Kab. Probolinggo	636.206.544.000	636.206.544.000	75.532.000.000	75.532.000.000
264	Kab. Semarang	496.762.247.000	496.762.247.000	63.545.600.000	63.545.600.000
265	Kab. Sidrap	265.043.522.000	265.043.522.000	55.774.300.000	55.774.300.000
266	Kab. Situbondo	516.014.782.000	516.014.782.000	60.953.300.000	60.953.300.000
267	Kab. Sumenep	664.759.175.000	664.759.175.000	67.552.300.000	67.552.300.000
268	Kab. Trenggalek	535.503.237.000	535.503.237.000	61.777.800.000	61.777.800.000
269	Kab. Tuban	606.241.945.000	606.241.945.000	66.440.200.000	66.440.200.000
270	Kab. Tulungagung	724.035.454.000	724.035.454.000	80.751.200.000	80.751.200.000
271	Kota Blitar	290.235.761.000	290.235.761.000	23.442.000.000	23.442.000.000
272	Kota Kediri	398.391.638.000	398.391.638.000	4.626.800.000	4.626.800.000
273	Kota Malang	287.283.819.000	287.283.819.000	24.017.300.000	24.017.300.000
274	Kota Melati	623.802.226.000	623.802.226.000	16.670.000.000	16.670.000.000
275	Kota Mijenku	265.354.548.000	265.354.548.000	20.562.000.000	20.562.000.000
276	Kota Samarinda	264.131.721.000	264.131.721.000	15.248.200.000	15.248.200.000
277	Kota Probolinggo	311.521.089.000	311.521.089.000	22.575.200.000	22.575.200.000
278	Kota Surabaya	875.450.277.000	875.450.277.000	88.459.500.000	88.459.500.000
279	Kota Tebing	270.330.205.000	270.330.205.000	17.564.300.000	17.564.300.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	845.483.888.000	845.483.888.000	38.389.60.000	38.389.60.000
281	Kab. Bengkayang	340.829.612.000	340.829.612.000	59.129.300.000	59.129.300.000
282	Kab. Landak	103.595.524.000	103.595.524.000	61.850.500.000	61.850.500.000
283	Kab. Pujungan Hilir	RBD 042.112.000	RBD 042.112.000	98.738.400.000	98.738.400.000
284	Kab. Ketapang	671.219.723.000	671.219.723.000	75.127.000.000	75.127.000.000
285	Kab. Pontianak	350.298.817.000	350.298.817.000	60.887.500.000	60.887.500.000
286	Kab. Samarinda	520.019.658.000	520.019.658.000	95.541.200.000	95.541.200.000
287	Kab. Sanggau	502.566.510.000	502.566.510.000	79.157.800.000	79.157.800.000
288	Kab. Sintang	953.592.817.000	953.592.817.000	77.616.800.000	77.616.800.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 RISETED

DMTARO.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
298	Kota Pariaman	454.032.213,00C	454.032.213,00C	36.139.330,00C	34.189.300,00C
299	Kota Sirkawang	305.338.253,00C	205.383.253,00C	36.130.000,00C	26.132.000,00C
300	Kab. Kayong Utara	254.832.307,00C	254.832.307,00C	51.222.000,00C	51.222.000,00C
301	Kab. Kulin Gayo	46.428.453,00C	46.428.453,00C	88.528.453,00C	88.528.400,00C
302	Kab. Sekadau	288.562.775,00C	288.562.775,00C	44.251.000,00C	44.251.000,00C
303	Kab. Meaui	392.120.019,00C	392.120.019,00C	49.813.230,00C	49.813.200,00C
305	Provinsi Kalimantan Tengah	795.816.335,000	795.816.335,000	51.915.000,000	51.915.000,000
306	Kab. Barito Selatan	389.816.632,00C	289.816.629,00C	42.280.000,00C	21.722.575,00C
307	Kab. Barito Utara	360.138.000,00C	360.138.000,00C	35.810.400,00C	35.810.400,00C
308	Kab. Kapuas	67.310.838,00C	67.310.838,00C	63.247.700,00C	62.374.700,00C
309	Kab. Kotawaringin Barat	624.143.849,00C	424.143.849,00C	27.102.230,00C	27.102.200,00C
310	Kab. Kotawaringin Timur	532.019.153,00C	532.019.153,00C	45.672.400,00C	45.672.400,00C
311	Kota Pangkajene	386.522.888,00C	386.522.888,00C	39.138.500,00C	22.739.300,00C
312	Kab. Parit Indera	310.780.577,00C	310.780.577,00C	44.755.700,00C	44.755.700,00C
303	Kab. Muaragga	442.915.042,00C	442.915.042,00C	14.569.800,00C	14.569.800,00C
304	Kab. Pulang Pisau	398.419.142,00C	398.419.142,00C	52.170,000,00C	52.170,000,00C
305	Kab. Amungkas	366.370.621,00C	366.370.621,00C	38.678.500,00C	38.678.500,00C
306	Kab. Lamandau	266.233.333,00C	266.233.333,00C	20.877.500,00C	10.877.500,00C
307	Kab. Pulau Amak	203.431.181,00C	203.431.181,00C	28.931.000,00C	28.931.000,00C
308	Kab. Kotawato	445.162.914,00C	445.162.914,00C	20.415.100,00C	20.415.100,00C
309	Kab. Sa'we	702.754.243,00C	402.457.243,00C	39.613.000,00C	28.512.800,00C
310	Provinsi Kalimantan Selatan	504.878.152,000	504.878.152,000	37.248.400,000	37.248.400,000
311	Kab. Banjar	129.361.238,00C	129.361.238,00C	20.139.500,00C	10.139.500,00C
312	Kab. Barito Kuala	361.962.283,00C	361.962.283,00C	53.288.800,00C	52.738.800,00C
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	324.457.413,00C	324.457.413,00C	36.846.000,00C	36.846.000,00C
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	322.516.858,00C	222.516.858,00C	35.926.500,00C	25.939.500,00C
315	Kab. Hulu Sungai Utara	204.016.088,00C	204.016.088,00C	43.561.300,00C	40.757.300,00C
316	Kab. Kotawaringin	124.735.132,00C	124.735.132,00C	25.057.800,00C	25.054.800,00C
317	Kab. Lebong	261.786.235,00C	261.786.235,00C	17.384.200,00C	17.394.200,00C
318	Kab. Tambang Laut	327.811.683,00C	327.811.683,00C	15.431.300,00C	15.431.300,00C
319	Kab. Tapin	284.509.328,00C	284.509.328,00C	31.810.200,00C	31.810.200,00C
320	Kota Banjarbaru	242.193.675,00C	242.193.675,00C	25.384.300,00C	25.384.300,00C
321	Kota Samarinda	444.335.637,00C	444.335.637,00C	11.852.700,00C	11.852.700,00C
322	Kab. Belahan	1.772.446.636,00C	1.772.446.636,00C	2.712.000,00C	2.036.400,00C
323	Kab. Tambang Lirung	203.285.563,00C	203.285.563,00C	17.737.700,00C	17.737.700,00C
324	Provinsi Kalimantan Timur	51.448.845,000	51.448.845,000	28.188.100,000	38.188.100,000
325	Kab. Dobo	340.420.844,00C	340.420.844,00C	9.839.200,00C	7.257.025,00C
326	Kab. Balikpapan	745.388.711,00C	745.388.711,00C	8.781.000,00C	8.781.000,00C
327	Kab. Kita Kartanegara	1.066.820,00C	1.066.820,00C	50.236.000,00C	37.039.200,00C
328	Kab. Luwu	457.034.645,00C	457.034.645,00C	48.768.000,00C	48.238.000,00C
329	Kab. Luwu Timur	311.148.164,00C	311.148.164,00C	13.971.800,00C	13.971.800,00C
330	Kab. Maros	516.030.063,00C	516.030.063,00C	20.760.000,00C	40.730.000,00C
331	Kab. Minahasa	328.387.301,00C	328.387.301,00C	13.758.700,00C	13.758.700,00C
332	Kab. Poso	206.234.266,00C	206.234.266,00C	3.638.000,00C	6.658.300,00C
333	Kota Palopo	288.220.224,00C	288.220.224,00C	7.038.500,00C	7.928.300,00C
334	Kota Samarinda	83.934.543,00C	83.934.543,00C	4.820.000,00C	4.820.000,00C
335	Kab. Tana Toraja	146.538.008,00C	146.538.008,00C	3.835.000,00C	3.650.300,00C
336	Kota Samarinda	397.762.867,00C	397.762.867,00C		

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 (SAKIPED)

DMFTAR.GE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
321	Kota Tarakan	180.480.878.000	180.438.843.000		
328	Kab. Paser Utara	118.728.287.000	118.423.287.000	7.933.300.000	7.952.300.000
338	Provinsi Sulawesi Utara	618.711.007.000	618.711.007.000	29.288.200.000	28.288.200.000
340	Kali Belawang Marungasem	392.510.271.000	392.510.271.000	52.680.700.000	52.680.700.000
341	Kab. Minahasa	105.791.075.000	105.491.075.000	50.651.800.000	50.651.800.000
342	Kab. Sanggau	322.070.577.000	322.070.577.000	83.411.800.000	83.411.800.000
343	Kota Bitung	304.372.454.000	204.372.454.000	27.939.800.000	27.939.800.000
344	Kota Maros	182.554.131.000	182.454.131.000	42.958.800.000	42.958.800.000
345	Kali Kendari Tual	278.075.014.000	278.073.014.000	45.301.300.000	45.301.300.000
346	Kab. Minahasa Selatan	321.072.211.000	321.072.211.000	73.240.500.000	73.240.500.000
347	Kab. Minahasa Tenggara	264.095.658.000	264.095.658.000	44.095.400.000	44.095.400.000
348	Kab. Kepulauan Sui Toli-Toli dan Bira	266.267.512.000	266.267.512.000	46.519.800.000	46.519.800.000
349	Kota Samarinda	233.190.069.000	233.190.069.000	27.514.200.000	27.514.200.000
350	Kali Deli Selatan	105.376.443.000	105.376.443.000	56.185.300.000	56.185.300.000
351	Kab. Belitung Timur	195.333.159.000	195.333.159.000	54.308.300.000	54.308.300.000
352	Kota Tomohon	247.393.633.000	247.393.633.000	34.559.700.000	34.559.700.000
353	Kab. Minahasa Utara	307.375.483.000	307.375.483.000	47.726.300.000	47.726.300.000
354	Kab. Belitung	226.524.073.000	226.524.073.000	45.430.300.000	45.430.300.000
355	Provinsi Gorontalo	481.118.109.000	481.118.109.000	28.057.700.000	28.057.700.000
356	Kab. Bone	263.431.056.000	263.481.050.000	46.054.800.000	46.054.800.000
357	Kab. Gresik	382.576.841.000	282.576.841.000	69.782.000.000	69.782.000.000
358	Kota Enrekang	296.333.485.000	296.333.485.000	28.678.300.000	28.678.300.000
359	Kab. Pamekasan	266.367.211.000	266.367.211.000	27.307.100.000	27.307.100.000
360	Kab. Grobogan	211.537.972.000	211.537.972.000	43.217.300.000	43.217.300.000
361	Kab. Bone Bolango	267.849.954.000	267.849.954.000	27.031.300.000	27.031.300.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	743.161.759.000	743.161.759.000	38.139.100.000	38.139.100.000
363	Kab. Donggala	504.395.617.000	504.395.617.000	64.255.300.000	64.255.300.000
364	Kab. Bone Kep. Laut	323.060.072.000	233.631.072.000	23.555.300.000	18.555.300.000
365	Kab. Buton	322.192.207.000	232.192.207.000	46.620.300.000	45.620.300.000
366	Kab. Tulungagung	352.284.600.000	352.284.600.000	47.518.400.000	47.518.400.000
367	Kab. Donggala	302.726.232.000	202.426.232.000	65.306.500.000	65.306.500.000
368	Kab. Morowali	426.539.136.000	426.539.136.000	48.504.000.000	48.504.000.000
369	Kab. Poso	434.180.787.000	434.180.787.000	57.450.200.000	57.450.200.000
370	Kota Palu	422.391.757.000	422.391.757.000	39.201.000.000	39.201.000.000
371	Kab. Parigi Moutong	447.807.500.000	447.807.500.000	73.237.800.000	73.237.800.000
372	Kab. Sigi	380.712.153.000	380.712.153.000	53.930.300.000	53.930.300.000
373	Kab. Tana Toraja	310.639.620.000	310.639.620.000	55.087.200.000	55.087.200.000
374	Provinsi Sulawesi Selatan	818.757.989.000	818.757.989.000	41.888.000.000	41.888.000.000
375	Kab. Bone	260.320.424.000	260.320.424.000	39.919.000.000	39.919.000.000
376	Kab. Luwu	286.337.851.000	286.337.851.000	36.867.000.000	36.867.000.000
377	Kab. Bone	622.434.218.000	622.434.218.000	83.250.000.000	83.250.000.000
378	Kab. Bulukumba	1'313'8.855.000	1'313'8.855.000	63.052.800.000	63.052.800.000
379	Kab. Pinrang	302.571.273.000	302.571.273.000	42.179.400.000	42.179.400.000
380	Kab. Gowa	1'70.823.554.000	1'70.823.554.000	51.230.000.000	51.230.000.000
381	Kab. Jeneponto	365.798.253.000	365.798.253.000	57.859.500.000	57.859.500.000
382	Kab. Luwu	306.991.261.000	306.991.261.000	57.320.300.000	57.320.300.000
383	Kab. Luwu Utara	377.853.264.000	377.853.264.000	55.752.200.000	55.752.200.000
384	Kab. Maros	358.502.014.000	358.502.014.000	48.938.800.000	48.938.800.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 RISETED

DMTARO.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
395	Kab. Pangkajene Sulawesi	305.792.048,000	205.623.049,000	57.801.300,000	57.801.300,000
396	Kab. Pinrang	720.139.733,000	420.180.733,000	51.463.100,000	51.463.100,000
397	Kab. Seraya	304.381.618,000	204.381.619,000	46.164.100,000	46.164.100,000
398	Kali Selangor Pecatuang	365.925.851,000	365.923.851,000	48.028.000,000	48.028.000,000
399	Kab. Sinjai	345.768.219,000	245.753.219,000	51.552.000,000	51.552.000,000
400	Kab. Suppeng	3.610.618.207,000	3.610.618.207,000	40.756.100,000	40.756.100,000
401	Kab. Takalar	324.734.072,000	224.731.972,000	43.636.000,000	43.636.000,000
402	Kab. Tana Toraja	322.960.334,000	222.851.734,000	48.028.000,000	48.028.000,000
403	Kali Wae	473.980.242,000	473.836.242,000	63.257.200,000	63.257.200,000
404	Kota Palu Barat	276.566.813,000	275.566.812,000	29.405.800,000	29.405.800,000
405	Kab. Tana Ura	287.459.218,000	287.459.218,000	65.056.000,000	65.056.000,000
406	Kota Maros	718.739.524,000	718.739.524,000	60.858.100,000	60.858.100,000
407	Kota Parepare	285.089.118,000	285.089.118,000	28.169.000,000	28.169.000,000
408	Kali Luwu Timur	283.380.053,000	283.380.053,000	41.551.800,000	41.551.800,000
409	Provinsi Sulawesi Barat	441.578.798,000	441.578.798,000	35.800.700,000	35.800.700,000
410	Kab. Mamuju	300.011.441,000	300.011.441,000	47.802.800,000	47.802.800,000
411	Kab. Mamuju Utara	425.352.857,000	425.352.857,000	36.023.700,000	36.023.700,000
412	Kab. Polewali Mandar	400.306.164,000	400.306.164,000	53.730.000,000	53.730.000,000
413	Kab. Maros	290.185.285,000	290.183.285,000	57.380.700,000	57.380.700,000
414	Kab. Maros	227.777.100,000	227.777.100,000	34.751.300,000	34.751.300,000
415	Provinsi Sulawesi Tenggara	700.836.557,000	700.836.557,000	33.804.600,000	33.804.600,000
416	Kab. Bone	382.426.111,000	382.426.111,000	47.602.800,000	47.602.800,000
417	Kab. Konawe	273.770.515,000	273.770.515,000	55.124.000,000	55.124.000,000
418	Kab. Kete�e	486.534.118,000	486.534.118,000	33.268.000,000	33.268.000,000
419	Kab. Muna	425.548.351,000	425.548.351,000	65.756.000,000	65.756.000,000
420	Kota Kendari	390.702.724,000	290.702.724,000	31.027.000,000	31.027.000,000
421	Kota Bau-Bau	371.792.017,000	271.792.017,000	24.674.800,000	24.674.800,000
422	Kab. Konawe Selatan	362.334.553,000	362.334.553,000	57.356.300,000	57.356.300,000
423	Kab. Bone	282.236.285,000	282.236.285,000	41.146.400,000	41.146.400,000
424	Kab. Konawe Utara	205.582.448,000	205.532.448,000	47.030.500,000	47.030.500,000
425	Kab. Buton	260.734.842,000	250.481.842,000	21.154.575,000	21.154.575,000
426	Kab. Wakatobi	262.080.467,000	252.039.467,000	30.130.300,000	30.130.300,000
427	Kota Ende	273.275.363,000	273.275.363,000	35.179.200,000	35.179.200,000
428	Provinsi Gili	560.673.533,000	560.673.533,000	21.221.700,000	15.916.275,000
429	Kab. Ende	157.052.573,000	157.052.573,000	250.800,000	210.175,000
430	Kab. Ronggur	321.378.151,000	321.378.151,000	29.329.400,000	29.329.400,000
431	Kab. Deli Serdang	588.406.917,000	588.406.917,000	54.720.700,000	54.720.700,000
432	Kab. Minahasa	435.135.812,000	435.135.812,000	41.076.300,000	41.076.300,000
433	Kab. Jembrana	336.721.763,000	336.721.763,000	35.454.800,000	35.454.800,000
434	Kab. Aceh Besar	410.032.798,000	410.032.798,000	41.734.700,000	41.734.700,000
435	Kab. Aceh Jaya	315.814.056,000	315.814.056,000	29.886.200,000	29.886.200,000
436	Kab. Aceh Tamiang	763.294.443,000	163.294.443,000	21.524.200,000	41.524.200,000
437	Kota Banda Aceh	381.538.052,000	381.538.052,000	3.558.900,000	3.558.900,000
438	Provinsi Nusa Tenggara Barat	648.671.083,000	648.671.083,000	15.904.400,000	45.964.400,000
439	Kab. Bima	575.830.028,000	575.830.028,000	17.230.000,000	14.220.000,000
440	Kab. Dompu	340.587.265,000	340.587.265,000	42.456.800,000	42.456.800,000
441	Kab. Lombok Barat	166.594.063,000	165.594.063,000	53.265.300,000	53.265.300,000
442	Kab. Lombok Tengah	582.768.958,000	582.768.958,000	57.211.500,000	57.211.500,000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 (1960760)

DMFTAR.GE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
428	Kab. Lemoen : Timur	897.499.073.000	897.499.073.000	89.351.000.000	88.351.000.000
429	Kab. Sumbawa	796.158.923.000	493.153.923.000	53.736.000.000	58.736.000.000
430	Kota Mataram	367.095.232.000	261.094.372.000	25.481.000.000	26.431.000.000
431	Kab. Lemoen : Barat	248.572.261.000	243.572.237.000	35.120.000.000	35.120.000.000
432	Kota Elba	268.031.565.000	268.001.555.000	23.036.000.000	23.036.000.000
433	Kab. Sumbawa Barat	274.492.125.000	274.427.225.000	25.149.800.000	25.149.800.000
434	Provinsi Nusa Tenggara Timur	752.057.444.000	752.057.444.000	47.399.400.000	47.399.400.000
435	Kab. Blor	362.421.335.000	362.421.331.000	63.351.500.000	62.351.500.000
436	Kab. Deli	427.871.241.000	427.871.241.000	63.134.400.000	63.134.400.000
437	Kab. Ence	376.131.405.000	273.131.405.000	57.616.000.000	57.616.000.000
438	Kab. Flores Timur	312.359.575.000	312.359.575.000	49.808.000.000	48.808.000.000
439	Kab. Rupeng	407.388.823.000	407.388.823.000	66.211.700.000	66.211.700.000
440	Kab. Lemata	263.382.845.000	263.382.845.000	49.812.300.000	49.812.300.000
441	Kab. Manggarai	318.378.073.000	318.378.073.000	61.129.000.000	61.129.000.000
442	Kab. Ngada	287.115.923.000	287.115.923.000	42.245.800.000	42.245.800.000
443	Kab. Sikka	362.434.780.000	362.434.780.000	47.417.000.000	47.417.000.000
444	Kab. Sumba Barat	236.420.878.000	236.420.878.000	41.717.700.000	44.177.700.000
445	Kab. Sumba Timur	305.839.303.000	305.839.303.000	43.338.100.000	46.356.100.000
446	Kab. Timor Tengah Selatan	455.454.583.000	455.454.583.000	78.389.400.000	78.389.400.000
447	Kab. Timor Tengah Utara	354.429.725.000	334.403.729.000	60.569.900.000	60.569.900.000
448	Kota Kupang	377.792.653.000	277.792.653.000	79.732.000.000	40.732.000.000
449	Kab. Probolinggo	296.431.485.000	296.431.485.000	34.116.000.000	34.116.000.000
450	Kab. Pasuruan	261.131.754.000	261.101.754.000	50.710.100.000	50.710.100.000
451	Kab. Sumatra Tengah	207.7852.41.000	207.7852.41.000	51.495.300.000	51.495.300.000
452	Kab. Sumatra Barat Daya	277.318.203.000	277.318.203.000	54.952.300.000	54.952.300.000
453	Kab. Manokwari Timur	286.150.561.000	286.150.561.000	62.128.500.000	62.128.500.000
454	Kab. Sabu Iskua	195.901.347.000	195.811.347.000	54.201.400.000	54.201.400.000
455	Kab. Manokwari Barat	287.038.667.000	287.038.667.000	77.839.300.000	47.839.300.000
456	Provinsi Maluku	703.953.953.000	703.953.953.000	44.657.700.000	44.657.700.000
457	Kab. Maluku Tenggara Barat	318.328.722.000	318.328.722.000	50.781.000.000	50.781.000.000
458	Kab. Maluku Tengah	546.568.283.000	546.553.823.000	53.650.000.000	58.660.000.000
459	Kab. Maluku Tenggara	264.149.048.000	264.149.048.000	43.042.300.000	43.042.300.000
460	Kota Puncak Jaya	234.987.724.000	234.931.724.000	55.136.300.000	55.136.300.000
461	Kota Sorong	211.1386.16.000	211.1386.16.000	36.120.000.000	36.120.000.000
462	Kota Seram Bagian Barat	323.727.006.000	323.727.006.000	43.232.000.000	43.232.000.000
463	Kota Seram Bagian Timur	262.886.612.000	262.836.612.000	44.468.200.000	44.468.200.000
464	Kab. Maluku Utara, Jayaw	302.514.689.000	302.514.689.000	47.874.300.000	48.750.325.000
465	Kota Bitung Sulawesi	222.130.223.000	222.101.223.000	43.774.700.000	43.774.700.000
466	Kab. Kepulauan Aru	302.931.353.000	292.501.353.000	35.067.300.000	26.768.325.000
467	Kota Ternate	186.005.800.000	183.865.800.000	53.626.200.000	53.840.200.000
468	Provinsi Maluku Utara	540.389.811.000	540.389.811.000	51.223.800.000	51.223.800.000
469	Kab. Halmahera Tengah	255.879.015.000	255.879.015.000	39.916.000.000	39.916.000.000
470	Kab. Halmahera Barat	263.225.085.000	263.223.085.000	48.810.200.000	48.810.200.000
471	Kota Ternate	314.020.637.000	274.020.637.000	29.522.900.000	26.522.900.000
472	Kab. Halmahera Utara	243.818.712.000	243.813.712.000	43.231.000.000	40.231.000.000
473	Kota Ternate Kepulauan	313.516.231.000	313.516.231.000	43.757.000.000	40.722.000.000
474	Kab. Kepulauan S. Le	296.528.813.000	293.452.813.000	57.050.000.000	54.960.400.000
475	Kab. Pulau Morotai	203.956.615.000	203.856.615.000	53.034.100.000	53.034.100.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TA-UN 2011 (BUDGETED)

DMFTAR.GE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
481	Kab. Helmahera Selatan	364.188.238.000	284.133.238.000	50.583.300.000	50.583.300.000
482	Kab. Helmahera Utara	290.778.800.000	290.473.800.000	57.722.000.000	54.722.000.000
483	Kab. Taimpo	288.082.285.000	288.082.285.000	126.768.800.000	126.768.800.000
484	Kali Baru Jaya	323.334.558.000	223.334.558.000	108.576.500.000	108.576.500.000
485	Provinsi Papua	1.276.285.908.000	1.276.285.908.000	96.151.200.000	72.115.650.000
486	Kab. Likupang Nauter	363.019.081.000	363.019.081.000	84.054.400.000	64.854.400.000
487	Kab. Jayapura	710.732.253.000	410.483.233.000	49.271.300.000	46.271.300.000
488	Kab. Jayawijaya	608.421.186.000	408.421.186.000	86.776.100.000	86.776.100.000
489	Kali Merende	754.078.803.000	354.078.803.000	102.766.300.000	102.766.300.000
490	Kab. Mimika	316.339.561.000	213.339.561.000	53.576.100.000	53.576.100.000
491	Kab. Neira	620.579.022.000	420.579.022.000	71.083.300.000	71.083.300.000
492	Kab. Fakfai	384.779.124.000	384.779.124.000	85.280.000.000	85.280.000.000
493	Kab. Puncak Jaya	173.734.652.000	473.734.652.000	90.837.800.000	86.837.800.000
494	Kali Kei Timur	304.016.581.000	304.016.581.000	83.089.200.000	86.068.200.000
495	Kota Jayapura	392.364.036.000	392.364.036.000	46.370.800.000	46.370.800.000
496	Kab. Samosir	282.994.002.000	482.994.002.000	39.170.000.000	32.170.000.000
497	Kab. Keren	325.353.118.000	325.353.118.000	41.822.900.000	44.812.900.000
498	Kab. Yahukimo	126.267.032.000	126.267.032.000	66.138.000.000	66.138.000.000
499	Kab. Pegunungan Bintang	494.385.584.000	494.385.584.000	75.518.900.000	76.510.500.000
500	Kab. Tololelo	376.436.000.000	376.436.000.000	97.332.100.000	97.352.100.000
501	Kab. Boven Digoel	531.012.244.000	531.012.244.000	52.683.300.000	52.692.300.000
502	Kab. Maiser	495.129.572.000	495.129.572.000	25.522.400.000	25.522.400.000
503	Kab. Sarmi	506.993.333.000	506.993.333.000	62.047.800.000	62.077.800.000
504	Kab. Waigeo	316.516.827.000	216.516.827.000	46.821.700.000	46.821.700.000
505	Kab. Mamuju Utara	436.957.462.000	436.957.462.000	52.612.300.000	52.612.300.000
506	Kab. Maros Selatan	291.037.75.000	291.037.75.000	83.002.800.000	88.002.800.000
507	Kab. Nduga	354.094.018.000	354.094.018.000	127.624.100.000	95.720.700.000
508	Kab. Oepi	280.034.216.000	280.034.216.000	62.338.000.000	62.338.000.000
509	Kab. Intan Jaya	216.416.661.000	476.416.661.000	124.892.200.000	124.892.200.000
510	Kab. Fakfak	466.452.765.000	466.452.765.000	109.067.100.000	108.602.100.000
511	Kab. Deiwei	322.332.648.000	222.332.648.000	52.131.800.000	92.131.800.000
512	Kab. Supiori	215.985.262.000	215.985.262.000	41.762.700.000	41.762.700.000
513	Provinsi Papua Barat	700.444.910.000	700.444.910.000	40.538.900.000	40.538.900.000
514	Kab. Sorong	362.929.803.000	262.929.803.000	74.424.400.000	74.424.400.000
515	Kali Meremba	444.364.531.000	444.364.531.000	83.684.400.000	86.884.400.000
516	Kab. Fakfak	404.103.867.000	404.103.867.000	55.316.300.000	55.316.300.000
517	Kota Sorong	286.780.059.000	286.780.059.000	22.839.000.000	44.889.000.000
518	Kab. Nunukan	265.282.482.000	265.282.482.000	58.729.000.000	58.729.000.000
519	Kab. Raja Ampat	372.441.508.000	272.441.508.000	66.024.900.000	66.824.900.000
520	Kab. Teluk Dalam	381.764.052.000	381.764.052.000	44.631.500.000	44.888.500.000
521	Kab. Teluk Wondama	230.131.869.000	230.131.869.000	52.843.400.000	52.843.400.000
522	Kab. Tembagapura	223.338.735.000	223.338.735.000	61.757.200.000	61.764.200.000
523	Kab. Maybrat	328.555.367.000	272.553.767.000	73.448.700.000	76.448.700.000
524	Kab. Kaimana	392.068.116.000	392.068.116.000	39.938.000.000	39.938.000.000
525	Desa Ladergan				
	JUMLAH	225.633.712.048.000	225.633.712.048.000	25.222.800.900.000	24.803.509.925.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

DAFTAR II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Bentuk	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	4.646.785.087.600	4.610.868.498.600	34.778.671.000	4.646.438.087.600
2	Kab. Aceh Besar	42.725.392.520	3	42.725.392.520	42.725.392.520
3	Kab. Aceh Besar	65.423.794.210	3	65.423.794.210	65.423.794.210
4	Kab. Aceh Selatan	50.569.911.920	3	50.569.911.920	50.569.911.920
5	Kab. Aceh Singkil	52.091.813.100	3	52.091.813.100	52.091.813.100
6	Kab. Aceh Tengah	106.331.397.320	3	106.331.397.320	106.331.397.320
7	Kab. Aceh Tenggara	103.654.952.080	3	103.654.952.080	103.654.952.080
8	Kab. Aceh Timur	92.103.282.130	3	92.103.282.130	92.103.282.130
9	Kab. Aceh Utara	127.469.984.380	3	127.469.984.380	127.469.984.380
10	Kab. Bireuen	104.523.344.180	3	104.523.344.180	104.523.344.180
11	Kab. Aceh	133.384.053.280	3	133.384.053.280	133.384.053.280
12	Kab. Simeulue	47.583.357.240	3	47.583.357.240	47.583.357.240
13	Kota Banda Aceh	129.687.734.730	3	129.687.734.730	129.687.734.730
14	Kota Banda Aceh	32.549.012.430	3	32.549.012.430	32.549.012.430
15	Kota Singkawang	71.804.006.000	3	71.804.006.000	71.804.006.000
16	Kota Jambi	33.685.032.040	3	33.685.032.040	33.685.032.040
17	Kab. Natuna Raya	60.504.736.010	3	60.504.736.010	60.504.736.010
18	Kab. Aceh Jaya	53.153.501.880	3	53.153.501.880	53.153.501.880
19	Kab. Pidie Jaya	66.049.204.840	3	66.049.204.840	66.049.204.840
20	Kab. Aceh Barat Daya	43.525.922.040	3	43.525.922.040	43.525.922.040
21	Kab. Berau	36.799.254.800	3	36.799.254.800	36.799.254.800
22	Kab. Aceh Tengah	78.883.745.200	3	78.883.745.200	78.883.745.200
23	Kab. Bener Meriah	53.611.261.600	3	53.611.261.600	53.611.261.600
24	Kota Sukajadi	53.988.001.010	3	53.988.001.010	53.988.001.010
25	Provinsi Sumatera Utara	3.577.572.000	0	-	0
26	Kab. Asahan	120.693.830.000	3	120.693.830.000	120.693.830.000
27	Kab. Deli Serdang	37.693.337.540	3	37.693.337.540	37.693.337.540
28	Kab. Deli Serdang	215.282.372.780	3	215.282.372.780	215.282.372.780
29	Kab. Tapanuli Tengah	79.145.331.150	3	79.145.331.150	79.145.331.150
30	Kab. Labuhan Batu	116.841.531.880	3	116.841.531.880	116.841.531.880
31	Kab. Langkat	147.273.312.110	3	147.273.312.110	147.273.312.110
32	Kab. Nias Selatan	84.311.065.320	3	84.311.065.320	84.311.065.320
33	Kab. Nias	36.731.997.860	3	36.731.997.860	36.731.997.860
34	Kab. Rimbohun	153.032.466.000	3	153.032.466.000	153.032.466.000
35	Kab. Taperul Sektor	91.625.131.040	3	91.625.131.040	91.625.131.040
36	Kab. Taperul Tengah	98.012.192.680	3	98.012.192.680	98.012.192.680
37	Kab. Taperul Laut	131.215.071.080	3	131.215.071.080	131.215.071.080
38	Kab. Toba Samosir	32.425.027.040	3	32.425.027.040	32.425.027.040
39	Kota Binjai	113.653.411.880	3	113.653.411.880	113.653.411.880
40	Kota Medan	341.784.005.440	3	341.784.005.440	341.784.005.440
41	Kota Pematangsiantar	93.050.435.520	3	93.050.435.520	93.050.435.520
42	Kota Banda Aceh	36.883.134.180	3	36.883.134.180	36.883.134.180
43	Kota Tarutung	38.133.988.240	3	38.133.988.240	38.133.988.240
44	Kab. Bat. Enrek	73.632.856.360	3	73.632.856.360	73.632.856.360
45	Kab. Labuhan Batu Utara	92.628.805.280	3	92.628.805.280	92.628.805.280
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	40.090.897.000	3	40.090.897.000	40.090.897.000

DAFTAR IIA-011-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Bantuan	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
47	Kab. Padang Lawas Utara	31.038.937.440	3	27.082.937.440	27.082.937.440
49	Kab. Padang Lawas	43.150.927.720	3	39.327.927.720	39.327.927.720
49	Kab. Nias Utara	31.211.507.200	3	31.311.507.200	31.311.507.200
53	Kab. Nias Barat	20.525.961.700	3	20.525.961.700	20.525.961.700
51	Kota Tebing Tinggi	30.711.221.500	3	30.711.221.500	30.711.221.500
52	Kota Pariaman Sidempuan	77.671.925.700	3	77.671.925.700	77.671.925.700
53	Kab. Palgint Banyak	59.354.458.220	3	59.354.458.220	59.354.458.220
54	Kab. Nias Selatan	57.800.738.730	3	57.800.738.730	57.800.738.730
55	Kab. Lingga	51.814.458.320	3	51.814.458.320	51.814.458.320
56	Kab. Sembalun	124.263.933.800	3	124.263.933.800	124.263.933.800
57	Kab. Samosir	40.887.231.080	3	40.887.231.080	40.887.231.080
58	Kota Sungai Penuh	40.301.735.240	3	40.301.735.240	40.301.735.240
59	Provinsi Sumatera Barat	18.835.500.000	0	18.835.500.000	18.835.500.000
60	Kab. Limapuluh Kota	101.445.710.530	3	101.445.710.530	101.445.710.530
61	Kota Padang	125.404.875.730	3	125.404.875.730	125.404.875.730
62	Kab. Kepulauan Mentawai	25.063.901.200	3	25.063.901.200	25.063.901.200
63	Kab. Padang Pariaman	144.703.311.240	3	144.703.311.240	144.703.311.240
64	Kab. Pasaman	106.004.011.800	3	106.004.011.800	106.004.011.800
65	Kab. Pesisir Selatan	113.500.775.240	3	113.500.775.240	113.500.775.240
66	Kab. Sijunjung	83.588.045.730	3	83.588.045.730	83.588.045.730
67	Kab. Solok	86.591.455.730	3	86.591.455.730	86.591.455.730
68	Kota Tanjung Balai	93.898.155.440	3	93.898.155.440	93.898.155.440
69	Kota Lubuk Linggau	39.801.525.480	3	39.801.525.480	39.801.525.480
70	Kota Batang Toru	39.048.562.080	3	39.048.562.080	39.048.562.080
71	Kota Batam	173.000.814.160	3	173.000.814.160	173.000.814.160
72	Kota Payakumbuh	45.079.535.520	3	45.079.535.520	45.079.535.520
73	Kota Sawahlunto	77.149.162.000	3	77.149.162.000	77.149.162.000
74	Kota Sibolga	49.708.415.870	3	49.708.415.870	49.708.415.870
75	Kota Pariaman	57.130.414.520	3	57.130.414.520	57.130.414.520
76	Kab. Pasaman Barat	59.801.096.720	3	60.001.096.720	60.001.096.720
77	Kab. Dairi	83.622.812.730	3	83.622.812.730	83.622.812.730
78	Kab. Solok Selatan	72.460.311.100	3	73.105.267.100	73.105.267.100
79	Provinsi Riau	3.473.322.000	0	3.473.322.000	3.473.322.000
80	Kab. Bengkalis	55.000.098.100	3	55.000.098.100	55.000.098.100
81	Kab. Indragiri Hilir	92.671.362.100	3	92.971.362.100	92.971.362.100
82	Kab. Indragiri Hulu	39.452.024.400	3	39.452.024.400	39.452.024.400
83	Kab. Kampar	124.524.928.120	3	124.524.928.120	124.524.928.120
84	Kab. Kuantan Singing	30.311.090.080	3	30.311.090.080	30.311.090.080
85	Kab. Pelalawan	37.601.015.780	3	37.901.015.780	37.901.015.780
86	Kab. Rokan Hulu	86.063.124.100	3	86.662.313.100	86.662.313.100
87	Kab. Rokan Hulu	30.105.262.400	3	30.105.262.400	30.105.262.400
88	Kab. Situbondo	31.094.760.040	3	31.094.760.040	31.094.760.040
89	Kota Jambi	31.021.162.000	3	31.021.162.000	31.021.162.000
90	Kota Pekanbaru	160.283.735.880	3	160.322.735.880	160.322.735.880
91	Kota Kapuas Hulu	39.384.810.320	3	39.124.461.320	39.124.461.320
92	Provinsi Kepulauan Riau	9.073.500.000	0	9.073.500.000	9.073.500.000

LAPORAN REALISASI PENYESUAIAN PADA TAHUN 2011

DAFTAR II

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)**

No.	Bantuan	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
83	Kab. Deli Serdang	29.541.163.120	0	29.541.163.120	29.541.163.120
94	Kab. Nias Selatan	17.582.332.800	0	17.582.332.800	17.582.332.800
95	Kab. Karimun	47.632.068.640	0	47.632.068.640	47.632.068.640
96	Kota Batam	79.389.604.010	0	78.036.604.010	78.036.604.010
97	Kab. Kapuas Hulu	45.229.715.200	0	39.746.175.200	39.746.175.200
98	Kota Tarakan	35.314.242.700	0	33.014.242.700	33.014.242.700
99	Kab. Lingga	29.018.015.320	0	28.016.015.320	28.016.015.320
100	Provinsi Jambi	18.000.000.000	0	18.000.000.000	18.000.000.000
101	Kab. Delsel	57.707.031.800	0	57.707.031.800	57.707.031.800
102	Kab. Donggala	71.003.349.320	0	70.898.349.320	70.898.349.320
103	Kab. Kotawaringin Barat	80.101.735.180	0	80.101.735.180	80.101.735.180
104	Kab. Kotawaringin Timur	72.763.637.880	0	72.763.637.880	72.763.637.880
105	Kab. Muara Jambi	91.093.217.320	0	91.093.217.320	91.093.217.320
106	Kab. Paserbarisan	61.287.122.520	0	60.287.122.520	60.287.122.520
107	Kab. Tambang Ijo	47.253.835.800	0	47.253.835.800	47.253.835.800
108	Kab. Tambang Ijo Timur	39.071.225.130	0	39.071.225.130	39.071.225.130
109	Kab. Tabo	59.032.531.120	0	58.022.531.120	58.022.531.120
110	Kota Ambon	113.304.811.810	0	113.304.811.810	113.304.811.810
111	Kota Banda Aceh	47.304.224.080	0	47.304.224.080	47.304.224.080
112	Provinsi Sumatera Selatan	38.422.173.000	0	38.422.173.000	38.422.173.000
113	Kab. Lahat	104.031.042.530	0	104.031.042.530	104.031.042.530
114	Kab. Musi Rawas	67.503.254.930	0	67.503.254.930	67.503.254.930
115	Kab. Musi Rawas Utara	106.561.221.240	0	106.561.221.240	106.561.221.240
116	Kab. Muara Enim	113.805.382.650	0	113.805.382.650	113.805.382.650
117	Kab. Ogan Komering Ilir	140.104.174.000	0	140.104.174.000	140.104.174.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	84.409.039.180	0	84.409.039.180	84.409.039.180
119	Kota Padang	984.798.457.480	0	984.798.457.480	984.798.457.480
120	Kota Payakumbuh	39.814.725.480	0	39.814.725.480	39.814.725.480
121	Kota Lubuk Linggau	103.607.422.340	0	103.607.422.340	103.607.422.340
122	Kota Padangpanjang	37.008.712.480	0	37.008.712.480	37.008.712.480
123	Kab. Empat Lawang	41.825.532.060	0	41.825.532.060	41.825.532.060
124	Kab. Bone	102.219.862.000	0	102.219.862.000	102.219.862.000
125	Kab. Ogan Ilir	87.076.774.400	0	87.076.774.400	87.076.774.400
126	Kab. OKI Timur	120.490.764.080	0	120.490.764.080	120.490.764.080
127	Kab. OKI Selatan	36.741.144.550	0	36.741.144.550	36.741.144.550
128	Provinsi Bengkulu	33.778.671.000	0	33.778.671.000	33.778.671.000
129	Kab. Bangka	42.738.031.040	0	42.738.031.040	42.738.031.040
130	Kab. Belitung	32.629.804.120	0	32.629.804.120	32.629.804.120
131	Kota Pangkal Pinang	39.199.974.750	0	38.150.974.750	38.150.974.750
132	Kab. Bangka Selatan	29.003.313.500	0	28.003.313.500	28.003.313.500
133	Kab. Bangka Barat	43.510.498.000	0	43.510.498.000	43.510.498.000
134	Kab. Bangka Tengah	38.503.812.830	0	38.503.812.830	38.503.812.830
135	Kab. Deli Serdang	26.651.362.840	0	24.651.362.840	24.651.362.840
136	Provinsi Bengkulu	9.240.071.000	0	9.240.071.000	9.240.071.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	37.011.002.700	0	37.011.002.700	37.011.002.700
138	Kab. Bengkulu Utara	130.592.701.080	0	129.592.701.080	129.592.701.080

DAFTAR LRA-018-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
139	Kab. Pejeng Lebur	57.932.714.183	C	57.932.714.183	57.932.714.183
140	Kota Bengkulu	28.802.942.273	C	28.802.942.273	28.802.942.273
141	Kab. Karim	4.330.430.083	C	4.330.430.080	4.330.430.080
142	Kab. Seluma	71.482.288.800	C	71.482.288.800	71.482.288.800
143	Kab. M. Jatim	52.102.488.773	C	52.102.488.770	52.102.488.770
144	Kab. Ciamis	73.744.842.100	C	73.744.842.100	73.744.842.100
145	Kab. Bangka Tengah	40.575.543.500	C	40.575.543.500	40.575.543.500
146	Kab. Kapuas	71.721.798.883	C	71.721.798.883	71.721.798.883
147	Provinsi Lampung	43.663.000.000	D	43.200.000.000	43.200.000.000
148	Kab. Lampung Barat	119.480.018.983	C	119.480.018.980	119.480.018.980
149	Kab. Lampung Selatan	188.432.093.943	C	188.432.093.940	188.432.093.940
150	Kab. Lampung Tengah	216.592.249.443	C	216.592.249.440	216.592.249.440
151	Kab. Lampung Utara	166.573.073.023	C	166.573.073.020	166.573.073.020
152	Kab. Lampung Timur	182.830.223.783	C	182.830.223.780	182.830.223.780
153	Kab. Tanggamus	130.629.480.203	C	130.629.480.200	130.629.480.200
154	Kab. Tulang Bawang	86.737.644.783	C	86.737.644.780	86.737.644.780
155	Kab. Way Kanan	107.655.088.373	C	107.655.088.370	107.655.088.370
156	Kab. Aceh Barat	128.081.784.363	C	128.081.784.360	128.081.784.360
157	Kab. Pidie Jaya	22.210.158.083	C	22.210.158.080	22.210.158.080
158	Kab. Aceh Jaya	138.349.070.023	C	138.349.070.020	138.349.070.020
159	Kab. Tulang Bawang Barat	86.341.383.003	C	86.341.383.000	86.341.383.000
160	Kota Banda Lampung	212.608.120.783	C	212.608.120.780	212.608.120.780
161	Kota Metro	56.358.173.813	C	56.358.173.810	56.358.173.810
162	Provinsi D.I. Jakarta	1.321.603.061.360	D	1.313.264.447.360	1.313.264.447.360
163	Provinsi Jawa Barat	8.154.072.000	D	8.154.072.000	8.154.072.000
164	Kab. Bandung	445.458.210.443	C	445.458.210.440	445.458.210.440
165	Kab. Bogor	246.279.381.873	C	246.279.381.870	246.279.381.870
166	Kab. Bogor	456.008.510.023	C	456.008.510.020	456.008.510.020
167	Kab. Cicirem	268.380.250.773	C	268.380.250.770	268.380.250.770
168	Kab. Cianjur	316.907.031.543	C	316.907.031.540	316.907.031.540
169	Kab. Cirebon	285.403.307.083	C	285.403.307.080	285.403.307.080
170	Kab. Garut	350.701.374.083	C	350.701.374.080	350.701.374.080
171	Kab. Indramayu	255.923.010.583	C	255.923.010.580	255.923.010.580
172	Kab. Garut	267.615.332.433	C	267.615.332.430	267.615.332.430
173	Kab. Gorontalo	272.802.243.383	C	272.802.243.380	272.802.243.380
174	Kab. Mojokerto	124.273.051.183	C	124.273.051.180	124.273.051.180
175	Kab. Probolinggo	188.611.523.983	C	188.611.523.980	188.611.523.980
176	Kab. Sidoarjo	222.843.117.383	C	222.843.117.380	222.843.117.380
177	Kab. Sukabumi	321.038.491.983	C	321.038.491.980	321.038.491.980
178	Kab. Sumedang	210.389.040.723	C	210.389.040.720	210.389.040.720
179	Kota Tasikmalaya	266.078.513.183	C	266.078.513.180	266.078.513.180
180	Kota Bandung Barat	273.201.613.093	C	273.201.613.090	273.201.613.090
181	Kota Bandung Selatan	380.310.847.383	C	380.310.847.380	380.310.847.380
182	Kota Bekasi	277.188.140.723	C	277.188.140.720	277.188.140.720
183	Kota Bogor	162.137.649.343	C	162.137.649.340	162.137.649.340
184	Kota Cirebon	20.442.792.083	C	20.442.792.080	20.442.792.080
185	Kota Depok	106.948.457.403	C	106.948.457.400	106.948.457.400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
108	Kota Sukabumi	82.633.339.642	C	32.825.339.340	32.825.339.340
107	Kota Cimahi	21.803.011.922	C	93.366.011.922	93.366.011.922
106	Kota Pekanbaru	123.583.128.022	C	100.565.128.022	100.565.128.022
109	Kota Bandar Lampung	62.753.004.622	C	53.753.004.622	53.753.004.622
110	Provinsi Banten	9.456.000.000	D	4.956.000.000	4.956.000.000
111	Kab. Bogor	240.932.242.722	C	241.352.242.722	241.352.242.722
112	Kab. Purwakarta	245.333.090.202	C	245.368.090.202	245.368.090.202
113	Kab. Serang	125.308.000.122	C	108.308.000.122	108.308.000.122
114	Kab. Tanggamus	327.120.655.022	C	289.251.655.000	289.251.655.000
115	Kota Cilegon	31.051.082.132	C	31.136.082.132	31.136.082.132
116	Kota Tangerang	227.604.780.022	C	236.358.432.000	236.358.432.000
117	Kota Serpong	145.705.835.542	C	145.705.835.542	145.705.835.542
118	Kota Tangerang Selatan	145.015.673.722	C	149.145.673.720	149.145.673.720
119	Provinsi Jawa Tengah	32.064.260.000	D	32.064.260.000	32.064.260.000
200	Kab. Semarang	170.717.633.522	C	170.177.633.520	170.177.633.520
201	Kab. Batu Bara	251.603.888.002	C	281.603.888.000	281.603.888.000
202	Kab. Batang	126.741.714.332	C	136.741.714.330	136.741.714.330
203	Kab. Blora	100.789.483.022	C	106.789.483.000	106.789.483.000
204	Kab. Banyumas	170.730.048.222	C	174.722.743.782	174.722.743.782
205	Kab. Brebes	224.407.999.022	C	224.407.999.000	224.407.999.000
206	Kab. Ciamis	225.334.100.242	C	233.384.100.240	233.384.100.240
207	Kab. Cirebon	120.780.107.622	C	181.780.107.620	181.780.107.620
208	Kab. Tulungagung	155.272.337.782	C	193.272.337.780	193.272.337.780
209	Kab. Jember	147.443.324.242	C	157.446.324.240	157.446.324.240
210	Kab. Ngawi	127.055.055.072	C	187.055.055.040	187.055.055.040
211	Kab. Malang	274.423.820.222	C	214.428.820.200	214.428.820.200
212	Kab. Bondowoso	172.230.152.382	C	182.230.152.380	182.230.152.380
213	Kab. Probolinggo	202.150.928.622	C	262.150.928.600	262.150.928.600
214	Kab. Blitar	177.802.563.672	C	111.302.563.600	111.302.563.600
215	Kab. Mojokerto	150.907.579.502	C	156.056.664.430	156.056.664.430
216	Kab. Pasuruan	184.299.039.862	C	100.186.453.335	100.186.453.335
217	Kab. Pamekasan	121.033.608.042	C	126.463.483.940	126.463.483.940
218	Kab. Ponorogo	225.800.003.882	C	235.800.003.880	235.800.003.880
219	Kab. Lumajang	194.424.027.642	C	186.424.027.640	186.424.027.640
220	Kab. Banyuwangi	173.573.408.162	C	173.573.408.160	173.573.408.160
221	Kab. Bondowoso	115.419.194.562	C	112.347.720.300	112.347.720.300
222	Kab. Sidoarjo	104.188.589.072	C	127.381.589.000	127.381.589.000
223	Kab. Brangkal	120.923.073.892	C	180.926.073.600	180.926.073.600
224	Kab. Sukoharjo	156.605.559.232	C	156.605.559.230	156.605.559.230
225	Kab. Trenggalek	272.337.729.692	C	208.326.106.990	208.326.106.990
226	Kab. Lamongan	123.342.105.322	C	122.342.105.320	122.342.105.320
227	Kab. Wonosobo	272.092.777.082	C	212.092.777.080	212.092.777.080
228	Kab. Wates	145.522.177.382	C	143.558.177.060	143.558.177.060
229	Kota Magelang	55.007.101.722	C	50.376.075.720	50.376.075.720
230	Kota Pekalongan	55.040.021.722	C	53.640.021.720	53.640.021.720
231	Kota Salatiga	85.852.950.862	C	83.052.950.800	83.052.950.800
232	Kota Semarang	205.992.018.052	C	207.040.100.100	207.040.100.100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
233	Kota Samarinda	170.724.549.440	C	170.724.549.440	170.724.549.440
234	Kota Sipal	74.752.623.330	C	74.752.623.330	74.752.623.330
235	Provinsi DI Yogyakarta	9.142.321.000	D	9.142.321.000	9.142.321.000
236	Kab. Batu	242.734.580.400	C	242.734.580.400	242.734.580.400
237	Kab. Ciamis: Babel	185.807.330.270	C	185.807.330.240	185.807.330.240
238	Kab. Gunung Pinggan	104.530.030.440	C	104.530.030.440	104.530.030.440
239	Kab. Sleman	226.591.421.330	C	208.551.421.330	208.551.421.330
240	Kota Yogyakarta	125.374.198.490	C	125.374.198.490	125.374.198.490
241	Provinsi Jawa Timur	37.476.102.000	D	37.476.102.000	37.476.102.000
242	Kab. Ngawi	181.810.235.060	C	181.810.235.060	181.810.235.060
243	Kab. Pasuruan	234.807.223.920	C	234.807.223.920	234.807.223.920
244	Kab. Probolinggo	216.928.039.640	C	216.928.039.640	216.928.039.640
245	Kab. Bojonegoro	124.412.089.000	C	107.108.940.000	107.108.940.000
246	Kab. Jember	162.321.183.300	C	143.321.183.300	143.321.183.300
247	Kab. Bondowoso	151.733.182.320	C	151.733.182.320	151.733.182.320
248	Kab. Lamongan	154.447.090.570	C	121.544.541.370	121.544.541.370
249	Kab. Lamongan	126.638.363.870	C	109.888.363.870	109.888.363.870
250	Kab. Jombang	225.877.679.300	C	208.377.679.300	208.377.679.300
251	Kab. Lamongan	241.438.570.320	C	241.438.570.320	241.438.570.320
252	Kab. Madiun	150.208.608.720	C	150.208.608.720	150.208.608.720
253	Kab. Tulungagung	120.950.320.360	C	123.350.320.360	123.350.320.360
254	Kab. Ngawi	168.829.501.290	C	169.326.501.290	169.326.501.290
255	Kab. Ngawi	375.572.115.330	C	315.572.115.330	315.572.115.330
256	Kab. Mojokerto	148.046.310.160	C	149.046.310.160	149.046.310.160
257	Kab. Ngawi	151.103.515.710	C	101.103.515.710	101.103.515.710
258	Kab. Ngawi	127.410.800.520	C	101.580.479.100	101.580.479.100
259	Kab. Probolinggo	149.238.037.180	C	129.238.037.180	129.238.037.180
260	Kab. Pamekasan	145.503.693.560	C	145.503.693.560	145.503.693.560
261	Kab. Pasuruan	221.653.307.020	C	201.653.307.020	201.653.307.020
262	Kab. Probolinggo	104.093.738.020	C	104.093.738.020	104.093.738.020
263	Kab. Probolinggo	172.322.514.130	C	172.322.514.130	172.322.514.130
264	Kab. Sampang	152.897.920.400	C	152.897.920.400	152.897.920.400
265	Kab. Blitar	255.720.623.920	C	253.720.623.920	253.720.623.920
266	Kab. Blitar	126.193.443.560	C	94.368.560.560	94.368.560.560
267	Kab. Sumenep	128.431.830.470	C	128.431.830.470	128.431.830.470
268	Kab. Trenggalek	175.800.007.000	C	173.800.007.000	173.800.007.000
269	Kab. Tuban	162.688.563.330	C	151.688.563.330	151.688.563.330
270	Kab. Tulungagung	128.737.138.930	C	103.737.138.930	103.737.138.930
271	Kota Blitar	51.062.817.060	C	47.062.817.060	47.062.817.060
272	Kota Kendari	36.016.067.470	C	33.016.067.440	33.016.067.440
273	Kota Madura	67.000.323.960	C	56.760.005.160	56.760.005.160
274	Kota Malang	146.927.490.070	C	143.927.490.000	143.927.490.000
275	Kota Majalengka	36.433.874.270	C	36.433.874.270	36.433.874.270
276	Kota Pasuruan	70.111.122.360	C	70.111.122.360	70.111.122.360
277	Kota Pekalongan	36.229.091.340	C	33.229.091.040	33.229.091.040
278	Kota Surabaya	386.951.310.320	C	308.951.310.320	308.951.310.320
279	Kota Batu	47.493.639.450	C	47.493.639.450	47.493.639.450

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
280	Provinsi Kalimantan Barat	78.066.000.000	0	77.800.000.000	77.800.000.000
281	Kab. Sangkayang	18.010.907.770	C	19.110.907.440	36.110.807.440
282	Kab. Landak	53.222.277.900	C	80.222.277.900	80.222.277.900
283	Kab. Kapuas Hulu	64.357.034.380	C	21.357.034.380	80.357.034.380
284	Kab. Selatpanjang	56.117.750.270	C	86.117.750.240	86.117.750.240
285	Kota Pontianak	77.201.093.290	C	77.201.093.290	77.201.093.290
286	Kab. Banjar	125.773.490.600	C	103.773.490.300	103.773.490.600
287	Kab. Sampit	10.403.004.400	C	67.403.004.400	77.403.004.400
288	Kab. Situbondo	9.304.753.130	C	76.304.753.130	76.304.753.130
289	Kota Pontianak	128.565.070.230	C	123.565.070.230	123.565.070.230
290	Kota Sungai Penuh	77.210.113.940	C	77.210.113.940	77.210.113.940
291	Kab. Sei. Kepanjen	21.450.984.620	C	21.450.984.620	21.450.984.620
292	Kab. Guru Patai	23.574.105.300	C	80.574.105.300	80.574.105.300
293	Kab. Sei. Siau	44.228.199.400	C	44.228.199.400	44.228.199.400
294	Kab. Melawi	38.359.841.320	C	33.356.841.320	33.356.841.320
295	Provinsi Kalimantan Tengah	7.083.571.000	0	7.083.571.000	7.083.571.000
296	Kab. Barito Selatan	11.277.301.330	C	72.108.672.100	83.385.973.430
297	Kab. Barito Timur	54.541.008.300	C	43.063.008.800	48.003.008.800
298	Kab. Kapuas	111.331.719.130	C	111.331.719.130	111.331.719.130
299	Kab. Kotawaringin Barat	34.947.004.180	C	34.947.004.180	34.947.004.180
300	Kab. Kotawaringin Timur	57.103.295.400	C	57.103.295.400	57.103.295.400
301	Kota Palangkaraya	58.100.450.430	C	58.100.450.430	58.100.450.430
302	Kab. Teritorial Timur	45.943.901.130	C	49.345.901.130	49.345.901.130
303	Kab. Muara Enim	22.100.801.400	C	22.100.801.400	22.100.801.400
304	Kab. Hulu Sungai Besar	68.301.883.270	C	53.301.883.240	60.301.883.240
305	Kab. Durian Mas	57.138.134.300	C	57.138.134.300	57.138.134.300
306	Kab. Jambi	42.284.305.300	C	72.284.305.300	42.284.305.300
307	Kab. Sumatra Barat	13.304.600.440	C	13.307.102.200	13.307.102.200
308	Kab. Aceh Tamiang	21.301.700.960	C	31.301.700.960	31.301.700.960
309	Kab. Serdang Bedagai	22.110.881.000	C	22.110.881.000	22.110.881.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	88.678.038.000	0	88.678.038.000	88.678.038.000
311	Kab. Barito	80.797.279.440	C	80.797.279.440	80.797.279.440
312	Kab. Teritorial Barat	54.800.233.730	C	94.800.233.730	94.800.233.730
313	Kab. Muara Sungai Sebatik	48.334.401.230	C	49.334.401.200	49.334.401.200
314	Kab. Muara Sungai Tengah	50.803.912.130	C	81.803.912.130	81.803.912.130
315	Kab. Muara Sungai Utara	51.301.401.000	C	51.301.401.000	51.301.401.000
316	Kab. Kongor	54.737.101.120	C	54.737.101.120	54.737.101.120
317	Kab. Tualang	80.288.708.200	C	80.288.708.200	80.288.708.200
318	Kab. Tanah Liat	60.788.025.730	C	53.788.025.480	53.788.025.480
319	Kab. Tapin	42.488.008.500	C	42.488.008.500	42.488.008.500
320	Kota Samarinda	78.237.414.120	C	78.237.414.120	78.237.414.120
321	Kota Samarinda	116.939.813.590	C	113.939.813.390	118.939.813.590
322	Kab. Samarinda	22.231.002.130	C	22.231.002.130	22.231.002.130
323	Kab. Tanah Bumbu	45.517.000.000	C	45.517.000.000	45.517.000.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	3.449.322.000	0	3.102.512.000	3.102.512.000
325	Kab. Berau	34.871.532.100	C	34.871.532.100	34.871.532.100
326	Kab. Kutai Kartanegara	27.703.013.660	C	27.703.013.660	27.703.013.660

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
227	Kab. Kotai Kartanegara	126.413.441.000	C	104.256.532.800	104.256.532.800
228	Kab. Kotai Barat	24.253.133.120	C	37.262.133.120	37.262.133.120
229	Kab. Kotai Timur	40.080.687.000	C	70.080.687.000	70.080.687.000
230	Kab. Melinau	58.034.443.720	C	59.426.878.720	59.426.878.720
231	Kab. Nunukan	22.043.307.140	C	32.213.307.140	32.213.307.140
232	Kab. Paser	75.594.291.020	C	74.536.157.820	74.536.157.820
233	Kota Deli Serdang	86.147.031.280	C	88.147.031.280	88.147.031.280
234	Kota Pontianak	33.243.879.920	C	33.243.879.920	33.243.879.920
235	Kab. Tanah Tidung	14.902.709.000	C	9.421.593.000	9.421.593.000
236	Kota Samarinda	173.000.350.000	C	113.499.350.000	113.499.350.000
237	Kota Tarakan	52.244.331.200	C	52.244.331.200	52.244.331.200
238	Kab. Penajam Paser Utara	22.950.321.020	C	33.950.321.020	33.950.321.020
339	Provinsi Sulawesi Utara	100.084.249.000	D	100.084.749.000	100.084.749.000
240	Kab. Boalemo Donggala	34.621.718.400	C	84.621.718.400	84.621.718.400
241	Kab. Minahasa	11.624.052.300	C	111.624.052.300	111.624.052.300
242	Kab. Sampit	25.981.482.040	C	75.981.482.040	75.981.482.040
243	Kota Bitung	51.813.019.960	C	51.813.019.960	51.813.019.960
244	Kota Manado	140.792.512.040	C	140.792.512.040	140.792.512.040
245	Kab. Republik Tana Toraja	41.439.031.130	C	41.439.031.130	41.439.031.130
246	Kab. Minahasa Selatan	102.401.500.500	C	102.401.500.500	102.401.500.500
247	Kab. Minahasa Tenggara	70.033.783.130	C	70.033.783.130	70.033.783.130
248	Kab. Republik Sa. Iugan dan Sigi	56.174.263.400	C	56.174.263.400	56.174.263.400
249	Kota Kotamobagu	111.837.241.040	C	111.837.241.040	111.837.241.040
250	Kab. Jasinga Mongondow Selatan	55.354.245.340	C	55.354.245.340	55.354.245.340
251	Kab. Boalemo Donggala Selatan	55.511.087.760	C	55.511.087.760	55.511.087.760
252	Kota Tomohon	57.307.543.740	C	57.307.543.740	57.307.543.740
253	Kab. Minahasa Utara	71.259.310.000	C	82.259.310.000	82.259.310.000
254	Kab. Enrekang Menggala Jawa	58.508.645.000	C	58.508.645.000	58.508.645.000
255	Provinsi Gorontalo	18.073.250.000	D	18.000.000.000	18.000.000.000
256	Kab. East Belitung	47.000.700.160	C	47.000.700.160	47.000.700.160
257	Kab. Berau	145.701.537.860	C	143.701.537.860	143.701.537.860
258	Kota Gorontalo	133.720.788.160	C	133.720.788.160	133.720.788.160
259	Kab. Tolukko	87.423.915.570	C	87.423.915.570	87.423.915.570
260	Kab. Bone	122.035.471.920	C	102.035.471.920	102.035.471.920
261	Kab. Enrekang	11.249.000.440	C	101.249.000.440	101.249.000.440
262	Provinsi Sulawesi Tengah	22.641.260.000	D	22.641.260.000	22.641.260.000
263	Kab. Maros	120.251.080.370	C	116.351.080.370	116.351.080.370
264	Kab. Bonepile Keulevan	29.930.498.090	C	32.317.002.800	32.317.002.800
265	Kab. Buton	29.856.829.370	C	89.368.829.370	89.368.829.370
266	Kab. Toli Toli	50.434.938.200	C	80.434.938.200	80.434.938.200
267	Kab. Donggala	119.384.840.240	C	119.384.840.240	119.384.840.240
268	Kab. Morowali	71.793.939.920	C	71.793.939.920	71.793.939.920
269	Kab. Poso	126.973.070.380	C	126.376.070.380	126.376.070.380
270	Kota Pal.	57.978.088.680	C	57.978.088.680	57.978.088.680
271	Kab. Parigi Moutong	79.739.004.000	C	79.739.004.000	79.739.004.000
272	Kab. Sigi	87.027.680.500	C	87.027.680.500	87.027.680.500
273	Kab. Tana Ioba	54.447.721.400	C	54.447.721.400	54.447.721.400

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
374	Provinsi Sulawesi Selatan	44.081.760.000	0	44.081.760.000	44.081.760.000
275	Kab. Enrekang	28.518.402.320	C	93.578.402.320	122.096.702.320
376	Kab. Barru	127.908.714.300	C	127.908.714.300	127.908.714.300
277	Kab. Bone	274.834.443.340	C	274.834.443.340	274.834.443.340
378	Kab. Buton	145.167.320.000	C	145.167.320.000	145.167.320.000
379	Kab. Enamkang	124.994.694.320	C	124.994.694.320	124.994.694.320
380	Kab. Donggala	133.529.000.240	C	133.529.000.240	133.529.000.240
381	Kab. Gorontalo	120.287.749.420	C	120.287.749.420	120.287.749.420
382	Kab. Jepara	142.001.550.520	C	142.001.550.520	142.001.550.520
383	Kab. Jombang	170.507.076.380	C	170.507.076.380	170.507.076.380
384	Kab. Merang	125.445.205.000	C	125.445.205.000	125.445.205.000
285	Kab. Pemalang	149.697.198.680	C	149.697.198.680	149.697.198.680
386	Kab. Ponorogo	110.431.680.520	C	110.431.680.520	110.431.680.520
287	Kab. Selangor	67.977.644.400	C	67.977.644.400	67.977.644.400
388	Kab. Sidoarjo	158.789.730.120	C	126.766.730.120	126.753.730.120
389	Kab. Situbondo	118.397.008.120	C	118.397.008.120	118.397.008.120
390	Kab. Soppeng	172.511.671.030	C	102.911.671.030	102.911.671.030
391	Kab. Tana Toraja	130.541.500.240	C	130.541.500.240	130.541.500.240
392	Kab. Tanjung	112.233.074.640	C	112.233.074.640	112.233.074.640
393	Kab. Wajo	155.807.241.560	C	155.807.241.560	155.807.241.560
394	Kota Parepare	20.759.907.600	C	20.759.907.600	20.759.907.600
395	Kab. Toraja Utara	76.500.197.120	C	76.500.197.120	76.500.197.120
396	Kota Makassar	229.327.499.000	C	229.327.499.000	229.327.499.000
397	Kota Palopo	26.634.121.860	C	26.634.121.860	26.634.121.860
398	Kab. Luwu Timur	68.083.688.330	C	68.083.688.330	68.083.688.330
399	Provinsi Sulawesi Barat	82.093.260.000	0	81.800.000.000	81.800.000.000
400	Kab. Minahasa	76.389.259.770	C	76.389.259.770	76.389.259.770
401	Kab. Maros	117.149.781.180	C	117.149.781.180	117.149.781.180
402	Kab. Pidie Jaya	126.630.100.270	C	126.630.100.270	126.630.100.270
403	Kab. Morowali	50.872.483.880	C	50.872.483.880	50.872.483.880
404	Kab. Menado Utara	74.415.634.000	C	74.415.634.000	74.415.634.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	39.095.321.000	0	39.003.035.000	39.003.035.000
406	Kab. Tololelo	146.900.1320.360	C	146.900.1320.360	146.900.1320.360
407	Kab. Tomohon	72.040.605.560	C	72.040.605.560	72.040.605.560
408	Kab. Wajo	74.326.919.860	C	74.326.919.860	74.326.919.860
409	Kab. Muara	146.330.440.000	C	146.330.440.000	146.330.440.000
410	Kota Kendari	128.218.684.760	C	128.218.684.760	128.218.684.760
411	Kota Ombilu	25.714.502.060	C	25.714.502.060	25.714.502.060
412	Kab. Gorontalo Selatan	124.130.000.960	C	107.768.000.960	107.768.000.960
413	Kab. Enrekang	53.347.247.300	C	53.347.247.300	53.347.247.300
414	Kab. Gorontalo Utara	21.634.129.160	C	21.634.129.160	21.634.129.160
415	Kab. Buton Jaya	53.134.809.520	C	46.930.139.520	46.930.139.520
416	Kab. Wakatobi	23.634.747.370	C	23.634.747.370	23.634.747.370
417	Kab. Kotawaringin	46.033.620.270	C	49.052.620.240	49.052.620.240
418	Provinsi Bali	5.229.821.000	0	5.229.821.000	5.229.821.000
419	Kab. Batang	24.540.772.760	C	94.540.772.760	94.540.772.760
420	Kab. Bangli	51.782.184.200	C	91.782.184.200	91.782.184.200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
421	Kab. Buleleng	170.700.113.383	C	170.700.113.383	170.700.113.383
422	Kab. Bener Meriah	119.350.137.232	C	119.350.137.232	119.350.137.232
423	Kab. Cimbran	03.200.693.763	C	03.200.693.763	03.200.693.763
424	Kab. Aceh Singkil	126.201.281.383	C	126.201.281.383	126.201.281.383
425	Kab. Blangkal	54.903.455.673	C	54.903.455.673	54.903.455.673
426	Kab. Tahaman	127.082.202.023	C	127.082.202.023	127.082.202.023
427	Kota Denpasar	141.271.883.143	C	141.271.883.143	141.271.883.143
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	87.300.000.000	D	87.300.000.000	87.300.000.000
429	Kab. Simeulue	170.271.651.183	C	170.271.651.183	170.271.651.183
430	Kab. Lampung	103.133.368.773	C	103.133.368.773	103.133.368.773
431	Kab. Ambon: Ostal	144.801.080.643	C	144.801.080.643	144.801.080.643
432	Kab. Ambon: tengah	127.510.480.923	C	127.510.480.923	127.510.480.923
433	Kab. Ambon: Timur	210.708.021.063	C	210.708.021.063	210.708.021.063
434	Kab. Sumbawa	126.339.108.683	C	126.339.108.683	126.339.108.683
435	Kota Mataram	127.550.097.303	C	127.550.097.303	127.550.097.303
436	Kab. Lhokseumawe	46.992.800.383	C	46.992.800.383	46.992.800.383
437	Kota Bima	51.748.740.733	C	51.748.740.733	51.748.740.733
438	Kab. Sumbawa Barat	34.008.281.503	C	34.008.281.503	34.008.281.503
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	42.300.000.000	D	42.300.000.000	42.300.000.000
440	Kab. Ende	56.500.490.163	C	56.500.490.163	56.500.490.163
441	Kab. Ende	127.784.702.133	C	127.784.702.133	127.784.702.133
442	Kab. Ende	28.797.201.923	C	28.797.201.923	28.797.201.923
443	Kota Flores Timur	71.534.674.873	C	71.534.674.873	71.534.674.873
444	Kab. Kupang	44.953.841.923	C	44.953.841.923	44.953.841.923
445	Kab. Larantuka	44.156.828.733	C	44.156.828.733	44.156.828.733
446	Kab. Manggarai	75.080.003.243	C	75.080.003.243	75.080.003.243
447	Kab. Ngada	26.210.853.123	C	26.210.853.123	26.210.853.123
448	Kab. Sumba	50.907.607.083	C	50.907.607.083	50.907.607.083
449	Kab. Sumba Barat	24.384.491.033	C	24.384.491.033	24.384.491.033
450	Kab. Sumba Timur	55.773.772.003	C	55.773.772.003	55.773.772.003
451	Kab. Timor Tengah Selatan	26.604.490.643	C	26.604.490.643	26.604.490.643
452	Kab. Timor Tengah Utara	56.978.189.063	C	56.978.189.063	56.978.189.063
453	Kota Kupang	54.401.070.743	C	54.401.070.743	54.401.070.743
454	Kab. Ende	26.235.623.933	C	26.235.623.933	26.235.623.933
455	Kab. Manggarai Barat	40.374.434.303	C	40.374.434.303	40.374.434.303
456	Kab. Sumba Tengah	86.024.920.043	C	86.024.920.043	86.024.920.043
457	Kab. Sumba Barat Daya	26.629.803.333	C	26.629.803.333	26.629.803.333
458	Kab. Manggarai Timur	22.933.744.123	C	22.933.744.123	22.933.744.123
459	Kab. Sabu Raijua	21.129.250.073	C	21.129.250.073	21.129.250.073
460	Kab. Manggarai Barat	22.784.434.303	C	22.784.434.303	22.784.434.303
461	Provinsi Maluku	87.032.250.000	D	86.850.000.000	86.850.000.000
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	52.091.039.123	C	52.091.039.123	52.091.039.123
463	Kab. Maluku Tengah	122.890.941.873	C	122.890.941.873	122.890.941.873
464	Kab. Maluku Tenggara	70.978.621.733	C	70.978.621.733	70.978.621.733
465	Kab. Maluku Barat	24.030.672.123	C	24.030.672.123	24.030.672.123
466	Kota Ambon	125.830.039.383	C	125.830.039.383	125.830.039.383
467	Kab. Sors - Rega Barat	51.227.127.943	C	51.227.127.943	51.227.127.943

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

TAHUN ANGGARAN 2011

(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
468	Kab. Berau - Daya Timur	50,830,405,330	C	50,830,405,330	50,830,405,330
469	Kab. Melulu Barat Daya	32,332,634,960	C	32,227,634,960	32,227,634,960
470	Kab. Euro Selatan	30,304,278,720	C	30,304,278,720	30,304,278,720
471	Kab. Republik Amu	66,870,000,120	C	67,344,300,120	67,344,300,120
472	Kota T. a	37,162,651,200	C	37,162,651,200	37,162,651,200
473	Provinsi Maluku Utara	48,411,571,000	D	48,152,571,000	48,152,571,000
474	Kab. Samarinda Tengali	56,953,440,330	C	56,355,440,330	56,355,440,330
475	Kab. Samarinda Barat	46,421,292,000	C	46,421,292,000	46,421,292,000
476	Kota Samarinda	65,413,613,990	C	65,418,613,990	65,418,613,990
477	Kab. Samarinda Timur	62,618,724,280	C	62,618,724,280	62,618,724,280
478	Kota Tambang Sekuler	64,541,155,830	C	64,541,155,830	64,541,155,830
479	Kab. Republik S.ile	68,000,779,760	C	68,000,779,760	68,000,779,760
480	Kab. P. la. Warta	27,003,602,000	C	27,125,602,000	27,125,602,000
481	Kab. Samarinda Selatan	76,484,617,240	C	76,484,617,240	76,484,617,240
482	Kab. Samarinda Utara	37,147,150,280	C	37,147,150,280	37,147,150,280
483	Kab. Yolno	36,125,800,510	C	36,125,800,510	36,125,800,510
484	Kab. Lam. Lays	63,723,027,000	C	63,723,027,000	63,723,027,000
485	Provinsi Papua	3,971,248,797,560	3,957,459,547,550	12,500,000,000	3,970,959,547,550
486	Kab. Bi. R. Jur	38,523,561,440	C	38,523,561,440	38,523,561,440
487	Kab. Jayapura	87,187,479,400	C	87,187,479,400	87,187,479,400
488	Kab. Jayawijaya	76,001,627,330	C	76,001,627,330	76,001,627,330
489	Kab. Merakata	42,634,595,960	C	43,024,595,960	43,024,595,960
490	Kab. Mimika	25,900,071,440	C	25,715,571,440	25,715,571,440
491	Kab. Nabire	74,553,642,080	C	74,556,642,080	74,556,642,080
492	Kab. Pensi	50,887,130,920	C	53,387,130,920	53,387,130,920
493	Kab. Puncak Jaya	56,010,623,040	C	56,310,623,040	56,310,623,040
494	Kab. Republik Yapen	66,173,882,240	C	66,176,882,240	66,176,882,240
495	Kota Jayapura	50,541,748,040	C	50,541,748,040	50,541,748,040
496	Kab. Serm	26,259,168,920	C	26,266,168,920	26,266,168,920
497	Kab. Keerom	52,750,171,020	C	52,750,171,020	52,750,171,020
498	Kab. Yohukim	24,552,327,000	C	24,552,327,000	24,552,327,000
499	Kab. Pegunungan Bintang	34,172,907,000	C	34,172,907,000	34,172,907,000
500	Kab. Tolikara	31,254,457,000	C	31,254,457,000	31,254,457,000
501	Kab. Jaye - Jipe	36,611,153,290	C	36,611,153,290	36,611,153,290
502	Kab. Wop	55,047,070,340	C	55,047,070,340	55,047,070,340
503	Kab. Samat	8,580,677,050	C	8,580,677,050	8,580,677,050
504	Kab. Woro	54,259,455,320	C	54,259,455,320	54,259,455,320
505	Kab. Menoreh Tova	15,840,974,000	C	12,172,674,000	12,172,674,000
506	Kab. Mamberamo Tengah	12,243,811,000	C	12,130,811,000	12,130,811,000
507	Kab. Wina	54,310,439,000	C	54,367,942,000	54,367,942,000
508	Kab. Jayawa	27,732,420,920	C	27,722,420,920	27,722,420,920
509	Kab. Bar. Jawa	41,100,749,000	C	40,493,989,000	40,493,989,000
510	Kab. Purwak	14,329,565,000	C	14,463,065,000	14,463,065,000
511	Kab. Daya	17,513,890,000	C	17,515,890,000	17,515,890,000
512	Kab. Supiori	58,580,043,000	C	58,583,043,000	58,583,043,000
513	Provinsi Papua Barat	2,074,868,826,102	1,963,198,848,960	108,867,877,162	2,066,864,828,102
514	Kab. Sorong	30,493,102,990	C	30,495,102,990	30,495,102,990

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN

DAFTAR LRA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Dalam Rupiah)

No.	Bantuan	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
315	Kab. Manokwari	36.231.360.800	0	63.221.350.800	63.221.350.800
318	Kab. Labi Labi	25.204.800.000	0	25.204.800.000	25.204.800.000
317	Kota Sorong	48.240.095.640	0	43.348.095.640	43.348.095.640
315	Kab. Sorong Seletar	17.351.127.440	0	17.351.127.440	17.351.127.440
315	Kab. Raja Ampat	12.311.103.380	0	12.311.103.380	12.311.103.380
327	Kab. Teluk Bintuni	52.329.904.190	0	52.329.904.190	52.329.904.190
321	Kab. Teluk Wondama	40.541.132.000	0	40.541.132.000	40.541.132.000
322	Kab. Tambrauw	31.282.735.000	0	81.282.735.000	81.282.735.000
323	Kab. Jayawijaya	14.107.420.000	0	14.107.420.000	14.107.420.000
324	Kab. Kaimana	19.037.074.000	0	19.037.074.000	19.037.074.000
325	Lembar Cedungan	0	0	-	0
JUMLAH		81.185.578.868.802	10.421.312.983.000	53.857.287.884.474	81.078.550.877.474

DAFTAR LRA-025-

RINCIAN SUSPEN BELANJA BERDASARIKAN KEMENTERIAN MEGARULEMBAGA DAN JENIS BELANJA YANG DILAKUKAN

ա՛ՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

PRINCIPAL SUSPEN BELNJA BENDA SARACAN KEMENTERIAN MEGARALEMBAGA DAN JENIS BELANJA LAZATI

GIFTED 373

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
1	510.000267030	REKENING KHUSUS DEPKEL (RUPIN) JATI / MOLETSMS KOK PROJECT TYPE GRANT A 2010	0	0
2	510.000275980	REKENING KHUSUS DEPKEL (RUPIN) JATI / MOLETSMS KOK PROJECT TYPE GRANT A 2010	77.301.797.70	120.706.433.71
3	510.000275930	VDN PROJECT GRANT A 1 TAHUN 2002	100.375.085.337	100.375.085.337
4	510.000276960	VDN PROJECT GRANT A 1 TAHUN 2002	77.218.454.364	77.218.454.364
5	510.000121960	REKENING PEMERINTAHAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN (PDP) SECOND KENNEDY ROUND CSR	54.520.044.564	42.342.00.357
6	501.0010111930	REKES DEPKEL UPTON CONST. DE JUNIOR SECONDARY SCHOOL FOR THE NEEDS OF THE BASIC EDUCATION PROGRAM, LAM AIKE LDC	22.854.200.548	22.854.200.548
7	501.0023111930	REKES DEPKEL UPTON EASTERN INDONESIA NATIONAL RURAL IMPROVEMENT PROJECT (ENRIP) A PRO LO02	147.848.024.331	222.463.038.480
8	501.0411111930	REKES DEPKEL UPTON CAIRE MADYA UNIVERSITY DEV. IF-494 CCT	302.300.305	205.402.120
9	501.0451111930	REKES DEPKEL UPTON PENGENAL. PRAS. PEDESAAN (PPD) RURAL AREAS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJ. EST. 1-P-506 JBC D'MAI LPY	3.629.377.040	3.782.849.214
10	501.0481111930	REKES DEPKEL UP PROFESSINA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT (H) UNIVERSAS PROGRAM, PROJECT LAM JBC SDA	21.828.251.189	6.648.515.322
11	501.0491111930	REKES DEPKEL UPTO PROJECT LAM FUNAN PENGHUSU DEVELOPMENT PROJECT DOMESTIC PROGRAM, PROJ. EST. 049 JUIC 1995 B	4893.342.683	28.964.567.630
12	501.0501111930	REKES DEPKEL UPTO DEVELOPMENT OF COLLEGE MEDICAL AND LAB FACILITIES OF SYARIF HIDAYAH UNIVERSITY JAKARTA	923.000.003	3.650.845.303
13	501.0501111930	REKES DEPKEL UPTO FENGEMBANGAN FAULTURE TEKNIK UNIVERSITAS ASY'ARIN DAULATI SEJATI MUSLIMITA JPY	129.139.225	5.542.39.390
14	501.0551111930	REKES DEPKEL UPTO REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT, LAM JBC IF-523 A DALAM WILITA JPY	287.878.402.603	287.374.217.157
15	501.0551111930	REKES DEPKEL UPTO REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT, LAM JBC IF-523 B DALAM WILITA JPY	0	0
16	501.0581111930	REKES DEPKEL UPTO UPTO PROJECT IKL SI HPUJ	0	8.000.003.705
17	501.2034111930	REKES DEPKEL UPTO FEMBIN SECOND WATER & SANITATION FOR OWN IN CENE COMMUNITIES PROJECT	0	1.491.803.300
18	501.2034111930	REKES DEPKEL UPTO ECONOMIC & EMPOWERMENT DI SURAL DEVELOPMENT PROJECT ADDRA. 755-IND	15.058	155.024
19	501.2081111930	REKES DEPKEL UPTO CITATORY INTEGRATED DEV. IN PAINTER TAPAS 2001. MINYA 550-10 PAN	00.098	32.617
20	501.2091111930	REKES DEPKEL UPTO DECENTRALIZED HEALTH SERVICES	70.003	69.411
21	501.2104111930	REKES DEPKEL UPTO TECHNICAL AND PROFESSIONAL SKILL DEVELOPMENT	30.369	37.123
22	501.2144111930	REKES DEPKEL UPTO MARSH & COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT	15.753.992	15.316.300

DAFTAR NERACA 325

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
23	301.210***1930	PERKELAS DEPKEU U/ SECOND KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT IDN NO. 4327.IND/KA CR. NO. 3505 IND/CR/5/329	3'0852.400	308212.326
24	301.221***1930	PERKELAS DEPKEU U/ DECENTRALIZED BASIC EDUCATION PROJECT	388.301	382.686
25	301.224***1930	PERKELAS DEPKEU U/ SECOND URBAN POVERTY PROJECT LOAN IDRD NO. 4384 IND/CR/47 NO. 041 PM.041 & LIST	3.613.480.285	20.539.345.372
26	301.229***1930	PERKELAS DEPKEU U/ POOR FARMERS INCOME IMPROVEMENT & FOOD INNOVATION PROJ. PRC. (PPI3P)	54.073.303	54.577.382
27	301.230***1930	PERKELAS DEPKEU U/ CORAL REEF REHAB. ITAT CR AND MANAGEMENT PROJECT PHASE II (CARB-ITAT PHASE II)	3.382.957.716	314.775
28	301.232***1930	PERKELAS DEPKEU U/ GOVERNMENT FINANCE MANAGEMENT / REVENUE ADMINISTRATION PROJECT 4702 NO	85.411.787.04	141.917.15.293
29	301.233***1930	PERKELAS DEPKEU U/ HEALTH WORKFORCE AND SERVICE PROJECT LOAN IDRD NO. 4327.3834 IND/CR. 37041.0	49.075.301	484.239.345
30	301.239***1930	PERKELAS DEPKEU U/ LAND MANAGEMENT AND POL CY DEVELOPMENT PROJECT LOAN/CREDT NC. 4331.3834 ND.DUR/NC.LUSD	0	1'3238.578
31	301.239***1930	PERKELAS DEPKEU U/ SECOND EAST TANAH INFRASTRUCTURE PROJECT (EIP 4.2)	4.294.555.745	88.351.850.495
32	301.240***1930	PERKELAS DEPKEU U/ THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT	728.476.760	724.797.393
33	301.241***1930	PERKELAS DEPKLU U/ THE IMPLEMENTATION OF LAND & TENURE SYSTEM AT 4 IN. LUPIL PROJECT NO. IND.CUSU	13.712.937.984	13.910.544.958
34	301.242***1930	PERKELAS DEPKEU U/ CORAL REEF REHAB. ITAT CR & MANAGEMENT PHASE II (CARB-ITAT PHASE II)	58.395	40.034.003.5
35	301.243***1930	PERKELAS DEPKEU U/ SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT	1.287.283	422.862
36	301.244***1930	PERKELAS DEPKEU U/ SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT	206.332	79.650
37	301.245***1930	PERKELAS DEPKLU U/ STA. LAUDI KEL. DINA SLOTRU JUMLAH PMDN PROJ	0	362.186
38	301.246***1930	PERKELAS DEPKEU U/ SUPPORT FOR POOR & DISADVANTAGED AREAS PROJECT	29.140.187.350	41.245.340.700
39	301.247***1930	PERKELAS DEPKEU U/ INDONESIA MINISTER HIGH EDUCATION RELEVANCE & EFFICIENCY PROJ. IDRD NO. 4739. IND/NO. 4037-N	41.002.181.528	165.326.149.644
40	301.248***1930	PERKELAS DEPKEU U/ CARB-COD OPERATING 3.8-SECTOR PROJECT (NC.38M)	0	0
41	301.251***1930	PERKELAS DEPKEU U/ THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE	4.676.432	4.633.038
42	301.252***1930	PERKELAS DEPKEU U/ THIRD URBAN POVERTY PROJECT LOAN IDRD NO. 4773 IND/CR. 4085	0.750.509.302	13.212.278.917
43	301.253***1930	PERKELAS DEPKEU U/ LOCAL GOVERNMENT FINANCE AND GOVERNANCE REFORM SEC. DPP. FREGBUA (REFRIBUA) DAY 408 NO. 2193.IND	0	0
44	301.255***1930	PERKELAS DEPKEU U/ INITIATIVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECT (JUGRIP)	5.104.393	632.528

DAFTAR NERACA 328

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Rekening	Nama Rekening	31 December 2010	31 December 2011
45	501.255/11030	PEKELAS DEPKU U WATER RESOURCES AND IRIGATION SECTOR MNGMT FR-WASH	68.806.413	13.700.403.523
46	501.257/11930	PEKELAS DEPKU U COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH PROJECT	12.751	338.770
47	501.238/11930	PEKELAS DEPKU U COMMUNITY WATER SERVICES & HEALTH PROJECT LAMPUNG 21R4 NO 1571	1.632	107.382
48	501.239/11930	PEKELAS DEPKU U WATER SECTOR CIVIL DEVELOPMENT REFORM PROJECT 1783-N2	125.708.744	66.308.177.524
49	501.260/11930	PEKELAS DEPKU U FAIR COUNTRY IRRIGATION SECTOR IP SP	454	20.143
50	501.251/11930	PEKELAS DEPKU U FAIR COUNTRY IRRIGATION SECTOR IP SP	1.782	1.883
51	501.254/11930	PEKELAS DEPKU U EARLY CHILDHOOD EDUC & LEV PROJECT ECDI 4216	10.047.911.930	53.621.838.517
52	501.258/11930	PEKELAS DEPKU U PROYECT READ. LOAN IDN 615-IP	967.133	15.281.742.707
53	501.250/11930	PEKELAS DEPKU U SUSTAINABLE AGRICULTURE DEV FOR FOOD SECURITY AND POVERTY REDUCTION PROJECT	1.639.767	3.533.443
54	501.240/11930	PEKELAS DEPKU U MADRASAH EDUC & DEVELOPMENT PROJECT	126.407	12.860.141
55	501.271/11930	PEKELAS DEPKU U F. FARMER EMPOWER THROUGH AGRICULT, TAI, IT&C & INFORMATION PROJECT	55.840.590.272	27.777.300.392
56	501.274/11930	PEKELAS DEPKU U LOAN STRATEGIC 1043 VSTRUCTURE PROJECT (SRP)	362.327	360.778.112
57	501.278/11930	PEKELAS DEPKU U BETTER PROJECT CR THROUGH REFERENCI MANAGEMENT AND UNIVERSAL TEACHER UPGRADING PROJECT (BERMITU)	9.705.327.783	25.038.822.642
58	501.240/11930	PEKELAS DEPKU U N. H. CN IMPROVEMENT THROUG COMMUNITY EMPOWERMENT PROJECT (NCI)	3.339.335	223.105.321
59	501.260/11930	PEKELAS DEPKU U THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT TMMSV 03 (204)	92.372	116.774.324.362
60	501.262/11930	PEKELAS DEPKU U NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY IMPROVEMENT IN RURAL AREAS PROJECT	41.310.865.197	245.721.415.207
61	501.283/11930	PEKELAS DEPKU U LOAN IDN NO. 7304-104001 TTD 10.4204 IN NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY IMPROVEMENT DUREAN MARES PROJECT 1.769.10	7.735.081	177.310.408.375
62	501.264/11930	PEKELAS DEPKU U VOCAL SKALE EDUCATION STRENGTHENING PROJECT (VSEF)	66.451.080	1.866.285
63	501.265/11930	PEKELAS DEPKU U LOCAL INITIATIVES SUPPORT PM MAMUJU	0	13.240.112.04
64	501.266/11930	PEKELAS DEPKU U NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY IMPROVEMENT IN R. TAI ARTAS PROJECT NO 1 NC 735 ID	10.061.949.547	1.304.567.395
65	501.287/11930	PEKELAS DEPKU U INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT LOAN NO. ND-12' (1ST)/132 LN 01 JV W. IRI	42.111.830.843	68.471.025.254
66	501.288/11930	PEKELAS DEPKU U INTEGRATED CTR IN WATER RESOURCES MGT INVESTM PROGRAM PROJECT (WATERMPL) LOAN NO. 2001-NU (S)	10.455.771.617	2.385.021.681

DAFTAR NERACA 327

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
67	501.280/11030	REKSIS DEPKU LCN IBRD 7688 ID COMM OPERAS CRNL MPPROVEMENT AND SAFETY PROJECT DISPLI	21.227.531.953	3.708.306
68	501.280/11980	REKSL DEPKU UNTUK QUALITY PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY PROJECT LCN 7.371 IND	2.725.721	351.439
69	501.281/11980	REKSIS DEPKU UNTUK RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO THE PNPM V AND VI PROJECT (PNPM V DAN VI) DAN ADE NO. 2625 NC	50.018.330	11.508.300
70	501.282/11980	REKSL DEPKU UNTUK URBAN WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT IBRD LOAN NO. 7730 ID	726.843.653	13.408.500.000
71	501.283/11980	REKSL DEPKU UNTUK DEVELOPMENT OF RANAU 13 INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT) IJAN JICA NO. IP.ERS D.M. 2411.LT.P.JY	1.581.342.478	4.211.408.000
72	501.284/11980	REKSL DEPKU UNTK INFRASTRUCTURE RE-DRY SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (RSDP)LCN ADE NO. 2264-INDSP	0	0
73	501.285/11980	REKSL DEPKU UNTK THIRTEEN NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPPOWERMENT IN RURAL AREA (PNPM MURNI) NDI LOAN BRI 786710	65.022.539.003	5.900.712
74	501.285/11030	REKSL KEMENTRIAN KELAUTAN UTK PROJECT FOR INDONESIA TAX ADMINISTRAT CR. REFORM LOAN ICR 10.7501-ID	0	0
75	501.287/11980	REKSL KEMENTRI LNT FOR COMM TAPWON IN UPTAHARAS JUWITA 38611	8.843.851.244	0
76	501.288/11030	REKSL KEMENDEU UTK SCHOLARSHIPS PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUT CNS PROJECT IBRD 8011-C C	98.215.224.734	0
77	501.289/11980	REKSL KEMENRDU LATUZ PROJEK SOLID WASH AD NO. L7-839 D JALAM KALLIAU, SPC	1.659.771	0
78	501.300/11980	REKSL KEMENDEU LATUZ PROJEK INTEGRATED COMMUNITY CRIMEN DEVELOPMENT PROJECT (ICD) PHASE II LOAN IDB DPM WU JITA USD	264.741.864.748	0
79	501.301/11980	REKSL KEMENRDU LATUZ CERTAIN REGIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT DALAM WU JITA 310	228.045.149.024	0
80	502.001/11980	REKSL KEMENRDU LATUZ INSTITUTE TRAINING NO. 17-50039 DALAM WU JITA 310	50.383.220.775	0
81	502.001/11030	REKSL KEMENRDU LATUZ HIGH UNIFORM NO. 051- AGIE2008123-039 DALAM JALAN	286.431.265	0
82	502.002/11980	REKSL KEMENRDU LATUZ HIGH UNIFORM 2007-65039 DALAM WU JITA JLN2	51.324.932.000	0
83	502.002/11030	REKSL KEMENRDU LATUZ HIGH UNIFORM 2007-65039 DALAM WU JITA EUR2	4.536.741.324	0
84	502.079/11980	REKSL DEPKU UPTAHT RTT RTHAB. ITION 2012 MANAGEMENT PROJ. PHASE II (CREMAY II)	5.569.751.710	5.215.802.507
85	502.080/11980	REKSL DEPKU UPTAHT FINANCIAL MANAGEMENT & EXPENSE ADMINISTRATION PROJECT FOR 2012	1.369.888.088	1.665.703.284
86	502.082/11980	REKSL DEPKU UPTAHT KALI BULAN IN JULY CY SIMPUR PROJECT	527.785.602	522.738.738
87	502.084/11980	REKSL DEPKU UPTAHT SUMATRA PROJECT PAT. JAS NORTH SUMATRA PROJECT	33.370	33.087

DAFTAR NERACA 328

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
88	502.085/11030	PEKELAS DEPKU U STATE AUDIT REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT	0	3.007.000
89	502.085/11980	PEKELAS DEPKU U INITIATIVE STRENGTHENING INVESTMENT UPV PROJECT (JURPN)	10.134.548	24.325.851.778
90	502.087/11980	PEKELAS DEPKU U WATER RESOURCES AND IRRIGATION PROJECT ORGANIC PROJECT WISME	1.239.323	70.370
91	502.089/11980	PEKELAS DEPKU U STATE AGRICULTURAL INFRACRUY S. P. PPU DI ABU PEK BELINDA SEC FOCY 2006/1	300.545.002	305.726.227
92	502.081/11980	PEKELAS DEPKU U JAPAN SECTOR DEVELOPMENT PROJECT FOR JAPERS	846.768	4.063.342.380
93	502.082/11980	PEKELAS DEPKU U EUROPEAN UNION GRANT FOR TENGGARAK WTR. RSC. MNG. PROGRAM	223.226.604	292.557
94	502.085/11980	PEKELAS DEPKU U FAIR CONTRACTORY IRRIGATION SECTOR PROJECT	4.395	5.485
95	502.085/11030	PEKELAS DEPKU U EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT TP.568/11	25.007.515.275	8.621.057.382
96	502.087/11980	PEKELAS DEPKU U FINANCIAL & INVESTMENT HOLDING IN NANGGROE ACEH CARLESSALAM AND NORTH SUMATERA	62.281.110	61.782.763
97	502.088/11980	PEKELAS DEPKU U PROJECT DELTA GHANI	366.871.983	1.382.182.73
98	502.089/11980	PEKELAS DEPKU U PROJECT FROM BEST PRACTICE POLICY FORMULATION PROJECT (TP) 572/26	0	9.001.784
99	502.100/11980	PEKELAS DEPKU U PROJECT KECAMATAN BASED RECONSTRUCTION AND REHABILITATION PLANNING PROJECT (KRP) TF.063/037-ND	0	53.054.637.203
100	502.102/11980	PEKELAS DEPKU U STRENGTHENING AGRICULTURAL VARIETY FOR AND MITIGATE OF DISASTER RELATED AGR. INTEGRITY NO. 78.574/23	0	0
101	502.104/11980	PEKELAS DEPKU GRANT DA NO. TH.05/933 (MJI - HUT 40TH ANNIVERSARY NORTH SUMATERA, SUPP. FOR FOOD AND ECONOMIC VANTAGE AREA PROJECT)	4.410.828.679	8.210.789.742
102	502.105/11980	PEKELAS DEPKU U INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT AC. WITH IMPULSE ACCOUNT 11 DELTA GHANI AG. ALLIMENT CO. LTD	0	0
103	502.106/11980	PEKELAS DEPKU U PROJEK READ. GRANT 110.726/10	32.268.153	6.139.561
104	502.107/11980	PEKELAS DEPKU U FUND OF TRANS-INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION (MANUFACTURAL FACILITY) TP.073/27	10.280.016.003	8.600.638
105	502.108/11980	PEKELAS DEPKU U PROJ. 2004 RECONSTRUCTION - ONE (400) GRANT 110.726/10/IND	10.269.007.770	30.293.817.578
106	502.109/11980	PEKELAS DEPKU GRANT FOR P.10 STUDY ON TEACHERS CERTIFICATION AND QUALITY IN DULUTH ILU COTCH LUCU SUPPLY. (PDP. 11.05.02/1)	0	0
107	502.110/11980	PEKELAS DEPKU U MOT TO SUPPORT PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION REFORM PROJECT TP.080/27-IND	29.240.278	14.841.383
108	502.112/11980	PEKELAS DEPKU U KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT AND LAW PUNMMI IR. SLEAWALI INDUSTRI	0	6.131.323
109	502.114/11980	PEKELAS DEPKU U THIRD KEC. DEV. PRO. PHASE I FOR SMAL. HC. DERAFRIL. S DEV. INITIATIVE (RSPN)	0	0

DAFTAR NERACA 329

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
10	502.115/11030	REKESI DEPKU GRANT NO. 067574 STREAMLING DATA FLOWS FROM REGION TO THE CENTER UNDER DECENTRALISATION PROJECT	0	0
11	502.121/11930	REKESI DEPKU UNTUK HERALDUS RUST FUND FOR THE BETTER EDUCATION, KELUGH REFERRED NGT AND A.W. TEACHER LEGRADING PROJ.	23.063.811,77	18.787.817,66
12	502.122/11930	REKESI DEPKU U.TECH. ASS. TO IND.NAT.SGL WINDOW, WJTI CONGTRUIT JND.O.SJF. FUEL FIN. MOT & REV. ADM. PERDAM GRANT TF 09/412	362.720,00	9.040,22
13	502.123/11930	REKESI DEPKU U.GAS EDUCATION PROJECT II 081985100	3336.439,480	3.018.581,920
14	502.124/11930	REKESI DEPKU U.PURE BIOMASS POWER GENERATION PROJECT TF 082304	885.847,82	9.259.978,561
15	502.125/11930	REKESI DEPKU U.GEOL. H. D. MPROV LACIE BE KEN GUY FA REPORT S. SOURCE OF F TF 92016	68.847,92	350.560,000
16	502.126/11930	REKESI DEPKU U.D.TCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM ENS. RIA II 1393613	0	0
17	502.129/11030	MULT-DONOR SUPPORT FACILITY FOR NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT CO-FINANCING GRANT FOR DECENTRALISATION VET O' VATLAWI REND. DATA & MONITORING ENTRY	1.563.791	60.769.333,553
18	502.130/11930	REKESI DEPKU U.II BANTU DANA FOR ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING PROJ. I (ED-I)	54.519.620,77	105.013.528,87
19	502.131/11030	REKESI DEPKU U.GLOBAL PARTNERSHIP ON UJ PU BASIC AND EXPANDING P PEFIT WATER SUPPLY TO SLUMSAYA'S JEPAN PROJ PROJECT	3.579.657,308	4.795.600,000
20	502.132/11930	REKESI DEPKU U.NATIONAL PROGRAM MIL. DR COMM UNIT EMPOWERMENT IN RURAL AREAS PROJECT GRANT NO. 109310	0	0
21	502.133/11930	REKESI DEPKU UNTUK IBMAT F 080092 THE PREPARATION OF STRENGTHENING NATIONAL STATISTICAL SYSTEM OF INDONESIA PROJECT	0	1.239.919,520
22	502.134/11930	PPDAKL MULTICOUNTRY TRADE AND INDUSYLY CLIMATE FACILITY TF-094033	1.203.283	35.7160,724
23	502.135/11930	REKESI DEPKU U.SUPPORT FOR T-APT-IKE WATER SUPPLY & SANITATION FOR OWN INDEPT COMMUNITY PROJECT PANSIMAS (TF 094.921)	14.759.424,623	30.120
24	502.136/11030	REKESI DEPKU U.DECENTRALISATION SUPPORT FACILITY I CAPACITY STRENGTHENING PROG FOR LOCAL GOVERNMENT ERRIK J TIBERI TF 0955641	1.137.711,48	624.238,827
25	502.137/11930	REKESI DEPKU U.WEST INDONESIA NATIONAL ROAD MINING WLMN PROJECT GRANT II 084130	0	1.085.338,153
26	502.138/11930	REKESI DEPKU U.INDONESIA WATER AND SANITATION PROGRAM SLE PROGRAM I- SANITATION COMMUNITY & MUNICIPAL PLATA PROJECT TF 082640	350.060,198	3.596.400,000
27	502.139/11930	REKESI DEPKU U.INDONESIA WATER AND SANITATION PROGRAM SLE PROGRAM I- TECHNICAL ASSISTANCE FOR FLOOD MITIGATION PROJECT TF 082640	54.110,782	588.316,814
28	502.140/11030	REKESI DEPKU U.JPP ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR, GRANT NO. 9152-INL-TVW 921-JSP	62.082,248	1.168.433,57

DAFTAR NERACA 330

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
130	502.141/11030	PEKERJA DEPREKU UNTUK DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY II: GOVT TRA VNG AND FOLIATON CENTER DEPMINT DESPONITA D958851	3.620.580	5.415.192
130	502.1423/11930	PEKERJA DEPREKU UTK L48-BR HOUSEHOLD WA-E SUPPLY AND SERVICE, JUN PROGRAM JLM DAL ADJUDICATED LEADING AGR-NO. 541341	269.270.000	113.228.149.348
131	502.1404/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTKTD TECH AGREE/ADCE TO IND TAX ADM PERIOD UNDER THE SUPPLY TO PUBLIC IN MNGMT N TCV ADM MULT CNDITI D958882	239.091.023	0
132	502.1442/11930	ELPPUP INC II: JUJUNSIAN CUP IUPION LIQUIDATION IN CORRUPTION PREVENTION STRATEGY TF-094187	0.531.708	222.329.857
133	502.1454/11930	PEKERJA DEPREKU LTF SF-NPK FIR DOAI GOVERNMENT BNPB OF INDIA T-CAREC	228.820.942	0
134	502.1455/11930	MU-FHAK-AZER ALI INDIA SLM4-5A1-085385	325.373	14.385.800.000
135	502.1474/11930	PEKERJA DEPREKU UTK GRANT FOR SUPPORT TO EPV FOR PREPARATION OF NEW STRATEGIC PLAN PROJECT D9588640	34.678.333	59.234.349
136	502.1484/11930	WA-LIARD SANITATION PLATY AND ACTION PLANNING FACILITY PROJECT WNSFOL/ATFC095802	1.007.21.034	2.247.750.000
137	502.1304/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTKGPART AGREEMENT PNFM SUPPORT FACILITY TREATMENT D958883	139.517.610.497	91.708.200.000
138	502.1314/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTY RESTRUCTURE RECORD FCTION -KANURAG FACILITY PROJECT ADDITIONALLY FINANCING D9588082	48.29.036.891	0
139	502.1324/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTY PARTNERSHIP AN OUTLET RARE LAND EXISTING TEL COMMUNICATION IN KLUH INDONESIA TULUSI H092629	269.137.348	0
140	502.1334/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTY OF GRANT FOR S. PNTT TO EPV IN FILIPINIPILLWALTA, ICEN DI COCTH THN LWD IP PROJECT II D958344	603.062.987	0
141	502.1344/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTY OF GRANT FOR S. PNTT TO EPV IN FILIPINIPILLWALTA, ICEN DI COCTH THN LWD IP PROJECT II D958344	57.262.150	0
142	502.1354/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTKTD NATIONAL FRCG FOR COMM TWIN/PRTV IN RURAL AREA DISASTER MITIGATION MEASURES N-77098016	22.225.461.024	0
143	502.1354/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTKTD NTT DUTA D958831	317.880.000	0
144	502.1354/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTY OF GRANT FOR AREA 2 & NORTH SUMATERA INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION ENGR-ING FRCG PT DUA WU.01.USD 11.353894 IND	0	0
145	502.1364/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTKTD 099083 INTEGRATED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IMIS FOR PNFM MANDIRI SIMPAUDU CLM WA-UZA.IND	2.027.297	0
146	502.1394/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTKTD 099060 PNFM SUPPORT FACILITY TRUST FUND IFSD COMM BASED SETTLEMENT JACKINTPA (PSI), CALM/WA.UZA.IND	0.927.200.000	0
147	502.1394/11930	PEKERJA KEMEN/KEU LTKTD 093869 PNFM SUPPORT FACILITY TRUST FUND IFSD COMM BASED SETTLEMENT PREKONPA (PSI), CALM/WA.UZA.IND	24.253.467.620	0

DAFTAR NERACA 331

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 4

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2010	31 Desember 2011
148	502.151.11030	REKESI KEMENKEU LTK TF C03870 PNPN SUPPORT FACILITY "F1ST FLAME FOR THRD NGT FRC3 FOR CDM FMF IV JATENG JLM VAL LSC	53.7.800.000	0
149	502.152.11930	REKESI KEMENKEU LATUK SUPPORT F04 14.31. V INDONESIA F 99322	1.715.250.013	0
150	502.15041.1930	REKESI KEMENKEU LATUK GOLD GRANT FAD NO. 34-3-803-1 JLM VAL UTA LSC	308.932.677	0
151	302.134.11930	REKESI KEMENKEU LATUK THIR NATIONAL PROGRAM F01 COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREAS-PSP FINANCING TF- D386114	82.382.128.722	0
152	301.502.11930	REKESI KEMENKEU LATUK PROJECT PER GRANT SENI UTA DAN M. JLN SHNHE127 SESEK MKN M VAL UTA	0	0
153	301.254.11930	REKESI KEMENKEU LATUK PROJECT JAKARTA MASS KAF J TRANS SISTEM CMTD JAUH CMC PSC	0	0
154	502.15541.1930	REKESI KEMENKEU LATUK PSP REED + READINESS PREPARATION DALAM VAL TA LSC	2.305.951.371	0
155	502.00331.1030	REKESI KEMENKEU LATUK PROJECT EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAM (ESPP) GRANT NO. EC172 DWT VALUTA RUD	0	0
156	301.504.11930	REKESI KEMENKEU LATUK URBAN SANITATION & RURAL INFRASTRUCTURE (LSR) SUPPORT TO PNPM MARUM PROJEC 2768 RU DLY VAL UTA	0	0
157	301.303.11930	REKESI KEMENKEU LATUK WATER RESOURCES AND IRIGATION SECTOR NGT PROGRAM PHASE II RC27 IN DWT VAL UTD	0	0
JUMLAH			2.390.016.547.064	2.824.334.933.971

DAFTAR NERACA 332

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

NO.	KANTINIL/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
1.	LACEH		188.416.496.574	166.798.620.202
2.	BANDA ACEH	C01	86.372.731.348	85.273.671.801
3.	LINGGA	C02	16.029.006.000	11.636.260.000
4.	MELAKAII	C03	21.355.059.287	12.045.267.403
5.	TAFAK TL43	C74	9.171.395.471	8.184.700.000
6.	LHOKSEUMAWE	C89	40.312.416.021	36.863.796.470
7.	KITACAWI	C95	8.122.076.402	7.511.886.100
8.	TAKENGON	C92	7.055.931.838	6.584.100.076
9.	BANDA ACEH IKFJSLSI	C76	0	0
	IL MEDAN		321.199.207.671	281.207.843.308
10.	MEDAN	C04	11.651.742.740	32.783.362.062
11.	PEMATANG SIRNAK	C06	50.589.035.281	28.513.330.663
12.	PALANG SIDEMPUAN	C08	16.722.065.413	12.461.227.770
13.	BUKITTINGGI	C07	4.932.717.921	7.438.598.812
14.	RANTAU PRAPAT	C75	6.634.925.218	6.226.065.101
15.	LAMUNG BALK	C78	13.241.333.432	3.093.388.070
16.	SIDO.04	C96	10.576.537.277	13.859.146.065
17.	BUKITTINGGI	C13	7.228.086.200	11.346.886.260
18.	MEDAN	C23	76.625.883.263	71.083.116.813
19.	TOD NO.7 NAGI	C24	15.310.004.503	13.013.365.230
20.	BALI PP	C26	14.130.350.048	8.575.003.120
	IL PADANG		200.128.014.170	120.810.000.643
21.	PALANG	C10	11.672.070.217	60.353.166.656
22.	BUKITTINGGI	C11	45.115.547.189	31.643.228.160
23.	SUMILANG	C77	7.636.869.248	5.004.740.001
24.	SOLOK	C90	15.216.416.065	3.611.476.173
25.	LUBUKLINGGAU	C91	8.085.323.005	5.543.324.974
26.	PAINAI	C92	6.312.961.798	4.242.716.295
	IV. PEKANBARU		263.197.614.313	130.676.346.121
27.	PEKANBARU	C09	55.786.045.711	32.083.676.008
28.	LANJURIS F NAME	C09	38.410.663.148	23.569.617.403
29.	RONDAT	C92	16.364.617.710	12.259.507.800
30.	DJMMI	C23	50.454.600.241	15.000.066.036
31.	BALAIAN	C37	20.817.652.789	16.894.328.063
	V. JAMBI		107.874.425.308	85.428.219.856
32.	JAMBI	C12	60.922.299.563	42.719.532.929
33.	BUINEAI PEGUH	C13	7.223.281.000	6.673.207.416
34.	MUARA BUNGO	C73	7.728.601.812	5.867.742.500
35.	KUALA TINGKAL	C93	14.446.010.180	4.619.767.700
36.	BANGKO	C58	17.023.061.551	5.543.650.000
	VI. PALEMBANG		180.873.682.826	131.414.215.424
37.	PALEMBANG	C14	17.226.622.748	25.251.201.202
38.	LUBUKLINGGAU	C74	8.910.823.232	6.111.034.700
39.	BATURAGA	C03	13.325.813.424	8.283.176.811
40.	LHOK	C44	24.054.221.008	25.741.104.122
41.	SEKAYU	C59	28.287.781.463	10.896.785.000

DAFTAR NERACA 393

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

NO.	KANwil/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
	VII. BANDAR LAMPUNG		124.091.607.162	120.864.023.068
41	BANDAR LAMPUNG	C17	61.310.071.253	57.001.002.395
42	KOTABUMI	C18	30.121.612.237	13.445.368.877
43	METTE	C28	17.587.811.368	21.285.468.033
44	TAWA	C35	9.000.000.400	3.121.000.000
	VIII. BENGKULU		78.202.812.720	62.805.218.171
45	BENGKULU	C16	50.036.651.721	36.755.737.299
46	MANTA	C21	8.372.711.191	5.823.957.138
47	DJURL	C48	14.327.884.277	7.759.464.792
48	MUKOMUKO	C91	3.043.452.591	2.401.366.911
	IX. PANDEKAN PINANG		34.904.308.343	20.530.451.900
49	PANDEKAN PINANG	C15	20.228.471.429	16.891.377.007
50	TANJUNG PANDAN	C77	4.735.031.207	3.689.574.800
	X. SERANG		163.509.005.823	105.766.370.189
51	SERANG	C23	69.821.933.803	52.703.167.822
52	TANGERANG	C22	67.555.634.352	57.094.460.113
53	RANGKAPURITUNG	C21	6.237.722.353	5.671.722.403
	XI. JAKARTA		6.215.001.070.288	4.805.355.013.864
54	JAKARTA I	C13	242.318.039.803	132.985.026.873
55	JAKARTA II	C19	4.800.038.131.633	4.044.092.782.457
56	JAKARTA III	C89	406.076.021.567	295.030.001.509
57	JAKARTA IV	C33	341.028.857.073	166.733.467.303
58	JAKARTA V	C38	216.712.520.450	224.757.365.261
59	JAKARTA VI	C40	0	0
	XII. BANDUNG		739.479.519.121	609.842.261.714
60	PURWAKERAJA	C21	41.176.439.077	31.069.947.603
61	BANDUNG	C22	5.247.021.277	135.043.342.163
62	BOGOR	C20	118.020.012.559	80.703.402.566
63	CIREBON	C24	64.376.632.033	46.873.390.942
64	TASI OMALAYA	C26	43.233.023.479	37.181.756.022
65	KARAWANG	C96	14.107.737.147	5.129.427.134
66	SUMEDANG	C87	22.037.266.778	14.213.332.237
67	BANDUNG III	C95	172.025.938.803	145.471.615.013
68	GARUT	C98	24.228.431.820	22.212.376.861
69	SUKABUMI	C29	44.382.811.760	36.702.181.462
70	KININGAN	C47	24.421.377.167	14.203.302.871
71	BEKASI	C71	63.320.063.172	42.309.324.051
	XIII. SEMARANG		575.404.071.680	445.110.821.281
72	SEMARANG I	C28	78.317.416.977	61.829.798.393
73	PURWODADI	C27	18.736.629.540	14.723.621.424
74	SIRAKARTA	C29	61.928.221.362	7.101.976.139
75	PURWOKERA I	C29	44.086.433.349	32.081.761.313
76	PEKADEGAN	C72	17.487.832.867	14.056.187.031
77	PATI	C97	31.526.650.362	24.401.043.696
78	MAGELANG	C16	8.162.820.824	42.089.444.602
79	TERGG	C18	58.425.748.547	37.596.568.033

DAFTAR NERACA 394

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

NO.	KANNUL/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
90	KJULB	129	41.882.943.263	10.053.357.729
91	D. KAP	130	10.722.833.230	11.084.364.210
92	SEMARANG II	131	69.058.813.650	61.233.356.530
93	K. KTCN	132	50.224.575.157	18.554.565.430
94	BRAGEN	133	16.126.645.452	13.090.800.666
95	PURWODADI	134	16.910.613.721	(12.033.216.679)
96	BANJARMINGGI	135	20.354.527.743	11.281.372.240
	XIV. YOGYAKARTA		148.845.090.850	124.430.668.061
97	YOGYAKARTA	136	93.230.037.810	121.671.921.561
98	WONOSARI	137	7.016.037.087	6.624.426.000
99	WATES	138	7.928.180.540	6.823.371.200
	XV. SURABAYA		780.833.712.442	629.812.079.077
100	SUPRAKASA	139	159.914.711.767	135.529.355.246
101	MALANG	140	101.226.329.753	102.359.365.734
102	MAD. JLN	141	66.121.489.748	55.721.988.206
103	KEDIRI	142	49.410.033.070	42.875.226.051
104	BONDOWOSO	143	28.447.637.509	15.345.165.902
105	PAMERESWA	144	23.945.855.163	25.126.904.387
106	BOJONEGORO	145	50.311.433.150	14.506.322.973
107	MOJOKERTO	146	36.072.221.753	32.497.765.200
108	PACITAN	147	4.111.713.212	4.044.162.610
109	BANTENWAN	148	21.771.824.589	8.469.305.881
110	JEMEER	149	41.953.039.750	42.411.306.000
111	SURABAIA	150	88.328.039.829	86.217.657.813
112	B. ITAP	151	20.375.736.362	16.741.365.036
113	SIDOARJO	152	31.822.630.857	26.466.327.100
114	TUBAN	153	11.476.034.980	12.823.312.879
	XVI. PONTIANAK		116.459.122.054	93.401.279.064
115	PONTIANAK	154	65.185.053.153	52.475.757.034
116	SINTANG	155	12.526.630.200	11.543.300.630
117	SINGKAWANG	156	33.657.522.452	16.789.736.660
118	KITA PAHNG	157	5.182.025.002	4.721.306.400
119	PUTUSSIBAU	158	0.631.276.400	3.412.060.100
120	SANIGAU	159	8.221.501.454	7.491.395.400
	XVII. PALANGKARAYA		71.579.848.714	49.123.077.800
121	PALANGKARAYA	160	48.120.593.853	32.257.403.700
122	SAMPT	161	8.115.043.619	6.632.390.410
123	BUKITOK	162	10.315.011.283	6.743.300.570
124	PANGALAN BUN	163	8.446.343.250	5.285.325.030
	XVIII. BANJARMASIN		112.667.726.843	91.314.602.379
125	BANJARMASIN	164	66.405.572.764	55.009.472.267
126	KOTAKRARI	165	7.244.064.500	7.507.726.124
127	BMR-SRI	166	16.810.221.727	12.841.712.333
128	TANJUNG	167	7.488.812.548	8.493.712.411
129	PELAIHARI	168	4.340.354.387	3.351.312.293
	XIX. SAMARINDA		175.948.398.725	94.120.181.889

DAFTAR NERACA 395

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

NO.	KANWIL/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
125	SAMARINDA	C48	64.921.339.283	32.182.320.119
126	BALI KUPANG	C47	50.124.066.552	30.815.339.553
127	TENGKARA	C43	19.656.056.000	14.147.366.010
128	MALUKU	C52	7.120.389.261	2.253.854.013
129	TANJUNGPINrang	C30	11.320.637.260	2.321.350.010
	XX. DENPASAR		132.471.870.720	118.202.484.000
128	DENPASAR	C37	59.106.836.720	53.402.102.720
130	SINGARAJA	C32	21.321.463.269	21.500.988.010
129	KALIBUTU	C34	1.424.639.729	12.289.327.310
	XXI. MATARAM		111.106.729.455	71.824.511.673
128	MATARAM	C38	65.475.039.587	45.729.708.717
129	BIMA	C71	27.726.875.270	17.361.147.961
130	SUMBAWA SELATAN	C01	9.216.317.784	5.876.922.810
131	BUJANG	C59	9.746.201.504	5.554.322.410
	XXII. KUPANG		86.000.812.880	77.214.048.673
132	KUPANG	C08	50.317.610.571	45.151.066.634
133	ENJE	C10	9.867.891.309	9.229.288.031
134	WAINECARU	C41	6.175.039.292	5.511.214.893
135	RUTEKA	C11	6.935.424.227	6.035.706.000
126	K. AMEUN	C72	8.662.987.150	8.893.326.610
137	LAMBERTUKA	C74	4.635.076.124	2.503.755.011
	XXIII. MAKASSAR		281.386.641.016	237.837.262.618
138	MAKASSAR	C54	54.624.139.384	32.297.342.212
139	WATAMPONE	C56	21.510.036.621	15.211.063.283
140	BANTAIENG	C58	12.335.842.159	11.293.107.329
141	PARE-PARE	C57	20.126.220.583	20.608.063.608
142	PALU	C53	11.215.431.221	9.623.929.436
143	MAJENE	C59	8.321.147.000	7.491.566.493
144	NAKEDAR I	C06	74.146.034.353	67.106.971.173
145	BENI-KIS	C56	2.321.701.172	2.391.064.383
146	NAKALE	C70	4.022.372.091	3.887.245.417
147	SINJAI	C77	2.354.736.440	3.220.360.578
148	MANUJU	C78	1.631.832.327	5.265.432.810
	XXIV. PALU		83.827.539.667	88.633.008.753
149	PALU	C51	63.236.286.823	46.823.732.661
150	POLO	C52	8.312.625.306	8.514.261.610
151	LJWJK	C53	6.162.225.472	5.404.318.161
152	TOU-TEU	C02	5.327.422.204	4.883.102.441
	XXV. KENDARI		72.601.273.858	52.202.420.524
153	KENDARI	C03	46.355.064.342	31.224.069.064
154	BALI-EGII	C00	12.320.039.127	6.029.206.900
155	KULGEP	C58	8.382.562.520	1.681.296.610
156	RUMI	C57	3.026.567.840	3.567.002.063
	XXVI. GORONTALO		41.066.614.227	31.012.666.374
157	GORENTALO	C50	36.930.036.268	27.557.348.274

DAFTAR NERACA 396

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (40/07/2012)

DAFTAR 5

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

NR.	KANWIL/KPPN	KODE KPPN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
138	MARSA	'32	4.173.713.666	3.655.607.109
	XXVII. MANADO		117.866.620.918	77.048.816.318
139	MANADO	042	80.290.910.410	50.350.510.913
140	TABUNA	033	3.502.825.385	3.213.208.300
141	PEKALONGAN	'52	10.207.836.384	9.281.862.003
142	ETIMB	'73	15.003.135.042	8.197.207.300
	XXVIII. TERNATE		33.801.319.339	29.349.864.300
143	TERNATE	062	31.433.505.635	28.599.172.300
144	TUBUE	'12	2.363.038.704	2.251.541.000
	XXIX. AMBON		48.787.163.285	73.767.452.601
145	AMBON	067	34.106.813.395	53.161.22.100
146	TIKI	034	8.479.561.900	5.595.598.454
147	SAWOLEK	'34	2.801.301.200	2.611.041.200
148	WASOHI	'73	7.280.487.800	7.082.065.800
	XXX. JAYAPURA		221.445.997.769	194.526.934.407
149	JAYAPURA	063	87.453.552.472	103.421.024.596
150	EKA	064	16.121.892.746	15.171.341.200
171	MANOKWARI	060	16.635.798.830	14.002.739.725
172	SORONG	068	15.375.235.800	17.255.413.900
173	MUKIHE	067	6.572.361.735	4.051.937.000
174	WERAJE	065	32.156.700.640	16.517.788.700
175	NAJHL	095	5.646.511.805	4.022.921.100
176	WAMENA	'13	5.881.941.500	5.161.425.300
177	SEBLI	'38	5.246.098.271	3.583.541.406
178	HM SG	'47	23.301.602.956	10.236.170.300
	JUMLAH KPPN		11.870.560.047.881	9.218.612.887.732

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA TAHUN 2011 (SIMPANAN)

DEPTAK

REKENING PEMERINTAH LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

NO	NO REKENING	NAMA REKENING	Jumlah	
			31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
A.	DI BANK INDONESIA			
1	510000001	Rencana Pendekat	0,00	0,00
2	510000002	Rencana Pengeluaran Pendekat	0,00	0,00
3	61250211	RE. IPB	0,00	105,27
4	612502111	RE. PUD	0,00	0,00
5	612502111	RE. USD	0,00	0,00
6	612502111	RE. CFB	0,00	0,00
7	612502981	RE. SDR	0,00	0,00
8	612502981	RE. EUR	0,00	0,00
9	612502981	Dekpo. K : Hsl Mlysk Pnsjng (Kosa Produk & Sherry)	6.217.138.352.266,00	7.201.482.402.768,11
10	620000071	Peng. rencn Pd. tmbangan rcr. 22.1000	128.346.646.879,00	61.521.102.324,71
11	620000084	Peng. rencn Pnsj. Unit	1.790.120.000,00	205.304.171.102,20
12	620000001	Kewm. Keuangan Dg. Dekpo. Jenderal Anggaran (k m tumpang rcr. saluran) & sum. rca dan rca tbcn nrcn lndor	0,00	0,00
13	620000003	Kewm. Keuangan Dg. Dekpo. Anggaran (k m tumpang rcr. saluran) & sum. rca dan rca tbcn nrcn lndor	0,00	0,00
14	620000001	Kewm. Keuangan Dg. Dekpo. Anggaran (k m tumpang rcr. saluran) & sum. rca dan rca tbcn nrcn lndor	0,00	0,00
15	510000001	Rv. Penerimaan ke anggaran dengn rca dan rca tbcn nrcn lndor	0,00	0,00
16	620000071	Pengir. Bkt. Pnsjng Dalam Negeri Acara AUSD	0,00	0,00
17	62901981	Rencna. Jln. Perencana. Atas. Bant. Beker. Suppl. Prog. (E365)	0,00	0,00
18	519001113	Fct. Pembiayaan Hsl. Pnsjng Beras. Perorangan	0,00	0,00
		JUMLAH	6.558.844.566,61	7.201.482.402.768,11
B.	REKENING PEREMPATAN DI BANK UMUM			
1	0100117508	BNK Cbt. Pasuruan	0,00	0,00
2	01001002276204	BNK Cbt. Jl. Veteran	0,00	0,00
3	170-0000000000000000	Bnk. Mandiri Cbt. Jl. Pura Kediri	0,00	0,00
		JUMLAH	0,00	0,00
C.	REKENING RETUR			
1	010000001	Bnk BRI Cabang Blora & Pekalongan	0,00	5.497.287.500,00
2	0395.0.402365.503	Bnk BRI Cabang Blora & Pekalongan	0,00	0,00
3	1.5.204207345.5	Bnk Mandiri Cabang Samarinda	0,00	RP. 541.208.987,00
4	011.0.0.03093.4	BPN Bantul Cabang Sleman & Kulon Progo	0,00	3.328,00
5	1010100825	BPN Kalideres Cabang Cirebon	0,00	0,00
6	0101012608	BPN Mandiri Cabang Samarinda	0,00	4.282.356.100,00
7	120.00.000.227118.8	BPN Salatiga Cabang Kulon Progo	0,00	0,00
8	1.001.3.0010046.6	BNP. Jambi Cabang Lampung Selatan	0,00	0,00
9	002.000.006	Bnk. Mandiri	0,00	17.125.180.261,20
10	011001201	Pengir. II-BKPM Jambi Selatan	0,00	0,00
11	011001201	Pengir. II-BKPM Medan	0,00	0,00
12	011001201	Pengir. II-BKPM Padang	0,00	0,00
13	011001201	Pengir. II-BKPM Samarinda	0,00	0,00
14	011001201	Pengir. II-BKPM Manado	0,00	0,00
15	011001201	Pengir. II-BKPM Samarinda	0,00	0,00
16	011001201	Pengir. II-BKPM Samarinda	0,00	0,00
17	011001201	Pengir. II-BKPM Samarinda	0,00	0,00
18	011001201	Pengir. II-BKPM Samarinda	0,00	0,00
19	011001201	Pengir. II-BKPM Samarinda	0,00	0,00
20	011001201	Pengir. II-BKPM Samarinda	0,00	0,00
21	011001201	PER3MWD.03.01-BPN. Cilacap	0,00	0,00
22	011001201	Pengir. BKPM BPKP. Samarinda	0,00	0,00
23	011001201	Pengir. II-BKPM BPKP. Samarinda	0,00	0,00
24	011001201	Pengir. II-BKPM BPKP. Samarinda	0,00	0,00
25	011001204	Pengir. II-BKPM BPKP. Samarinda	0,00	0,00
26	011001204	Pengir. II-BKPM BPKP. Samarinda	0,00	0,00
27	011001204	PER3MWD.03.01-BPKP. Samarinda	0,00	0,00
28	011001201	PER3MWD.03.01-BPKP. Samarinda	0,00	0,00
29	011001201	PER3MWD.03.01-BPKP. Samarinda	0,00	0,00
		JUMLAH	0,00	482.181.167,10
		GRAND TOTAL	1.558.844.566,61	8.057.197.957.738,59

DRAFT MERCASSR

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (400/178)

DAFTAR

**SALDO PENIERINTAH LAINNYA DI BANK UNUM
PER 31 DESEMBER 2011**

No.	Nama Rekening	Saldo Awal 1 Januari 2011	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Rak Induk Daring Urug Bergair	19.701.981.185,78	7.313.401.980,31	1.637.371.250,00	7.1.3.2/4.320,69
2.	Rak Induk K Endesmar	9.460.188.842,34	38.163.334,00	9.436.818.711,84	12.072.338,00
3.	Rak KK3N Eng Hesil EW1	12.372.133,71	432.129,519,23	435.537,794,33	9.570.268,61
4.	Rak K U M K	760.782.981,75,13	131.285.273.925,30	906.288.152.873,00	40.775.802.320,33
5.	Proyek Distrik ed. Jawa I	13.023.478,70	11.723.836,20	13.118.264,00	10.228.040,90
6.	Proyek P.D. Sel	15.150.676,20	163.010,00	15.134.400,00	10.115.080,20
7.	Rak Recovan (LT 1069)2000	14.401.122,28	567.275.239,20	571.735.050,00	10.000.752,98
8.	Rens Perbaikan BRI 95/2011	12.467.687,48	22.373.670,00	22.373.670,00	10.000.000,00
9.	Rekening C.K. C.I	32.887.050,87	2678.0419,00	184.675.513,36	1.527.837,53
10.	Percungan Gularan (P2W)	7.383.141,81	110.721,00	1.310.000,00	7.483.862,41
11.	P.R.U.P.P Perketr (341)BRI	208.270.783,58	1.135.451.038,35	906.636.417,00	345.234.434,93
12.	P.R.U.P.P Perketr (325)BP	3.083.810.532,11	21.231.503,57,08	18.733.935,21,53	6.181.436.521,08
13.	P.R.U.P.P Perketr (341)RHB	148.544.540,76	245.108.249,37	67.132.561,00	230.512.228,13
14.	P.R.U.P.P Perketr (325) Mandiri	56.237.199,05	1.008.067.349,53	751.637.452,75	261.607.190,04
15.	P.R.U.P.P Perketr (541) Mandiri	13.597.547,06	70.760.36,55	42.097.924,50	45.335.170,61
16.	P.R.U.P.P Perketr (325) Mandiri	55.572.577,50	2.794.541.118,61	2.035.426.390,59	1.320.800.397,11
17.	P.R.U.P.P Perketr (541) Mandiri	12.917.019,04	123.453.101,65	86.324.180,19	81.125.319,61
	Jumlah	794.774.458.673,93	219.213.081.500,85	957.230.000.034,87	50.708.133.589,71

DAFTAR PERIODE 039

**KAS PADA KJL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	BKA	Kementerian Negara/lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGETAHUAN		KAS DI BENDAHARA PENGETAHUAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited
1	001	Majlis Permusyawaratan Rakyat	10,501,022	78,652,646	17,700,000	41,689,875	3,044,874,478	1,925,258,480
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	4,004,699,807	4,925,879,203				
3	004	Badan Penanaman Kawangan	15,805,355,373	12,861,631,482	132,571,641	1,195,829,643	2,310,592,123	389,630,542
4	005	Wakilrahan Agama	830,807,521	1,261,149,772		372,202,950	6,194,039,368	717,937,976
5	006	Kaja Kasan Agung	703,822,326	487,188,213	3,877,525,188	4,404,766,934	36,727,015,418	511,342,900
6	007	Sekretariat Negara	3,035,136,669	7,887,837,382	408,075,654	4,125,000	15,182,785,948	7,739,337,498
7	010	Kementerian Islam Negeri	6,415,680,382	4,260,025,143	22,372,149,618	67,215,928,241	11,137,702,526	3,635,543,096
8	011	Kementerian Luar Negeri	89,237,337,975	355,550,551,237	14,544,381	130,112,045	165,351,188	114,058,152
9	012	Kementerian Pertahanan	3,033,990,986	-	6,679,893,688	4,831,423,918	119,999,985,000	4,145,785,970
10	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	2,517,672,150	1,620,431,927	3,040,660,248	4,086,349,035	2,155,385,364	1,392,376,866
11	015	Kementerian Kawangan	1,439,660,756	2,253,756,843	970,359,613	416,590,875	8,115,195,571	2,149,709,968
12	018	Kementerian Pertanian	6,028,888,911	7,105,670,688	312,270,655	280,162,462	6,708,498,077	6,722,647,329
13	019	Kementerian Perindustrian	5,152,557,973	552,773,084	23,817,118,524	2,108,256,492	159,994,850	5,546,919,227
14	020	Kementerian ESDM	707,394,288	142,416,400	10,024,536,870	345,308,190,520	24,711,542,175	1,572,590,125
15	022	Kementerian Perhubungan	473,989,973	854,081,528	99,315,904,988	104,877,778,482	1,073,343,972	126,491,885
16	023	Kementerian Perkembang Nasiona	29,057,547,642	27,089,509,376	1,416,762,912	1,910,102,873	227,389,900,596	79,591,384,944
17	024	Kementerian Kesehatan	6,014,567,167	15,057,882,368	2,579,653,331	2,931,569,230	380,314,581,881	772,403,090,194
18	025	Kementerian Agama	2,772,512,926	9,723,647,812	8,837,150,157	11,228,028,167	10,104,236,574	10,915,757,688
19	026	Tanaga Kerja dan Transmigrasi	18,015,981,617	18,361,918,789	60,459,150	214,561	17,558,844	9,673,275
20	027	Kementerian Sosial	1,176,984,982	304,806,245	48,365,486,680	63,275,181,111	119,650,989,281	72,418,176,820

卷之三

**KAS PADA K/L DAN BUNI
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

		KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
21	029	Kementerian Kehakiman	21.886.190.391	9.987.013.381
22	032	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	1.477.383.772	3.623.498.421
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	885.824.764	482.333.441
24	034	Kementerian Bidang Politik dan Keamanan		
25	035	Kementerian Binaan Perkemahan		
26	036	Kementerian Binaan Kesuksesan Rukuh	830.727.713	199.701.543
27	040	Kementerian Kedudukan dan Perwiskita	2.740.697.216	432.696.848
28	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	203.531.190	509.018.639
29	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	1.223.163.777	122.431.700
30	044	Kementerian Negara KUKM	4.528.100	358.654.340
31	047	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	734.080.171	1.558.183.545
32	048	Pelindungan Anak		
33	050	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	900	
34	051	Badan Intelijen Negara		
35	054	Lembaga Sandi Negara		
36	055	Balai Pusat Statistik	986.006.527	1.105.973.357
37	056	Kementerian Negara PPN/Bapenas	800	26.481.042
38	057	Badan Pertanahan Nasional	531.237.398	3.468.773.330
39	059	Pengembangan Nasional Republik Indonesia	40.969.023	26.261.717
		984.705.032	7.373.883	7.616.183.000
				3.091.346.024
				1.368.981.576
				816.709
				35.698.500
				8.110.043.451
				2.914.260.792
				4.953.263.971
				1.534.150.823
				642.074.556
				33.158.231

Digitized by srujanika@gmail.com

KAS PADA KJL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

		KAS DI BENDAHARA PENGETAHUAN	KAS DI BENDAHARA PENEMUAN	KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
-40	060	Kepolisian RI 2.891.198.021	2.377.582.012	80.445.000 80.935.000 329.225.730.191 202.291.286.798
-41	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan 19.783.341	177.209.681	
-42	064	Lembaga Kehakiman Nasional 2.642.800		894.865.264 1.136.125.160
-43	065	Badan Koordinasi Panganan dan Modal 2.135.186.973	598.877.385	6.201.000 19.466.200 6.835.628 812.773.212
-44	066	Badan Kartika Nasinal 58.705.840	-	8.056.788.253 1.930.197.422
-45	067	Kementerian Pertumbuhan Daerah Tinggi 120.382.875	378.768.375	69.980.000 3.043.143.912 6.253 167.839.400 89.238
-46	068	Badan Kependidikan dan Kebudayaan 6.972.725.190	3.043.143.912	1.418.702.072
-47	074	Komisi Nasional Huk Aksesi Munisipal 21.680.442	-	5.373.427 5.382.875.437 2.916.256.432
-48	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 34.790.671	48.817.502	3.390.424.469 258.341.291
-49	076	Komisi Perlindungan Umum 734.812.937	1.271.412.045	18.637.727 47.109.184 2.248.307
-50	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 3.319.350	13.181.600	197.889.230 1.664.684 98.754.014
-51	080	Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Badan Pengelajahan dan Penerapan Teknologi 802.389.067	55.105.684 696.634.055	2.163.851.684 1.363.476.489 50.212.958
-52	081	Badan Pengelajahan dan Penerapan Teknologi 89.071.600	876.930.581 7.306.000	583.423.176 1.691.678.884 45.777.154 50.477.125
-53	082	Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Antar Basis Nasional 5.214.300	62.750.600	2.287.222 2.532.257
-54	083	Bakosurtanal		
-55	084	Badan Standardisasi Nasional		8.486.500
-56	085	Badan Pengawas Tanaga Nukir		674.864.490
-57	086	Lembaga Administrasi Negara		
-58	087	Arsip Nasional Republik Indonesia 341.292.393	84.015.761 39.468.038	12.390.200 254.719.000 15.338.000 4.671.161
-59	088	Badan Kepegawaian Negara 22.068.116	100.247.627	

KAS PADA KJL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

		KAS DI BENDAHARA PENGETAHUAN	KAS DI BENDAHARA PENGETAHUAN	KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
80	089	Bulan Pengeluaran dan Pendekatan	10.008.900	147.672.398
81	090	Kementerian Perdagangan	12.489.197.859	10.650.726.397
82	091	Kamen Panitia Pen Bakar	86.383.250	32.344.425
83	092	Kamen Pemuda dan Olah Raga	222.424.000	687.639.750
84	093	Komisi Pemeliharaan Kompus		
85	095	Dekan Perwakilan Daerah	8.721.342.129	1.191.037.367
66	100	Komisi Yudisial	40.747	*
67	103	Badan Nasional Pangan dan Bantuan		
68	104	Badan Nasional Pemeliharaan dan Perlindungan	695.006.374	254.342.352
		Tentara Keamanan Internasional		
69	106	Lembaga Kebijakan Pengembangan Bantuan	18.012.024	5.105.000
		Pemerintahan		
70	107	Badan SAR Nasional	239.002.105	170.000
71	110	Domestik dan Internasional	10.921.753	*
72	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3.235.900	*
73	999.03	BUN (Investasi)		
74	999.05	BUN (DJK)		
75	999.07	BUN (Subsidi)		
75	999.09	BUN (Belanja lainnya)	28.257.142.888	5.723.660.621
		JUMLAH	292.795.937.959	518.919.020.152
			252.900.321.124	632.344.354.246
				8.756.075.773.441
				8.852.179.999.211

**PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

NO	BN	IMPLEMENTASI NEGAI DAN LEMBAGA	PIUTANG BUKAN PAJAK			Dalam Rupiah
			31 Desember 2011 Audited	PERUBAHAN	NETTO	
1	012	Dewan Perwakilan Rakyat	2.324.224.515	176.5501	2.324.322.266	-
5	014	Balai Penelitian Kehutani	11.151.218	655.7081	10.604.050	-
3	015	Minbaran Agro	17.401.524	110.0371	17.291.541	182.294.554
4	017	Sekuritas Negara	-	-	-	463.131.467
2	010	Kontraktor Bina Negara	7.301.625.039	8.738.1031	5.125.108.100	4.521.163.000
1	011	Kontraktor Lain Negara	10.376.281.016	61.036.211.000	20.374.108.482	-
1	012	Kontraktor Lainnya	7.3.38.001.05	11.12.001.051	120.851.105.155	-
1	013	Kontraktor Koperasi BUMN	11.124.301.406	11.124.301.406	11.124.301.406	-
1	015	Kontraktor Koperasi	41.479.142.017	14.191.101.017	27.288.031.000	58.119.429.000
1	018	Kontraktor Pabrikasi	555.735.172	107.570.1131	155.587.246	9.437.357.755
1	019	Kontraktor Tambang	4.197.125.011	108.001.001.011	3.108.125.000	3.108.125.000
2	050	Kontraktor PBB	2.514.738.454.010	1.013.872.457.927	1.117.812.507.255	506.501.348.557
12	052	Kontraktor Pengembangan	117.144.738.007	1.258.351.1441	186.711.405.255	222.841.000.455
4	053	Kontraktor Pendidikan Vokasi	241.367.185.218	150.161.355.5451	221.108.951.551	324.300.000
5	024	Kontraktor Perbaikan	2.487.331.480	63.474.0541	1.428.901.318	1.581.517.575
5	025	Kontraktor Agama	1.306.002.013	1.000.001.013	1.073.400.102	-
2	030	Taruna Kita dan Terciptakan	5.301.131	100.0001	5.270.011	325.210
2	027	Kontraktor Bumi	248.671.600	-	248.671.600	67.140.101
3	020	Kontraktor Infrastruktur	5.123.000.000.000	1.229.531.000.000	211.017.000.000	4.101.573.000.000
21	022	Kontraktor Infrastruktur dan Energi	1.124.001.811	13.246.001	1.100.611.812	461.164.000
2	023	Kontraktor Infrastruktur dan Energi	1.124.001.811	13.246.001	1.100.611.812	461.164.000
22	026	Kontraktor Koperasi dan BUMN	1.124.001.811	13.246.001	1.100.611.812	461.164.000
23	040	Kontraktor Koperasi dan Perkebunan	102.000.000	11.420.0001	20.000.000	3.873.300.000
24	041	Kontraktor Negara BUMN	1.124.001.811	13.246.001	1.100.611.812	461.164.000
25	043	Kontraktor Negara BUMN	159.306.000	6.570.0001	105.401.100	21.347.500
23	041	Kontraktor Negara BUMN	1.124.001.811	13.246.001	1.100.611.812	461.164.000
27	054	Balai Penelitian Biologi	67.751.572	101.5801	66.817.011	93.347.825
28	055	Kontraktor Negara BPN/Brayane	175.000.000	1.211.500.000	1.211.500.000	1.331.800
24	056	Balai Penelitian Medis	375.000.000	1.211.500.000	1.211.500.000	47.549.500
23	057	Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	3.800.000	-	3.800.000	-
27	058	Kontraktor Kesehatan	2.423.000.000	1047.512.571.000	1.000.101.042.000	1.100.201.177.231
22	060	Egospida RI	1.158.851.609	120.120.321	12.757.044.324	2.485.261.230
33	023	Badan Pengelola Obat dan Makanan	6.271.000	12.000	6.269.000	170.000
34	025	Badan Pengelola Obat dan Makanan	-	-	-	449.170.673
35	026	Badan Konsil Pengawas Makanan	2.014.000.110	-	2.014.000.110	747.400.407
30	028	Badan Pengelola dan Pengawas Lingkungan Hidup	3.000.000	12.000	2.988.000	8.091.421.361
32	025	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3.110.000.100	12.000.000	3.108.000.100	12.911.765.807
33	028	Badan Kependidikan dan Kebudayaan	1.1.303.000	12.000.000	1.1.301.000	12.221.620
31	031	Menko Kesi dan B	57.884.012	124.4711	57.708.754	-
40	018	Fundasi Pendidikan dan Kesehatan Terpadu Nasional	-	-	-	17.5.50.205
4	019	Kontraktor Pengembangan Infrastruktur	317.547.812	101.027.5351	218.454.811	947.359.000
42	020	Balai Penelitian Makanan	438.574.241	8.15.2721	145.206.389	403.379.500
43	021	Balai Penelitian dan Pengembangan Peternakan	14.380.000.148	121.007.361.021	12.100.000.120	19.121.396.264
44	022	LAPRI	-	-	-	167.514.107
45	023	Badan Pengelola	7.002.789.840	7.002.789.840	12.301.074	61.311.230
47	026	Badan Pengelola Tanpa Modal	316.000.000	100.016.0001	106.000.000	240.000
43	028	Lembaran Peraturan dan Pelaksanaan	10.800.000	142.000	10.658.000	2.000.000.000
44	029	Badan Pengelola Pengembangan Makanan	-	-	-	131.4.7.855
51	020	Badan Pengelola Makanan	15.7.000.000	12.000	15.6.000.000	-
52	021	Balai Penelitian Biologi	375.711.572	101.578.0041	1.155.001.575	1.2.1.352.187
53	024	Balai Penelitian Bahan Bakar	381.177.219	12.425.0001	1.153.591.153	-
51	025	Balai Penelitian Bahan Bakar	318.017.010	61.015.001	297.002.007	-
54	029	Balai Penelitian dan Pengembangan	47.371.512.058	101.122.519.000	57.1.942.401.55	454.258.778
63	066	Badan Pengelola Diklat	12.77.073	1.30.001	12.367.646	1.401.000
55	124	Badan Pengelola Pengembangan dan Perlindungan Tanpa Syarat (Bapak Inpres)	2.7.6.151.250	100.230.000	2.7.6.131.403	1.2.1.134.013
67	126	Badan Pengelola Pengembangan Jurusan Sibuk	2.7.6.70.006	100.000.000	2.7.6.69.300	72.300.000
53	127	Bidan SPK	1.123.025.010	12.000	1.122.005.010	50.040.000
68	120	Bidan Pengelola Pendidikan Dasar	41.320.361.020	100.000.000	1.152.497.000	17.021.111.101
69	121	Bidan Pengelola Pendidikan Dasar	1.125.001.010	100.000.000	1.125.001.010	-
0	447.70	BUM JawaPos	34.11.065.611	101.578.000.000	3.05.007.100	-
0	447.71	BUM JawaPos	-	-	-	-
0	447.72	BUM Bank Mandiri	873.139.004.810	7.304.105.100	874.147.802.700	460.788.742.976
0	447.73	BUM Bank Mandiri	745.181.200	-	745.181.200	97.584.222.811
0	447.74	BUM Transaksi Kewajiban	5.148.175.404.558	100.000.000	4.885.175.404.558	447.579.478.051
0	447.75	BUM PT PIAI	-	-	-	2.121.512.481
JUMLAH			10.886.181.412.626	10.263.216.812.624	8.632.483.610.011	8.020.878.496.678

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITORS)

DAFTAR 10

**BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI			(Dalam Rupiah)
			31 Desember 2011 Audited	PENYIBAHAN	NETTO	
			BRUTO			31 Desember 2010 Audited
1	004	Dinas Perwakilan Presiden	30.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000
2	005	Nashkumen Agung	220.267.028	11.136.455	209.130.574	176.152.600
3	007	Sekeuana Negara	78.434.000	1282.170	78.305.830	46.067.850
4	010	Konkeutan Dalam Negeri	88.872.704	(454.864)	88.417.840	3.604.14.366
5	011	Kementerian Luar Negeri	31.295.000.473	61.173.416.310	12.121.935	4.133.307.007
6	012	Kementerian Perdagangan	6.735.2532		6.735.2532	4.514.880
7	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	138.980.300		138.980.300	-
8	016	Kementerian Keuangan	9.074.036.706	(9.470.708.729)	308.249.860	327.504.656
9	019	Kementerian Pertanian	596.011.026	278.054.367	318.956.438	2.007.149.247
10	019	Kementerian Perindustrian	50.345.823	362.149	50.180.172	7.200.000
11	020	Kementerian ESDM	34.585.000	(172.810)	34.389.190	15.000.000
12	022	Kementerian Perhubungan	48.70.400	(230.652)	48.469.348	3.006.686.491
13	023	Kementerian Pendidikan Nasional	39.861.172		39.861.172	102.171.173
14	024	Kementerian Kesehatan	2.701.21.114	(9.762.818)	260.388.290	24.12.237
15	027	Kementerian Sosial	13.455.996	167.300	13.422.696	20.516.000
16	029	Kementerian Kehutanan	9.690.072.386	(9.230.754.411)	260.147.840	3.766.634.766
17	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.466.664	167.300	13.379.354	710.000
18	033	Kementerian Pekerjaan Umum	29.490.000	(2.240.616)	28.249.384	13.000.030
19	034	Kementerian Bidayah Politik dan Kemanusiaan	8.840.000	164.200	8.675.800	8.840.000
20	036	Kementerian Penerbangan				11.000.000
21	043	Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan				35.075.000
22	044	Kementerian Negara EUMN	4.063.338		4.063.338	-
23	044	Konkeutan Negara (KUN)	48.868.800		48.868.800	85.626.642
24	050	Dinas Militer Negeri				4.017.003
25	054	Badan Pusat Statistik	362.246.672	300.644.029	61.602.644	14.296.338.455
26	055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	38.000.000	118.450	26.811.550	85.200.000
27	055	Badan Peraturan Dasar	68.301.770	(3.201.659)	65.040.231	16.024.050
28	059	Kementerian Kominfo	134.570.406		134.570.406	93.712.843
29	060	Kepala BPN	44.560.002		44.560.002	50.676.627
30	063	Badan Pengawas Bioteknologi				2.500.000
31	067	Kementerian Negara PDT	13.260.000	(1.260.000)	8.000.000	8.000.000
32	070	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	52.386.607	(26.503)	52.112.704	45.167.499
33	080	Badan Energi Nuklir Nasional	4.21.151.028	(328.450.243)	3.883.140.785	11.200.000
34	081	Badan Pengelolaan Sumberdaya Tanah dan	2.1.340.008	(2.1.340.008)	18.208.007	16.740.000
35	082	Lembaga Persebaran dan Antar-kota Nasional	3.400.000	112.000	3.288.000	42.636.233
36	083	Risnindomul	7.200.000	156.000	7.164.000	7.200.000
37	084	Badan Standardisasi Nasional				1.000.000
38	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	8.000.000	150.000	8.850.000	8.000.000
39	086	Lembaga Administrasi Negara	1.663.076.096	(1.766.360)	1.646.312.708	-
40	087	Asosiasi Nasional Perusahaan				79.625.638
41	089	Badan Pengawas Perdagangan dan Perindustrian	11.825.000	158.170	11.666.825	250.000
42	090	Kementerian Perdagangan	399.800.208	(354.058.750)	45.053.458	180.267.713
43	090	Komit Perbaikan Perpajakan	8.465.146	147.046	8.421.802	-
44	104	Dinas Nasional Peneropitar dan Perindustrian Tanaga Sarana Indonesia	170.466.702	(162.464)	18.002.200	140.864.429
45	108	Komit Perbaikan Perpajakan Lainnya	173.000.207	(138.020.207)	3.980.000	-
46	109	DJKN Dinas Kesehatan	242.267.206	(1.21.466)	241.055.720	105.866.000
		TOTAL	60.470.939.992	151.244.956.650	5.225.983.392	38.591.410.963

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 11

UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Kementerian Negara/Lembaga	(Dalam Rupiah)	
		31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1	Badan Perencanaan Negara	1.265.471.406	2.03.358.439
2	Bahlilah Agung	1.192.330.134	1.194.167.306
3	Kajakuan Pgung		20.360.000.000
4	Sekretariat Negara	28.052.473	51.306.720
5	Kementerian Dalam Negeri	51.141.526.725	-
6	Kementerian Luar Negeri	5.218.141.384	
7	Kementerian Pertahanan		3'7.408.268.742
8	Kementerian Pekerjaan Umum	1.023.72.231	-
9	Kementerian Keuangan	28.325.040.516	33.201.366.733
10	Kementerian Pertanian	19.624.586	25.378.353
11	Kementerian Pariwisata	511.732.780	3.372.061.624
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	17.218.108.484	
13	Kementerian Transmigrasi	77.123.391.271	25.374.041.330
14	Kementerian Agama	1.774.57.862	2.360.667.256
15	Kementerian Sosial	5.672.246.200	
16	Kementerian Kesehatan	37.747.3167	152.697.728
17	Kementerian R&D	30.730.484	128.371.639
18	Kementerian Pekerjaan Umum	50.372.000	32.618.357
19	Kementerian Budaya	6.069.122.750	2.509.140.126
20	Kementerian Pangan		-
21	Badan Nasional Statistik	475.850.689	1.385.359.112
22	Badan Penanaman Masih	21.021.384	1.250.000
23	Kementerian Komunikasi dan Informatika	37.702.107.200	160.354.302
24	Kepolisian RI	120.331.100	
25	Badan Pengewasor Bantuan Makanan	7.261.766.771	36.666.667
26	Badan Amalilike Nasional	431.203.000	388.256.233
27	Badan Veterinari Klimatologi dan Geofisika	5.557.000	-
28	Komisi Penyiaran Internasional	15.000.000	
29	Lembaga Penyelektoran Nasional	11.057.670	5.590.590
30	Badan Koordinasi Sumber dan Amanat Nasional	77.308.536.528	
31	Badan Standardisasi Nasional		-
32	Lembaga Administrasi Negara		107.713
33	Badan Capaianan Negara	132.772.000	12.085.126.204
34	Badan Pengewasor Keuangan dan Pembangunan	80.5.942.577	-
35	Kementerian Pendidikan	34.162.707.302	37.076.406.876
36	Kementerian Pekerjaan	82.403.000	
37	Komisi Penyelenggaraan Persasi	511.572.225	83.191.500
38	BRRNPN - Riau		20.005.738.810
39	Dewan Perwakilan Daerah	377.510.250	-
40	Badan Nasional Penegulangan Reserves	2.223.203.337	-
41	Badan Nasional Penempatan dan Peluncuran Teraga Kerja Indonesia	2.1.133.000	-
42	Lembaga Penyelar Penerjasaan Penegulangan Penempatan	3.004.881.313	7.520.500.350
43	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.187.079.075	
44	BUN (Badan Urusan	3.957.734.801	
	TOTAL	1.270.165.315.147	614.122.632.355

DAFTAR NERACA 346

KELAYAKAN NEGARA LAIN-LAIN BERUPA HAK TAHUN PEMERINTAH KEPADA BPL

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 13

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	(Dalam Rupiah)	
			31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
1	101	Dinas Penanaman Masyarakat	2.704.250.390	3.104.310.603
2	102	Dewan Perwakilan Rakyat	14.018.638.616	10.382.661.284
3	104	Bacan Pemeriksa Keuangan	14.148.667.402	16.727.215.088
4	105	Mahkamah Agung	12.494.808.124	12.817.810.175
5	106	Kepala Mahkamah Agung	278.832.062.623	31.188.463.287
6	107	Sekretariat Negara	197.626.516.572	131.286.406.735
7	107	PLU Sekretariat Negara	74.101.658.502	73.746.841.748
8	110	Kementerian Dalam Negeri	31.311.207.236	2.455.832.426
9	111	Kementerian Luar Negeri	70.281.389.136	17.106.236.813
10	112	Kementerian Perdagangan	46.270.246.107.363	26.116.628.671.708
11	113	Kementerian Hukum dan HAM RI	274.316.602.208	140.064.664.121
12	115	Kementerian Keuangan	282.731.118.571	261.137.038.702
13	116	PLU Kementerian Keuangan	1.107.528.135	1.563.323.824
14	118	Kementerian Pekerjaan	148.145.804.216	48.571.833.058
15	118	PLU Kementerian Pekerjaan	10.292.297.374	-
16	119	Kementerian Perindustrian	8.195.608.896	5.227.091.607
17	120	Kementerian PSDM	287.312.920.202	268.650.630.083
18	122	Kementerian Perhubungan	749.291.628.330	1.180.701.825.328
19	122	PLU Kementerian Perhubungan	1.171.208.863	798.324.273
20	123	Kementerian Perindustrian Nasional	143.290.802.535	130.803.762.355
21	123	PLU Kementerian Perindustrian Nasional	147.733.428.587	73.295.442.141
22	124	Kementerian Riset dan Teknologi	490.573.034.821	368.476.047.776
23	124	PLU Kementerian Riset dan Teknologi	350.601.356.307	247.391.631.516
24	125	Kementerian Agama	61.710.662.338	29.814.625.134
25	125	PLU Kementerian Agama	3.832.606.518	1.637.474.822
26	126	Tanaga Kerja dan Transmigrasi	1.719.665.897	30.278.662.435
27	126	PLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi	803.425.378	226.618.224
28	127	Kementerian Sosial	265.705.172.608	262.306.866.476
29	128	Kementerian Kesehatian	27.257.632.614	25.516.067.392
30	129	Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan	745.791.093.746	31.105.152.682
31	133	Kementerian Perhubungan Laut	401.246.681.565	776.314.875.136
32	133	PLU Kementerian Perhubungan Laut	-	6.244.300
33	134	Kementerian Energi, Fisika dan Keuangan	1.787.727.035	192.112.250
34	135	Kementerian Energi, Perkonomian	397.176.501	316.220.807
35	136	Kementerian Energi, Kelembagaan dan Politik	624.284.167	3.196.417
36	140	Kementerian Keseharian dan Privatase	150.087.198.380	18.152.644.711
37	141	Kementerian Kegaraan LHMN	1.362.512.207	827.058.235
38	142	Kementerian Kegaraan Riset dan Teknologi	6.200.332.452	4.205.709.542
39	143	Kementerian Kegaraan Lingkungan Hidra	17.281.283.255	5.300.152.037
40	144	Kementerian Kegaraan LHMN	280.780.175	24.326.375
41	144	PLU Kementerian Negara LHMN	497.460.335	301.459.856
42	147	Kementerian Kegaraan Pembangunan Perempuan	3.330.142.221	7.105.106.323
43	148	Kementerian Kegaraan PMK	634.284.357	734.2.2.836
44	150	Badan Intelijen Negara	8.278.027.297	2.278.053.177

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 13

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	(Dalam Rupiah)	
			31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
46	121	Lembaga Bencici Daerah	8.877.485.134	1.185.910.676
47	122	Dewan Komisioner Nasional	2.414.500	4.475.500
48	124	Badan Perancangan Statistik	18.293.548.500	20.780.532.611
49	125	Kementerian Kegiatan PPKB Bapenas	1.535.774.403	1.490.246.803
50	126	Badan Perumahan Nasional	55.073.263.200	50.690.367.426
51	127	Perusahaan Nasional Binaan : Irinnesia	1.117.266.784	1.287.308.615
52	128	Kementerian Koperasi	38.273.758.428	24.887.577.823
53	129	BII Kementerian Kominfo	11.175.204.016	1.978.840.780
54	130	Kepolisian RI	2.418.580.239.680	1.322.582.781.774
55	133	Dewan Pengawas Ubud dan Violen	15.802.780.532	46.524.016.301
56	134	Embaga Kedaeraha Nasional	356.642.130	1.105.102.798
57	135	Badan Koordinasi Perantamatan Model	6.156.770.586	3.496.119.692
58	136	Dewan Karkutka Nasional	16.591.276.514	10.187.431.308
59	137	Kementerian Agama PNT	12.310.000.780	1.247.413.144
60	138	Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional	666.573.768.111	521.127.671.436
61	139	Kurisik Sosial dan Kesiagaan Masyarakat	93.402.556	93.236.710
62	140	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	33.260.417.300	35.350.514.442
63	141	Kurisik Pemilhan Umum	438.117.612.183	425.220.531.572
64	142	Maklumat Konsolidasi RI	1.476.261.202	1.104.626.857
65	143	Pemeritah dan Analisis Transaksi Keuangan	595.620.672	425.657.720
66	144	Lembaga Penyelesaian Disperindagri	5.776.377.174	3.514.357.270
67	145	Dewan Teraga Nukir Nasional	65.593.761.776	42.376.394.773
68	146	Badan Pengelola dan Pengarapn Teknologi	11.322.572.374	10.498.612.406
69	147	BLU Badan Pengelola dan Pengarapn Teknologi	10.789.155	-
70	148	Lembaga Pengembangan dan Antariksa Nasional	28.107.781.354	13.315.172.816
71	149	BII Kembaga Perencangan dan Amanisa Nasional	94.230.640	92.307.620
72	150	Badan Koordinasi Survei dan Pemeterai Nasional	21.134.888.333	18.726.816.004
73	151	Dewan Standardisasi Nasional	1.01.222.700	12.280.420
74	152	Badan Pengawas Tenaga Nukir	706.885.636	460.332.070
75	153	Lembaga Administrasi Negara	1.536.880.318	1.181.661.326
76	154	Kurisik Perekonomian Republik Indonesia	334.781.177	25.380.601
77	155	Dewan Koperasi dan Nagara	10.229.132.516	32.570.636.413
78	156	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	5.134.682.211	7.400.637.020
79	157	Kementerian Perdagangan	8.388.080.577	5.205.350.540
80	158	Kementerian Perindustrian	151.612.155.418	100.656.600.733
81	159	BLU Kementerian Perhubungan	34.155.200	-
82	160	Kementerian Pariwadilan Daerah	12.480.130.273	1.216.780.816
83	161	BRN WAD - Nias	12.180.860.475	16.211.660.480
84	162	Lewan Perwakilan Daerah	1.572.278.572	1.561.617.677
85	163	Kurisik Yuktid WI	245.679.231	1.306.365.800
86	164	Badan Nasional Perangg Jangan Bencana	355.130.770.110	10.293.371.723

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 13

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	(Dalam Rupiah)	
			31 Desember 2011 (Audited)	31 Desember 2010 (Audited)
87	104	Badan Nasional Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia	70.276.330.333	21.387.746.217
88	105	Badan Perappungangan Lampung Sidoarjo	3.101.733	3.335.800
89	108	Lembaga Kebijakan Pengelolaan Barang Jasa Pemerintah	1.398.298.601	1.158.340.451
90	107	Badan SAR	8.046.788.626	5.074.112.677
91	108	Konisi Pergawas Persatuan Usaha	1.141.562.596	737.168.291
92	109	Badan Pengembangan Wilayah & Komodik	6.406.801	-
93	110	Brigade Maritim Republik Indonesia	36.182.530	-
94	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	152.272.208	-
95	200.07	JLN (Subsidi)	4.921.100.000	1.75.307.130.305
96	200.08	JLN (Bantuan)	2.521.210.010.518	2.001.310.120.742
JUMLAH			59.214.846.453.180	38.388.080.681.005

DAFTAR NERACA 350

HAKISAN PERUJAKAN HEDARA DAN PERVENTIAN MUDAL HEDARA PADA BUNYI PER 31 DESEMBER 2011

卷之三十一

www.korean-edu.com

KETTISAN PERUSAHAAN NEDARA DAN PEMERINTAH MOODA NEDARA PADA BUKU PER 31 DESEMBER 2011

卷之三

HAKITISAN PERUJUANAN HEDERA DAN PEMERINTAHAN NODAL HEDERA PADA BUMN PER 31 DESEMBER 2011

ID	Subject	WV	Status	Milestone	Performance		Resource Utilization		Timeline		Risk	
					Actual	Planned	Allocated	Spent	Remaining	Efficiency	Completion	Impact
1	System A	100%	Completed	Phase 1	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Low
2	System B	95%	In Progress	Phase 2	90%	100%	100%	95%	5%	95%	95%	Medium
3	System C	80%	Pending Review	Phase 3	75%	80%	80%	75%	25%	80%	80%	High
4	System D	70%	Planning	Phase 4	60%	70%	70%	60%	40%	70%	70%	Critical
5	System E	60%	Design	Phase 5	50%	60%	60%	50%	50%	60%	60%	Medium
6	System F	50%	Development	Phase 6	40%	50%	50%	40%	60%	50%	50%	Medium
7	System G	40%	Testing	Phase 7	30%	40%	40%	30%	70%	40%	40%	Medium
8	System H	30%	Deployment	Phase 8	20%	30%	30%	20%	80%	30%	30%	Medium
9	System I	20%	Monitoring	Phase 9	10%	20%	20%	10%	90%	20%	20%	Medium
10	System J	10%	Future Work	Phase 10	5%	10%	10%	5%	95%	10%	10%	Medium
11	System K	0%	Archived	Phase 11	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
12	System L	0%	Archived	Phase 12	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
13	System M	0%	Archived	Phase 13	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
14	System N	0%	Archived	Phase 14	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
15	System O	0%	Archived	Phase 15	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
16	System P	0%	Archived	Phase 16	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
17	System Q	0%	Archived	Phase 17	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
18	System R	0%	Archived	Phase 18	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
19	System S	0%	Archived	Phase 19	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
20	System T	0%	Archived	Phase 20	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
21	System U	0%	Archived	Phase 21	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
22	System V	0%	Archived	Phase 22	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
23	System W	0%	Archived	Phase 23	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
24	System X	0%	Archived	Phase 24	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
25	System Y	0%	Archived	Phase 25	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
26	System Z	0%	Archived	Phase 26	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
27	System AA	0%	Archived	Phase 27	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
28	System BB	0%	Archived	Phase 28	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
29	System CC	0%	Archived	Phase 29	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
30	System DD	0%	Archived	Phase 30	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
31	System EE	0%	Archived	Phase 31	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
32	System FF	0%	Archived	Phase 32	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
33	System GG	0%	Archived	Phase 33	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
34	System HH	0%	Archived	Phase 34	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
35	System II	0%	Archived	Phase 35	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
36	System JJ	0%	Archived	Phase 36	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
37	System KK	0%	Archived	Phase 37	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
38	System LL	0%	Archived	Phase 38	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
39	System MM	0%	Archived	Phase 39	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
40	System NN	0%	Archived	Phase 40	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
41	System OO	0%	Archived	Phase 41	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
42	System PP	0%	Archived	Phase 42	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
43	System QQ	0%	Archived	Phase 43	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
44	System RR	0%	Archived	Phase 44	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
45	System SS	0%	Archived	Phase 45	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
46	System TT	0%	Archived	Phase 46	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
47	System UU	0%	Archived	Phase 47	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
48	System VV	0%	Archived	Phase 48	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
49	System WW	0%	Archived	Phase 49	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
50	System XX	0%	Archived	Phase 50	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
51	System YY	0%	Archived	Phase 51	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
52	System ZZ	0%	Archived	Phase 52	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
53	System AA	0%	Archived	Phase 53	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
54	System BB	0%	Archived	Phase 54	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
55	System CC	0%	Archived	Phase 55	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
56	System DD	0%	Archived	Phase 56	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
57	System EE	0%	Archived	Phase 57	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
58	System FF	0%	Archived	Phase 58	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
59	System GG	0%	Archived	Phase 59	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
60	System HH	0%	Archived	Phase 60	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
61	System II	0%	Archived	Phase 61	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
62	System JJ	0%	Archived	Phase 62	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
63	System KK	0%	Archived	Phase 63	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
64	System LL	0%	Archived	Phase 64	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
65	System MM	0%	Archived	Phase 65	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
66	System NN	0%	Archived	Phase 66	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
67	System OO	0%	Archived	Phase 67	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
68	System PP	0%	Archived	Phase 68	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
69	System QQ	0%	Archived	Phase 69	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
70	System RR	0%	Archived	Phase 70	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
71	System SS	0%	Archived	Phase 71	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
72	System TT	0%	Archived	Phase 72	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
73	System UU	0%	Archived	Phase 73	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
74	System VV	0%	Archived	Phase 74	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
75	System WW	0%	Archived	Phase 75	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
76	System XX	0%	Archived	Phase 76	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
77	System YY	0%	Archived	Phase 77	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
78	System ZZ	0%	Archived	Phase 78	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
79	System AA	0%	Archived	Phase 79	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
80	System BB	0%	Archived	Phase 80	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
81	System CC	0%	Archived	Phase 81	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
82	System DD	0%	Archived	Phase 82	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
83	System EE	0%	Archived	Phase 83	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
84	System FF	0%	Archived	Phase 84	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
85	System GG	0%	Archived	Phase 85	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
86	System HH	0%	Archived	Phase 86	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
87	System II	0%	Archived	Phase 87	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
88	System JJ	0%	Archived	Phase 88	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
89	System KK	0%	Archived	Phase 89	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
90	System LL	0%	Archived	Phase 90	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
91	System MM	0%	Archived	Phase 91	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
92	System PP	0%	Archived	Phase 92	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
93	System QQ	0%	Archived	Phase 93	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
94	System RR	0%	Archived	Phase 94	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
95	System SS	0%	Archived	Phase 95	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
96	System TT	0%	Archived	Phase 96	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
97	System UU	0%	Archived	Phase 97	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
98	System VV	0%	Archived	Phase 98	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
99	System WW	0%	Archived	Phase 99	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
100	System XX	0%	Archived	Phase 100	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
101	System YY	0%	Archived	Phase 101	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
102	System ZZ	0%	Archived	Phase 102	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
103	System AA	0%	Archived	Phase 103	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
104	System BB	0%	Archived	Phase 104	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
105	System CC	0%	Archived	Phase 105	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
106	System DD	0%	Archived	Phase 106	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
107	System EE	0%	Archived	Phase 107	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
108	System FF	0%	Archived	Phase 108	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
109	System GG	0%	Archived	Phase 109	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
110	System HH	0%	Archived	Phase 110	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
111	System II	0%	Archived	Phase 111	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
112	System JJ	0%	Archived	Phase 112	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
113	System KK	0%	Archived	Phase 113	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
114	System LL	0%	Archived	Phase 114	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
115	System MM	0%	Archived	Phase 115	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
116	System PP	0%	Archived	Phase 116	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
117	System QQ	0%	Archived	Phase 117	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
118	System RR	0%	Archived	Phase 118	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
119	System SS	0%	Archived	Phase 119	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
120	System TT	0%	Archived	Phase 120	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
121	System YY	0%	Archived	Phase 121	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
122	System ZZ	0%	Archived	Phase 122	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
123	System AA	0%	Archived	Phase 123	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
124	System BB	0%	Archived	Phase 124	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
125	System CC	0%	Archived	Phase 125	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
126	System DD	0%	Archived	Phase 126	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
127	System EE	0%	Archived	Phase 127	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
128	System FF	0%	Archived	Phase 128	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low
129	System GG	0%	Archived	Phase 129	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Low

1930. 20 JUN 20. 1930. 20 JUN 20. 1930.

LAMPUH KELAHAN - BEMERU - KEPULAUAN RIAU

INVENTARIS PERUSAHAAN NEGERI DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN PER 21 DESEMBER 2011

Lampiran 4.b

Kd	Sbm.4	Kd/5	STATUS LEPFORM	Kd/6/5	Kd/6/6	Kd/6/7	Kd/6/8	Kd/6/9	Kd/6/10	Kd/6/11	Kd/6/12	Kd/6/13	Kd/6/14	Kd/6/15	Kd/6/16	Kd/6/17	Kd/6/18	Kd/6/19	Kd/6/20	Kd/6/21	Kd/6/22	Kd/6/23	Kd/6/24	Kd/6/25	Kd/6/26	Kd/6/27	Kd/6/28	Kd/6/29	Kd/6/30	Kd/6/31	Kd/6/32	Kd/6/33	Kd/6/34	Kd/6/35	Kd/6/36	Kd/6/37	Kd/6/38	Kd/6/39	Kd/6/40	Kd/6/41	Kd/6/42	Kd/6/43	Kd/6/44	Kd/6/45	Kd/6/46	Kd/6/47	Kd/6/48	Kd/6/49	Kd/6/50	Kd/6/51	Kd/6/52	Kd/6/53	Kd/6/54	Kd/6/55	Kd/6/56	Kd/6/57	Kd/6/58	Kd/6/59	Kd/6/60	Kd/6/61	Kd/6/62	Kd/6/63	Kd/6/64	Kd/6/65	Kd/6/66	Kd/6/67	Kd/6/68	Kd/6/69	Kd/6/70	Kd/6/71	Kd/6/72	Kd/6/73	Kd/6/74	Kd/6/75	Kd/6/76	Kd/6/77	Kd/6/78	Kd/6/79	Kd/6/80	Kd/6/81	Kd/6/82	Kd/6/83	Kd/6/84	Kd/6/85	Kd/6/86	Kd/6/87	Kd/6/88	Kd/6/89	Kd/6/90	Kd/6/91	Kd/6/92	Kd/6/93	Kd/6/94	Kd/6/95	Kd/6/96	Kd/6/97	Kd/6/98	Kd/6/99	Kd/6/100	Kd/6/101	Kd/6/102	Kd/6/103	Kd/6/104	Kd/6/105	Kd/6/106	Kd/6/107	Kd/6/108	Kd/6/109	Kd/6/110	Kd/6/111	Kd/6/112	Kd/6/113	Kd/6/114	Kd/6/115	Kd/6/116	Kd/6/117	Kd/6/118	Kd/6/119	Kd/6/120	Kd/6/121	Kd/6/122	Kd/6/123	Kd/6/124	Kd/6/125	Kd/6/126	Kd/6/127	Kd/6/128	Kd/6/129	Kd/6/130	Kd/6/131	Kd/6/132	Kd/6/133	Kd/6/134	Kd/6/135	Kd/6/136	Kd/6/137	Kd/6/138	Kd/6/139	Kd/6/140	Kd/6/141	Kd/6/142	Kd/6/143	Kd/6/144	Kd/6/145	Kd/6/146	Kd/6/147	Kd/6/148	Kd/6/149	Kd/6/150	Kd/6/151	Kd/6/152	Kd/6/153	Kd/6/154	Kd/6/155	Kd/6/156	Kd/6/157	Kd/6/158	Kd/6/159	Kd/6/160	Kd/6/161	Kd/6/162	Kd/6/163	Kd/6/164	Kd/6/165	Kd/6/166	Kd/6/167	Kd/6/168	Kd/6/169	Kd/6/170	Kd/6/171	Kd/6/172	Kd/6/173	Kd/6/174	Kd/6/175	Kd/6/176	Kd/6/177	Kd/6/178	Kd/6/179	Kd/6/180	Kd/6/181	Kd/6/182	Kd/6/183	Kd/6/184	Kd/6/185	Kd/6/186	Kd/6/187	Kd/6/188	Kd/6/189	Kd/6/190	Kd/6/191	Kd/6/192	Kd/6/193	Kd/6/194	Kd/6/195	Kd/6/196	Kd/6/197	Kd/6/198	Kd/6/199	Kd/6/200	Kd/6/201	Kd/6/202	Kd/6/203	Kd/6/204	Kd/6/205	Kd/6/206	Kd/6/207	Kd/6/208	Kd/6/209	Kd/6/210	Kd/6/211	Kd/6/212	Kd/6/213	Kd/6/214	Kd/6/215	Kd/6/216	Kd/6/217	Kd/6/218	Kd/6/219	Kd/6/220	Kd/6/221	Kd/6/222	Kd/6/223	Kd/6/224	Kd/6/225	Kd/6/226	Kd/6/227	Kd/6/228	Kd/6/229	Kd/6/230	Kd/6/231	Kd/6/232	Kd/6/233	Kd/6/234	Kd/6/235	Kd/6/236	Kd/6/237	Kd/6/238	Kd/6/239	Kd/6/240	Kd/6/241	Kd/6/242	Kd/6/243	Kd/6/244	Kd/6/245	Kd/6/246	Kd/6/247	Kd/6/248	Kd/6/249	Kd/6/250	Kd/6/251	Kd/6/252	Kd/6/253	Kd/6/254	Kd/6/255	Kd/6/256	Kd/6/257	Kd/6/258	Kd/6/259	Kd/6/260	Kd/6/261	Kd/6/262	Kd/6/263	Kd/6/264	Kd/6/265	Kd/6/266	Kd/6/267	Kd/6/268	Kd/6/269	Kd/6/270	Kd/6/271	Kd/6/272	Kd/6/273	Kd/6/274	Kd/6/275	Kd/6/276	Kd/6/277	Kd/6/278	Kd/6/279	Kd/6/280	Kd/6/281	Kd/6/282	Kd/6/283	Kd/6/284	Kd/6/285	Kd/6/286	Kd/6/287	Kd/6/288	Kd/6/289	Kd/6/290	Kd/6/291	Kd/6/292	Kd/6/293	Kd/6/294	Kd/6/295	Kd/6/296	Kd/6/297	Kd/6/298	Kd/6/299	Kd/6/300	Kd/6/301	Kd/6/302	Kd/6/303	Kd/6/304	Kd/6/305	Kd/6/306	Kd/6/307	Kd/6/308	Kd/6/309	Kd/6/310	Kd/6/311	Kd/6/312	Kd/6/313	Kd/6/314	Kd/6/315	Kd/6/316	Kd/6/317	Kd/6/318	Kd/6/319	Kd/6/320	Kd/6/321	Kd/6/322	Kd/6/323	Kd/6/324	Kd/6/325	Kd/6/326	Kd/6/327	Kd/6/328	Kd/6/329	Kd/6/330	Kd/6/331	Kd/6/332	Kd/6/333	Kd/6/334	Kd/6/335	Kd/6/336	Kd/6/337	Kd/6/338	Kd/6/339	Kd/6/340	Kd/6/341	Kd/6/342	Kd/6/343	Kd/6/344	Kd/6/345	Kd/6/346	Kd/6/347	Kd/6/348	Kd/6/349	Kd/6/350	Kd/6/351	Kd/6/352	Kd/6/353	Kd/6/354	Kd/6/355	Kd/6/356	Kd/6/357	Kd/6/358	Kd/6/359	Kd/6/360	Kd/6/361	Kd/6/362	Kd/6/363	Kd/6/364	Kd/6/365	Kd/6/366	Kd/6/367	Kd/6/368	Kd/6/369	Kd/6/370	Kd/6/371	Kd/6/372	Kd/6/373	Kd/6/374	Kd/6/375	Kd/6/376	Kd/6/377	Kd/6/378	Kd/6/379	Kd/6/380	Kd/6/381	Kd/6/382	Kd/6/383	Kd/6/384	Kd/6/385	Kd/6/386	Kd/6/387	Kd/6/388	Kd/6/389	Kd/6/390	Kd/6/391	Kd/6/392	Kd/6/393	Kd/6/394	Kd/6/395	Kd/6/396	Kd/6/397	Kd/6/398	Kd/6/399	Kd/6/400	Kd/6/401	Kd/6/402	Kd/6/403	Kd/6/404	Kd/6/405	Kd/6/406	Kd/6/407	Kd/6/408	Kd/6/409	Kd/6/410	Kd/6/411	Kd/6/412	Kd/6/413	Kd/6/414	Kd/6/415	Kd/6/416	Kd/6/417	Kd/6/418	Kd/6/419	Kd/6/420	Kd/6/421	Kd/6/422	Kd/6/423	Kd/6/424	Kd/6/425	Kd/6/426	Kd/6/427	Kd/6/428	Kd/6/429	Kd/6/430	Kd/6/431	Kd/6/432	Kd/6/433	Kd/6/434	Kd/6/435	Kd/6/436	Kd/6/437	Kd/6/438	Kd/6/439	Kd/6/440	Kd/6/441	Kd/6/442	Kd/6/443	Kd/6/444	Kd/6/445	Kd/6/446	Kd/6/447	Kd/6/448	Kd/6/449	Kd/6/450	Kd/6/451	Kd/6/452	Kd/6/453	Kd/6/454	Kd/6/455	Kd/6/456	Kd/6/457	Kd/6/458	Kd/6/459	Kd/6/460	Kd/6/461	Kd/6/462	Kd/6/463	Kd/6/464	Kd/6/465	Kd/6/466	Kd/6/467	Kd/6/468	Kd/6/469	Kd/6/470	Kd/6/471	Kd/6/472	Kd/6/473	Kd/6/474	Kd/6/475	Kd/6/476	Kd/6/477	Kd/6/478	Kd/6/479	Kd/6/480	Kd/6/481	Kd/6/482	Kd/6/483	Kd/6/484	Kd/6/485	Kd/6/486	Kd/6/487	Kd/6/488	Kd/6/489	Kd/6/490	Kd/6/491	Kd/6/492	Kd/6/493	Kd/6/494	Kd/6/495	Kd/6/496	Kd/6/497	Kd/6/498	Kd/6/499	Kd/6/500	Kd/6/501	Kd/6/502	Kd/6/503	Kd/6/504	Kd/6/505	Kd/6/506	Kd/6/507	Kd/6/508	Kd/6/509	Kd/6/510	Kd/6/511	Kd/6/512	Kd/6/513	Kd/6/514	Kd/6/515	Kd/6/516	Kd/6/517	Kd/6/518	Kd/6/519	Kd/6/520	Kd/6/521	Kd/6/522	Kd/6/523	Kd/6/524	Kd/6/525	Kd/6/526	Kd/6/527	Kd/6/528	Kd/6/529	Kd/6/530	Kd/6/531	Kd/6/532	Kd/6/533	Kd/6/534	Kd/6/535	Kd/6/536	Kd/6/537	Kd/6/538	Kd/6/539	Kd/6/540	Kd/6/541	Kd/6/542	Kd/6/543	Kd/6/544	Kd/6/545	Kd/6/546	Kd/6/547	Kd/6/548	Kd/6/549	Kd/6/550	Kd/6/551	Kd/6/552	Kd/6/553	Kd/6/554	Kd/6/555	Kd/6/556	Kd/6/557	Kd/6/558	Kd/6/559	Kd/6/560	Kd/6/561	Kd/6/562	Kd/6/563	Kd/6/564	Kd/6/565	Kd/6/566	Kd/6/567	Kd/6/568	Kd/6/569	Kd/6/570	Kd/6/571	Kd/6/572	Kd/6/573	Kd/6/574	Kd/6/575	Kd/6/576	Kd/6/577	Kd/6/578	Kd/6/579	Kd/6/580	Kd/6/581	Kd/6/582	Kd/6/583	Kd/6/584	Kd/6/585	Kd/6/586	Kd/6/587	Kd/6/588	Kd/6/589	Kd/6/590	Kd/6/591	Kd/6/592	Kd/6/593	Kd/6/594	Kd/6/595	Kd/6/596	Kd/6/597	Kd/6/598	Kd/6/599	Kd/6/600	Kd/6/601	Kd/6/602	Kd/6/603	Kd/6/604	Kd/6/605	Kd/6/606	Kd/6/607	Kd/6/608	Kd/6/609	Kd/6/610	Kd/6/611	Kd/6/612	Kd/6/613	Kd/6/614	Kd/6/615	Kd/6/616	Kd/6/617	Kd/6/618	Kd/6/619	Kd/6/620	Kd/6/621	Kd/6/622	Kd/6/623	Kd/6/624	Kd/6/625	Kd/6/626	Kd/6/627	Kd/6/628	Kd/6/629	Kd/6/630	Kd/6/631	Kd/6/632	Kd/6/633	Kd/6/634	Kd/6/635	Kd/6/636	Kd/6/637	Kd/6/638	Kd/6/639	Kd/6/640	Kd/6/641	Kd/6/642	Kd/6/643	Kd/6/644	Kd/6/645	Kd/6/646	Kd/6/647	Kd/6/648	Kd/6/649	Kd/6/650	Kd/6/651	Kd/6/652	Kd/6/653	Kd/6/654	Kd/6/655	Kd/6/656	Kd/6/657	Kd/6/658	Kd/6/659	Kd/6/660	Kd/6/661	Kd/6/662	Kd/6/663	Kd/6/664	Kd/6/665	Kd/6/666	Kd/6/667	Kd/6/668	Kd/6/669	Kd/6/670	Kd/6/671	Kd/6/672	Kd/6/673	Kd/6/674	Kd/6/675	Kd/6/676	Kd/6/677	Kd/6/678	Kd/6/679	Kd/6/680	Kd/6/681	Kd/6/682	Kd/6/683	Kd/6/684	Kd/6/685	Kd/6/686	Kd/6/687	Kd/6/688	Kd/6/689	Kd/6/690	Kd/6/691	Kd/6/692	Kd/6/693	Kd/6/694	Kd/6/695	Kd/6/696	Kd/6/697	Kd/6/698	Kd/6/699	Kd/6/700	Kd/6/701	Kd/6/702	Kd/6/70

KATISAN PERPUSTAKAAN NEGARA DAN PEMERINTAH MELAKA NEGERI PA DA BUNYI PER 21 DESEMBER 2011

卷之三

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN (LKP) TAHUN 2011

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

LOH-LAP 14.4.2

No	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHK	LPP+ BEBAN USAHK	LABA USAHK	PENJADWALAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	EBIT	BEBAN BANGKA	LABA SEBBUM PADDI	PAJAK	LABA BUCHI SEBELUM POS LUAR BIASNA	LABA RUGI SEBELUM HUK MINORITY	LABA RUGI BERSIH HUK MINORITY	(Rp Juta)	
1	Pertahanan	Pertahanan Nasional	Surat 201	7.7.600	05.2.2	3.112.	66.297	4	6 - 3.43	7	1 - 18.7	9	10.503	54.105	11 - 10.11	13	14 - 113.13
2	Pertahanan	Pertahanan Nasional	Surat 201	1.317.742	1.431.533	186.422	291.438	3.1.587	73.313	35.324	36.002	4.244	53.105	1.5.421	102.037	102.037	102.037
3	Pertahanan	Pertahanan Nasional II	Surat 201	5.553.889	5.331.251	1.370.672	95.635	1.378.507	8.252	1.680.025	425.762	1.260.133	260.275	1.260.133	260.275	1.260.133	1.260.133
4	Pertahanan	Pertahanan Nasional IV	Surat 201	1.221.110	1.321.501	192.516	105.471	1.221.110	1.20.712	1.358.908	1.20.712	1.20.712	1.20.712	1.20.712	1.20.712	1.20.712	1.20.712
5	Pertahanan	Pertahanan Nasional V	Surat 201	4.380.710	4.435.310	562.321	44.277	457.540	52.752	62.752	43.7256	17.750	370.105	82.105	370.105	370.105	370.105
6	Pertahanan	Pertahanan Nasional VI	Surat 201	1.552.614	2.005.123	247.306	33.070	18.70	28.873	23.034	23.633	19.462	17.195	13.770	17.176	17.176	17.176
7	Pertahanan	Pertahanan Nasional VII	Surat 201	4.342.329	4.342.329	208.489	57.070	19.314	617.115	202.256	20.372	30.110	50.410	13.411	13.411	13.411	13.411
8	Pertahanan	Pertahanan Nasional VIII	Surat 201	2.351.188	1.651.305	382.826	14.759	15.114	341.311	1.935	32.331	31.538	23.331	23.331	23.331	23.331	23.331
9	Pertahanan	Pertahanan Nasional IX	Surat 201	1.935.400	1.075.372	907.598	77.737	1.25.289	63.033	2.4.733	90.130	31.103	3.6.233	1.15.342	1.15.342	1.15.342	1.15.342
10	Pertahanan	Pertahanan Nasional X	Surat 201	1.310.380	1.321.219	132.281	65.117	51.19	252.175	41.387	5.1.102	2.1.102	1.15.743	1.15.743	1.15.743	1.15.743	1.15.743
11	Pertahanan	Pertahanan Nasional XI	Surat 201	1.565.900	1.621.549	363.697	42.229	50.510	1.25.283	42.916	1.17.894	11.15.929	1.15.294	1.15.294	1.15.294	1.15.294	1.15.294
12	Pertahanan	Pertahanan Nasional XII	Surat 201	1.221.873	1.011.652	185.205	1.25.361	1.25.361	1.25.361	18.251	30.156	1.25.361	1.25.361	1.25.361	1.25.361	1.25.361	1.25.361
13	XII	Pertahanan Nasional XIII	Surat 201	3.516.398	3.355.214	756.384	164.337	1.23.761	277.769	31.496	244.752	50.257	54.293	18.739	54.293	54.293	54.293
14	XII	Pertahanan Nasional XIV	Surat 201	421.226	221.207	203.917	5.934	10.543	11.10.521	42.152	1.15.224	6.900	1.15.434	1.15.434	1.15.434	1.15.434	1.15.434
15	XII	Pertahanan Nasional XV	Surat 201	4.343.350.02	4.014.350.12	268.485	11.035.136	164.139	16.229	1.15.022	71.227	63	1.15.731	1.15.731	1.15.731	1.15.731	1.15.731
16	XII	Pertahanan Nasional XVI	Surat 201	3.157.562	3.833.729	308.808	14.552	36.70	40.752	40.752	40.752	11.165	9.147	3.1.147	3.1.147	3.1.147	3.1.147
17	XII	Pertahanan Nasional XVII	Surat 201	17.239.95	7.7.529	337	2.04.0	10.473	9.605	9.605	9.605	9.139	1.15.521	1.15.521	1.15.521	1.15.521	1.15.521
18	XII	Pertahanan Nasional XVIII	Surat 201	74.73	2.3.5	1.032	13.571	315	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
19	XII	Pertahanan Nasional XIX	Surat 201	74.73	2.3.5	1.032	13.571	315	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032

DRAFT MENGACAH 250

卷之三

INTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2011
PERDAPATAN, BEBAN DAN LABA BERSIH BERSIH

卷之三

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN (LKP) TAHUN 2011

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

LOH-LAP 14.4.2

No	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHK	LPP+ DEBAN USAHK	LABA USAHK	PENIAPATA M.LNM.	BEBAN LAIN	EBIT	BEBAN BANGKA	LABA SEBBUM PAJAKI	PAJAKI	LABA BUCHI SEBELUM BIASNA	LABA RUGI BERSIH	HAK MINORITAS	(Rp Juta)		
33	P	Pelabur	Kuifid 201	1.235.582	1.275.146	3.112	1.0249	51.040	6 - 3.437	7	1 - 18.71	9	10 - 6.891	11	12 - 10.111	13	14 - 113.131	
44	P	Dutarz	Soli, jd 301*	345.112	344.317	51. 98	4.638	22.364	10.422	37.935	59.023	10.352	41.203	4.169	10.245	1.245	47.201	
45	P	Fr. Keban Steel Tk.	Kuifid 301	17.205.862	17.553.311	346.57	184.857	370.361	1.150.567	1.120.887	38.72	1.025.53	1.120.887	38.72	1.025.53	1.275	47.411	
46	P	Kantil Jit. S.	11. K.1.1-1.3110	320.073.836	355.192.3	62.313	2.051	2.66	11.232	21.721	40.352	1.262	41.352	1.262	40.352	1.275	29.281	
47	P	Raksa Inti	Kuifid 201	3.29.043	4.21.637	38.406	3.420	5.429	7.115	25.375	9.174	14.754	12.355	1.255	12.355	1.255	16.954	
48	P	Raksa Finc	Kuifid 201	1.75.239	1.75.239	1.15.0	1.020	1.110	925	11.587	5.547	17.331	17.331	17.331	17.331	17.331	17.331	
49	P	Emarit Lakir	Fr. Emarit Lakir	470.082	457.212	18.934	51.677	48.781	48.781	46.231	3.587	43.463	43.463	43.463	43.463	43.463	43.463	
50	P	Fr. Emarit Lakir	Kuifid 201	261.549	233.368	33.734	4.140	12.377	12.377	5.654	5.354	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541	9.541	
51	P	Fr. Iks. Grahita Indus	11. K.1.1-1.3110	46.072	46.283	32.7	20.65	20.65	20.65	16.230	140.580	140.580	140.580	140.580	140.580	140.580	140.580	
52	P	Iklan Indus	Kuifid 201	6.768	38.735	350.41	201.632	16.230	16.230	11.711	5.624	6.23	2.503	3.505	3.505	3.505	3.505	20.951
53	P	Iklan Indus	Kuifid 201	1.16.302	2.11.200	6.552	3.677	3.336	11.711	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	14.861
54	P	Finsatua	Kuifid 201	51.320	2.1.326	1.463	2.024	2.37	2.37	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	2.625
55	P	Iks. Iks	Soli, jd 701	11.1.703	21.1.552	67.357	34.876	11.1.552	11.1.552	7.258	25.834	10.277	15.6.139	15.6.139	15.6.139	15.6.139	15.6.139	1.821
56	P	Iklan Indus	Kuifid 201	34.719	5.345	1.429	11.1.552	11.1.552	11.1.552	5.455	22.0.94	40.2	12.411	12.411	12.411	12.411	12.411	22.421
57	P	Iklan Indus	Fr. Iklan Indus	1.56.011	1.621.252	287.363	67.022	56.220	251.372	1.946	2.552	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
58	P	Perint. 31.12	Kuifid 201	41.1.96	8.157	5.322	3.955	5.692	16.301	1.946	2.552	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
59	P	Perint. 31.12	Kuifid 201	33.0	2.726	1.956	1.673	1.246	9.123	7.861	2.345	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122
60	P	Perint. 31.12	Kuifid 201	4.422	5.316	30.301	14.231	30.219	10.105	3.045	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105	2.341
61	P	Perint. 31.12	Kuifid 201	-	27.934	23.0	633	633	35.208	35.208	35.208	35.208	35.208	35.208	35.208	35.208	35.208	

DRAFT MENCAP 230

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGERA BUMN TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

No	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHK	NPP+ DEBAN USAHK	LABA USAHK	PENDAPATAN LAIN-LAIN	DEBAN LAIN-LAIN	EBIT	BEBAN BANGKA	LABA SERBUK PAGDI	PAJAK	LABA BUCHI SEBELUM POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HUK MINORITAS	(Rp Juta)			
63	Perusahaan	P.T. Adiwina Tbk	Kuartal 201	1.222.462	2	3.112.	1.155.0	91.989	2.239	17.762	21.277	1 - 10.75	9	10 - 6.891	11	11 - 10.11		
64	Perusahaan	P.T. Karya Tama Tbk	Kuartal 201	3.451.088	1	3.251.122	222.004	2.033	2.033	244.167	2.036	23.025	30.342	10.302	30.342	17.734	1 - 56.917	
65	Perusahaan	P.T. Bina Graha	Kuartal 201	694.573	1	538.759	306.756	306.756	41.643	27.772	20.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	1 - 171.792	
66	Perusahaan	P.T. Indofood Tbk	Kuartal 201	1.291.300	49.113.110	21.26.100	1.049.100	1.049.100	2.365.100	21.26.100	2.365.100	1.049.100	1.049.100	1.049.100	1.049.100	1.049.100	1.049.100	
67	Perusahaan	P.T. WTI	Kuartal 201	723.117	697.433	25.684	14.955	12.767	72.395	25.477	12.547	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432	10.432	
68	Perusahaan	P.T. LPI Indah	Kuartal 201	1.355.029	1.257.310	90.610	11.057	20.89	57.985	39.117	19.432	39.704	11.196	42.052	11.196	42.052	11.196	42.052
69	Perusahaan	P.T. PTSC Anggaran	Kuartal 201	147.411	123.305	5.812	1.533	3.285	3.285	5.51	5.51	7.3	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
70	Perusahaan	P.T. Prima Produktif Tbk	Tujuan 201	6.020	7.117	1.008.911	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	Layanan	P.T. PSH-SK-TDN (PTPS)	Kuartal 201	208.317.824	193.197.629	14.550.264	2.381.229	1.245.217	2.381.229	1.245.217	2.381.229	1.245.217	6.78.302	6.78.302	6.78.302	6.78.302	6.78.302	6.78.302
72	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia I	Kuartal 201	1.153.653	821.338	322.577	13.211	69.787	261.106	260.79	260.79	260.79	26.361	21.336	21.336	21.336	21.336	21.336
73	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia II	Kuartal 201	4.436.889	2.912.341	1.552.892	695.916	149.383	2.059.289	19	2.089.289	19	1.683.214	42.272	1.683.214	42.272	1.683.214	42.272
74	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia III	Kuartal 201	2.647.153	2.223.113	1.371.410	85.423	67.110	1.352.733	45.4	1.383.932	37.523	858.120	1	858.120	1	858.120	1
75	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia IV	Kuartal 201	327.069	63.226	387.868	85.539	11.380	351.286	38.293	38.293	38.293	25.405	26.005	26.005	26.005	26.005	26.005
76	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia V	Kuartal 201	1.356.709	2.356.233	2.310.704	304.650	118.415	F06.735	11.126	54.472	54.472	54.472	54.472	54.472	54.472	54.472	54.472
77	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia VI	Kuartal 201	2.436.410	2.194.473	1.312.097	224.011	96.129	1.270.138	1.270.138	1.270.138	1.270.138	1.270.138	1.270.138	1.270.138	1.270.138	1.270.138	1.270.138
78	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia VII	Kuartal 201	2.356.591	536.573	140.309	161.516	25.458	25.458	25.458	25.458	25.458	25.458	25.458	25.458	25.458	25.458	25.458
79	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia VIII	Kuartal 201	8.05	78.489	5.52	2.657	0.0	7.932	9.1	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
80	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia IX	Kuartal 201	360.433	64.527	7.158	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
81	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia X-A	Tujuan 201	1.510.002	2.11.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240
82	Perusahaan	P.T. Pakarjaya Indonesia XI	Kuartal 201	2.11.240	1.01.240	2.11.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240	1.01.240

DRAFT MNRCA 239

IKHTISAR LAPORAN KELUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA BERSIH BERSIH

MÉMOIRE D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

NETIE WEBINAR

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGERA BUMN TAHUN 2011
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

LOH-LAP-14.4.2

No	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHK	NPP+ BEBAN USAHK	LABA USAHK	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEBAN LAIN-LAIN	EBIT	BEBAN BANGKA	LABA SERBUJU PAGI	PAJAK	LABA BUCHI SEBELUM POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HUK MINORITAS	(Rp Juta)	
101		" Konsorsium Infrastruktur Nasional " p	Untuk 2011	1.7.60	1.2.17	31.326	63.298	1.737	392	1.261	-	1.231	1.205	1.239	1.205	
104	105	P-14.01.01.06	Untuk 2011	344.184	242.308	55.915	323	4.610	4.638	54.721	15.173	425	504	374	374	
105	107	P- Binaan dan Perkembangan Bumi	Untuk 2011	21.515.105	21.515.105	21.515.105	12.702.371	1.629.381	1.512.235	16.512.035	3.815.170	2.765.845	21.127.79	17.230.955	44.531	44.531
107	109	P- Bank Mandiri	Untuk 2011	2.151.549	2.151.549	2.151.549	1.245.772	1.206.059	22.077.205	13.713.901	3.637.582	5.001.965	205.55	14.019.491	9.100	14.017.295
109	110	P- Bank BNI Tbk	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
110	111	P- Bank BNI Tbk	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
111	112	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
112	113	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
113	114	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
114	115	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
115	116	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
116	117	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
117	118	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
118	119	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
119	120	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
120	121	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
121	122	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
122	123	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
123	124	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
124	125	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
125	126	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
126	127	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
127	128	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
128	129	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
129	130	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
130	131	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
131	132	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
132	133	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
133	134	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
134	135	P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278
135		P- BNI DTV Bhd	Untuk 2011	2.361.192	7.439.592	13.125.518	1.7.103.8	3.450.583	7.531.308	7.30.305	1.651.50	5.000.13	63.326	580.34	110.278	100.278

DAFTAR MELIHAT

DAFTAR MELIHAT

ESTATE PLANNING FOR THE RETIREMENT MARKET

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2011
PENGATURAN, BERAN, DAN LABA BERSIH

ਪੰਜਾਬ ਮੈਲ

14.000,- 12.500,- 10.000,- 8.000,- 6.000,-

14.000,- 12.500,- 10.000,- 8.000,- 6.000,-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA
NEGERA PER 31 DESEMBER 2011

PERUSAHAAN NEGARA LEMBAGA DILAKUKAH PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN

No	PERUSAHAAN NEGARA LEMBAGA	SUMBER	AKTIVA LAIN	AKTIVA TIDAK LAMAR	TOTAL AKTIVA	KETRIJAWAAN PENGELUARAN	KEWILAYAHAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWILAYAHAN JANGKA PANJANG	HARGA MINORITAS	MODAL SAHAM DILAKUKAH RENCANA	TAMBAHAN MODAL DILAKUKAH	EKUITAS LAIN	LABA DILAKUKAH	TOTAL EKUITAS MEWARAH	% SAHAM MEWARAH	KEPERLUAN RENCANA	(dalam juta Rupiah)
1	JABATAN DILAKUKAH RENCANA	Saldo 2011	25.356.222	6.657	25.362.879	211.336	1.146.651	12.161.651	1.146.651	0.321.016	0.321.016	4.118	59.643	6.363.164	100%	5.863.344	
2	1. SALAHSATU DAN SERDUA	Salah 2011	2.185.863	2.177	2.187.040	4.016.612	1.408.291	6.362	2.108.023	2.032.200	2.032.200	-	-	2.032.200	100%	2.032.200	
3	2. TIGA RIBU SEMBELUH	Salah 2011	1.017.160	308.48	1.325.648	5.913.595	14.751	5.019	17.820	2.032.200	2.032.200	-	-	165.348	2.552.526	100%	2.617.874
4	3. SEPULUH RIBU DUA RIBU LIMA	Salah 2011	2.724.578	7.13	2.731.717	3.328.631	21.177	188	3.743	3.532.200	3.532.200	-	-	743.272	3.233.782	100%	3.203.782
5	4. SEPULUH RIBU DUA RIBU LIMA	Salah 2011	172.487	1.63.30	183.137	16.242	7.010	10.960	21.725.443	21.725.443	21.725.443	88.201	1.632.367	718.201	1.816.177	100%	1.027.526
	TOTAL																16.463.774

PENDAPATAN, BEAM, DAN LABA (RUGI) BERSIH
UNTUK PERIODE TAHUN 2011 DESember 2011
PERUSAHAAN NEGERA/LEMBADA DIBAWAH PEMERINTAH KEBANGSAAN

NO	PERUSAHAAN NEGERA/LEMBADA	SUMBER	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BEAM LAIN-LAIN	EBIT	BEBAN BULOG	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI BERSIH	HAK MINORITAS	HAK MAJORITAS	LABA RUGI BERSIH
1	PT BUMN PERTAMBANGAN DAN ENERGI	jumlah 701	PT BUMN	116.959	561.749	2.511	-	543.730	-	543.730	10.118	481.644	5.357	486.376	13	14 = 12.13	
2	PT SGR&PTT GRUP TRANSFUSI	jumlah 201	PT BUMN	114.10	23.506	32.344	2.02	84.847	-	84.847	4.036	80.819	3.238	-	-	-	80.496
3	PT SGR&PTT TRANSFUSI	jumlah 201	PT BUMN	67.72	67.72	135.91	58.29	94.92	-	93.932	1.364	92.568	3.338	-	-	-	92.298
4	PT SUMBER MULIA HUTAN	jumlah 201	PT BUMN	53.740	134.530	3.740	9.41	91.31	-	91.31	33.091	58.74	61.612	15.664	-	-	15.664
5	PT SMC DINDI THEDO	jumlah 201	PT BUMN	156.179	30.350	11.323	1.640	170.032	-	170.032	5.318	173.856	5.356	178.506	-	-	178.506

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUDITED)

DAFTAR 14.C

**Daftar BPYBDS pada BUMN
PER 31 Desember 2011**

No.	BUMN	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
1	Perum DAMRI	161.462.000.000,00	145.810.132.570,00
2	Perum PPD	67.770.841.810,00	67.770.841.810,00
3	PT Kereta Api Indonesia	826.546.294.645,00	826.546.294.645,00
4	PT Perusahaan Listrik Negara	20.040.436.783.477,00	36.028.022.757.584,00
5	Perum Jasa Tirta I	1.131.342.305,00	1.131.342.305,00
6	PT Angkasa Pura I	3.393.080.807.000,00	1.658.828.138.178,01
7	PT Angkasa Pura II	2.221.583.000.000,00	2.065.258.136.834,68
8	Perum BULOG	670.113.824.005,00	751.610.346.381,00
9	PT Pelindo I	435.700.207.506,00	56.800.815.000,00
10	PT Pelindo II	0,00	7.652.076.000,00
11	PT Pelindo III	209.730.528.118,00	209.730.528.118,00
12	PT Pelindo IV	68.176.454.500,00	320.700.155.600,00
13	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	1.304.810.487.854,00	1.047.255.575.783,00
14	Perum Percetakan Negara Indonesia	1.003.285.000,00	506.280.000,00
15	Perum Prasarana Perikanan Samudra	47.036.685.555,00	47.036.685.555,00
16	PT Djakarta Lloyd	667.188.771.346,05	667.188.771.346,05
17	PT Pelayaran Nasional Indonesia	2.997.874.185.088,93	2.931.814.461.210,00
18	Perum Perumnas	5.068.434.600,00	5.068.434.600,00
19	PT Pos Indonesia	29.936.024.480,00	21.326.953.360,00
20	Perum LKBN Antara	0,00	25.927.871.002,00
21	PT Pengrukan Indonesia	0,00	58.608.072.481,05
22	Perum produksi Film Negara (PFN)	14.903.777.061,00	14.903.777.061,00
23	PT Pertamina	520.917.902.842,48	588.201.887.308,47
24	PT Geo Dipa Energi	1.670.877.372.176,00	0,00
Jumlah		44.364.558.159.478,40	47.527.099.985.351,20

DAFTAR 365

LAPORAN KEGIATAN PEMERINTAH PADA TAHUN 2011 (K29/SZ)

CATATAN

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA PERUSAHAAN NEGARA MINORITAS
PER 31 DESEMBER 2011**

No.	Nama Perusahaan	Sumber al	% Saham Kepemilikan RI	Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah Per 31
1	PT Indonesia Academy of Management (INALMI)	Audited 2011 (31 Maret 2012)	41,73%	8.384.000.000,-	3.449.143.638.359
2	PT Sinar Mas Agribusiness and Investment (SMAI)	Audited 2011	50,00%	224.367.675.116	112.683.838.058
3	PT Jaya Wijaya Indah Estate Purbalingga (JIEF)	Unaudited 2011	50,00%	210.052.233.000	105.026.10.000
4	PT Asiaean Aceh Ferolza	Picasa Lihdas			-
5	PT Asiaean Copper Product	r.e.			-
Jumlah I					3.668.659.494.413
No.	Nama Perusahaan	Sumber al	Saham	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham
1	PT Barito Pacific	Audited 2011	A	0,05%	4.736.255
		Audited 2011	E	13,00%	1.034.532.376
2	PT Pekayon Industri (PEKINDO)	Audited 2011		4,97%	22.366
3	PT Transnet Indonesia	Unaudited 2011	Mass	9,02%	21.310
4	PT Garuda Padalarang	Unaudited 2011		1,49%	29.030
5	PT Financi, Tbk	Audited 2011	Per B	14,76%	776.024.965
6	PT Washita Karya	Audited 2011		1,00%	130.070
7	PT Sencindo	Unaudited 2011	Ber D		265.000
		Unaudited 2011	Ber C		794.715.000
		Unaudited 2011	Ber D		2.000
		Unaudited 2011	Total	10%	42.260.000.000
8	PT Freedome purnama Jembatan Indonesia (FPLI)	Audited 2010			40.578.225.000
9	PT Asiaean Briliant Ferolza	Audited 2010		13%	39.000
JUMLAH II					593.097.113.750
JUMLAH I + II					4.261.656.608.163

CATATAN

JN-TB.313

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA ORGANISASI LEMBAGA KEDILAKUAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2011**

No	LEMBAGA KEDILAKUAN INTERNASIONAL	TOTAL PENYERTAAN MODAL			Penyelesaian yang masih Berberlaku
		Mata Uang	USD	IDR	
1	Bank Indonesia dan Bank Investasi dan Asuransi Tbk	3,315 3,315	196,331,300,00	3,312,278,533,30	2,311,080,740,488,80
2	PTBN Bank Group				
3	International Bank for Reconstruction and Development	1,310	10,215,773,92	398,980,831,55,93	96,741,582,236,573,40
4	International Bank for Economic Development	1,310	15,557,837,20	4,078,435,3,8,00	1,585,20
5	International Finance Corporation	1,310	29,599,000,00	259,738,852,000,00	5,751,39,887,8
6	Wu, Alfred Insurance Companies Agency	1,310	3,737,822,00	31,198,831,780,00	1,295,343,224,00
7	Islamic Development Bank	1,310	30,772,53,13	729,921,534,35,83	
8	Islamic Corporation for Investment Research	1,310	2,060,000,00	8,880,030,000,00	
9	Islamic Corporation for Insurance and Investment	1,310	182,73,89	1,742,77,8,67	
10	Islamic Corporation for Investment and Development	1,310	39,374,000,00	433,028,272,000,00	
11	Common Fund for Commodities	1,310	3,8,023,51	31,831,19,89	
12	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector	1,310	5,225,000,00	41,380,310,000,00	2,425,000,00,9,00
13	Great Eastern Life Insurance Company	1,310	72,500,000,00	4,246,830,000,00	
	Jumlah total		3,914,414,758,78	35,495,913,032,569,90	25,978,352,436,5

Catatan:

1. Fonds Operasional Pendidikan Tinggi (FOP) : modal awal sebesar Rp 1,200,- = USD 1,563,88

2. Fonds Operasional Pendidikan Tinggi (FOP) : modal USD 1,306,-

3. Fonds Operasional Pendidikan Tinggi (FOP) : modal USD 1,139,88

4. Fonds Operasional Pendidikan Tinggi (FOP) : modal USD 1,139,88

5. Kurs : 1 rupiah = 0,0012 dolar Amerika Serikat

6. Pada tahun 2012 diperkirakan jumlah penyertaan modal pada Organisasi Internasional akan bertambah sebesar 1,2%

Kriteria dan klasifikasi penyertaan modal berdasarkan ketentuan peraturan

Kriteria dan klasifikasi penyertaan modal berdasarkan ketentuan peraturan

WITAR : TRAC : 367

ASSET TETAP PADA K.L.DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

תְּנַשֵּׁא בֶּן־בָּנָה יְמִינָה וְעֲלָיו תְּנַשֵּׁא בֶּן־בָּנָה יְמִינָה

ASET TETAP PADU K.L.DAN BUM
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

THE JOURNAL OF CLIMATE VOL. 13, NO. 10, OCTOBER 2000

ג'ז עירוני

LAPORAN SETIAHAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 MULAI 01

ASSET TETAP PADA KALDAM BUNI
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	Bd.	Kemudahan dan peralatan	Tgl. awal	Tgl. akhir	Perubahan	Nilai awal	Nilai akhir	JUMLAH BAHAN BAKU DAN BAHAN		45% TERSEDIA DIAWA	30% TERSEDIA DIAWA	20% TERSEDIA DIAWA	KEMUDAHAN DAN PERALATAN
								No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
01	11	Kereta api dan kereta	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	12	Bahan bakar dan minyak	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	13	Bahan kimia dan zat kimia	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	14	Peralatan dan mesin	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	15	Alat tulis dan alat kantor	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	16	Alat komunikasi	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	17	Alat pertanian	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	18	Alat pertambangan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	19	Alat bangunan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	20	Alat medis	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21	Alat olahraga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	22	Alat sekolah	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	23	Alat rumah tangga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	24	Alat lainnya	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	25	Alat teknologi	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	26	Alat kesehatan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	27	Alat pertanian	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	28	Alat pertambangan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	29	Alat bangunan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	30	Alat medis	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	31	Alat olahraga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	32	Alat sekolah	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	33	Alat rumah tangga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	34	Alat lainnya	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	35	Alat teknologi	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	36	Alat kesehatan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	37	Alat pertanian	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	38	Alat pertambangan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	39	Alat bangunan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	40	Alat medis	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	41	Alat olahraga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	42	Alat sekolah	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	43	Alat rumah tangga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	44	Alat lainnya	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	45	Alat teknologi	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	46	Alat kesehatan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	47	Alat pertanian	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	48	Alat pertambangan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	49	Alat bangunan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	50	Alat medis	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	51	Alat olahraga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	52	Alat sekolah	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	53	Alat rumah tangga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	54	Alat lainnya	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	55	Alat teknologi	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	56	Alat kesehatan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	57	Alat pertanian	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	58	Alat pertambangan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	59	Alat bangunan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	60	Alat medis	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	61	Alat olahraga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	62	Alat sekolah	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	63	Alat rumah tangga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	64	Alat lainnya	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	65	Alat teknologi	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	66	Alat kesehatan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	67	Alat pertanian	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	68	Alat pertambangan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	69	Alat bangunan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	70	Alat medis	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	71	Alat olahraga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	72	Alat sekolah	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	73	Alat rumah tangga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	74	Alat lainnya	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	75	Alat teknologi	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	76	Alat kesehatan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	77	Alat pertanian	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	78	Alat pertambangan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	79	Alat bangunan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	80	Alat medis	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	81	Alat olahraga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	82	Alat sekolah	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	83	Alat rumah tangga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	84	Alat lainnya	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	85	Alat teknologi	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	86	Alat kesehatan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	87	Alat pertanian	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	88	Alat pertambangan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	89	Alat bangunan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	90	Alat medis	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	91	Alat olahraga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	92	Alat sekolah	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	93	Alat rumah tangga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	94	Alat lainnya	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	95	Alat teknologi	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	96	Alat kesehatan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	97	Alat pertanian	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	98	Alat pertambangan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	99	Alat bangunan	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	100	Alat medis	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	101	Alat olahraga	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	102	Alat sekolah	2010-01-01	2010-12-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	103	Alat rumah tangga											

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (402/2777)

Dc - KR 18

**TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2011 Audited			31 Desember 2010 Audited
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
1	004	EPK	1.773.342.370	1.778.3-3.870	-	1.432.709.333
2	005	MN	1.927.626.705	1.903.812.819	23.813.891	417.157.718
3	108	Gedekan Agung	345.904.815	-	345.904.815	4.194.310
4	007	Sekretariat Negara	56.053.000	(280.475)	55.772.525	-
5	010	Gubernur Daerah Negeri	10.473.098.238	-	10.473.098.238	243.148.228
6	011	Gubernator Luar Negeri	1.026.200.400	(397.975)	1.025.802.525	4.137.974.529
7	012	Gubernator Provinsi	4.243.250.000	-	4.243.250.000	755.434.709
8	013	Gubernator Hukum dan HAM RI	423.564.049	-	423.564.049	5.402.015.370
9	015	Gubernator Kepulauan	38.441.080	(132.210)	38.308.870	186.421.378
10	016	Gubernator Perseorangan	7.117.064.820	(1.801.438.270)	5.315.626.550	7.849.821
11	015	Gubernator Perintiner	10.059.000	(903.475)	10.189.525	35.789.343
12	020	Gubernator ESDM	33.957.000	(39.042.360)	35.314.040	485.841.937
13	022	Gubernator Perekonomian	423.135.811	(1.312.745)	421.823.066	-
14	023	Gubernator Pendidikan Nasional	12.350.000	-	12.350.000	131.000.000
15	028	KOIN Komisi Penyalahgunaan Sosial	134.000.000	-	134.000.000	-
16	024	Gubernator Kesehatan	805.000.357	(31.720.387)	837.785.390	815.411.747
17	024	KOIN Komisi Kesehatan	29.900.000	-	29.900.000	25.920.000
18	026	Gubernator Agama	-	-	-	4.020.200
19	020	Tanaga Pers dan Tenaga Kesa	-	-	-	-
20	027	Gubernator Sosial	686.024.331	(654.239.900)	4.817.431	7314.000
21	028	Gubernator Kependidikan	-	-	-	34.891.481
22	032	Gubernator Keuangan dan Perdagangan	-	-	-	48.383.872
23	033	Gubernator Penerbangan Internasional	59.388.500.000	(349.188.100)	59.040.148.100	118.889.014.00
24	034	Gubernator Pidang Politik dan Keamanan	35.121.044	(105.005)	35.015.939	46.372.627
25	040	Gubernator Gospolymer dan Pariwisata	135.280.035	(77.350.055)	24.930.000	207.743.035
26	041	Gubernator Negara S. M.	69.973.002	-	69.973.002	-
27	043	Gubernator Negara Lingkungan Hidup	1.863.000.000	-	1.863.000.000	1.540.000.000
28	044	Gubernator Negara C. C.M	114.403.034	-	114.403.034	114.403.034
29	054	103	146.837.549	(24.782.514)	122.055.035	138.212.243
30	055	Gubernator Negara EPW Bepernaya	-	-	-	14.270.000
31	060	Pada Perintiner Nasional	3.299.476.133	(2.190.300.825)	1.109.077.308	2.084.302.009
32	065	Gubernator Kominfo	73.163.184	-	73.163.184	545.779.102
33	066	Sekretariat R	423.281.018	(24.300.010)	249.981.008	258.724.084
34	068	PPOM	-	-	-	15.450.000
35	067	Gubernator Negara PII	6.000.000	-	37.000.000	48.000.000
36	076	JPK	53.406.444.530	(53.470.475.704)	16.064.700	15.030.621
37	090	Pada Tenaga Kuli Nasional	20.295.372.479	(26.223.710.973)	41.915.375	3.029.824.292
38	091	PPFT	40.713.310.577	(46.047.780.354)	70.323.003	-
39	082	JPAK	1.123.812.578	(1.132.525)	1.172.228.651	23.325.000
40	088	Pakuruan	72.900.000	(11.250)	72.888.750	25.420.000
41	086	Sudan Pengawas Tenaga Nukir	54.673.298	(1.733.581)	52.940.717	42.379.248
42	097	AVR	-	-	-	2044.132
43	098	PNM	305.950.045	(305.950.045)	-	-
44	099	PPKE	24.345.068.482	(24.343.058.452)	-	14.070.000
45	090	Gubernator Perdagangan	692.881.250	(2.28.381)	690.602.869	698.788.862
46	108	SPRI	8.821.020	(3.323.720)	1.137.300	-
47	399.03	KOIN Seluruh Indonesia	-	-	-	14.471.873
		TOTAL	249.628.424.418	(157.010.079.393)	92.492.345.025	38.224.744.301

TAMAR KTRAD 4.021

**ASET TAK BERWIJUD DAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

No.	BA	Kementerian/Negara/Lembaga	ASET TAK BERWIJUD		ASET LAIN LAIN	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2010 Audited
1	001	NPK	333.829.940	307.032.440	307.611.200	304.773.300
2	002	DPR	1.277.405.370	1.074.235.570	27.403.430.658	27.406.400.653
3	004	DYK	48.201.373.781	24.841.047.711	26.300.729.003	15.729.380.140
4	005	NA	10.653.237.078	10.720.067.338	14.329.970.254	12.307.963.577
5	006	Kelautan & Perikanan	2.484.073.122	2.118.026.877	9.377.886.224	11.043.091.476.041
6	007	Sekretariat Negara	12.662.381.414	11.424.156.389	1.948.657.533.617	2.122.784.617.814
7	008	R. I. Republik Indonesia	724.599.000	40.981.500	357.825.135.526	582.753.625.543
8	010	Kementerian Dalam Negeri	751.443.021.142	215.441.562.039	107.358.116.011	20.655.346.383
9	011	Kementerian Luar Negeri	12.758.120.581	5.408.639.711	187.709.974.536	302.713.716.508
10	012	Kementerian Pertahanan	262.553.511.930	141.359.725.324	3.520.434.367.679	3.000.321.272.971
11	013	Kementerian Riset dan Teknologi	205.237.070.178	154.287.912.472	79.352.911.315	5.774.124.331
12	015	Kementerian Kesehatan	474.663.975.096	306.493.002.592	246.380.231.600	569.617.026.647
13	016	B.I. Kementerian Keuangan	2.888.418.780	808.653.780	79.131.782.074	70.416.161.384
14	018	Kementerian Pertanian	13.254.105.300	10.203.125.745	251.030.034.245	291.702.764.831
15	019	D.L. Kementerian Perindustrian	4.482.782	-	240.010.315	-
16	019	Kementerian Perindustrian	6.309.700.586	4.647.804.539	65.910.500.709	4.213.124.240
17	020	Kementerian Sosial	1.631.491.871.235	1.671.561.169.325	712.181.291.764	4.628.401.570.983
18	020	B.L. Kementerian ESDM	-	-	-	1.813.131.600
19	022	Kementerian Pekerjaan Umum	1.466.853.757.842	1.174.363.426.410	1.157.498.645.717	144.213.272.102
20	023	B.L. Kementerian Pekerjaan Umum	21.003.296.313	15.598.036.216	1.2.200.000	-
21	023	Kementerian Pendidikan Nasional	291.717.973.500	216.631.054.817	133.123.931.272	13.409.750.259.271
22	023	B.L. Kementerian Pendidikan Nasional	82.024.011.330	24.824.912.152	19.813.493.881	1.822.447.739
23	024	Kementerian Koordinator	42.817.291.751	31.871.560.031	8.758.274.610.169	2.807.986.703.011
24	024	R. I. Kementerian Kesehatan	23.377.871.313	22.029.734.493	56.105.893.769	36.077.526.470
25	025	Kementerian Kesehatan	17.000.925.207	25.180.911.757	7.6.617.517.762	24.277.066.000
26	025	D.L. Kementerian Agama	15.051.399.401	10.743.026.334	3.1.4.044.489	2.573.328.933
27	026	Taruna Karya dan Transmigrasi	34.857.201.873	8.644.297.493	2.251.751.891.111	2.723.035.313.357
28	029	R. I. Tim Pengelolaan Transmigrasi	233.452.200	4.273.000	135.139.000	129.106.000
29	031	Kementerian Sosial	16.620.450.784	8.700.973.584	21.788.713.387	25.483.312.500
30	032	Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam	92.811.559.679	36.028.890.407	33.330.737.436	1.871.893.361.313
31	033	Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam	26.870.743.723	16.745.222.371	95.370.157.264	47.549.386.231
32	033	Kementerian Pendidikan Umum	4.251.353.850.388	3.252.332.454.783	475.711.122.701	373.870.324.911
33	034	B.L. Kementerian Pendidikan Umum	-	619.990.000	-	-
34	034	Kementerian Bidang Perekonomian	26.020.001.130	16.824.912.380	1.237.717.821	282.036.440
35	035	Kementerian Binaan Perumahan	7.7.313.750	1.39.432.000	-	-
36	036	Kementerian Binaan Perumahan	2.187.216.560	595.443.000	-	207.134.000
37	040	Kementerian Kabupaten dan Perkotaan	12.122.912.500	7.617.556.000	3.783.623.241	8.453.375.451
38	047	Kementerian Negara DPMPTSP	18.259.921.862	18.801.436.362	4.803.412.561	8.809.784.751
39	048	Kementerian Negara Perhubungan	41.800.426.843	41.233.892.932	34.341.834.811	20.529.521.080
40	049	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	12.354.441.683	8.594.999.000	5.029.222.412	3.053.364.049
41	049	Kementerian Negara RTRW	12.322.102.860	1.611.173.000	31.318.913.952	61.626.672.621
42	051	B.L. Kementerian Negara ESDM	12.330.003.000	12.750.216.500	-	29.000.000
43	052	Kementerian Negara Perdagangan	7.250.305.900	5.200.530.600	344.949.647	1.409.947.596
44	052	Kementerian Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.004.023.730	1.879.023.730	236.251.398	1.095.880.063
45	055	R. I.	375.007.047.700	370.420.862.070	3.183.187.009	-
46	057	LSN	30.664.005.369	23.529.400.291	-	-
47	058	Devisa Kebutuhan Nasional	3.575.883.374	2.430.166.211	-	4.464.150.087
48	059	BPS	12.359.274.923	12.349.331.304	35.209.833.288	27.849.906.848
49	060	Kementerian Negara PPPK, Bappenas	15.593.826.378	18.593.826.384	33.173.284.903	64.276.546.979
50	060	Badan Persewatan Nasional	136.051.563.051	65.312.130.571	20.7.229.01.224	7.305.921.452
51	061	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	55.767.076.002	45.659.106.542	583.037.583	583.037.583

347-1 NETACA 572

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PLSATTA (JUN 2011) (AUDITED)

TAFFARIAH

**ASET TAK BERWIJUD DAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010**

		ASET TAK BERWIJUD		ASET LAIN LAIN	
55	255 Kementerian Kominfo	35.401.851.971	57.642.763.739	38.490.085.542	26.013.066.729
56	255 R.L. Komisi Penanam Kapital	4.970.159.000	4.874.293.600		
57	260 Kepolisian RI	203.830.516.794	26.807.733.159	214.652.569.080	170.023.670.635
58	260 DITNI	8.075.253.551	5.539.279.025	5.825.293.740	5.520.955.000
59	264 Lembaga Keuangan Nasional	75.457.112.203	75.487.112.203	1.821.437.045	10.922.000
60	265 BPKN	93.041.357.078	70.127.632.979	70.615.072	79.915.072
61	266 BPK	92.673.876.938	11.819.376.308	93.419.036.879	98.617.488.443
62	267 Kementerian Negara dan Hukum	14.031.000	14.031.000	2.541.108.400	
63	268 BKBN	17.029.746.303	10.714.525.000	2.765.812.789	2.413.196.503
64	271 Komnas HAM	1.687.352.086	1.630.577.080		
65	272 BMKG	37.024.023.063	54.981.030.131	16.167.950.870	15.131.688.435
66	276 KTI	303.036.485	130.834.255	3.144.821.229	1.069.308.577
67	277 Mahkamah Konstitusi RI	5.479.046.974	3.073.067.230	3.020.812.470	3.005.724.467
68	278 PPATK	4.323.409.326	6.420.829.221	46.407.000	
69	279 LHK	6.875.012.387	8.412.673.875	16.885.127.770	24.326.786.339
70	280 Badan Tenaga Nukir Nasional	23.343.133.014	10.145.375.280	6.323.539.552	25.173.14.800
71	281 DITTT	58.173.195.329	28.130.832.337	2.301.135.000	70.573.922.002
72	281 R.L. EPP	34.727.000		2.647.616.264	35.747.2.375
73	282 LPKN	6.463.417.712	19.231.7.817	16.348.384	17.222.553
74	283 B.L. LAPNA	2.262.000	3.382.000		
75	285 Pekerja Sosial	380.881.356.253	342.531.726.761	80.742.689	7.704.551.009
76	286 BSN	1.339.907.780	1.031.102.730	302.310.200	109.712.000
77	286 Badan Pengawas Tenaga Nukir	230.200.750	100.000.650	1.639.059.540	1.422.961.910
78	286 LBN	2.870.929.811	2.642.111.600	281.626.374	1.291.944.443
79	287 ANRI	11.324.334.315	6.319.902.613	3.262.136.649	8.282.150.848
80	288 RIN	145.761.042.374	10.537.056.030	6.351.873.179	120.741.335.001
81	288 BP2P	8.723.731.615	6.708.031.615	1.260.136.128	7.732.341.172
82	289 Kementerian Perdagangan	114.589.001.200	ED.113.365.397	2.309.043.702	204.372.252
83	290 Kementerian Perindustrian	48.403.327.583	21.705.852.253	542.230.677.050	544.233.540.500
84	292 Kemen Pemuda dan Olah Raga	17.408.103.900	17.037.829.900	126.991.000.954	127.200.050.634
85	293 KAI	12.194.350.178	11.130.475.728	1.368.931.627	3.781.005.950.691
86	293 BPKVAD-Nas			488.826.373.122	889.829.038.122
87	295 DPC	4.234.326.372	2.533.029.500	5.025.321	33.331.000
88	296 Komisi Yudisial RI	1.300.201.000	1.300.201.000	205.273.975	
89	297 BPKB	23.644.061.964	22.693.110.816	126.924.591.600	32.080.035.000
90	297 BPKPIK	6.897.914.174	2.887.026.149	6.140.000	
91	298 DTS	249.756.147	145.008.147	180.957.450	501.375.855
92	298 LPP	8.444.711.246	5.123.869.745	86.473.000	
93	297 Badan SGR	22.761.301.102	1415.151.000	52.021.073.226	51.683.264.100
94	298 KTI	8.000.059.348	1.230.809.174	1.980.511.740	-
95	298 Badan Pengelolaan Wilayah Sumsel	18.823.102.850	-		
96	116 Pemerintah Republik Indonesia	93.000.000			
97	117 Badan Nasional Panganan Pertambangan	96.677.401.710			
98	300.C3 BPN Kepabeanan			172.127.897.810	-
99	300.C4 BPN KPK+DIT. S/ML			13.478.100.122.803	23.052.303.565.232
100	300.C5 BPN (Selain Kepabeanan)			46.701.931.689	21.012.163.813
101	300.C9 BPN (Transaksi Kh. s/d)			48.420.101.894.229	
102	300.P03 BPN KPK+DIT			-	2.674.411.711.232
103	300.P05 BPN KPK+DIT yang dicantumkan di 102			-	1.748.073.726.841
104	300.P07 BPN KPK+DIT yang dicantumkan di 102				25.503.047.187.612
105	300.P09 BPN KPK+DIT				145.800.297.541.523
106	300.P09/ BPN KPK+DIT PERITINGKAT		21.037.9.000		44.363.231.729.177
107	300.P10 BPN Kepabeanan Internasional	22.724.946.611	126.282.148.239		
		TOTAL	17.406.618.812.595	9.351.448.050.840	105.997.977.282.250
					303.373.990.422.989

34741 NETACA 873

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PLSATTA I JN 2011 (AUDIT/2011)

DAFTAR 20 A

ASET TANAH KPKS YANG DICATAT PADA NEBACA LIKPP 2011

No.	UNIT / KPKS	LOKASI/BLOCK	SALDO PER DESEMBER 2011		ICETERANCAN
			LURAS(M2)	NILAI WAJAR TANAH 'Rp'	
-	-	-	-	-	-
-	TOTAL BODONG & PAF	BAT (PAFA)	9.703.925	54.6054.637.072,00	
1	WCC SANAGI BAKI 30	SANAGI-SANAGI	1.151.532	44.076.198.000,00	
2	PT. MEDCO E&P INDONESIA	TAHARAN	310.639	28.062.663.000,00	
4	PT. PERTAMINA EP AREA CEPU	AREO CEPU	42.055	3.392.580.000,00	
5	PT. CHEVRON INDONESIA COMPANY	BAT (PAFA)	14.489.988	201.860.240.300,00	
6	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	PORAK	437.675.257	10.562.439.545.180,00	
7	PT. SANTUPUTRI MITIUM SA	PEKANBARU	6.391.150	250.121.987.000,00	
8	PT. PETROGELAT LTD	PELAT PARUNG	471.388	10.572.640.000,00	
9	PT. MEDCO E&P INDOENESIA	PEKANBARU - MELAWATIN	8.129.852	84.253.226.280,00	
10	PT. CAHAYA PARINDI PTI	PEKALAWAN & PEKANBARU	301.203	1.945.126.000,00	
11	PT. CAULIA KOTINDI JAPUJU LTD	PEKANBARU	464.000	7.532.882.430,00	
12	PT. PETROCHINA INT'L FERMIDA	GORONG	3.967.621	7.003.770.750,00	
13	PT. PETROCHINA SA AWATI	SALAWATI	1.600.974	2.554.657.310,00	
14	KARIBEAR ENERGY	KARIBEAR ELCER	388.504	40.817.668.880,00	
15	PT. WEDCO E&P PMAU	PINKU BLOCK	1.497.097	5.562.224.000,00	
16	MOBIL CUPPLTE	ELCER & DJONCEGORO	527.573	49.573.680.000,00	
17	PSKOMMCE OIL INDONESIA	BLOCK 9 ACFH	524.270	10.531.230.000,00	
18	PT. PERLAWAH EP REGION SUMATERA	SUMATERA	12.640.018	923.092.421.000,00	
19	COROCOPHILLIFF SOUTH LAMPUNG LTD	LAMPI	25.667.874	3.400.036.190,00	
20	WCC UNIT SEMERAK	SEMERAH	12.292.826	51.419.100.000,00	
21	WCC UNIT KUTA BAKI	JAPANBARU FAJAR BAKI	5.689.235	20.536.482.115,00	
22	WCC UNIT KUTA BAKI	JAPANBARU MIFJAR	11.083.001	64.787.024.336,00	
22	WCC UNIT BAKI & H. AM	BAKIK CAN HILMI	78.867.267	129.273.424.543,00	
24	PETROCHINA INTERNAT CNALBANGKO	BNOKO BLOCK	1.014.135	19.021.857.852,00	
25	PT. WEDCO E&P INDONESIA	LEWATANG BLOCK	986.044	3.549.652.338,00	
26	JCE WEDCO JAMBI MENDO	LAMDI	971.277	8.029.600.000,00	
27	JCE PER. ANNA GOLDEN SPICE - PERCIPD	PENGUPO	366.099	31.521.875.000,00	
28	JCE PERTAMINA JAKA TIRAM	TIRAM	506.945	66.459.340.700,00	
29	COROCOPHILLIFF GRISIK PT	GRISIK - MIN BAWIYAH SIN	655.838	322.676.000,00	
30	PT. WEDCO E&P INDONESIA	CENTRA - SIMATRAS MUSI	285.547	2.112.262.000,00	
31	JCB TIRI AM NA - ALISMAN	UCAN KUHLING NU	482.823	2.259.768.000,00	
32	PT. RDE BLM SIACI PHEAKO	SIACI PEGAL BAKI	132.879	4.100.446.000,00	
33	TAC PERTAMINA BWP MELAP LTD	SAROLANGUN	201.743	3.657.073.025,00	
34	PT. LAPPITI BAKI PG INC	SIDOMUJI	47.224	33.296.382.832,00	
35	JCE PER. ANNA - WEDCO TUMURI	BLOCK C-L SULWESI	273.688	3.274.550.332,00	
36	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA - SAK	SAK - TIKADARL	4.256.676	3.428.603.433,00	
37	ENERGY FACILITY PT. CIBERANG KANDI	SENANGKANG	567.466	20.890.280.000,00	
38	PFARI C-L TINGKAL LTD	TINGKAL - B. SOKI JAMRI	283.137	1.071.880.132,00	
39	PT. PETROCHINA INDONESIA	4-BLK 3 BLOCK - LAMB	844.978	523.955.852.558,00	
40	KOTEREF ENTRAY LTD	ENTRAY	33.520	1.068.439.575,00	
41	WESS INDONESIA PANTAI	ENTRAY	706.825	33.457.000.000,00	
		TOTAL		13.788.358.899.984,00	
42	PT. PLATIGINA EP PLUGGED JAWA, JALAN BAKI	JAWA BAKI & JATI	-	59.557.230.000,00	Hest IP 2011
43	Chesnix Indonesia Company	East Kalimantan	1.904.589	475.717.800.000,00	Hest IP 2011
44	PT. PERTAMINA EP Cepu		89.268	30.378.459.000,00	Hest IP 2011
		TOTAL		573.625.470.000,00	
		TOTAL	887.818.264	14.262.784.169.984,00	

Brs. 1.000 = Rp 9.400

34741 NOTADA 874

DAFTAR ASET NON TANAH KPK

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Rasio IP Aset Non Tanah	
				Rasio Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KEGS PRODUKSI					
1	BGB PT Bumi Sa : Pusako-Pertamina Jul.	Coastal Riau-Pembari	6.765	22.156.225	962.529.363.125
2	BP Berau Ltd.	Berau Mukti	321	526.356.402	5421.136.386.510
3	BP Muhi Ltd.	Menggar			
4	BP WIRAWIKA	Bawean	163	47.316.124	227.811.469.620
5	Cairns Resources Canada Ltd.				
6	Chevron Indonesia Company IC coll	Esel-Kelimanian	4.201	730.361.012	3.770.069.244.719
7	Chevron Mt. Bassa Ltd.	Maluku Strait	37	406.514.026	2.073.131.921.407
8	Cito Samit Ltd.	Seram-Von Dura	731	66.429.476	385.533.009.623
9	DKOON South East Sumatra Ltd.	South-east Sumatras	1.681	704.331.184	4.121.488.967.235
10	ConocoPhillips (Gresik) Ltd.	Cendrawasih	111	867.393.277	5.724.355.171.739
11	ConocoPhillips (Bukit Jambi) Ltd.	South Jambi B	265	47.316.930	2.267.718.914.788
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South-Natuna Sea B	1.072	2.286.407.238	20.830.850.031.670
13	Energy Equity PRC (Pengaruyung) Ltd	Sengkang	531	17.153.795	74.035.201.655
14	Fess Indonesia Perusahaan	Floris II	4.065	1.122.134.224	4.971.141.008.540
15	Fess Indonesia Perusahaan	Pangkab	243	342.576.087	3.512.113.724.384
16	JDE Pertamina - Golden Spike Ltd	Rea Pendopo	41	6.033.151	76.912.082.720
17	JDE Pertamina-Cessa International Group Ltd	North Cebang	133	28.865.382	167.223.373.081
18	JDE Pertamina-Maico E&P Tomor Suwesi	Santolo-Toli	23	10.363.733	1.009.933.301.169
19	JDE Pertamina PetroChina East Asia	Tulisan	103	103.363.375	358.113.419.679
20	JDE Pertamina PetroChina Sarawati	Kepala Burung	236	22.221.324	125.818.309.542
21	JDE Pertamina-Taliansan (Duan Kuningting) Ltd.	Duan Kuningting	1.031	52.871.782	322.931.153.227
22	JDE Pertamina-Teliasan Jambi Merang	Merang	235	300.994	5.575.702.147
23	Kalla (Karya Baru) Pty Ltd	Kenari Beru	102	1.269.000	35.833.436.143
24	Kaltex Petroleum (Ceramy) Ltd.	Julis	977	6.029.900	37.339.206.660
25	Karangasem Energy Indonesia	Karangasem	383	369.216.478	467.929.513.541
26	Kodra Energy Ltd.	West Marcus	103	52.801.425	718.348.363.428
27	Koncur Petroleum S.A.	Malacca Strait	1.314	170.679.511	870.230.911.821
28	Lapindo Brantas Tbk	Pentas	213	16.810.200	128.131.351.529
29	Maril Cupu Ltd.	Cupu	1.317	88.533.906	820.944.054.045
30	Maril Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	583	437.154.072	9.426.473.101.706
31	Merl'O'Ungku Angke Ltd.	Tungkal	57	1.313.366	132.233.979.778
32	Petroleum Huayang (WW) Ltd	Oil Shale Northwest Java	15	308.064.468	2028.409.468.281
33	Petronas Bentek Taka	Nalawa	521	8.111.921	38.893.990.884
34	Petro China International (Bangkok) Ltd	Bangkok	23	473.011	3.827.014.250
35	Petro China International (Berjaya) Ltd.	Salawati Basin	2.863	70.071.432	350.133.722.764
36	Petro China International (Ushuaia) Ltd	Tanjung Jabung	6.332	82.381.268	4.076.413.000.000
37	Petrosea Ltd.	Selat Panjang	33	4.796.361	26.410.239.423
38	Pioneer Oil Natural Sea Sy	Natural Sea At. A	611	302.126.828	1931.331.016.637
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Stek	303	11.355.995	46.073.381.481
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Pokan	45.407	3.006.369.206	17.533.562.372.660
41	PT SPP Lembar	Mountain Point Kuantan	37	3.393.212	21.743.119.661
42	PT Medco E&P Indonesia	North & Central Sumatra	1.121	12.148.173	144.921.171.483
43	PT Medco E&P Lembang	Lembang	27	72.392.506	322.469.522.763
44	PT Medco E&P Makassar	Elak-E	1	32.080	13.238.000
45	PT Medco E&P Riau	Banjar Riau	2.411	176.039.127	1.207.132.751.382
46	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	136	50.446.206	2.1.031.647.572
47	PT Perseroita Dj	Indonesia	5.963	335.238.217	5.388.761.000.475
48	Santos (Makassar) Pty Ltd	Makassar	13	18.833.317	148.831.176.674

DAFTAR ASET NON TANAH KKKS

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Rasio IP Aset Non Tanah	
				Rasio Perolehan (USD)	(Rp)
1	Z	3	4	5	6
16	Santos Sa'pani Fcv. Jsc.	Samperg	43	64.313.073	921.869.331.141
EC	Star Energy (M) Sdn Bhd.	Kakap	737	375.149.130	165.319.722.421
E1	Total E&P Inc. Inc.	Mahakam	7.032	3.257.719.830	28.778.330.795.030
E2	Total E&P Inc. Inc.	Tengah Aves	54	22.036.038	772.133.294.037
E3	Triang'e Pase Inc.	Pase	37	60.313.430	421.093.751.000
E4	Uvu Indoneisa Cv.	Bergasang	2.673	1.182.777.816	3.125.881.881.000
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			109.250	10.301.305.079	139.124.936.709.684
KKKS EKSPLORASI					
EE	Amadeus Indonesia Company	North East Madura II	12	301.210.00	294.386.544.00
EE	Amadeus Indonesia Kuning Company	N. Lautan	5	151.231.00	1.867.112.210,00
E1	Amadeus Peayang Ltd.	Peayang	13	23.778	216.381.124
EE	Amadeus Fprod. Ltd.	Popodji	14	23.778	216.381.124
EE	Fungamas International Pte	Guraganes	23	186.794	1.873.385.210
PE	Amira Berglenn Ferry Ltd	Bangkalan	21	25.385.00	153.342.764,00
E1	EJI Arabela Ltd	Arabela			
Q2	EJI Bukit Ltd	Bukit	77	295.795	1.839.014.000
E2	EJI Krung Mare Ltd	Offshore North Aceh	3	49.615.00	233.009.358
D4	EJI Muara Basa. B.V.	Muara Basa	5	7.039	69.002.883
PE	EJI Pul. Marap PV	Pulungan			
BB	Era Widiwidjaja & Fransiska Indonusa Makassar Ltd.	Mardar	1	310.721.55	3.435.261.410,00
BB	Era Widiwidjaja & Fransiska Indonusa Samarinda United	Samarinda	1	218.798.72	3.422.392.376,00
OF	Fusky L. (Mature) Ltd	Mature Strait	35	31.500	934.215.354
OF	Fusky L. North Sumbawa Jsc	North Sumbawa	64	153.276	533.094.422
TC	Ipex Misela Ltd	Misela	40	104.710	695.830.650
C1	Per Petronas Ltd	Maritim	63	46.813	3.49.716.80
C2	Ralla Iliran. Ltd	Bratu Ilir	31	70.048	487.071.454
72	PEC Rumelai B.V	Rumelai	30	177.080	1.838.022.884
74	Per Oli Setiabudi	Sabtu	13	240.984	2.264.197.482
76	Transwadi Survey Exploration Jsc.		39	100.221	944.070.540
BB	TPP Domestik Ltd	Domestik			
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			665	2303.400	22.083.17.218
TOTAL ASET				1'0.315	19.504.168.978
					139.140.936.709.684

SUMUR TIDAK DIGUNAKAN

No	Kontaktor Kontrak Kerja Sama IKKSISI	Kontrak Area /Block	Jumlah Aset	Sumur Tidak Digunakan	
				Rilai Perolehan (USD)	Rp
1	2	3	4	5	6
IKKS PRODUksi					
1	EUB +1 Euri Sekasic-Pertamina Hulu	Coastal Main Block 10			
2	EP Beria, Ltd.	Beru			
3	BP Wihuri Ltd.	Munri			
4	BLW RADAK	Arinapar			
5	Cavat Reco, over Canada Ltd	East Barat			
6	Charon Indonesia Company (Cincin)	Perak Kalimantan	2	2.611.537	11.613.911.128
7	Chervon Makassar Ltd.	Maluku Sel.			
8	Croc Seal Ltd.	Seram Non Bula	1	3.720.653	11.483.401.726
9	CNOOC South East Sumatra Ltd	South east Sumatra	125	41.544.710	113.643.971.391
10	Conoco-Philips (South Kalimantan) Ltd.	Centaur	15	2.155.677	8.100.088.643
11	Conoco-Philips (South Jambi) Ltd.	South Camari B			
12	Conoco-Philips Indonesia Ltd	South Natura Sea E	2	374.782	147.136.283
13	Energy Equity FEC (Bengkulu) Pty. Inc	Rejang			
14	ExxonMobil Indonesia Inc	Duck D	12	10.321.437	38.029.977.761
15	Fess Indonesia Pantai Barat Ltd.	Pantai Barat			
16	JOB Pertamina Falan Sulit. Ltd	Baja Pradepta			
17	JOB Pertamina-Ecuad. Petroleum Group Ltd.	Peri Delang			
18	JOB Pertamina-Medco E&P Indonesia Sulawesi	Senoro-Lotti			
19	JOB Pertamina PetroChina East Java	Eltan			
20	JOB Pertamina-Pt IndiCine Balaceu	Empat Limburg			
21	JOB Pertamina-Talisman (Dewan Komering) Ltd.	Ugar, Comering			
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang			
23	Kaltim Petronas Barito, Pte. Ltd.	Kerto Barito			
24	Kaltim Petronas Samarinda Ltd	Duta			
25	Karenian Energy Indonesia	Kandean			
26	Ketam Energy Co. Ltd	West Natuna	1	3.325.010	34.832.910.680
27	Kincaid Petroleum S.A.	Maluku Selat	2	523.522	2.511.117.253
28	Lazonic Santos Inc.	Bra. Iles			
29	Maci Depu Ltd.	Depu			
30	Maci Equinor Indonesia	Purba Sumbawa Offshore			
31	MC ICIC Indonesia Ltd.	Tenggol			
32	Pertamina Hulu Energi OMAL, Ltd	Offshore Northwest Java	7	1.022.453	1.521.997.113
33	Pertamina Ranta Tolole	Wilmari			
34	PetroChina International (Dang oil) Ltd	Gangga	15	1.524.437	13.867.595.613
35	PetroChina International (Bawana) Ltd.	Sawarna Barat			
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jaktung	2	329.931	3.157.272.600
37	PetroChina Ltd	Seni Daivang	1	83.065	447.917.803
38	Pemex UINatura Sea BV	Kawana Sea Block A			
39	PT Cimarrt Pacific Indonesia	Siak			
40	PT Cimarrt Pacific Indonesia	Belan	255	18.353.678,00	36.647.920.737,00
41	PT PTB Langkap	Muara Enim, Kusiter			
42	PT Wedo BMP Indonesia	South & Central Sumatra			
43	PT Wedo E&P Commerg	Commerg			
44	PT Wedo BMP Makassar	Block A			
45	PT Wedo BMP Rameu	Berau Rameu			
46	PT Wedo E&P Tambang	Tambang			
47	PT Wedo E&P TPI	Pulau Raya			
48	Santos Indonesia, Pte Ltd.	Nadira			
49	Santos Sampang, Pte Ltd.	Sampang			

DAFTAR MELAKA 377

SUMUR TIDAK DIGUNAKAN

No	Kontaktor Kontrak Kerja Sama IKKKS	Kontak Area Block	Jumlah Aset	Sumur Tidak Digunakan	
				Rilai Perolehan (USD)	Rp
1	2	3	4	5	6
EE	Sinar Energy (KARAF) Ltd.	5 Blok	2	13.721.503	13.721.503
E1	Total ESP Indonesia	Merak	12	96.026.008	96.026.008
E2	Total ESP Indonesia	Tengah Area			
E3	Triangle Petroleum Inc.	Pigis			
E4	Poco Petroleum Co.	Berpasir	13	2.088.040	2.088.040
SUB TOTAL IKKKS PRODUKSI			62	155.226.734	115.912.088.205
IKKS EKSPLORASI					
EE	Enakerto Indonesia Company	No. 11 West Macau # II			
EE	Enakerto Indonesia Natura Company	Nunukan			
E1	Enakerto Petaling Sdn Bhd	Petaling			
E2	Enakerto Petrol Sdn Bhd	Pepuluhan			
E3	Eutamex Internation Co.	Bengkamas			
E4	Flame Energia Energy Ltd	Bangkari			
E5	DKI Zincast Ltd.	Citatah			
E6	EVI B. Kar Ltd.	Bukit			
E7	EVI C. Lang N. Ltd.	Offshore North Area			
E8	EVI Muara Dalam O.D.	Muara Dalam			
E9	EVI Sungai Bulang S.D.	Bulang			
E10	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Mandiri Limited	Kantor			
E11	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surimaco Limited	Surimaco			
E12	Fusco Oil (Medan) Ltd	Medan Emas			
E13	Fusco Oil North Sumatra Ltd	Kurti Sumatra			
E14	Ipana Masaia Ltd	Masaia			
E15	Kic-Promin Ltd	Kambasai			
E16	Kita Berluk Ltd	Baru Jukuk			
E17	KLH Rimbeka E.V	Homesai			
E18	Leer Oil (Sabah) Ltd	Sabuku			
E19	Transworld Energy Explorasi Ltd	Bumbung			
SUB TOTAL IKKKS EKSPLORASI			-	-	-
TOTAL ASET			823	106.276.734	1.119.872.088.205

SUBSEQUENT EXPENDITURE

No	Kontraktor/Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Subsequent Expenditure	
				Nilai Peralihan (USD)	Rp
1	2	3	4	5	6
KKKS PRODUKSI					
1	ROR PT Rimi Sakti Pratama Perkasa Energi	Central Java Selatan			
2	RPT Heran 1d	Java I			
3	RPT Indah 1c	Madura			
4	RPT N HKP4R	Madura			
5	Caron Hartman Canada Ltd.	Maluku			
6	Chesca Indonesia Company Limited	Pek. Karimata	263	28.164.139	120.462.191.193
7	Chesca Indonesia Ltd.	Maluku Selatan	3	146.166	524.889.386
8	Cone Beta 1st	Berau Kalimantan Barat	635	41.088.128	223.138.019.200
9	CRICK South East Sumatra Ltd.	North Sumatra	1.482	482.443.438	1.101.449.000.421
10	Centro Phillips - Gresik 1st	Gresik	209	63.246.728	542.311.828.143
11	Centro Phillips - South Ambon 1st	South Ambon	9	30.840	135.882.380
12	Centro Phillips Indonesia Ltd.	South Sulawesi Sel.	682	2.365.746.500	8.200.050.395.394
13	Energy Energy EPIC Bengkulu Pty Ltd.	Bengkulu	2	1.950	1.950
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Et. Et. B	461	144.943.768	699.981.000.339
15	Hess Indonesia Pengasp. Ltd	Janglo			
16	JCB Petroleum - Golden Spike Ltd	Pati Kendal			
17	JCB Petroleum-Citra Mitra Cipta 200.000 Ltr	Nomor Selatan			
18	JCB Petroleum-Gado Gado Lampung Selatan	Semenanjung			
19	JCB Petroleum-Nur Chira East Java	Tubar	85	3.021.300	1.341.750.751
20	JCB Petroleum-Nur Chira Sulawesi	Republik Sulawesi			
21	JCB Petroleum-Asahan Ogan Komering Ulu	Ogan Komering Ulu	111	3.72.002	20.328.753.319
22	JCB Petroleum-Tanjung Andir Riau	Jambi Merang			
23	Kaltim Kimia Ber. 1st Pty Ltd.	Kutai Baru	5	747.131	7.138.877.595
24	Karim Petroleum Swarna Ltd.	Et. Et.	2	41.135	20.197.132
25	Karimun Energy Indonesia	Samosir	88	342.263	9.138.623.331
26	Kerinci Energy Co Ltd.	West Sumatra	27	1.235.847	10.742.033.423
27	Kerinci Petroleum S.A.	Maluku Sel.	533	44.054.331	225.538.973.233
28	Lantau Energy Inc.	Bantam	13	1.862.018	7.055.041.537
29	Mobi Cepu L...	Depa	3	6.764	41.232.352
30	Mobi Equator Indonesia	North Sumatra Cidukore	11	1213.919	8.181.499.353
31	Mobi Oil Tenggarong 011 Lt.	Tenggarong	17	243.357	2.374.033.133
32	Pertamina Hulu Energi D499 J Ltd.	Central & Northwest Java	5.038	2.016.806.382	8.588.208.989.319
33	Persada Energi Tbk	Maluku			
34	PeruChina International (Bumi) Ltd.	Bangka			
35	PeruChina International (Bumi) de Ltd.	Sarawak Batu	437	41.166.063	163.828.059.053
36	PeruChina International (Jacung) Lt.	Tanjung Jabung	1.273	142.154.762	1.988.370.850.723
37	Perusdal Ltd	Bda. Pasirputih	1	3.780	35.000.350
38	Premier 31 Natural Gas Bt	Natural Gas Block A	162	1.4.854.828	1.8.036.847.343
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Suk			
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Pekar			
41	PT SP2I Langga	Mountian Front Muaraen			
42	PT Wadco E&P Indonesia	South & Central S. meters			
43	PT Wadco E&P Lembaran	Lembaran			
44	PT Wadco E&P Melati	Batu A			
45	PT Wadco E&P Pitu	Batu B			
46	PT Wadco E&P Terasen	Terasen			
47	PT Pertamina E&	Indonesia			
48	Sarina (Adaro) Pty Ltd	Medan	10	12.166.046	110.468.002.249
49	Sarina (Sampangi) Pty Ltd.	Sampangi	1	1.476	8.277.322
50	Sinar Energy (A. (O.P) Ltd	Kalak	3	26.486	27.020.719
51	Total E&P Indonesia	Malakasam	1.536	2.688.066.260	18.880.774.263.031
52	Total E&P Indonesia	Surigao Area	0	20.026.034	86.186.083.46
53	Triarga Pura Inc	Fase			

SUBSEQUENT EXPENDITURE

No	Kontrolker Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Subsequent Expenditure	
				Nilai Peralihan (USD)	Rp
1	2	3	4	5	6
54	Vina media Co.	Gorontalo	133	37.000.000	138.222.802.341
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			13.893	8.300.424.524	44.345.400.225.493
KKKS EKSPLORASI					
60	Anato Ict Indonesia Company	North East Madura II			
61	Anato Ict Indonesia Kudus Company	Nunukan			
62	Anato Ict Pacitan Ict	Papating			
63	Anato Ict Bondowoso Ict	Focant			
64	Hutamaeksa International Ict	Bungomas			
65	Enexis Henglong Energy Ict	Kangkirea			
66	Ht. Amasir Ict	Amahat			
67	Ht. Anter Ict	H. ket			
68	Ht. Arjung Manado Ict	Ujung Manu North Asah			
69	Ht. Muara Balau d.o.o.	Muara Balau			
70	Ht. Bulungan B.V	J. Juncuan			
71	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Offshore Limited	Mentia			
72	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Sumatra Limited	Sumatra			
73	Hut. n UI (Medan) Ltd	Macassar Street			
74	Hut. n UI Ict Sumbawa Ltd	North Sumbawa			
75	Inox Media Ict	Mesale			
76	Inca Petroleum Ltd	Carakkar			
77	Kudu Iberia Ltd.	Sei Tu Stock			
78	AED Petroteks B.V	Purabata			
79	Pearl Oil Sabukit	Sekulu		6.179	57.127.381
80	Transworld Seaway Exploration LTD	Bondesi			
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			13.893	6.179	57.127.381
TOTAL ASET			13.893	8.300.424.524	44.345.400.225.493

ASET RUSAK BERAT

No	Entititas Kontrak Kerja Sama (EKS)	Lokasi Area (Block)	Jumlah Aset	Aset Rusak Berat	
				Mitra Perusahaan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
EKS PRODUKSI					
1	BUKPT Krikust Petronas Indonesia	Cavite, Filipina Petronas	309	19.650.187	39.900.700.000
2	BP Baru, Ltd.	Batu			
3	BP Nuru, Ltd.	Virar	7	837.823	335.340.450
4	BP W. RIABAR	Virasat			
5	Camer Resources Canada Ltd.	Denpasar	29	1.051.748	109.171.000
6	Chevron Indonesia Company (CIC)†	Petra Maranthon	1.148	10.151.920	27.378.258.965
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait			
8	CIMB Swire, Ltd.	Singapura (4)	36	1.104.160	1.410.890.462
9	CHODD S.A.V. Sudi, Ind.	Sudan, Sudan	1.134	26.495.803	45.732.841.275
10	ConocoPhillips (S) Sdn. Bhd.	Peninsular	26.301	2.541.987.100	4.071.988.140.00
11	ConocoPhillips Swire Jaya Ltd.	East Java B	1	1.295	1.393.236
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Ketam Sea G	1.358.000	1.030.636.00	23.397.317.678
13	Energy Equity PDC (Singapore) Pte. Ltd.	Singapura	89	695.07.05	132.061.964
14	ExxonMobil Indonesia Ltd.	Block E	.897	73.377.427	111.371.641.476
15	Fesco Oilfield Services (Singapore) Ltd.	Pangkajene			
16	JDD Pertamina - Goldean Spitzer Ltd.	Raja Ampat	0	1.107.820	10.232.363.251
17	JDD Pertamina Gorontalo International Sdn. Bhd.	Koror, Koror	0	4.414	7.791.000
18	JDS Petroleum Marine ESP (Tunisia) S.A.S.	Tunisia			
19	JDS Petroleum Maritime Services	Malta	202	1.214.01	1.742.360.000
20	JDS Petroleum Petrosolines S.A.S.	Kuwait, Kuwait	101	3.274.804	18.340.308.169
21	JDD Pertamina Tolokeri - Dean Kosinski Ltd.	Open Koskieng	314	2.006.019	24.163.913.000
22	JDS Petroleum Tolokeri - Jambi Kertau	Jambi, Kertau	31	20.093	222.566.882
23	Kel al-Jawaid Corp. Pty Ltd.	Koror, Denai			
24	Kokusai Petroleum (Korea) Ltd.	Block	224	2.358.095.2	5.338.653.259.70
25	Kanggar Internasional	Kancan	88	1.822.002	2.038.311.273
26	Kodoco Energy Co. Ltd.	West Madura	93	23.803.455	130.711.156.132
27	Koninklijke Shell B.V.	Malaysia East	34	338.758	1.470.408.842
28	Lapindo Brantas, Inc.	Bontang	20	11.195.00	182.411.626.30
29	Medi Corp, Ltd.	Gepe	57	231.182	136.336.636
30	Medi Explorer Indonesia	North Sumatra Offshore	6.00	31.175.535.82	56.965.801.36.36
31	Menjoo Tanjung Gil Ltd.	Tanjung			
32	Pertamina Int. Energy Devt. Ltd.	Offshore Northwest Java	5.00	110.306.036.00	1.7.69.689.10
33	Pertamina Bentan Iota	Natuna			
34	PetroChina International (Donghai) Ltd.	Bengko			
35	PetroChina International (Guizhou) Ltd.	Selatan Baan	613	4.164.022.00	7.38.413.065.00
36	PetroChina International (Lantau) Ltd.	Tengah, Jawa	496	3.874.554.00	8.332.910.862
37	PetroChina Ltd.	Sebat Pengang	95	1.195.01	142.035.743
38	Pertamina Berau Gas & Oil	Nature, Berau, Berau A	86.00	378.487.83	528.558.966.44
39	PTC-Center Pacific Indonesia	Sak	3	1.7.120	2.331.319.062
40	PTC-Center Pacific Indonesia	Riau	9.348	150.048.040.26	339.584.887.957.26
41	PTSPR Lampung	Mountain, Tengkukut			
42	PT Motoris BPV Indonesia	South Sum. Lembar, Sungai	282.00	302.461.57	1.381.657.018.00
43	PT Motoris BPV Lembar	Lembar	6	1.306.57	3.526.379.367
44	PT Motoris BPV Sulawesi	Block E	46	352.069	344.921.000
45	PT Motoris BPV Riau	Barat Riau	178	3.003.490	7.131.841.561
46	PT Motoris BPV Tualan	act	38	398.057	9.73.493.162
47	PT Motoris BPV†	Perak, Marura	217	385.896.110	2.703.601.762.69
48	Santex (Natura) Pty. Ltd.	Surabaya			
49	Santex (Surabaya) Ltd.	Kalimantan			
50	Star Charge (EAKAPI) Ltd.	Kalimantan	231	910.776	756.671.062
51	Star Oil BPV Indonesia	Mahasen	21.200	21.442.421.42	40.736.730.462.12
52	Total E&P Indonesia	Tengah, Aceh			
53	Unigas Petrol	Pase	17	9.016.713	10.470.547.135
54	Wira Indonesia	Rengganis	808	55.831.430	111.316.046.739
SUB TOTAL EKS PRODUKSI			21.479	896.049.00	13.2.344.358.420

DRAFT FOR INFORMATION

LAPORAN KEJAKOAN PENERBITAN PUGAT TAHUN 2011 (ABREVIES)

DAFTAR 208

ASET RUSAK BERAT

No	Entitas Kebutuhan Sama (EKKS)	Lokasi Aset (Blok)	Jumlah Aset	Aset Rusak Berat	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
EKKS EXPLORASI					
55	Amoco Indonesia Company	North East Minas I			
56	Amoco Indonesia Mandiri Company	Kutai Papera			
57	Amoco Paparang Ltd	Papera			
58	Amoco Papu Ltd.	Papua			
59	Bungurasih Internation Co.	Sumatera			
60	Enron Bangkok Energy, II	Bangkok			
61	CII Ambala Ltd	Ende	2	4310	5.255.830
62	EHI Asia, Ltd	Riau	11	107.431	131.412.960
63	EHI China Minas Ltd	China South Sea	48	245.855	296.356.800
64	EHI China Shale (H.C.)	Yunnan Shale			
65	EHI S. C. Corp BV	Bogor			
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Mandiri Limited	Mandiri			
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Sumatra Limited	Sumatra			
68	Fusco Oil (Indonesia) Ltd	Madura Strait			
69	Fusco Oil North Sumatra Ltd	North Sumatra	2	2.862	34.592.700
70	Giga Mandiri Ltd	Manado	2	3.835	36.450.000
71	Indo Petroleum	Manado	18	23.600	211.740.720
72	Kel. Bumi A. Ltd	Batu Belik			
73	KL International	Perak	1	877	1.004.884
74	Per 31 Eksplorasi	Seulawesi	1	3.276	36.036.700
75	Tanuwulan Semaway Exploration, LTD.		1	551	6.006.154
76	EF Bambang U.J	Babangs			
SUB TOTAL EKKS EXPLORASI			96	471.713	564.572.668
TOTAL ASET			21.805	837.264.312	10.330.893.308

ASET PEROLEHAN KKKS TAHUN 2011

No	Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Per 31 Desember 2011
			Nilai Perolehan
KKKS PRODUksi			
1	BOP PT Bumi Sitik Pusako-Perlaminu Hulu	Coastal Plain Pekunburu	1.029.159,95
2	BP Bratu Lul.	Batu	
3	BP Muturi Ltd.	Muturi	2.153.330,21
4	BP WIRIAGAR	Wiriagar	
5	Cairns Resources Canada Ltd.	Bawean	220.523,84
6	Chevron Indonesia Company (Cinc)	East Kalimantan	42.116.715,43
7	Chevron Makassar Ltd.	Malacca Strait	17.542.390,36
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	1.758.858,98
9	CNOOC South East Sumalera Ltd.	Southwest Sumalera	954.828.239,11
10	ConocoPhillips (Bintan) Ltd.	Condor	58.628.000,00
11	ConocoPhillips South Jambi Ltd.	South Jambi B	42.962,00
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	72.761.297,00
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) PL Lul.	Sengkang	504.488,12
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Blank B	1.173.815,48
15	Hess (Indonesia) Pangkahi Ltd.	Pangkahi	83.779.427,70
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pandope	-
17	JOB Pertamina-Cipta Inovasi Energi Gruji Lul.	Gedung	-
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Tomori-Toli	-
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	109.354,45
20	JOB Pertamina-PetroChina Selawali	Kepala Burung	-
21	JOB Pertamina-Tekman (Oyan Komering) Ltd.	Oyan Komering	4.418.071,30
22	JOB Pertamina-Tekman Jambi Merang	Jambi Merang	66.740,44
23	Kailia (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru	1.180,19
24	Kailia (Bentu) Lul.	Bentu Block	2.517.919,03
25	Kalmz Petroleum (Serem) Ltd.	Bula	51.827,98
26	Kangga Energy Indonesia	Kangga	2.012,00
27	Kontur Petroleum S.A.	Malacca Strait	5.907.761,85
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas	50.000,34
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	4.260.280,44
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatra Offshore	682.779,41
31	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	Tungkal	63.941,23
32	Perlaminu Hulu Energi ONWJ Lul	Offshore Northwest Java	18.888.788,20
33	Parudha Banua Taka	Waliwai	1.471,00
34	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin	2.699.419,47
35	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	15.905.297,78
36	PetroChina International (Bangku) Ltd.	Bangku	-
37	Petroplet Ltd.	Selat Panjang	56.196,68
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	552.563.878,01
39	PT Pertamina Hulu Energi WMM	West Madura	42.321.348,18
40	PT SPR Langguk	Muuntin Fmmt Kuanian	-
41	PT Chevron Pacific Indonesia	Sik	1.281.705,51
42	PT Chevron Pacific Indonesia	Rotan	128.579.560,86
43	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumalera	853.608,88
44	PT Medco E&P Lemataq	Lemataq	126.091,60
45	PT Medco E&P Melaka	Block A	-
46	PT Medco E&P Rimeu	Bairan Rimau	8.549.185,87

LAPORAN KEUANGAN PEGAWAI PUSAT TAHUN 2011 (ABDIYED)

DRAFT 30.8

ASET PEROLEHAN KKKS TAHUN 2011

No	Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Per 31 Desember 2011
			Nilai Perolehan
KKKS PRODUksi			
47	PT Medco E&P Terakun	Terakun	8.250,00
48	PT Pertamina EP	Indonesia	67.173.361,57
49	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura	-
50	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang	-
51	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	650.000,00
52	Total E&P Indonesia	Makassar	214.839.661,92
53	Total E&P Indonesia	Tengah	788.941,50
54	Triangle Pase Inc	Pase	1.118.683,89
55	Vivu Indonesia Co.	Sanggarasa	45.402.358,00
SUB TOTAL KKKS PRODUksi			2.382.563.147,67
KKKS EXPLORASI			
56	Anarko Indonesia Company	North East Natuna I	-
57	Anarko Indonesia Natuna Company	Natu. I	-
58	Anarko Papa ang Ltd.	Papaleng	-
59	Anarko Popo I ...	Popo	-
60	Bragg International Co	Kepulauan Riau	245.000,00
61	Ex. Anakao Ltd.	Anakao	-
62	Ex. Eukat Ltd.	Eukat	-
63	Ex. Gung Mone Ltd	Gung Mone	-
64	Ex. Maesa Eukat	Maesa Eukat	3.201,42
65	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mendiri) Limited	Mendiri	-
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Sumatra Limited	Sumatra	-
67	Ausy Oil Madura Ltd.	Madura Strait	-
68	Ausy Oil North Sumatra Ltd	North Sumatra II	3.000,00
69	Augie Vessel Ltd	Macassar	2.71.000,60
70	Boose Energy	Manokwari	-
71	GTT Romdhya JV	Pemabesi	-
72	Brasimeder Energy (Bengkulu) Limited	Bengkulu	106.119,62
73	Sarawak Offshore Exploration Limited	Sarawak Offshore	-
74	Pearl Oil (Bukit) Limited	Bukit	34.200,00
75	Pandai (Satu) Limited	II.III	-
76	Pearl Oil (J) Limited	Karawang	-
77	Pearl Oil (East Nusa) Ltd	East Nusa	-
78	Pandai Carigali Limited	Kerspu	-
79	EP Sarawak Ltd	Sarawak	-
80	Ex. Edungan E.P	Tarakan	-
81	CorocoF Ilips (Warim) Ltd	Warim	-
82	CorocoF Ilips (Kutai) Ltd	Kutai - West Sarawak	-
83	CorocoF Ilips (Amboi) Ltd	Amboi II - Arfura Sea	-
84	CorocoF Ilips (Arfura Sea BLK 1C) Ltd	Arfura Sea - Maluku	-
85	Star Energy (Selangor)	Selangor	-
86	Star Energy (Selangor)	Selangor	-
87	Star Energy (Barito)	Barito	-
88	TM Nusantara Indram	Indram	-
SUB TOTAL KKKS EXPLORASI			768.032,35
TOTAL ASET KAPITAL			2.383.321.180,02

DAFTAR VERACK 30

LIPSCOMB UNIVERSITY LIBRARIES LIBRARY

SISA ASET EKS BADAN PENYEHATAN PERBAIKAN NASIONAL
Per 31 Desember 2011

Journal of the American Statistical Association, Vol. 45, No. 251, March 1950, pp. 1-12.

RUOKAHAN JAJET UENDA YING DINKELA
PT. PERUSAHAAN PENGELUAR SETIFEREGON
TUTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011

11 DECEMBER 2004 PEPPERL AND TWARDY

二三

RUMAHAN AGUNG UEDARK YANG DENGKELDA
PT. PERUSAHAAN AGUNG PENGELDAM SETIA PERAK
TUTUP PERIODE YANG BERLAKU PADA SI DESSEMBER 2011

THE PRACTICAL APPROACH TO THE STUDY OF POLYMER

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	B/A	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited
1	D01	Majlis Permusyawaratan Rakyat	102.083.063	1.084.188.331		
2	D04	Bajuan Pemeriksa Keuangan	27.009.591.017	2.191.341.392	189.313.790	290.014.900
3	D05	Melaka Mah Apung	7.122.222.207	3.517.543.774	295.004.531	
4	D06	Kejaksaan Agung	52.575.145.887	1.845.635.750		
5	D07	Sekretariat Negara	56.484.424.331	38.645.718.358	99.400.454	10.061.239.117
6	D10	Kementerian Dalam Negeri	240.630.523	3.250.629.696	375.304.509	49.633.994
7	D11	Kementerian War Negefi	6.377.506.628	6.144.858.402	134.057.731	
8	D12	Kementerian Pertahanan	3.238.769.595.989	848.472.444.569		
9	D13	Kementerian Hukum dan HAM RI	11.601.007.426	10.271.046.636	80.818.001.500	45.840.000
10	D15	Kementerian Keuangan	17.174.929.541	202.674.045.731	1.583.445.635	1.667.370.182
11	D18	Kementerian Pertanian	8.125.215.601	5.681.134.174	306.576.000	50.830.038
12	D19	Kementerian Perindustrian	952.352.025	1.078.4.18.319	506.918.100	342.941.500
13	D20	Kementerian ESDM	26.898.099.190	18.855.590.948	42.459.875	68.475.000
14	D22	Kementerian Perhubungan	131.518.928.294	138.725.858.192	10.480.686.134	12.249.060
15	D23	Kementerian Pemukiman Nasional	355.430.295.118	68.560.459.557	51.063.938.610	
16	D24	Kementerian Kesehatan	757.292.903.523	480.417.525.175	99.880.288.663	75.455.159.412

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	B/A	Kementerian Negara Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Auditad	31 Desember 2012 Auditad
17	D25	Kementerian Agama	3.555.037.840.052	3.341.118.122.227	8.154.823.870	2.362.980.081
18	D28	Tarbiyah Kefid dan Transmigrasi	789.017.524	1.108.704.079	800.988.880	474.281.340
19	D27	Kementerian Sosial	429.228.942	2.844.045.420		
20	D29	Kementerian Kehakiman	1.585.987.772	20.076.067.216		
21	D32	Kementerian Keuangan dan Perikahan	1.505.102.403	3.077.845.489		
22	D33	Kementerian Pekerjaan Umum	90.256.723.878	123.943.580.692	464.723.968	924.648.291
23	D34	Kementerian Bidang Politik dan Keamanan	89.281.032	34.792.984	67.500.000	52.500.000
24	D35	Kementerio Bidang Perkonsumsi	80.660.791	472.555.219		
25	D36	Kementerian Riset dan Pengembangan Riset	502.912.927	85.173.294		
26	D40	Kementerian Kehutanan dan Pariwisata	1.770.921.240	2.198.627.671	18.333.333	38.333.333
27	D41	Kementerian Negara BUMN	16.772.500	16.772.500		
28	D42	Kementerian Negara Rishi dan Teknologi	821.080.991	639.279.882		
29	D43	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	73.607.371	70.121.336	109.200.000	12.000.000
30	D44	Kementerian Negara KUKM	2.808.617.548	2.746.160.312	7.485.950.149	7.530.870.448
31	D47	Kementerian Negara Pertambahanan Perumahan	96.293.000	374.468.886		
32	D48	Kementerian Negara PAN	123.191.980	293.140		

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	B.A	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited
33	050	Badan Intelijen Negara			62.641.824.087	
34	051	Lembaga Sandi Negara	\$11.794.000	157.734.520		
35	052	Dewan Kelembagaan Nasional				
36	054	Badan Pusat Statistik	2.774.401.823	4.728.405.585		
37	058	Bulletin Peraturan Hukum Nasional	9.685.858.284	3.945.778.871	17.400.378.211	14.515.577.014
38	057	Perustakan Nasional Republik Indonesia				15.000.000
39	059	Kementerian Kominfo	1.713.855.113	1.146.033.884	6.040.228.256.095	46.533.667
40	060	Kepolisian RI	651.127.696.097	198.832.881.549	9.252.117.772	1.417.354.316
41	063	Badan Pengetahuan Dalam Negeri Makarman	926.332.883	1.895.860.838	16.380.000	30.940.000
42	064	Lembaga Kerakitan Nasional	6.201.000			
43	065	Badan Koordinasi Pemanaman Modal	626.741.873	355.247.980		
44	066	Bulletin Narzikuka Nasional	6.113.498.620	1.005.568.294		
45	067	Kementerian Negara PDT	133.951.193	157.424.221		
46	068	Bidan Koperindukuran dan Keluarga Berencana Nasional	223.600.345	300.336.583		
47	074	Kurnias HAM			37.005.485	
48	075	Bulletin Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	655.048.487	4.576.579.279		

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	B/A	Kemantaineran Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited
48	076	Komisi Pemilihan Umum	369.770.658	860.777.048		
50	077	Mahkamah Konstitusi RI	10.055.990	93.670.568	93.108.000	93.108.000
51	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan		19.320.000	18.089.388	2.500.000
52	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	502.174.893	1.681.037.325	2.513.500	
53	080	Builan Tenaga Nukir Nasional	1.855.754.392	2.485.122.018	177.598.250	8.375.000
54	081	Batian Pengembalian dan Penerapan Teknologi	1.489.328.181	7.851.174.147		
55	082	Lembaga Perencanaan dan Antarkes Nasional	356.453.745	1.343.557.271		
56	084	Batian Standardisasi Nasional	15.625.618	19.620.196	248.500.000	466.190.000
57	085	Batian Penjaminan, Pangan, Nutrisi	300.260.443	235.049.038		
58	086	Lembaga Administrasi Negara	191.746.148	308.592.361	903.678.988	629.779.488
59	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	1.588.126.556	15.704.775		
60	088	Builan Laporan Keuangan Negara	105.642.208	678.208.038	96.000.000	
61	089	Builan Penjaminan Keuangan dan Pembiayaan	1.403.435.491	2.745.925.873	112.224.813	410.963.910
62	090	Kementerian Perdagangan	141.236.531	735.348.021	652.345.850	715.162.887
63	091	Kementerian Perumahan Rakyat	9.680.226.118	7.960.000		
64	092	Kementerian Pariwisata dan Olah Raga	1.225.169.654	290.693.054	1.050.000	

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 31 DESEMBER 2010

No.	BA	Kemantahan Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited
65	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.628.046.640	3.801.752.442		
66	095	Dewan Perwakilan Daerah	341.431.793	417.038.789		
67	100	Komisi Yudisial R	19.500.000	63.430.675	9.758.000	3.798.000
68	103	Batian Nasional Pengayomanan Bencana	364.636.512.063	38.308.058.050		
69	104	Batian Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia		1.055.457.130		
70	106	Lembaga Kehilangan Pinjaman Bantuan Sesama Pemerintah		707.847.172		
71	107	Batian Sarik Nasional	492.047.967		17.507.000	
72	108	Komisi Pengwas Persaininan Usaha	24.560.405		151.692.061	
73	110	Ombudsman Republik Indonesia	41.580.400			
74	989.03					2.318.040.768.528
75	999.05	BUMD/PKI	18.292.725.077.411	15.798.435.647.230		
76	989.08	BUM Belanja Istimewa	3.486.084.368.048	8.708.506.034.582		
77	990.092	BUM Dit. PKNI	1.137.834.225.983	638.068.754.870		
78	999.999	BUM Baperatarum		3.551.726.799.482		
		JUMLAH	31.780.634.369.020	31.370.392.714.181	8.639.914.082.680	119.116.551.668

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (ASURITED)

DRAFT NR 34.3

BAGIAN LANCAR UTANG OBLIGASI DALAM NEGERI
Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate	Unamortized	BookValue
		Date	Outstanding	%	Prem-/Disc/	
FIXED RATE BOND						
			27.083.469.000.000		(0) 274.007.000	27.016.093.993.000
1	FRC012	15-Jan-'12	7.351.283.000.000	13,1700%	2.315.369.000	7.534.196.399.000
2	FRC018	15-Jul-'12	5.453.087.000.000	13,1700%	-	5.431.989.000.000
3	FRC025	15-Nov-'12	14.727.143.000.000	11,0000%	(10.583.369.000)	14.651.561.000.000
			4.388.463.000.000		-	4.388.463.000.000
1	VH0010	25-Aug-'12	4.388.463.000.000	4,8700%		4.388.463.000.000
GRI						
1	DR 014	10-Nov-'12	12.839.766.000.000	9,4000%	-	12.839.766.000.000
2	DR 026	15-Aug-'12	8.183.783.000.000	9,3400%	-	8.183.783.000.000
			21.020.495.000.000			21.020.495.000.000
1	ZC002	20-Nov-'12	1.249.000.000.000		(100.267.664.000)	1.148.732.136.000
			1.249.000.000.000		(100.267.664.000)	1.148.732.136.000
SURAT UTANG PEMERINTAH						
			4.184.803.289.458			4.184.803.289.458
1	SUD03	11-Jan-'12	3.353.312.636	3,1000%	-	31.353.312.636
2	SUD03	10-Oct-'12	383.731.236.353	3,1000%	-	383.731.236.353
3	SUD04	1-Jan-'12	908.131.934.075	3,1000%	-	908.131.934.075
4	SUD04	1-Dec-'12	911.638.532.710	3,1000%	-	911.638.532.710
5	SUD05	1-Feb-'12	924.801.931.598	3,1000%	-	924.801.931.598
6	SUD07	1-Aug-'12	871.183.322.158	3,1000%	-	871.183.322.158
			58.512.748.789.456		(163.641.631.000)	58.346.607.418.456
BAGIAN LANCAR SUMBER DANA PJB						
			28.800.000.000.000		(890.050.040.000)	28.300.049.960.000
1	SPV02 2009B	01-Feb-'12	380.000.000.000		125.643.70 CCO	3.771.356.396.000
2	SPV02 2009B	01-Mar-'12	34.300.000.000		129.403.359 CCO	4.120.895.359.000
3	SPV02 2009B	01-Apr-'12	880.000.000.000		114.442.358 CCO	8.655.533.354.000
4	SPV02 2009B	01-May-'12	1.020.000.000.000		113.044.132 CCO	10.631.132.132.000
5	SPV02 2009B	01-Jun-'12	4.150.000.000.000		106.387.709 CCO	4.063.816.708.000
6	SPV02 2009B	01-Jul-'12	2.240.000.000.000		105.226.968 CCO	2.144.776.968.000
7	SPV02 2009B	01-Aug-'12	260.000.000.000		105.770.000 CCO	249.446.701.000
8	SPV03 2011B	15-Jan-'12	202.000.000.000		104.370 CCO	193.805.180.000
9	SPV03 2009B	01-Feb-'12	1.100.000.000.000		1.089.512 CCO	1.095.633.158.000
10	SPV03 2009B	23-Feb-'12	300.000.000.000		1.060.379 CCO	291.038.261.000
11	SPV12 2008B	13-Aug-'12	1.830.000.000.000		145.326.334 CCO	1.781.136.366.000
12	SPV12 2008B	01-Sep-'12	2.050.000.000.000		144.105.24 CCO	1.855.890.336.000
13	SPV12 2010B	10-May-'12	4.100.000.000.000		134.152.308 CCO	3.835.631.182.000
14	SPV12 2011B	13-Feb-'12	4.300.000.000.000		111.102.401 CCO	4.112.162.241.000
			79.900.000.000.000		(199.926.940.000)	79.200.043.000.000
SURAT PERBEDAHARAAN NEGARA SYARIAH						
			1.320.000.000.000		(10.151.163.000)	1.309.848.837.000
1	SPME12022012	01-Feb-'12	570.000.000.000		1.080.570 CCO	562.120.461.000
2	SPME12022012	15-Jan-'12	420.000.000.000		0.100.136 CCO	413.618.862.000
3	SPME24022012	24-Feb-'12	380.000.000.000		0.020.308 CCO	379.979.379 CCO
			9.920.290.000.000			9.920.290.000.000
1	SH02	25-Feb-'12	5.352.800.000.000	12,000%		5.555.280.000.000
			5.352.800.000.000			5.352.800.000.000
GSKI						
			3.343.000.000.000			3.343.000.000.000
1	RHH12012	01-Feb-'12	3.343.000.000.000	7,8100%	-	3.343.000.000.000
			3.343.000.000.000			3.343.000.000.000
SISA JANGKA PENDEK (e)						
			6.888.200.000.000		-	6.888.200.000.000
			88.830.500.280.158		(67.748.074.000)	07.752.738.315.458

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (A/2012/2)

DAFTAR 24.B

Utang Bunga/Imbalan (Accrued Interest/Return) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate (%)	Accrued Interest	(Dalam Rupiah)
		Date				
			47.452.758.000,000			13.328.508.888,302
1	FDC17	15/12/2012	7.851.280.000,000	15,1500%	987.671.353.431	
2	FDC19	15/12/2012	9.431.262.000,000	12,1750%	120.799.832.908	
3	FDC19	15/6/2013	11.436.241.000,000	14,2500%	76.923.521.079	
4	FDC20	15/12/2013	10.031.251.000,000	14,2750%	88.733.406.103	
5	FDC23	15/12/2012	14.772.143.000,000	17,0000%	21.715.478.537	
6	FDC26	15/10/2014	13.458.792.000,000	17,0000%	3.543.113.123.807	
7	FDC27	15/6/2015	19.654.700.000,000	9,5000%	80.201.802.000	
8	FDC29	15/6/2017	14.221.733.000,000	10,0000%	268.308.402.108	
9	FDC31	15/9/2016	12.651.200.000,000	16,7500%	14.319.130.003	
10	FDC31	15/11/2020	17.809.100.000,000	1,0000%	254.219.407.000	
11	FDC35	15/3/2016	1.404.000.000,000	15,0000%	55.368.132.000	
12	FDC35	15/3/2017	9.403.414.000,000	12,5000%	348.411.774.113	
13	FDC34	15/6/2012	16.750.400.000,000	128000%	66.016.708.000	
14	FDC35	15/6/2022	11.023.250.000,000	12,3700%	66.354.016.000	
15	FDC36	15/6/2015	13.428.800.000,000	17,0000%	346.335.848.810	
16	FDC37	15/9/2016	2.430.000.000,000	120000%	87.629.800.000	
17	FDC39	15/8/2018	2.521.767.000,000	17,5000%	127.372.097.536	
18	FDC38	15/6/2018	4.176.000.000,000	17,2500%	108.234.087.000	
19	FDC40	15/9/2018	26.471.000.000,000	17,0000%	861.331.488.000	
20	FDC42	15/7/2020	14.774.100.000,000	10,2500%	206.568.406.000	
21	FDC43	15/7/2022	14.417.000.000,000	16,2500%	362.888.637.000	
22	FDC44	15/6/2014	19.011.200.000,000	10,0000%	321.175.380.000	
23	FDC45	15/6/2017	6.401.200.000,000	9,7500%	80.563.900.000	
24	FDC46	15/7/2018	16.856.100.000,000	9,5000%	735.638.530.000	
25	FDC47	15/6/2018	21.641.000.000,000	10,0000%	267.168.430.000	
26	FDC49	15/9/2018	5.679.270.000,000	8,0000%	151.665.268.119	
27	FDC49	15/6/2019	4.786.007.000,000	9,0000%	127.310.790.721	
28	FDC50	15/7/2018	15.806.000.000,000	16,5000%	780.849.400.000	
29	FDC51	15/6/2014	3.838.123.000,000	17,2500%	22.331.542.688	
30	FDC52	15/6/2016	23.501.000.000,000	10,3000%	932.010.000.000	
31	FDC53	15/7/2021	13.622.000.000,000	6,2500%	747.014.020.000	
32	FDC54	15/6/2012	21.036.000.000,000	5,0000%	1.189.135.096.000	
33	FDC55	15/9/2010	15.401.000.000,000	7,3750%	360.932.800.000	
34	FDC56	15/6/2010	17.134.000.000,000	8,3750%	420.578.230.000	
35	FDC57	15/6/2014	13.651.000.000,000	5,0000%	108.214.000.000	
36	FDC58	15/6/2012	9.403.220.000,000	8,2500%	26.323.800.000	
37	FDC59	15/6/2013	7.850.700.000,000	7,0000%	70.343.300.000	
38	FDC60	15/6/2012	3.701.000.000,000	8,2500%	45.294.000.000	
39	FDC61	15/5/2022	4.701.000.000,000	7,0000%	61.169.800.000	
			42.616.370.000,000			100.003.432.785
1	DPIC04	15/6/2012	12.829.756.000,000	5,0000%	80.688.015.623	
2	DPIC05	15/6/2013	3.696.275.000,000	17,5000%	63.255.736.875	
3	DPIC06	15/9/2012	3.189.730.000,000	3,3000%	94.331.807.200	
4	DPIC07	15/6/2013	7.920.000.000,000	7,3500%	26.794.256.000	
5	DPIC08	15/10/2014	11.000.000.000,000	7,3000%	26.696.000.000	

DAFTAR NERACA 384

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AUGUSTUS)

DAFTAR 24.B

**Utang Bunga/Imbalan (Accrued Interest/Return) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2011**

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate (%)	Accrued Interest	(Dalam Rupiah)
		Date				
			135.003.416.000.000		723.777.587.150	
1	WRJ17/3	28/10/2012	4.830.460.000.000	4,6133%	36.811.226.800	
2	WRJ17/9	29/12/2014	13.608.225.000.000	4,6134%	11.371.348.731	
3	WRJ17/20	25/04/2015	9.893.777.000.000	4,8133%	87.992.273.223	
4	WRJ17/21	28/11/2015	7.446.320.000.000	4,4324%	33.449.905.376	
5	WRJ17/22	29/03/2016	9.256.749.000.000	4,4340%	7.943.131.391	
6	WRJ17/23	28/10/2016	3.052.259.000.000	4,8133%	70.933.125.781	
7	WRJ17/24	29/12/2017	9.500.350.000.000	4,4324%	44.512.375.000	
8	WRJ17/25	29/04/2017	8.898.300.000.000	4,4340%	6.946.143.000	
9	WRJ17/26	28/11/2018	6.442.142.000.000	4,8133%	48.375.200.289	
10	WRJ17/27	29/07/2018	5.442.142.000.000	4,8133%	48.375.200.289	
11	WRJ17/28	28/09/2018	7.000.355.000.000	4,4324%	51.638.701.640	
12	WRJ17/29	29/03/2019	13.213.230.000.000	4,4324%	54.857.711.473	
13	WRJ17/30	28/12/2019	10.503.215.000.000	4,4324%	6.022.080.885	
14	WRJ17/31	28/07/2020	26.022.256.000.000	4,6133%	226.390.404.708	
			244.036.437.384.007		8.202.721.802	
SUDAN SRBI						
1	SUDC2	01/04/2026	13.781.773.363.347	0,1010%	4.734.036.004	
2	SUDC4	01/12/2026	61.301.127.180.885	0,1010%	4.038.174.626	
3	SUDC7	01/08/2028	49.104.855.911.932	0,1010%	21.311.911.473	
4	SRB01	01/08/2033	120.007.547.327.420	0,1010%	52.676.048.601	
			61.451.260.000.000		706.615.830.740	
SBSN						
1	IFRCC1	15/08/2023	2.714.700.000.000	1,8000%	120.050.393.700	
2	IFRCC2	15/08/2018	1.558.770.000.000	1,9500%	89.556.046.000	
3	IFRCC3	15/08/2015	7.852.000.000.000	5,2600%	12.736.740.000	
4	IFRCC4	15/10/2012	559.200.000.000	0,0020%	10.548.002.000	
5	IFRCC5	15/01/2017	1.171.000.000.000	6,0010%	48.588.490.000	
6	IFRCC6	15/03/2020	2.175.000.000.000	10,7500%	63.146.132.000	
7	IFRCC7	15/01/2025	1.471.000.000.000	10,2500%	73.357.389.000	
8	IFRCC9	15/03/2030	252.700.000.000	6,8000%	9.576.727.000	
9	IFPC1	15/02/2026	3.713.000.000.000	10,0000%	140.134.120.000	
10	SCH 2C1/2A	13/03/2012	3.862.000.000.000	1,6100%	19.926.086.000	
11	SCH 2C1/3A	17/05/2012	4.250.000.000.000	1,5500%	12.927.001.000	
12	SCH 2C1/4A	09/08/2014	2.835.770.000.000	1,3900%	12.055.176.000	
13	SCH 2C1/4B	28/03/2014	338.000.000.000	1,0000%	48.384.000	
14	SCH 2C1/4C	07/10/2014	2.003.000.000.000	1,1332%	9.554.002.000	
15	SCH 2C1/4D	17/02/2014	6.001.000.000.000	1,8500%	29.360.007.000	
16	SCH 2C2/1A	17/02/2012	2.001.000.000.000	0,0010%	8.012.001.000	
17	SCH 2C2/1B	17/10/2012	3.001.000.000.000	1,1532%	8.887.002.000	
18	SRJ01	25/02/2012	5.536.280.000.000	12,0000%	12.340.132.820	
19	SRJ012	17/02/2013	9.031.980.000.000	6,7010%	41.034.275.700	
20	SRJ013	23/03/2014	7.341.470.000.000	8,1400%	14.471.765.500	
			195.629.800.000.000		4.163.545.829.449	
INTERNATIONAL BOND						
1	RIO014	13/03/2014	11.700.400.000.000	6,7500%	746.346.076.000	
2	RIO015	23/01/2015	8.138.000.000.000	7,2000%	126.869.805.648	
3	RIO010	15/01/2010	3.191.000.000.000	7,5000%	282.241.300.000	
4	RIO011	03/03/2012	3.239.000.000.000	6,8500%	152.354.224.444	

DAFTAR NERACA 385

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKUNTEN)

DAFTAR 24.B

Utang Bunga/Imbalan (Accrued Interest/Return) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate (%)	Accrued Interest	(Dalam Rupiah)
		Date				
5	R10018	17/01/2018	17.229.000.000,00	6,5730%	369.018.072.222	
3	R10015	17/10/2018	14.500.000.000,00	8,8500%	320.829.472.222	
7	R10037	17/12/2018	13.602.000.000,00	6,6250%	326.121.971.657	
8	R10038	17/01/2018	13.139.000.000,00	7,7500%	340.317.335.536	
9	R10020	17/03/2020	18.103.000.000,00	5,8750%	1.154.647.000,00	
10	R1431914	17/05/2014	9.039.000.000,00	11,2750%	148.360.847.657	
11	R1193301	17/03/2018	13.139.000.000,00	11,0250%	365.310.730.000	
12	SM/4	23/04/2014	5.304.000.000,00	3,3500%	67.074.702.222	
13	SM/8	21/11/2018	9.039.000.000,00	4,0000%	40.152.992.222	
14	JY193-19C7	23/11/2018	4.288.000.000,00	3,7500%	47.121.012.222	
15	JY1933010	17/11/2018	7.008.000.000,00	1,0000%	15.261.890.007	
13	R10521	05/05/2012	22.620.000.000,00	4,5750%	171.314.136.637	
TOTAL			1.153.923.030.354.010		18.274.479.498.314	

* Jumlah Utang DI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2011) adalah Rp. 116.60

* Jumlah Utang RBLSD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2011) adalah Rp. 81.000

DAFTAR NERACA 398

Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate	Unamortized	BookValue
		Date	Outstanding	(%)	Premi -(/-Disc%)	
FIXED RATE BOND			27.616.993.993,000		(67.374.000,000)	27.616.993.993,000
1	FB0117	15-Jan-12	7.831.230.000,000	13,0000%	2.973.000,000	7.834.190.000,000
2	FB0118	15-Jan-12	5.430.092.000,000	13,1750%	-	5.430.092.000,000
3	FB0129	15-Dec-12	14.722.430.000,000	11,0000%	(7.297.097,000)	14.051.865.983,000
VARIABLE RATE			4.368.483.000,000			4.368.483.000,000
1	VB01010	26-Nov-12	4.368.483.000,000	4,5000%	-	4.368.483.000,000
DRB			21.020.495.000,000			21.020.495.000,000
1	DR004	12-Mar-12	12.830.795.000,000	6,5000%	-	12.830.795.000,000
2	DR008	18-Aug-12	8.188.700.000,000	6,3840%	-	8.188.700.000,000
ZERO COUPON			1.148.732.136,000		(110.267.864,000)	1.148.732.136,000
1	ZC003	20-Nov-12	1.240.000.000,000	-	(107.267.354,000)	1.143.732.135,000
SURAT UTANG PEMERINTAH			4.184.803.289.456			4.184.803.289.456
1	SUD032	1-Apr-12	872.958.872.888	0,1000%	-	872.958.872.888
2	SUD032	1-Apr-12	881.437.263.348	0,1000%	-	881.437.263.348
3	SUD034	1-Jun-12	838.132.894.016	0,1000%	-	838.132.894.016
4	SUD034	1-Dec-12	811.336.830.716	0,1000%	-	811.336.830.716
E	SUD007	1-Feb-12	820.691.911.556	0,1000%	-	820.691.911.556
E	SUD007	1-Aug-12	871.160.007.136	0,1000%	-	871.160.007.136
BAGIAN LANCAR SNI JK PJB			58.512.240.280,456		(167.641.871,000)	58.344.607.418.456
SPN			29.900.000.000,000		(699.956.940,000)	29.200.043.060,000
1	SPN121120305	5-Feb-12	3.800.000.000,000	-	(25.943.701,000)	3.774.960.299,000
2	SPN121120305	9-Mar-12	3.450.000.000,000	-	(35.400.530,000)	3.414.599.470,000
3	SPN121120308	9-Apr-12	850.000.000,000	-	(11.121.938,000)	838.867.068,000
4	SPN121120501	7-Jun-12	300.000.000,000	-	(13.317.138,000)	886.689.868,000
5	SPN121121105	3-Jun-12	1.194.000.000,000	-	(88.830.742,000)	1.036.819.258,000
6	SPN121120706	8-Jul-12	2.210.000.000,000	-	(35.273.339,000)	2.144.726.032,000
7	SPN121120105	1-May-12	731.000.000,000	-	(65.735,000)	749.440.211,000
E	SPN121120115	10-Jun-12	200.000.000,000	-	(484.870,000)	199.515.130,000
E	SPN121120102	2-Feb-12	1.100.000.000,000	-	(1.138.874,000)	1.061.885.126,000
IC	SPN121120223	28-Feb-12	800.000.000,000	-	(1.380.934,000)	299.619.062,000
11	SPN121121612	18-Aug-12	1.800.000.000,000	-	(2.234.034,000)	1.561.765.968,000
12	SPN121120514	14-Sep-12	2.050.000.000,000	-	(34.179.741,000)	1.965.830.259,000
13	SPN121121005	10-May-12	4.100.000.000,000	-	(34.132.303,000)	3.935.867.152,000
14	SPN121121102	11-Feb-12	4.250.000.000,000	-	(171.332.705,000)	4.179.667.295,000
SUN JANGKA PENDEK (J)			28.800.000.000,000		(609.856.040,000)	28.200.143.960,000
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH			1.320.000.000,000		(10.151.183,000)	1.309.848.837,000

Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity	Principle	Rate	Unamortized	BookValue
		Date	Outstanding	(%)	Premi -/(Disk.)	
1	SP 0310120112	8 Feb-12	631.000.000.000	-	(1.380.613.000)	598.619.481.000
2	SP 0310120112	12 Mar-12	421.000.000.000	-	(8.150.468.000)	413.849.532.000
3	SPV824022012	24-Feb-12	330.000.000.000	-	(2.720.206.000)	327.279.794.000
SESN			5.550.290.000.000			5.550.290.000.000
	SOH1	26-Feb-12	5.550.290.000.000	12.00%	-	5.550.290.000.000
SOH1			3.342.000.000.000			3.342.000.000.000
1	SOH 27122	3-Mar-12	3.342.000.000.000	7.9100%	-	3.342.000.000.000
SESN JANGKA PENDEK (%)			3.898.290.000.000			3.898.290.000.000
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			98.630.539.280.456		(877.749.974.000)	97.752.789.315.456

LAFCRAN KE-A134N PEMERINTAH FUSAT T4 - M. 25/1 (ADDITION)

DIFAR 23 A

**Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2011**

LAFCRAN KE-4 (CAN PEN 35157) FUS4T T4 - M 2511 (ADOPTED)

DIFAR 23 A

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity	Principal	Rate	Unamortized	Book Value
		Date	Outstanding	(%)	Prem(+)/Disc(-)	
1	WFO01	28/12/2011	12.68E 226,330,000	4,46%DC%	-	12.59E 225,000,000
2	WFO02	29/04/2011	3.89E 037,320,000	4,81C38%	-	3.89E 037,000,000
3	WFO02	29/11/2011	7.44E 020,770,000	4,46740%	-	7.44E 020,000,000
4	WFO02	29/03/2011	3.78E 049,030,000	4,46740%	-	3.78E 049,000,000
5	WFO02	29/10/2011	3.65E 056,320,000	4,81C38%	-	3.65E 056,000,000
6	WFO04	26/12/2011	3.03E 310,770,000	4,40740%	-	3.03E 310,000,000
7	WFO05	26/09/2011	6.90E 010,320,000	4,46540%	-	6.90E 010,000,000
8	WFO06	26/07/2011	6.12E 112,320,000	4,81C38%	-	6.12E 112,000,000
9	WFO07	29/07/2011	5.44E 142,770,000	4,81C38%	-	5.44E 142,000,000
10	WFO08	29/08/2011	7.00E 984,320,000	4,46540%	-	7.00E 984,000,000
11	WFO08	26/08/2011	12.71E 2,821,030,000	4,46540%	-	12.71E 2,821,000,000
12	WFO09	29/12/2011	10.53E 015,320,000	4,40740%	-	10.53E 015,000,000
13	WFO09	29/07/2011	25.32E 354,770,000	4,81C38%	-	25.32E 354,000,000
SURAT UTANG PEMERINTAH			240,451,634,074,551			240,451,634,074,551
1	SUD02	01/04/2025	19.07E 430,887,916	C,10000%	-	18.07E 450,587,616
2	SUD03	01/12/2025	43.92E 1,76,853,133	C,10000%	-	43.92E 1,73,853,133
3	SUD07	01/08/2025	40.75E 718,853,133	C,10000%	-	40.75E 718,853,133
4	SUD01	01/08/2033	126.35E 947,927,433	C,10000%	-	126.35E 947,927,433
Total SUN Jangka Panjang (a)			840.841,730,074,551		[4.274.404,300,000]	\$30.507,325,700,551
SBSTU			52.552,370,000,000		300.328,340,000	52.853,298,340,000
1	IFS001	15/08/2011	2.11E 110,320,000	1,80DC%	-	2.11E 110,000,000
2	IFS002	15/08/2013	1.99E 010,320,000	1,95000%	-	1.99E 010,000,000
3	IFS003	15/09/2016	2.62E 010,320,000	5,25000%	43.044.124,000	2.375.044,24.000
4	IFS004	15/10/2013	5.93E 010,320,000	2,00DC%	12.322.945,000	5.955.351,000
5	IFS005	15/11/2017	1.171.000,320,000	5,00000%	37.714,412,000	1.20E 714,412,000
6	IFS006	15/03/2020	2.17E 010,770,000	1,25000%	14.97E 747,000	2.16E 970,747,000
7	IFS007	15/11/2026	1.94E 010,320,000	1,29000%	4.38E 1,070,000	1.95E 988,107,000
8	IFS008	15/03/2020	252.000,000,000	8,80000%	(268.625,000)	25E 781,374,000
9	IFS010	15/02/2036	3.711.010,770,000	1,00000%	205.814,457,000	3.01E 814,457,000
10	SGT101	27/06/2013	4.26E 010,320,000	2,85000%	-	4.26E 010,000,000
11	SGT101/A	15/08/2011	2.88E 010,320,000	1,38000%	-	2.88E 010,000,000
12	SGT101/B	25/08/2014	33E 010,070,000	7,30000%	-	33E 010,000,000
13	SGT101/C	07/10/2014	2.03E 010,320,000	7,18000%	-	2.03E 010,000,000
14	SGT101/D	11/12/2014	1.01E 010,320,000	7,38000%	-	1.01E 010,000,000
15	SGT201/A	15/04/2021	2.03E 010,320,000	8,00000%	-	2.03E 010,000,000
16	SGT201/B	21/02/2021	3.01E 010,770,000	7,16000%	-	3.01E 010,000,000
17	SGT002	10/02/2013	9.00E 080,320,000	6,40000%	-	8.00E 080,000,000
18	SGP002	28/02/2014	7.31E 10,320,000	8,15000%	-	7.31E 10,000,000
Total SBTU Jangka Panjang (b)			52.552,370,000,000		300.328,340,000	52.853,298,340,000
TOTAL SBM Jangka Panjang (a+b)			893.394,700,074,551		[3.974.402,822,000]	\$89.420,622,052,551

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Luar Negeri (Valas)
Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indication	Indexed Principle Outstanding	Unamortized Premium(+)/Discount(-)	Book Value
SUM VALAS (USD)			181,124,485,578,150		-11,452,385,578,150	169,571,800,000,000	274,123,883,000	189,845,722,688,000
1	R10014	10-Mar-14	11,330,165,221,750	6,75%	458,234,778,250	11,703,400,000,000	-11,263,179,000	11,777,136,821,000
2	R10015	20-Apr-15	9,613,000,000,000	7,25%	545,000,000,000	9,068,000,000,000	-25,761,411,000	9,042,238,589,000
3	R10016	15-Jan-16	9,099,000,000,000	7,50%	937,800,000,000	8,161,200,000,000	-27,429,039,000	8,133,770,961,000
4	R10017	8-Mar-17	9,370,000,000,000	6,88%	302,000,000,000	8,068,000,000,000	-38,885,548,000	8,029,144,452,000
5	R10018	17-Jan-18	17,904,549,384,750	6,88%	575,349,384,750	17,239,200,000,000	-174,784,026,000	17,054,436,974,000
6	R10035	12-Oct-35	15,436,000,000,000	9,50%	927,200,000,000	14,508,600,000,000	904,513,271,000	15,413,313,271,000
7	R10037	17-Feb-37	13,575,648,587,500	6,63%	26,351,42,500	13,602,000,000,000	-18,782,127,000	13,420,207,873,000
8	R10038	17-Jan-38	18,728,115,845,000	7,75%	583,115,845,000	18,136,000,000,000	-365,232,488,000	17,770,747,502,000
9	R10020	13-Mar-20	18,550,000,000,000	5,88%	-414,000,000,000	18,138,000,000,000	0	18,138,000,000,000
10	R1140504	4-May-14	12,025,000,000,000	10,38%	-2,957,000,000,000	9,068,000,000,000	-29,654,486,000	9,038,305,514,000
11	R1190304	4-Mar-19	24,050,000,000,000	11,63%	5,914,000,000,000	18,136,000,000,000	-124,917,757,000	18,011,082,243,000
12	R10521	5-Mar-21	21,441,886,560,150	4,88%	1,228,013,439,850	22,670,000,000,000	349,340,488,000	23,019,340,488,000
SESS VALAS (USD)			16,066,798,522,903		-1,104,590,522,903	14,962,200,000,000	0	14,962,200,000,000
13	SM14	23-Apr-14	7,031,748,227,903	9,80%	-1,137,548,227,903	5,894,200,000,000	0	5,894,200,000,000
14	SM18	21-Nov-18	9,035,050,295,000	4,00%	32,949,705,000	9,068,000,000,000	0	9,068,000,000,000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 [45/2012]

PARTÍCULAS 301

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 [A/R/TT/01]

DAFTAR 21.8

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Luar Negeri (Valas)
Per 31 Desember 2011

No.	Seri	Maturity Date	Issue Principle Outstanding		Rate (%)	Assumed Interest	Indexed Principle Outstanding	Unauthorized Premium (+) Discount (-)	Book Value	[Dalam Rupiah]
			Interest	Principal						
SUM VALAS (JPY)			10.136.743.000.000				903.800.000.000	11.098.000.000.000		9
14 RUP/0719		29-Jul-19	3.695.300.000.000	2.73%	392.700.000.000	4.098.000.000.000			0	4.098.000.000.000
15 RUP/1120		20-Nov-20	6.490.800.000.000	1,60%	517.200.000.000	7.008.000.000.000			0	7.008.000.000.000
Jumlah SBHN Valas			16.066.798.522.903		-1.104.598.522.903	14.962.200.000.000			0	14.962.200.000.000
Jumlah SUM Valas			191.211.213.579.150		-10.562.985.579.150	130.657.600.000.000			274.123.698.000	130.641.723.698.000
TOTAL			207.270.012.102.053		-11.667.564.102.053	195.626.800.000.000			274.123.698.000	195.603.923.698.000

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2011) : 11630,00 %

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2011) : 90680,00 %

**INFORMASI LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011**

NO	KODE BM	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KOMERSIAGATGAS		KOREKSIAK ABSIUT	BELAH KOREKSIA NETTO	
			40.05.01.00.001	40.07.02.01.001		40.01.01.01.001	40.01.01.01.001
1	011	DEPARTEMEN KERISTENIAN DAN KONSEP	298.100.700.872	298.100.700.872	-	-	-
2	012	DEPARTEMEN KERJA DAN PERTANIAN	163.021.666.282	163.021.666.282	-	-	-
3	013	DEPARTEMEN KERJA KEJAKRAN	215.015.386.011	215.015.386.011	-	-	-
4	014	DEPARTEMEN KUKUP	2.014.595.820.072	2.014.595.820.072	-	-	-
5	016	DEPARTEMEN KUMHAM	3.120.176.020.641	3.120.176.020.641	30.071.731.011.014	30.071.731.011.014	30.071.731.011.014
6	017	DEPARTEMEN KEGIATAN PEMERINTAH	2.165.123.026.011	2.165.123.026.011	35.123.131.011.012	35.123.131.011.012	35.123.131.011.012
7	018	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKERAS	1.119.100.788.741	1.119.100.788.741	5.115.100	5.115.100	5.115.100
8	019	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	1.120.176.020.641	1.120.176.020.641	30.071.731.011.014	30.071.731.011.014	30.071.731.011.014
9	020	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	6.026.119.025.719	6.026.119.025.719	25.310.355.104	25.310.355.104	25.310.355.104
10	021	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	7.078.226.026.016	7.078.226.026.016	15.111.131.011.012	15.111.131.011.012	15.111.131.011.012
11	022	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	7.075.229.191.142	7.075.229.191.142	16.011.011.001.002	16.011.011.001.002	16.011.011.001.002
12	023	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	1.181.141.801.231	1.181.141.801.231	-	-	-
13	024	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	2.162.155.751.011	2.162.155.751.011	35.123.131.011.014	35.123.131.011.014	35.123.131.011.014
14	025	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	7.114.167.127.631	7.114.167.127.631	14.351.355.104	14.351.355.104	14.351.355.104
15	026	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	46.042.004.000.000	46.042.004.000.000	35.321.131.011.012	35.321.131.011.012	35.321.131.011.012
16	027	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	1.557.787.908.983	1.557.787.908.983	35.321.131.011.012	35.321.131.011.012	35.321.131.011.012
17	028	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	3.020.422.381.471	3.020.422.381.471	40.016.474.070	40.016.474.070	40.016.474.070
18	029	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	1.116.226.026.016	1.116.226.026.016	41.016.474.070	41.016.474.070	41.016.474.070
19	030	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	4.072.557.758.877	4.072.557.758.877	41.016.474.070	41.016.474.070	41.016.474.070
20	031	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	2.334.025.024.321	2.334.025.024.321	4.025.355.104	4.025.355.104	4.025.355.104
21	032	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	1.168.267.827.412	1.168.267.827.412	41.016.474.070	41.016.474.070	41.016.474.070
22	033	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	19.570.258.000.011	19.570.258.000.011	11.411.001.001	11.411.001.001	11.411.001.001
23	034	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	681.857.911	681.857.911	-	-	-
24	035	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	1.224.001.001	1.224.001.001	-	-	-
25	036	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	7.991.700.771	7.991.700.771	-	-	-
26	037	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	1.854.259.028.513	1.854.259.028.513	1.354.275.403	1.354.275.403	1.354.275.403
27	038	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	3.024.001.001	3.024.001.001	-	-	-
28	039	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	9.750.781.005.613	9.750.781.005.613	51.145.053	51.145.053	51.145.053
29	040	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	5.548.555.931	5.548.555.931	1.053.322	1.053.322	1.053.322
30	041	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	32.419.000.740	32.419.000.740	222.200.114	222.200.114	222.200.114
31	042	DEPARTEMEN KERJA DAN KONSEP	2.149.761.871	2.149.761.871	-	-	-
32	043	DEPARTEMEN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	3.837.001.771	3.837.001.771	1.051	1.051	1.051
33	051	DEPARTEMEN PELAJARAN	722.179.667.315	722.179.667.315	-	-	-
34	052	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	5.678.173.971	5.678.173.971	-	-	-
35	053	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	3.150.104.341	3.150.104.341	-	-	-
36	054	DEPARTEMEN STATISTIK	30.014.000.115	30.014.000.115	2.301.013.264	2.301.013.264	2.301.013.264
37	055	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	1.071.155.981.107	1.071.155.981.107	-	-	-
38	056	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	1.465.102.992.738	1.465.102.992.738	4.350.258.587	4.350.258.587	4.350.258.587
39	057	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	20.047.000.100.103	20.047.000.100.103	17	17	17
40	058	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	1.021.143.111.111	1.021.143.111.111	15.477.130	15.477.130	15.477.130
41	059	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	21.111.143.111.111	21.111.143.111.111	15.477.130	15.477.130	15.477.130
42	060	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	22.510.408.008.723	22.510.408.008.723	32.511.451.122	32.511.451.122	32.511.451.122
43	061	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	3.211.000.000.001	3.211.000.000.001	21.024.741.261	21.024.741.261	21.024.741.261
44	062	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.711.559.049	10.711.559.049	-	-	-
45	063	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	359.467.545.733	359.467.545.733	58	58	58
46	064	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	162.260.121.271	162.260.121.271	-	-	-
47	065	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	2.131.000.710	2.131.000.710	-	-	-
48	066	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	4.111.143.111.111	4.111.143.111.111	-	-	-
49	067	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	457.052.862.345	457.052.862.345	558.240.517	558.240.517	558.240.517
50	068	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	161.407.010.010	161.407.010.010	-	-	-
51	069	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
52	070	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
53	071	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
54	072	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
55	073	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
56	074	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
57	075	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
58	076	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
59	077	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
60	078	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
61	079	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
62	080	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
63	081	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
64	082	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
65	083	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
66	084	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
67	085	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
68	086	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
69	087	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
70	088	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
71	089	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
72	090	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
73	091	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
74	092	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
75	093	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
76	094	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
77	095	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
78	096	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
79	097	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
80	098	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
81	099	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
82	100	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
83	101	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.000	31.133.382.000	31.133.382.000
84	102	DEPARTEMEN TANAMAN HIBRIDA	10.011.000.000.001	10.011.000.000.001	31.133.382.		

**INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011**

NO	KODE BM	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KOREKSIA		BELANJA KOREKSIA	
			KOREKSIA SATUAN	KOREKSIA %	ABSSOLUT	NETTO
56	04*	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	10.659.301.571	100.000.000.000	10.659.301.571	100.000.000.000
57	022	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	257.452.409.103	257.452.409.103	1.067	1.067
58	033	EDAM INVENTARIS GEOPOLITIK	(8.865.370.840)	89.893.370.840	-	-
59	091	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	2.119.772.231	2.119.772.231	-	-
60	033	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	16.711.815.246	16.711.815.246	-	-
61	033	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	164.322.018.261	164.322.018.261	-	-
62	092	MINISTERI KELAUTAN DAN PERIKERASIAN	20.819.100.000	20.819.100.000	11.450.500	11.450.500
63	033	EDAM KEPERLUAN MEDIKA	159.757.788.583	159.757.788.583	363	363
64	033	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN DAN PENAMBANGAN	1.100.765.707.231	1.100.765.707.231	-	-
65	093	EDAM LINGKUP PEMERINTAH	380.000.000	380.000.000	284.250.000	284.250.000
66	01	GENERAL PENGAWASAN PEMERINTAH	-	-	-	-
67	032	GENERAL PEMERINTAH DAN OLIGARKIA	17.515.024.023	17.515.024.023	-	-
68	093	EDAM LINGKUP PEMERINTAH	380.000.000	380.000.000	-	-
69	031	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	5.370.510.085.735	5.370.510.085.735	-	-
70	033	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	3.245.363.671	3.245.363.671	-	-
71	133	EDAM PENGAWASAN	18.749.000	18.749.000	-	-
72	131	EDAM KEGIATAN PEMERINTAH DAN PENGETAHUAN	2.174.101.851	2.174.101.851	-	-
73	134	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	12.459.020.401	12.459.020.401	12.459.020.401	12.459.020.401
74	133	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	-	-	-	-
75	131	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	-	-	-	-
76	132	EDAM PENGETAHUAN	63.401.150.031	63.401.150.031	244.16.214	244.16.214
77	133	EDAM PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN	-	-	-	-
TOTAL			442.218.620.000.128	442.218.620.000.128	1.036.198.316.102	1.036.198.316.102

ESTATE PLANNING FIFTY PRACTICE HIGHLIGHTS

RIGHTS RESERVED: READING BODANIS © 2007, PNUA
JETT DEWAJAH DAW: E-UNITAS
www.jett-dewa.com | jett-dewa@jett-dewa.com | 081212345678

三五

111

ESTATE PLANNING FIFTY PRACTICE HIGHLIGHTS

RIGHTS RESERVED: READING BODANIS © 2007 - PNUA
JETT DEWAJAH DIA: EMT28
www.jettdia.com | jett@jettdia.com | 081211211111
EDUCATION & CULTURE

THE MASTERS 414

100

WHITEHORN LTD., 7600, 78TH AVENUE, LETHBURN, ALBERTA, CANADA T1P 1K9
TELEPHONE 422-8138
ESTATE PLANNING

ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀՐԵՎ ՄԱՐԴԿԱԳՈՐԾՎԱԿԱՆ ԲՐԵՏ-1 ԱՌԱԽԱՐԵՆ

三一書局

-3-

IN THE MATTER OF: JEFFREY AND BONNIE COOPER, PLAINTIFFS
vs. STEPHEN KENNAUGH, DEFENDANT

116

-5-

**MINISTERI LAMPUUAN RUMAH DAN PERKELAHIAN UNTUK
PEKERJAAN, BENGKALIS, DAN SURPLUS JENISITI**
Per 31 December 2011
KEDAI KERASAN SAN

三

卷之三

ଭାରତୀୟ ଲୋକନାମିତି ପାଇଁ ଦେଶଭାଷା ଲାଭାନ୍ଵିତ ଉତ୍ସବ
ପ୍ରେସ୍‌ରୁକ୍ତି ଅଛି, ଯାଏ ଯୁଗରୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ।
ଆଜିର ଦିନ ହେଉଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିନ ।
ଆଜିର ଦିନ ହେଉଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିନ ।

三

三

INITIATIF KERAPATI KEDUAKAN KEPADA LAKUKAN UNTUK
PELUKATAN, DESEN, DAUZ SAMA-SAMA
Pkt 31 December 2011
PERDAGANGAN SAR.

卷之三

INITIATIF KERAPATI KERUGIAN KEPADA LAMAN UMMI
PERUPATI, DESEN, DAN SURPLUS SEMARANG
Per 31 Desember 2011
REDAKSIAN SRI

卷之三

**MINISTERI KERAPATAN DAN SAINS
PERDAPATAN, BESAN, DAN SUMBER ALAM**
PERDAPATAN, BESAN, DAN SUMBER ALAM
PUR 31 DESEMBER 2011
REDAKSIAGRIAN SAR.

102

卷之二

MINISTERI KERAPATI KEBUDAYAAN DAN SAINS
PERPADUAN, DESEN, DIAU SURNALUS JENAMA
Per 31 December 2011
REDAKSIENAN SAR.

111

ISSN 1062-1024 • 24 PAGES • OCT. 2004 • \$2.25

INITIATIF KERAPATI KUNCIAN KEPADA LATIHAN UNTUK
PEJOHATAN, DESEN, DAUR SURPLUS DAN SARA
Per 31 Desember 2011
BERDAGIAN SAR

卷之三

apresiasi Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Analisis)

DAFTAR 25 C

**PENGUNJANGAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA 85 SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
SESUAI DENGAN KMKG NOMOR 65/KMKL/DB/2012
PER 31 DESEMBER 2011 (Analisis)**

No	Badan Layanan Umum	Nilai Terdahulu	Akumulasi Penyusutan	Nilai Setelah Disusutkan
024 KEMENTERIAN KESEHATAN				
1 RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo	2.206.15.085.600	408.19.130.651	1.898.930.729.600	
2 RSUP Samarinda	470.453.449.600	168.502.039.37	301.950.610.600	
3 RSUP Purworejo	194.390.792.500	63.960.913.833	131.237.878.670	
4 RSUP dr. Sardjito	48.327.076.700	2.9.314.337.629	45.412.739.071	
5 RSUP dr. Soetomo	1.316.264.000.000	64.742.000.000	1.241.342.000.000	
6 RS Faisal Chalatna	1.110.292.401.658	127.038.103.09	982.923.308.570	
7 RSUP Dr. Haji Sulaiman	1.104.327.139.811	35.995.232.893	768.325.651.652	
8 RSUP dr. Kartini	1.153.063.923.101	222.306.572.407	9.927.279.339	
9 RSUP dr. Sardjito	385.077.398.418	58.172.627.013	326.950.771.400	
10 RSUP dr. M. Tegar	1.073.124.037.671	144.061.000.609	30.738.000.763	
11 RSUP dr. M. Djamil	48.473.001.687	2.5.426.429.711	246.309.600.608	
12 RSUP dr. Wahid Hasyim	308.126.089.782	29.350.838.141	635.375.191.651	
13 RSUP Singaperbangsa	302.952.971.292	224.776.934.762	46.176.030.600	
14 RSUP dr. Amanullah	124.966.703.439	202.726.488.691	46.174.321.448	
15 RSUP dr. Amurah Tirtonegoro	954.000.910.625	60.106.970.600	134.902.921.207	
16 RSUP Prof. Dr. S. D. Kartika	308.396.022.500	80.226.835.887	228.560.186.613	
17 RS Wahidien	106.297.208.600	63.712.537.873	135.478.688.633	
18 RSU Pem. U. & Soeharto	71.288.549.717	62.103.134.290	32.185.015.488	
19 RSP dr. I. W. Pratinoto	270.404.449.442	26.730.63.469	243.373.797.575	
20 RSP dr. Arifin Nasution	106.121.053.600	23.100.324.283	83.120.722.840	
21 RSP dr. Suryono Paluwidjaja	90.544.888.555	35.906.887.883	55.334.813.388	
22 RSPdr. Eustiqo	72.353.471.150	12.716.854.829	59.336.615.321	
23 RSJdr. Soeharto Hendjar	386.106.251.217	27.985.537.863	3.61.045.013.387	
24 RSJdr. Marzuki Yani	510.348.743.760	45.546.032.302	431.420.610.404	
25 RSJdr. Dr. Soerewo	343.152.082.682	30.920.031.803	3.4.002.020.684	
26 RSJdr. Radjiman Widodikaryo	168.590.081.500	40.321.493.201	120.373.576.308	
27 RSU dr. Soekarno	72.231.569.393	41.725.088.377	31.503.878.556	
28 RS dr. Sriwijaya	320.548.525.400	15.711.154.672	293.937.371.824	
29 RSPdr. Siswandi Paknon	170.729.005.618	19.345.330.069	154.382.735.840	
Suk Jumlah	10.396.594.050.520	3.358.581.078.542	12.880.003.780.070	
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
1 Balon Pendirian Sekretariat dan Pengembang Jalan	3.102.327.825	448.981.927	2.653.345.000	
Suk Jumlah	3.102.327.825	448.981.927	2.653.345.000	
035 KEMENTERIAN KEUANGAN				
1 Bank dr. Inggris Indonesia	812.732.700.294	57.121.017.375	755.303.682.820	
2 Bank Mandiri	12.713.323.531	3.321.328.457	9.103.914.174	
Suk Jumlah	815.445.028.565	58.324.325.832	756.111.000.793	
036 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1 Balon Komunikasi dan Informatika Perpres	4.740.375.346	13.148.140.710	38.127.234.627	
Suk Jumlah	51.278.370.346	13.148.140.710	38.127.295.827	
041 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM				
1 Perdagangan Bahan Bahan	10.397.263.249	3.263.765.906	7.134.497.343	
Suk Jumlah	10.951.263.249	3.263.765.906	7.257.487.343	
020 KEMENTERIAN KEHUTANAN				
1 Pusa. Penitikan Peleburan dan Jukung	5.792.591.257	780.322.510	4.708.269.744	
Suk Jumlah	5.498.591.254	780.322.510	4.708.269.744	
042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI				
1 Pusa. Pengajaran PTPTN	6.520.197.213	8.789.032.033	2.748.125.551	

DAFTAR NERACA 416

aporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Analisis)

DAFTAR 25 C

**PENGUNJANGAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA 85 SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
SESUAI DENGAN KMKG NOMOR 65/KMKL/DB/2012
PER 31 DESEMBER 2011 (Analisis)**

No	Badan Layanan Umum	Nilai Pendahuluan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Setelah Disusutkan
	Sisa Jumlah	9.548.197.216	6.798.092.666	2.749.104.550
042 BADAN PENGIKALIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI				
1 BPPT Energia	1.311.550	20.419	1.290.931	
	Sisa Jumlah	1.311.550	20.419	1.290.931
025 KEMENTERIAN AGAMA				
1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	1.386.903.523.820	212.335.820.007	1.173.573.823.813	
2 Universitas Islam Negeri Sultan Qasim Pd. Banten	316.372.037.508	59.360.593.193	277.557.443.110	
	Sisa Jumlah	1.603.275.561.128	271.796.192.205	1.375.083.383.953
082 LAPAN				
1 Pusat Penelitian Teknologi Digerakan (PITERGAT)	327.339.095	333.757.803	563.581.292	
	Sisa Jumlah	327.339.095	333.757.803	563.581.292
019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
1 Pusat Riset dan Analisis Bahan	43.168.885.103	12.275.517.381	28.893.367.742	
2 Balai Besar Industri Arzo	11.187.853.652	1.330.134.007	8.856.719.645	
3 Balai Besar R&D Pengembangan Pengaralan Industri	33.996.290.562	2.182.453.705	31.813.736.856	
	Sisa Jumlah	167.337.049.317	36.208.197.074	151.098.852.243
007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA				
1 Pusat Pengembangan Komunikasi dan Pengembangan PPKB	50.118.305.187.678	1.972.411.539.797	49.336.893.388.721	
2 Pusat Pengembangan Komunikasi dan Pengembangan PPKB Jakarta	24.786.707.893.671	7.361.436.272	24.719.120.462.342	
	Sisa Jumlah	74.605.090.993.229	187.088.552.169	74.418.001.891.062
023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL				
1 Universitas Daarul Ulum	2.521.850.813	1.115.980.77	2.335.129.538	
2 Universitas Pendidikan	1.321.002.650	-	1.321.002.650	
3 Universitas Muhammadiyah	813.539.638	105.342.295	708.190.373	
4 Universitas Islam Negeri Maulidin	1.304.749.592	321.696.295	2.782.052.297	
5 Universitas Binaan	3.174.031.833	98.175.91	3.075.855.932	
6 Universitas Negeri Semarang	308.775.195	-	308.775.195	
7 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	1.362.733.876	-	1.362.733.876	
8 Universitas Islam Gontor	301.059.012	-	301.059.012	
9 Universitas Muhammadiyah	300.599.177	-	300.599.177	
10 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim	1.377.701.882	200.408.824	2.171.298.038	
11 Universitas Islam Ngurah Rai	1.388.884.292	35.087.419	1.353.806.873	
12 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	324.303.476	-	324.303.476	
13 Universitas Islam Darul Ulum	321.051.680	-	321.051.680	
14 Universitas Islam Syarif Hidayatullah	1.322.993.713	220.932.814	2.312.031.132	
15 Universitas Halmahera	77.721.402	-	77.721.402	
	Sisa Jumlah	24.572.334.933	1.067.720.805	23.510.114.128
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
1 Balai Besar Pendidikan Pengajaran dan Penelitian - Ibu	14.571.793.687	57.377.553.823	105.194.230.839	
2 Balai Latihan dan Pelatihan dan OS PJ	846.702.108.087	56.471.102.648	801.230.147.030	
3 Politeknik Ilmu Kependidikan Mataram	404.942.481.468	20.273.453.375	384.668.898.111	
4 Politeknik Ilmu Kependidikan Samarinda	50.212.731.635	45.12.480.602	50.166.250.633	
	Sisa Jumlah	1.085.179.091.445	151.246.101.653	1.024.123.980.702
091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT				
1 Pusat Penelitian Perumahan	2.504.062.700	30.604.453	2.465.450.247	
	Sisa Jumlah	2.504.062.700	30.604.453	2.465.450.247

DAFTAR NERACA 417

LAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA DAN PENGETAHUAN
PERIODE APRIL DAN TOTAL ASSET
Per 31 Desember 2011
dalam Rupiah

אל גאנטן גאנטן

LAFCOURT, MAMBA & D'ARCY, 2011 [REVIEW]

**LAPORAN KEGIATAN LEMAGA MATA STRUKTURAL
APLIKASI APBN DAN TOTAL ASSET**
Per 31 Desember 2011
dalam Rupiah

卷之三

AFFERNAL (AFFERNA) 201 AUGUST

**LAMPIRAN LAPORAN KINERJA DAN ANALISIS STRUKTURAL
APBN, APBN/APBI DAN TOTAL ASSET**
Per 31 Desember 2011
dalam Ribuan Rupiah

卷二

卷之五

卷之三

**LAMPIRAN LAPORAN KINERJA DAN ANALISA MASA DEPAN STRUKTURAL
APBN, APBN/APBN DAN TOTAL ASSET**
Per 31 Desember 2011
dalam Rupiah

卷之三

**LAPORAN LEMBAGA PENGETAHUAN DAN TOTAL ASET APBN : RUMAH ABDI DAN TOTAL ASET
Per 31 December 2011
Dalam Ribuan Rupiah**

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	BELAKUA PENGAWAS	BELAKUA BARANG	BELAKUA N DUL	BELAKUA LAIN	JUMLAH BELAKUA RELAWA	312A	TOTAL ASET BERGARIS	MOU APBN	DETER UDIAU	Kerangka BK
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	Lembaga Pengetahuan dan Total APBN	194.751	-	-	-	-	194.751	-	-	-	-	14
83	Lebih banyak dikenal dengan nama BK	20.000.000	2.500.000	3.000.000	6.000.000	10.500.000	30.000.000	20.30.270	30.000.000	20.30.270	20.30.270	007
84	Lembaga Pengelolaan dan Pengembangan NKRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008
85	Pengelolaan dan Pengembangan NKRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040
86	Universitas Syiah Kuala (USK)	10.300.714	3.014.843	1.587.650	-	-	15.897.197	14.545.718	14.545.718	14.545.718	14.545.718	024
87	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	55.408.987	10.300.714	3.014.843	1.587.650	-	70.212.538	67.239.381	67.239.381	67.239.381	67.239.381	009
88	Sekolah Tinggi Psikologi	25.591.800	-	-	-	-	25.591.800	16.012.704	16.012.704	16.012.704	16.012.704	007
89	Universitas Islam Negeri Raden Intan Palembang	70.054.012	11.330.754	3.232.270	12.737.100	-	47.327.211	25.472.211	25.472.211	25.472.211	25.472.211	007
90	Universitas Syiah Kuala (USK)	8.300.716.036	10.300.714	3.014.843	1.587.650	-	8.300.716.036	8.300.716.036	8.300.716.036	8.300.716.036	8.300.716.036	024
91	JUMLAH	8.300.716.036	10.300.714	3.014.843	1.587.650	-	8.300.716.036	8.300.716.036	8.300.716.036	8.300.716.036	8.300.716.036	024

DRAFT NERDA 22.B

**LINTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2011**
[Dalam Riluan Rupiah]

No.	Badan Hukum Milik Negara	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Bahan Operasional	Bahan Non Operasional	Total Beban	Surplus / Defisit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (5)-(8)
1	Yayasan Hartapan Kita Badan Pengelola dan Pengembangan Tbk	87.750.900	-	87.750.900	65.821.227	1.944.552	67.885.779	(14.879)
2	Yayasan Sarana Wana Jayati Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti	48.061.307	1.734.931	49.796.238	44.315.644	4.381.406	48.697.050	1.099.188
3	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	4.907.533	-	4.907.533	3.588.257	146.754	3.735.011	1.172.522
4	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	-	-	-	-	-	-	-
5	Yayasan Gedung Arsitek Nasional RI	-	-	-	-	-	-	-
6	Yayasan Yusnisia Dharmayulisti Karini	-	-	-	-	-	-	-
7	Yayasan Purna Bhakti YARHATI	-	-	-	-	-	-	-
8	Yayasan Pengembangan Bumi	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	120.719.740	1.734.931	122.454.671	113.825.128	6.472.712	120.297.840	2.156.831	

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2011 (dalam Rupiah)

DRAFT NERDA 423

LIKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN
AKTIVA, KEWAJIBARA DAN EQUITAS
PER 31 DESEMBER 2011
(Dalam Rupiah Rupiah)

No	Nama Yayasan	Kemunculan Lembaga	Aset Lumar	Aset Tersip	Aset Lainnya	Investasi	TOTAL Aset	Kewajiban JK Pendek	Jn Pendek	Kewajiban Emisi Denda	TOTAL	Total Kewajiban & Harus dibayar	KET
1	2	3	4	5	6	7-3+4+5+6	8	9	10-8-9	11	12-10-11	14	
1	*Ayaman Basapen Kuta-Bedug-Pejabotek	G.Kantor Kantor	R.EP32.2.01	R.EP32.2.21	11.520.528		81.511.232	6.145.138	14.016.252	45.310.511	61.501.762	74.2011	
2	*Ayaman Basapen Kuta-Bedug-Pejabotek	Kantor Kantor	R.EP32.2.02	R.EP32.2.04	8.831.946		64.224.431	11.339.044	1.232.291	20.141.411	21.382.990	44.334.431	74.2011
3	*Ayaman Basapen Kuta-Bedug-Pejabotek	Sekretariat	R.EP32.2.03	R.EP32.2.09	1.953.632		11.133.911	1.232.9		1.332.9	11.120.598	11.120.598	74.2011
4	*Ayaman Basapen Kuta-Bedug-Pejabotek	Dinas	R.EP32.2.11	R.EP32.2.11	7.012.592		7.602.583			7.302.593		7.602.583	74.2008
5	*Ayaman Basapen Kuta-Bedug-Pejabotek	Mil											
6	*Ayaman Basapen Kuta-Bedug-Pejabotek	Kantor Kantor	R.EP32.2.01	R.EP32.2.23	3.288.000	16.796.000	19.084.000	40.439.5	46.382	51.539.73	113.826.445	113.826.445	74.2008
7	*Ayaman Basapen Kuta-Bedug-Pejabotek	Kantor Kantor	R.EP32.2.01	R.EP32.2.23	3.288.000	16.796.000	19.084.000	40.439.5	46.382	51.539.73	113.826.445	113.826.445	74.2008
8	*Ayaman Basapen Kuta-Bedug-Pejabotek	Kantor Kantor	R.EP32.2.01	R.EP32.2.23	3.288.000	16.796.000	19.084.000	40.439.5	46.382	51.539.73	113.826.445	113.826.445	74.2008
	TOTAL		136.537.015	84.108.154	14.897.480	16.786.860	292.277.919	16.781.995	85.881.584	90.125.453	169.251.876	265.297.779	

L007253 L007254 L007255 L007256 L007257 L007258 L007259

DE-6B 304

**DAFTAR ASET BERKAS MILIK ASINGIRMA YANG BELUM SELESAI
BERDASARAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HEDANGAN NOMOR 111/PNK.06/2008
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011**

No	Kab/Kota	Provinsi	Distrik/ Kecamatan/ Kecamatan Pemerintahan	Kompetensi	Pembinaan Perangkat Daerah					Dewan & Komisi Pemerintah	Penilaian	Jumlah
					Cawac	Hibah	Cekungan	Cekungan Diketahuan	Dewan & Komisi Pemerintah			
1	Bantaeng	Makassar Sulawesi Selatan	3	3	5	0	0	0	0	4	0	15
2	Mitra	Sulawesi Utara	1	2	48	0	0	0	0	0	0	133
3	Bitung	Sulawesi Barat	1	2	0	0	0	0	0	3	4	11
4	Petobo	Republik Indonesia	3	5	0	0	0	0	0	2	0	7
5	Kepulauan Riau	3	7	0	0	0	0	0	0	6	2	65
6	Gorontalo Selatan	2	13	5	2	0	0	0	0	0	0	11
7	Bukittinggi	Sumatera Barat	6	10	0	0	0	0	0	12	1	33
8	Jambi	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13
9	Lampung	1	9	0	0	0	0	0	0	4	1	15
10	Hargado	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
11	Lebong	3	4	0	0	0	0	0	0	1	2	5
12	Alor	DKI Jakarta	3	13	0	0	0	0	0	1	1	33
13	Malang	Jawa Timur	3	43	0	0	0	0	0	1	1	33
14	Lebo	5	18	0	0	0	0	0	0	9	0	48
15	Demak	01 Yogyakarta	3	1	0	0	0	0	0	0	0	7
16	Wonosobo	Jawa Tengah	27	69	26	0	0	0	0	15	0	133
17	Bojonegoro	01 Banten	15	72	45	0	0	0	0	0	7	157
18	Kelutmanan Selatan	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	9
19	Kelutmanan Tengah	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
20	XVII Samarinda	Kelutmanan Timur	3	5	6	0	0	0	0	0	0	14
21	Bali	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5
22	XIV Ceper	Muara Langgar Raya	3	3	0	1	0	0	0	0	0	3
23		Muara Langgar Istimur	3	3	4	1	0	0	0	2	0	13
24		Bukitnadi Induk	3	13	15	0	0	0	0	7	5	38
25	XVII Macesar	Bukitnadi Tengah	3	3	1	0	0	0	0	2	0	3
26		Bukitnadi Selatan	3	3	6	0	0	0	0	0	0	9
27		Bukitnadi Tengah	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
28	XVII Macesar	Gorontalo	3	1	0	0	0	0	0	0	0	3
29		Wajo, Ujung	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
30		Golamu Jiran	3	2	0	0	1	0	0	0	1	11
31		Popua	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
32	XVI Jayapura	Naika	3	3	0	0	0	0	0	5	0	17
33		Tan Jayapura	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	Jumlah		88	403	286	15	1	0	0	179	27	949

Kalmar

Dosajevskij, V. I., & Tikhonov, A. N. (1980). *Obobshchennye funktsii i ikh prilozheniya*. Moscow: Nauka.

1. Pemohonan status ABM/C memerlukan BIMC sebanyak 2 hari.
2. Pemohonan status ABM/C memerlukan BMNC sebanyak 2 hari.
3. Pemohonan ABM/C kondisi tidak ada lampiran terimakasih dibatasi 4 hari.

APORAN KEGIATAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011 (AKB/07/2012)

DAFTAR SC-B

CAPAIAN KINERJA PENYELESAIAN ABMA/C TAHUN 2011
PER TIM Asistensi DAERAH
PER KANWIL DJKN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011

No.	Kawil	Potraitik Penyelesaian					Jumlah
		Dinonaktifkan sebagai BMN	Dinonaktifkan sebagai BMD	Kompensasi	Dikembalikan	Dilelangkan	
1	I Sumatera Utara	0	1	3	0	0	1
2	II Medan	0	4	3	0	0	4
3	III Pelabuhan Ratu	0	3	3	0	0	3
4	IV Belitung	0	3	3	0	0	3
5	V Samarinda	0	1	3	0	0	1
6	VI Surabaya	0	1	3	0	0	1
7	VII Jakarta	0	4	3	0	0	4
8	VIII Bandung	0	3	3	0	0	3
9	IX Semarang	1	1	3	0	0	5
10	X Surabaya	0	6	1	0	0	7
11	XI Pontianak	0	2	3	0	0	2
12	XII Denpasar	3	1	3	0	0	4
13	XIII Samarinda	0	3	3	0	0	3
14	XIV Denpasar	2	1	3	0	0	3
15	XV Makassar	0	0	3	0	0	3
16	XVI Manado	1	0	3	0	0	1
17	XVII Jayapura	0		3	0	0	3
Jumlah		7	28	1	0	0	38

Keterangan:

Penyelesaian di Tahun 2010

2 asset menjadi BMN dan 3 asset dilepasan ke pihak ketiga (jasa/telah dibayar)

Penyelesaian di Tahun 2011

6 asset menjadi BMN, dan 1 asset dilepasan ke pihak ketiga

Penyelesaian di Tahun 2011

7 asset menjadi BMN, 28 menjadi BMD, dan 1 asset dilepasan ke pihak ketiga (total 36 asset)

Kompensasi penyelesaian ABMA/C tahun 2011 sebesar Rp 881.230.000,00

ABMA/C di Jalan M.T. Haryono No. 94 Kuta Baru Ngada Yogyakarta Pendidikan Kristen Indonesia

Rincian dari total ABMA/C sebesar Rp 881.230.000,00, diantarnya: 010 dalam lima kota BMN, 199PMK DR/2010, 01 asset telah disebutkan sebelumnya, masih sisa 348 asset yang belum diselesaikan statusnya belum

DAFTAR JI

**MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2010**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI ^a	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
I TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN								
1	Pendapatan dan Hibah		X					
1.1	Penerimaan pengeluaran menurut SAU senilai Rp65,40 miliar belum dapat dikonsolidasi dengan penerimaan menurut SAU dalam transaksi pembayaran (reversal) penerimaan perjanjian simpan pinjaman sebesar Rp3,38 triliun tidak dapat diukur keakuratannya.	1. Masih ditemukan jumlah transaksi dan nilai transaksi pengakuan tidak sesuai dengan jumlah transaksi dan nilai transaksi reversal sebesar Rp1.595.747,90 juta tahun 2008 dan Rp3.387.102,76 juta tahun 2010.		Penerimaan salah dan sedang melakukan upaya-paya.	1. Mereviewkan sistem pencatatan transaksi penerimaan melalui Bank/Kios. Persis, salah satunya yaitu sentralisasi penerimaan negara melalui penyesuaian sistem bWaG. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK. No.50/P/PMK.5/2011 tgl 23 Maret 2011 tentang Pelaksanaan Uji coba untuk tahap awal dilakukan secara terbatas pada kota-kota besar persentasi di wilayah tertentu dan akan dilanjutkan pada tingkat PT Pts Indonesia maupun pada perbankan seperti Bank Mandiri.	Dalam rangka Pelaksanaan Uji coba Billing System diterapkan secara berpasang-Saturni Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Saten MPN, Direktorat-Jenderal Perbandaran sedang melakukan LAK terhadap aplikasi dan sistem billing yang dilaksanakan oleh PT Pts Indonesia. Uji coba untuk tahap awal dilakukan secara terbatas pada kota-kota besar persentasi di wilayah tertentu dan akan dilanjutkan pada tingkat PT Pts Indonesia maupun pada perbankan seperti Bank Mandiri.	Uji coba Billing System diterapkan secara berpasang-Saturni Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Saten MPN, Direktorat-Jenderal Perbandaran sedang melakukan LAK terhadap aplikasi dan sistem billing yang dilaksanakan oleh PT Pts Indonesia. Uji coba untuk tahap awal dilakukan secara terbatas pada kota-kota besar persentasi di wilayah tertentu dan akan dilanjutkan pada tingkat PT Pts Indonesia maupun pada perbankan seperti Bank Mandiri.	
2	Terdapat data transaksi SAU dan SAU yang tidak terkonsolidasi, yaitu sebesar Rp4.71.492,92 juta ada di SAU namun tidak terdapat di SAU, dan sebesar Rp462.502,04 ada di SAU namun tidak terdapat di	2. Terdapat data transaksi SAU dan SAU yang tidak terkonsolidasi, yaitu sebesar Rp4.71.492,92 juta ada di SAU namun tidak terdapat di SAU, dan sebesar Rp462.502,04 ada di SAU namun tidak terdapat di						

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -427-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
	SALU	3. Pada DJBC, berdasarkan pengujian terhadap database SALU, tidak semua <i>file</i> nomor dokumen yang diberikan NTPN diterima yang seharusnya dan masih terdapat kesalahan penginputan nomor dokumen. Berdasarkan hasil rekonksisi DJBC, 29.631 transaksi senilai Rp162.700,11 juta di SALU tidak tercatat di SALU dan 104.071 transaksi senilai Rp445.907,59 juta di SALU tidak tercatat di SALU.	3.	document sumber pembukuan penemuan negara untuk menghindarkan pertambahan antara data transaksi kas dan data MPAI.	2. Dalam rangka meningkatkan compliance Bank/Pes Perspsi dalam menaikkan penerimaan negara, sejak tahun 2010, telah dilakukan User Acceptance Test (UAT) Jang terhadap Bank/Pes Perspsi. Dengan UAT ulang tersebut, Bank/Pes Perspsi telah memungkinkan kinerjanya yang semakin membikin.	Sudah dilakukan UAT Jang pada 81 Bank/Pes Perspsi dan jumlah keseluruhan 62 Bank/Pes Perspsi. Bank Perspsi yang belum di UAT ulang adalah PT. Bank Hirupun Saodara 1905, Tbk.	Semester II Tahun 2011	Semester II Tahun 2011
			3.	Melakukan perpenyempurnaan peraturan mendasari pengajuan pada tahun 2011 dan mengintensifkan rekonksisi dengan penyalinan antara data SAIN/M/N dengan data Kas Negara secara bulanan.	Direktorat Jenderal Perbedekrahan telah memberikan Peraturan Dirjen Perbedekrahan Nomor Per-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Pemerintah Negara pada Sistem Modul Perintemnas Negara sebagai penyempurnaan Peraturan Dirjen Perbedekrahan Nomor Per-05/PB/2010 tentang Pelaksaman Rekonsilasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Perjalanan Perjalanan pada Sistem Akuntansi	Direktorat Jenderal Perbedekrahan telah memberikan Peraturan Dirjen Perbedekrahan Nomor Per-90/PB/2011 tentang Rekonsilasi Data Transaksi Pemerintah Negara pada Sistem Modul Perintemnas Negara sebagai penyempurnaan Peraturan Dirjen Perbedekrahan Nomor Per-05/PB/2010 tentang Pelaksaman Rekonsilasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Perjalanan Perjalanan pada Sistem Akuntansi	Semester II Tahun 2011	Semester II Tahun 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -428-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audit Negatif)

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 - 429

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						masing Bank/Pos Persipai, maupun dengan dilakukannya segera konfirmasi dengan Bank/Pos Persipai berangkutan tentang sebab terjadinya reversal dalam jumlah yang signifikan.		
5.	Mominta kepada Bank/Pos Persipai untuk melaporkan setiap transaksi yang doreversal ke KPPN mitra lenja.					Sejak bulan Juni 2010 Dijen Perbedaharaan telah meminta kepada Direksi Bank/Pos Persipai pelaporan terhadap reversal yang dilakukan pada setiap akhir hari juga bersamaan dengan penyampaian LHP ke KPPN mitra kerja Bank/Pos Persipai. Dijen Perbedaharaan mendirikan SE-26/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penarikan Negara pada tanggal 24 Agustus 2011.	Semester II Tahun 2011	
6.	Menyempurnakan prosedur pemantauan dan pelaporan transaksi reversal MPNSAI dengan data SAU yang dilakukan oleh KPPN melalui internet Dijen Perbedaharaan dan selanjutnya melalui konfirmasi ke					- Penyempurnaan dan pelaporan transaksi reversal MPNSAI dengan data SAU yang dilakukan oleh KPPN melalui internet Dijen Perbedaharaan dan selanjutnya	Semester II Tahun 2011	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -430-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3
				Bank Penerima mitra kerja KPPN	melakukan konfirmasi ke Bank Penerima mitra kerja KPPN dilakukan melalui peneritian Surat Edaran Direktur Jenderal Perpendidikan dan Kebudayaan Nomor Sf. 36/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penitamaan Negara pada tanggal 24 Agustus 2011.	Semester II 2011
7.				- DJP telah melakukan konfirmasi ke KPP untuk selanjutnya diindaklanjuti oleh KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui S 1356/PJ.10/2011 tanggal 6 Oktober 2011	Sampai per 30 November 2011 dari janjehan satker berdasarkan SSPC/P diperoleh 1890 record SKI yang belum direview dokumen sumbernya satker Pj.49.491.274.579.	Semester II 2011
				7. Terkait dengan pendapatan bese dan cukai:	Rekonstruksi penitamaan dilakukan secara periodik dan berjenjang berdasarkan perdien BC No. 23/BC/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penitamaan Negara pada Diljen BC.	
				a. Diljen Bea dan Cukai telah meminimalisir uang masuk antara SKI dan SKU dengan mendistribusikan denda penitamaan yang uang masuk tersebut ke satker satker melalui surat Sandijen Bea dan Cukai Nomor S-244/BC.1/2011 tanggal 21 Juni		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -431-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 [Audited]

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
				2011 untuk dilakukan penelitian lebih lanjut ke dalam sumber (SSSPC).				
		b. Mewajibkan satker untuk melakukkan penilaian penerimaan secara periodik dan berjenjang.						
		c. Melakukan pembandingan dengan PT Pos mengenai perencanaan aplikasi pos-pelabuan dan penyusunan strategi implementasi aplikasi pelabuan atas transaksi barang kiriman pos (PKP), sesuai surat undangan PT Pos nomor 928/Pnzn/0611 tanggal 17 Juni 2011.						
		d. Untuk transaksi SAU mismatch yang tidak mempunyai kode Kamtor Bina dan Cukai, dilakukan sebagai penetapanan satker Kantor Pelaut Bina dan Cukai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perpendidikan Nomor Per-05/PB/2010 tanggal 22 Februari 2010.						

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -432:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
				2010 tentang pelaksanaan pelaporan realisasi anggaran pendapatan sektor perekonomian.	kode kantor dicatat sebagai penerimaan kantor bes dan cukai yang bersanggungan dan yang tidak mempunyai kode kantor bes dan cukai dicatat sebagai penerimaan sahier Kantor Pusat DJBC.		e. Menyempurnakan prosedur pelaksanaan pada unit fungional dantaranya Perdienan Bea dan Cukai Nomor PER-23/B/C/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Tata Cara Pakonsiasi Penenerimaan Pada Dirjen Bea dan Cukai.	
					f. Memperbaiki penistausahaan dan pelaporan data penerimaan dengan menyusun Perdienan Bea dan Cukai tentang pembaisahan penerimaan.			
					g. Pelaksanaan pelobiifikasi akan diterapkan secara berjenjang untuk tingkat sahier tipe batam, tingkat Kamwil triwulan, dan tingkat Edion I tiga semester,			

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -433-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
1.2	Peleksanan monitoring dan pengelahan atas kewajiban PPh Migas tidak optimal sehingga kewajiban PPh Migas sebesar Rp.2,25 triliun tidak dianau dan kewajiban PPh Migas sebesar Rp2,60 triliun belum ditagih	1. Tidak ada instansi yang melakukan rekonstrusi antara nilai government to government dalam FDR Tahun 2009 dengan nilai pembayaran pajak oleh operator dan partner dalam Laporan PSC 7.1 dan 7.2 Tahun 2009, sehingga selisih kewajiban PPh Migas Tahun 2009 sebesar USD139,45 juta atau ekuivalen Rp1.253.878,92 juta dari komtraktor-kontraktor pada 21 wilayah kerja tidak dipantau. 2. Pengawasan kepatuhan KPKS masih lemah dan tidak seluruh jumlah kewajiban pajak KPKS dapat diketahui. 3. Tidak ada instansi yang memantau kewajiban selebihnya kompensasi pemayatan PPh Migas pada	X	X	X	h. Terkait dengan ketidakjelasan NTPN, akan terus dilakukan dengan DJPPN dan bank.	- Mengembalikan mekanisme monitoring dan penegakan kewajiban PPh Migas dengan pembentukan PMK dan surat teknis dan PP No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Diambilkan di Biang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dalam Penghasilan PPh Migas; 2. Memverifikasi selisih kewajiban PPh Migas dan akan segera kelaungan PPh Migas; 3. Meningkatkan koordinasi antara DJP, DJA, DJPK, BP Migas dalam pelaksanaan monitoring dan pengaritan PPh Migas; 4. Dalam rangka memperbaiki mekanisme administrasi pelaporan dan peneriman emigras (PPh Migas dan PNPB Migas), saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur marginai kewarganegaraan dan koordinasi antar	Semester II tahun pelajaran 2010/2011 PMK-256/PMK.01/2011, PMK-258/PMK.01/2011, PMK-257/PMK.01/2011 dan 2 Perdinen Pajak (PER-28/PJ/2011 dan PER-28/PJ/2011), sedangkan 2 RPPMK masih dalam proses finalisasi. - Berdasarkan PP No.79/2010, DJP diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap KPKS untuk mengisi keleburatan perturunan PPh Migas dan Pajak lainnya. - Penuntutan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penetapan atas kekurangan pembayaran PPh Migas tersebut dan telah menerbitkan Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar USD189.880,19258. Temadap SKPKB yang diterbitkan oleh KPP tersbut, sebagian besar telah dibayar sebesar USD185,273,296,06.

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -434-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		periode kerjaibahan berjumlah berjumlah selangga tidak dapat diketahui ketepatan perhitungan kerjaibahan pajaknya.				instansi terkait dalam pengelolaan administrasi perajakan dan KKKS.		
4.	Tidak ada instansi yang memerlukan Fost Transche Petroleum (FTP) dan cost recovery dalam perhitungan kerjaibahan pajak KKKS.							
5.	Ketidakjelasan kewenangan dalam mendiskaljuli hasil pemerkasaan BPPTP terkait kurang bayar PPh Migas.							
6.	Pemantauan belum memiliki melaksana, penetapan dan persilinan PPh Migas sehingga keturunan pembayaran PPh Migas setelah US\$14,73 juta atau ekivalen Rp42.514,33 juta belum ditelaah dan dianalisis.							
1.3	Informasi tentang tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan Hasil Migas seiring Paneman karhungan penempaan negara minimal	X				Telah diterbitkan PP No. 79 Tahun 2010 = PP 79/2010 telah diimplementasikan sejak awal tahun 2010,	Sudah berjalan tahun 2011	
						- Dapat dikembalikan dan Perbaikan Pajak Penitrasian di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dalam Perhitungan PPh Migas, sehingga tidak terjadi lagi	- Telah diterbitkan peraturan pelaksanaan PP 79/2010 yaitu PMK 256/PMK.01/2011.	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -435

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
	sebesar Rp 1,43 triliun	2010 menunjukkan kendalkonsesianan 29 KKKS dalam mengalihkan tarif PPh tersebut.	inikonsistensi tarif pajak di tahun 2011 dan seterusnya.	Aturan pelaksanaan atas PP No 79 Tahun 2010 tersebut sedang dalam proses penyusunan.	- Terkait dengan tax treaty, Penisirman akan melakukan langkah-langkah alternatif penyelesaian sebagai berikut:	PMK.256/P/MAK-011/2011, PMK.257/P/MAK-011/2011 dan 2 Perdijen Pajak (PER/28/P/JI/2011 dan PER/28/P/2011), sedangkan 2 FPMK masih dalam proses finalisasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPPN/GS) akan berkoordinasi mengapayakan untuk melaluikan amandemen kontrak bagi hasil migas dengan membatalkan klause bahwa KKKS tidak boleh memanfaatkan tax treaty atau apabila memanfaatkan tax treaty, maka besarnya penerimaan harus disesuaikan sehingga penerimaan pemerintah wajib atau b. Mengajukan perpanjangan perjanjian penghindaran pajak berganda (FBE) dengan mengacuakan ketentuan PBB tersebut terhadap kontrak bers 	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -436-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
1.4	Penerimaan Hibah langsung minimal sebesar Rp886,43 miliar pada KKI belum disampaikan kepada BUN dan dikelola di luar melalui APBN	<p>1. DJPP tidak mencatat Penerimaan Hibah Non Kas baik Dalam Negeri sebesar Rp4.563,52 juta maupun Penerimaan Hibah Non Kas Luar Negeri sebesar Rp1.339.943,21 juta, namun dalam mengungkapkannya dalam Cat.II, perbedaan Penerimaan Hibah Luar Negeri kas sebesar Rp1.041.732,88 juta antara LKPP dengan LK BA 999.02. DJPP telah menekankan Cat.IV/tujuan/p</p> <p>2. Terdapat perbedaan Penerimaan Hibah Luar Negeri kas sebesar Rp1.041.732,88 juta antara LKPP dengan LK BA 999.02. DJPP telah menekankan Cat.IV/tujuan/p</p>	X	1.	Menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah Revisi PMK 40 PMK(05/2009) dan peraturan teknis lainnya, yang antara lain mengatur sanksi, penunjulan satker yang bertanggung jawab atas hibah, perlakuan transaksi penerimaan hibah non kas, serta metode dan format laporan.	Telah diambilkan: - PMK Nomor: 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; - PMK Nomor: 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah; - Perdjen PBN No. Per.81/PB/2011 tentang Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Perjanjian Meminjam Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.	sama minggu September 2011	
				2.	Mengintensifkan pelaksanaan PMK No. 33/PMK.08/2010 terhadap implementasi dan dinkenstifikasi pelaksanaannya.	PMK No. 33/PMK.08/2010 mengintensi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi/Perjanjian dan/atau Hibah Pemerintah.	Sosialisasi dan rekomunikasi hibah dengan KKI terus dilakukan.	
				3.	Mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan hibah langsung yang diterima oleh KKI.	KKI telah melakukan registrasi pendatatan hibahnya kepada Ditjen Pengelolaan Uang-Kementerian Keuangan dan mengungkapkannya		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -437-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3
		rekening kerusak.		3. Hasil penelitianan BPK secara uji petik juga menunjukkan bahwa KL yang menerima hibah langsung belum seolahnya melaporkan atau mengelola penerimaan hibahnya kepada Kementerian Keuangan, baik Hibah kas maupun barang/jasa. Pemeriksaan uji petik menunjukkan bahwa terdapat 13 KL yang belum melaporkan penerimaan hibahnya minimal setelah Rp895.346,23 juta dan satu KL belum melaporkan belanja hibah sebesar Rp7.934,75 juta.	dalam Laporan Keuangan KL yang bersangkutan. KL yang telah milihportum hibahnya kepada DPPU antara lain BKKBN, Kekaisaran Agung (Rp 8.348.045.000,-), Kementerian Pertanian (Rp 13.616.972.298, EUR 1.326.395, USD 74.341.487, AUD 18.089.944, JPY 714.633.000, dan CNY 12.277.853), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rp 1.580.044, Kehutanan USD 16.287.491, GBP 5.000.000, AUD 1.303.835), Kementerian Pertubuhan UPI 1.498.520.000) dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kausigen sudah menyampaikan surat kepada KL agar menyusun pedoman atau Standard Operating Procedures (SOP) hinrah perda masrtig-prasing KL. Babarsape KL telah menyusun perdonan atau SOP dimaksud, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pertubuhan, Kementerian Kehutanan.	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
2	Sistem Pengendalian Belanja							
2.1	Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realasi Belanja Bantuan Sosial tidak memenuhi persyaratan bantuan manapun sesuai yang telah ditetapkan.	1. Penyaluran bantuan pada 6 bulan (nam) Rp.2.295.331,86 juta belum diukur dengan baik pertanggungjawaban kewarganegaraan dari penerima bantuan. 2. Dana bersesuaian 4 (empat) K/L belum diatur dan masih tersimpan pada phant kartiga (bank/lembaga/kelompok penerima/koperasi) sebesar Rp 175.634,96 juta. 3. Penyaluran bantuan pada 3 (tiga) K/L tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak tepat sasaran sebesar Rp 4.937,13 juta.	X			1. Meninjau kembali beberapa kebijakan dan pedoman atas pelaksanaan bantuan sosial agar lebih optimal dan tepat sasaran.	Sedang disusun kegiatan mengenai Penyuluh Pelaksanaan Penyaluran dan Pencatatan dan Bantuan pada K/L. Telah disusun PMK No. 03/PMK.02/2011 tentang Penyusunan dan Penekahan RKA-KL dan PMK No. 101/PMK.02/2011 tg. Klasifikasi Anggaran sebagai arahan PP 90 Tahun 2010. Sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan bantuan sosial telah dan akan terus dilakukan.	Semester II Tahun 2011 (untuk sosialisasi Edite SAP telah dilakukan sejak Mei 2011)
						2. Melakukan sosialisasi kepada K/L untuk peningkatan peran APIP K/L dan BPKP dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial.	Kementerian Keuangan telah menyampaikan surat kepada Aparat Pergawas Intern Pemerintah bila K/L terkait untuk meningkatkan pengawasan atas penyaluran bantuan sosial. BPKP dan Kementerian Keuangan telah melakukan sosialisasi pengiklilan peran APIP K/L dalam penyaluran Bansos.	
						3. Melakukan sosialisasi Buletin Teknis SKdP tentang Akuntansi Bantuan.	Sosialisasi Buletin SKdP tentang Akuntansi Bantuan telah dan akan terus	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -439-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
		Bantuan Sosial	4. Menginstruksikan bantuan sosial untuk membuat bukti penggunaan bantuan sosial! 5. Menjetokkan siswa dana bantuan sosial ke kas negara. 6. Meringkaskan penganggaran penggunaan dana bantuan sosial. 7. Memberikan teguran kepada satker yang tidak taat menjalankan peraturan dalam penggunaan bantuan sosial. 8. Iktus pada Kementerian Sosial RI: - Mengawasi kerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Pos dan PT BRI dalam penyeluruh bantuan sosial - Mengoptimalisasi implementasi MOU antara Kementerian Sosial dengan BPKP dalam proses pencairan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan.	diakukan	Babberapa KI, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial sudah memberikan instruksi dan teguran kepada satker yang ada di lingkungannya untuk lebih teritorial memperbaiki penggunaan bantuan sosial. Terikat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang belum ada	- Kementerian Pendidikan Nasional: temuan Rp 1.43 miliar yang telah ditindaklanjuti sebesar Rp 1,06 triliun. - Kementerian Sosial: dari temuan Rp 236.510.250.900, beberapa penemuan bantuan telah menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kementerian Sosial. - Kementerian Kesehatan: Sedang telah melalui penelusuran siswa dana, melaksanakan monitoring dan penyaluran		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010

-440-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
2.2	Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang disusun sebesar Rp4,70 Triliun.	1. Ketidaksesuaian anggaran Belanja Barang dan Model sebagai berikut: - Pada 33 K/L masih ditemukan Anggaran Belanja Model diterapkan untuk Belanja	X			1. Mengintensifkan sosialisasi mengenai penggunaan Bagan Aliran Standar (BAS), baik kepada penelih di DJA, pejabat pegawai di Kanwil dan KPPN, serta perencanaan anggaran di K/L;	Sosialisasi BAS telah dan terus dilakukan kepada penelih di DJA, pejabat pegawai di Kanwil dan KPPN, serta pejabat pelaksana pemerintahan dimulai pertengahan anggaran di K/L	Juli 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -441-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
				2.	Menyertakan PMK tentang Peraturan Perusinan RKA-KL yang memuat definisi dan pengertian serta contoh-contoh yang lebih detail dan spesifik terhadap mestinya jenis belanja.		Telah diberikan PMK No. 187/PMK.02/2011 tentang Peraturan Perusinan dan Penelastasi RKA-KL pada tanggal 27 Juni 2011.	Akhir bulan Juni 2011
				3.	Terikat dengan akibat anggaran dari Belanja Lain-lain yang tidak sesuai dengan "Nature of Account" yang telah berwenang untuk meminimalisasi biaya Belanja Lain-lain yang tidak sesuai dengan Nature of Account. Yaitu membuat PMK 187/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran Belanja Lainnya (BA 998 DB) ke BA KL Tahun 2010. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf B pada UU APBN-P Tahun 2010 bahwa Pemerintah dapat melakukan pengeseran dari BA 999 DB Pengelola Barang Lainnya ke BA KL untuk kegiatan yang mempunyai ciri-ciri antara lain: dilakukan oleh KL yang telah mempunyai kode BA, tidak berada di dalam kategori intas sektors yang		Tahun 2012/untuk tahun 2011 sebagai telah dilakukan pengeseran anggaran Belanja Lain-lain ke anggaran KL	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -442-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
	tersbut digunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang seharusnya menggunakan BA lain.	X		diordinasikan oleh satu K/L dan bukan merupakan Menteri Keuangan selaku BUN		Pemerintah telah menerapkan SP Ba tam (BA 112), Bawastu (BA 115), LPP RRI (BA 116), LPP TVRI (BA 117), dan BPKS (BA 118) sebagai pengguna anggaran di APBN tahun 2012.	Tahun 2012	
	Terikat dengan status kelengkapan LPP TVRI, LPP RRI, BPK Seluruh, dan Bawastu, saat ini masih dalam proses pembahasan dan koordinasi dengan melibatkan pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, LPP TVRI, LPP TVRI, Kementerian Komunikasi dan Informasi.	X	4.			Terkait temuan pada K/L - Beberapa K/L telah memberikan teguran kepada pengelola keuangan yang tidak berhasil belanja sesuai dengan anggarannya, dan mengintensifkan agar lebih cermat dalam penggunaan anggaran, seperti pada Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanggung Nominal, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Komisi Pengawas Persaringan Usaha, Kementerian Perwakilan dan Ekonomi Kreatif, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Sosial, Badan Negara, Badan Meteorologi, Kimatologi Geofisika, Badan Tenaga Nukir		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -443-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
3.	Sistem Pengendalian Aset							
3.1	Uang Mula dan Rokering BUMN sebesar Rp.38,88 triliun yang disajikan pada LKPP Tahun 2010 belum dapat dijelaskan kepastiannya.	1. Sistem pengendalian pengeluaran reksus belum memadai. Proses pengajuan WA atas SP2D reksus yang telah diterbitkan mulai dari pengajuan K/L hingga pencairan melalui Dir. PTN sampai dengan proses terjadinya	X			1. Melakukan koordinasi dengan K/L seku si untuk menjamin lepasan reksus secara lebih intensif untuk menjamin keabsahan dalam rekening khusus sesuai dengan rencana belanja KPA/SA terhadap rekening yang minimalisasi kerugian khusus	Surat perintah/reimbursement/studah kepada Kementerian/Lembaga terkait melalui perangkat kerja khusus	Maret/Juni 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -444-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
		<p>pengariuman [rekomendasi] talangan bersangkutan masih lemah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan hubungan kerja antara Kementerian Keuangan dhi. DJP sekuju BUN dengan Kementerian Teknis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KP) terhadap sebagi EA dalam perujukan rekas belum dapat menjamin kejelasan waktu dan kepastian jumlah pencairan talangan serta rekomendasi. - Sistem pengendalian pengelolaan dalam rekening antara Sub BUN Dana Talangan Rekas oleh Dir. PN belum optimal sehingga saldo dan klasifikasi akan LangMula dari Rekening BUN yang disajikan pada Nota bukti dapat diakini. 	luosong/tidak mencukupi;			<p>Pada saat ini draft perubahan PMK No. 78/PMK.05/2011 tentang Penyelehan Bacikog atas Priyaman dan atau Hibah Luar Negeri. Melalui Melaksana Peleking Khusus yang mengikuti seiring dalam proses penyelesaian. Substanti yang diatur dalam RPPMK tersebut adalah: (1) penyelesaian batas waktu sebagai dasar penyelesaian subru Bacikog BBS PHLN dapat dimuatkan (2) penyelesaian atas penyelesaian atas pengajuan atas telangan yang sudah teraplilasi sebagai Bacikog hasil/gide.</p> <p>Sudah diberikan KMK No. 119/KMK.05/2011 tentang Penyelesaian Jumlah Bacikog atas Priyaman dan atau Hibah Luar Negeri Melalui Melaksana Peleking Khusus yang mengikuti dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sejak tahun 2008 (Awal/tarif). Sedangkan pada tahun 2012, terhadap Bacikog yang inviktif telah ditentukan Kepastian Dinen Perbaikahan Nomor KEP.119/PBI/2012 tentang Penyelesaian Jumlah Bacikog atas PHLN</p>		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -445-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
			2.	Pada Tahun 2009 dan 2010, terdapat nilai talangan dan remuneration masing-masing sebesar Rp1.142.215,25 juta dan Rp1.427.815,40 juta yang tidak dapat didentifikasi (non identifiable transactions).			Melalui Mekanisme Rekuis yang melibatkan Dalam LKPP Tahun 2010 (Aset/Investasi) Sebagaimana Kreatif Akuntansi atas Saldo Avail Uang Muka BUN pada LKBUIN Tahun 2011.	Telah disusun Rencana Proses Tata Cara Peranakan dan Pengolahan Rekening Piutang dan Hatch, dan saat ini sedang dalam pengembangan aplikasinya.
			3.	Salama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat pinjaman/bantah dengan nilai pengajuan/reimbursement (WA yang ditukar) lebih kuat dibandingkan dengan nilai WA yang diterima oleh Jenderal chor (WA yang di-reimburse). Selisih yang terjadi adalah sebesar Rp2.916.889,15 juta.	Menyenyalikan persuratan dan proses bisnis perjalanan Rekening Khusus terkait penggunaan Dana Talangan, sehingga terjadi Rekening Khusus kosong/tidak mencukupi.		Sistem akuntansi dan pelaporan Rekening Khusus dan Pelaporan Dana Talangan sedang dalam penyempurnaan.	
			4.	Salama Tahun 2008 sampai dengan 2010, terdapat reimbursement sebesar Rp85.947,43 juta atas tujuh pinjaman/bantah dengan nilai talangan Rp0,00.	Menperbaiki Sistem Akuntansi dan Pelaporan Rekening Khusus dan Rekening Dana Talangan.	Melakukan klarifikasi atas penggunaan nilai Dana Talangan dan rekomendasi masing-masing sebesar Rp 1.142.215,25 juta dan sebesar Rp 1.427.815,40 antara lain:	Telah dilaksanakan pemeriksaan dan audit pada tahun 2009 dan 2010, dengan hasil terdapat dana talangan sebesar Rp17.475.232.003 dan reimbursement sebesar Rp197.985.246.060 yang belum seluruhnya dipetakan.	
			5.	Terdapat WA untuk iban TF 093613 dengan aplikasi nomor 01ISBUN sebesar Rp787,45		a. Dari data transaksi atas aplikasi transaksi dikesaksikan pemetaan identifikasi data. Data yang belum dapat difidomi secepat mungkin		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -446-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3
				masing-masing Rp 18.995.538.900 dan Rp 1.387.971.412.723.	b. Mengakukan penyelesaian atas nilai talangan dan pembayaran yang belum dapat diidentifikasi loan (lending/Ref transaction) kepada Bank Indonesia.	
					5. Melakukan rekonstrusi dana amara DJPIN dan KU dan melaksanakan klarifikasi dana amara penimbasan pembiayaan pendapatan bahan PHIN dengan Aplikasi Penanaman Dana (webbased application/WA).	Telah dikemasukan referensi data pinjaman dan hilang luar negeri (PHIN) dan upaya penyelesaian masalah kerugian PHIN dengan Executive Agency/ Pelaksanaan data PHIN dengan executive agency akan dilakukan secara menyeluruh terhadap PHIN yang ada, dengan memprioritaskan prioritas kebutuhan antara lain batas waktu closing berelating account atau PHIN yang memiliki permasalahan segera diselesaikan.
					6. Melengkapi data pengajuan (Withdrawal Application) dan pengantarnya dari kreditor.	Data mengenai tanggal, nomor dan besaran WA telah dapat ditindaklanjuti sesinggah perbandingan antara nilai WA dan disbursemen nya dapat dijelaskan. Dan dasar WA yang menurut BPK

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -447-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
7.	Terhadap temuan nilai Rp15.554.921.134, sedangkan nilai Talangan RPL:	a. Melakukan klarifikasi data dan besaran nilainya untuk masing-masing transaksi. b. Melakukan pembenaran Sistem Akuntansi pengelolaan Rekening Khusus dan Dana Talangan. c. Melakukan penyemutamaan penggunaan wakafrawan aplikasi dengan sistem aplikasi yang memadai.		Data yang sudah dapat diterimakan sebesar Rp 15.554.921.134, sedangkan sisanya sebesar Rp 70.202.510.398 sudah dikonfirmasi ke BPK pada tanggal 23 Juni 2011 untuk memastikan rincian data sebagaimana dimaksud.			Direktorat Jenderal Perbandaran telah menerbitkan surat nomor 55953/PB/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang perintauan pengembalian atas pengeluaran grant 93.613 yang tidak mendapat penggarisan (konfirmasi) dari Bank Duta karena melebihi pagu hilah.	
8.	Terhadap overraft, yaitu pencairan belanja dari grant yang melebihi nilai pagu grant, akan dilakukan penggunaan Dana Talangan dimaksud kepada KIL yang bersangkutan. Overraft disebabkan oleh kenaikan nilai tukar (exchange rate) valas terhadap rupiah pada saat perencanaan (pagu DIPA) dengan nilai							

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -448-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
3.2	Sistem pengendalian atas pencatatan piutang pajak oleh DJP tidak memenuhi persyaratan.	<p>1. Monitoring atas pencatatan piutang pajak yang berhasil dan SKPKB tahun pajak 2008 s.d. 2010 masih lemah, sehingga terdapat perbedaan nilai antara pencatatan Piutang Pajak yang berhasil dari pencatatan SKPKB dan STP dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dengan data dalam Sistem Informasi DJP (SIUP/Sistem Informasi Perjalanan Modifikasi (SIP) Modif selesai Rp 2.510.754,65 Juta. Sampai dengan penyelesaian laporan, Pemerintah belum dapat memberikan dokumen sumber berkat Piutang Pajak.</p> <p>2. Terdapat selisih absolut nilai pengurang Piutang PBS ckim LP3 dengan penurunan PBS sebesar Rp 1.033.757,40 Juta.</p> <p>3. Saldo awal dan saldo akhir Piutang Pajak pada LKPP Tahun</p>	X			<p>1. Terkait dengan monitoring pencatatan pencatatan piutang, langkah yang akan dilaksanakan adalah:</p> <p>a. Menyusun prosedur dan format kerja rekenilaci pencatatan Piutang Pajak dan SKPKB/SKPKB/ISTP yang disampaikan di Laporan Penkembangan Piutang Pajak (LP3) dan register SIUP/SIP/Mod.</p> <p>b. Menyusun prosedur dan format kerja monitoring SKPKB/SKPKBT hasil pemantauan tahun pajak 2008 ke atas yang telah dilaku stibagi Piutang Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>c. Membangun aplikasi yang mengintegrasikan transaksi perjalanan yang memperjelas Piutang Pajak.</p>	<p>Tularkan pada pihak lain pembayaran.</p> <p>Selesai disusun tanggal 8 Juli 2011</p> <p>Selesai disusun tanggal 8 Juli 2011</p> <p>Selesai disusun tanggal 8 Juli 2011</p>	<p>Selesai</p>

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		2010 per 31 Desember 2010 tidak sesuai dengan rincian per SNI PERSTP.		2.	Terkait selisih pengurang PBB dalam LP3 dengan penemuan PBB, langkah-langkah yang akan dilakukan:	Pemutakhiran Ruang PBB Non Migas pada Aplikasi SISMAOP telah dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2011		
				a.	Melaksanakan rekonsiliasi data pembayaran PBB antara Modul Penetapan Negara dan Bank Operasional III.	Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-B/1/P/J/2008 tentang Pemutakhiran Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pederisan dan Sektor Perkotaan akan diterbitkan.		
				b.	Melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data pembayaran PBB khususnya PBB Sektor Pederisan dan Perkotaan dalam aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMAOP).	Pengesahan Pemutakhiran data Ruang PBB sektor P2.		
			3.		Terkait pencatatan pelimpahan SP3DRI dan DIBC ke DIP, langkah-langkah yang dilakukan:	Perubahan SE-781/P/J/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Perintahuan Pungutan Pajak Dalam Impor (SP3DRI) dalam proses penyelesaian.		
				a.	Merumuskan perubahan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-781/P/J/2008 tanggal 19 Desember 2008, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Perintahuan Pungutan Pajak Dalam Impor (SP3DRI) dalam proses penyelesaian akan dilakukan antara DIP dan DIBC sebelum penyusunan Laporan	Perubahan SE-781/P/J/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Perintahuan Pungutan Pajak Dalam Impor (SP3DRI) dalam proses penyelesaian.	Juli 2011	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010

-450-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
				b.	Menindaklanjuti SP30/R/1 tahun 2011 selaku dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011		Kesanggupan	
				b.	Menindaklanjuti SP30/R/1 tahun 2011 selaku dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011			
3.3	Aset Tetap yang dilaikukan	1. Walaupun laporan Tim Satgas IP DJKN per 1 April 2011 pada 74 KIL sebesar Rp410.294.609,12 juta, sedangkan nilai koreksi yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik	X	1. Terkait dengan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP).			Seluruh KIL telah memperbaiki Laporan Barang Pengguna BPN Semester II/2011 secara lengkap dan tepat waktu termasuk untuk melakukan verifikasi dan validasi data IP sebelum dilaksanakan	Tahun 2011
				a. Mendorong seluruh KIL untuk menyampaikan pelaporan BPN Semester II/2011 secara lengkap dan tepat waktu termasuk untuk melakukan verifikasi dan validasi data IP				

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -451-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
	MengalihSIMAK BMN berdasarkan data DJKN sebesar Rp410.098.943,27 juta sehingga terdapat selisih neto Rp194.666.751,83 juta, atau selisih absolut sebesar Rp 12.946.515,83 juta			pengirimannya dalam SIMAK BMN.		b. Mengaklasikan seluruh pemegang monopoli di Direktorat BMN bersama-sama dengan KPKN/Kawil DJKN untuk melakukan rekonsifikasi hasil IP atau melakukannya kembali atas korespondensi hasil IP sebelum kerja KI pada proses rekonsifikasi BMN Semester II 2011 dan tahunan 2011 serta menuangkannya dalam Berita Acara Rekonsifikasi BMN.	Berdasarkan hasil klasifikasi dan rekonsifikasi sampai dengan pelaporan keuangan tahun 2011, selisih korespondensi hasil IP dengan simak BMN turun menjadi Rp1.535.138.215,162 (selisih absolut) dan Rp1.325.989.554,496 (selisih neto).	Tahun 2012
2.	Hasil pemeriksaan pada KI juga menunjukkan adanya permasalahan sebagaimana berikut:					c. Mengungkapkan dan memeriksa data BMN yang belum dilakukan IP atau sulish di IP namun masih belum wajar nilainya sebesar jumlah Rp27.127,02 juta dimusukkan sebagai hasil IP;	Sudah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan KI terkait, meski surat resmi dan surat Nomor S-206/MNK/6/2011 tertanggal 8 Juli 2011, namun sebagian KI hanya memajikan data setoran setelah yang belum dikenakan termasuk data rincian BMNnya.	Juni 2011 (selesai)
	- Aset Tetap pada didapati KI dengan nilai perbaikan Rp6.344.273,04 juta yang belum diketahui IP;					- Hasil IP pada tiga KI sebesar Rp282.856,47 juta masih belum dimusukkan karena wajar nilainya masih sebesar Rp100,	DJKN melalui Kanwil DJKN dan KPKN terkait berkoordinasi dengan satker terkait untuk mengampullan data BMN.	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -452.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hasil IP sebesar Rp56.419.063,69 juta pada empat K.L. yang belum dicatat dalam LKPL. - Pelaksanaan IP di lingkungan Kementerian Perhutani dan Tentara Nasional Indonesia (Yonharmil TNI) belum selesai dilaksanakan, hasil IP belum dicatat seluruhnya/inventarisasi fisik tidak dilakukan secara penuh, dan hasil IP masih menunjukkan nilai yang tidak wajar. 		<p>Sedang dilakukan pengumpulan dan pemantauan data satker dan data BMN yang belum di IP.</p> <p>d. Melakukan IP dengan target penyelesaian sebelum Tahunan IV/2011 sehingga masih cukup waktu bagi satker untuk melaksanakan verifikasi hasil IP, rekomendasi dengan tim pelistrikan IP, mengoreksi dalam aplikasi SIMAK BMN dan melaporkannya dalam laporan barang selambat-lambatnya pada laporan tahunan 2011.</p>	Tahun 2012	
3.		Pelaksanaan IP yang dilakukan oleh Pemerintah dhi. DJIN, belum mencakup pembiayaan mengenai imbas marifas Aset Terap sehingga Pemenuhan bisa dilakukan perwujudan terhadap Aset Terap.			Pembinaan dan assistensi pada K.L dalam rangka perencanaan LEM dan persiapan rekonstruksi BMN semester V/2011 sudah dilakukan termasuk melakukan monitoring koreksi IP.	Desember 2011
4.		Terdapat selisih nilai Aset Terap antara literasi LKPP Tahun 2010 dan Laporan		e. Melakukan pembinaan dan assistensi pada seluruh K.L terutama terkait monitoring koreksi IP dengan target TA 2011 adalah periode terakhir koreksi IP.		
				f. Merevolenggarakan rapat dan Rapat-rapat koordinasi dengan K.L.	Juni 2011	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010

-453-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan cokelat dan SIMAK BMN sebesar Rp37.729.086,22 dimana permasalahan-permasalahan sebagai berikut;	X			Terikat dengan penyelesaian BMN yang belum dilakukan IP.	Kerjait telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian BMN yang belum dilakukan IP.	Tahun 2012
		- Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditegakkan Status Penggunaannya (BPPUDS) sebesar Rp26.418.257,87 Juta masih dicatat dalam LBMN karena belum ada PP mengenai penetapannya sebagai Penyetoran Modal Negara (PMN).		2.		Terikat dengan penyelesaian asset terap. Penyelesaian.	RPMK tentang Penyelesaian telah disusun dan sedang dalam proses pembahasan. Telah diterbitkan KMK No. SSKMK.06/2012 tentang Penyelesaian Penyelesaian Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.	Tahun 2012
		- BMW eks DK/TP sebesar Rp10.231.533,16 Juta masih disebut dalam LBMN karena belum ada penerapan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang mengakibati BMN tersebut. Sesuai itu, BMW eks DK/TP sudah tidak lagi dicatat di Neraca sebagai Aset Tetap.				a. Mewujudkan dan melaksanakan implementasi akuntansi berbasis skor. b. Mengembangkan dan melaksanakan aplikasi, sistematisasi, dan pelaporan akan diterapkan tahun 2012.	Pengembangan aplikasi, sosialisasi, dan peloring akan diterapkan tahun 2012.	Tahun 2012
						c. Menerapkan pada seluruh KIL dengan manerasukan terhadap implementasi akuntansi berbasis skor.	Penyelesaian penyusutan pada seluruh sumber KIL dilakukan pada tahun 2013.	Tahun 2013
						3. Terikat dengan asset BPPUDS.	Pada tanggal 10 dan 11 Februari 2011 telah dilakukan rekonstruksi antara KIL dengan BUMN serta Kementerian BUMN dan DKIN untuk memastikan penilaian BPPUDS telah sesuai	Semester II 2011
						a. Melakukan monitoring atas pencatatan BPPUDS pada KIL yang memilih asset BPPUDS.		

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
		<p>melainkan direktif/kel</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjadi Aset Lain-Lain. - Aset tetap Renovasi sebesar Rp610.572.952 juta dibukukan dalam Neraca menggunakan mekanisme jumlah asset karena akunnya telah tersedia. Namun, Aset Tetap Renovasi tidak dapat dibukukan dalam LBN karena asset belum tersedia kodenikasinya. 					<p>dengan Peraturan Perundang-Peraturan No 10/B/2007 tentang Tata Cara Pelaporan BPYBDS dalam Penyusunan LKPP dan Surat Menteri Keuangan kepada K/L nomor S.343/MK.05/2009 tertanggal 4 Juni 2009 hal Pendakuan Pencatatan BPYBDS pada neraca K/L dan neraca BUMN.</p> <p>Telah dibuktikan rapat koordinasi rencanakan penyelesaian BPYBDS yang dimulai oleh Kementerian Keuangan, BPK, BPCP, Kementerian BUMN, Kesiapanan Pembiayaan, Kementerian Pajak dan Umar, Kementerian Perindustrian, dan Direksi BUMN yang memiliki BPYBDS.</p> <p>b. Meminta K/L agar memperbaiki penyampaikan permuhanan terhadap status asset BPYBDS menjadi PMN, sehingga dapat diproses Parituaran Pemerintah tentang Panjuran Modal Negara.</p> <p>c. Memproses usulan PMN dan BPYBDS yang sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). BPYBDS pada Penum LKBN Amara senilai Rp25.927 miliar, dimana PP PMN nya telah diharmonisasikan di Kunham, dan dalam proses 	<p>PMN BPYBDS pada Penum LKBN Amara telah di terapkan dengan pp.</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -455-

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
				2). BPYBDS pada PT PLN semai Rp.20,019 triliun, dimana saat ini telah diminta persetujuan hensesa DPR RI dan setelah dibahas di Komisi terkait di DPR.	Rpp PMII BPYBDS pada PT PLN telah diskusikan pembahasan dengan Komisi DPR terkait. Sesuai hasil pembahasan Rpp dengan Seiring dan Kemenkeu & HAM tanggal 13 Juli 2011, seputar kisitik terdapat ketidaksesuaian status persetujuan DPR, Menteri Keuangan dapat mengajukan surat kepada Presiden untuk meminta persetujuan surat pemohonan persetujuan pembahasan tanganan BUMN kepada DPR dengan perimbangan tersebut pada dasarnya sudah diberikan melalui ketentuan Pasal 31 UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011..		Persetujuan BUMN kepada PT PLN terhadap sebagian bersihkit, - 7 BUMN sedang dalam proses hamantasi Rpp, yaitu, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Pelindo I, PT Pelindo III, PT Pelindo IV, PT ASOP, dan PT Pengelolaan Indonesia;	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							- 1 BUMN telah dimintaikan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan No. S.511/PK.06/2011 Tanggal 5 September 2011, yaitu PT Pelindo II.	
							- 4 BUMN sedang dalam proses kajian bersama, yaitu, Perum DAMRI, PT Kereta Api Indonesia, PT Djakarta Uney, dan PT PELNI.	
4.	Menyusun RPjMK pengelolaan BMN eks DKTP yang diperlukan sebelum TA 2010, termasuk di dalamnya peraturan terkait mekanisme bahan, penjualan, pemakaian, penggunaan, serta akhirnya dan pelapornya.						Peraturan terkait Pengelolaan BMN eks DKTP sudah diterapkan Menteri Keuangan pada tanggal 8 Agustus 2011 melalui PMK No. 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011.	
5.	Mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan dan Kodiklasi Barang Milik Negara.						PMK No. 29/PMK.06/2010 telah dimplementasikan, termasuk kodifikasi Aset Tetap Renovasi yang sudah dimplementasikan pada Laporan BMN Semester I/2011.	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -457-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN	
			1	2	3				
3.4	Pengendalian inventarisasi dan pelaksanaan asset eks KKKS belum memadai	<p>1. Beberapa inventarisasi terlambat dengan inventarisasi yang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya pembilahan tanda IP pada aset-aset yang telah dimonitoring tersebut sesuai sasisus tersurat. - Sebagian asset yang tidak terdiri dari imbalan risiko atau terdiri dari imbalan risiko yang tidak tersusut. - Keterlebihan pengelaman sudut pandang atau penilaian masing-masing tim atas kondisi (baik, sedang, atau jelek) dan status (digunakan atau tidak digunakan) serta adanya kreativitas masing-masing tim 	X			<p>1. Menerapkan Inventarisasi yang telah disempurnakan mengenai metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP BNN.</p> <p>2. Melakukan verifikasi terhadap seluruh hasil IP yang telah selesai dilaksanakan dan memperbaikinya sesuai dengan hasil rekomendasi temuan BPK yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan kurs sesuai dengan tanggal bukan perolehnya PIS (Pace into Service) untuk biaya perolehan tahun 2005 ke atas. 	<p>Buletin Teknis</p> <p>Buletin Inventarisasi</p> <p>Buletin Pelaksanaan IP</p> <p>Buletin KKKS yang belum selesai dilakukan IP.</p> <p>Buletin KKKS yang belum selesai dilakukan pelaksanaan IP BNN.</p>	<p>Buletin Teknis</p> <p>Buletin Inventarisasi</p> <p>Buletin Pelaksanaan IP</p> <p>Buletin KKKS yang belum selesai dilakukan IP.</p> <p>Buletin KKKS yang belum selesai dilakukan pelaksanaan IP BNN.</p>	<p>Juni 2011 (setelah)</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -458.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		melaksanakan inventarisasi aset.				Hasil koreksi Kantor Pusat DUKN telah disampaikan kepada Kanwil DUKN untuk dilakukan perbaikan atas Laboran Hasil Penelitian BMW KKKS, koreksi hasil tersebut akan disampaikan kembali kepada Kantor Pusat DUKN.		
		- Pelaksanaan Inventarisasi aset KKKS secara sensus diragukan karena adanya beberapa aset yang berasal dari dan statutnya berbeda antara Berita Acara (BA) hasil IP dengan BA hasil cek Fisik BPV.				b. Terhadap status surur telah dilakukan koreksi sesuai dengan data yang disampaikan BPWIGAS/KKKS, sehingga terhadap surur yang sudah tidak digunakan (ditumpuk pemanenan akan dikeluarkan dari narsis (Cal.K) sedangkan surur yang masih digunakan akan dicatat dalam neraca.		
2.		Kelemahan pengendalian terkait penilaian yaitu:				c. Terhadap status surur telah dilakukan koreksi sesuai dengan format yang disampaikan untuk memenuhi bahwa IP aset KKKS dimaksud telah dilaksanakan secara sesuai, mengingat jumlah dan		
		- Tidak terdapat dokumentasi yang memadai atas proses anal penetapan metodeologi penilaian menggunakan pendekatan biaya (WBC) dan perbandingan data pasar, tetapi bagaimana asumsi disusun dan simbolikasinya ditunjukkan;						
		- Total akhirnya validasi atas data dasar Harga Model Nomor Induk III (Harmoni III) yang digunakan, yang sebenarnya merupakan data aset KKKS yang dihitung oleh						

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -459-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
		Pertamina Isant ini dikelola oleh BPMIGAS untuk tujuan cost recovery/tulian untuk memfasilitasi aset; - Pemilikan aset KKKS tanpa membendungkan dengan dokumen sumber atau dokumen pendukung masing-masing aset;		karakteristik aset KKKS diharapkan penyusunan foto sejelas pada bulan September 2011.				
		- Pemilikan aset KKKS yang telah selesai 100% sebenarnya, selain bersifat berbasis aset dengan nilai hasil penilaian senilai nol.		d. Terhadap subsequent effective untuk aset KKKS saat ini sedang dilakukan pembahasan.				
		- Pemilikan aset KKKS yang telah selesai 100% sebenarnya, selain bersifat berbasis aset dengan nilai hasil penilaian senilai nol.		3. Melanjutkan IP BMN KKKS yang belum selesai. Berdasarkan rapat koordinasi tingkat pusat yang diajukan tanggal 23 Juni 2011 telah disepakati bahwa IP BMN KKKS yang belum dilaksanakan (terhadap 36 KKKS) akan dimulai pada minggu ketujuh Juli 2011 yang ditandai dengan pertemuan di 3 (tiga) tempat yaitu Makassar (tanggal 01 Juli 2011), Palembang (tanggal 04 Juli 2011) dan Jakarta (04 Juli 2011).			Terkait dengan perlakuan subsequen awalnya berupa <i>overhead</i> , telah diajukan KSAF bahwa perlakuan kapitalisasi overhaul dilaksanakan sesuai dengan PP 71/2010 terhang SAP.	
		- Pemilikan BSB yang diperoleh tahun 2004 dan sebelumnya menggunakan nilai kurs tanggal penilaian, namun untuk aset yang diperoleh tahun 2005 s.d 2010 menggunakan kurs akhir tahun perolehan. Dari Harmoni III					Pencapaian IP BMN KKGS sampai dengan penyelesaian LKPP Tahun 2011 target selebihnya sebanyak 73 KKKS dengan target penyelesaian sebanyak 76 KKKS, dengan incian:	
							- Disediakan dalam Neraca LKPP Tahun 2011 (<i>audit trail</i>):	
							- Tanah: Rp 14.362.284.169.984,-	
							- Non Rp 136.146.696.129.232	Tamat: Rp 136.146.696.129.232

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010

-460-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3
		<p>informasi BPK LHP SPI = LKPP TAHUN 2010 Halaman 37 dari 48 halaman Page Info Service (PIS) sehingga seharusnya kurs yang digunakan untuk pencatatan aset tahun 2015 s.d. 2010 adalah kurs akhir bulan perolehan.</p> <p>- Dalam pencatatan DJMN tidak memperbaiki kembali status aset. Selain itu nilai aset KKKS di Harum III termasuk biaya pemeliharaan yang dilakukan selain tanggai penyebaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan SAP yang mengatur bahwa pengeluaran setelah tanggai penyebaran akan bila menambah kapasitas dan kinerja aset.</p> <p>- Masih adanya beberapa aset dengan tahun pencatatan setelah tahun</p>		<p>- Dungungan dalam CalK LKPP Tahun 2011 (Audit):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aset surau yang tidak digunakan sebesar Rp 1.119.972.096,205. - Aset Subsidi <i>Expenditure</i> sebesar Rp 44.315.895.350,377. - Aset Kondisi Rusak Berat sebesar Rp 1.313.308.913.398. - Aset yang dalam penghapusan sebesar Rp 27.406.356. 		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -461-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
3.5	Pengendalian peratausahaan asset eks BPPI yang berasal dari Tim Koordinasi belum memadai	1. Penatausahaan atas Aset Kredit Tim Koordinasi sebesar Rp6.179.143.97 juta oleh DJKN belum memadai. 2. Aset Properti Eks BPPI yang bersifat dari asset yang dikelola Tim Koordinasi sejumlah senilai Rp552,09 miliar dan Aset Properti hasil verifikasi Tahun 2010 sebanyak 244 unit belum dilakukan inventarisasi dan perlakuan.	X			1. Menyusun pedoman tindak lanjut untuk melaksanakan inventarisasi dan verifikasi asset kredit dan properti eks BPPI.	Telah ditentukan Keputusan Dirjen Kebayaan Negara No. KEP-144/K/W/2011 sebagai pertukar pelaksanaan kerjatatan inventarisasi, verifikasi dan penilaian.	Juli 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -462-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
			3. Terikat aset kredit eks BPBN:					
			a. Mengelola database aset kredit eks BPBN hasil inventarisasi dan verifikasi dalam Modul Kelayakan Negara II.	- Terikat aset kredit eks BPBN yang masih diserahkan kepada KPKNL dan Kanwil setempat.			- Telah dilakukan pemeriksaan data jumlah dan nilai aset kredit yang telah diserahkan kepada KPKNL dan Kanwil setempat.	Desember 2011
			b. Rekonsiliasi data inventarisasi aset kredit di tahun 2011, diperlomb sejumlah dokumen kredit dengan nilai sebesar Rp 21.961.761.870,391 (termasuk nilai matang sting setelah dikonversi dengan kurs tengah per 30 Desember 2011), atau disebut juga Non-Accrue Transferred K/c (Non-ATR).	- Dari hasil inventarisasi aset kredit di tahun 2011, diperlomb sejumlah dokumen kredit dengan nilai sebesar Rp 21.961.761.870,391 (termasuk nilai matang sting setelah dikonversi dengan kurs tengah per 30 Desember 2011), atau disebut juga Non-Accrue Transferred K/c (Non-ATR).				Desember 2011
			4. Terikat aset properti eks BPBN:					
			a. Inventarisasi fisik dan penilaian aset berperkara, aset sisa kepakisan, dan aset dalam stengkemas, serta 244 aset hasil verifikasi.	- Dalam tahun 2011, 726 aset properti dan 1.643 aset properti yang memiliki dokumen aset yang memenuhi drifi sebesar Rp 1.961.229.815.153. Dalam proses penilaian 726 aset properti, Kantor penilaian tidak dapat menemukan fisik aset 67 aset properti, maka atas aset dimaksud disajikan dengan menggunakan nilai buku sesuai data dari Tim Koordinasi, 917 aset properti akan dilakukan penilaian di tahun anggaran 2012.				Desember 2011
			b. Mengelola database aset properti eks BPBN hasil verifikasi dan pemilahan dalam Modul Kelayakan Negara II.					

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -463.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN Kewajiban	PENGELASAN TEMUAN Pengendalian	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT PENYELESAIAN	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
4.	Sistem Pengendalian Kewajiban	Berdasarkan penilaian, pengelolaan, dan penggunaan, pertanggungjawaban pengorganisasian, penggunaan, dan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban piutang gaji PNS untuk iuran dan pensum masih belum diatur dengan jelas	X	1. Mengemukakan kejadian dan akurasi status pensum PNS, termasuk mengenai status pensum PNS. Penyelesaian ini merupakan bagian dari grand design perbaikan program pensum dan THT PNS yang diimbenahkan dengan implementasi SISN.			Kementerian Keuangan bersama Kementerian PAN dan RB, BKN, Setkab dan Sentig telah melakukan beberapa kali pertemuan dan telah disusun usulan revisi PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS.	2012-2014
5.	Sistem Pengendalian Efekitas	Dalam LKPP Tahun 2010, saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2010 masih berbeda dengan rincian kas.	X	1. Mengusulkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan selisih kurs pada penerimaan luar negeri. 2. Melakukan pemeriksaan dan identifikasi permasalahan terkait saldo kas di Bantahara Pengeluaran di KPKI dan kas pada BLU. 3. Mengusulkan peraturan langkah-langkah bagi KPKI dalam penyelesaian permasalahan kas di Bantahara pengeluaran pada			Pemeriksaan PMK mengenai perlakuan selisih kurs masih dalam proses pembahasan dan penyelesaian, identifikasi pemeriksaan terkait saldo kas di Bantahara pengeluaran dilaksanakan.	Semester III Tahun 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -464-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3
		diganjar oleh Kementerian Luar Negeri dengan nominal Rp 610.77.93 juta, namun belum dipenganggungjawabkan sehingga masih tercatat sebagai utang KL pada BLM.	- Belum efektifnya rekonstruksi antara data realisasi belanja berdasarkan SAR dan SAL sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp 17.405.48 juta. - Adanya kesalahan penggunaan mata anggaran atas penyetoran pengembalian UP oleh satker selama tahun 2010.	Pengeluaran.	<p>mencair tingkat KPPN khususnya terhadap transaksi tahun-tahun yang lalu, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan sektor bendahara atas siswa UP yang disebut ke bank pasca-piulan mitra kena KPPN untuk tsb - Koreksi atas kesalahan penggunaan sisaan pada setoran siswa UP. - Koreksi pencatatan atas kedudukan setoran siswa UP untuk mengoreksi saldo kas di bendahara pengeluaran yang muncul pada neraca KPPN. - Koreksi akumulasi atas kas di bendahara pengeluaran yang sudah tidak dapat direksurui lagi dengan sumber manajemen satker. <p>Dari data tsalgan yang sudah dapat diidentifikasi</p> <p>Rs 15.554.921.134 sebagian besar atas data tahun 2010 baik penggunaan dan tsalgan dan pengambilannya, serta ditindaklanjuti dengan mengajukan permintaan penjelasan atas nilai tsalgan dan pengambilannya kepada Bank Indonesia</p>	<p>Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintah BPK atas LKPP Tahun 2010 -465-</p> <p>4. Terhadap temuan <i>unidentified transaction</i>, akan diajukan klarifikasi atas data tahun 2010 baik penggunaan dan tsalgan dan pengambilannya, serta ditindaklanjuti dengan mengajukan permintaan penjelasan atas nilai tsalgan dan pengambilannya kepada Bank Indonesia</p>

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
II TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
I	Pembelajaran dan Mitigasi							
1.1	Penilaian, pengawasannya, PBB Migas tidak sesuai dengan UU PBB, dan UU Migas sehingga realisasi PBB Migas sebesar Rp 19,30 triliun tidak dijalani kerjanya	<p>1. Mekanisme penegakan dan pembelajaran PBB Migas tidak sesuai dengan UU PBB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DJP tidak melakukan pengawasan yang merata terkait penyampaian SPUP PBB Migas. - DJP tidak menggunakan mekanisme yang telah ditentukan dalam UU PBB dalam penegakan PBB Migas. - Pengajuan PBB Migas kepada subjek pajak tidak memiliki dasar hukum. <p>2. Penetapan nilai PBB Migas Tidak Wajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas areal onshore yang digunakan DJP sebagai dasar perhitungan PBB Migas bukan hanya luas tanah yang sudah dibebaskan, melainkan seluruh luas wajahnya berdasarkan koordinat yang 	X			<p>1. Melaksanakan perbaikan terhadap peraturan-peraturan yang ada, khususnya yang mengatur masalah areal onshore dan hasil produksi Langkah ini yang akan dilakukan adalah mengadakan rapat koordinasi antara Direktorat untuk memperbaiki Surat Edaran Dinen Pajak No. SE-156/PJ/2010 dan Surat Edaran Dinen Pajak No. SE-201/PJ/2010 untuk memperbaikinya mengenai definisi dan klasifikasi objek PBB Migas, khususnya areal onshore dengan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</p> <p>2. Melaksanakan perbaikan terhadap aturan dan механизme penetapan dan pengajuan PBB Migas melalui Koordinasi bersama lintas Esdat I dan Lingkungan Kementerian</p>	Dokumen tsahan PBB Migas telah dibangun dengan SPPT dan DJA telah melalui proses perbaikan triwulan I & II 2011 sesuai dengan tegihan DJP. Pembayaran PBB Migas sebesar Rp 19,3 T mengacu sesuai dengan SPPT PBB Migas tahun 2010 sebagai dasar pengajuan yang telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan surat Direktur Efektivitas dan Penilaian nomor S-252/PJ.06/2011 tanggal 5 Mei 2011, dan S-266/PJ.06/2011 tanggal 26 Agustus 2011.	November 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -466-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3
	ditemukan dalam Kontrak Kerja Sama. Hal tersebut mengalihbankan pengenaan ganda atas objek pajak yang sama, bahkan pengenaan pajak atas objek yang tidak diketahui PBB atau yang dideputasikan dan wilayah kerja.	Keuangan menyempurnakan aturan yang selama ini menjadi peraturan hukum penerapan dan pengihinan PBB Migas yang tidak sesuai lagi, antara lain:	untuk pembaharuan disampaikan dalam berita Penerangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Minyak Bumi, dan Pemas Bumi yang akan mengatur mengenai obyek dan subjek, pengenaan, penagihan, dan pembayaran PBB Migas.	1) Surat Edaran Bantuan antara Dirjen Pajak dan Dirjen Lembaga Keuangan (sekarang Dirjen Anggaran Nomor 630/4568, tanggal 24 September 2001) untuk disampaikan kepada instansi yang berlakunya.	untuk pembaharuan disampaikan dalam berita Penerangan Peraturan Menteri Keuangan yang berlakunya setiap 3 bulan berdasarkan SPPT yang hanus diluncurkan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak SPPT diterima dengan mekanisme distribusi denda bagi hasil PBB Migas yang dilakukan setiap 3 bulan.	1) Surat Edaran Direktor Jenderal Pajak Nomor SE-201/P/J/2010 tentang Prosedur Kerja Pengiran dan Perintah Pemindahbukuan Pembayaran PBB Migas untuk disampaikan dengan perundang undangan atau peraturan yang ada.
	- Lulus area administrasi yang digunakan oleh DPP melalui luars wilayah kabupaten/kota yang diberikan Menteri Dalam Negeri,	kelebihan penerapan PBB Migas atas Hasil Produksi sebesar Rp31.779,29 juta (Rp7.209.041,02 juta - Rp6.837.261,74 juta).	2) Surat Edaran Direktor Jenderal Pajak dengan Direktur Jenderal Keuangan (selanjutnya Direktur Jenderal Anggaran) nomor 630/4568 tanggal 24 September 2001.			
	- Terdapat pelanggaran PBB Migas atas Hasil Produksi sebesar Rp31.779,29 juta (Rp7.209.041,02 juta - Rp6.837.261,74 juta).	Berdasarkan hasil uji penilaian manajemen adanya KOKS yang melaporkan hasil produksi pada KTKS yang belum mengembangkan				

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -467-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
		Objek yang substantinya		b.	Menyusun SGP KmK, yaitu SGP yang mengatur alur penetapan dan pengalihan PBB Migas antar unit eselon I di Kementerian Keuangan.		SGP Link akan disesuaikan dengan masing-masing pada RPKM yang sedang disusun.	Agustus 2011
				c.	Melaksanakan koordinasi dengan BPNGAS dan Komitoran ESDM untuk mendukung persopan penyampaian SGP PBB dari KKKS seiring SPT PBB Migas untuk tahun pajak berjalan dengan segera terselenggarakan.		Koordinasi telah dan akan terus dilakukan.	September s.d Desember 2011
3.				3.	Melaksanakan verifikasi atas validitas data luas areal tanah dan bangunan yang disusulkan oleh KKKS melalui BPNGAS sehingga diperoleh data objek pajak yang lebih valid, termasuk inventarisasi data luas 51 kahupaten/kota yang kelebihan luas administrasi serta selisih off-ray.	Telah dilaksanakan analisis data spasial dan dicantum dalam pergeseran luas wilayah kerja dalam SGP sehubungan terdiri dan beberapa kabupaten/kota, namun dalam penulisan di SGP dimasturkan dalam satu kabupaten/kota tertentu. Akan dilakukan koordinasi dengan BPNGAS untuk menyelesaikan masalah ini.	Desember 2011	
				a.	Melakukan koordinasi dengan BPNGAS untuk menginformasi luas areal tanah dan bangunan yang disusulkan dalam SGP oleh KKKS	PBB Migas secara kesuruan telah mencerminkan luas wilayah kerja yang ditugasi KKKS, namun distribusi dalam wilayah		

Tim Lajut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -468.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
1.2	Penyalasan PPN sebesar Rp.11.26 melalui mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah tidak sesuai dengan UU PPN	Penyelassan PPN melalui meliansasi Pajak DTP tidak sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Baku dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 16B yang menyatakan bahwa fasilitas PPN berupa: (1) tetang tetapi tidak dipungut baik sebagai maupun seluruhnya; dan (2) dibedakan.	X	Pemerintah akan mengubah sanksi pemberian Pajak Ditanggung Pemerintah menjadi sanksi pemberian subsidi harga.	b.	Jika terdapat adidih luas, akan dilakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan hasil ukuran yang lebih ril. c. Mengusulkan pemungutan dalam tahun-tahun berikutnya terkait dengan pembayaran PBB Miges.	Kabupaten/kota perlu diberlakukan sejauh kabupaten/kota dimana wilayah fungsi pertambangan itu berada	Aktif Satgas APBN-P Tahun 2011, diseusukan dengan APBN-P 2011
1.3	PNBEP pada 41 Kd. Minimai sebesar Rp388.97 miliar belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp312.604,54 juta yang terjadi pada 23 Kd..	1. Terdapat PNBEP yang terlambat disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp312.604,54 juta	X	1. Mendirong pimpinan Kd. untuk memberikan sanksi kepada pejabat pengelola PNBEP yang mengelola PNBEP tidak sesuai dengan ketentuan			Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada Pimpinan Kd. yang mengelola PNBEP, yaitu Surat Nomor: S.172/MK.2/2011	Juni-Juli 2011

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -469-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
	miliar digunakan luar anggaran APBN melalui mekanisme APBN	2. Terdapat PNBP yang belum disetor pada 18 KL sebesar Rp56.464,60 juta dan PNBP yang digunakan luar anggaran di luar melalui mekanisme APBN sebesar Rp213.742,49 juta.			Yang berlaku.		Tanggal 20 Juli 2011 hal Pemerintahan RI/BP diberikan Perintah Sanksi kepada Pengusaha PNBP; dan Surat Nomor: S-2089/A.G/2011 - tanggal 22 Agustus 2011 hal Pemerintahan Laporan Tindak Lanjut dan Penyelesaian Copy SSSBPP atas Temuan BPK Tahun 2010.	Tahun 2012
						2. Mewajibkan RPMK tentang sanksi atas pelanggaran PNBP yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.	Telah dilakukan pembahasan secara intensif atas RPMK sanksi.	Berdasarkan sanksi akan diatur dalam revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Sedang disusun RPMK mengenai tata cara pelaksanaan dan waktu penyelesaian secara beretika.

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -470.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
2	Belanja Negara	1. Pengalokasian Dana Penyelesaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas	X			Pemerintah akan menyampaikan Penyesuaian dalam pembahasan Kasus dan RAPBN TA 2012 berdasarkan peraturan undangan yang berlaku. Dalam hal	1. Aturan akan dimuat dalam revisi UU 33/2004, yang difasilitasi selesai dalam kurun waktu 2 tahun. 2. Sudah disampaikan ke Badan	Agustus 2011
2.1	Pengalokasian Dana Penyelesaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas	1. Pengalokasian Tahun Anggaran (TA) 2010 tidak sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 UU Nomor 33 Tahun 2004 Peril						

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -471-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)	RENCANA TINDAK LANJUT			MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
				1	2	3		
		27 menyatakan bahwa penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan seorang kurangnya sebesar 25% dari Penitentia Dalam/Wajri IPDN Neto yang ditripsi APBN dan Penyelesaian Pesi 107 ayat (2) menyatakan bahwa DAU diberikan sebesar 25,15% dari PPN Neto s.d. Tahun 2007.	diperlukan tambahan Dana Penyelesaian, agar tetap mengacu pada kriteria dan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan transparan dan akuntabel. Pemerintah juga akan mempertajam kriteria, program, jenis kegiatan yang dapat mencerminkan output dan outcome dalam mengalokasikan Dana Penyelesaian.	Anggaran DPR RI dalam rangka pembahasan perubahan APBN 2011 pada Bulan Agustus 2011.	3. Pemerintah bersama DPR telah memusulkan dalam Peranggarungawakenan Pelaksanaan APBN Tahun 2010 kriteria-kriteria slokasi Dana Penyelesaian yang terukur.			

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemerintahan BPK atas LKPP Tahun 2010 -472-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PEJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYESAIAN
			1	2	3			
2.2	Realisasi Belanja Barang di 44 KL Setseor Rp 110,48 Miliar dan USD 63,45 Ribu. Tingkatnya Didiktekan Kegiatannya, Objayer Ganda, Tidak Sama dengan Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Pertanggungjawaban	Buku	<p>1. Pertanggungjawaban realisasi belanja penjelasan dinas sebesar Rp 12.713,17 juta pada 23 KL digunakan untuk membayar kegiatan yang tidak penuh dialeksikan;</p> <p>2. Pembayaran biaya perjalanan dinas ganda yaitu perjalanan dinas atas nama satu orang yang berbenturan waktu nya dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ke tempat lain. Permasalahan ini ditemukan pada sembilan KL dengan nilai Rp 1.293,13 juta;</p> <p>3. Penjelaman dinas tidak dilaksanakan sesuai bukti perangkutjawaban.</p> <p>Adanya perangkutjawaban dinas yang tidak dilaksanakan dengan menggunakan meskipun sesuai titik yang dilengkapi sebagai pertanggungjawaban</p> <p>Int Terjadi pada 39 KL dengan nilai terbesar Rp 83.359,36 juta dan</p>	<p>1. Memberikan pengaruh kepada pegawai yang pembinaan perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>2. Menyekar harma ke Kas Negara pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan;</p>	<p>1. Pembinaan kepada pegawai telah dan terus dialeksikan. Beberapa KL juga telah menyampaikan teguran kepada salur kerjanya, seperti Arsip Nasional RI, BPPT, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR, dan Badan Nasional Perempatan dan Perindaginan TN.</p> <p>2. Banyaknya KL telah menyertakan kilebihan biaya pengeluaran dinas dan halaman yang tidak dilaksanakan ke Kas Negara seperti Badan Permanihan (Rp 106.370.000), Arsip Nasional RI (Rp 139.480.000), BPPT (Rp 131.557.100), Kementerian Peramian (Rp 1.095.258.263), BMKG/URUTAMA (Rp 94.153.950), BPPT (Rp 131.557.100), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rp 183.275.840).</p>			

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas I KPP Tahun 2010 - 473

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAJARAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		USD63,45 ribu.				4. Pejalanun dmas tidak diikutsertakan peranggungan dalam sebagaimana datur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perendaharaan. Permasalahan ini teredi pada das XI dengan nilai Rp6.420,96 juta	Komisi Yudisial (Rp.82.560.100), Kementerian Kehutanan (Rp.743.710.680), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rp.251.486.700), BAPETEN (Rp.73.260.805), Kementerian Bataman (Rp.24.350.000), Kementerian Sosial (Rp.736.404.912), BP2P (Rp.238.752.500), Kementerian Kesehatan (Rp.2.709.740.700), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keseharian, Komisi Pemilihan Umum (Rp.77.038.710), Lemdaegi Administrasi Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rp.224.867.015,-), Badan Nasional Perempuan dan Perlindungan TK (Rp.57.563.800), Kementerian Koperasi dan UKM (Rp.1.068.240.501), Lemdaegi Ilmu Pengetahuan (Rp.11.161.300) dan Semenig (Rp.28.111.100)	3. Untuk menghindari peryimpangan pertanggungjawaban BPPD perlu

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2010 -474-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

No	TEMUAN	PELAKUAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK LANJUT	MONITORING TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						4. Meryusut SOP pelaksanaan dimes;	ditegasikan tugas dan tanggung jawab BPK selaku pejabat yang mengajukan permintaan pembayaran atas buktibukti pengeluaran.	
						5. Meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan	4. Sudah dibentuk tim pada Kementerian Keuangan yang menangani pengaturan perjalanan dimes. 5. Pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawaban terus dilakukan.	

Keterangan:

Klasifikasi 1: Temuan Penyelesaian BPK disaksikan dalam tahun anggaran berjalan.

Klasifikasi 2: Temuan Penyelesaian BPK disaksikan dalam tahun anggaran berikutnya.

Klasifikasi 3: Temuan Penyelesaian BPK disaksikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

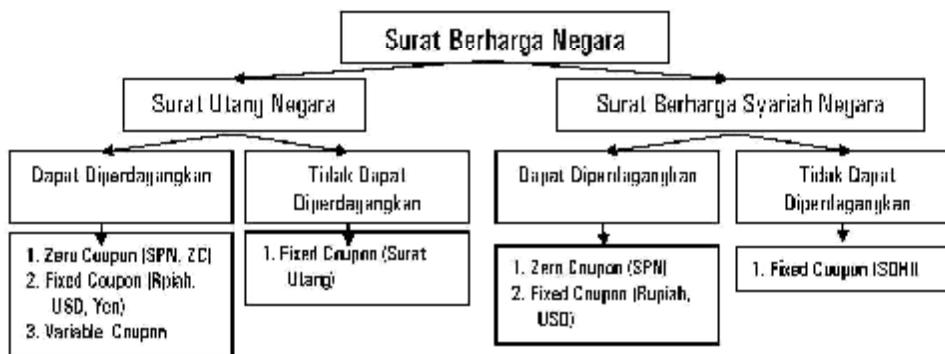
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011**

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menjalankan keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2011 dan berakhir 31 Desember 2011, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Surat Berharga Negara [SBN] terdiri atas Surat Utang Negara [SUN] dan Surat Berharga Syariah Negara [SBSN]. Secara umum, SUN dapat dibekalkan atas Surat Perbendaharaan Negara [SPN] yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dan Obligasi Negara [ON] yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Menurut denominasi mata wangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Manurut jenja tingkat hungsanya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat hunga tetap dan ON dengan tingkat hunga mengamhang. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan ON tanpa hunga yaitu Zerro Coupon (ZC). Sementara itu, Surat Berharga Syariah Negara mulai diterbitkan pada tahun 2008 dengan denominasi Rupiah dan Tingkat imbalan tetap [Fixed Rate].

Berikut ini adalah gambaran struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2011:



Grafik 49: Struktur Surat Berharga Negara

II. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2011

Target pembiayaan APBN-Pembahan tahun 2011 dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp126,6 triliun. Realisasi SBN Neto tahun 2011 mencapai 95,58%. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto, yaitu jumlah penerbitan SUN baru setelah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (*buyback*). Untuk melaksanakan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan portofolio SUN dilakukan kegiatan:

A. Penerbitan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2011 dilelang sebanyak 24 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2011. Penerbitan Obligasi Negara secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdama. Pada setiap penerbitan, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk dengan *bid to cover ratio* berkisar dari 1,02 kali sampai 56,63 kali.

Total nilai net nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp89,514 triliun, ON dengan tingkat bunga mengambang (*Variable Rate*) dan ON dengan pembayaran bunga secara diskonto (*Zero Coupon*) tidak diterbitkan pada tahun 2011, serta ORI diterbitkan sebesar Rp11,00 triliun. Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan iii) *cost of borrowing*.

Penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) yang dilakukan sebanyak 1 kali penerbitan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan dilakukan untuk investor cara bookbuilding melalui Agen Penjual yang disebutkan oleh Paritia Seleksi. Penerbitan ORI008 tersebut mendapat sambutan yang cukup positif dari masyarakat, terbukti dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp11,00 triliun.

B. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2011, Pemerintah menerbitkan 23 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp 40 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Jenis dan Outstanding SPN Tahun 2011

No	Seri	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Fade Value
1	SPN03111119	16 Agustus 2011	18 November 2011	-	1.200.000.000.000
2	SPN03111223	20 September 2011	23 Desember 2011	-	150.000.000.000
3	SPN03120105	04 Oktober 2011	05 Januari 2012	-	750.000.000.000
4	SPN03121119	18 Oktober 2011	19 Januari 2012	-	200.000.000.000
5	SPN02120202	01 November 2011	03 Februari 2012	-	1.100.000.000.000
6	SPN02120223	24 November 2011	23 Februari 2012	-	300.000.000.000
7	SPN12120519	19 Agustus 2011	18 Agustus 2012	-	1.500.000.000.000
8	SPN12120514	25 September 2011	14 September 2012	-	2.250.000.000.000
9	SPN12121705	04 Oktober 2011	05 Oktober 2012	-	4.100.000.000.000
10	SPN12121102	01 November 2011	02 Februari 2012	-	4.350.000.000.000
11	SPN20110623	22 Maret 2011	23 Juni 2011	-	2.000.000.000.000
12	SPN20110706	05 April 2011	06 Juli 2011	-	2.000.000.000.000
13	SPN20110720	19 April 2011	20 Juli 2011	-	600.000.000.000
14	SPN20110804	03 Mei 2011	04 Agustus 2011	-	2.000.000.000.000
15	SPN20110922	23 Juni 2011	22 September 2011	-	100.000.000.000
16	SPN20111006	05 Juli 2011	06 Oktober 2011	-	1.400.000.000.000
17	SPN20111020	19 Juli 2011	20 Oktober 2011	-	550.000.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

18	SPN20120209	08 Februari 2011	09 Februari 2012	-	3.800.000.000.000
19	SPN20120309	10 Maret 2011	09 Maret 2012	-	3.450.000.000.000
20	SPN20120406	05 April 2011	06 April 2012	-	950.000.000.000
21	SPN20120504	03 Mei 2011	04 Mei 2012	-	700.000.000.000
22	SPN20120608	07 Juni 2011	06 Juni 2012	-	4.150.000.000.000
23	SPN20120706	07 Juli 2011	06 Juli 2012	-	2.200.000.000.000
					40.000.000.000.000

Untuk meningkatkan minat investor atas instrumen SPN dan mendorong perkembangan pasar SPN, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap PP Nomor 11 Tahun 2006 dengan menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas diskonto SPN, dimana pemungutan pajak atas diskonto SPN dilakukan di pasar sekunder dan pada saat jatuh tempo dengan tarif sebesar 20% final.

C. Penerbitan Obligasi Negara dalam Valuta Asing (*International Bonds*)

Total penerbitan *International Bonds* dalam tahun 2011 mencapai USD2,5 miliar atau setara dengan Rp21,44 triliun. Mempertimbangkan daya tarik pasar SBN domestik, pada tahun 2011 dilaksanakan 1 kali penerbitan *International Bonds* yaitu pada bulan Mei 2011 yaitu seri RI0321 dengan tingkat yield 4,875%.

Penerbitan Obligasi Negara di pasar internasional pada tahun 2011 ini adalah untuk kedua kalinya sejak penerbitan pertama pada tahun 2004 lalu. Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2011 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Hasil penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap manajemen fiskal dan prospek ekonomi Indonesia jangka panjang.

Sehubungan dengan kinerja penerbitan *International Bonds* pada tahun 2008, telah diperoleh penghargaan internasional, yaitu The Assets Triple A Deal of The Year 2008 untuk kategori sebagai berikut:

1. *Best Issuer*;
2. *Best Sovereign Bond* untuk penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing seri INDO-18 dan INDO-38;
3. *Best Deal in Indonesia* untuk penerbitan Obligasi Negara dalam valuta asing seri INDO-18 dan INDO-38.

The Assets sebagai salah satu media keuangan internasional memberikan penghargaan tersebut karena melalui Indonesia telah berhasil dalam memerlukan Obligasi Negara dalam valuta asing dengan tenor 10 dan 30 tahun di tengah-tengah krisis keuangan global yang pernah terlantang.

D. Pelaksanaan Debt Swiching/Buyback

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2011 adalah sebanyak 4 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp664 miliar.

Tabel 15
Debtswitch Tahun 2011

No	Tanggal Debtswitch	Penawaran yang Masuk	Jumlah Dimenangkan
1	31-Jan-2011	2.172.000,0	233.000.000.000
2	4-May-2011	291.000,0	50.000.000.000
3	15-Jun-2011	552.000,0	381.000.000.000
4	15-Dec-2011	65.000,0	-
	JUMLAH	3.080.000,0	664.000.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Selain itu juga telah dilakukan *cash buyback* sebanyak 13 kali yang dilakukan dengan mekanisme lelang dan pembelian langsung (*direct payment*) dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp3,4 triliun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 16
Transaksi *Buyback* Tahun 2011 (dalam miliar rupiah)

No	Tanggal	Seri	Jatuh Tempo	Volume	
1	11 Jan	FR0016	15-Aug-11	5,000	
		ORI003	12-Sep-11	155,000	
		FR0025	15-Oct-11	10,000	
Sub total				170,000	
2	18 Jan	FR0020	15-Dec-13	100,000	
		Sub total			100,000
3	21 Jan	FR0020	15-Dec-13	12,200	
		FR0027	15-Jun-15	85,000	
		Sub total			97,200
4	29 Apr	Tidak ada yang dimenangkan			
		Sub total			-
5	14 Sep	FR0030	15-May-16	100,000	
		Sub total			100,000
6	15 Sep	FR0054	15-Jul-31	393,000	
		Sub total			393,000
7	16 Sep	FR0054	15-Jul-31	183,000	
		Sub total			183,000
8	21 Sep	FR0023	15-Dec-12	54,000	
		FR0020	15-Dec-13	13,000	
		FR0051	15-May-14	25,000	
		VR0019	25-Dec-14	850,000	
		FR0027	15-Jun-15	283,000	
		VR0021	25-Nov-15	100,000	
		VR0022	25-Mar-16	400,000	
		FR0030	15-May-16	357,000	
		Sub total			2,082,000
9	22 Sep	FR0027	15-Jun-15	37,000	
		FR0030	15-May-16	326,000	
		Sub total			363,000
10	23 Sep	FR0026	15-Oct-14	11,786	
		Sub total			11,786
TOTAL 2011				3,499,086	

Pada akhir tahun 2011, profil jatuh tempo SUN terkonsentrasi dengan jumlah cukup besar pada kurun waktu 2011-2014. Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN pada kurun tahun 2011-2014 tersebut, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri Obligasi Negara jangka pendek dan menuatkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Jumlah SUN yang jatuh tempo pada kurun tahun 2011-2014, yang berada pada kisaran di atas Rp32,4 triliun, digeser ke jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi refinancing risk adalah dengan memberikan prioritas penerbitan Obligasi Negara jangka menengah dan panjang.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Disamping *debt switch*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian Obligasi Negara yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. Dalam periode tahun anggaran 2011, *cash buyback* sebanyak 10 kali. *Buyback* dilakukan secara jelang dan pembelian langsung dengan jumlah nominal sebesar Rp3.499 triliun dari target sebesar Rp3 triliun. Obligasi Negara yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Pada saat pasar mengalami *bearish*, dimana harga SUN cenderung diskon, penerapan strategi *cash buyback* ini akan lebih menguntungkan Pemerintah, dibanding jika harus membayar pelunasan pokok pada saat jatuh tempo nantinya. Disamping itu pelaksanaan *cash buyback* oleh Pemerintah pada saat kondisi pasar *bearish* ini juga dapat menahan penurunan harga yang makin dalam dan melakukan stabilisasi pasar SUN.

III. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2011

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. adanya suatu transaksi pendukung *underlying transaction* berupa sajumlah terlentru aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlukan adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyengkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan hiasis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, pada 7 Mei 2008 telah disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diajukan oleh pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan risikol dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan;
- b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit yang dibentuk oleh Menteri;
- c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Bantuan Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara *underlying asset*;
- d. Kewenangan Wali Amanat untuk berlindung mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- e. Kewenangan Pemerintah untuk membayarkan semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai habiskannya kewajiban tersebut;
- f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara sebanyak 20 kali dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 17
Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN tahun 2011

No	Seri	Tanggal Lelang	Maturity Date	Coupon	Valas USD	Jumlah
Total Zero Coupon (SPN-S)						1.320.000.000.000
1	SPNS03022012	02 Agustus 2011	03 Februari 2012	-		570.000.000.000
2	SPN-S24022012	23 Agustus 2011	24 Februari 2012	-		330.000.000.000
3	SPN-S12042012	11 Oktober 2011	12 April 2012	-		420.000.000.000
Total Fixed Rate						1.951.410.000.000
4	IFR0005	01 Maret 2011	15 Januari 2017	9.00000%		250.000.000.000
5	IFR0005	11 April 2011	15 Januari 2017	9.00000%		360.000.000.000
6	IFR0007	01 Maret 2011	15 Januari 2025	10.25000%		100.000.000.000
7	IFR0007	14 Maret 2011	15 Januari 2025	10.25000%		150.000.000.000
8	IFR0007	02 Agustus 2011	15 Januari 2025	10.25000%		40.000.000.000
9	IFR0010	01 Maret 2011	15 Februari 1936	10.00000%		1.150.000.000.000
10	IFR0010	14 Maret 2011	15 Februari 1936	10.00000%		850.000.000.000
11	IFR0010	11 April 2011	15 Februari 1936	10.00000%		140.000.000.000
12	IFR0010	26 April 2011	15 Februari 1936	10.00000%		500.000.000.000
13	IFR0010	02 Agustus 2011	15 Februari 1936	10.00000%		200.000.000.000
14	IFR0010	23 Agustus 2011	15 Februari 1936	10.00000%		500.000.000.000
15	IFR0010	11 Oktober 2011	15 Februari 1936	10.00000%		370.000.000.000
16	SR-003	20 Februari 2011	23 Februari 2014	8.15000%		7.341.410.000.000
Total Fixed Coupon Denominated US Dollar						9.035.000.000.000
17	SNI18	17 Nopember 2011	21 Nopember 2018	4.00000%	1.000.000.000	9.035.000.000.000
Total Fixed Coupon Non Tradable Securities						11.000.000.000.000
18	SDHI 2014D	08 Februari 2011	11 Februari 2014	7.85000%		6.000.000.000.000
19	SDHI 2021A	05 April 2011	11 April 2021	8.00000%		2.000.000.000.000
20	SDHI 2021B	11 Oktober 2011	17 Oktober 2021	7.16000%		3.000.000.000.000
Total Penerbitan SBSN 2011						33.306.410.000.000

IV. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2011

A. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dipisahkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

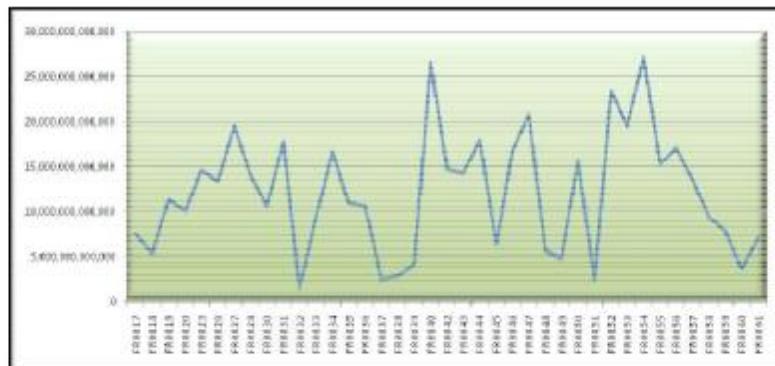
a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds – FR*)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Berdasarkan posisi akhir tahun 2011, terdapat 39 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 6,250% sampai dengan 15% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2041. Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindah tanggalkan kepemilikannya di pasar sekunder.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 18
Nilai Outstanding SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011

No.	Seri	Outstanding	No.	Seri	Outstanding
1	FR0017	7.531.263.000.000	21	FR0043	14.417.000.000.000
2	FR0018	5.430.062.000.000	22	FR0044	18.014.000.000.000
3	FR0019	11.456.341.000.000	23	FR0045	6.400.000.000.000
4	FR0020	10.061.751.000.000	24	FR0046	16.855.000.000.000
5	FR0023	14.722.143.000.000	25	FR0047	20.840.000.000.000
6	FR0026	13.455.749.000.000	26	FR0048	5.675.970.000.000
7	FR0027	10.554.000.000.000	27	FR0049	4.786.607.000.000
8	FR0028	14.221.786.000.000	28	FR0050	15.686.000.000.000
9	FR0030	10.657.000.000.000	29	FR0051	2.336.123.000.000
10	FR0031	17.609.000.000.000	30	FR0052	23.500.000.000.000
11	FR0032	1.434.000.000.000	31	FR0053	19.622.000.000.000
12	FR0033	9.400.474.000.000	32	FR0054	27.096.000.000.000
13	FR0034	16.736.400.000.000	33	FR0055	15.400.000.000.000
14	FR0035	11.023.750.000.000	34	FR0056	17.164.000.000.000
15	FR0036	10.735.500.000.000	35	FR0057	13.550.000.000.000
16	FR0037	2.450.000.000.000	36	FR0058	9.400.000.000.000
17	FR0038	2.920.757.000.000	37	FR0059	7.850.000.000.000
18	FR0039	4.175.000.000.000	38	FR0060	3.700.000.000.000
19	FR0040	26.474.000.000.000	39	FR0061	7.100.000.000.000
20	FR0042	14.774.100.000.000			



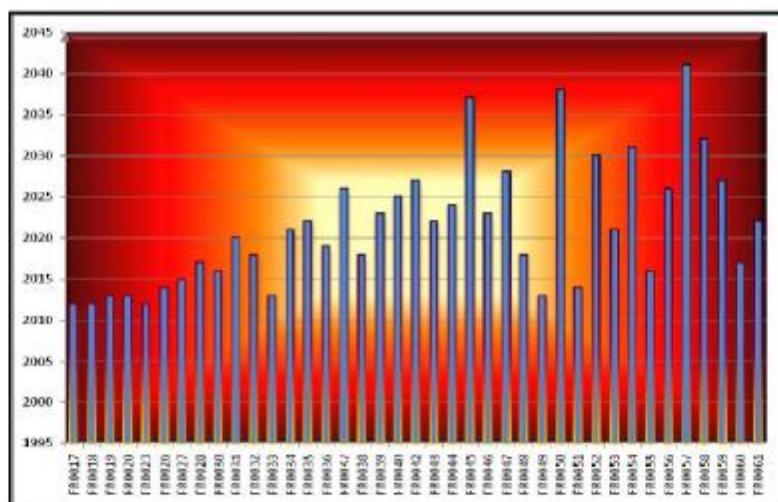
Grafik 50: Struktur Outstanding ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 19

Jatuh Tempo SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011

No	Seri	Jatuh Tempo	No	Seri	Jatuh Tempo
1	FR0015	15 Februari 2011	20	FR0037	15 September 2026
2	FR0016	15 Agustus 2011	21	FR0038	15 Agustus 2018
3	FR0017	15 Januari 2012	22	FR0039	15 Agustus 2023
4	FR0018	15 Juli 2012	23	FR0040	15 September 2025
5	FR0019	15 Juni 2013	24	FR0042	15 Juli 2027
6	FR0020	15 Desember 2013	25	FR0043	15 Juli 2022
7	FR0022	15 September 2011	26	FR0044	15 September 2024
8	FR0023	15 Desember 2012	27	FR0045	15 Mei 2037
9	FR0025	15 Oktober 2011	28	FR0046	15 Juli 2023
10	FRDD28	15 Oktober 2014	29	FR0047	15 Februari 2028
11	FRDD27	15 Juni 2015	30	FR0048	15 September 2018
12	FR0028	15 Juli 2017	31	FR0049	15 September 2013
13	FRDD30	15 Mei 2016	32	FR0050	15 Juli 2038
14	FRDD31	15 Nopember 2020	33	FR0051	15 Mei 2014
15	FR0032	15 Juni 2018	34	FR0052	15 Agustus 2030
16	FRDD33	15 Maret 2013	35	FR0053	15 Juli 2021
17	FR0034	15 Juni 2021	36	FR0054	15 Juli 2031
18	FRDD35	15 Juni 2022	37	FR0055	15 September 2016
19	FR0036	15 September 2019	38	FR0056	15 September 2026

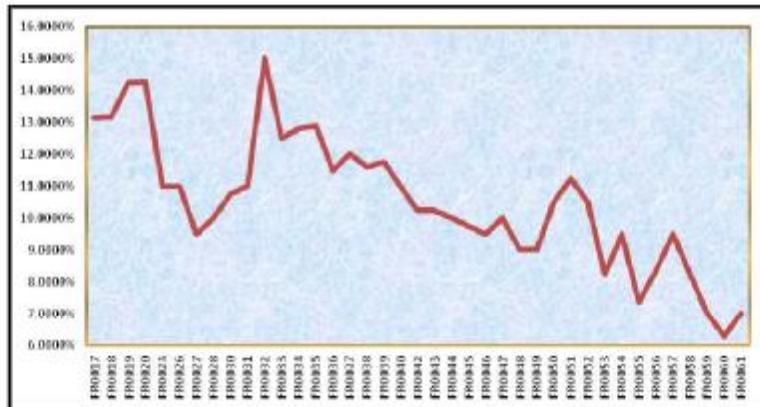


Grafik 51: Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 20
Kupon SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2011

No	Seri	Kupon	No	Seri	Kupon
1	FR0015	13,4000%	20	FR0037	12,0000%
2	FR0018	13,4500%	21	FR0038	11,6000%
3	FR0017	13,1500%	22	FR0039	11,7500%
4	FR0018	13,1750%	23	FR0040	11,0000%
5	FR0019	14,2500%	24	FR0042	10,2500%
6	FR0020	14,2750%	25	FR0043	10,2500%
7	FR0022	12,0000%	26	FR0044	10,0000%
8	FR0023	11,0000%	27	FR0045	9,7500%
9	FR0025	10,0000%	28	FR0046	9,5000%
10	FR0026	11,0000%	29	FR0047	10,0000%
11	FR0027	9,5000%	30	FR0048	9,0000%
12	FR0028	10,0000%	31	FR0049	8,0000%
13	FR0030	10,7500%	32	FR0050	10,5000%
14	FR0031	11,0000%	33	FR0051	11,2500%
15	FR0032	15,0000%	34	FR0052	10,5000%
16	FR0033	12,5000%	35	FR0053	8,2500%
17	FR0034	12,8000%	36	FR0054	9,5000%
18	FR0035	12,9000%	37	FR0055	7,3750%
19	FR0036	11,5000%	38	FR0056	8,3750%



Grafik 52: Tingkat Kupon Seri FR per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindah tangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

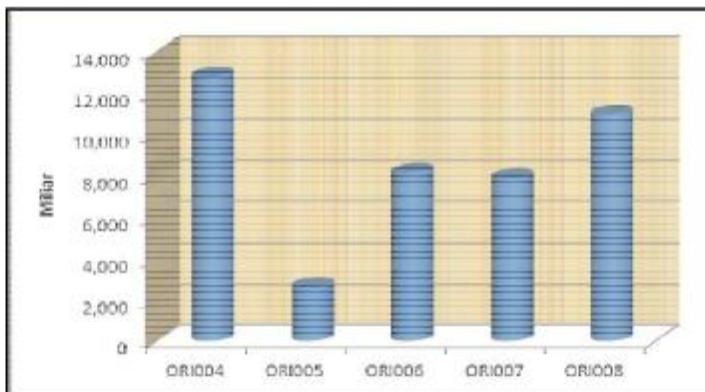
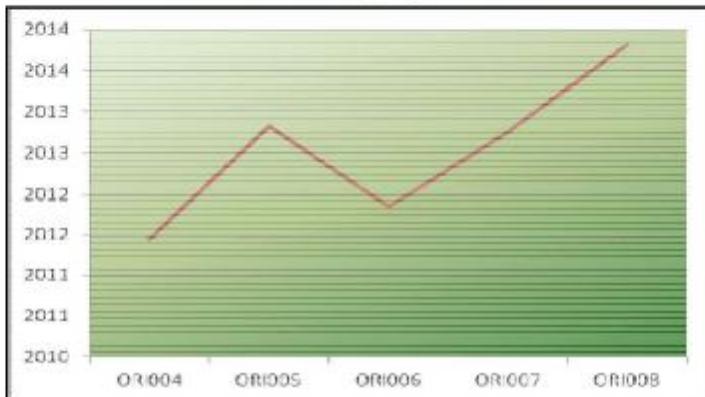
Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2010 – 2014 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 380/KMK.08/2010. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor. Penerbitan ORI merupakan langkah nyata Pemerintah dalam melaksanakan strategi dimaksud. Selain itu, ORI diterbitkan juga dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang notabene instrumen pasar uang. Terlebih dengan belum pulihnya kepercayaan masyarakat umum pada industri reksadana. Selain itu, keberadaan ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito. Tahun 2011 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI008 dengan tingkat kupon 7,30% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp11 triliun sehingga posisi pada akhir 2011 menunjukkan ada 5 seri ORI yang masih outstanding dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan nilai outstanding berkisar antara Rp2,63 triliun sampai dengan Rp12,86 triliun.

Tabel 21

Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2011

No	Seri	Outstanding	Jatuh Tempo
1	ORI004	12.839.765.000.000,00	12 Maret 2012
2	ORI005	2.666.275.000.000,00	15 September 2013
3	ORI006	8.186.730.000.000,00	15 Agustus 2012
4	ORI007	7.923.000.000.000,00	15 Agustus 2013
5	ORI008	11.000.000.000.000,00	15 Oktober 2014
	Jumlah	42.616.370.000.000,00	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Grafik 53: Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2011

Grafik 54: Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2011

c. Obligasi tanpa bunga (zero coupon – ZC)

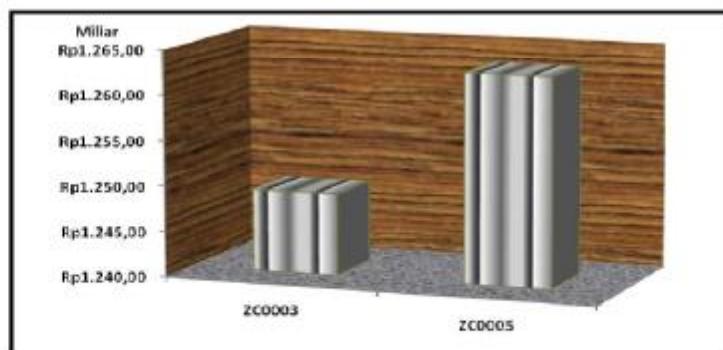
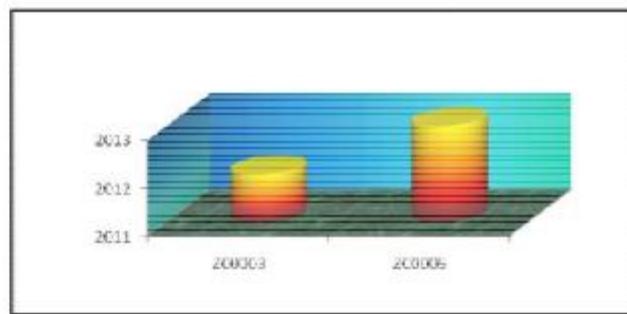
Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi akhir tahun 2011, terdapat 2 seri ZC dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,25 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindah tanggalkan kepemilikannya di pasar sekunder. ZC0004 telah dilakukan pelunasan seluruhnya pada tahun 2011.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Tabel 22

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN seri Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011

No	Seri	Nilai Outstanding (Rp)	Jatuh Tempo
1	ZC0003	1.249.000.000.000,00	20 Nopember 2012
2	ZC0005	1.263.000.000.000,00	20 Februari 2013

Grafik 55: Struktur *Outstanding* Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011

Grafik 56: Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2011

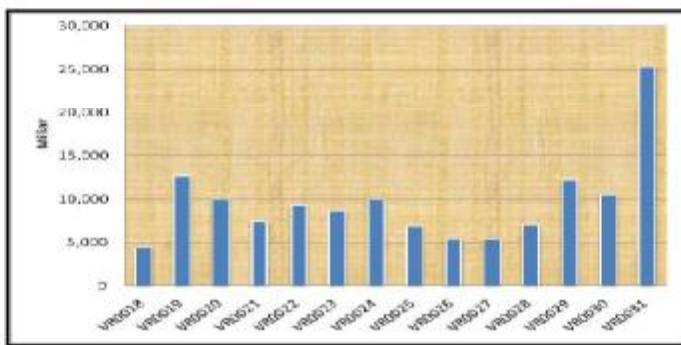
d. Obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds - VR)

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2011, terdapat 16 seri VR dengan *outstanding* berkisar dari Rp1,03 triliun sampai dengan Rp25 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2011 sampai dengan 2020. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindah tanggalkan kepemilikannya di pasar sekunder.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

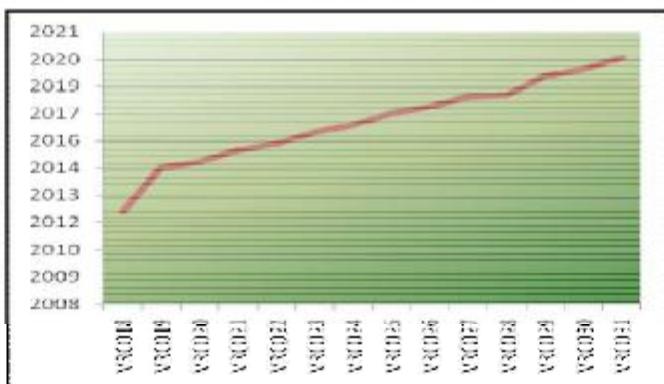
Tabel 23
Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2011

No	Seri	Nilai Outstanding	Jatuh Tempo
1	VR0018	4.368.483.000.000,00	25 Oktober 2012
2	VR0019	12.656.226.000.000,00	25 Desember 2014
3	VR0020	9.899.007.000.000,00	25 April 2015
4	VR0021	7.446.328.000.000,00	25 Nopember 2015
5	VR0022	9.266.749.000.000,00	25 Maret 2016
6	VR0023	8.652.056.000.000,00	25 Oktober 2016
7	VR0024	9.909.300.000.000,00	25 Februari 2017
8	VR0025	6.909.300.000.000,00	25 September 2017
9	VR0026	5.442.142.000.000,00	25 Januari 2018
10	VR0027	5.442.142.000.000,00	25 Juli 2018
11	VR0028	7.033.994.000.000,00	25 Agustus 2018
12	VR0029	12.212.320.000.000,00	25 Agustus 2019
13	VR0030	10.503.015.000.000,00	25 Desember 2019
14	VR0031	25.322.354.000.000,00	25 Juli 2020



Grafik 57: Struktur Outstanding VR per 31 Desember 2011

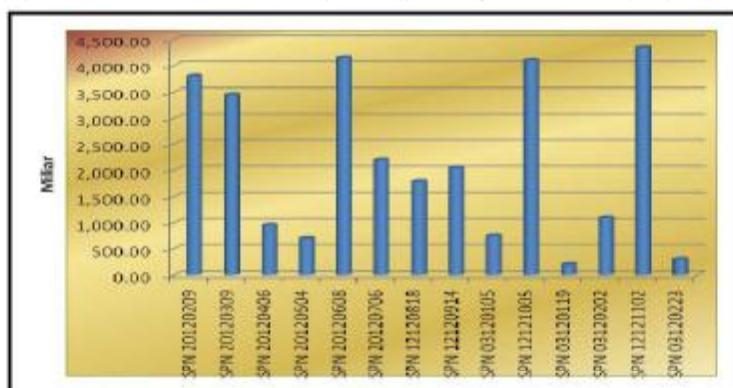
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Gratik 5B: Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2011

e. Surat Perpendekan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen obligasi jangka pendek dengan penembatan setara diskonto. Sampai akhir tahun 2011, terdapat 14 seri SPN yaitu SPN 20120209, SPN 20120309, SPN 20120408, SPN 20120504, SPN 20120608, SPN 20120708, SPN 12120618, SPN 12120914, SPN 03120105, SPN 12121005, SPN 03120119, SPN D3120202, SPN 12121102, dan SPN 03120223 dengan *outstanding* berkisar Rp200 miliar dan Rp4,3 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2012. SPN dapat diperdagangkan dan dipindah tanggalkan kepemilikannya di pasar sekunder.



Grafik 59: Struktur Outstanding SPN per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

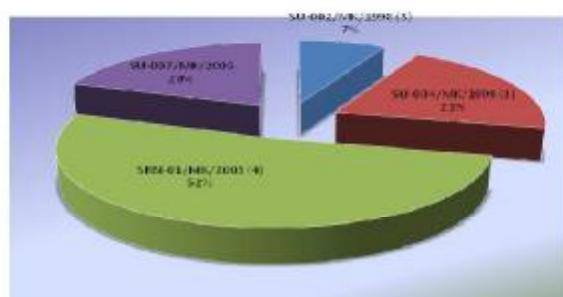
f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari lima seri yaitu SU002, SU004, SU007, dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBIO 1). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga.

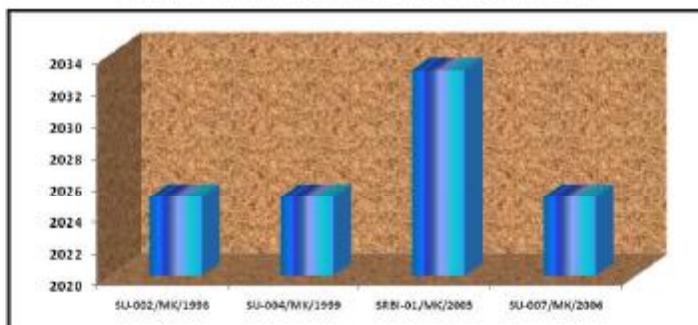
Tabel 24

Nilai dan Outstanding Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2011

No	Nama	Outstanding	Jatuh Tempo
1	SU-002/MK/1998	18.781.775.893.847,00	01 April 2025
2	SU-004/MK/1999	50.701.147.130.899,00	01 Desember 2025
3	SRBI-01/MK/2003	126.697.947.827.429,00	01 Agustus 2033
4	SU-007/MK/2006	48.455.566.511.832,00	01 Agustus 2025
	JUMLAH	244.636.437.364.007,00	



Grafik 60: Struktur Outstanding SUP per 31 Desember 2011



Grafik 61: Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

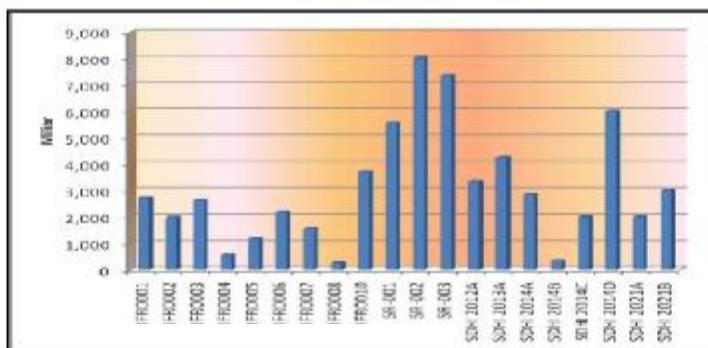
Pada akhir tahun 2011, terdapat 10 seri *fixed rate* SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, IFR0010, SR-001, SR-002 dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12,00%. Selain itu terdapat 8 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI 2012A, SDHI 2013A, SDHI 2014A, SDHI 2014B, SDHI 2014C, SDHI 2014D, SDHI 2021A, dan SDHI 2021B dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2021 dan tingkat imbalan antara 7,13% sampai dengan 8,00%.

Tabel 25

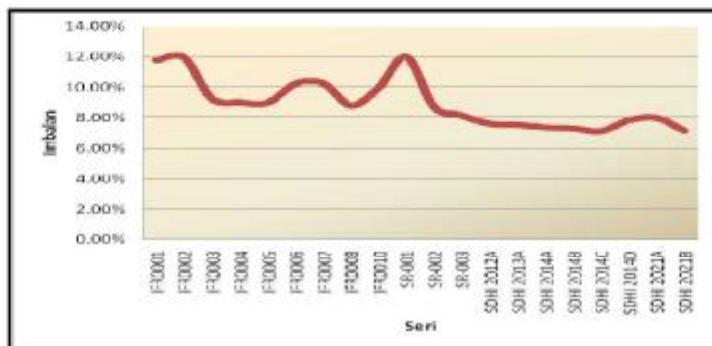
Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2011

No	Seri	Jatuh Tempo	Imbalan	Outstanding
1	IFR0001	15-Aug-15	11,80%	2.714.700.000,000
2	IFR0002	15-Aug-18	11,95%	1.983.000.000,000
3	IFR0003	15-Sep-15	9,23%	2.632.000.000,000
4	IFR0004	15-Oct-13	9,00%	350.000.000,000
5	IFR0005	15-Jan-17	9,00%	1.171.000.000,000
6	IFR0006	15-Mar-30	10,25%	2.175.000.000,000
7	IFR0007	15-Jan-25	10,25%	1.547.000.000,000
8	IFR0008	15-Mar-20	8,80%	232.000.000,000
9	IFR0010	15-Feb-36	10,00%	3.710.000.000,000
10	SR-001	25-Feb-12	12,00%	5.558.290.000,000
11	SR-002	10-Feb-13	8,70%	8.033.260.000,000
12	SR-003	23-Feb-14	8,15%	7.341.410.000,000
13	SDHI 2012A	3-Mar-12	7,61%	3.342.000.000,000
14	SDHI 2013A	17-May-13	7,55%	4.250.000.000,000
15	SDHI 2014A	9-Aug-14	7,36%	2.855.000.000,000
16	SDHI 2014B	25-Aug-14	7,30%	336.000.000,000
17	SDHI 2014C	7-Oct-14	7,13%	2.000.000.000,000
18	SDHI 2014D	11-Feb-14	7,85%	6.000.000.000,000
19	SDHI 2021A	11-Apr-21	8,00%	2.000.000.000,000
20	SDHI 2021B	17-Oct-21	7,16%	3.000.000.000,000
Total				61.451.260.000,000

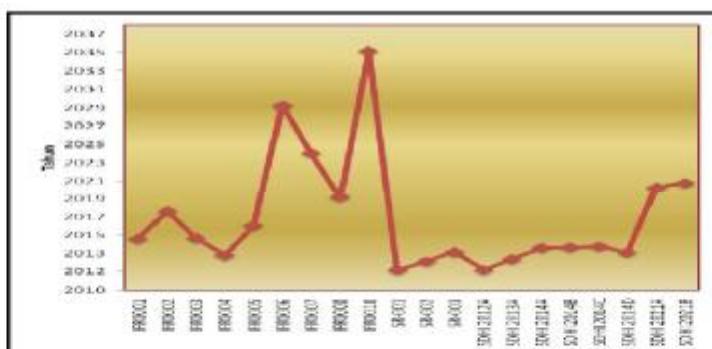
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)



Grafik 62: Struktur *Outstanding Fixed Rate SBSN* per 31 Desember 2011



Grafik 63: Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2011



Grafik 64: Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

B. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valas

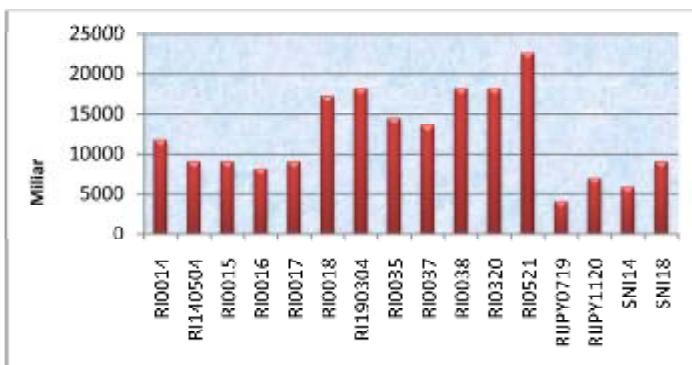
Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembentukan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembentukan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan pertimbangan beberapa hal seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah memutuskan untuk melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir tahun 2011, terdapat 17 seri SBN Valas dengan 15 seri memiliki denominasi USD dan 2 seri dengan denominasi JPY yaitu seri RIJPY0719 dan RIJPY1120. SBN valas tersebut memiliki tingkat kupon mulai dari 1,6% s.d. 11,63% dengan masa jatuh tempo mulai dari tahun 2014 s.d. 2038. Selain itu terdapat 2 seri SBSN Valas yaitu seri SNI14 sebesar USD650.000.000 setara Rp5,8 triliun dan USD1.000.000.000 setara Rp9,07 triliun.

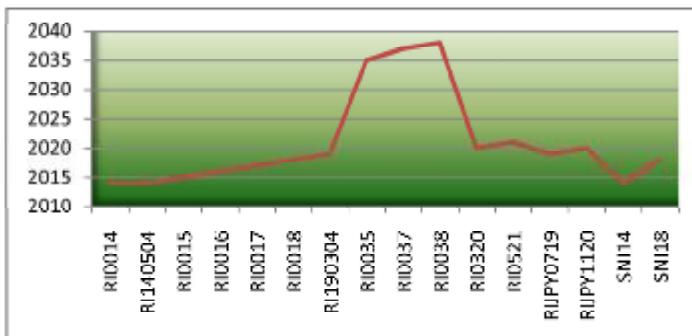
Tabel 26

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas dalam rupiah per 31 Desember 2011

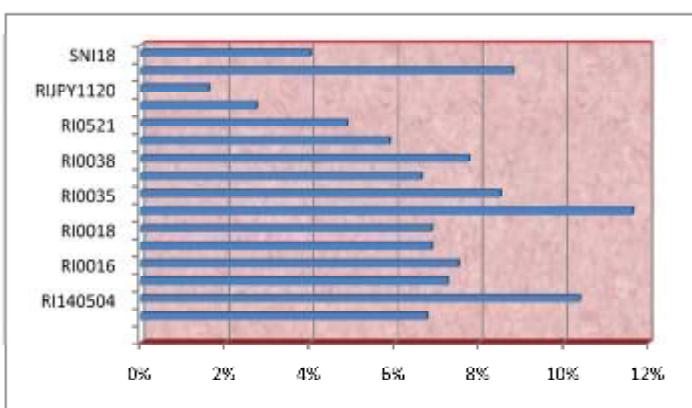
No	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Outstanding	
				Valas	Rupiah
1	RI0014	10 Maret 2014	6.75%	USD 1,300,000,000	11.788.400.000.000
2	RI140504	04 Mei 2014	10.38%	USD 1,000,000,000	9.068.000.000.000
3	RI0015	20 April 2015	7.25%	USD 1,000,000,000	9.068.000.000.000
4	RI0016	15 Januari 2016	7.50%	USD 900,000,000	8.161.200.000.000
5	RI0017	09 Maret 2017	6.88%	USD 1,000,000,000	9.068.000.000.000
6	RI0018	17 Januari 2018	6.88%	USD 1,900,000,000	17.229.200.000.000
7	RI190304	04 Maret 2019	11.63%	USD 2,000,000,000	18.136.000.000.000
8	RI0035	12 Oktober 2035	8.50%	USD 1,600,000,000	14.508.800.000.000
9	RI0037	17 Februari 2037	6.63%	USD 1,300,000,000	13.602.000.000.000
10	RI0038	17 Januari 2038	7.75%	USD 2,000,000,000	18.136.000.000.000
11	RI0320	13 Maret 2020	5.88%	USD 2,000,000,000	18.136.000.000.000
12	RI0521	05 Mei 2021	4.88%	USD 2,500,000,000	22.670.000.000.000
14	RIJPY0719	29 Juli 2019	2.73%	JPY 35,000,000,000	4.088.000.000.000
15	RIJPY1120	12 Nopember 2020	1.60%	JPY 60,000,000,000	7.008.000.000.000
16	SNI14	23 April 2014	8.80%	USD 650,000,000	5.894.200.000.000
17	SNI18	21 Nopember 2018	4.00%	USD 1,000,000,000	9.068.000.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Grafik 65: Struktur Outstanding SBN Valas per 31 Desember 2011 (dalam rupiah)



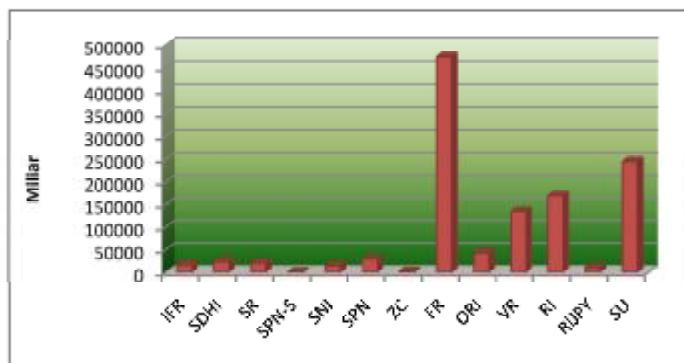
Grafik 66: Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2011



Grafik 67: Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 Desember 2011

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

Secara umum, struktur Surat Berharga Negara pada akhir tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 6B: Struktur Outstanding SBN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2011

V. MUTASI SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2011

Surat Berharga Negara dapat berubah saudanya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2011

No	Jenis SBN	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Mutasi
(1)	(2)	(3)	(4)	5= (3-4)
1	IFR	16.736.700.000.000,00	12.126.700.000.000,00	4.610.000.000.000,00
2	SDHI	23.743.000.000.000,00	12.703.000.000.000,00	11.000.000.000.000,00
3	SR	20.931.560.000.000,00	13.590.150.000.000,00	7.341.410.000.000,00
4	SPV'S	1.320.000.000.000,00	-	1.320.000.000.000,00
5	SVI	14.962.200.000.000,00	5.844.150.000.000,00	9.118.050.000.000,00
	\$	1.850.000.000,00	\$ 850.000.000,00	1.000.000.000,00
6	SPN	29.900.000.000.000,00	29.795.000.000.000,00	105.000.000.000,00
7	ZC	2.512.000.000.000,00	2.512.000.000.000,00	-
8	FR	474.525.756.000.000,00	399.723.017.000.000,00	74.802.139.000.000,00
9	OB	42.816.170.000.000,00	40.872.085.000.000,00	1.944.305.000.000,00
10	VR	135.063.416.000.000,00	142.795.082.000.000,00	(7.731.666.000.000,00)
11	RI	168.571.600.000.000,00	145.664.200.000.000,00	23.017.400.000.000,00
	\$	10.700.000.000,00	\$ 18.200.000.000,00	2.500.000.000,00
12	RIJPY	11.096.000.000.000,00	771.629.514.000.000,00	(760.533.514.000.000,00)
	¥	85.000.000.000.000,00	¥ 85.000.000.000.000,00	-
13	SU	244.636.437.364.007,00	248.432.177.308.032,00	13.795.739.945.085,00
Total		943.018.602.000.000,00	1.577.125.476.000.000,00	1634.106.876.000.000,00

Menperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SBN berbunga tetap (FR) dan menurunnya porsi SBN berbunga mengambang (VR) serta menurunnya porsi Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga dengan meningkatkan porsi *fixed rate bonds* dalam portofolio SBN.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited)

VI. PENCAPAIAN TARGET APBN TA 2011

Target APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN (SUN + SBSN) dan Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN-P TA 2011, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp76,160 triliun sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN Dalam Negeri mencapai Rp65.552 triliun, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp10,608 triliun.

Pagu Bunga Utang SUN Valas ditetapkan sebesar Rp16.503 triliun sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SUN valas mencapai Rp12,789 triliun, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp3.714 triliun.

B. Surat Berharga Negara Neto

Surat Berharga Neto adalah selisih antara SBN yang diterbitkan dengan SBN yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali, asalkan jumlah SBN Neto tidak melebihi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Untuk tahun 2011, SBN Neto dalam APBN-P ditetapkan sebesar Rp126.65 triliun, sedangkan realisasi SBN Neto mencapai Rp120,07 triliun, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp6,58 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	% realisasi terhadap target
SBN Nette (APBN)	126.663.800	120.072.948	94,80%
Kebutuhan Penerbitan 2011 (Gross)	211.179.862	204.588.810	96,88%
SUN		171.292.500	
SBN Lunistik		140.850.000	
OBL		60.050.000	
CD		-	
SBN		40.000.000	
OPI		11.800.000	
SUN Valas		21.142.300	
SBSN		59.308.410	
SBSN Lunistik		24.271.410	
ITI		4.810.000	
SBSN FID		13.411.110	
SBN		11.000.000	
SBN G		1.320.000	
SBSN Valas		8.026.000	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO